

RPJMD

KABUPATEN LEMBATA

2017 - 2022

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2017 - 2022



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2017-2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0070);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA

Dan

BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah, adalah hasil perencanaan tata ruang.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Lembata adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rancangan Teknokratik RPJMD adalah Rancangan Dokumen Perencanaan 5 (Lima) Tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
22. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang/jasa.
25. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

27. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD merupakan :

a. dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN; dan
b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (*stakeholders*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan RPJMD adalah :

a. menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan, rencana investasi dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang mendorong terwujudnya visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lembata Periode 2017-2022 dengan memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Lembata; dan
b. menjabarkan visi, misi dan prioritas program Bupati dan Wakil Bupati Lembata Periode 2017-2022 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah dan kebijakan serta program pembangunan yang terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RPJMD adalah:

a. sebagai acuan dan pedoman resmi bagi aparat Pemerintah Kabupaten Lembata dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa serta sekaligus merupakan acuan penentuan program dan kegiatan pembangunan yang akan dibahas dalam rangkaian Musrenbang Daerah Kabupaten Lembata secara berjenjang dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
b. sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Periode 2017-2022;
c. menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan;

d. menyediakan acuan resmi bagi perangkat daerah dan pemerintah desa di Kabupaten Lembata dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten lembata, APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber pendanaan lainnya;
e. mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025;
f. mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031;
g. mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
h. mendukung terwujudnya tujuan, sasaran dan agenda pembangunan yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019;
i. mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang berkelanjutan/*Sustaniable Development Goals* (SDGs);
j. mendorong terwujudnya koordinasi, integrase, sinkronisasi pembangunan, baik antar perangkat daerah, antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan Pemerintah Pusat;
k. menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dan pemerintah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata;
l. menciptakan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; dan
m. mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Lembata, pelaku usaha dan masyarakat.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika RPJMD sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat hasil analisa data dan informasi terhadap kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah dan data dasar daerah lainnya dalam setiap sektor pembangunan serta tantangan yang akan dihadapi selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Memuat kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan dan arah kebijakan keuangan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat analisa permasalahan pembangunan yang selanjutnya dirumuskan menjadi butir-butir isu strategis daerah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2017-2022.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2017-2022 serta memuat kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja disertai penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan yang ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

BAB IX PENUTUP

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 8

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan pada indikator, sasaran dan program serta kerangka pendanaan dalam RPJMD tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 9

RPJMD dapat disesuaikan dalam hal RTRW dan RPJPD yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD telah mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka RKPD Tahun 2017 dan Tahun 2018 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 17 November 2017

BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 17 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PETRUS TODA ATAWOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2017 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 09/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Lembata untuk periode 5 (lima) tahun yakni Tahun 2017-2022. Penyusunan rencana pembangunan ini dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi kebijakan dan keberlanjutan program pembangunan yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh unsur pemerintahan daerah dengan pelibatan masyarakat dan unsur pemangku kepentingan.

Penyusunan RPJMD akan menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati untuk mengarahkan perjalanan pemerintahan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat pada akhir periode kepemimpinan.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 9 TAHUN 2017



Lampiran Peraturan Daerah
Kabupaten Lembata

Nomor 9
Tahun 2017
Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022

Daftar Isi

Daftar Isi ---- i
Daftar Tabel ---- iv
Daftar Gambar ---- vii
Daftar Grafik ---- viii
Daftar Diagram ---- xi

BAB I PENDAHULUAN ---- I-1
1.1. Latar Belakang ---- I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ---- I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen ---- I-5
1.4. Maksud dan Tujuan ---- I-10
1.5. Sistematika Penulisan ---- I-11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ---- II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi ---- II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ---- II-1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ---- II-17
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana ---- II-26
2.1.4. Demografi ---- II-38
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ---- II-41
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ---- II-41
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ---- II-45
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ---- II-49
2.3. Aspek Pelayanan Umum ---- II-50
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ---- II-50
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ---- II-74
2.3.3. Fokus Pendukung Urusan Pemerintahan ---- II-86
2.3.4. Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan ---- II-89
2.4. Aspek Daya Saing Daerah ---- II-91
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ---- II-91
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ---- II-93
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ---- II-96
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ---- II-97

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ---- III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ---- **III-1**
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ---- III-1
3.1.2. Neraca Daerah ---- III-10
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ---- III-13
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ---- III-14
3.2.2. Analisis Pembiayaan ---- III-16
3.3. Kerangka Pendanaan ---- III-18
3.3.1. Analisis Periodik Wajib dan Mengingkat serta Utama ---- III-18
3.3.2. Proyeksi Keuangan Daerah ---- III-21
3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan ---- III-29

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH ---------- IV-1

4.1. Telaah terhadap Dokumen Perencanaan ---------- IV-1
4.1.1. Telaah terhadap RPJPD Kabupaten Lembata ---------- IV-1
4.1.2. Telaah terhadap RPJMN ---------- IV-3
4.1.3. Telaah terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ---------- IV-5
4.1.4. Telaah terhadap RTRW Kabupaten Lembata ---------- IV-6
4.1.5. Telaah terhadap RPJMD Provinsi NTT ---------- IV-10
4.2. Permasalahan Pembangunan ---------- IV-11
4.2.1. Permasalahan Geografi dan Demografi ---------- IV-11
4.2.2. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat ---------- IV-11
4.2.3. Permasalahan Pelayanan Umum ---------- IV-13
4.2.4. Permasalahan Sarana Prasarana ---------- IV-14
4.2.5. Aspek Daya Saing Daerah ---------- IV-16
4.3. Analisis Isu Strategis ---------- IV-16
4.3.1. Identifikasi dan Analisis Lingkungan Internal ---------- IV-16
4.3.2. Identifikasi dan Analisis Lingkungan Eksternal ---------- IV-18
4.4. Isu Strategis ---------- IV-21

BAB V VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN ---------- V-1
5.1. Visi dan Misi ---------- V-1
5.1.1. Visi Pembangunan ---------- V-1
5.1.2. Misi Pembangunan ---------- V-1
5.2. Skenario Pembangunan ---------- V-7
5.2.1. Skenario Pengembangan Wilayah 2017-2022 ---------- V-15
5.2.2. Skenario Pembangunan Ekonomi Daerah 2017-2022 ---------- V-31
5.3. Tujuan dan Sasaran ---------- V-33
5.3.1. Tujuan dan Sasaran Misi Pembangunan Kesatu ---------- V-33
5.3.2. Tujuan dan Sasaran Misi Pembangunan Kedua ---------- V-34
5.3.3. Tujuan dan Sasaran Misi Pembangunan Ketiga ---------- V-36
5.3.4. Tujuan dan Sasaran Misi Pembangunan Keempat ---------- V-36
5.3.5. Tujuan dan Sasaran Misi Pembangunan Kelima ---------- V-37
5.3.6. Tujuan dan Sasaran Misi Pembangunan Keenam ---------- V-38

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ---------- VI-1
6.1. Strategi dan Kebijakan Pembangunan mewujudkan Misi ---------- VI-1
6.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan mewujudkan Misi Kesatu ---------- VI-15
6.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan mewujudkan Misi Kedua ---------- VI-18
6.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan mewujudkan Misi Ketiga ---------- VI-21
6.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan mewujudkan Misi Keempat ---------- VI-23
6.1.5. Strategi dan Arah Kebijakan mewujudkan Misi Kelima ---------- VI-24
6.1.6. Strategi dan Arah Kebijakan mewujudkan Misi Keenam ---------- VI-27

6.2. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Wilayah Kecamatan ---------- VI-29
6.2.1. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Nagawutung ---------- VI-29
6.2.2. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Wulandoni ---------- VI-31
6.2.3. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Ile Ape ---------- VI-33
6.2.4. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Ile Ape Timur ---------- VI-34
6.2.5. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Lebatukan ---------- VI-36
6.2.6. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Nubatukan ---------- VI-38

6.2.7. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Omesuri ---------- VI-40
6.2.8. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Buyasuri ---------- VI-42
6.2.9. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Atadei ---------- VI-44
6.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah ---------- VI-46
6.3.1. Kebijakan Umum ---------- VI-46
6.3.2. Tahapan Pembangunan ---------- VI-55
6.3.3. Program Pembangunan Daerah ---------- VI-86

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ---------- VII-1
7.1. Perkiraan Kebutuhan dan Investasi Pendanaan ---------- VII-1
7.1.1. Asumsi Dasar Penghitungan Kebutuhan Investasi ---------- VII-1
7.1.2. Penghitungan Kebutuhan Investasi 2017-2022 ---------- VII-1
7.1.3. Perkiraan Kebutuhan Pendanaan APBD Provinsi ---------- VII-3
7.1.4. Perkiraan Kebutuhan Pendanaan APBN ---------- VII-3

7.2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lembata 2017-2022 ---------- VII-4

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ---------- VIII-1

BAB IX PENUTUP ---------- IX-1
9.1. Pedoman Transisi ---------- IX-1
9.2. Kaidah Pelaksanaan ---------- IX-1
9.3. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan ---------- IX-3

Daftar Tabel

Tabel.2.1 Nama, Luas Wilayah per Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kabupaten Lembata Tahun 2016 ..... II-1
Tabel.2.2 Tipe Morfologi Kabupaten Lembata II-3
Tabel.2.3 Formasi Geologi Kabupaten Lembata II-6
Tabel.2.4 Formasi Hidrologi Wilayah Kabupaten Lembata II-8
Tabel.2.5 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Lembata II-8
Tabel.2.6 Curah Hujan per Tahun dan Curah Hujan per Bulan II-11
Tabel.2.7 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Lembata II-11
Tabel.2.8 Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Lembata II-13
Tabel.2.9 Jenis Tanah di Kabupaten Lembata II-15
Tabel.2.10 Potensi Rawan Gempa di Kabupaten Lembata II-26
Tabel.2.11 Potensi Longsor di Kabupaten Lembata II-33
Tabel.2.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Lembata 2010-2016 ..... II-38
Tabel.2.13 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lembata 2010-2016 ..... II-38
Tabel.2.14 Perkembangan Jumlah Penduduk menurut Umur II-39
Tabel.2.15 Potensi Jumlah Penduduk Balita, Usia Sekolah, Usia Kerja dan Lansia II-39
Tabel.2.16 Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan II-40
Tabel.2.17 Jumlah Penduduk menurut Agama II-40
Tabel.2.18 Distribusi PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha II-41
Tabel.2.19 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK II-41
Tabel.2.20 PDRB ADHK dan ADHB II-42
Tabel.2.21 PDRB Per Kapita Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016 ..... II-43
Tabel.2.22 Indeks Gini Kabupaten Lembata II-43
Tabel.2.23 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lembata II-43
Tabel.2.24 Jumlah Tingkat Kriminal di Kabupaten Lembata II-44
Tabel.2.25 Persentase Penyelesaian Tindak Kriminal II-44
Tabel.2.26 Angka Melek Huruf Kabupaten Lembata II-45
Tabel.2.27 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Lembata II-45
Tabel.2.28 Persentase Penduduk yang Bekerja II-48
Tabel.2.29 Capaian Indikator Kinerja Kebudayaan II-49
Tabel.2.30 Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga II-49
Tabel.2.31 Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2012-2016 ..... II-50
Tabel.2.32 Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah II-51
Tabel.2.33 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar II-51
Tabel.2.34 Rasio Guru dan Murid per Kelas Rata-Rata II-51
Tabel.2.35 Angka Partisipasi Sekolah II-54
Tabel.2.36 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah II-52
Tabel.2.37 Rasio Guru terhadap Murid II-52
Tabel.2.38 Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata II-53
Tabel.2.39 Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016 ..... II-53
Tabel.2.40 Persentase Angka Kelulusan dan Kualifikasi Guru II-54
Tabel.2.41 Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun 2011-2015 ..... II-55
Tabel.2.42 Jumlah Tenaga Kesehatan II-55
Tabel.2.43 Kondisi Jalan di Kabupaten Lembata II-57
Tabel.2.44 Kondisi Irigasi di Kabupaten Lembata II-58
Tabel.2.45 Panjang dan Luas Irigasi di Kabupaten Lembata II-59
Tabel.2.46 Jumlah Konsumsi Air Minum di Kabupaten Lembata II-59
Tabel.2.47 Jumlah Konsumsi Air Baku di Kabupaten Lembata II-60
Tabel.2.48 Kondisi Perumahan di Kabupaten Lembata II-60
Tabel.2.49 Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh II-61
Tabel.2.50 Persebaran Rumah Layak Huni II-61
Tabel.2.51 Gambaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-62

Tabel.2.52 Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial II-64
Tabel.2.53 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Lembata II-65
Tabel.2.54 Data Partisipasi Perempuan di Kabupaten Lembata II-66
Tabel.2.55 Kondisi Produktivitas Tanaman Pangan di Kabupaten Lembata II-66
Tabel.2.56 Kinerja Pertanahan di Kabupaten Lembata II-67
Tabel.2.57 Kondisi Lingkungan Hidup II-68
Tabel.2.58 Kondisi Admnistrasi Kependudukan dan Catatan Sipil II-69
Tabel.2.59 Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-70
Tabel.2.60 Data Pembangunan Keluarga Berencana II-70
Tabel.2.61 Kondisi Pembangunan Perhubungan II-71
Tabel.2.62 Kondisi Pembangunan Komunikasi dan Informatika II-71
Tabel.2.63 Jumlah Koperasi di Kabupaten Lembata II-72
Tabel.2.64 Jumlah Investor dan Nilai Investasi II-72
Tabel.2.65 Capaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga II-73
Tabel.2.66 Kondisi Statistik Kabupaten Lembata II-73
Tabel.2.67 Kondisi Kebudayaan Kabupaten Lembata II-73
Tabel.2.68 Kondisi Perpustakaan Kabupaten Lembata II-74
Tabel.2.69 Kondisi Pembangunan Kearsipan Kabupaten Lembata II-74
Tabel.2.70 Jumlah Nelayan dan Sarana Prasarana yang dimiliki II-76
Tabel.2.71 Data Produksi Komoditi Pertanian II-77
Tabel.2.72 Produksi Sayur-sayuran di Kabupaten Lembata II-77
Tabel.2.73 Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Lembata II-78
Tabel.2.74 Produksi Tanaman Perkebunan II-78
Tabel.2.75 Data Populasi Ternak di Kabupaten Lembata II-79
Tabel.2.76 Produksi HMT dan Padang Penggembalaan Ternak II-79
Tabel.2.77 Data Produksi Daging di Kabupaten Lembata II-80
Tabel.2.78 Data Kelompok Ternak di Kabupaten Lembata II-80
Tabel.2.79 Data Produksi Telur di Kabupaten Lembata II-81
Tabel.2.80 Data Situasi Penyakit Ternak di Kabupaten Lembata II-81
Tabel.2.81 Data Pengeluaran Ternak dan Bahan Asal Ternak II-82
Tabel.2.82 Data Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak II-82
Tabel.2.83 Data Produksi dan Produkstivitas Komoditi Kehutanan II-83
Tabel.2.84 Elektrifikasi Desa Berlistrik II-84
Tabel.2.85 Kinerja Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Listrik II-85
Tabel.2.86 Jumlah Pasar dan Kelompok Kerajinan serta UMKM II-85
Tabel.2.87 Indikator Perangkat Daerah Kabupaten Lembata II-87
Tabel.2.88 Nilai, Predikat dan Status AKIP II-87
Tabel.2.89 Nilai EKPP Kabupaten Lembata II-87
Tabel.2.90 Data Desa Sadar Hukum II-88
Tabel.2.91 Gambaran Penunjang Urusan Pengawasan II-88
Tabel.2.92 Kecamatan di Kabupaten Lembata II-88
Tabel.2.93 Kinerja Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lembata II-89
Tabel.2.94 Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah II-89
Tabel.2.95 Kondisi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan II-90
Tabel.2.96 Data PNS berdasarkan Jabatan Struktural II-90
Tabel.2.97 Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik II-91
Tabel.2.98 Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Pengeluaran Per Kapita II-91
Tabel.2.99 Persentase Pengeluaran Per Kapita menurut Jenis Pengeluaran II-92
Tabel.2.100 Nilai Tukar Petani di Kabupaten Lembata II-92
Tabel.2.101 Kondisi Pembangunan Perhubungan di Kabupaten Lembata II-93
Tabel.2.102 Kondisi Penataan Ruang di Kabupaten Lembata II-93
Tabel.2.103 Jenis Bank Per Kecamatan di Kabupaten Lembata II-94
Tabel.2.104 Jumlah Hotel di Kabupaten Lembata II-94
Tabel.2.105 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih II-95
Tabel.2.106 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik II-95
Tabel.2.107 Angka Kriminalitas di Kabupaten Lembata II-96
Tabel.2.108 Jumlah Demo di Kabupaten Lembata II-96
Tabel.2.109 Lama Proses Perijinan di Kabupaten Lembata II-97
Tabel.2.110 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah II-97
Tabel.2.111 Ratio Lulusan S1/S2/S3 ..... II-97

Tabel.2.112 Ratio Ketergantungan II-97
Tabel.2.113 Hasil Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja II-99
Tabel.3.1. Kinerja Pendapatan Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016 ..... III-3
Tabel.3.2. Kinerja Belanja Daerah III-6
Tabel.3.3. Kinerja Pembiayaan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016 ..... III-9
Tabel.3.4. Perkembangan Neraca 2012-2016 ..... III-11
Tabel.3.5. Analisis Rasio Keuangan Tahun 2012-2016 ..... III-12
Tabel.3.6. Proporsi Realisasi Belanja Daerah terhadap Anggaran III-15
Tabel.3.7. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2012-2016 ..... III-15
Tabel.3.8. Proporsi Belanja Pemenuhan Pendidikan Tahun 2012-2016 ..... III-15
Tabel.3.9. Surplus Defisit Tahun 2012-2016 ..... III-17
Tabel.3.10. Defisit Anggaran Tahun 2012-2016 ..... III-17
Tabel.3.11. Pengeluaran Wajib, Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2012-2016 ..... III-19
Tabel.3.12. Pengeluaran Wajib, Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2017-2022 ..... III-20
Tabel.3.13. Proyeksi Pendapatan 2017-2022 ..... III-23
Tabel.3.14. Proyeksi Belanja Tahun 2017-2022 ..... III-26
Tabel.3.15. Proyeksi Pembiayaan Tahun 2017-2022 ..... III-28
Tabel.3.16. Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017-2022 ..... III-30
Tabel.3.17. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil 2017-2022 ..... III-31
Tabel.3.18. Kerangka Pendanaan Alokasi Riil Keuangan Daerah III-33
Tabel 4.1 Tabel Keterkaitan SDG's dengan RPJMD IV-5
Tabel 5.1. Penjabaran Operasional Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor/Wilayah melalui Cincin Ekonomi V-17
Tabel 5.2. Perkiraan Pertumbuhan Pendudukan, Angkatan Kerja dan Ekonomi, Pengangguran dan Kemisikinan di Kabupaten Lembata V-36
Tabel 5.3. Keterkaitan antara Visi, Misi Tujuan dan Sasaran 2017-2022 ..... V-40
Tabel.6.1 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT VI-2
Tabel.6.2 Analisis SWOT dalam Penetapan Strategi Pembangunan Daerah VI-6
Tabel.6.3 Keterkaitan Antara Strategi Pokok dan Strategi Operasional VI-11
Tabel.6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan MISI KESATU VI-15
Tabel.6.5 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan MISI KEDUA VI-18
Tabel.6.6 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan MISI KETIGA VI-21
Tabel.6.7 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan MISI KEEMPAT VI-23
Tabel.6.8 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan MISI KELIMA VI-24
Tabel.6.9 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan MISI KEENAM VI-27
Tabel.6.10 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kec. Nagawutung VI-30
Tabel.6.11 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kec. Wulandoni VI-31
Tabel.6.12 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kec. Ile Ape VI-34
Tabel.6.13 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kec. Ile Ape Timur VI-35
Tabel.6.14 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kec. Lebatukan VI-37
Tabel.6.15 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kec. Nubatukan VI-39
Tabel.6.16 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kec. Omesuri VI-41
Tabel.6.17 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kec. Buyasuri VI-43
Tabel.6.18 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kec. Atadei VI-45
Tabel.6.19 Penjabaran Agenda Politik Kepala Daerah ke dalam Program Prioritas VI-86
Tabel 7.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi Kab. Lembata Tahun 2017-2022 ..... VII-2
Tabel 7.2. Perkiraan Kebutuhan Pendanaan APBD Provinsi NTT VII-3
Tabel 7.3. Perkiraan Kebutuhan Pendanaan untuk APBN VII-4
Tabel 7.4. Pembagian Prioritas dan Kerangka Pendanaan 5 Tahun VII-5
Tabel 7.5. Program Prioritas 1 ..... VII-8
Tabel 7.6. Program Prioritas 2 ..... VII-26
Tabel 7.7. Program Prioritas 3 ..... VII-33
Tabel. 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama VIII-2
Tabel. 8.2. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lembata 2017-2022 ..... VIII-5

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-8
Gambar 1.2.	Kerangka Pikir Penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022	I-9
Gambar 2.1.	Peta Admnistrasi Wilayah Kabupaten Lembata	II-2
Gambar 2.2.	Peta Morfologi Kabupaten Lembata	II-4
Gambar 2.3.	Peta Topografi Kabupaten Lembata	II-5
Gambar 2.4.	Peta Geologi Kabupaten Lembata	II-7
Gambar 2.5.	Peta Hidrologi Kabupaten Lembata	II-9
Gambar 2.6.	Peta Sebaran Daerah Aliran Sungai Kabupaten Lembata	II-10
Gambar 2.7.	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Lembata	II-12
Gambar 2.8.	Peta Kawasan Hutan Kabupaten Lembata	II-14
Gambar 2.9.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Lembata	II-16
Gambar 2.10.	Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Lembata	II-18
Gambar 2.11.	Peta Rencana Kawasan Peruntukan Perikanan	II-20
Gambar 2.12.	Peta Kawasan Pertambangan Kabupaten Lembata	II-21
Gambar 2.13.	Peta Kawasan Peruntukan Industri	II-23
Gambar 2.14.	Peta Kawasan Pariwisata	II-24
Gambar 2.15.	Peta Kawasan Permukiman Kabupaten Lembata	II-25
Gambar 2.16.	Peta Ancaman Gempa Bumi Kabupaten Lembata	II-27
Gambar 2.17.	Peta Ancaman Tsunami di Kabupaten Lembata	II-29
Gambar 2.18.	Peta Ancaman Gunung Api di Kabupaten Lembata	II-31
Gambar 2.19.	Peta Ancaman Kekeringan di Kabupaten Lembata	II-33
Gambar 2.20.	Peta Ancaman Kebakaran Lahan di Kabupaten Lembata	II-34
Gambar 2.21.	Peta Ancaman Banjir di Kabupaten Lembata	II-35
Gambar 2.22.	Peta Ancaman Abrasi di Kabupaten Lembata	II-36
Gambar 2.23.	Peta Ancaman Longsor di Kabupaten Lembata	II-37
Gambar 4.1.	Telaah RPJPD	IV-2
Gambar 4.2.	Telaah RPJMN	IV-4
Gambar 4.3.	Keterkaitan Nawacita dengan Misi RPJMD	IV-4
Gambar 4.4.	Telaah dengan RPJMD Provinsi NTT	IV-11
Gambar 5.1.	Model Pengembangan Pariwisata Lembata	V-5
Gambar 5.2.	Skenario Lembata 2.0	V-8
Gambar 5.3.	Dimensi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	V-8
Gambar 5.4.	Dimensi Pembangunan Ekonomi	V-9
Gambar 5.5.	Cincin Pertanian	V-9
Gambar 5.6.	Cincin Ekonomi Kelautan, Perikanan dan Maritim	V-10
Gambar 5.7.	Cincin Ekonomi Pariwisata	V-10
Gambar 5.8.	Cincin Ekonomi dan Industri Kreatif	V-11
Gambar 5.9.	Cincin Keuangan Makro	V-11
Gambar 5.10.	Cincin Pemberdayaan Ekonomi Umat Basis	V-12
Gambar 5.11.	Pengembangan Ekonomi Wilayah	V-12
Gambar 5.12.	Wilayah Pertumbuhan Strategis sekitar Kabupaten Lembata	V-13
Gambar 5.13.	Rencana Kerjasama Pertumbuhan Strategis Utara-Utara	V-13
Gambar 5.14.	Model Integrasi Distribusi dan Skema Rantai Ekonomi	V-14
Gambar 5.15.	Skema Pembangunan Perdesaan Model Cluster	V-14
Gambar 5.16.	Dimensi Pembangunan Ekologi	V-15

Daftar Grafik

Grafik 2.1.	Laju Inflasi Provinsi NTT Tahun 2012-2016	II-42
Grafik 2.2.	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lembata	II-44
Grafik 2.3.	Tingkat Kriminal di Kabupaten Lembata	II-46
Grafik 2.4.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Lembata	II-48
Grafik 2.5.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Lembata	II-49
Grafik 2.6.	Angka Harapan Hidup Bayi di Kabupaten Lembata	II-50
Grafik 2.7.	Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Lembata	II-50
Grafik 2.8.	Jumlah Anak Usia Dini di Kabupaten Lembata	II-56
Grafik 2.9.	Annual Parasite Incidence Kabupaten Lembata	II-59
Grafik 2.10.	Konsumsi Ikan Laut di Kabupaten Lembata	II-79
Grafik 2.11.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	II-81
Grafik 2.12.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan HP	II-102
Grafik 3.1.	Komposisi Kinerja Pendapatan Daerah 2012-2016	III-4
Grafik 3.2.	Komposisi Kinerja Belanja Daerah 2012-2016	III-7

Daftar Diagram

Diagram 2.1	Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Lembata	II-46
Diagram 2.2	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Lembata	II-47
Diagram 2.3	Persentase Angka Putus Sekolah di Kabupaten Lembata	II-54
Diagram 2.4	Kondisi Produktifitas Tanaman Pangan di Kabupaten Lembata	II-70
Diagram 2.5	Data Produksi Ikan dan Rumpu Laut di Kabupaten Lembata	II-75
Diagram 2.6	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata	II-84
Diagram 2.7	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri	II-86



Bab 1 Pendahuluan

Bagian ini memuat latar belakang penulisan dan landasan hukum, hubungan antar dokumen serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD. Argumentasi yang melatari penyusunan RPJMD ini adalah bahwa telah menjadi sebuah keharusan bagi Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk menetapkan idenya membangun daerah dalam bentuk dokumen resmi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD, selain disusun secara teknokratis, politis dan partisipatif juga harus sinkron dan sinergis dengan RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN, selaras dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD dan RTRW, serta menjadi rujukan bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan dalam periode yang bersangkutan.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2017-2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Lembata merupakan salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang terus berkembang. Kabupaten Lembata ditetapkan sebagai kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Flores Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. Dalam kurun waktu Tahun 2011-2016 pelaksanaan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016 telah mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah. Sejalan dengan perubahan sosial, ekonomi dan budaya, roda pembangunan Kabupaten Lembata terus berjalan.

Kehidupan masyarakat Lembata secara bertahap terus bergerak semakin maju dan berkembang sehingga menjadi salah satu pusat layanan dan pusat pertumbuhan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemajuan tersebut telah membangkitkan harapan dan optimisme bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata bahwa dinamika pembangunan telah memberikan arah yang lebih jelas menuju tata kehidupan yang lebih maju dan sejahtera. Keberhasilan pembangunan selain diukur dari hasil nyata juga dinilai dari perubahan sikap, perilaku dan tindakan masyarakat dalam membangun masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Dinamika pembangunan di Kabupaten Lembata selama lima tahun terakhir (2011-2016) telah membawa kemajuan dalam berbagai bidang seperti berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa, terbangunnya prasarana dan sarana, tertatanya perumahan dan permukiman, bertumbuhnya sektor pariwisata serta meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Perubahan lingkungan global yang ditandai oleh semakin luasnya investasi dan perdagangan internasional terutama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN menuntut Kabupaten Lembata berkembang menjadi kabupaten yang mempunyai lingkungan kondusif untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan kreativitas; serta memiliki daya tarik dan daya saing yang kuat. Pelaksanaan demokrasi mendorong proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lembata menjadi lebih baik, partisipatif, transparan dan akuntabel yang memberikan peluang lebih luas bagi terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut tata kelola Pemerintahan Kabupaten Lembata yang lebih maju dan modern dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih bermutu, cepat, mudah, adil, dan tanpa disrkiminasi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.

Tantangan pembangunan Kabupaten Lembata dalam lima tahun (2017-2022) mendatang adalah menjaga momentum pembangunan di periode sebelumnya, **#Lembata 1.0** dengan mendorong percepatan pembangunan desa dan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia agar dapat mengatasi permasalahan di Kabupaten Lembata terutama belum maksimalnya tingkat kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, kondisi infrastruktur, transportasi, air bersih, energi, komunikasi

dan penataan kota yang belum optimal. Masih diabaikannya potensi sumber daya laut dan maritim, pengembangan pariwisata yang baru dimulai. Pendapatan daerah yang masih rendah dan juga sumber daya aparatur yang belum berbasis teknologi dan informasi. Selanjutnya masih adanya kemiskinan dan pengangguran, belum tuntasnya kesenjangan antar wilayah kecamatan dan desa, belum optimalnya pengelolaan pemerintahan, dan belum meratanya akses masyarakat terhadap pemenuhan hak dasar yang bermutu. Selain itu, tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah mendorong perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang lebih maju, modern dan bermartabat; menjamin pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan sejalan dengan komitmen pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs-Sustainable Development Goals*); serta memperkuat keunggulan dan daya saing daerah dalam menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Berbagai tantangan tersebut perlu diatasi melalui strategi, kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten Lembata yang terencana, terukur, terpadu dan merata antar desa dan antar kecamatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan peningkatan kinerja pembangunan Kabupaten Lembata. Perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyakat dan mempercepat kemajuan daerah.

Kabupaten Lembata telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak secara langsung pada bulan Februari 2017 dan telah ditetapkan serta dilantik pada tanggal 22 Mei 2017 Eliaser Yentji Sunur, ST sebagai Bupati Lembata dan Dr. Thomas Ola, SE, M.Si sebagai Wakil Bupati Lembata masa jabatan 2017-2022. Pelaksanaan Pilkada tersebut merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyakat dan mempercepat kemajuan Kabupaten Lembata. Rangkaian dari penyelenggaraan Pilkada adalah penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lembata Tahun 2017–2022 disusun sebagai salah satu kewajiban yang harus ditunaikan Pemerintah Daerah pasca pelantikan Bupati/Wakil Bupati. RPJMD ini merupakan kebijakan publik yang menjamin adanya konektivitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban dan evaluasi pembangunan daerah untuk jangka menengah. Substansinya memuat visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati, arah kebijakan keuangan daerah, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah, program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Proses penyusunan RPJMD ini sedapat mungkin didasarkan pada pendekatan politis, teknokratis, partisipatif serta *top down* dan *bottom up*. Secara teknokratis, perencanaan pembangunan daerah disusun menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah atas bawah- bawah atas (*top down-bottom up*) dilaksanakan melalui proses sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berjenjang dalam hierarki pemerintahan. Sedangkan secara politis, dokumen ini disusun sebagai terjemahan dan penjabaran dari cita-cita dan pemikiran politik Bupati/Wakil Bupati untuk membangun Kabupaten Lembata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan potensi daerah dan permasalahan yang dihadapi. Logikanya sederhana, bahwa optimalisasi

pengelolaan potensi daerah akan berkontribusi secara signifikan bagi upaya mengatasi berbagai problema daerah seperti kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya. Pemetaan potensi dan permasalahan daerah ini menjadi kompas penunjuk arah bagi pemimpin daerah untuk membawa masyarakatnya menuju pencapaian visi yang diimplementasikan melalui misi dan program pembangunan.

Konstruksi bangunan visi, misi dan program tersebut kemudian dikemas secara sistematis, terarah dan terukur dalam dokumen resmi yang disebut RPJMD, didasari dengan suatu metode dan kerangka berpikir yang ilmiah. Kendati demikian, alur pikir dan substansi RPJMD ini diupayakan untuk selaras, sinkron dan sinergis dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Karena itu, dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah pada pemerintahan pusat dan level provinsi tersebut dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017 – 2022. Proses penyusunannya pun dilakukan melalui suatu mekanisme politik yang memberi ruang yang luas bagi seluruh rakyat (melalui representasinya di DPRD dan para pemangku kepen tingan/*stakeholders*) untuk terlibat aktif dalam pembahasan dan penetapan dokumen ini.

Selain selaras dengan arah kebijakan pada level nasional dan provinsi, hadirnya dokumen ini pun merupakan buah refleksi atas kebijakan pembangunan pada periode sebelumnya. Artinya bahwa kebijakan pembangunan ini tetap melanjutkan kebijakan periode 2011–2016 yang dipertajam dengan beberapa terobosan baru guna mengefektifkan dan mengefisienkan pencapaian tujuan pembangunan yang dicita-citakan. Pembaruan dan penajaman arah kebijakan dimaksud, dilakukan pada beberapa aspek yang dipandang penting dan mendesak untuk mengatasi permasalahan publik sebagaimana telah disebutkan di atas. Karenanya, penyusunan RPJMD ini merupakan suatu keharusan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RPJMD selanjutnya dirumuskan menjadi *Guide of* Lembata *Development* (GoLD) sebagai *roadmap* percepatan pembangunan, melalui kebijakan Rantai Ekonomi #Lembata 2.0 (*Two Point Zero*). #Lembata 2.0 (*Two Point Zero*) merupakan kelanjutan dari #Lembata 1.0 (*One Point Zero*) yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016, hal mana isu-isu visi dan misi pembangunan tahun 2011-2016 yang menjadi hambatan pembangunan dijadikan *feedback* penyusunan visi dan misi pembangunan tahun 2017-2022.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0070);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari manajemen pembangunan Pemerintah Kabupaten Lembata khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1.3.1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Lembata

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 terutama visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan tahapan ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lembata masa

bhakti Tahun 2017-2022, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025.

Visi Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 adalah **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Lembata yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing".** Misi Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 adalah (1) Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Berbasis Potensi Daerah; (2) Meningkatkan Kesejahte raan Masyarakat melalui Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Daya Beli dan Infrastruktur Daerah; (3) Meningkatkan Daya Saing Perekonomian untuk Penguatan Otonomi Daerah;

Selain itu, RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa fokus pembangunan tahap ketiga (RPJMD) Tahun 2017-2022 adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta mandiri di segenap wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

1.3.2. RPJMD dan RTRW Kabupaten Lembata

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lembata terutama menyangkut penetapan pola dan struktur tata ruang, serta penetapan kawasan strategis sebagai acuan dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan, serta prioritas pembangunan wilayah kecamatan. RPJMD Kabupaten Lembata memuat stratagi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan. Keserasian dokumen RPJMD dan RTRW untuk menjamin terwujudnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup di Kabupaten Lembata secara berkelanjutan.

1.3.3. RPJMD, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 dan RPJMN 2015-2019

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 memperhatikan dan mengacu tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur mempertimbangkan dan mengacu tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta prioritas pembangunan nasional Nawacita yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata memperhatikan agenda pembangunan Nawacita yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

RPJMN Tahun 2015-2019 menjelaskan visi pembangunan: **"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**dan misi pembangunan: (1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

RPJMN 2015-2019 memuat sembilan agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yaitu : (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

RPJMN Tahun 2015-2019 juga memberikan arah kebijakan untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Lembata, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah. Penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memperhatikan komitmen nasional dalam mewujukan tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs=sustainable development goals*). Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 juga memperhatikan, mengacu dan mendukung terwujudnya tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Nawacita dan *SDG's*.

1.3.4. RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan penjabaran teknis dari perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022. Renstra PD juga menjadi dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran dan indikator kinerja, lokasi dan anggaran sesuai dengan urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Renstra PD disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Lembata.

1.3.5. RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022. RPJMDesa juga memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran dan indikator kinerja, lokasi dan anggaran sesuai dengan kewenangan Pemerintah Desa dan urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan. RPJMDesa disusun oleh Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata.

1.3.6. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Lembata yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. Selanjutnya Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Lembata yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten.

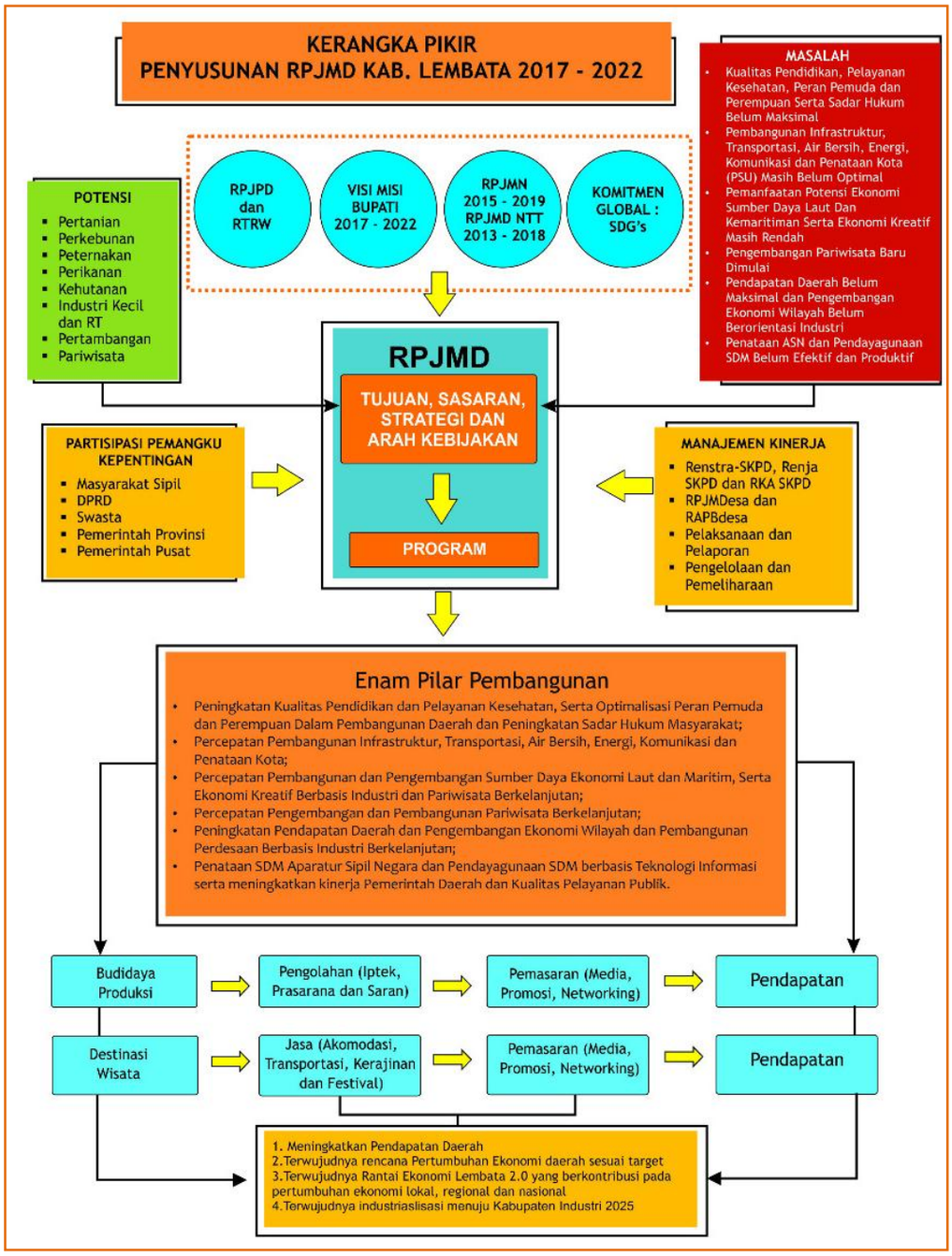
Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1. berikut ini :

Gambar.1.1.
Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif di laksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional, untuk memastikan sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Gambar.1.2.
Kerangka Pikir Penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022



Penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 memperhatikan hasil kajian terhadap potensi daerah baik sumber daya pertanian, pertambangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kecil dan pariwisata terutama menyangkut ketersediaan lahan, kapasitas produksi dan pelaku usaha baik rumah tangga maupun swasta dalam mengelola sumber daya. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 juga memperhatikan kajian terhadap permasalahan daerah terutama keterbatasan usaha, kemiskinan, pengangguran, ketertinggalan, keterisolasian, kesenjangan dan kerusakan lingkungan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan nasional dan daerah, yaitu: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lembata, (2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lembata, (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, (5) komitmen nasional terhadap tujuan pembangunan berkelajutan,

serta (6) hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berbagai dokumen dan kebijakan tersebut digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta indikator kinerja RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata 2017-2022 memperhatikan berbagai pandangan dari para pemangku kepentingan baik tokoh masyarakat, DPRD, masyarakat sipil, pelaku usaha, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang dihimpun melalui diskusi, rapat koordinasi dan media informasi.

Penataan manajemen kinerja juga menjadi penentu keberhasilan dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022. Penataan manajemen kinerja mencakup kemampuan perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lembata. Penataan manajamen kinerja juga mensyaratkan kemampuan pemerintah desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RABDesa) sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lembata. Selain itu, penataan manajemen kinerja juga mencakup pengembangan sistem informasi perencanaan dan penganggaran, pelaporan, pengendalian dan evaluasi (*e-planning, budgeting*, monitoring dan evaluasi) secara terpadu dan konsisten.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan, rencana investasi dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lembata tahun 2017-2022 dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018, RPJMN Tahun 2015-2019, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Lembata.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 juga dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi dan prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lembata masa bakti 2017-2022 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 adalah :

1. Acuan dan pedoman resmi bagi aparat Pemerintah Kabupaten Lembata dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa; serta sekaligus merupakan acuan penentuan program dan kegiatan pembangunan yang akan dibahas dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Lembata secara berjenjang dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
2. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Lembata dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Lembata, APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, APBN dan sumber dana lainnya;

3. Mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025;
4. Mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031;
5. Mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
6. Mendukung terwujudnya tujuan, sasaran dan agenda pembangunan Nawacita yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019;
7. Mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang berkelanjutan (*SDG's*);
8. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah; antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain; antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan Pemerintah Nusa Tenggara Timur; serta antara Pemerintah Kabupaten Lembata dan Pemerintah Pusat;
9. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
10. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD;
11. Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata;
12. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; dan
13. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Lembata, pelaku usaha dan masyarakat.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Organisasi penulisan RPJMD ini mencakup sembilan (9) bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya memiliki keterkaitan dan berada dalam sebuah alur pikir yang sistematis. Secara umum, substansinya membahas latar belakang dan landasan penyusunan RPJMD, gambaran umum daerah dan pengelolaan keuangan, analisis isu strategis daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah, indikasi dan pendanaan program pembangunan, penetapan indikator kinerja daerah serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Bab I. PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang penulisan dan landasan hukum, hubungan antar dokumen serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD. Argumentasi yang melatari penyusunan RPJMD ini adalah bahwa telah menjadi sebuah keharusan bagi Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk menetapkan idenya membangun daerah dalam bentuk dokumen resmi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD, selain disusun secara teknokratis, politis dan partisipatif juga harus sinkron dan sinergis dengan RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN, selaras dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD dan RTRW, serta menjadi rujukan bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan dalam periode yang bersangkutan.

Bab II. **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Gambaran umum kondisi daerah yang dipaparkan pada bagian ini mencakup 4 (empat) aspek yakni 1) aspek geografi dan demografi, 2) aspek kesejahteraan masyarakat, 3) aspek pelayanan umum, dan 4) aspek daya saing daerah. Terhadap keempat aspek ini, tidak hanya disajikan data pokok selama periode 2011 – 2016 tetapi juga diikuti dengan analisis mengenai trend perkembangan setiap item dengan tujuan untuk memperoleh sebuah gambaran secara garis besar tentang potret Kabupaten Lembata. Dengan paparan data dan hasil analisis tersebut, akan diketahui problema pembangunan dan potensi daerah yang dapat digali melalui suatu kemasan program yang tersusun secara sistematis.

Bab III. **GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH**

Ada 3 (tiga) frame besar yang digambarkan pada bagian ini yakni kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu serta kerangka pendanaan. Kinerja ke uangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah pada periode sebelumnya (minimal 3 tahun terakhir) guna memberikan gambaran tentang kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan selama kurun waktu 2011–2016 disajikan sebagai gambaran untuk mengetahui perbandingan proporsi anggaran antara belanja aparatur dengan belanja pembangunan, serta pendapatan dan pengeluaran yang bersumber dari pembiayaan. Sementara kerangka pendanaan merupakan alat teropong untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah serta proyeksi pendapatan dan pendanaan belanja daerah untuk periode berikutnya.

Bab IV. **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Bagian ini terdiri dari 2 (dua) sub bagian yang terkait satu sama lain yakni uraian tentang permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis internasional, nasional, regional maupun isu lokal. Permasalahan dan isu strategis ini tidak terlepas dari hasil analisis pada bab 2, dan menjadi dasar bagi penyusunan prioritas pembangunan daerah yang diramu dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2017 – 2022.

Bab V. **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Judul bab ini sudah mencerminkan cakupannya yakni uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017 – 2022 sebagai tindak lanjut dari visi – misi calon Bupati/Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada masa kampanye Pemilukada 2017 lalu. Paparan ini diikuti dengan penjelasan arah dan kata-kata kunci visi, penjelasan pernyataan misi, pernyataan tujuan, pernyataan sasaran yang di ikuti dengan indikator dan rencana target sasaran serta sebuah matriks keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran.

Bab VI. **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Strategi disusun sebagai jalan atau cara untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada bab 5, sedangkan arah kebijakan menguraikan secara detail arah jalan atau cara dimaksud pada setiap tahun dalam periode 2017 – 2022.

Strategi dan arah kebijakan ini menjelaskan bagaimana mewujudkan visi, misi dan tujuan melalui pencapaian sasaran.

Mengacu pada strategi dan arah kebijakan bagian ini disusun sebagai jantung dari formula perencanaan pembangunan daerah secara garis besar. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Bab VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat 2 (dua) hal pokok yakni indikasi program prioritas dan kebutuhan pendanaan. Program prioritas yang dimaksudkan di sini adalah bahwa program-program pembangunan daerah yang disebutkan pada bab sebelumnya kemudian dijabarkan dalam program-program prioritas PD yang dilengkapi dengan rencana target capaian (makro) setiap tahun dari setiap program dimaksud. Program-program ini kemudian ditargetkan alokasi pendanaannya sesuai skala prioritas daerah.

Bab VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja daerah pada bagian ini meliputi beberapa hal yang mana indikator capaiannya bersifat makro dan diuraikan setiap tahun. Target indikator ini merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pada akhir masa jabatan Bupati/Wakil Bupati.

Bab IX. PENUTUP

Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah yang dipaparkan pada bagian ini mencakup 4 (empat) aspek yakni 1) aspek geografi dan demografi, 2) aspek kesejahteraan masyarakat, 3) aspek pelayanan umum, dan 4) aspek daya saing daerah. Terhadap keempat aspek ini, tidak hanya disajikan data pokok selama periode 2012 – 2016 tetapi juga diikuti dengan analisis mengenai trend perkembangan setiap item dengan tujuan untuk memperoleh sebuah gambaran secara garis besar tentang potret Kabupaten Lembata. Dengan paparan data dan hasil analisis tersebut, akan diketahui problema pembangunan dan potensi daerah yang dapat digali melalui suatu kemasan program yang tersusun secara sistematis.



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1. 1. Luas dan Batas Wilayah Admnistrasi

Kabupaten Lembata merupakan salah satu kabupaten dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.

Secara geografis, sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah timur berbatasan dengan Selat Merica Kabupaten Alor dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Boleng dan Selat Lamakera Kabupaten Flores Timur.

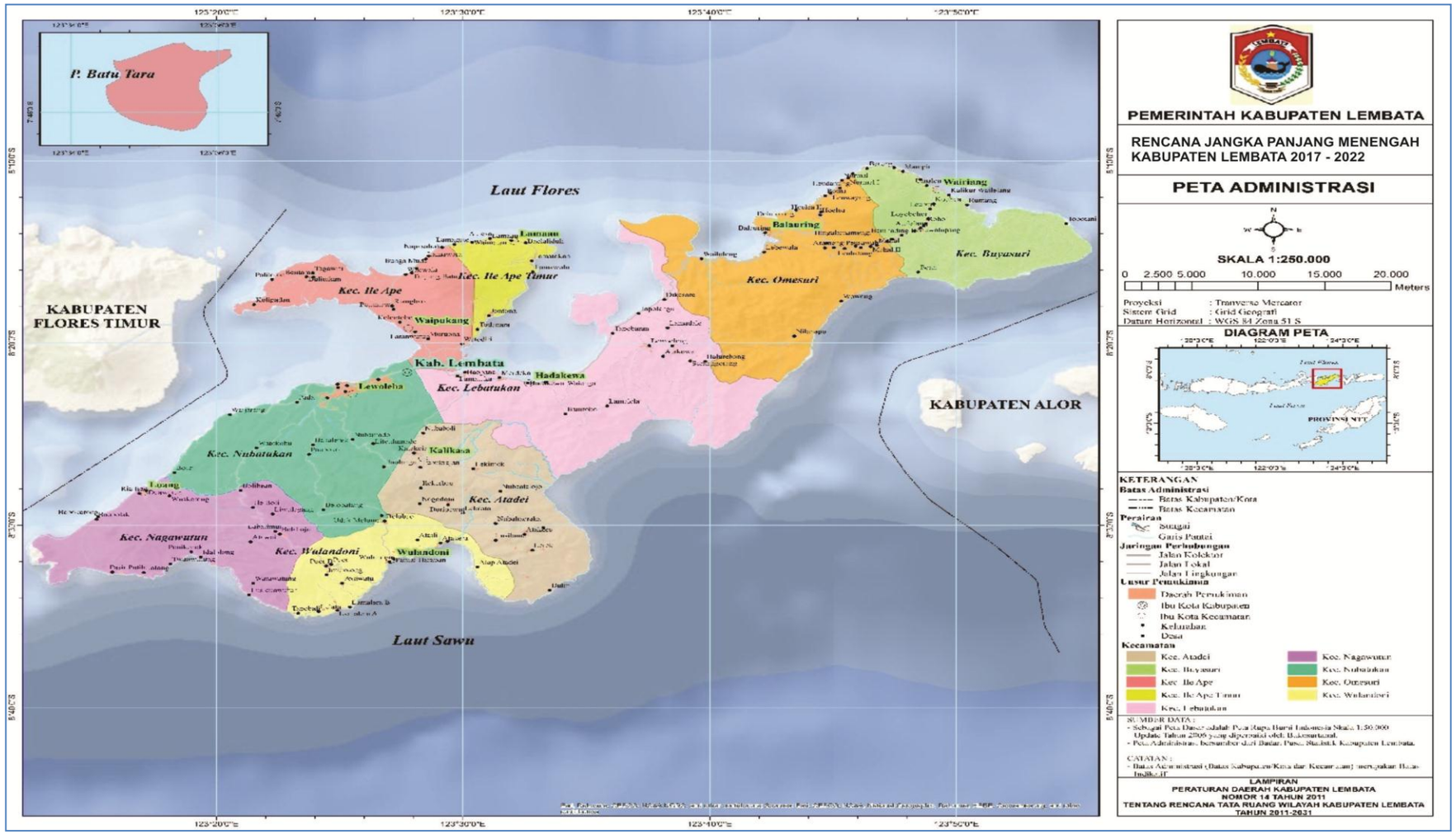
Luas administrasi daratan Kabupaten Lembata adalah sebesar 1.266,40 Km^2, terdiri dari 9 kecamatan, 144 desa dan 7 kelurahan. Luas serta sebaran per masing-masing kecamatan tersaji pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1 berikut :

Tabel.2.1
Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan
dan Jumlah Kelurahan di Kabupaten Lembata Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan dan Desa	Luas Wilayah	
			(Km^2)	(%) Thd Total
1	Nagawutun	18	185,70	14,66
2	Atadei	15	150,42	11,88
3	Ile Ape	17	96,86	7,65
4	Lebatukan	17	241,90	19,10
5	Nubatukan	11 desa dan 7 kelurahan	165,64	13,08
6	Omesuri	22	161,91	12,79
7	Buyasuri	20	104,26	8,23
8	Wulandoni	15	121,44	9,59
9	Ile Ape Timur	9	38,26	3,02
	Jumlah	144 desa dan 7 kelurahan	1.266,40	100

Sumber: Lembata Dalam Angka, Tahun 2016

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2016



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2016

2.1.1. 2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara morfologi Kabupaten Lembata terbagi menjadi dua satuan, yaitu daerah pegunungan dan pedataran. Berikut ini tipe morfologi Kabupaten Lembata hasil bentukan aktivitas tektonik dan vulkanik dapat disajikan pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.2.

Tabel.2.2
Tipe Morfologi Kabupaten Lembata

Tipe Morfologi	Luas (ha)	Persentase (%)
Pedataran	33.684,17	26,59%
Perbukitan gelombang	52.461,44	41,42%
Perbukitan terjal	40.517,40	31,99%
Luas Total	126.663,01	100%

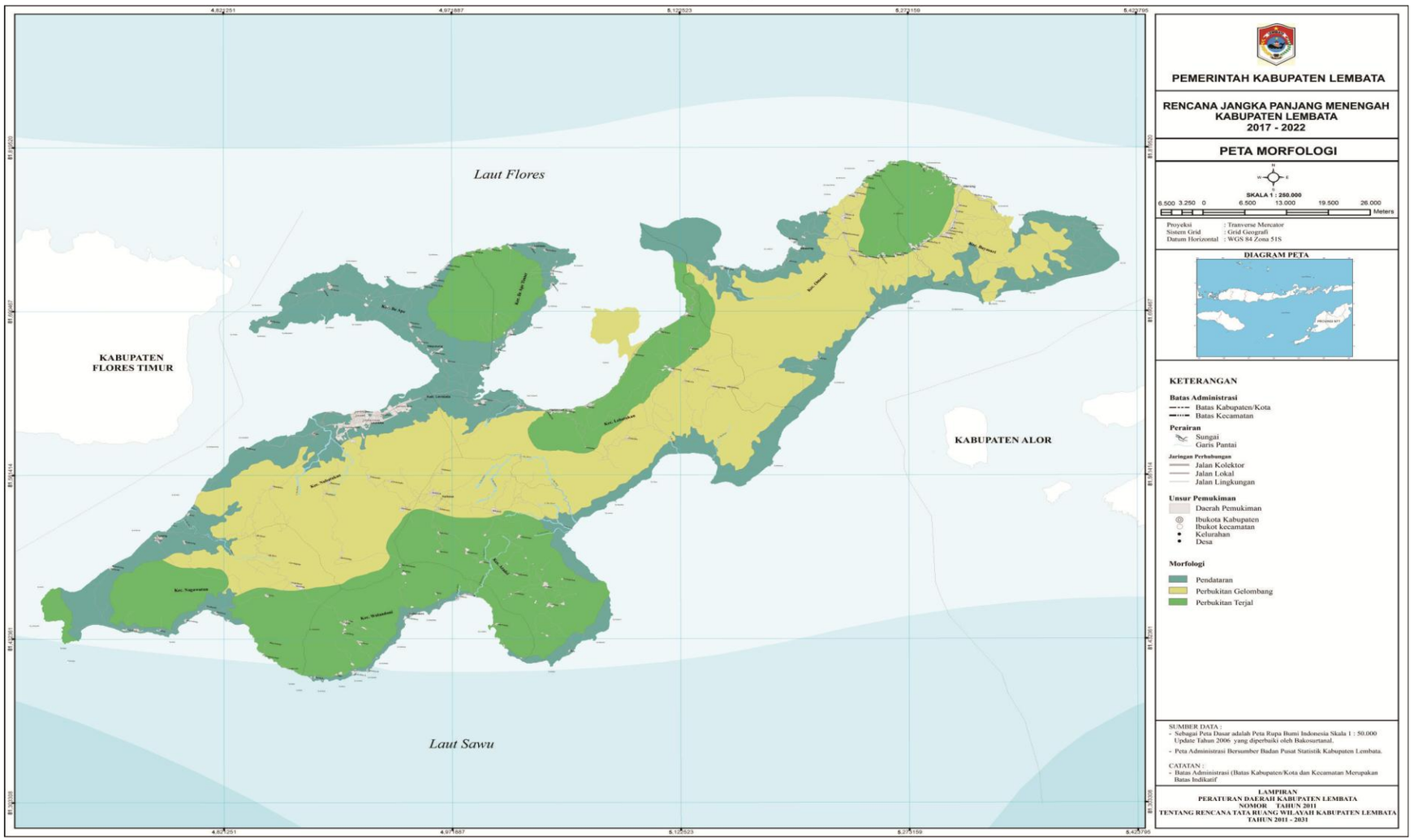
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2016

2.1.1. 3.Topografi (Kemiringan Lahan, Ketinggian Lahan)

Wilayah Kabupaten Lembata pada umumnya terdiri dari tanah pegunungan/bukit dan sedikit dataran yang tersebar pada 9 (sembilan) kecamatan. Daratan Kabupaten Lembata bagian timur mempunyai topografi yang bergunung dengan gunung berapi Uyelewun yang mempunyai ketinggian 1.080 meter dari permukaan laut. Bagian selatan dan bagian barat juga mempunyai topografi bergunung. Sedangkan bagian utara sebagian datar dan sebagian bergunung-gunung dengan gunung berapi Ile Ape yang mempunyai ketinggian 1.913 meter dari permukaan laut. Sebagian besar desa di Kabupaten Lembata merupakan desa pesisir yang jumlahnya mencapai 86 (delapan puluh enam) desa/kelurahan dan 65 (enam puluh lima) desa berada di dataran tinggi.

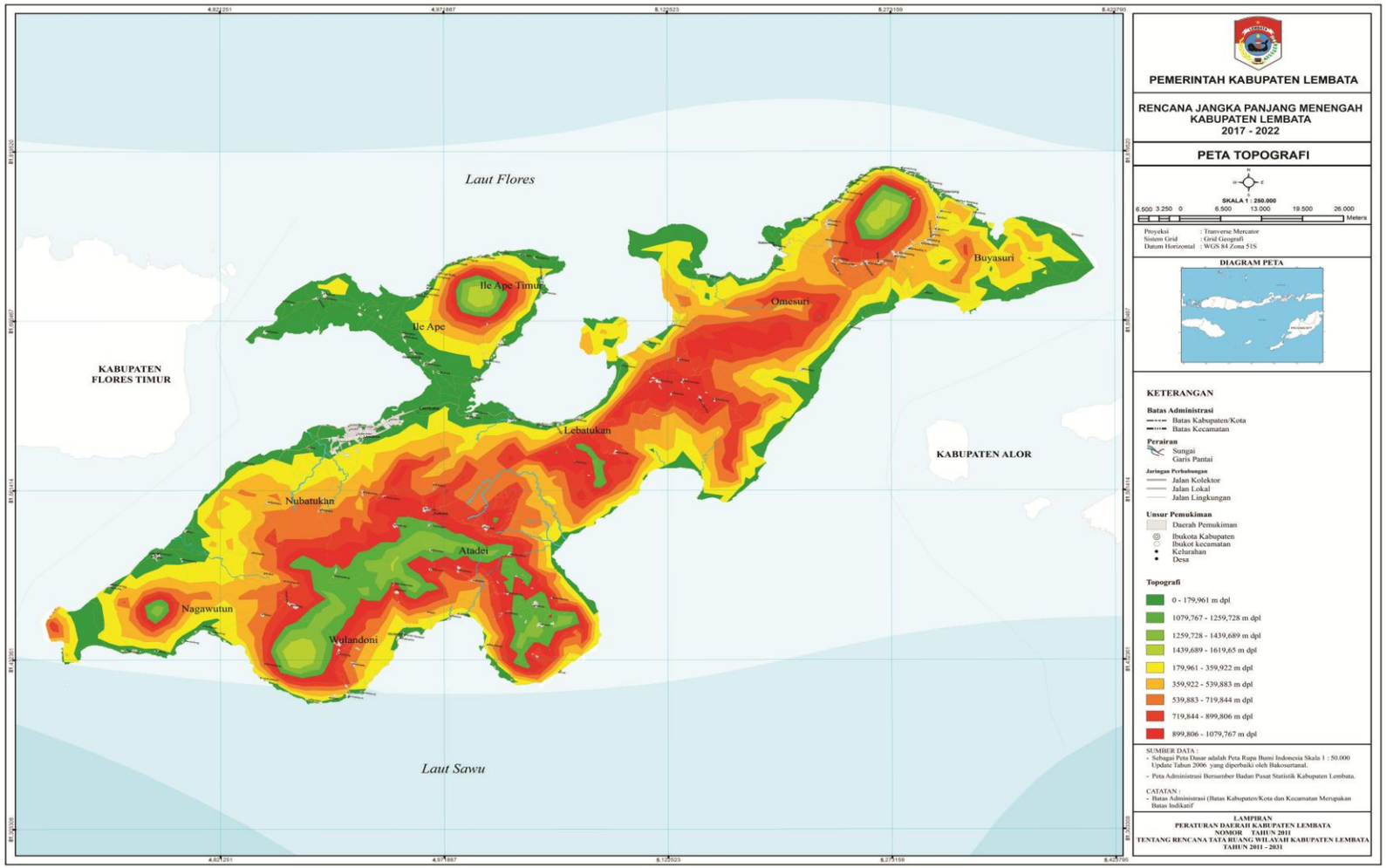
Adapun kemiringan lahan di Kabupaten Lembata dikelompokkan dalam 3 (tiga) kisaran antara lain : daerah dengan kemiringan 0 – 15% seluas 60.220 Ha, daerah dengan kemiringan 16 – 40% seluas 53.110 ha dan daerah dengan kemiringan > 40% seluas 12.800 ha.

Gambar 2.2. Peta Morfologi Kabupaten Lembata



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2016

Gambar 2.3. Peta Topografi Kabupaten Lembata



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2016

2.1.1. 4.Geologi (Struktur dan Karakteristik, Potensi)

Ragam formasi geologi yang terbentuk di Kabupaten Lembata akibat aktivitas tektonik maupun vulkanik tersaji pada Tabel 2.3 berikut ini :

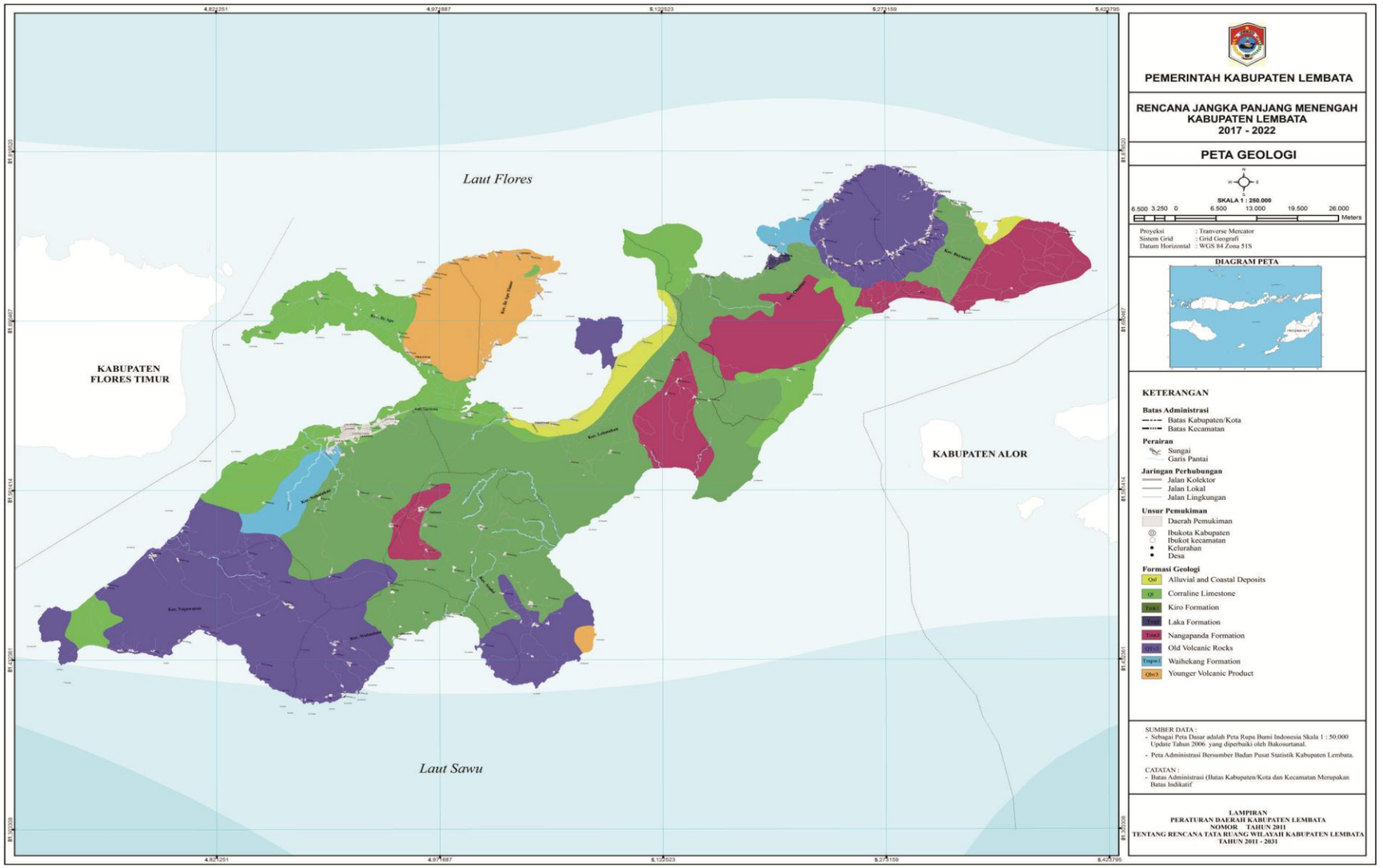
Tabel.2.3
Formasi Geologi Kabupaten Lembata

Formasi Geologi	**Geology Formation**	**Simbol Formasi Geologi**	**Luas (Ha)**
Aluvial dan Endapan Koastal	Alluvial and Coastal Deposits	Qal	2.679,23
Batuan Gunung api Tua	Old Volcanic Rocks	QTv3	34.972,08
Batuan Gamping Koral	Corraline Limestone	Ql	17.167,18
Formasi Kiro	Kiro Formation	Tmk1	44.345,73
Formasi Laka	Laka Formation	Tmpl	161,67
Formasi Nangapanda	Nangapanda Formation	Tmn3	15.862,84
Formasi Waihekang	Waihekang Formation	Tmpw1	3.250,28
Produk vulkanik muda	Younger Volcanic Product	Qhv3	8.224,00
Luas Total			126.663,01

Sumber: RTRW Kabupaten Lembata Tahun, 2011- 2031

Stratigrafi umum di wilayah ini secara berurutan dari umur tua ke muda, terdiri dari formasi kiro, nangapanda, waihekang Batuan Gunung Api Tua dan Undak Pantai, sebagaimana Peta geologi regional pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Peta Geologi Kabupaten Lembata



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2016

2.1.1. 5.Hidrologi (Daerah Aliran Sungai, Sungai, Danau, Rawa, Debit)

Ditinjau dari aspek hidrologi ketersediaan air permukaan maupun air tanah sangat terbatas, karena rendahnya curah hujan. Potensi simpanan air tanah seluas 13.757,75 Ha pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.5 berikut :

Tabel.2.4
Formasi Hidrologi Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2016

Formasi Hidrologi	Hidrology Formation	Simbol Formasi Hidrologi	Luas (ha)
Batuan Gunung api Tua	Old Volcanic Rocks	QTv3	34.751,66
Batugamping Koral	Corraline Limestone	Ql	20.129,94
Endapan Pantai	Coastal Terraces	Qct	4.954,18
Formasi Laka	Laka Formation	Tmpl	53.069,47
Daerah air tanah	Daerah air tanah	Daerah air tanah	13.757,75
Luas Total			126.663,01

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2016

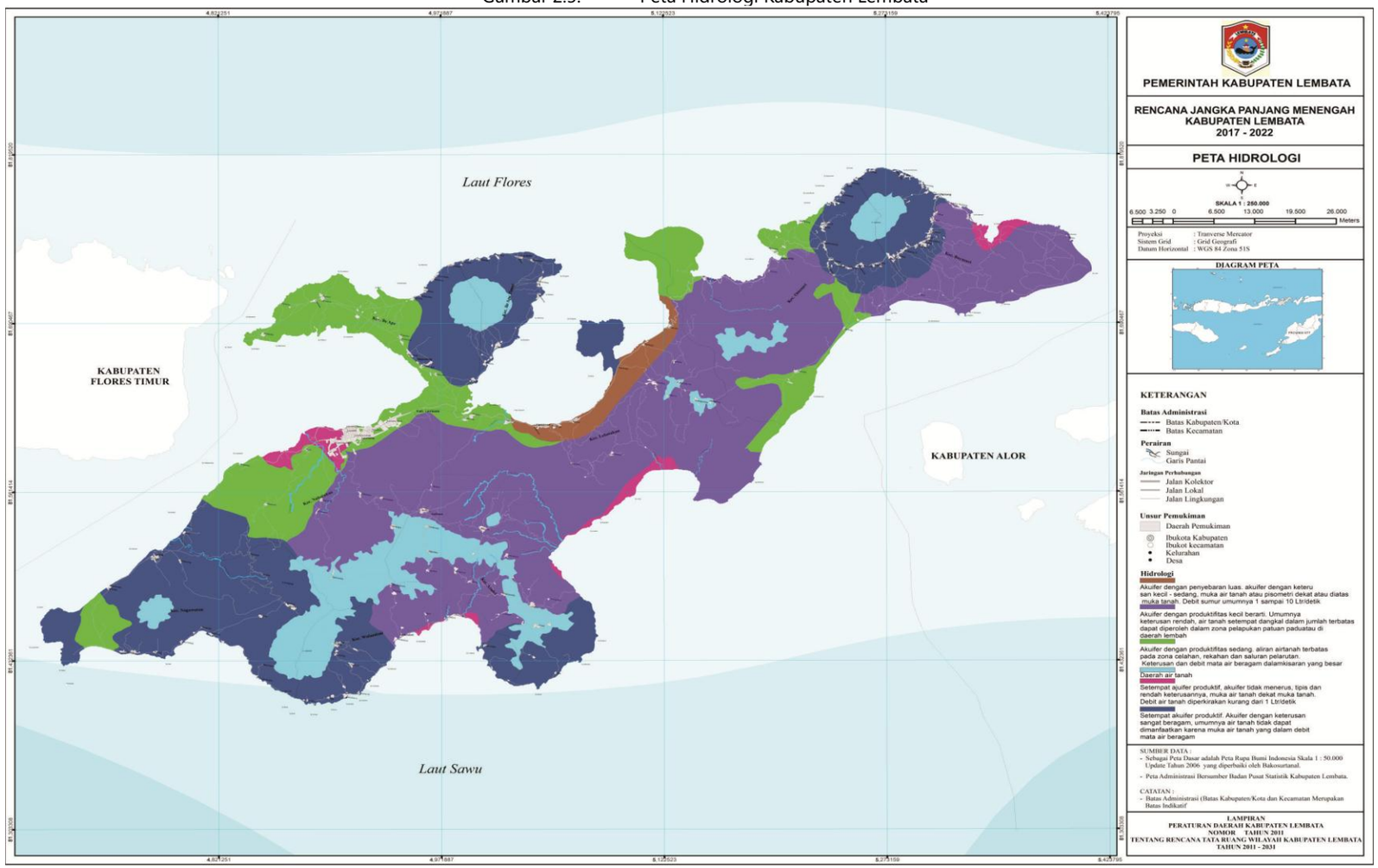
Sumber air permukaan terdapat pada 15 Daerah Aliran Sungai tersaji pada Tabel 2.5.berikut:

Tabel.2.5
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Lembata Tahun 2016

Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (ha)
DAS Delamo	6.761,70
DAS Riang	5.304,36
DAS Maa	11.401,97
DAS Beten	9.150,08
DAS Teba	14.138,46
DAS Wewang	10.714,20
DAS Atawuwur	6.967,18
DAS Lelang	6.151,48
DAS Kima	7.642,77
DAS Bau	513,09
DAS Nongabelang	11.155,26
DAS Pokang	7.649,57
DAS Mulankepa	14.238,59
DAS Lani	5.059,32
DAS Lema	4.815,00
Luas Total	126.663,01

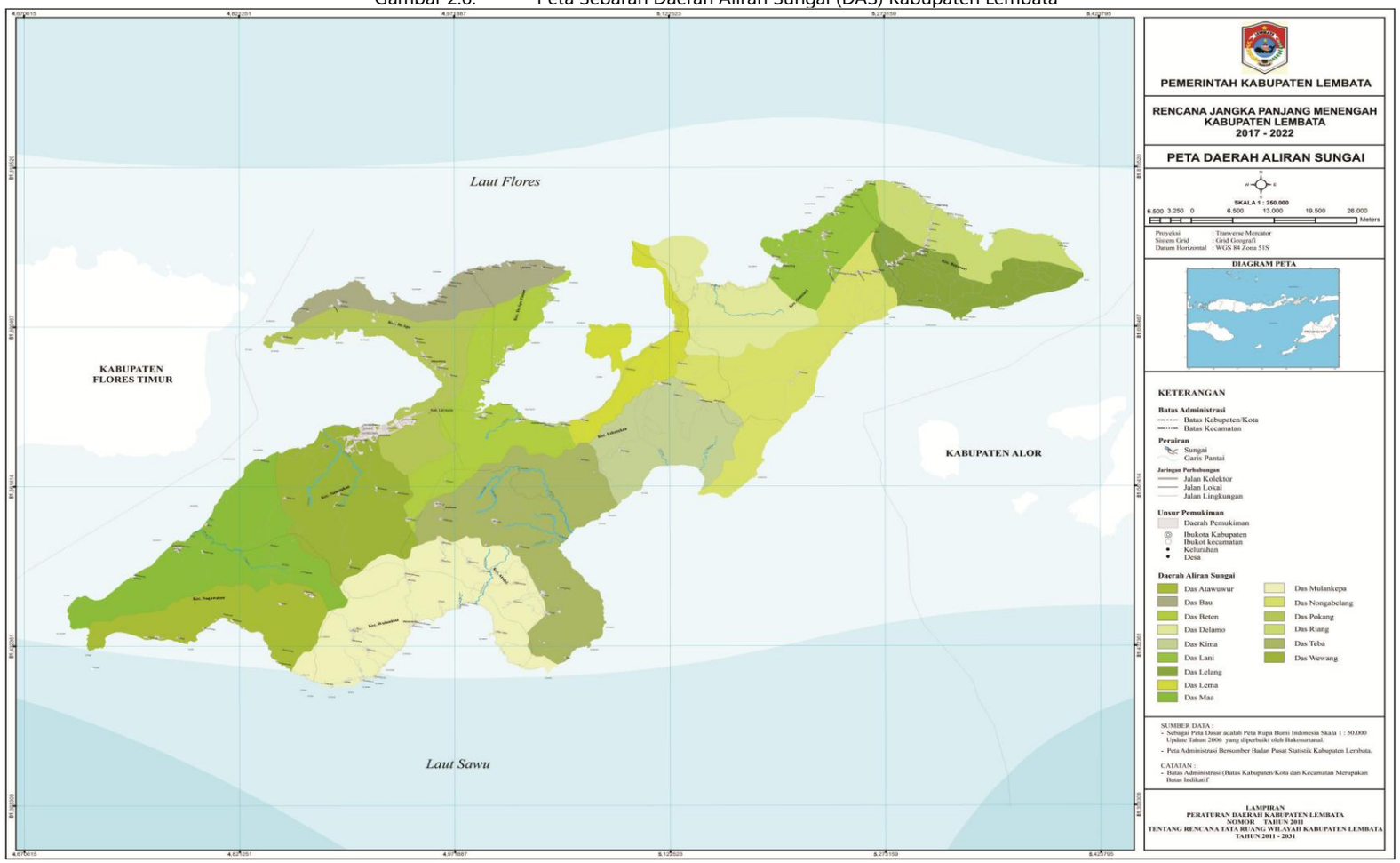
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata,Tahun 2016

Gambar 2.5. Peta Hidrologi Kabupaten Lembata



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2016

Gambar 2.6. Peta Sebaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Lembata



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2016

2.1.1. 6.Klimatologi (Tipe, Curah Hujan, Suhu dan Kelembaban)

Kondisi Iklim di wilayah Kabupaten Lembata tergolong kering, berdasarkan data curah hujan periode tahun 2002-2011 rata-rata curah hujan dalam setahun sebesar 1.286,37 mm dan rata-rata curah hujan perbulannya sebesar 107,22 mm. Musim hujan berlangsung rata-rata antara bulan Desember sampai dengan bulan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Nopember setiap tahunnya. Suhu udara rata-rata 27^{0}C, dengan suhu minimum mencapai 20^{0}C dan suhu maksimum mencapai 33^{0}C. Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 72% sampai 84% sedangkan kecepatan angin tergolong rendah rata-rata 8,4 knot/jam. Data curah hujan selengkapnya tersaji pada Tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel.2.6
Curah Hujan per Tahun dan Curah Hujan per Bulan
di Kabupaten Lembata Tahun 2002-2011

Tahun	Curah Hujan per Tahun (mm)	Rata-rata Curah Hujan per Bulan (mm)
2002	641,80	53,50
2003	1.250,00	104,20
2004	918,50	76,50
2005	1.401,00	116,80
2006	1.257,10	104,80
2007	1.383,10	115,30
2008	1.516,70	126,40
2009	889,10	74,10
2010	1.859,70	155,00
2011	1.746,70	145,60
Rata-rata	**1.286,37**	**107,22**

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lembata, Tahun 2016

2.1.1. 7. Penggunaan Lahan (Kawasan Budidaya, Kawasan Lindung)

1. Kawasan Budidaya

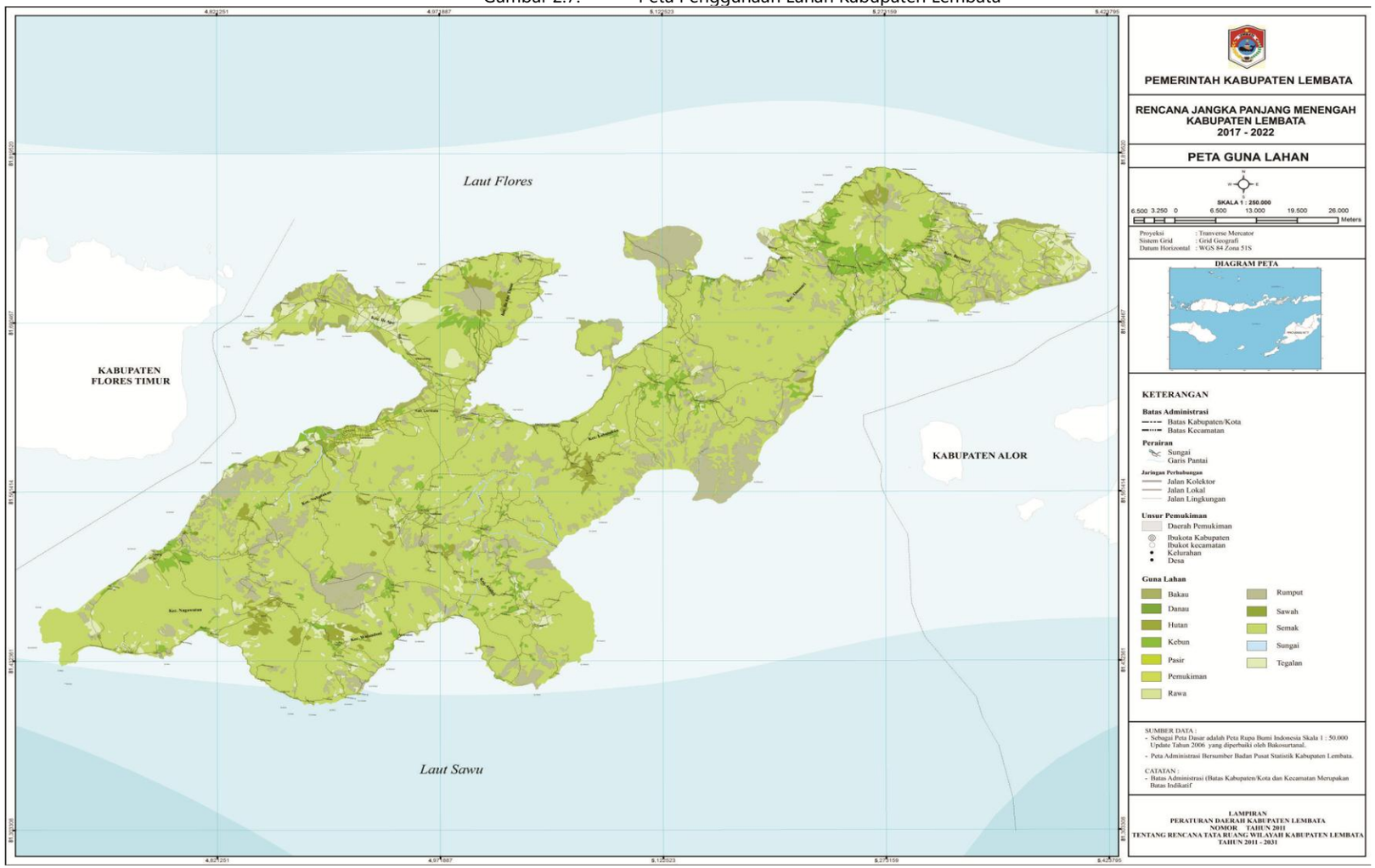
Penggunaan lahan didominasi semak yaitu sebesar 93.119,25 Ha (71,43%) dan padang rumput sebesar 15.524,33 Ha (11,91%). Lahan tempat bercocok tanam dengan luas yang sangat sedikit yaitu tegalan 5,66%, kebun 4,28% dan sawah 0,07%. Luas proporsi hutan dan bakau hanya sebesar 1,61% dan 1,08%, sedangkan lahan terbuka berupa pasir sebesar 1,85%. Lahan permukiman penduduk sebesar 1,43% dan sisanya sebesar 0,434% berupa sungai dan danau. Luas penggunaan lahan tersaji pada Tabel 2.7 dan Gambar 2.7 berikut :

Tabel.2.7
Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Lembata Tahun 2016

Tipe Penggunaan Lahan	Luas (ha)	%
Bakau	1.413,44	1,08
Danau	5,5	0,004
Hutan	2.095,83	1,61
Kebun	5.575,62	4,28
Pasir	2.417,82	1,85
Pemukiman	1.869,66	1,43
Rawa	178,56	0,14
Rumput	15.524,33	11,91
Sawah	95,98	0,07
Semak	93.119,25	71,43
Sungai	562,07	0,43
Tegalan	7.507,81	5,76
Luas total	130.365,85	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2016

Gambar 2.7. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Lembata



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, 2016

2. Kawasan Lindung

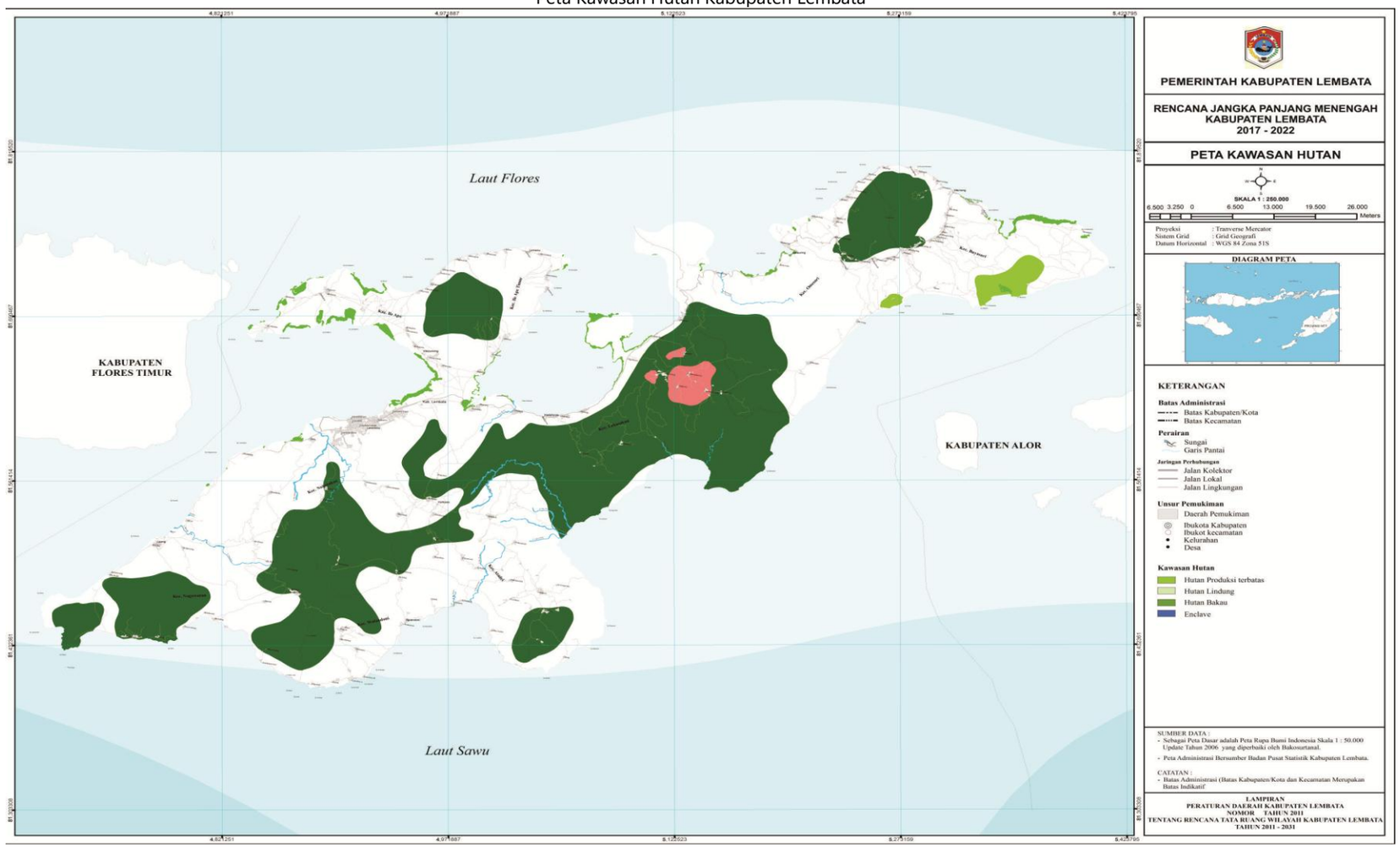
Luas hutan lindung disajikan pada tabel 2.8 dan gambar 2.8 berikut:

Tabel.2.8
Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Lembata Tahun 2016

No	Kecamatan/ RPH	Kelompok Hutan/Fungsi	RTK	Luas (ha)	%
1	Buyasari	1. IlePapar/HP	92	1650	3,39
		2. IleKodang/HP	91	1100	2,26
2	Omesuri	3. HadakewaLabalekang /HL	130	2248	4,62
		4. IleKodang/HL	91	1100	2.26
		5. Natu/HP	116	300	0,62
3	Lebatukan	6. HadakewaLabalekang /HL	130	17040	35,04
4	IleApe dan Ile Ape Timur	7. Ile Lewotolok/HL	90	5092,86	10,47
5	Nubatukan	8. HadakewaLabalekang /HL	130	4172,69	8,58
6	Atadei	9. IlePaugora/HL	135	1650	3,39
		10. HadakewaLabalekang /HL	130	3452	7,10
7	Nagawutung	11. IleMahino/HL	144	1109,89	2,28
		12. HadakewaLabalekang/HL	130	6262	12,88
		13. Ile Mingar/HP/HL	88	3450	7,09
	JUMLAH			48627,44	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2016

Gambar 2.8.
Peta Kawasan Hutan Kabupaten Lembata



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, 2016

3. Jenis Tanah

Tanah yang terbentuk di Kabupaten Lembata terdiri dari tiga ordo, yaitu entisol, inceptisol dan molisol.

Berdasarkan data jenis tanah, terdapat (lima) satuan peta tanah (SPT) yang merupakan asosiasi atau kompleks dari 5 grup yaitu Haplustolls-Usthorthents, Haplustepts, Haplustepts-Usthorthents, Usthorthents dan Ustipsamments, didominasi Usthorthents seluas 50,90%.

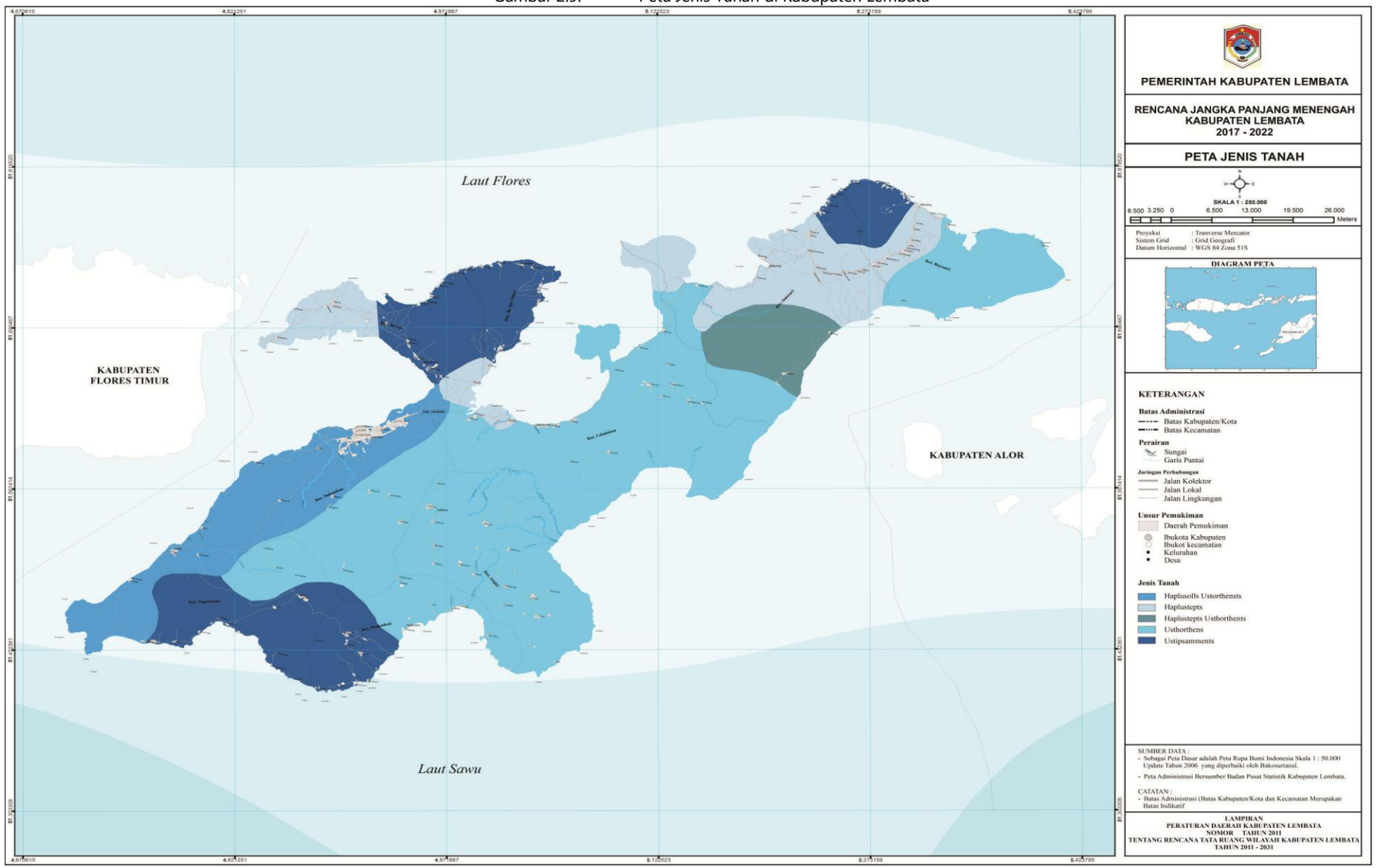
Kemiringan lahan dikelompokan dalam daerah dengan kemiringan: 0-15% seluas 60.220 ha, 15 – 40% seluas 53.110 ha dan > 40% seluas 12.800 ha.

Tabel.2.9
Jenis Tanah Kabupaten Lembata

Jenis Tanah	Luas (ha)
Haplusolls_Ustorthensts	15.712,01
Haplustepts	16.585,75
Haplustepts_Usthorthents	5.493,87
Usthorthens	64.079,37
Ustipsamments	24.792,01
Luas Total	126.663,01

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lembata Tahun 2016

Gambar 2.9. Peta Jenis Tanah di Kabupaten Lembata



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, 2016

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 distribusi peruntukan ruang untuk fungsi budidaya digambarkan sebagai berikut:

2.1.2.1. Kawasan Peruntukan Pertanian

A.1. Kawasan pertanian tanaman pangan

1). Kawasan tanaman pangan lahan basah dengan komoditas padi terdiri dari:
   a) Kawasan tanaman pangan lahan basah irigasi berdasarkan daerah irigasi berada di Kecamatan Nubatukan, Nagawutung, Wulandoni, Atadei, Lebatukan, dan Omesuri.
   b) Kawasan tanaman pangan lahan basah tadah hujan di seluruh kecamatan.
2). Kawasan tanaman pangan lahan kering tersebar di seluruh kecamatan dengan komoditas jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau.
3). Pengembangan tanaman jagung tersebar di seluruh kecamatan.
4). Pengembangan tanaman padi ladang tersebar di seluruh kecamatan.

A.2. Kawasan Holtikultura

Rencana pengembangan kawasan pertanian hortikultura terdiri dari kawasan tanaman sayur-sayuran direncanakan di dataran tinggi Kecamatan Atadei, dan Nubatukan dan Buah-buahan tersebar di seluruh kecamatan.

A.3. Kawasan Perkebunan

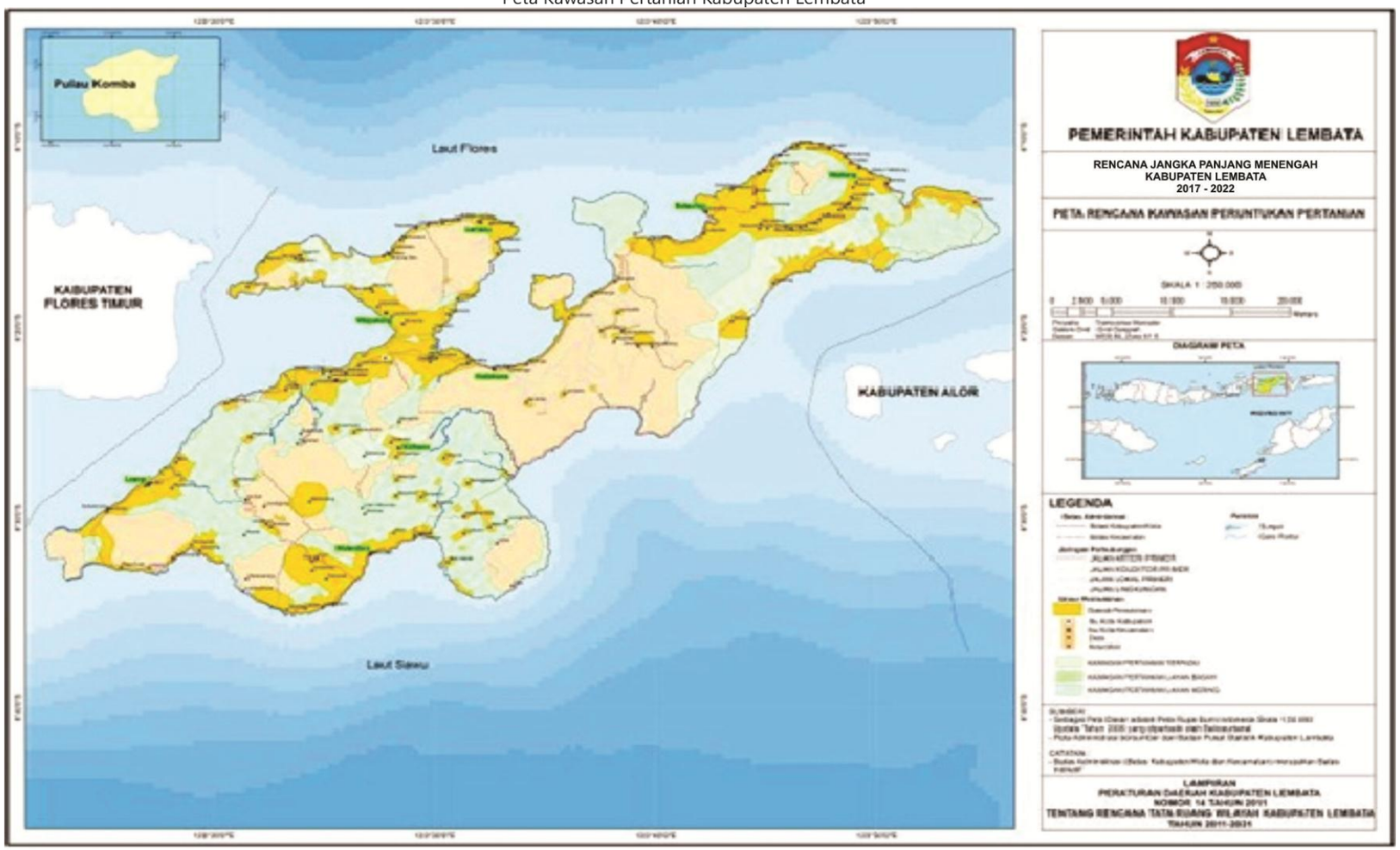
Rencana pengembangan kawasan perkebunan, adalah kawasan perkebunan di seluruh kecamatan; kelapa diprioritaskan di Kecamatan Nubatukan, Nagawutung, Lebatukan, Wulandoni, Atadei, Omesuri, dan Buyasuri.

A.4. Kawasan Peternakan

Rencana pengembangan kawasan peternakan, terdiri atas:

1) Kawasan budi daya ternak besar berupa sapi potong, tersebar di seluruh kecamatan.
2) Kawasan budi daya ternak kecil berupa babi dan kambing tersebar di seluruh kecamatan,
3) Kawasan budi daya ternak unggas berupa ayam potong, ayam buras, dan itik di seluruh kecamatan.

Gambar 2.10.
Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Lembata



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, 2016

2.1.2.2. Kawasan Perikanan

Rencana pengembangan kawasan perikanan terdiri atas:

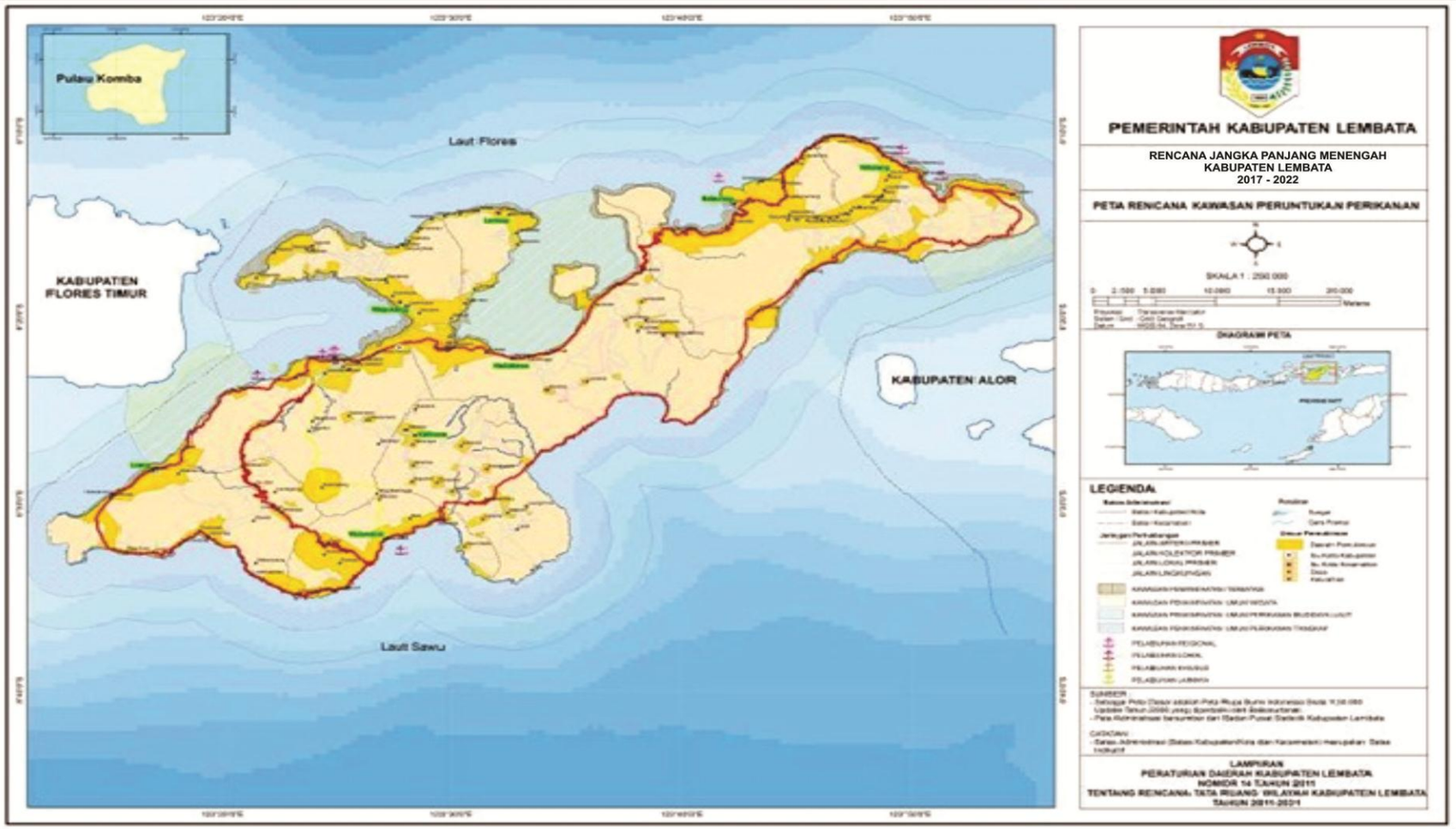
1) Kawasan perikanan tangkap terdiri atas:
   a) Kawasan perikanan tangkap di perairan laut Kecamatan Nubatukan, Lebatukan, Ile Ape, Ile Ape Timur, Omesuri, Buyasuri, Nagawutung, Atadei dan Wulandoni (Laut Flores dan Laut Sawu);
   b) Prasarana dan sarana perikanan tangkap Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hukung di Nubatukan.
2) Kawasan Peruntukan Budidaya Perikanan terdiri atas:
   a) Kawasan budidaya perikanan air laut terdiri dari:
      1. Budidaya ikan laut tersebar di seluruh pesisir Pulau Lembata khususnya di Teluk Lewoleba, Teluk Nuhanera dan Teluk Lewolein;
      2. Rumput laut di Nubatukan dan Nagawutung.
   b) Kawasan budidaya perikanan darat tersebar di seluruh kecamatan
3) Kawasan Pengolahan Hasil Ikan terdapat di Kecamatan Nubatukan.
4) Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya di Kecamatan Nubatukan, Ile Ape, Ile Ape Timur, Lebatukan, Nagawutung, Omesuri, Buyasuri dan Wulandoni.

2.1.2.3. Kawasan Pertambangan

Rencana peruntukan kawasan pertambangan sebagai berikut:

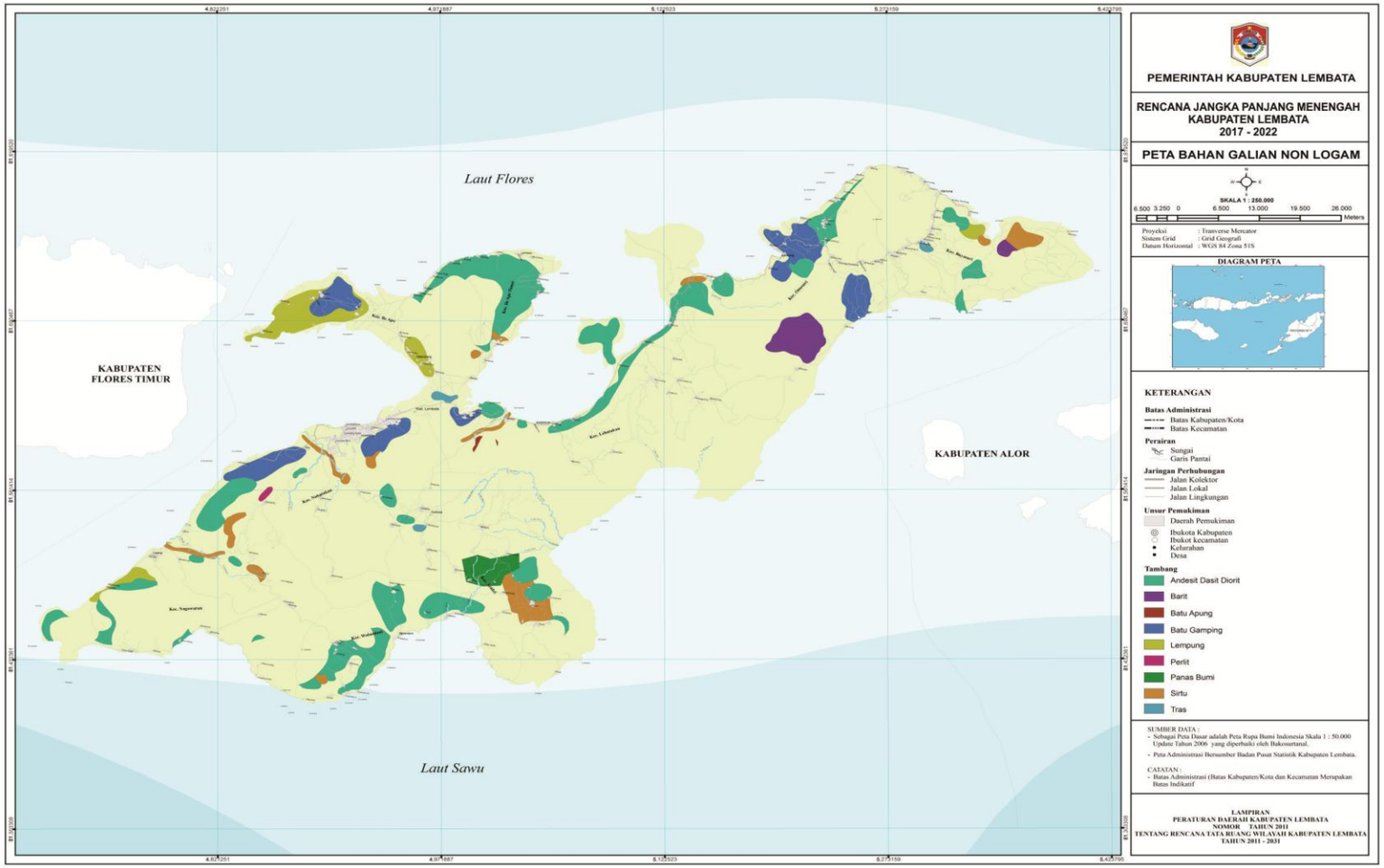
a) Panas bumi terdapat di Kecamatan Atadei.
b) Bahan galian mineral non logam dan batuan tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Gambar 2.11.
Peta Rencana Kawasan Peruntukan Perikanan



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2016

Gambar 2.12. Peta Kawasan Pertambangan



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2016

2.1.2.4. Kawasan Peruntukan Industri

Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri, terdiri dari:

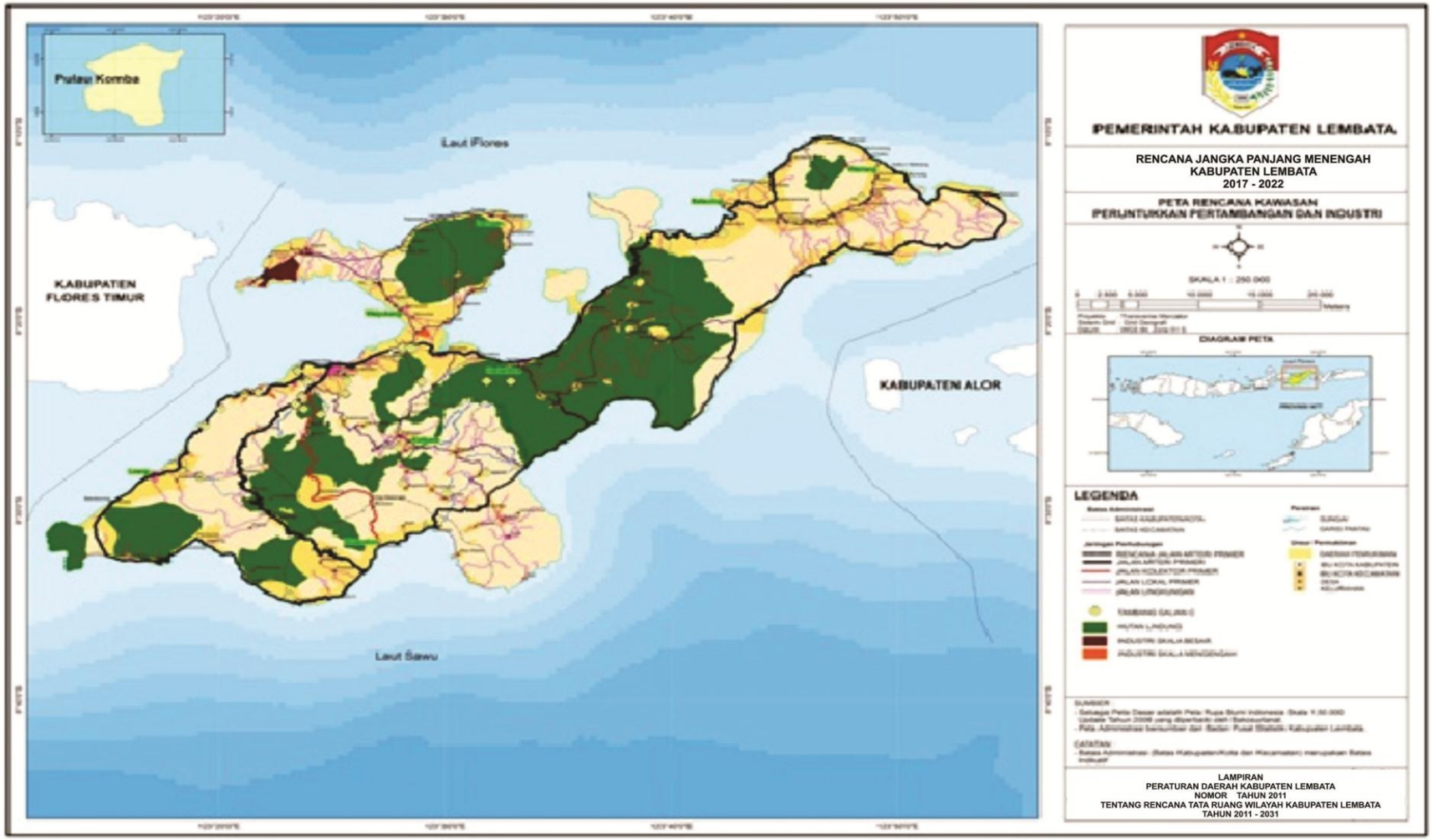
1) Kawasan peruntukan industri besar terdapat di Kecamatan Ile Ape;
2) Kawasan peruntukan industri menengah terdapat di Kecamatan Nubatukan;
3) Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan.

2.1.2.5. Kawasan Pariwisata

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata :

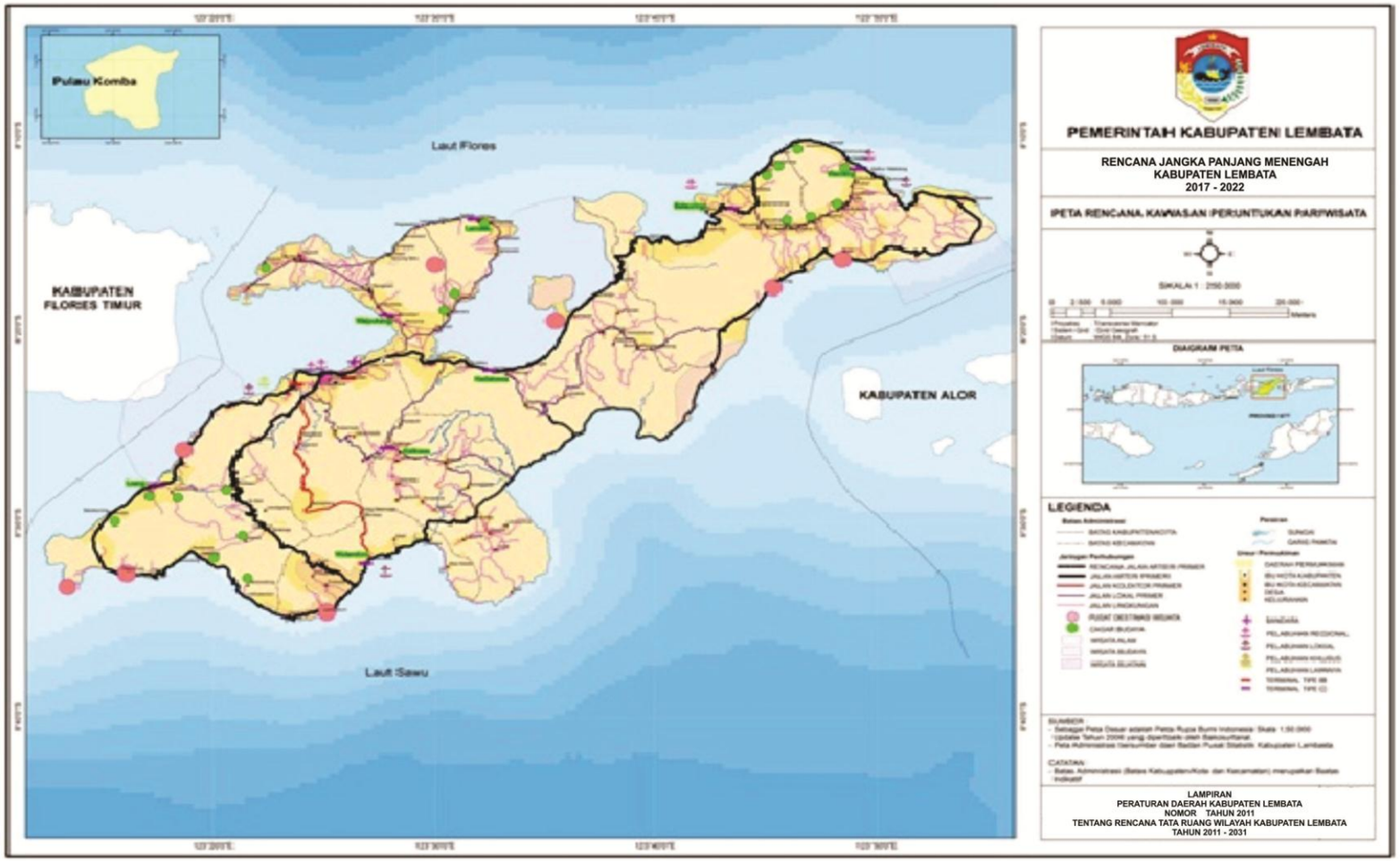
1) Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri dari :
   a) Teluk Nuhanera dan sekitarnya.
   b) pengembangan pesisir pantai Wowong sampai Tanjung Leur sebagai zona wisata pantai/wisata bahari.
   c) Pantai Waijarang- Bour-Pantai Mingar
   d) Rencana pengembangan pesisir utara Ile Ape (Kolipadan dan Pasir Putih Meko dan Pantai Kasang di atas Lewotolok)
   e) Pegunungan di antaranya gunung Ile Lewotolok dan Batutara
   f) Rencana pengembangan pariwisata tirta di Atawuwur Lodovavo dan Hidalabi.
2) Kawasan Peruntukan Pariwisata Budaya adalah rencana pengembangan kawasan Desa Lamalera A dan Lamalera B, Lewohala-Desa Jontona, Leuwayang dan sekitarnya, Lamanungan, Lusilame, Wakio dan sekitarnya, dan Desa Benihading.
3) Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan adalah:
   a) Pengembangan kawasan wisata bukit doa Watomiten dan Bukit Cinta/Wolor Pass, Kecamatan Nubatukan.
   b) Rencana pengembangan Goa Jepang di Hadakewa, Kecamatan Lebatukan.
   c) Wisata rohani Gua Maria di Lewopenutung Desa Lusiduawutun dan Lite
   d) Rencana pengembangan kawasan agrowisata KEK Wade di Kecamatan Lebatukan.
   e) Pantai Hadakewa, Lewolein sebagai lokasi wisata kuliner dan peristirahatan di Lebatukan.
   f) Wisata Pantai Roma

Gambar 2.13. Peta Kawasan Peruntukan Industri



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, 2016

Gambar 2.14. Peta Kawasan Pariwisata

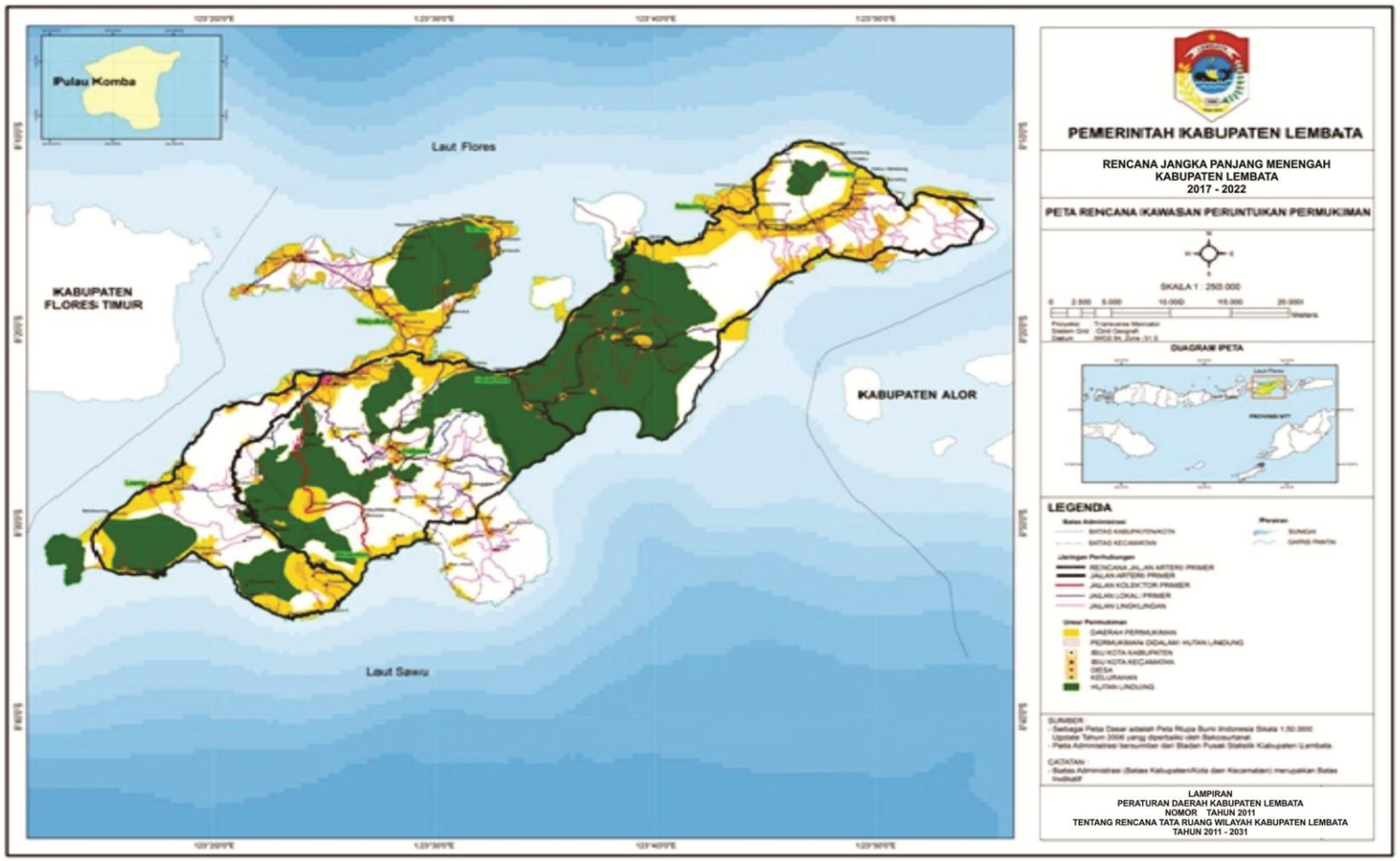


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, 2016

2.1.2.6. Kawasan Peruntukan Permukiman

Rencana pengembangan kawasan pemukiman terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.

Gambar 2.15. Peta Kawasan Permukiman



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, 2016

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Pulau Lembata terletak pada pusat kegiatan tektonik dari busur magmatik Sunda-Banda berarah Barat-Timur yang menunjukkan tempat bertemunya tiga lempeng tektonik besar (Hamilton,1979). Pulau Lembata merupakan bagian dari sistem Busur Banda bagian dalam dan terbentuk dalam rangkaian kepulauan bergunung api aktif.

Beberapa potensi bencana yang ada antara lain, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gelombang pasang, erupsi gunung api, kekeringan, longsor, kebakaran padang, banjir dan abrasi.

2.1.3.1. Gempa Bumi

Pulau Lembata dihimpit oleh 2 sesar aktif, yakni pertama *Timor Back Arc* di sebelah selatan yang maksimum magnitudonya 7,5 M serta slip-rate 30 mm/tahun dan kedua sesar aktif Timor/Sumba normal yang maksimum magnitudonya 8,3 M serta *slip-rate* 10 mm/tahun.

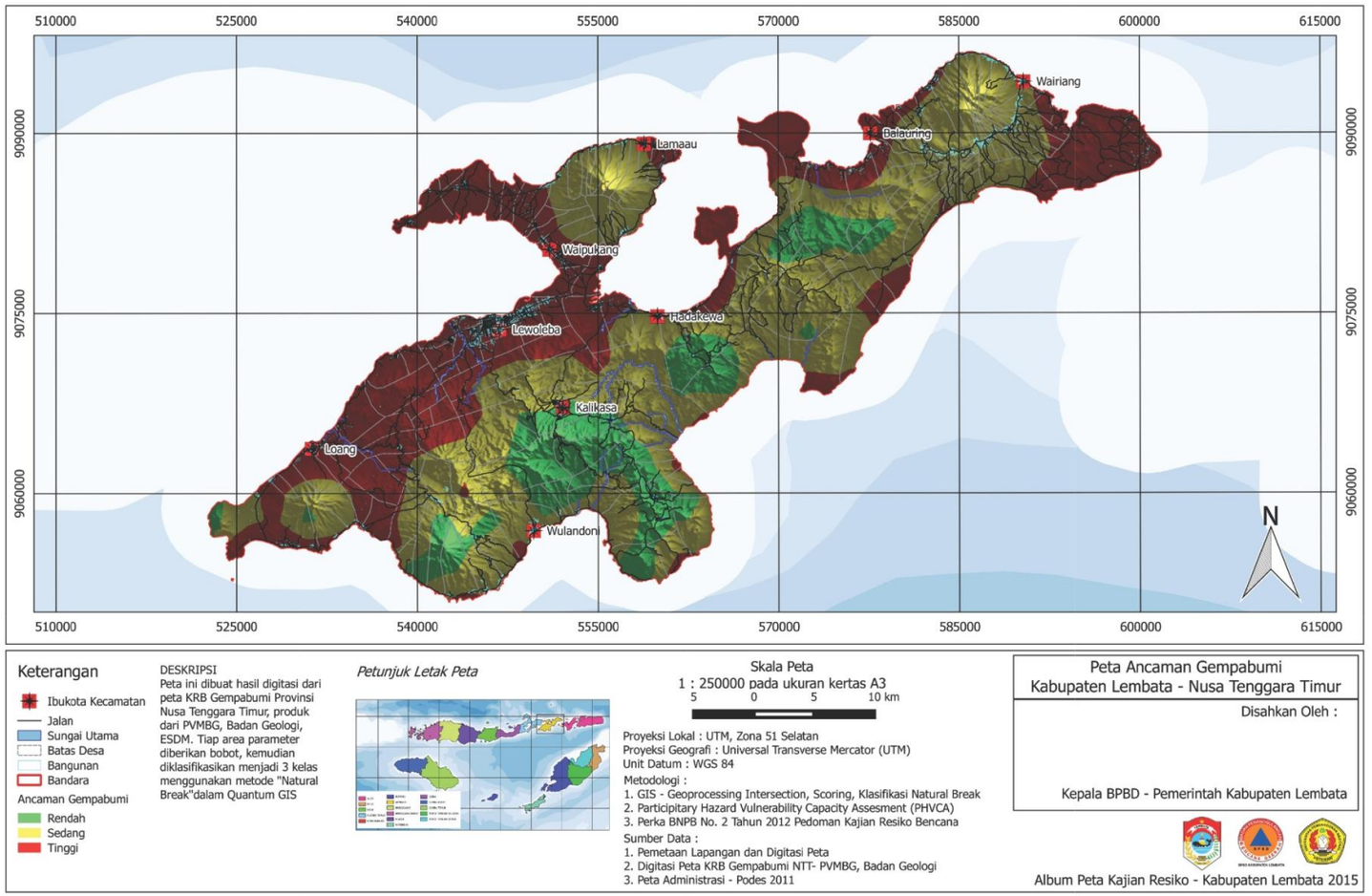
Berikut ini adalah tipe zona/kawasan rawan gempa serta penyebarannya, tersaji pada Tabel 2.10 dan Gambar 2.16.

Tabel.2.10
Potensi Rawan Gempa di Kabupaten Lembata

Zona/Kawasan Rawan Gempa	Luas (%)	Kecamatan
Zona rawan gempa Bumi Tinggi (MMI = VI – VIII), terasa oleh semua orang, konstruksi bangunan tinggi rusak, tembok pecah.	10,60%	Desa Kolipadan, Desa Kolontobo, Kelurahan Lewoleba, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kelurahan Lewoleba Utara, Lewoleba Barat, Lewoleba Timur, Kelurahan Selandoro, Watokobu, Duawutun, Pasirputih, Wailolong, Tobotani, Bean, Lodotokowa.
Zona rawan gempa Bumi Menengah (MMI = VII – VIII) terjadi kerusakan pada bangunan kuat, pengemudi kendaraan terganggu.	1,99%	Desa Amakaka, Leudanung, Balauring
Zona Rawan Gempa Bumi Rendah dan sangat rendah	87,41%	Seluruh wilayah yang tidak termasuk kedalam Zona Tinggi dan Menengah.
Luas Total	**100%**	

Sumber : BPBD Kab. Lembata Tahun 2017

Gambar 2.16.
Peta Ancaman Gempa Bumi di Kabupaten Lembata



Sumber : BPBD Kabupaten Lembata, 2015

2.1.3.2. Tsunami

Kondisi ancaman bahaya tsunami di Kabupaten Lembata dibagi menjadi zona rawan tsunami dan zona tidak rawan tsunami. Zona rawan tsunami sebanyak 49,67% yang terdiri dari 7 (tujuh) zona sebagai berikut :

(1). Zona I yang meliputi Bour, Wuakerong, Baopukang, Baobolak, Pasir Putih, Duawutun, Penikenek, Warawatung dan Lusiduawutung;

(2). Zona II yang meliputi Lamalera B, Wulandoni, Pantai Harapan, Atakera, Leworaja dan Alap Atadei. Zona II ini termasuk Zona Tsunami akibat gempa vulkanik Hobal;

(3). Zona III yang meliputi Watodiri, Todanara, Jontona, Lamawolo dan Lamatokan;

(4). Zona IV yang meliputi Baolaliduli, Lamau, Aulesa, Lamagute, Napasabok, Bungamuda, Amakaka, Tanjung Batu, Lamawara dan Waowala;

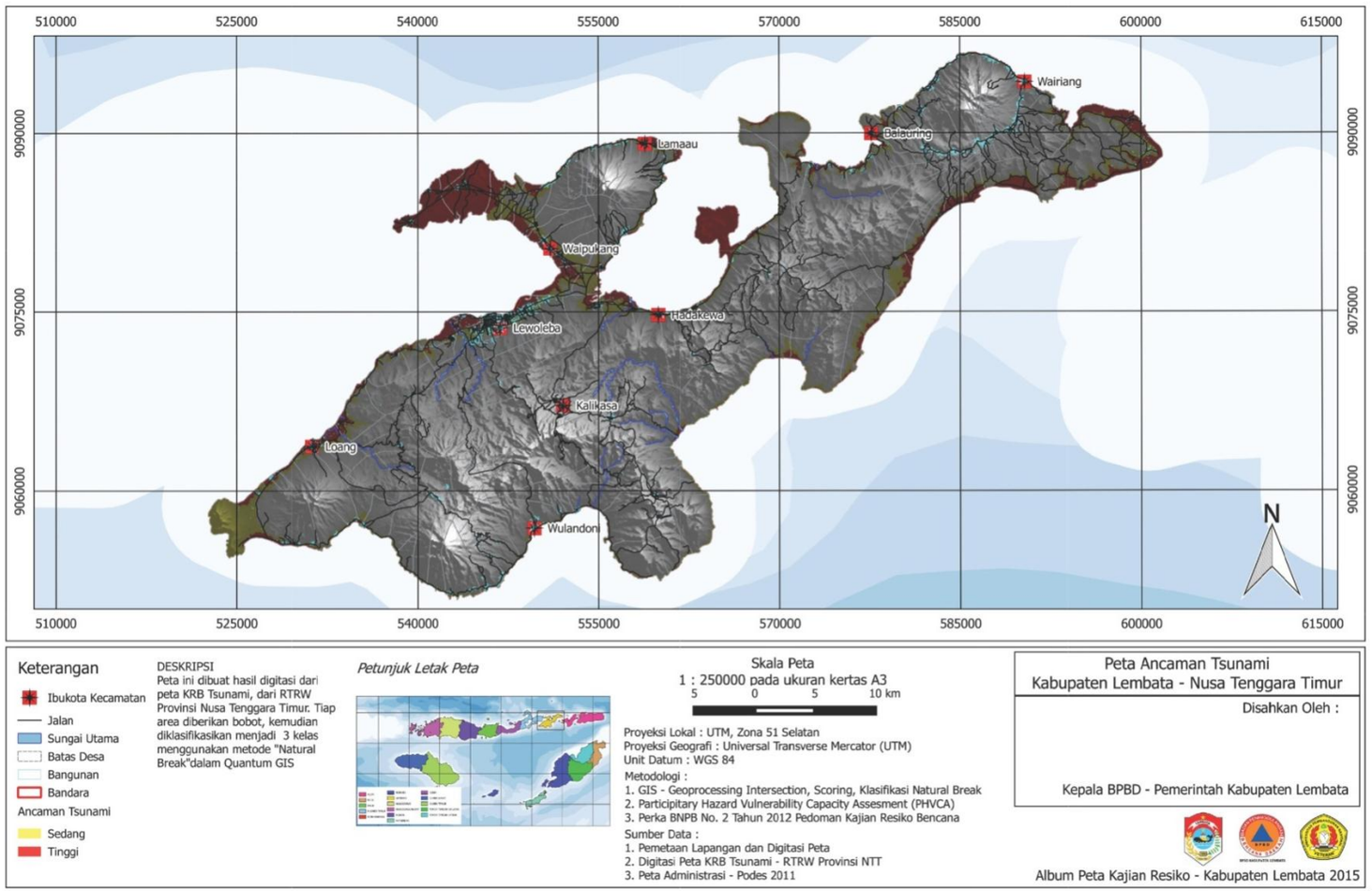
(5). Zona V yang meliputi Muruona, Laranwutun, Kolontobo, Riangbao, Petuntawa, Dulitukan, Tagawiti, Beutaran, Palilolon dan Kolipadan;

(6). Zona VI yang meliputi Merdeka, Hadakewa, Lerahinga, Waienga, Tapolangu dan Dikesare; dan

(7). Zona VII yang meliputi Wailolong, Lebewala, Balauring, Dolulolong, Roma, Leuwayan, Normal, Normal 1, Kalikur, Bareng, Leuwohung, Mampir, Boriwutun, Umaleu, Kalikur WL, Rumang, Tobotani, Bean dan Nilanapo.

Untuk Zona tidak rawan tsunami sebesar 50,33% yang tidak mencakup keseluruhan lokasi pada zona rawan tsunami diatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta berikut:

Gambar 2.17.
Peta AncamanTsunami di Kabupaten Lembata



Sumber : BPBD Kabupaten Lembata, 2015

2.1.3.3. Erupsi Gunung Berapi

Menurut Hartmann (1935) tumbuhnya gunung api di Lomblen (sekarang Lembata) umumnya adalah akibat gaya tektonik, sehingga besar kemungkinan dapat mempengaruhi kegiatan gunung api tersebut. Di Wilayah Kabupaten Lembata terdapat empat (4) gunung Api aktif yaitu; Ile Lewotolok, Ile Batutara, Ile Werung dan Ile Hobal serta satu (1) gunung api tipe B yaitu Ile Labalekang. Ancaman erupsi gunung api di Kabupaten Lembata dibagi menjadi :

(1). Gunung Ili Lewotolok yang terbagi menjadi :

- Kawasan Rawan bencana III dengan luas 3,97%

  Kawasan rawan bencana III adalah kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu (pijar) dan gas beracun.

  Lokasi yang termasuk dalam kawasan rawan bencana III yaitu Todanara, Jontona, Lamawolo, Lamatokan, Baolaliduli dan Lamau yang termasuk Kecamatan Ile Ape Timur.
- Kawasan Rawan Bencana II dengan luas 5,30%

  Merupakan kawasan yang berpotensi terlanda perluasan awan panas, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat.

  Lokasi yang termasuk dalam kawasan ini yaitu Aulesa, Lamagute, Napasabok, Bungamuda, Amakaka, Tanjung Batu, Lamawara dan Waowala.
- Kawasan Rawan Bencana I dengan luas 3,97

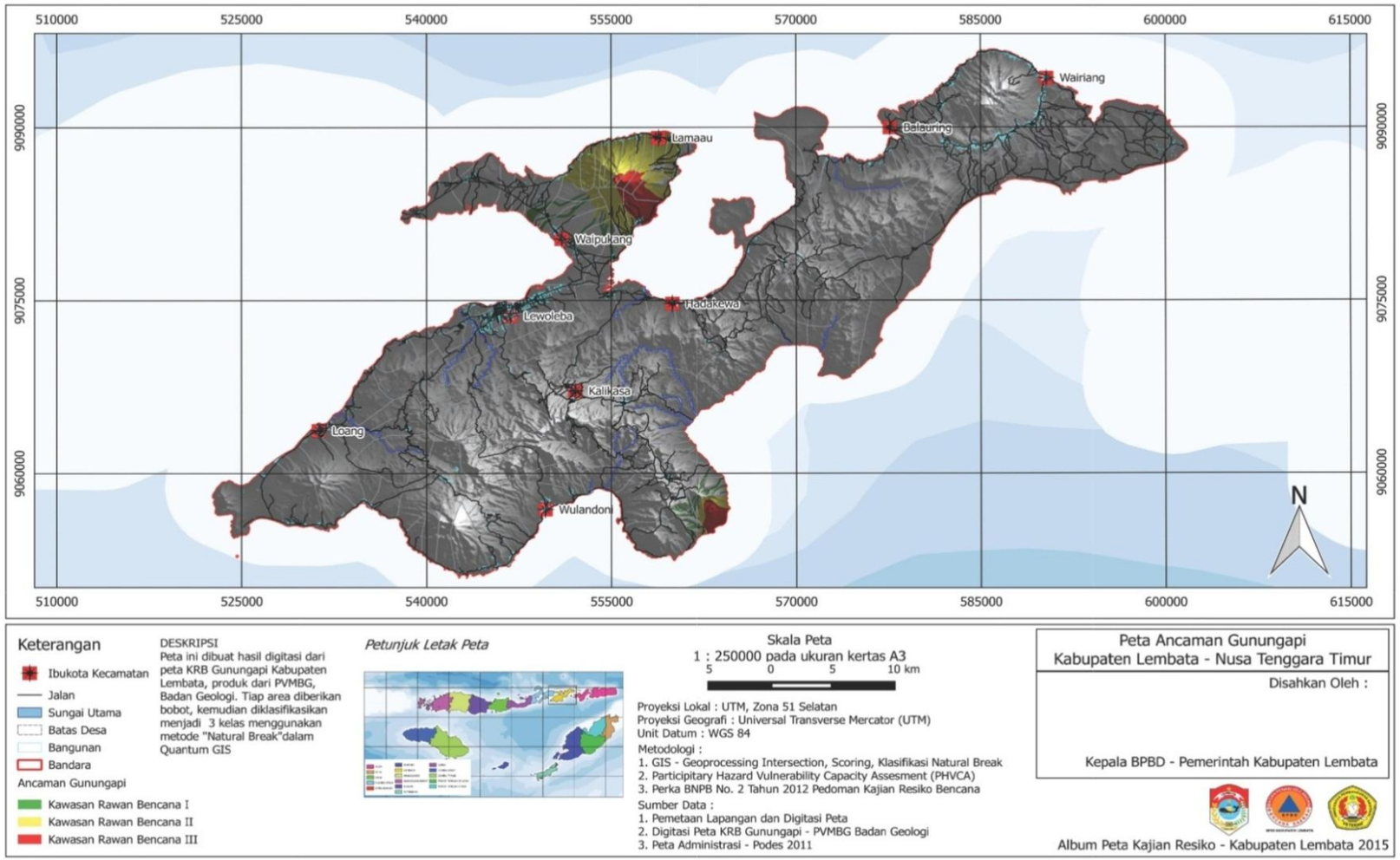
  Merupakan kawasan yang berpotensi terkena aliran lahar dan atau tertimpa material jatuhan berupa hujan abu berukuran kurang dari 2 cm.

  Lokasi yang termasuk dalam kawasan ini yakni Watodiri, Muruone, Laranwutun, Kolontobo, Riangbao dan Petuntawa.
- Kawasan diluar KRB I, II dan III dengan luas 86,76%

(2). Gunung Ili Werung yang terbagi menjadi :

- Kawasan Rawan bencana III
- Kawasan Rawan Bencana II dengan luas 2,65%
- Kawasan Rawan Bencana I dengan luas 3,315
- Kawasan diluar KRB I, II dan III dengan luas 94,04%

Gambar 2.18.
Peta Ancaman Gunung Api di Kabupaten Lembata



Sumber : BPBD Kabupaten Lembata Tahun 2015

2.1.3.4. Kekeringan

Secara geografis letak Kabupaten Lembata berada pada belahan bumi dengan iklim *monsoon* tropis yang sangat sensitif terhadap anomali iklim *El-Nino Southern Oscillation* (ENSO). Akibatnya terdapat 76,82% kawasan dengan tingkat kekeringan tinggi dan 23,18% kawasan dengan tingkat kekeringan rendah.

Faktor penyebab terjadinya kekeringan di Kabupaten Lembata adalah: 1) adanya penyimpangan iklim; 2) adanya gangguan keseimbangan hidrologis; dan 3) kekeringan agronomis

2.1.3.5. Kebakaran Lahan

Ancaman kebakaran lahan di Kabupaten Lembata mencakup seluruh wilayah/daerah padang yang rawan kebakaran. Kebakaran terjadi hampir setiap tahun di seluruh wilayah Kabupaten Lembata. Terdapat 42,6% beresiko tinggi, 43,8% beresiko sedang dan 13,6% beresiko rendah.

2.1.3.6. Banjir

Daerah rawan banjir di Kabupaten Lembata seluas 33,11% sedangkan daerah yang tidak rawan banjir seluas 66,89 yang tersebar hampir di setiap kecamatan. Resiko bencana banjir terjadi di enam kecamatan, meliputi kecamatan Nagawutung, Wulandoni, Atadei, Lebatukan, Nubatukan dan Omesuri.

2.1.3.7. Abrasi

Ancaman abrasi yang ada di Kabupaten Lembata tersebar di seluruh wilayah pesisir. Resiko bencana Abrasi pantai terjadi di lima (5) kecamatan, meliputi : Kecamatan Nagawutung, Wulandoni, Ile Ape Timur, Lebatukan dan Omesuri.

2.1.3.8. Longsor

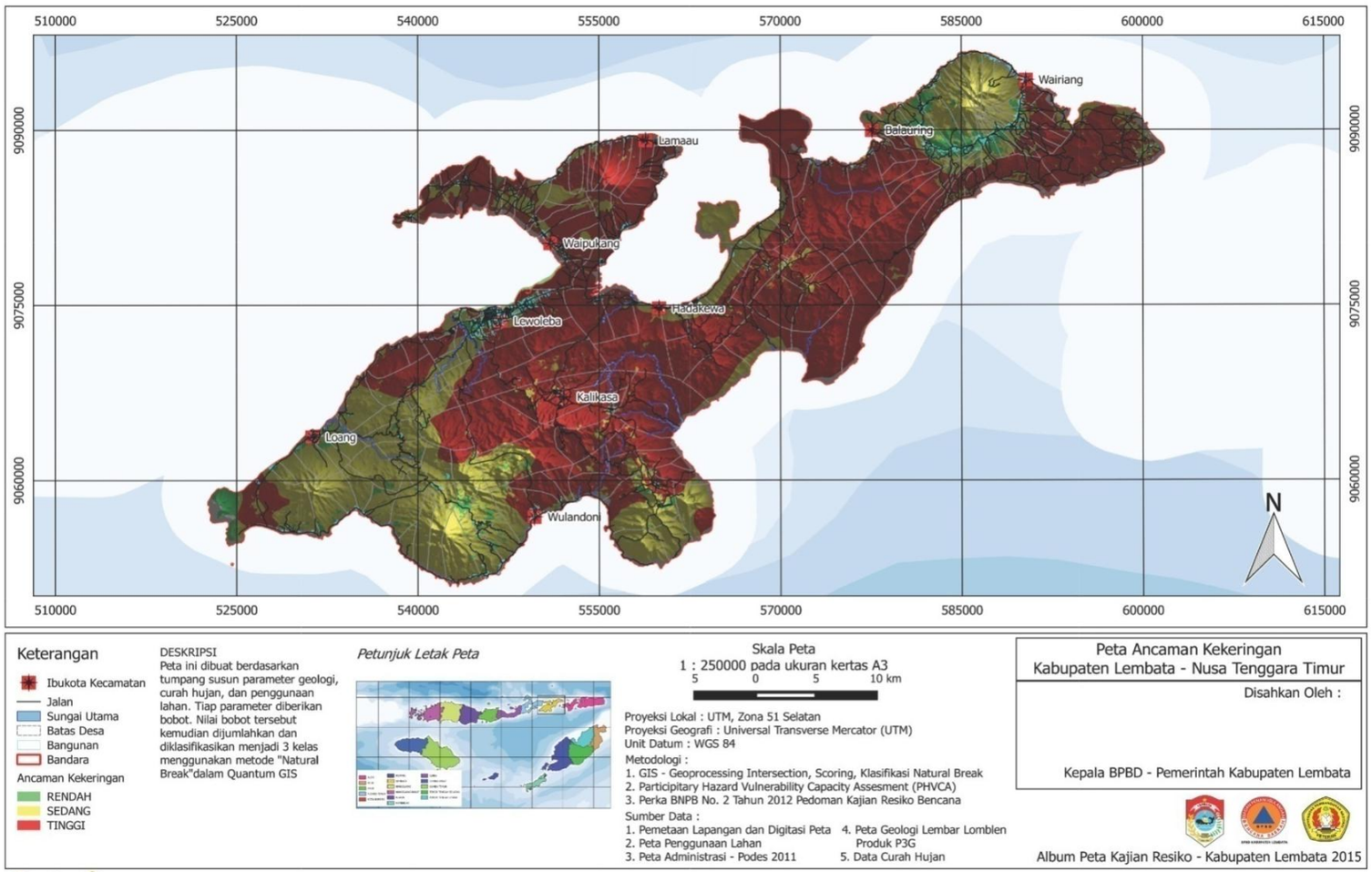
Potensi longsor di Kabupaten Lembata dominan dapat dikategorikan berada pada tingkat rendah. Berikut ini luas dan sebaran potensi longsor di Kabupaten Lembata, tersaji pada Tabel 2.11 dan gambar 2.23

Tabel.2.11
Potensi Longsor di Kabupaten Lembata

Tingkat Potensi Gerakan Tanah	Luas (ha)
Potensi Gerakan Tanah Rendah	110.034,40
Potensi Gerakan Tanah sedang	14.398,77
Potensi Gerakan Tanah Tinggi	2.229,83
Luas Total	126.663,01

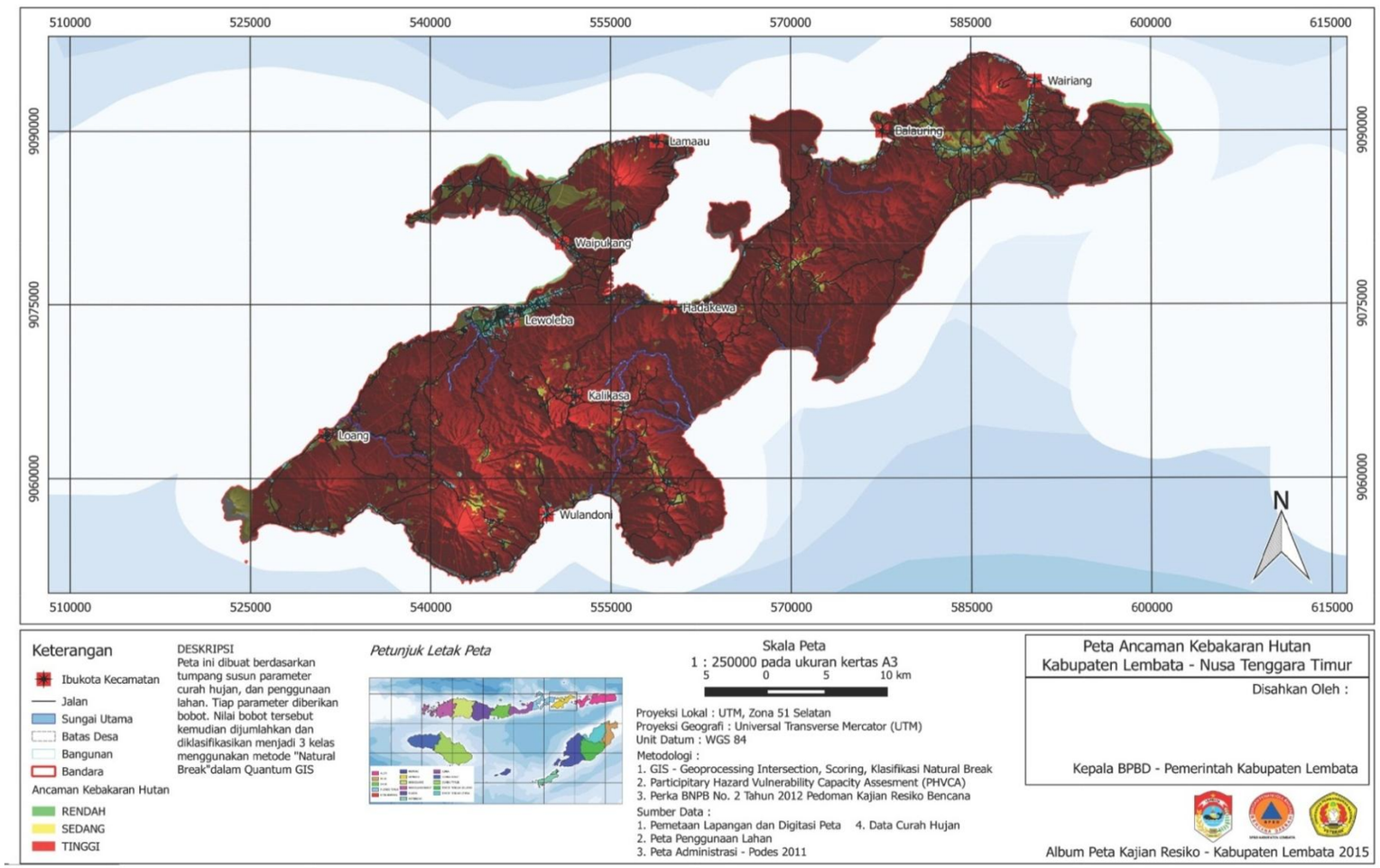
Sumber : BPBD Kabupaten Lembata, 2017

Gambar 2.19.
Peta Ancaman Kekeringan di Kabupaten Lembata



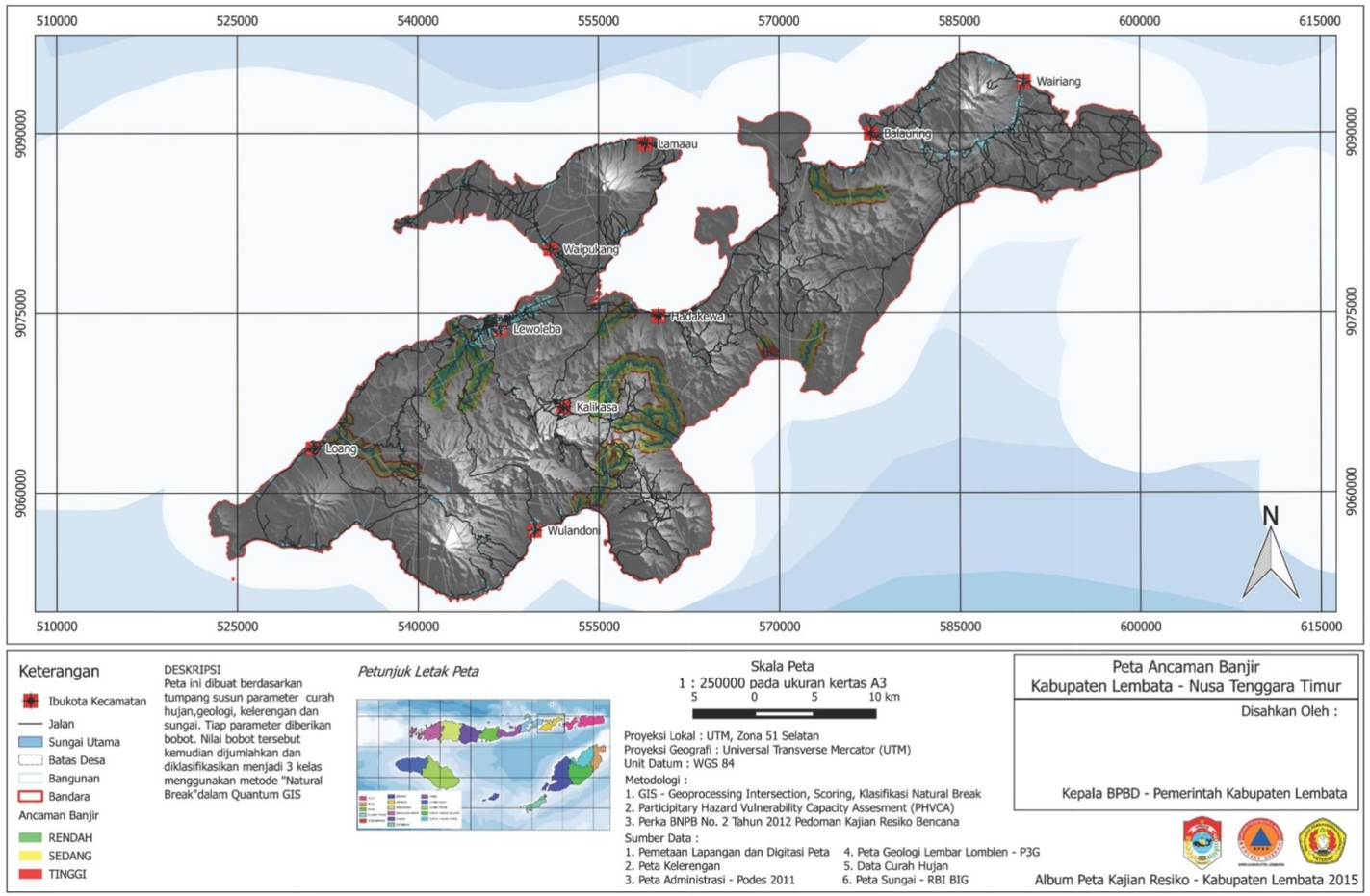
Sumber : BPBD Kabupaten Lembata Tahun 2015

Gambar 2.20.
Peta Ancaman Kebakaran Lahan di Kabupaten Lembata



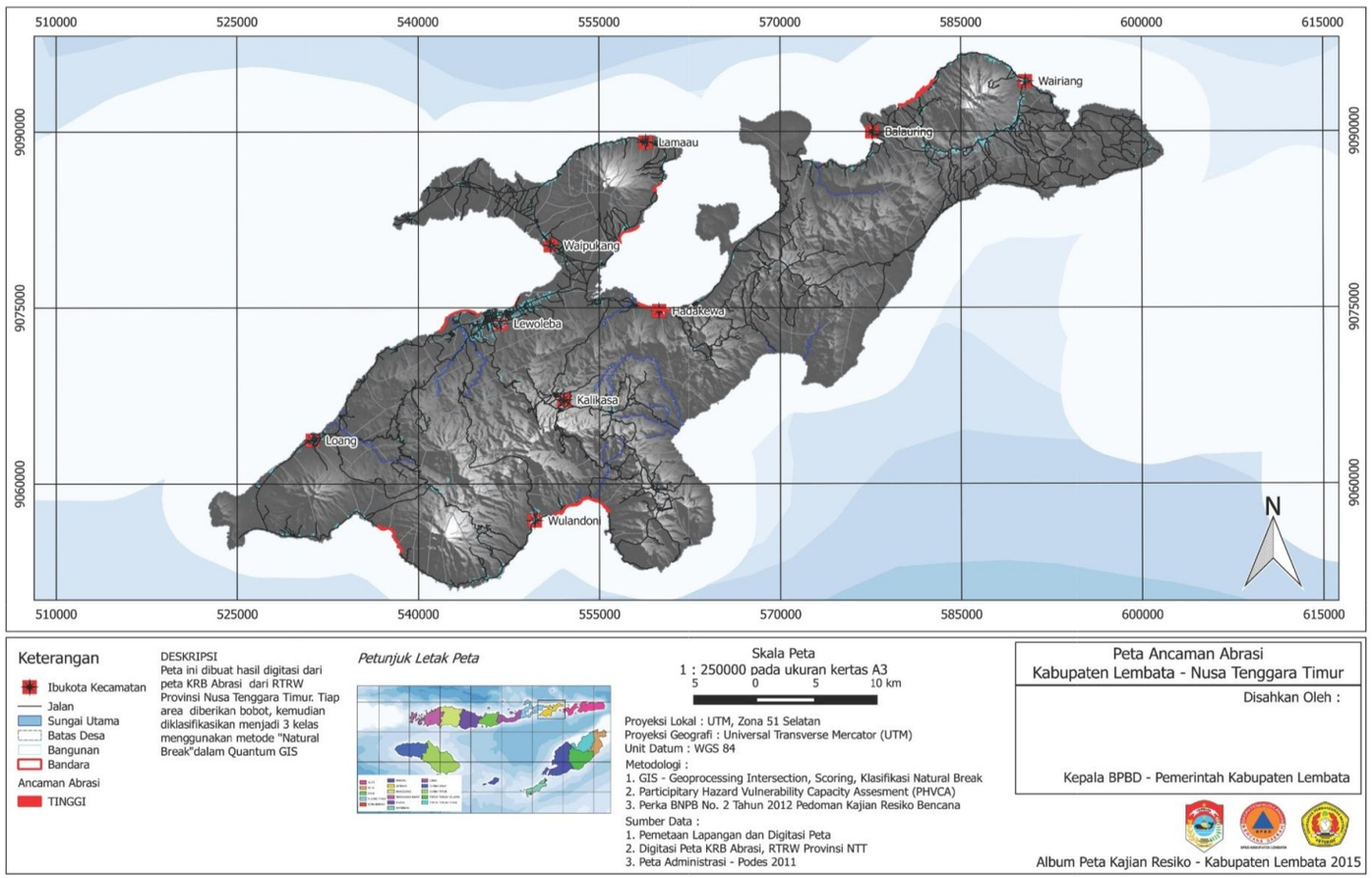
Sumber : BPBD Kabupaten Lembata Tahun 2015

Gambar 2.21.
Peta Ancaman Banjir di Kabupaten Lembata



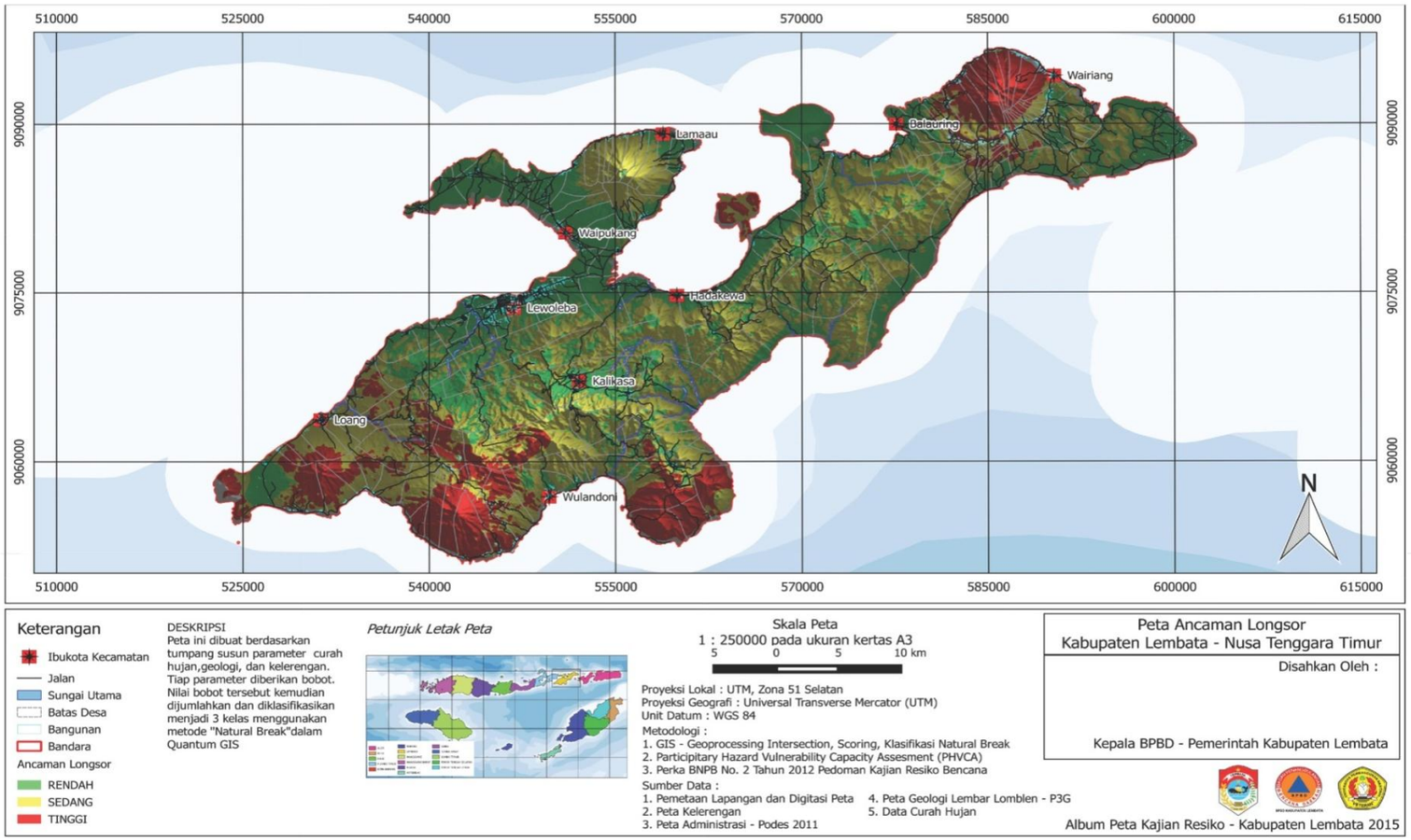
Sumber : BPBD Kabupaten Lembata Tahun 2015

Gambar 2.22.
Peta Ancaman Abrasi di Kabupaten Lembata



Sumber : BPBD Kabupaten Lembata Tahun 2015

Gambar 2.23.
Peta Ancaman Longsor di Kabupaten Lembata



Sumber : BPBD Kabupaten Lembata Tahun 2015

2.1.4. Demografi

2.1.4.1. Jumlah Penduduk dan Persebaran

Jumlah penduduk Kabupaten Lembata sampai dengan tahun 2016 mencapai 133.152 jiwa dengan jumlah terbanyak berada di kecamatan Nubatukan yang mencapai 39.097 jiwa. Penduduk paling sedikit di kecamatan Ile Ape Timur sebanyak 6.073 jiwa. Secara lebih jelas jumlah penduduk Kabupaten Lembata menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.12
Jumlah Penduduk Kabupaten Lembata 2010-2016

	Kecamatan *Subdistrict*	**Jumlah Penduduk (ribu)** ***Population (thousand)***				
		2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nagawutung	9.243	9.197	9.407	9.570	9.490
2	Wulandoni	8.778	8.666	8.999	8.365	8.744
3	Atadei	7.795	7.545	7.739	7.614	7.681
4	Ile Ape	13.666	12.879	13.030	13.421	12.521
5	Ile Ape Timur	6.537	5.538	5.913	5.460	6.073
6	Lebatukan	9.135	8.907	9.299	8.890	9.061
7	Nubatukan	40.621	39.777	40.648	39.474	39.097
8	Omesuri	18.092	18.407	19.072	18.331	18.756
9	Buyasuri	20.570	20.861	20.824	20.776	21.774
	Lembata	**134.437**	**131.777**	**134.931**	**132.081**	**133.152**

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Lembata Tahun 2017

2.1.4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaan menghitung laju pertumbuhan penduduk adalah untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Lembata dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.2.13
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lembata 2010-2016

No	**Kecamatan**	**Jumlah Penduduk (ribu)**			**Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)**	
		2010	2015	2016	2010 - 2015	2015 - 2016
1	Nagawutung	8.900	9.570	9.490	6.63	-0,83
2	Wulandoni	8.656	8.365	8.744	1.02	4,53
3	Atadei	7.886	7.614	7.681	2.6	0,88
4	Ile Ape	12.344	13.421	12.521	1.43	-6,70
5	Ile Ape Timur	5.731	5.460	6.073	5.97	7,68
6	Lebatukan	8.549	8.890	9.061	5.46	7,78
7	Nubatukan	34.822	39.474	39.097	12.28	-0,95
8	Omesuri	16.973	18.331	18.756	10.50	2,31
9	Buyasuri	21.850	20.776	21.774	-0.35	4,80
	Lembata	**125.711**	**132.081**	**133.152**	5.92	0.81

Sumber : Dukcapil Kab. Lembata 2017, Data Terolah Bappelitbangda

Dari tabel di atas diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lembata dalam kurun waktu 2010-2015 sebesar 5,92% dengan Kecamatan Nubatukan sebagai penyumbang laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yaitu 12,28% dan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk

paling sedikit adalah Kecamatan Buyasuri, yaitu -0,35%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lembata kurun waktu 2015-2016 adalah 0,81% dengan penyumbang laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah kecamata Lebatukan (7,78%) dan kecamatan Ile Ape Timur (7,68%). Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terkecil adalah kecamatan Nagawutung dengan jumlah -0,81%.

2.1.4.3. Struktur Penduduk

A. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata diketahui struktur penduduk Kabupaten Lembata didominasi oleh penduduk usia sekolahyakni 10 - 14 tahun sebesar 11,96% dan tingkatan umur 5 – 9 tahun sebesar 10,81%. Regenerasi penduduk usia kerja juga diperkirakan akan berhasil sebab struktur penduduk dari tahun 2010 hingga 2015 menunjukan penduduk usia sekolah 5-24 tahun juga cukup besar dengan prosentasi mencapai 41,50 %. Struktur penduduk menurut umur secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.14
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Umur
di Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016

Tingkatan Umur (Tahun)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
0 - 4	9.689	10.555	6.983	9.920	8.677	6.737
5 - 9	15.065	16.200	15.286	15.606	14.560	14.389
10 - 14	14.841	15.409	15.510	15.433	15.598	15.917
15 - 19	11.460	12.083	12.735	12.563	13.804	14.000
20 - 24	8.598	9.241	9.469	9.522	10.694	10.939
25 - 29	9.615	10.055	9.344	9.531	9.043	8.508
30 - 34	8.999	10.015	9.776	9.948	10.172	9.222
35 - 39	8.730	9.029	9.217	9.287	9.223	9.163
40 - 44	7.915	8.420	8.195	8.226	8.630	8.230
45 - 49	6.711	6.936	7.463	7.490	7.685	7.636
50 - 54	3.126	300	6.465	6.453	6.513	6.268
55 - 59	300	3.502	5.582	5.583	5.963	6.017
60 - 64	5.228	5.450	4.825	4.794	5.038	4.941
65 - 69	4.276	4.425	4.081	4.050	3.998	3.900
70 - 74	3.737	3.669	3.044	2.997	3.364	3.025
75+	6.094	6.546	3.802	3.528	4.328	4.213

Sumber : Dukcapil Kab. Lembata

Tabel.2.15
Prosentasi Jumlah Penduduk Balita, Usia Sekolah,
Usia Kerja dan Lansia di Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016

Tingkatan Umur (Tahun)	Persentase Jumlah Balita, Usia Sekolah, Usia Kerja dan Lansia (%)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0 - 4	7,62	7,99	5,23	7,35	6,32	5,05
5 - 24	39,91	39,25	40,21	39,34	39,81	41,50
25 - 59	37,84	37,86	42,52	41,88	41,68	41,34
60+	15,21	14,88	11,95	11,39	12,18	12,11

Sumber : Dukcapil Kab. Lembata Tahun 2017

B. Penduduk Menurut Pendidikan

Data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016 diketahui bahwa jumlah pendidikan yang tidak tamat SD/belum pernah sekolah pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun 2015, yakni sebesar 15,85%; persentase penduduk yang tamat SD mengalami peningkatan sebesar 7% pada tahun 2016 dari tahun 2015 sebesar 35,32%; persentase penduduk yang tamat SMP pada tahun 2016 15,03% atau mengalami peningkatan sebesar 3,59% dan persentase penduduk yang menamatkan SMA mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 5,25%. Untuk mengetahui jumlah penduduk menurut pendidikan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel.2.16
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Lembata
Tahun 2011-2016

Tingkatan Pendidikan	Persentase Penduduk menurut Pendidikan					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Tidak tamat SD/Belum Pernah Sekolah	46.265	49.069	48.826	50.135	49.233	22.428
Tamat SD	47.206	47.819	46.673	46.664	45.987	43.225
Tamat SMP	12.632	13.049	12.930	13.527	14.885	15.347
Tamat SMA	15.361	19.842	17.088	13.527	20.110	21.142
DI/II	1.130	1.124	1.092	1.091	1.055	2.399
D III	1.551	1.548	1.672	1.734	1.803	5.136
D IV/S1	2.959	2.971	3.382	3.632	4.085	5.449
S2	111	107	114	119	130	122
S3	5	-	-	2	2	-

Sumber : Dukcapil Kab. Lembata Tahun 2017

C. Penduduk Menurut Agama

Penduduk di Kabupaten Lembata mayoritas beragama Katolik dengan jumlah jiwa pada tahun 2016 sebesar 93.280 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk menurut agama yang paling sedikit yakni penduduk beragama Budha dengan jumlah 4 jiwa. Jika dilihat secara menyeluruh jumlah penduduk menurut agama mengalami penurunan untuk setiap agama. Secara lebih detail penduduk menurut agama dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2.17
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Lembata
Tahun 2011 – 2016

Agama	Jumlah Penduduk Menurut Agama (Jiwa)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Katolik	89.232	90.237	91.891	94.068	95.853	93.280
Islam	35.693	38.102	37.637	38.585	39.221	37.848
Kristen Protestan	1.969	2.190	2.161	2.185	2.129	1.953
Hindu	71	81	80	86	79	62
Budha	4	9	8	7	8	4

Sumber : Dukcapil Kab. Lembata, Tahun 2017

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Tabel.2.18
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen)
di Kabupaten Lembata Tahun 2012 -2016

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35.36	35.38	35.36	35.31	34.27
B.Pertambangan dan Penggalian	0.44	0.47	0.46	0.47	0.48
C.Industri Pengolahan	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
D.Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.04	0.05	0.06	0.08
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
F.Konstruksi	6.44	6.43	6.56	6.64	7.08
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.54	6.62	6.63	6.87	7.13
H.Transportasi dan Pergudangan	2.69	2.71	2.73	2.75	2.72
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.20	0.22	0.23	0.24	0.24
J.Informasi dan Komunikasi	7.76	7.28	7.17	6.85	6.70
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	0.38	0.40	0.41	0.41	0.40
L.Real Estate	1.55	1.62	1.65	1.68	1.69
M,N.Jasa Perusahaan	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	29.03	28.87	28.39	28.19	28.36
P.Jasa Pendidikan	6.50	6.99	7.46	7.65	7.92
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.54	1.50	1.48	1.47	1.51
R,S,T,U.Jasa lainnya	1.18	1.15	1.11	1.09	1.09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kab Lembata 2017

Tabel.2.19
Laju PertumbuhanPDRB ADHK (Persen) di Kabupaten Lembata Tahun 2012 -2016

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (Persen)				
	2012	2013	2014	2015	2016
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.54	2.76	2.82	3.55	1.37
B.Pertambangan dan Penggalian	5.06	5.27	4.86	6.03	9.97
C.Industri Pengolahan	4.68	4.48	3.30	5.12	4.84
D.Pengadaan Listrik dan Gas	8.43	6.39	19.97	14.16	14.67
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.72	7.57	5.93	3.66	2.56
F.Konstruksi	6.31	5.91	5.99	5.24	9.56
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4	6.12	5.26	7.22	7.32
H.Transportasi dan Pergudangan	4.61	4.17	8.14	7.18	3.32
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.80	9.37	9.22	7.27	5.40
J.Informasi dan Komunikasi	3.50	4.95	7.28	6.11	7.06
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	7.32	8.01	7.10	3.09	7.03
L.Real Estate	4.53	6.83	5.92	5.47	3.95
M,N.Jasa Perusahaan	0.35	3.32	2.80	5.12	3.70
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.37	6.65	5.81	5.70	6.08
P.Jasa Pendidikan	4.67	8.81	9.48	4.71	5.84
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.20	2.29	3.36	3.99	6.29
R,S,T,U.Jasa lainnya	1.70	1.15	2.14	3.84	3.73
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.77	4.96	5.09	4.98	4.71

Sumber: BPS Kab Lembata 2017

Tabel.2.20
PDRB AHB dan AHK (Miliar rupiah) Kabupaten Lembata
Tahun 2012-2016

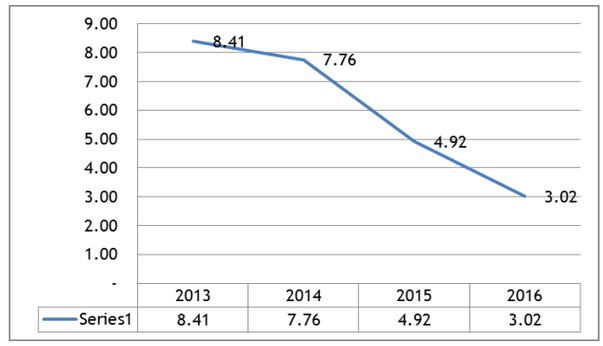
No	Tahun	PDRB	
		HB	HK
1	2012	972,79	829,78
2	2013	1.080,37	870,92
3	2014	1.205,42	915,27
4	2015	1.335,36	960,84
5	2016	1.470,98	1.006,12

Sumber: BPS Kab. Lembata Tahun 2017

Dari tabel diatas diketahui bahwa pertumbuhan PDRB atas harga Berlaku dan harga konstan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan sebesar 10,34% dari tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar 4,68%.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Grafik 2. 1.
Laju Inflasi Provinsi NTT Tahun 2012-2016



Sumber: BPS Kab. Lembata 2017, Data Terolah Bappelitbangda

Dari tabel diatas diketahui bahwa inflasi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur pada akhir desember 2016 sebesar 3,02 persen atau lebih rendah dibandingkan angka inflasi nasional yang sebesar 3,58 persen. Secara kumulatif pada tahun 2016 angka inflasi NTT tercatat hanya 0,55 persen atau jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 2,59 persen. Pencapaian inflasi tersebut tidak terlepas dari terkendalinya laju kenaikan harga di Provinsi NTT.

2.2.1.3. PDRB Perkapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2016, secara agregat PDRB per kapita Kabupaten Lembata mencapai 10,93 juta rupiah, meningkat 8,21 persen bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 10,10 juta rupiah. Pertumbuhan tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2015 yang mencapai 8,4 persen. PDRB per kapita merupakan *proxy* ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Ini dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel.2.21
PDRB Per Kapita Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016

No	Tahun	PDRB PerKapita (Juta Rupiah)
1	*2*	*3*
1	2011	7,09
2	2012	7,85
3	2013	8,53
4	2014	9,31
5	2015	10,10
5	2016*)	10,93

*) : Angka Sementara
Sumber : BPS Kabupaten Lembata Tahun 2016

2.2.1.4. Indeks Gini

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kabupaten Lembata digunakan pendekatan teori Gini Ratio.Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 – 1 (>0 dan <1).

Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 0,00 < G < 0,35 → pemerataan tinggi / ketimpangan rendah
- 0,35 < G < 0,50 → pemerataan / ketimpangan sedang
- G > 0,50 → pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

Tabel.2.22
Indeks Gini Kabupaten Lembata

Tahun	2014	2015	2016
Indeks Gini	0,27	0,36	0,30

Sumber : BPS Kabupaten Lembata Tahun 2016

Dari data BPS tahun 2017 seperti terlihat pada tabel di atas, indeks Gini Ratio Kabupaten Lembata tahun 2016 mencapai angka (0,30). Hal ini berarti ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Lembata masih dalam level **Rendah**, namun tetap harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lembata karena angka ketimpangan dalam tiga tahun terakhir masih belum stabil.

2.2.1.5. Penduduk Miskin

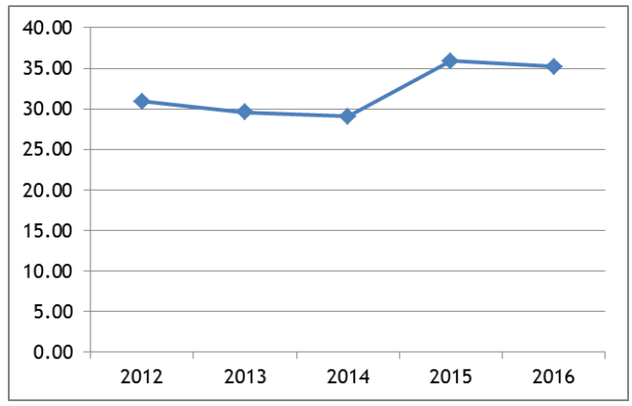
Jumlah penduduk miskin Kabupaten Lembata secara fluktuatif terus mengalami penurunan sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 namun pada tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 35.930,- jiwa dan pada kondisi terakhir tahun 2016 mengalami penurunan kembali sebesar 35.180,- jiwa. Sementara angka garis kemiskinan di tahun 2016 adalah Rp.309.992,- per kapita per bulan, sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel.2.23
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lembata (Ribu Jiwa)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
	1	***2***	***3***	***4***	***5***
Jumlah Penduduk Miskin	30,90	29,60	29,07	35,93	35,18
Garis Kemiskinan/ Rp/Kap/Bulan	247.351	267.510	282.510	288.970	309,992

Sumber : BPS Kabupaten Lembata Tahun 2017

Grafik 2. 2.
Jumlah Penduduk Miskin Kab. Lembata (Ribu Jiwa)



Sumber : BPS Kabupaten Lembata-2017

2.2.1.6. Angka Kriminalitas yang Tertangani

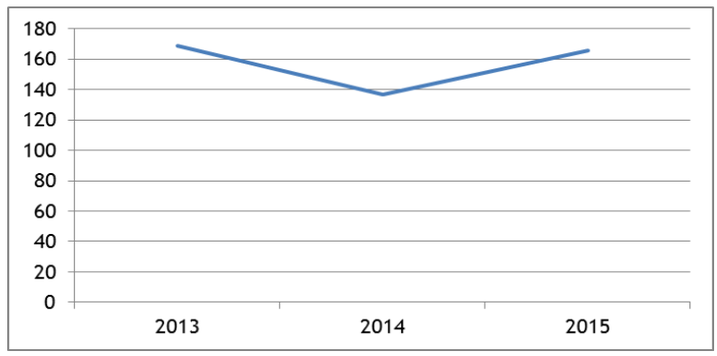
Jumlah kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Lembata sebanyak 166 kasus, dengan penyelesaian kasus mencapai 71,08%. Ini dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel.2.24
Jumlah Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Lembata
Tahun 2013-2015

Tahun	Angka Kriminalitas
2013	169
2014	137
2015	166

Sumber : Lembata Dalam Angka 2016

Grafik 2. 3.
Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Lembata Tahun 2013-2015



Sumber: Lembata Dalam Angka Tahun 2016

Dari grafik diatas diketahui tingkat kriminalitas di Kabupaten Lembata masih mengalami peningkatan.Meskipun pada tahun 2014 telah mengalami penurunan.

Tabel.2.25
Presentase Penyelesaian Tindak Kriminalitas Tahun 2013-2015

Tahun	Penyelesaian Kasus (%)
2013	95,27
2014	72,26
2015	71,08

Sumber : Lembata Dalam Angka Tahun 2016

Dari tabel diatas diketahui penyelesaian tindak kriminalitas di Kabupaten Lembata mengalami penurunan dari tahun ke tahun.Pada tahun 2015 mengalami penurunan 0,01% dari tahun 2014.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Indikator yang dapat digambarkan antara lain Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan dan kesempatan kerja.

2.2.2.1. Pendidikan

Indikator kinerja urusan Pendidikan pada Fokus Kesejahteraan Sosial antara lain dilihat dari Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk, dan Angka Partisipasi Murni.

Indikator partisipasi sekolah terdiri dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menjadi salah satu faktor yang dapat menjadi tolok ukur dalam tingkat partisipasi bidang pendidikan dalam kesejahteraan sosial masyarakat.Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Sedangkan APK melihat partisipasi penduduk di suatu jenjang pendidikan tanpa memperhatikan usianya.

1) Angka Melek Huruf

Tabel.2.26
Angka Melek Huruf di Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Melek Huruf	90,00	99,34	99,34	99,34	100,00

Sumber : Dinas PKO Kabupaten Lembata 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian angka melek huruf penduduk Kabupaten Lembata pada tahun 2016 menunjukkan prosentase terbaik, yaitu 100,00. Sementara angka melek huruf tertinggi di tahun 2013-2015, yaitu 99,34. Artinya, pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Lembata usia 15 tahun ke atas yang semuanya telah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Atau dengan kata lain, pada tahun 2016 Kabupaten Lembata bebas melek huruf.

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Tabel.2.27
Angka Rata - rata Sekolah di Kab. Lembata Tahun 2011 - 2016

No	Tahun	Jumlah
1	2011	8,93
2	2012	8,93
3	2013	8,93
4	2014	8,93
5	2015	8,93
6	2016	8,93

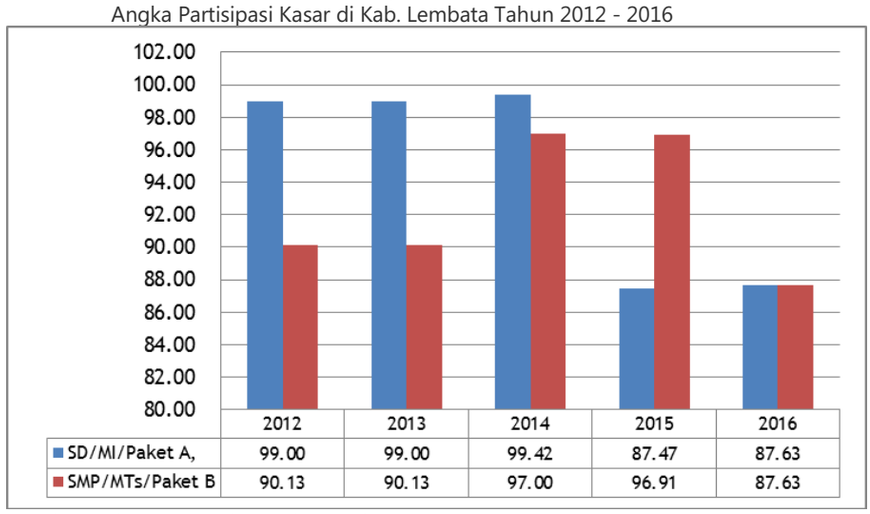
Sumber : Dinas PKO Kab. Lembata 2017

Dari tabel diatas diketahui Angka rata-rata sekolah di Kabupaten Lembata dari tahun 2011-2016 tetap stabil yakni 8,93. Angka ini merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.

3) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partispasi Kasar SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket tidak relative stabil dari tahun 2012 – 2016. Pada tahun 2016 APK SD/MI/Paket A, mengalami kenaikan sebesar 0,6 sedangkan APK untuk SMP/MTs/Paket B mengalami penurunan 0,23. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram 2.1.
Angka Partisipasi Kasar di Kab. Lembata Tahun 2012 - 2016

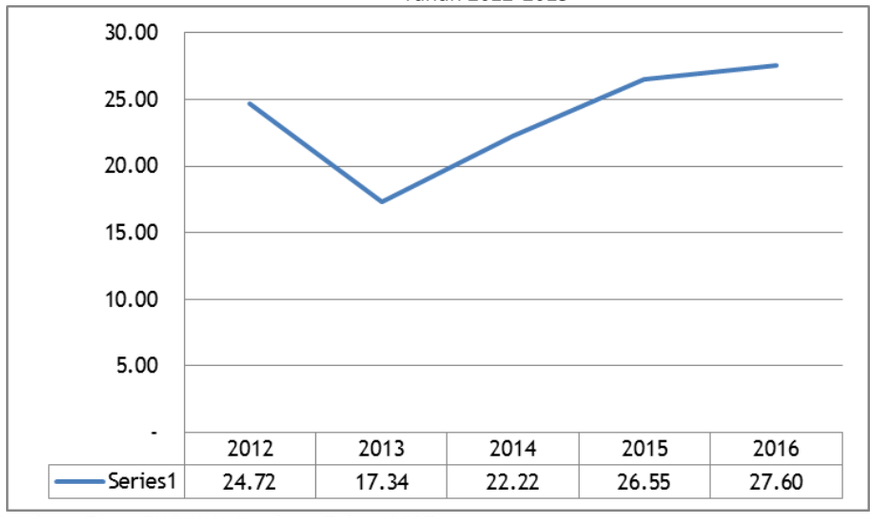


	2012	2013	2014	2015	2016
SD/MI/Paket A,	99.00	99.00	99.42	87.47	87.63
SMP/MTs/Paket B	90.13	90.13	97.00	96.91	87.63

Sumber : Dinas PKO Kab. Lembata Tahun 2017

4) Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Grafik 2. 4.
Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Lembata
Tahun 2012-2015



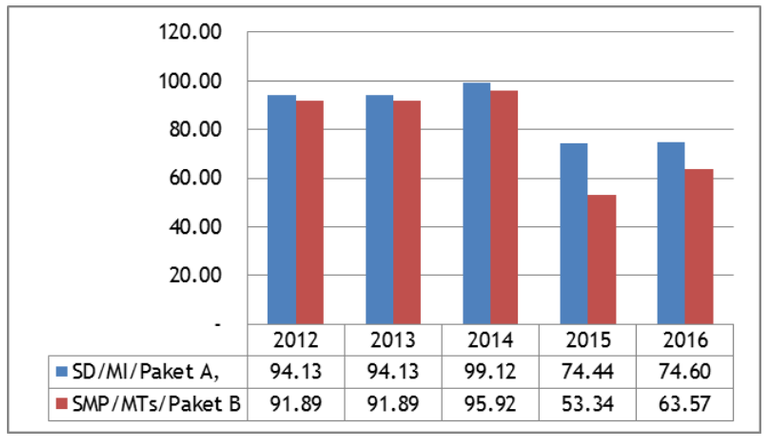
	2012	2013	2014	2015	2016
Series1	24.72	17.34	22.22	26.55	27.60

Sumber : Dinas PKO Kab. Lembata Tahun 2017

Angka pendidikan yang ditamatkan di kabupaten Lembata mengalami penurun drastis pada tahun 2013 yakni sebanyak 17,34. Namun pada tahun 2013-2016 terus mengalami peningkatan.

5) Angka Partisipasi Murni (SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B)

Diagram 2.2.
Angka Partisipasi Murni di Kab. Lembata Tahun 2012-2016



	2012	2013	2014	2015	2016
SD/MI/Paket A,	94.13	94.13	99.12	74.44	74.60
SMP/MTs/Paket B	91.89	91.89	95.92	53.34	63.57

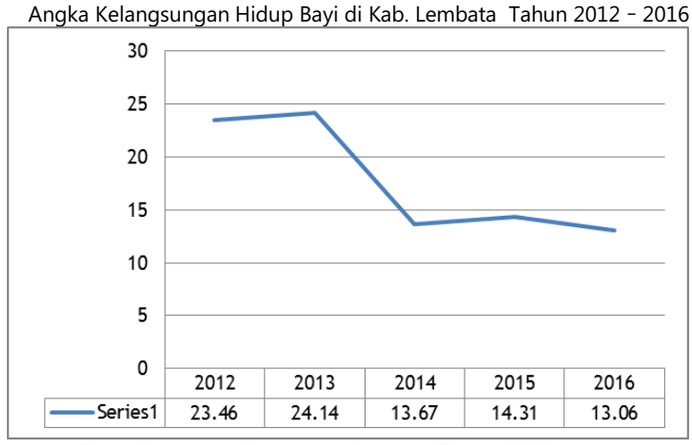
Sumber : Dinas PKO Kab. Lembata Tahun 2017

Angka Partispasi Murni SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket tidak stabil dari tahun 2012 – 2016. APM terendah SD/MI/Paket A, pada tahun 2015 yakni 74,44%. sedangkan APM terendah untuk SMP/MTs/Paket B yakni pada tahun 2015 sebesar 53,34%.

2.2.2.2. Kesehatan

1) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Grafik 2. 5.
Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kab. Lembata Tahun 2012 – 2016



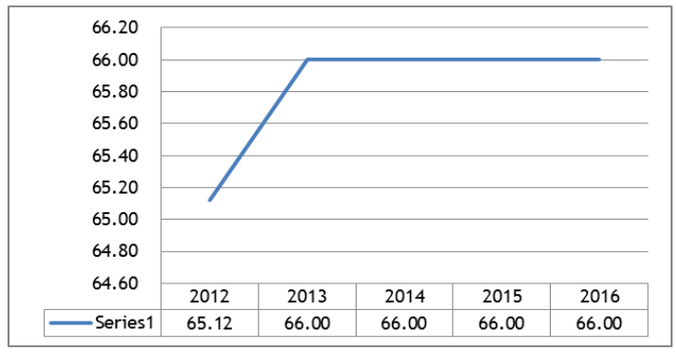
	2012	2013	2014	2015	2016
Series1	23.46	24.14	13.67	14.31	13.06

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun 2017

Dari grafik tersebut diketahui bahwa angka kelangsungan hidup bayi di kabupaten Lembata dari tahun 2012 – 2016 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 angka kelangsungan bayi sebesar 13,06.

2) Angka Harapan Hidup

Grafik 2. 6.
Angka Harapan Hidup di Kab. Lembata Tahun 2012 – 2016



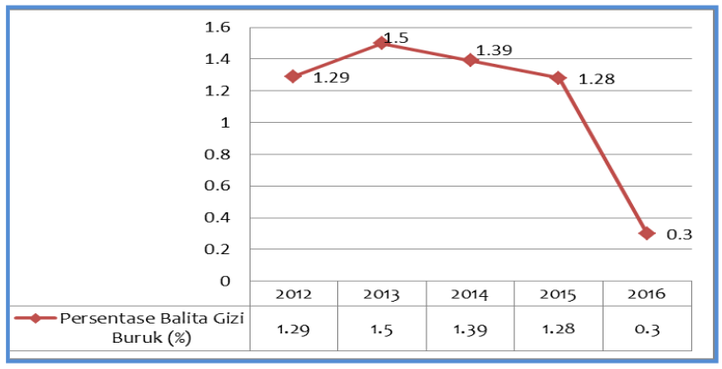
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata 2017

Angka usia harapan hidup di kabupaten Lembata dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 dan relative stabil pada tahun 2014 – 2016 sebesar 66,00.

3) Persentase Balita Gizi Buruk

Prosentase balita dengan status gizi buruk di kabupaten Lembata tahun 2012-2016 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2. 7.
Persentase Balita Gizi Buruk di Kab. Lembata Tahun 2012 – 2016



Sumber : Dinas Kesehatan, Data Terolah Bappelitbangda Tahun 2017

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa persentase balita gizi buruk di Kabupaten Lembata mengalami penurunan drastis pada tahun 2016 yakni sebesar 0,30 %.

2.2.2.3. Ketenagakerjaan

Indikator dari ketanagakerjaan adalah rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Lembata yang bekerja tahun 2012 – 2016.

Tabel.2.28
Persentase Penduduk yang Bekerja di Kab. Lembata Tahun 2012 - 2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Penduduk yang bekerja	0,68	0,64	0,61	0,7	-

Sumber: BPS Kab. Lembata 2016

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 rasio penduduk yang bekerja semakin besar, yaitu 0.7 jika dibandingkan tahun- tahun sebelumnya. Artinya, pada tahun 2015 jumlah penduduk yang tidak bekerja semakin banyak dibandingkan jumlah penduduk yang sedang bekerja.Pencapaian angka rasio penduduk yang bekerja paling sedikit di tahun 2014, yaitu 0.6.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Kebudayaan

Kabupaten Lembata memiliki ragam seni budaya yang merupakan satu kesatuan dari kehidupan masyarakat adat pada masing – masing kecamatan dan desa. Berbagai bentuk kesenian tradisional yang dikenal seperti tari – tarian dan syair – syair adat yang dilagukan dalam tradisi daerah serta ritual adat seperti pesta kacang merupakan budaya yang perlu terus dikembangkan. Budaya daerah yangsangat terkenal dan menjadi icon pariwisata adat adalah Penangkapan Ikan Paus secara tradisional di Desa Lamalera Kecamatan Wulandoni yang mempunyai daya tarik tersendiri.

Tabel.2.29
Capaian Indikator Kinerja Kebudayaan
di Kab. Lembata Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Grup Kesenian	1	16	12	12	13
Jumlah Gedung Kesenian	-	-	-	-	-

Sumber : LAKIP Kabupaten Lembata Tahun 2016

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah group kesenian berupa sanggar meningkat pada tahun 2016 sedangkan sampai tahun 2016 belum ada gedung kesenian untuk mendukung kegiatan kesenian tersebut.

2.2.3.2. Pemuda dan Olahraga

Pembangunan di bidang keolahragaan mengalami perkembangan yang positif. Cabang-cabang olahraga yang berkembang di Kabupaten Lembata meliputi Sepak Bola, Bola Volly, Bulu Tangkis, Tenis Meja, Sepak Takraw, Atletik, Silat, Tinju, Kempo, Karate, Taekwondo dan Senam di bawah naungan dan pembinaan KONI Kabupaten Lembata dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel.2.30
Capaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Lembata Tahun 2015

No	Indikator Kinerja Makro	2015	2016
1	*2*	3	*4*
	1) Jumlah klub olahraga	20	50
	2) Jumlah gedung olahraga	-	-

Sumber : Dinas PKO Kab. Lembata Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah klub olahraga pada tahun 2015 sebesar 20 dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 yakni sebesar 50. Keberadaan klub olahraga tidak didukung oleh fasilitas gedung olahraga yang sampai tahun 2016 Kabupaten Lembata belum memiliki fasilitas tersebut.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang - undangan. Pelayanan umum meliputi pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana prasarana umum dan pelayanan penunjang antara lain penanaman modal, KUKM, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, komunikasi dan transportasi, pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan dan kearsipan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta pemuda dan olahraga.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun bidang pembangunan lainnya. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan di bidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

a. Pendidikan Dasar

Fokus layanan pendidikan dasar meliputi angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah, rasio guru dan murid.

- Angka Partisipasi Sekolah

Ukuran yang tepat untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah di suatu wilayah adalah Angka Partisipasi Sekolah. Angka Partisipasi Sekolah ada dua macam yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Sedangkan APK melihat partisipasi penduduk di suatu jenjang pendidikan tanpa memperhatikan usianya.

Berdasarkan data pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupten lembata, Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Lembata pada jenjang pendidikan dasar pada tahun 2016 mengalami penurunan, yaitu 611,49 bila dibandingkan dengan tahun 2015, yakni 692,63. Angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar tertinggi adalah pada tahun 2014, yaitu 982,83. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.2.31
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi				
	2012	2013	2014	2015	2016
SD/Sederajat	992,18	857,8	982,83	692,63	611,49

Sumber: Dinas PKO Kab. Lembata 2017

- Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Untuk melihat ketersediaan untuk memenuhi pelayanan pendidikan, maka dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel.2.32
Rasio Ketersediaan Sekolah Per Per Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Ketersediaan Sekolah	6,14	17,73	32,45	81,26	90,83

Sumber :Dinas PKO Kabupaten Lembata Tahun 2017

Rasio Ketersediaan sekolah usia pendidikan dasar hampir menyeluruh ada di semua desa/kelurahan di Kabupaten Lembata, sehingga dari segi akses dan transportasi semua penduduk usia 7-12 tahun dapat menempuh pendidikan di SD/MI. Pada tahun 2016 angka rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar adalah 90,83 dan merupan yang tertinggi jika dibandingkan tahun- tahun sebelumnya.

- Rasio Guru / Murid

Rasio guru per (terhadap) murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio guru dan murid jenjang pendidikan dasar di SD/MI sebagaimana dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel.2.33
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Guru Murid	456,47	709,01	597,02	805,77	867,8

Sumber :Dinas PKO Kab. Lembata Tahun 2017

Dari tabel diatas diketahui bahwa rasio guru/murid pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Lembata terendah di Tahun 2012, yaitu 456,47. Sedangkan rasio guru/murid tertinggi pada tahun 2016, yaitu 867,8.

- Rasio Guru / Murid Per Kelas Rata-Rata

Rasio Guru trhadap Muris per Kelas Rata-Rata dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.34
Rasio Guru terhadap Murid Per Kelas Rata- Rata
Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Guru terhadap Murid pr Klas Rata-Rata	45,66	79,0	59,72	80,58	84,99

Sumber : Dinas PKO Kabupaten Lembata Tahun 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata- ratapada tahun 2016 semakin meningkat dari tahun sebelumnya dan menjadi yang tertinggi, sedangkan rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata terndah pada tahun 2012, yaitu 45,66.

b. Pendidikan Menengah

- Angka Partisipasi Sekolah

  Angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah di kabupaten Lembata dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.2.35
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Partisipasi Sekolah	671,55	594,78	689,32	395,45	333,41

Sumber: Dinas PKO Kabupaten Lembata Tahun 2017

Berdasarkan data pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Lembata, angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah menunjukkan penurunan pada tahun 2016, yaitu 333,41 jika dibandingkan tahun 2015 dan tahun- tahun sebelumnya. Angka Partisipasi Sekolah tertinggi adalah pada tahun 2014, yaitu 689,32.

- Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

  Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel.2.36
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Ketrsediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	327,12	131,67	60,01	28,61	32,12

Sumber : Dinas PKO Kabupaten Lembata Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah di kabupaten Lembata tertinggi pada tahun 2012, yaitu 327,12. Angka ini semakin menurun di tahun 2015, yakni 28,61 dan sedikit meningkat di tahun 2016, yaitu 32,12.

- Rasio Guru terhadap Murid

  Rasio guru terhadap murid di kabupaten Lembata selanjutnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel.2.37
Rasio Guru terhadap Murid Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Guru terhadap Murid	827,33	752,52	740,51	472,04	1105,56

Sumber : Dinas PKO Kabupaten Lembata 2017

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Guru terhadap Murid jenjang pendidikan menengah di kabupaten Lembata semakin meningkat di tahun 2016, yaitu 1105,56 jika dibandingkan data tahun 2015, yakni 472,04.

- Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata

Rasio guru terhadap murid per Kelas rata-rata dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.2.38
Rasio Guru terhadap Murid Per Kelas Rata- Rata
Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Guru terhadap Murid Per Kelas Rata- Rata	82,73	75,25	74,05	47,2	50,42

Sumber: Dinas PKO Kabupaten Lembata Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata, tinggi/ meningkat di tahun 2012, yakni 82,73 dan semakin rendah/ menurun di tahun 2015, yakni 47,2.

c. Fasilitas Pendidikan

Gambaran fasilitas pendidikan di kabupaten Lembata dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel.2.39
Fasilitas Pendidikan di Kab. Lembata Tahun 2012-2016

No	Fasilitas Pendidikan	Capaian Kinerja (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Sekolah SD/MI Kondisi Bangunan Baik	30	35	40	45	50
2.	Sekolah SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	40	45	50	60	65

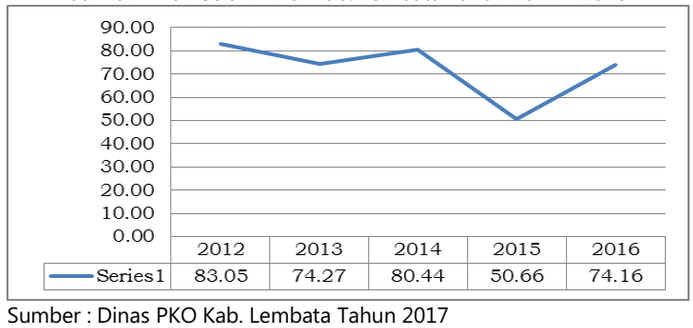
Sumber : Dinas PPO Kab. Lembata Tahun 2017

Dari tabel diatas diketahui fasilitas pendidikan untuk semua jenjang pendidikan baik SD/MI maupun SMP/MTs di Kabupaten Lembata dari tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan kualitas sehingga semakin banyak jumlah sekolah yang dalam kondisi baik. Kondisi tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat 50 SD/MI dalam kondisi baik dan 65 SMP/MTS dalam keadaan baik pula.

d. Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah pendidikan anak usia dini di Kabupaten Lembata dari tahun 20122016 dapat disajikan dalam grafik berikut :

Grafik 2. 8.
Jumlah Anak Usia Dini di Kab. Lembata Tahun 2012 – 2016



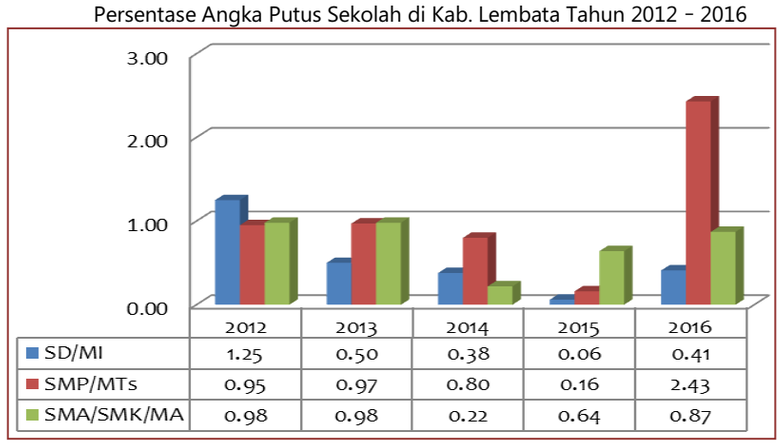
Sumber : Dinas PKO Kab. Lembata Tahun 2017

Dari grafik tersebut diketahui jumlah anak usia dini mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 50,66 % menjadi 74,16% di tahun 2016. Hal ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah usia produktif di Kabupaten Lembata.

e. Angka Putus Sekolah

Persentase angka putus sekolah menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Lembata dari tahun 2012 – 2016 dapat disajikan dalam sebagai berikut :

Diagram 2.3.
Persentase Angka Putus Sekolah di Kab. Lembata Tahun 2012 – 2016



Sumber : Dinas PPO, Data Terolah Bappelitbangda
Kab. Lembata Tahun 2017

Dari data diatas diketahui bahwa persentase angka putus sekolah pada Tahun 2012 – 2016 terjadi pada tingkatan pendidikan menengah.Persentase angka putus sekolah ini juga mengalami kenaikan dari setipa tahunnya. Pada tahun 2016 persentase angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,41% atau jika dibandingkan dengan tahun 2015 yakni sebesar 0,06%.

f. Angka Kelulusan

Persentase angka kelulusan menurut tingkat pendidikan dan persentase guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Lembata dari tahun 2012 – 2016 dapat disajikan dalam sebagai berikut :

Tabel.2.40
Persentase Angka Kelulusan dan Kualifikasi guru
di Kab. Lembata Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	% Angka Kelulusan SD/MI	99,96	99,36	99,93	100,00	100,00
2.	% Angka Kelulusan SMP/MTs	98,54	99,63	100,00	99,95	99,48
3.	% Angka Kelulusan SMA/MA	98,64	99,91	99,85	99,85	99,09
4.	% jumlah siswa SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs	85,75	122,12	77,40	78,25	112,93
5.	% jumlah siswa SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/MA	80,9	138,00	93,89	73,92	137,02
6.	% Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	6,41	20,24	35,72	63,35	70,86

Sumbe r: Dinas PKO Kabupaten Lembata, Tahun 2017

Dari tabel diatas diketahui bahwa persentase angka lulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA hampir mencapai 100%. Hal ini dilihat dari kelulusan SMP/MTs 99,48% dan SMA/MA 99,09%. Jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya juga mengalami peningkatan.Persentase guru yang memenihi kualifikasi S1/D-IV juga mengalami kenaikan. Hal ini terlihat pada tahun 2016 sebesar 70,86%.

2.3.1.2. Kesehatan

Gambaran capaian indikator aspek pelayanan kesehatan di bawah ini menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya.Akan tetapi ditinjau dari aspek ketersediaan tenaga kesehatan (paramedis dan dokter) maka terjadi kesenjangan yang cukup besar antar desa di mana desa - desa dengan kondisi aksesibilitas transportasi yang sulit, kekurangan tenaga paramedis sangat dirasakan.Terbatasnya jumlah tenaga dokter umum menyebabkan penyebarannya hanya sampai pada tingkat Puskesmas sedangkan Puskesmas Pembantu belum memiliki tenaga dokter umum.

Tabel.2.41
Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun 2011-2015

Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Posyandu Per Satuan Balita	2.43	2.66	2.81	2.81	3.21
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	4.84	5.37	5.6	5.52	2.96
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	2.55	2.48	2.4	2.36	3.00
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	32.25	34.71	17.61	17.34	20.09
Persentase Balita Gizi Buruk (%)	1.93	1.29	1.5	1.39	1,28
Rasio pustu per satuan penduduk	28.01	28.1	27.22	26.79	3,76
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	500	237	453	98	54,97
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	81.94	93.05	95.35	84.29	96.7
Cakupan desa, kelurahan / UCI	88	90	26	106	72.85
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	29.44	47.54	52.94	100	67.90
Penemuan dan penanganan penderita TBC DTA	120	173	62	140	88.57
Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	3,690	2,625	227	1,116	2,139
Jumlah posyandu	315	315	315	315	315
Jumlah dokter	38	30	22	20	18
Jumlah puskesmas	9	9	9	9	9
Jumlah pustu	48	56	61	61	61

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Tahun 2015

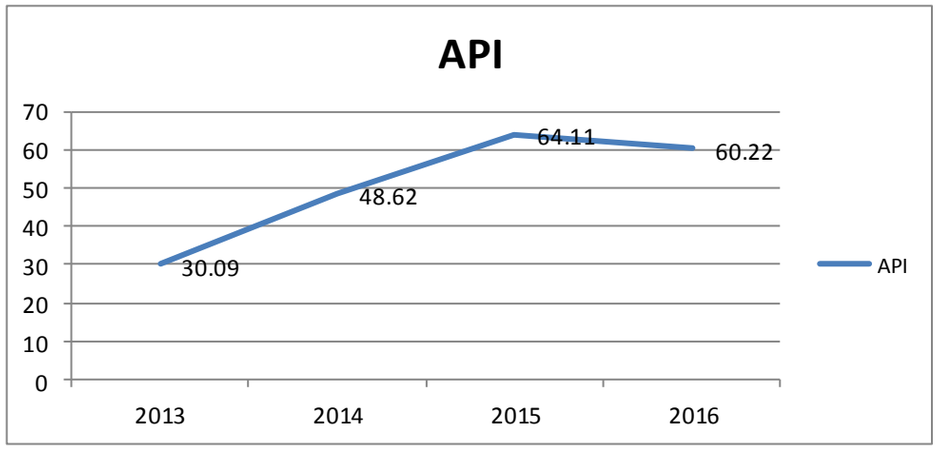
Tabel.2.42
Jumlah Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan	Capaian Kinerja				
	2012	2013	2014	2015	2016
Dokter Spesialis		1	2	2	2
Dokter Umum	15	18	20	19	23
Dokter Gigi	6	3	3	3	5
Bidan	152	194	208	278	300
Perawat	113	223	273	341	389
Tenaga Kefarmasian	25	34	39	42	54
Tenaga Gizi	17	21	36	43	43
Tenaga Kesmas	41	48	46	88	118
Tenaga Sanitasi	22	14	17	23	23
Jumlah	**391**	**556**	**644**	**839**	**957**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata 2017

Keberadaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai menjadi faktor penting dalam usaha peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kabupaten Lembata telah memiliki Puskesmas beserta tenaga medisnya untuk melayani masyarakat di masing-masing kecamatan. Selain itu juga terdapat 1 RSUD dan 2 rumah sakit swasta, 9 Puskesmas yang siap melayani kesehatan masyarakat.Namun jumlah tenaga medis yang tersedia masih belum mencukupi, terutama tenaga dokter. Tenaga Kesehatan yang meningkat dari tahun ketahun diharapkan dapat meningkatkan kunjungan kepada masyarakat serta mengurangi angka kunjungan masyarakat ke puskesmas/rumah sakit.

Grafik 2. 9.
Annual Parasite Incidence Kabupaten Lembata Tahun 2013 -2016



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun 2017

Penyakit malaria merupakan salah satu penyakit yang upaya pengendaliannya menjadi komitmen global dalam MDGs, dimana menjadi masalah kesehatan terutama di Kabupaten Lembata yang dapat menjadi determinan menurunya produktifitas kerja.

Orientasi penanganan kasus malaria dari tahun ke tahun difokuskan pada kasus dengan melihat pada hasill pemeriksaan sediaan darah. Jumlah kasus malaria di Kabupaten Lembata tahun 2016 berdasarkan hasil pemeriksaan darah sebanyak 30.258 sediaan dengan hasil positif sebanyak 7.959 sediaan atau sebesar 26,31%. dengan API sebesar 60,22/ 1000 penduduk.

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada pada tahun 2013 sebesar 30,09 % namun meningkat pada tahun 2014 sebesar 13,90 menjadi 43,99/1.000 penduduk, dan pada tahun 2015 sebesar 64,11%, sementara untuk tahun 2016 API sebesar 60,22/1.000 penduduk.

Dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2013 dari bidang P2PL tidak memberikan laporan sementara untuk puskesmas hanya 4 puskesmas yang memasukan laporan, dengan malaria klinis sebanyak 46 orang, malaria dengan pemeriksaan sebanyak 3.758 orang dengan API sebesar 30,09/1.000 penduduk.

Data dari 8 puskesmas yang melapor pada tahun 2014 jumlah sediaan darah yang diperiksa sebanyak 11.241 dengan jumlah sedian yang positif sebesar 48,62%, dengan *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 43,99 per 1.000 penduduk.

Untuk tahun 2015 jumlah sedian darah yang diperiksa sebanyak 25.512 sedian dengan jumlaah sedian positip sebesar 33,91%., dengan API 64,11/1.000 penduduk. Sementara untuk tahun 2016 terjadi penurunan API menjadi 60,22/1.000 penduduk.

Pengendalian Malaria di Lembata dilaksanakan secara menyeluruh dengan cara menemukan sedini mungkin penderita Malaria, mengobati penderita, meningkatkan sumber daya manusia pada

tenaga medis, tenaga laboratorium, pengelola program dan pembagian kelambu berinsektisida serta koordinasi lintas sektor.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi sarana dan prasarana umum dapat dilihat pada indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, panjang jalan yang dilalui roda 4, jaringan irigasi dan rasio rumah layak huni.Kondisi panjang jalan dari tahun 2012-2016dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.43
Kondisi Jalan di Kabupaten Lembata Tahun 2012-2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (km)	78,24	86,54	98,58	108,57	208,49
2	Panjang jalan dilalui Roda 4	546,53	546,53	546,53	546,53	577,03

Sumber : Dinas PU Kabupaten Lembata Tahun 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa proporsi panjang jaringan jalan dalam keadaan baik di kabupaten Lembata mengalami peningkatan jumlah dari tahun ke tahun. Kondisi di tahun 2016 menunjukan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 108.49 Km. Artinya, bahwa pada tahun 2016 volume panjang jalan dalam kondisi baik semakin banyak dibandingkan kondisi jalan dalam keadaan baik.

Panjang jalan yang dilalui roda 4 di Kabupaten Lembata tahun 2012 – 2015 tidak mengalami peningkatan yakni masih sebesar 546,53 km. Pada tahun 2016 panjang jalan yang dilalui roda 4 meningkat menjadi 577,03 km atau sebesar 0, 55%.

- Kondisi Irigasi

Secara umum dapat digambarkan kondisi irigasi dikabupaten Lembata yakni Total irigasi yang menjadi wewenang Kabupaten yang dibangun sejak dari Tahun 1996- 2017 di Kabupaten Lembata 3.115 Ha, yang sudah difungsikan sebesar 17,5Ha yang belum difungsikan sebesar 3.137,5 Ha, hal tersebut dapat terlihat pada Tabel dibawa berikut :

Tabel.2.44
Kondisi Irigasi di Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

IVENTARISASI DAERAH IRIGASI KABUPATEN LEMBATA																						
No	Nama D.I.	Debit Andalan M^3/dtk	debit Berfungsi	Desa / Kelurahan	Tingkat Jaringan (Teknis,Semi Teknis,Sederhana) Tahun di Bangun	LUAS DAERAH IRIGASI (Ha)		BENDUNG					PRIMER			SALURAN PEMBAWA						JENIS BANGUNAN
						Potensial		TETAP			PENGAMBILAN BEBAS	BRONJONG				SEKUNDER			TERSIER			BANG.PELENGKAP
						Irigasi	Sudah Irigasi	BAIK	RR	RB			BAIK	RR	RB	BAIK	RR	RB	BAIK	RR	RB	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
A	**Kewenangan Kabupaten**																					
I																						
	TOTAL					**750**	**7**															
1	Waimatan Puor	0.063	0.0013		SD (2014)	50	1	1					15									
2	Waidara	0.062	0.0025	Wulandoni	SD (1996)	50	2			1					100			1,500				
3	Liwulagan	0.073	0.0006	Liwulagan	SD (2014)	50	1	1					100			1,500						
4	Atanila /Wainili	0.335	0.0013	Atanila	SD (2016)	250	1	1					250			1,500						
5	Wai pei	0.061	0.0006	Panama	SD (2014)	50	1	1					100			2,000						
6	Wai Lolon	0.063	0.0006	Wailolong	SD (2014)	50	1						100			2,000						
7	Wai Ramai	0.043	0.0013	Baolangu	SD (2015)	100	1	1					200									
8	Waiteba	0.215	0.0006		SD 2010	150	1	1									2,500					
	T O T A L					**750**	**7**	**6**		**1**	**-**	**-**	**765**			**7,000**	**2,500**	**1,500**		**-**		

Sumber : Dinas PUPRP Kab.Lembata Tahun 2017

Tabel.2.45
Kondisi Irigasi (km) di Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Panjang Saluran Irigasi	5156,50	5156,50	5609,80	7585,80	10035,30
2	Luas Irigasi Kabupaten					5.555

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Lembata Tahun 2017

Tabel di atas memperlihatkan panjang saluran irigasi di kabupaten Lembata semakin meningkat volumenya dari tahun ke tahun. Peningkatan yang lebih baik ada di tahun 2016 di mana mencapai 10035.30 Km jika dibandingkan tahun 2015 7585 Km. Sementara luas irigasi kabupaten Lembata pada tahun 2016 adalah 5.555 ha.

Dari total luas irigasi Kabupaten Lembata ada tiga kawasan yang menjadi kewenangan pusat yakni daerah irigasi Waikomo dengan luas 550 ha, daerah irigasi riangdua dengan luas 1000 ha dan daerah irigasi Waimuda dengan luas 1,500 ha; empat (4) kawan yang menjadi kewenangan propinsi yakni daerah irigasi Waimatan Boto dengan luas potensial 450 ha, daerah irigasi beang dengan luas 200 ha, daerah irigasi Wowong dengan luas 350 ha dan daerah irigasi Wailawang dengan luas 100 ha; dengan enam belas daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dengan luas lahan potensial 1.405 ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Dari total luas daerah irigasi berdasarkan kewenangan tersebut terdapat 101ha atau1,82% dalam kondisi baik.

Selain panjang jalan, jaringan irigasi terdapat indikator lain yakni rasio rumah layak huni. Sampai pada tahun 2016 rasio rumah layak huni di Kabupaten Lembata sebesar 1,15.

➢ Kondisi Air Minum dan Air Baku

1) Ketersediaan air baku dan tingkat pelayanan air minum

Prosentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga setiap hari pada tahun 2016 sebesar 55,91 % dari total rumah tangga di Kabupaten Lembata. Dari berbagai sumber air baku yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga di Kabupaten Lembata, saat ini baru memanfaatkan air permukaan (mata air), sumur gali dan sebagian kecil sumur bor. Sedangkan potensi air baku lain yang belum dimanfaatkan adalah air sungai, 59 ending, embung dan air bawah tanah. Sedangkan pelayanan air minum mengalami terhadap penduduk Kabupaten Lembata mengalami peningkatan cukup signifikan yakni 25,40% pada tahun 2012 meningkat mencapai 58,06% pada tahun 2016. Dengan demikian maka perlu peningkatan sebesar 10,82 % untuk mencapai target MDGs 68,87 % terhadap total penduduk Kabupaten Lembata.

Tabel.2.46
Jumlah Konsumsi Air Minum di Kabupaten LembataTahun 2016

No.	Kecamatan	Total Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah KK	Jumlah Penduduk Yang Mengakses Air Minum Yang Aman (jiwa)	%
1	Nubatukan	45,488	9,097	34,917	76.76
2	Lebatukan	8,899	2,415	5,442	61.15
3	Ile Ape	12,158	3,243	2,403	19.76
4	Ile Ape Timur	5,119	1,407	1,026	20.04
5	Omesuri	15,548	4,783	7,394	47.56

No.	Kecamatan	Total Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah KK	Jumlah Penduduk Yang Mengakses Air Minum Yang Aman (jiwa)	%
6	Buyasuri	19,523	5,222	4,238	21.71
7	Atadei	7,568	2,264	6,306	83.32
8	Nagawutun	9,368	2,430	7,640	81.55
9	Wulandoni	8,503	2,366	7,355	86.50
Total		**132,174**	**33,227**	**76,721**	58.05

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan, Tahun 2017

Tabel.2.47
Jumlah Konsumsi Air Baku di Kabupaten Lembata Tahun 2016

No.	Kecamatan	Total Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Pengguna Air Baku	%
1	Nubatukan	45,488	9,097	7,182	5,513	76.76
2	Lebatukan	8,899	2,415	2,185	1,459	66.77
3	Ile Ape	12,158	3,243	2,853	564	19.77
4	Ile Ape Timur	5,119	1,407	1,297	260	20.05
5	Omesuri	15,548	4,783	4,260	2,026	47.56
6	Buyasuri	19,523	5,222	4,749	1,031	21.71
7	Atadei	7,568	2,264	2,057	1,714	83.33
8	Nagawutun	9,368	2,430	2,131	1,738	81.56
9	Wulandoni	8,503	2,366	2,060	1,782	86.50
Total		**132,174**	**33,227**	**28,774**	**16,087**	55.91

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan, Tahun 2017

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja pembangunan daerah adalah data Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, prosentase Rumah Tangga Bersanitasi dan prosentase Rumah Tangga Pengguna Listrik. Untuk kabupaten Lembata data- data ketiga indikator kinerja pembangunan daerah ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.2.48
Kondisi Perumahan di Kabupaten Lembata Tahun 2012-2015

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja			
		2012	2013	2014	2015
1	Prosentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	25.4	31.78	47.78	56.51
2	Prosentase Rumah Tinggal Bersanitasi	40	43,00	77,83	84.49
3	Prosentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	36,5	38,70	40,00	92.57

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan, Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa prosentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Lembata mengalami peningkatan dari tahun ketahun, yakni pada tahun 2012 sebesar 25.4% menjadi 31.78% di tahun 2013, 47.24% di tahun 2014 dan 67.22% di tahun 2015. Demikian juga dengan prosentase Rumah Tinggal Bersanitasi dan Prosentase Rumah Tangga Pengguna Listrik meningkat dari tahun ke tahun.Khusus untuk indikator Rumah Tinggal Bersanitasi dan Rumah Tangga Pengguna Listrik menunjukkan prosentase capaian yang sangat baik di tahun 2015, masing- masing 94.49% dan 92.57%.

- Permukiman Kumuh

Berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 473 Tahun 2014 tentang Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perkotaan sebesar 231,54 Ha. Lokasi persebarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2.49
Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 473 Tahun 2014)

No	Lokasi	Luas (Ha)
1	Kawasan Bakalerek	8,99
2	Kawasan Bour	11,00
3	Kawasan Pada	15,56
4	Kawasan Paobokol	11,16
5	Kawasan Waijarang	10,37
6	Kawasan Watokobu	10,22
7	Kawasan Lewoleba Barat	41,22
8	Kawasan Lewoleba Timur	26,97
9	Kawasan Lewoleba Selatan	35,10
10	Kawasan Lewoleba Utara	17,72
11	Kawasan Selandoro	18,57
12	Kawasan Lewoleba Tengah	9,96
13	Kawasan Nubamado	14,70
Jumlah		**231,54**

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan, Tahun 2017

Dari tabel diatas diketahui luas kawasan permukiman kumuh paling banyak berada di Kawasan Lewoleba Barat yakni sebesar 41,22 Ha. Sedangkan kawasan dengan jumlah permukiman paling sedikit yakni kawasan lewoleba Tengah dengan luas 9,96 Ha.

- Perumahan

Di Kabupaten Lembata masih banyak terdapat kondisi rumah yang tidak layak huni yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Lembata, pada tahun 2016 jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 12.000 rumah dengan jumlah yang paling banyak berada di Kecamatan Omesuri dengan jumlah 2.991 rumah. Sampai pada tahun 2016 kondisi rumah yang tidak layak huni sudah diperbaiki sebesar 310 rumah yang semuanya berada di Kecamatan Nubatukan. Dengan demikian masih terdapat 11.690 rumah tidak layak huni yang masih harus diperbaiki.

Tabel.2.50
Persebaran Rumah Layak Huni di Kabupaten Lembata Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Sudah Di Perbaiki
1	Omesuri	2.991	
2	Buyasuri	1.951	
3	Ile Ape	1.125	
4	Ile Ape Timur	414	
5	Lebatukan	913	
6	Nubatukan	1.301	310
7	Atadei	1.030	
8	Nagawutung	1.436	
9	Wulandoni	839	
Jumlah		**12.000**	**310**
Sisa		**11.690**	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan, Tahun 2017

- Ruang Terbuka Hijau

Luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Lembata yang tercatat pada tahun 2011, yakni 175.733 Ha.

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kesuksesan pemerintahan suatu daerah tergambar juga dari kemampuan pemerintahannya dalam memberikan perlindungan bagi masyarakatnya sehingga tercipta stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Tanggung jawab ini dapat dilakukan secara nyata melalui penyediaan fasilitas dan sarana pelayanan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

Gambaran ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lembata dalam dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.2.51
Gambaran Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	10,09	10,23	9,73	9,53	9,36
2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	152,99	155,19	147,59	148,52	145,87
3.	Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan	2.04	1.95	1.95	1.95	1.95
4.	Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah patroli Petugas Satpol PP Pemantauan Dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 Jam	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
6.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber: Satuan Pol PP Kabupaten Lembata Tahun 2017

Dari tabel di atas didapatkan informasi bahwa Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10000 Penduduk dalam kurun waktu 2012-2015 cenderung turun atau semakin kecil pada setiap tahunnya. Secara berurutan rasio jumlah polisi pamong praja per 10000 penduduk sejak tahun 2012 adalah 10.9, 10.23, 9.73, 9.53 dan 9.36 di tahun 2016. Hal ini berarti proporsi jumlah polisi pamong praja per 10000 jumlah penduduk semakin tidak sebanding sejak tahun 2012 sampai tahun 2016. Hal ini dikarenakan terjadi pertambahan jumlah penduduk yang tidak diimbangi jumlah polisi pamong praja. Sementara itu Jumlah Linmas per Jumlah 10000 penduduk menunjukkan jumlah yang semakin sedikit pada tahun 2016, yaitu 145, 87 dibandingkan empat tahun sebelumnya. Penurunan jumlah linmas per jumlah 10000 penduduk pada setiap tahunnya ini dikarenakan pula oleh faktor pertambahan jumlah penduduk di setiap tahunnya yang tidak diimbangi dengan pertambahan jumlah linmas.

Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/ Kelurahan di tahun 2012 adalah 2.04 lebih tinggi jika dibandingkan empat tahun berikutnya sampai tahun 2016 yang tetap pada angka 1.95. Penurunan angka rasio pos siskamling per jumlah desa/ kelurahan sebagai akibat dari pertambahan jumlah desa dan desa/ kelurahan ini belum belum memiliki Pos Siskamling. Untuk penegakan Perda, dari data pada tabel di atas menunjukan bahwa sejak tahun 2012 penegakan Perda terealisasi 100%. Begitu pula dengan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3.

Jumlah Patroli Petugas Satuan Pol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 sebanyak 2 (dua) pada setiap tahunnya sejak tahun 2012 sampai tahun 2016. Sementara itu cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten dan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terealisasi 0,0% sejak tahun 2012 sampai tahun 2016. Artinya tidak ada pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Lembata dari kurun waktu tahun 2012-2016.

2.3.1.6. Sosial

Berkaiatan dengan data sosial secara umum dan data Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial, maka berikut ini akan dijabarkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial perkecamatan sesuai jenis penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.Dari tabel yang ada, akan dijabarkan jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

1. Anak Balita Telantar (ABT 1)
2. Anak Telantar (AT)
3. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
4. Anak Jalanan (AJ)
5. Anak dengan kedisabilitisan (ADK)
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau yang diperlakukan salah (AKTK/S)
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)
8. Lanjut usia telantar (LUT)
9. Penyandang disabilitas (PD)
10. Tuna Susila (TS)
11. Gelandangan (G)
12. Pengemis (PNGS)
13. Pemulung ((PMNG)
14. Kelompok minoritas (KM)
15. Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBL)
16. Orang dengan HIV/Aids (ODHA)
17. Korban penyalagunaan NAPSA (KPN)
18. Korban trafficing (KT)
19. Korban tindak kekerasan (KTK)
20. Pekerjaan migran bermasalah sosial (PMBS)
21. Korban bencana alam (KBA)
22. Korban bencana sosial (KBS)
23. Perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE)
24. Fakir Miskin (FM)
25. Keluarga bermasalah sosial Psikologis (KBSP)
26. KAT
27. Orang dengan kecacatan (ODK)

Dari ke 27 indikator di atas diketahui bahwa jumlah PMKS di Kabupaten Lembata pada tahun 2016 sebanyak 8372 orang dan tersebar di seluruh kecamatan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.2.52
Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Lembata 2016

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	JUMLAH		TOTAL
		L	P	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	87	99	186
2	Anak Terlantar (AT)	516	388	904
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABDH)	2	-	2
4	Anak Jalanan (AJ)	-	-	-
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	115	114	229
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (AMKTK)	22	17	39
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	-	2	2
8	Lanjut Usia Terlantar (LUT)	1.306	2.440	3.746
9	Penyandang Disabilitas (PD)	169	172	341
10	Tuna Susilah (TS)	-	1	1
11	Gelandangan (G)	9	-	9
12	Pengemis (PNG)	2	-	2
13	Pemulung (PMN)	1	-	1
14	Kelompok Minoritas (KM)	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan (BWBLP)	20	1	21
16	orang dengan HIV/Aids (ODHA)	-	-	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA (KPN)	1	-	1
18	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	10	14	24
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	25	23	48
20	Korban Bencana Alam (KBA)	10	27	37
21	Korban Bencana Sosial (KBS)	79	68	147
22	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	-	597	597
23	Fakir Miskn (FM)	491	585	1.076
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)	8	9	17
25	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	51	18	69
26	Orang Dengan Kecacatan (ODK)	445	428	873
	TOTAL			**8.372**

Sumber: Dinsos – PMD Kabupaten Lembata Tahun 2017

Dari tabel di atas diketahui bahwa jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial terbanyak adalah Lanjut Usia Terlantar dengan jumlah 3.746 orang disusul Fakir Miskin (FM) sebanyak 1.076 orang, Orang Dengan Kecacatan sebanyak 873 orang, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) berjumlah 597 orang dan Penyandang Disabilitas (PD) 341 orang.

2.3.1.7. Tenaga Kerja

Beberapa indikator capaian kinerja pada masalah ketenagakerjaan adalah mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Angka Sengketa Pengusaha, Tenaga Kerja Ditempatkan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja.Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja.Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas) yang tidak bekerja atau sedang mencari perkerjaan atau sedang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Beberapa gambaran kondisi ketenagakerjaan tersebut di atas dapat diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel.2.53
Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Lembata Tahun 2012 – 2015

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72.96	74.50	75.25	76.00	76.66
2.	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	-	-	-	100	75
3.	Pencari Kerja Ditempatkan	-	-	75	72	142.91
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.45	3.40	3.30	3.20	3.10

Sumber : Dinas Sosial Kab. Lembata Tahun 2015

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2016 TPAK Kabupaten Lembata meningkat dari tahun- tahun sebelumnya menjadi 76.6%. TPAK terendah terdapat di tahun2012, yakni 72.6%. Hal ini cukup bagus karena di tengah kondisi sosial ekonomi nasional yang menurun, besaran relatif dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau aktif dalam memproduksi barang-barang atau jasa di Kabupaten Lembata meningkat bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan TPAK di Kabupaten Lembata sebagaimana data di atas ternyata diimbangi dengan turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kabupaten Lembata cenderung turun di setiap tahunnya. Dari angka 3.45% di tahun 2012 kemudian semakin turun mencapai angka terendah 3.10% di tahun 2016.

2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari capaian indikator utama, yaitu prosentase peran perempuan dalam domain publik, baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang swasta, rasio KDRT, jumlah tenaga kerja dibawah umur, partisipasi angkatan kerja perempuan.

Data urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lembata tahun 2012-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel.2.54
Data Partisipasi Perempuan di Kabupaten Lembata Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Tahun (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Prosentase Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	6,86	3.14	4.36	6.85	7.03
2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	0.97	0.98	0.99	1.02	1.05
3	Rasio KDRT	48	76	88	113	107
4	Prosentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	-	-	-	-	-
5	Prosentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	40,39	41,80	42,36	43,74	58,63

Sumber : Dinas PPKBP3PA. Kab. Lembata 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa prosentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan masih sangat rendah. Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan hanya bergerak dari kisaran 3.14% di tahun 2013 hingga ke angka 7.03% pada tahun 2016. Sementara itu tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta lebih rendah dibandingkan tingkat Partisipasi Perempuan pada Lembaga Pemerintahan. Prosentase partisipasi perempuan pada lembaga swasta tertinggi hanya mencapai angka 1.05%, yakni pada tahun 2016. Prosentase terendah terdapat di tahun 2012, yaitu 0.97%.

Rasio KDRT menunjukkan perbandingan jumlah kasus KDRT dibanding jumlah rumah tangga. Rasio KDRT terbesar di tahun 2015, yakni 113 dan terkecil di tahun 2012, yakni 48. Sementara itu, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 40.39% (terendah) kemudian terus meningkat menjadi 58.63% (tertinggi) pada tahun 2016.

2.3.1.9. Pangan

Jenis tanaman pangan yang diusahakan di Kabupaten Lembata adalah padi (padi sawah dan padi ladang) dan palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, kacang hijau).Data tentang luas panen dan jumlah produksi tanaman pangan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.2.55
Kondisi Produktivitas Tanaman Pangan di Kabupaten Lembata Tahun 2012 – 2016

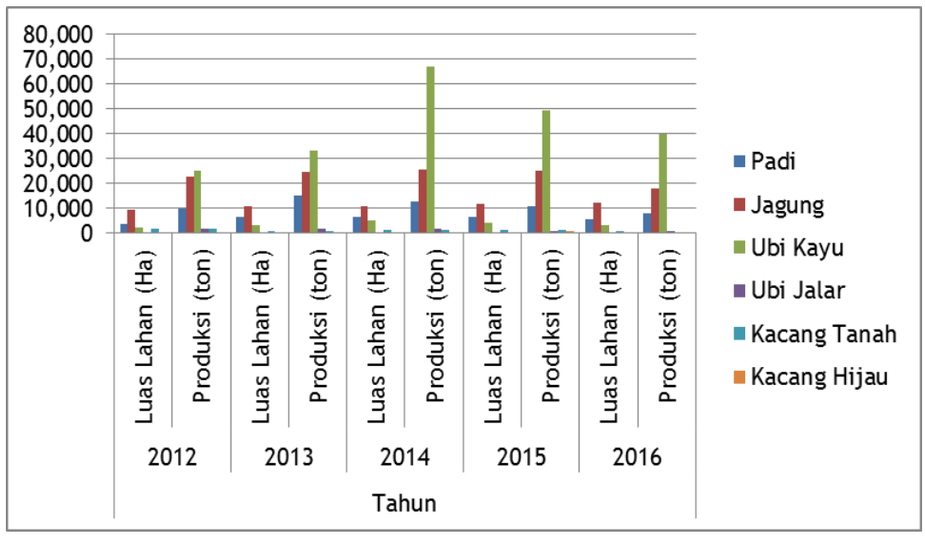
Jenis Tanaman Pangan	Tahun									
	2012		2013		2014		2015		2016	
	Luas Lahan (Ha)	Produksi (ton)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (ton)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (ton)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (ton)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (ton)
Padi	3.836	9.617,94	6.479	14.972,80	6.702	12.794,74	6.728	10.896,43	5.329	7.844,00
Jagung	9.463	22.547	10.943	24.708	10.672	25.462	11.976	25.170	12.363	17.942
Ubi Kayu	2.353	25.137	2.943	33.192	4.962	66.934	4.030	49.236	3.046	39.763
Ubi Jalar	205	1.692	204	1.621	245	1.818	250	1.000	198	859
Kacang Tanah	1.523	1.675	692	965	1.216	1.213	1.323	1.337,50	988	409
Kacang	137	115	212	178	320	268	290	529	180	74

Jenis Tanaman Pangan	Tahun									
	2012		2013		2014		2015		2016	
	Luas Lahan (Ha)	Produksi (ton)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (ton)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (ton)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (ton)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (ton)
Hijau										

Sumber : BPS Lembata Tahun 2016

Tabel di atas menampilkan tingkat produktivitas tanaman pangan dan luas lahan produksi di Kabupaten Lembata tahun 2012-2016. Dari data- data di atas menunjukkan bahwa jumlah produksi tanaman padi pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 7.844 ton dibandingkan tahun 2015 sebesar 10.896 ton. Produksi jagung juga mengalami penurunan pada tahun 2016, yakni 17.942 ton yang mana jumlah produksi di tahun 2015 adalah 25.170 ton.Jumlah produksi ubi kayu juga mengalami penurunan jumlah prodksi, yaitu 39.763 ton.Jumlah produksi ubu kayu tertinggi di tahun 2014, yaitu 66.934 ton. Produksi ubi jalar juga mengalami penurunan produksi di tahu 2016, yakni 859 ton yang jika dibandingkan jumlah produksi tertinggi sebelumnya sebesar 1.818 di tahun 2014. Untuk jenis tanaman kacang tanah pun mengalami penurunan jumlah produksi yang besar pada tahun 2016, yakni 409 ton yang mana jumlah produksi tahun sebelumnya (2015) sebesar 1.337,50 ton. Sementara untuk jumlah produksi tanaman kacang hijau mengalami penurunan yang drastic. Dari jumlah produksi 529 ton di tahun 2015 menjadi hanya 74 ton di tahun 2016.

Diagram 2.4.
Kondisi Produktifitas Tanaman Pangan di Kabupaten Lembata Tahun 2012 – 2016



Sumber : BPS Lembata 2016, Data Terolah Bappelitbangda Tahun 2017

2.3.1.10. Pertanahan

Indikator pertanahan bertujuan memberikan gambaran mengenai tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Fokus pertanahan ini dapat dilihat dari indikator sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel.2.56
Kinerja Pertanahan Kabupaten Lembata Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Data Luas Tanah Milik Pemerintah Daerah (ha)	-	15 ha	22,242	21,047	30,2927

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
2	Jumlah Tanah Pemerintah Daerah berserftikat (buah)		1	26	42	68
3	Jumlah Kasus Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan		10	9	7	5
4	Penyelesaian Ijin Lokasi				7	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Pertanahan, Tahun 2017.

Dari tabel di atas terlihat bahwa data luas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Lembata jumlahnya meningkat pada tahun 2016 menjadi 30.2927 ha dari jumlah tahun 2015, yakni 21.047 ha.Dari luas tanah milik pemerintah tersebut, tanah yang sudah memiliki sertifikat adalah sebanyak 68 buah di tahun 2016.

Sementara jumlah kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan, kondisi di tahun 2016 adalah semakin berkurang, yakni 5 kasus.Jumlah kasus tertinggi di tahun 2013, yaitu 10 kasus.

2.3.1.11. Lingkungan Hidup

Kondisi Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek untuk mengukur capaian kinerja pembangunan suatu daerah. Beberapa indikator lingkungan hidup yang menjadi ukuran kinerja pembangunan daerah adalah Data Kerusakan Lingkungan, Kegiatan Perbaikan Lingkungan, Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL. Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.2.57
Kondisi Lingkungan Hidup Tahun 2012-2016

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Data kerusakan lingkungan (ha)	34.573	40.122	34.573	2.765	2.811
2.	Kegiatan perbaikan lingkungan (Ha)	90	2,5	30	60	34
3.	Jumlah Kasus Lingkungan yang ada			25	18	12
4.	Jumlah Kasus Lingkungan yang Ditangani Pemda			13	10	5
5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL (%)	0,35	0,48	0,61	0,74	1,00
6.	% Pengangkutan Sampah				32.850	36,30
7.	% Pengurangan Sampah				-	36,30

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lembata 2017

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa data kerusakan lingkungan hidup mengalami penurunan yang signifikan pada kurun waktu dua tahun terakhir, yakni tahun 2015 dan tahun 2016. Luas kerusakan lingkungan terbesar pada tahun 2013, yakni 40.122 Ha. Sementara luas kerusakan paling sedikit pada tahun 2015, yakni 2.765 Ha.Sedangkan kegiatan-kegiatan untuk mengatasi kerusakan lingkungan tetap dilakukan termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL meski dalam cakupan yang masih relatif kecil.Jumlah kasus lingkungan hidup tertinggi pada tahun 2014, yakni 25 kasus dan sudah tertangani pada tahun itu adalah 13 kasus.Sedangkan jumlah kasus lingkungan di tahun 2016 sebanyak 12 kasus dan sudah berhasil ditangani sebnyak 5 kasus.

Sementara masalah penanganan sampah di Kabupaten Lembata pada tahun 2016persentase pengangkutan sampah yang dilakukan sebesar 36,30% dan persentase pengurangan sampah juga sebesar 36,30%. Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan sampah adalah bahwa TPS yang pernah ada telah dibongkar, penampungan dilakukan di lahan kososng atau di pekarangan rumah tanpa ada penampung/TPS yang memadai.

2.3.1.12. Admnistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan kependudukan dan catatan sipil mencakup pembuatan berbagai jenis akta, kartu keluarga dan KTP, ketersediaan database kependudukan skala provinsi dan penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Gambaran pelayanan dministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lembata tersaji dalam tabel berikut :

Tabel.2.58
Kondisi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lembata Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio Penduduk BerKTP per Satuan Penduduk	38,83	48,71	61,56	33,38	67,50
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	46,58	33,95	61,52	44,30	39,53
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	1,93	1,44	2,98	21,73	2,52
4	Kepemilikan KTP	38,83	37,17	61,44	33,38	78,40
5	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk	3,13	2,11	4,05	17,55	5,29
6	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017

Dari tabel di atas diketahui bahwa Rasio Penduduk BerKTP per Satuan Penduduk cenderung naik turun. Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan yang belum maksimal dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP. Rasio penduduk berKTP tertinggi di tahun 2016, yakni 67.50 dan terendah di tahun 2015, yakni 33.38. Begitu pula Rasio Bayi Berakte cenderung naik turun. Rasio tertinggi di tahun 2014, yakni 61.52 dan terendah 339.95 di tahun 2013. Rasio Pasangan Berakte Nikah tertinggi di tahun 2014, yakni 21.73 dan rasio terendah sebsar 1.44 di tahun 2013. Kepemilikan KTP pencapaian tertinggi di tahun 2016, yakni 78.40% dan terendah di tahun 2015 sebesar 33.38%. dan Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk pencapaian terbaik ada di tahun 2015, yakni 17,55% dan capaian terendah pada tahun 2013 sebesar 2.11%.

Dari sebaran data di atas secara umum dapat dikatakan bahwa capaian kinerja pelayanan adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih rendah. Masih terdapat banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen, baik KTP, Akte Kelahiran dan Akte Nikah.

Sementara itu, ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi tersedia setiap tahunnya dari tahun 2012-2016. Dan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK sudah dijalankan di Kabupaten Lembata selama periode 2012-2016.

2.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa diupayakan untuk memperkuat otonomi desa dan memberdayakan masyarakat menuju kesejahteraan. Upaya tersebut dijabarkan melalui kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM), Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kelompok UEP serta Desa siaga. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel.2.59
Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012-2015

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja			
		2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kelompok binaan LPM	151	151	151	151
2.	Jumlah kelompok binaan PKK	1.469	1.469	1.469	1.469
3.	Jumlah kelompok UEP dan SPP PNPM-MP	1.353	1.557	1.557	1.557

Sumber : BPMD Kab. Lembata Tahun 2015

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Lembata tidak mengalami peningkatan pada periode tahun 2012-2015, yakni 151 kelompok. Begitu pula dengan kelompok binaan PKK tidak mengalami peningkatan jumlah dari kondisi awal 1.469 di tahun 2012. Sementara itu jumlah kelompok UEP dan SPP PNPM-MP meningkat 1.577 di tahun 2013 dari 1.353 di tahun 2012 namun tidak mengalami peningkatan jumlah selama kurun waktu 2014-2015.

2.3.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Cakupan kinerja pembangunan daerah tergambar dalam beberapa indikator, antara lain Jumlah Akseptor KB, Prosentase Keluarga Sejahtera, Cakupan Peserta KB Aktif. Kondisi layanan penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Lembata dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.60
Data Pembangunan Keluarga Berencana Tahun 2012-2016

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Akseptor KB	10,261	10,863	8,410	8,951	14,909
2	Prosentase Keluarga Sejahtera	50.43	50.43	48.39	84.9	85,87
3	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	64.74	70.74	57.00	59	92,27

Sumber : Dinas PPKBP3PA. Kab. Lembata Tahun 2017

Dari tabel diatas menunjukan bahwa di tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah akseptor KB sebesar 14.909 bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah 8.951.Capaian terendah di tahun 2014, yakni 8.410. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat Kabupaten Lembata khususnya pasangan suami istri mulai menyadari pentingnya mengikuti program KB.

Prosentase Keluarga Sejahtera juga mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 85.87%. Sedangkan prosentase terendah di tahun 2014, yakni hanya 48.39%.

2.3.1.15. Perhubungan

Kondisi Perhubungan tergambar dalam beberapa indikator sebagaiman dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.2.61
Kondisi Pembangunan Perhubungan Tahun 2012-2016

No	Indikator	Capaian Kinerja			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	170.901	189.719	698,400	168.333
2.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	824	819	60	489
3.	Jumlah Terminal/ pelabuhan laut & udara	6	7	7	7
4.	Jumlah Angkutan Darat	461	528	832	902

Sumber : Dinas PUPR Kab. Lembata Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan gambaran kondisi perhubungan di Kabupaten Lembata dalam kurun waktu 2012-2016. Dari tabel itu diketahui jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 168.333 di tahun 2016 sebelumnya 698.400 di tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan pribadi masyarakat Kabupaten Lembata. Jumlah uji kir angkutan umum 2016 juga meningkat di tahun 2012, yakni824 dan turun dengan capain terendah 60 di tahun 2015.sebesar 489. Jumlah terminal/pelabuhan laut udara tidak mengalami perubahan.

Kemudian jumlah angkutan darat mengalami peningkatan sebesar 902 di tahun 2016, jumlah barang yang terangkut angkutan umum juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 28.917,5 di tahun 2016 yang sebelumnya berjumlah 349 di tahun 2015. Hal ini menggambarkan bahwa ada peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Lembata.

2.3.1.16. Komunikasi dan Informasi

Gambaran Kondisi Pembangunan Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Lembata tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.2.62
Kondisi Pembangunan Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Lembata Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah surat kabar nasional / lokal	2	2	2	3	3
2	Jumlah siaran radio lokal aktif	2	1	1	1	-
3	Website Milik Pemda	1	1	1	1	1
4	Jumlah Menara telepon genggam	13	13	26	27	27
5	Jumlah Menara telepon stasioner	1	1	1	1	1
6	Prosentase Penduduk yang menggunakan HP/Telpon	25.83	25,80	27,12	28,00	27

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lembata Tahun 2015

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa pembangunan sarana komunikasi dan informasi di kabupaten Lembata masih terbatas. Cakupan pelayanan komunikasi dan informasi belum memadai. Hal ini bisa dilihat dari jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlah siaran radio aktif, jumlah website milik Pemda, jumlah menara telpon yang mana ketersediaannya tidak mengalami peningkatan dan terbatas sejak tahun 2012 hingga tahun 2016. Sementara jumlah Menara telpon genggam sedikit mengalami peningkatan jumlah dari 13 di tahun 2012 menjadi 27 di tahun 2016. Peningkatan jumlah menara telpon genggam yang tidak signifikan ini berdampak pada

prosentase penduduk yang menggunakan Hp/Telp. Prosentase tertinggi di tahun 2015, yaitu 28% dan terendah di tahun 2013 sebesar 25.80%.

2.3.1.17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Gambaran cakupan kinerja pembangunan daerah bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Lembata pada tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.2.63
Jumlah Koperasi di Kabupaten Lembata tahun 2013-2016

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Koperasi berbadan Hukum	82	85	91	103
2	Jumlah Koperasi Aktif berbadan Hukum	58	60	84	90
3	Jumlah Pra Koperasi/ belum badan Hukum	72	93	106	155

Sumber : Dinas Koperindag dan UMKM Lembata 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah koperasi di Kabupaten Lembata, baik peningkatan jumlah koperasi berbadan hukum, koperasi aktif berbadan hukum dan jumlah pra koperasi/ belum berbdan hukum. Hal ini berarti bahwa kehidupan kopeasi di Kabupaten Lembata mengalami perkembangan. Jumlah koperasi berbadan hukum di tahun 2016 mencapai 103 koperasi dan yang aktif sebanyak 90 koperasi di tahun 2016.

2.3.1.18. Penanaman Modal

Penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha/industri, semakin besar dan berkembang usaha/industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut.Penanaman modal di Kabupaten Lembata disajikan dalam tabel ini.

Tabel.2.64
Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kabupaten Lembata Tahun 2013-2016

Indikator		Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	3	4	4	5	4
2	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional	31.528.628.444	31.840.793.082	32.152.957.720	32.465.122.358	38.812.563.161

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa jumlah investor di kabupaten Lembata masih kurang. Data 2013 menunjukkan bahwa ada 4 investor di tahun 2012 dan bertambah menjadi 5 investor di tahun 2015 kemudian turun lagi menjai 4 investor di tahun 2016. Namun dalam indikator nilai investasi justru mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Nilai investasi meningkat dari angka 19.289.399.425 di tahun 2012 menjadi 40.343.935.361 di tahun 2016.

2.3.1.19. Kepemudaan dan Olahraga

Keberhasilan pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga ditentukan oleh beberapa faktor pendukung antara lain : Klub Olahraga, Jumlah Organisasi Olahraga, Jumlah Gedung Olahraga, Event-event olahraga, Jumlah Lapangan olahraga, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel.2.65
Capaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Di Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Aspek kesejahteraan masyarakat					
	1. Jumlah klub olahraga				60	60
2.	Aspek Pelayanan Umum					
	1. Jumlah organisasi olahraga	12	12	*12*	12	12
	2. Jumlah gedung olahraga	-	-	-	-	-
	3. Jumlah kegiatan kepemudaan	1	2	*2*	2	2
	4. Jumlah kegiatan olahraga	3	3	*3*	3	3
	5. Lapangan olahraga	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Sumber : Dinas PKO Lembata Tahun 2016

Tabel di atas menggambarkan kondisi pembangunankepemudaan dan olahraga di Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016. Jumlah klub olahraga pada tahun 2015 sebanyak 60 klub, jumah organisasi olahraga sejak tahun 2012-2016 masih sama, yaitu sebanyak 12 organisasi, jumlah kegiatan kepemudaan sampai tahun 2016 sebanyak 2 kegiatan, jumlah kegiatan olahraga dari tahun 2012-2016 tetap sama, yaitu 3 kegiatan. Sementara jumlah lapangan olahraga per 10000 penduduk, kondisi tahun 2016 adalah 0,36.

2.3.1.20. Statistik

Indikator statistik dapat diketahui dengan adanya buku kabupaten dalam angka dan buku PDRB Kabupaten. Gambaran statistik dapat dilihat pada tebel berikut :

Tabel.2.66
Kondisi Statistik Kabupaten Lembata Tahun 2012 - 2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kab. Lembata Tahun 2016

2.3.1.21. Kebudayaan

Pembangunan Kebudayaan suatu daerah tergambar melalui beberapa indikator, seperti Penyelenggaraan Festival Budaya, Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan. Berikut gambaran pembangunan kebudayaan di Kabupaten Lembata tahun 2012-2016 :

Tabel.2.67
Kondisi Kebudayaan di Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Penyelenggaraan Festival Budaya	1	3	2	2	3
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	2	6	6	10	12
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	5	5	3	14	6

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lembata Tahun 2016

Dari tabel di atas diketahui bahwa frekuensi penyelenggaraan festival budaya di kabupaten Lembata tertinggi berada di tahun 2013 dan tahun 2016, yakni sebanyak 3 kali dan hanya 1 kali di tahun 2012. Sedangkan ketersediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya semakin meningkat hingga mencapai jumlah tertinggi di tahun 2016, yakni sebanyak 12 buah.

2.3.1.22. Perpustakaan

Pembangunan Perpustakaan melipitu beberapa indikator, antara lain: Jumlah Perpustakaan, Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun, Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah.Kondisi pembangunan kepustakaan di Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016 seperti pada tabel berikut ini:

Tabel.2.68
Kondisi Kepustakaan Daerah di Kab. Lembata Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Perpustakaan	1	1	1	1	1
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	7.636	7.999	2.930	5.117	3.621
3	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	16.519	17.309	18.203	19.269	20.274

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lembata 2017

Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah perpustakaan di Kabupaten Lembata tidak mengalami peningkatan. Hanya terdapat 1 (satu) perpusatakaan di kabupaten Lembata sejak tahun 2012 hingga tahun 2016. Sedangkan jumlah pengunjung perpustakaan pertahun terbanyak pada tahun 2012, yakni 7.636 orang dan paling sedikit di tahun 2014 sebanyak 2.930 orang.

2.3.1.23. Kearsipan

Pembangunanan Kearsipan mencakup Pengelolaan Arsip secara Baku dan Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM. Kondisi pembangunan kearsipan Kabupaten Lembata tahun 2012-2016 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.69
Kondisi Pembangunan Kearsipan Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pengelolaan arsip secara baku	-	-	-	-	2,33
2	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	-	1	1	1	2

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lembata 2017

Tabel di atas memperlihatkan cakupan pengelolaan arsip secara baku baru mencapai 2.33% di tahun 2016 sedangkan jumlah kegiatan peningkatan SDM masih sedikit frekuensinya di mana paling banyak 2 kali, yaitu pada tahun 2016.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

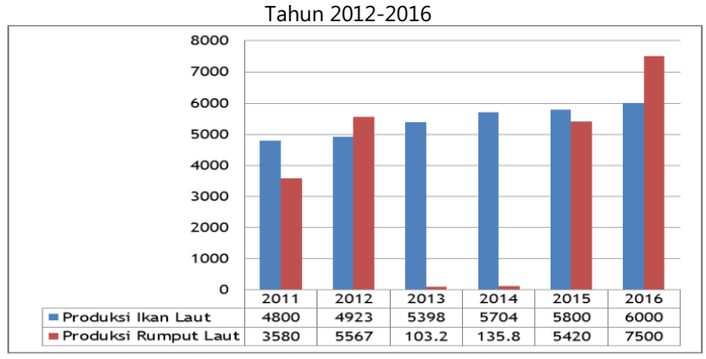
2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

Luas wilayah lautan Kabupaten Lembata mencapai 72,59% dari total luas wilayah Kabupaten Lembata. Hal ini menunjukan bahwa potensi wilayah laut tersedia cukup besar untuk dikelolah secara bijaksana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lembata.

Pada sektor ini, pemerintah daerah mengarahkan pengembangan pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan, memajukan kualitas desa pantai melalui peningkatan dan diversifikasi produksi ikan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, serta meningkatkan nilai ekspor.

Khusus budidaya rumput laut, merupakan komoditas strategis unggulan yang perlu menadapat perhatian khusus. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Lembata memilki luas lahan potensial untuk pengembangan rumput laut, seluas 5.730 Ha yang tersebar di 9 kecamatan dengan kondisi laut yang sangat cocok dan strategis untuk jenis usaha ini. Adapun perkembangan produksi hasil kelautan dan perikanan dapat dilihat pada gambar berikut:

Diagram 2.5.
Data Produksi Ikan dan Rumput Laut di Kabupaten Lembata
Tahun 2012-2016



	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produksi Ikan Laut	4800	4923	5398	5704	5800	6000
Produksi Rumput Laut	3580	5567	103.2	135.8	5420	7500

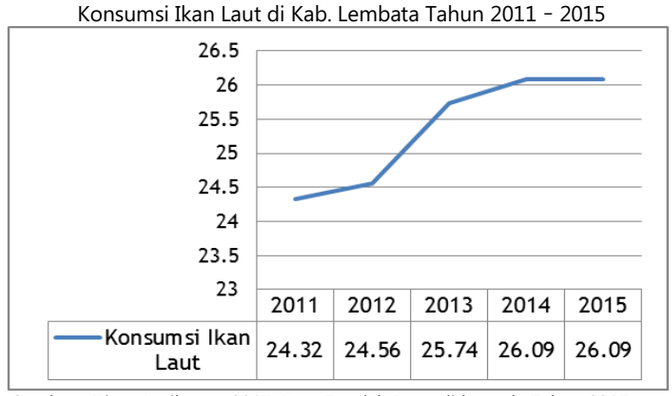
Sumber : Dinas Perikanan Kab. Lembata Tahun 2017

Dari data diatas diketahui bahwa produksi ikan laut meningkat dari tahun ke tahun.Pada tahun 2016, kenaikan produksi ikan tangkap mencapai 92,3% atau 6000 Ton dari target 6.500 Ton produksi ikan tangkap. Sedangkan pada tahun 2015, kenaikan produksi ikan tangkap mencapai 5.800 Ton atau 98% dari target 5.900 Ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, maka jumlah kenaikan produksi ikan tangkap mengalami peningkatan dari 5.800 Ton ke 6000 Ton.

Pada tahun 2016, jumlah produksi rumput laut mencapai 7.500 Ton atau 100% dari target 7.500 ton produksi rumput laut. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah produksi rumput laut mencapai 7.375 Ton atau 98% dari target 7.500 Ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, maka pada tahun 2016 prosentase kenaikan produksi rumput laut mengalami peningkatan dari 7375 Ton ke 7500 Ton.

- Konsumsi Ikan

Grafik 2. 10.
Konsumsi Ikan Laut di Kab. Lembata Tahun 2011 – 2015



	2011	2012	2013	2014	2015
Konsumsi Ikan Laut	24.32	24.56	25.74	26.09	26.09

Sumber : Dinas Perikanan 2017, Data Terolah Bappelitbangda Tahun 2017

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa konsumsi ikan laut di Kabupaten Lembata mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah konsumsi ikan laut mencapai 26,09 %.

Untuk cakupan bina kelompok nelayan Pemerintah Kabupaten terus memperhatikan serta pembinaan kelompok nelayan serta memperbaiki pemenuhan sarana pendukungnya.

Tabel.2.70
Jumlah Nelayan dan Sarana Prasarana yang Dimiliki
Di Kabupaten Lembata Tahun 2015 - 2016

No	Uraian	Tahun	
		2015	2016
1	Nelayan		
	Nelayan Penuh	768	994
	Nelayan Sambilan Utama	564	627
	Nelayan Sambilan Tambahan	858	865
2	Sarana/Prasarana		
	Motor Tempel	341	386
	Kapal Motor < 5 GT	131	250
	Kapal Motor > 5 GT	51	56
	Perahu Tanpa Motor	1006	986

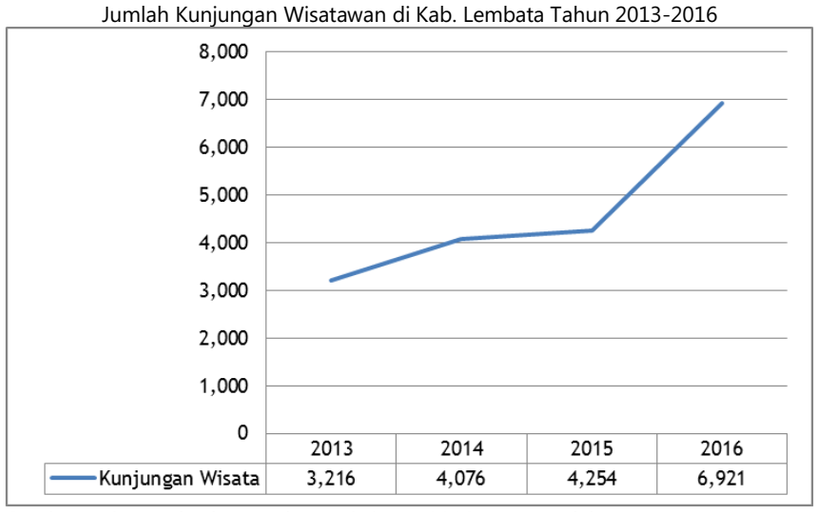
Sumber : Dinas Perikanan Kab. Lembata Tahun 217

Jumlah nelayan dari tahun 2016 menigkat dari tahun 2015.Begitu juga dengan sarana prasarananya. Untuk nelayan yang menggunakan perahu tanpa motor mengalami penurunan pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini disebabkan karena bertambahnya penggunaan kapal jenis motor temple, kapal motor < 5 GT dan kapal motor > 5 GT.

2.3.2.2. Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Lembata memilki potensi ekonomi yang cukup besar jika dikelolah secara baik.Pertumbuhan sektor pariwisata sangat bergantung pada infrastruktur pendukung seperti sarana dan prasarana transportasi dan perhotelan. Selain itu peningkatan pengelolan wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus melalui penyelenggaraan event-even pariwisata rutin tahunan perlu terus digalakan dan ditingkatkan statusnya menjadi even tahunan nasional maupun internasional dalam rangka menarik minat wisatawan dalam daerah maupun wisatawan asing. Untuk mengetahui jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lembata dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2. 11.
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kab. Lembata Tahun 2013-2016



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Periwisata 2016, Data terolah Bappelitbangda Tahun 2017

Dari grafik diatas diketahui jumlah kunjungan wisatawan sejak tahun 2013 – 2016 mengalami tren kenaikan yang positif.Hal ini diketahui dari jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2016 sebesar 6.921.

2.3.2.3. Pertanian

- Pertanian

Perkembangan produksi Tanaman Pangan dari tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.71
Data Produksi Komoditi Pertanian Tahun 2012-2016 (Ton)

No	IndikatorKinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Padi	9.618	14.973	12.795	10.509	7.671,39
2.	Jagung	22.547	24.708	25.462	25.384	17.942
3.	Ubi Kayu	25.137	33.192	66.934	60.062	39,742
4.	Ubi Jalar	1.692	1.621	1.818	1.184	858
5.	Kacang Tanah	1.675	965	1.213	1.338	409
6.	Kacang Hijau	115	178	268	492	74

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lembata 2016

Disamping tanaman padi dan palawija, tanaman hortikultura yang terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan juga merupakan komoditi penting yang diusahakan pada sub sektor tanaman pangan. Jenis komoditi ini mempunyai kandungan bermacam-macam vitamin yang sangat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan serta membangun daya tahan tubuh manusia. Dengan demikian tanaman hortikultura juga banyak diusahakan oleh petani karena mempunyai peranan dalam perekonomian daerah. Produksi hortikultura di Kabupaten Lembata untuk sayur-sayuran dan buah-buahan tahun 2012-2015 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel.2.72
Produksi Sayur-Sayuran di Kabupaten Lembata
Tahun 2012-2015 (Ton)

Jenis Tanaman	2012	2013	2014	2015
1	3	4	5	6
Bawang Merah	2,0	7,0	24	38,8
Bawang Putih	-	-	-	
Bawang Daun	-	-	-	
Kentang	-	-	-	
Kubis	750	-	-	
Petsai/Sawi	860	1.085	1.140	563
Wortel	-	-	-	
Lombok	-	-	-	
Kacang-kacangan	62	545	180	543
Cabe	1,3	6,8	4	19,7
Tomat	30	410	680	875
Terung	304	1.294	570	1.977
Buncis	1	-	-	
Ketimun	157	377	240	876
Labu Siam	290	1.934	300	3.698
Kangkung	496	1.636	1.550	2.017
Bayam	252	1.228	1.340	980

Sumber : BPS Kab. Lembata-Dinas Pertanian dan Kehutanan-Tahun 2015;

Tabel.2.73
Produksi Buah-buahan Kabupaten Lembata Tahun 2012-2015 (Ton)

Jenis Tanaman	2012	2013	2014	2015
1	3	4	5	6
Alpokat	418	3.160	3.358	7.405
Mangga	1.287	4.980	8.502	5.398
Rambutan	69	726	1.138	908,50
Jeruk Siam	129	588	-	-
Jeruk Keprok	169	2.431	1.054	65,50
Jambu Biji	554	962	1.340	695,00
Jambu Air	626	783	222	373,00
Pepaya	5.506	60.384	27.715	17.771
Pisang	28.900	30.356	26.111	11.738
Nenas	8.995	7.603	2.995	5.734
Salak	15	588	627	182,80
Nangka	794	4.251	3.023	4.688
Sawo	22	282	296	156,00
Belimbing	384	44	205	50,00

Sumber : BPS Kab. Lembata-Dinas Pertanian dan Kehutanan-Tahun 2015

Sub sektor perkebunan merupakan salah satu sub sektor andalan Kabupaten Lembata karena sub sektor ini cukup berperan sebagai penyumbang pendapatan asli daerah. Produksi perkebunan mempunyai nilai ekonomis tinggi dan menyerap tenaga kerja. Hasil atau produksi sub sektor ini merupakan bahan baku industri pengolahan, di samping itu keberadaan sub sektor ini pohonnya sebagai pelestari lingkungan hidup.

Di Lembata, sub sektor perkebunan umumnya yang diusahakan oleh masyarakat atau perkebunan rakyat. Sedangkan perkebunan besar belum ada. Berikut ini disajikan data produksi berbagai komoditi perkebunan di Kabupaten Lembata Tahun 2012-2015.

Tabel.2.74
Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)
Kabupaten Lembata Tahun 2012-2015

Jenis Tanaman	2012	2013	2014	2015
1	*3*	*4*	*5*	*6*
Kelapa	2.328,69	2.330,30	2.335	2.834,90
Kopi	314,50	212,30	168	187,17
Cengkeh	0,70	0,70	1	2,57
Kakao	115,60	115,60	166	191,82
Jambu Mente	1.520,10	1.300,80	1.452	1.747,69
Pinang	50,10	50,10	67	71,31
Kapok	26,60	26,60	25	27,70

Sumber : BPS 2015, Dinas Pertanian dan Kehutanan 2015

- Peternakan

Sektor peternakan juga tak sedikit memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan demi menujang proses pembangunan di kabupaten Lembata. Berikut kondisi peternakan di kabupaten Lembata.

Tabel.2.75
Data Populasi Ternak di Kabupaten Lembata Tahun 2011 – 2016

NO	NAMA TERNAK	POPULASI					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Sapi	3.340	3.425	4.164	4.247	4.467	4.619
3	Kuda	1.362	1.354	1.335	1.361	1.385	1.411
4	Kambing	39.423	39.423	36.334	37.112	38.131	39.060
5	Domba	1.132	1.132	1.439	1.445	1.451	1.511
6	Babi	49.081	49.081	38.074	39.566	41.087	42.699
7	Unggas	**125.963**	**163.530**	**223.028**	**205.708**	**283.900**	**313.704**
a	Ayam Kampung	119.232	124.800	125.684	126.941	128.210	130.775
b	Ayam Petelur	**105**	**0**	**0**	**0**	**300**	**400**
c	Ayam Pedaging	**3.847**	35.818	95.000	76.400	**153.000**	**180.116**
d	Itik/Bebek	**2.779**	**2.912**	**2.344**	**2.367**	**2.390**	**2.413**

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Lembata Tahun 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa populas/ternak Sapi di kabupaten Lembata pada tahun 2016 berjumlah 4.619 ekor, kuda 1.411 ekor, Kambing 39.060 ekor, domba 1.511 ekor, Babi 42.699 ekor, Unggas 313.704 ekor. Dari data terlihat bahwa populasi ternak terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016.

Untuk data produksi HMT dan padang penggembalaan ternak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2.76
Produksi HMT dan Padang Penggembalaan Ternak
di Kabupaten LembataTahun 2011 – 2016

URAIAN		Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
a	Luas Padang Penggembalaan (Ha)	22.895	22.895	22.895	22.895	22.895	22.895
b	Yang Belum Dimanfaatkan (Ha)	16.243	16.243	16.243	16.243	16.243	16.243
c	Yang Sudah Dimanfaatkan (Ha)	6.652	6.652	6.652	6.652	6.652	6.652
d	% Pemanfaatan	29%	29%	29%	29%	29%	29%
		16.243	0,29	0,2905438			
Produksi HMT							
a	Rumput Lapangan (Ton)	5.259	5.259	5.255	4.953	4.871	4.854
b	Rumput Unggul (Ton)	756	756	771	786	729	682
c	Legum (Ton)	266	330	340	520	589	590

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Lembata Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa hingga tahun 2016 luas padang penggembalaan ternak di kabupaten Lembata seluas 22.895 Ha. Dari keseluruhan luas lahan penggembalaan ini masih terdapat 16.243 ha lahan yang belum dimanfaatkan untuk lahan penggembalaan ternak dan hanya sekitar 6.652 ha yang sudah dimanfaatkan untuk lahan penggembalaan ternak.

Sementara itu untuk produksi HMT pada tahun 2016, khusus rumput lapangan berkurang dari tahun sebelumnya menjadi 4.854 ton, produksi rumput unggul juga menurun menjadi 682 ton dan hanya produksi HMT jenis legun yang meningkat menjadi 590 ton disbanding tahun- tahun sebelumnya. Untuk data produksi daging dapat diihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.2.77
Data Produksi Daging di Kabupaten Lembata Tahun 2013 - 2017 (Kg)

NO	KOMODITI	TAHUN			
		2013	2014	2015	2016
1	Sapi	25.233,84	25.736,00	27.100,00	27.991,14
2	Kuda	8.819,81	8.989,15	9.126,00	9.321,91
3	Kambing	109.000	111.334,64	114.340,00	11.718,00
4	Babi	693.898,65	721.099,48	748.811,25	778.189,28
5	Domba	4.092,20	4.046,53	408,000	4.230,80
6	Ayam Buras	122.730,43	123.957,73	125.197,26	127.701,79
7	Ayam Pedaging	4.901,40	21.437,00	96.390,00	113.437,00
8	Itik	25,30	25,55	26,00	26,33
9	Bebek	812,20	820,32	828,44	836,11
10	Merpati	332,43	339,10	345,77	343,24
Total		**860.955,26**	**1.017.785,50**	**1.122.572,72**	**1.073.795,60**

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Lembata Tahun 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 jumlah produksi daging terbanyak adalah daging Babi sebanyak 778.189,28 ton, menyusul Ayam Buras sebanyak 127.701,79, dan Ayam Pedaging 113.437,00 ton. Sementara itu, pada tahun 2016 jumlah produksi daging paling sedikit adalah Itik sebanyak 26,33 ton. Untuk kelompok ternak di kabupaten Lembata sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel.2.78
Data Kelompok Ternak di Kabupaten Lembata
Tahun 2011 - 2016 (Kg)

No	Kelompok Ternak	2011	2012	2013	2014	2015	2016	% Klpk Aktif
A	**Jumlah Kelompok Berdasarkan Jumlah Ternak**							
1	Sapi	5	8	13	13	17	17	17%
2	Kambing	-	3	3	5	10	14	12%
3	Babi	-	1	1	1	9	16	16%
4	Unggas	-	-	-	-	4	4	25%
B	1. Total	5	12	17	19	40	51	
	2.% Kelompok Aset	20%	25%	25%	20%	20%	25%	25%
C	**Kelompok Berdasarkan Kelas Kemampuan**							
	1. Pemula	5	12	17	19	40	51	
	2. Madya	-	-	-	-	-	-	
	3. Lanjut	-	-	-	-	-	-	

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Lembata Tahun 2017

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2016 dari total 51 kelompok ternak jumlah kelompok ternak terbanyak adalah peternak Sapi dengan jumlah kelompok 17 kelompok menyusul kelompok ternak Babi (16 kelompok), dan paling sedikit adalah kelompok peternak Unggas sebanyak 4 kelompok. Dan dari ke 51 kelompok ternak ini semuanya masih dalam kategori kelompok pemula. Untuk data produksi telur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.2.79
Data Produksi Telur di Kabupaten Lembata Tahun 2013 - 2016 (Kg)

NO	JENIS UNGGAS	TAHUN			
		2013	***2014***	***2015***	***2016***
1	Ayam Lokal	175.957,60	177.717,18	179.494,00	126.940,84
2	Ayam Petelur			3.240,00	324,000
3	Bebek	18.283,20	18.466,03	15.917,00	2.367,44
4	Itik	569,4	575,00	500	376,38
Total		**194.810,20**	**196.758,21**	**199.151,00**	**130.008,66**

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Lembata Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah produksi telur pada tahun 2016 sebanyak 126.940,84 kg yang berasal dari Ayam Lokal, 324.000 kg dari Ayam Petelur, 2.367 kg dari bebek dan 367,38 kg dari itik. Produksi telur pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mengenai situasi penyakit ternak pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.80
Data Situasi Penyakit Ternak di Kabupaten Lembata
Tahun 2011 - 2016 (Kg)

NO	JENIS PENYAKIT	JUMLAH KASUS PERTAHUN					
		2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Scabies	619	359	388	447	559	449
2	Streptoccosis	21	14	19	10	29	14
3	Def. Vit. + Mineral	368	310	280	212	280	247
4	Helminthiasis	756	367	258	214	362	367
5	Pink Eye	639	254	254	208	254	254
6	Diare / Enteritis	442	375	332	210	375	375
7	Vulnus	67	65	85	55	65	65
8	InfeksiSlrn Napas	78	83	88	47	83	83
9	Collibacillosis	73	96	114	32	96	96
10	Prolapsus	5	1	6	4	7	1
11	Mastitis	10	7	9	9	22	7
12	Bloat	37	12	13	5	12	12
13	ND	600	244	290	160	244	244
14	CRD	62	70	70	37	70	70
15	Coccidiosis	16	14	19	10	14	14
16	Infksi Slrn Kncing	7	8	12	7	13	8
17	BEF	13	9	11	11	11	9
18	Orf	32	14	17	18	17	14
19	Rabies	5	4	6	546	4	4
20	Hog Cholera	1322	2.312	351	~	~	~
21	Distokia		2	4	7	1	1
22	Metritis		1	3	-	~	~
23	Suspet SE				12		

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Lembata Tahun 2017

Dari semua jenis ternak yang ada, dapat dihitung pengeluaran dan pemasukan ternak serta bahan asal ternak. Untuk pengeluaran ternak dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel.2.81
Data Pengeluaran Ternak dan Bahan Asal Ternak Tahun 2012 - 2016 (ekor)

NO	URAIAN	POPULASI				
		2012	2013	2014	2015	2016
I	TERNAK BESAR					
1	Sapi	19	148	151	70	39
2	Kerbau	0	0	153	0	0
3	Kuda	25	124	0	65	28
II	TERNAK KECIL					
1	Kambing	115	849	1.264	2.588	2.135
2	Domba	18	0	0	2	0
3	Babi	3	383	538	254	27
III	UNGGAS (Ekor)					74
1	DOC (Ekor)	0	0	0	0	0
2	Broiler (Ekor)	0	0	0	30	0
3	Buras (Ekor)	19	0	0	63	0
IV	HASIL TERNAK					
1	Daging (Kg)	0	0	0	0	0
2	Telur	0	0	0	0	0
V	HASIL IKUTAN TERNAK					
1	Kulit (Lembar)	0	2.900	2.760	130	0
2	Tulang (Kg)	0	0	140	0	0
VI	PAKAN TERNAK (KG)	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Lembata Tahun 2017

Dari tabel diatas diketahui pengeluaran ternak terbesar untuk ternak besar pada tahun 2016 adalah sapi dengan jumlah 39 ekor jika dibandingkan pada tahun 2015 yang sebanyak 70 ekor. Untuk ternak kecil yakni kambing dengan jumlah 2.135 ekor.

Tabel.2.82
Data Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak Tahun 2012 - 2016 (ekor)

NO	URAIAN	POPULASI				
		2012	2013	2014	2015	2016
I	TERNAK BESAR					
1	Sapi	155	2	3	135	69
2	Kerbau	0	0	0	0	0
3	Kuda	0	0	14	0	0
II	TERNAK KECIL					
1	Kambing	33	10	213	177	157
2	Domba	2	0	0	0	54
3	Babi	0	0	0	0	0
III	UNGGAS (Ekor)					
1	Petelur	-	-	-	300	400
2	Broiler (Ekor)	35.818	95.000	76.400	152.200	**180.116**
3	Buras (Ekor)	0	0	0	0	0
IV	HASIL TERNAK					
1	Daging (Kg)	210	0	0	1.560	490

NO	URAIAN	POPULASI				
		2012	2013	2014	2015	2016
2	Telur	5.210	54.000	54.000	559.000	-
V	**HASIL IKUTAN TERNAK**					
1	Kulit (Lembar)	0	0	60	0	0
2	Tulang (Kg)	0	0	0	0	0
VI	**PAKAN TERNAK (KG)**	2.200	3.500	2.000	139.600	29.950

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Lembata Tahun 2017

Dari tabel diatas diketahui pemasukan ternak terbesar untuk ternak besar pada tahun 2016 adalah sapi dengan jumlah 69 ekor jika dibandingkan pada tahun 2015 yang sebanyak 135 ekor. Untuk ternak kecil yakni kambing dengan jumlah 157 ekor. Sedangkan unggas yakni broiler sebanyak 180.116 ekor.

2.3.2.4. Kehutanan

Tabel.2.83
Data Produksi dan Produktivitas Komoditi Kehutanan Tahun 2013 – 2016

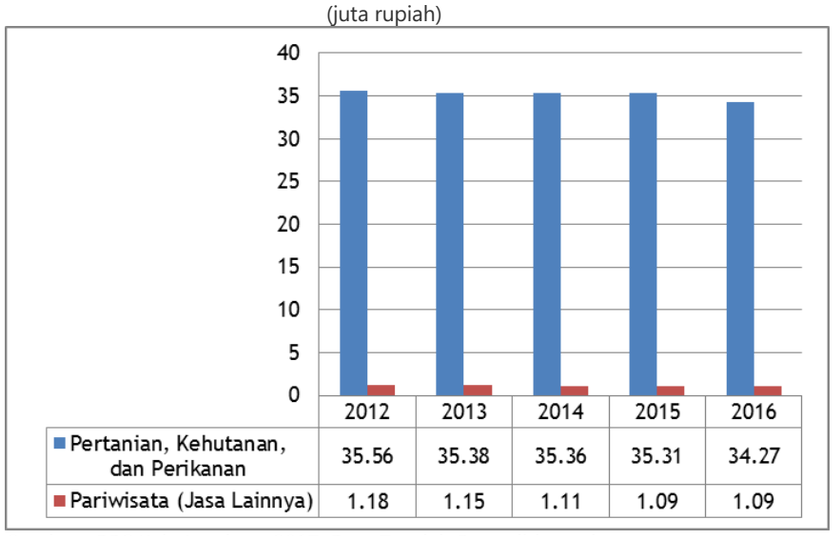
No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja			
		2013	2014	2015	2016
1.	Luas hutan dan lahan kritis yang direhab (Ha)	2.706	3.107	10,968	3100
2.	Total hutan dan lahan kritis	86.266	85.865	76.177	74.010
3.	RHL Kritis (2/3%)	3,37	3,35	14.75	0,04
4.	Produksi Kemiri (isi) = Kg	95.700	203,350	93,177	2.000
5.	Produksi Asam (isi) = Kg	5.000	203,801	54,906	68.000
6.	Kayu Kelas II (Rimba Campuran) = m3	26	3.148	594	34.5

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata Tahun 2016

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis meningkat dari tahun 2013 – 2016.Pada tahun 2013 Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhab 2,706 ha dan pada tahun 2016 menjadi 3100 ha. Hal ini berpengaruh terhadap luas hutan dan Lahan Kritis. Selain kawasan hutan lindung yang perlu dilakukan konservasi, hutan produksi juga harus menjadi perhatian pemerintah agar hasil hutannya dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya.Lahan kritis di Kabupaten Lembata menurun setiap tahunnya.Pengurangan lahan kritis ini berupa fungsi menjadi lahan produktif.

Sektor Perikanan dan kelautan, pertanian, kehutanan dan Pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Lembata. Untuk mengetahui kontribusi sektor tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Diagram 2.6.
Kontribusi Sektor Pertanian Kehutanan Perikanan dan
(juta rupiah)



Sumber : BPS Kab. Lembata 2017, Data Terolah Bappelitbangda

Dari data diketahui bahwa kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mempunyai nilai kontribusi yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lembata jika dibandingkan dengan sektor pariwisata.Pada tahun 2016 terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB namun tetap berada kontribusi paling besar terhadap PDRB Kabupaten Lembata.

2.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber energi listrik sebagian besar berasal dari PLN sedangkan sebagian lainnya berasal dari PLTD yang dikelola oleh pemerintah daerah.Dari Tahun ke tahun jumlah desa/kelurahan yang terlayani listrik semakin meningkat. Rasio elektrifikasi di Kabupaten Lembata sebagaimana termuat dalam tabel berikut ini :

Tabel.2.84
Elektrifikasi Desa Berlistrik Kabupaten Lembata Tahun 2014-2016

No.	Lokasi pelayanan/ Kecamatan	Jumlah desa/ kelurahan	Jumlah desa/kelurahan terlayani listrik			Jumlahdesa / kelurahan yang belum ada listrik		
			2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nubatukan	18	15	16	18	3	2	0
2.	Lebatukan	17	13	13	13	4	4	4
3.	Ile Ape	17	16	16	16	1	1	1
4.	Ile Ape Timur	9	9	9	9	0	0	0
5.	Omesuri	22	18	18	18	4	4	4
6.	Buyasuri	20	18	18	18	2	2	2
7.	Atadei	15	5	6	6	10	9	9
8.	Nagawutung	18	13	14	14	5	4	4
9.	Wulandoni	15	14	14	14	1	1	1
a.	JumlahDesa	**151**	**121**	**124**	**126**	**30**	**27**	**25**
b.	Bobot Elektrifikasi (%)		**80.13**	**82.12**	**83.44**	**19.87**	**17.88**	**16.56**

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017

Dari tabel diatas diketahui masih terdapat beberapa desa di Kabupaten Lembata yang belum terlayani listrik.Pada tahun 2016 penduduk di kecamatan Nubatukan dan ile Ape Timur semuanya sudah memakai listrik. Pada tahun Masih sebanyak 16,56 % dari total masyarakat yang belum terlayani listrik.

Khusus untuk sumber daya mineral, Kabupaten Lembata memprioritaskan pada pertambangan golongan C. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.85
Kinerja Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Listrik
Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertambangan Tanpa Ijin	53.85	49.22	64.33	62.72	64.33
2.	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	0,95	3,93	0,58	0,47	0,58
3.	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	85,00	90,00	95,00	80,00	80,00

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017

Dari tabel di atas diketahui bahwa rasio jumlah kasus pertambangan tanpa ijin pada tahun 2016 semakin banyak, yakni 64.33 dibandingkan tahun 2013, yaitu 49.22 ataupun angka rasio 62.72 pada tahun 2015.Sedangkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Lembata masih sangat pada periode tahun 2012-2916.Pada tahun 2016 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB sebesar 0.58% Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB terbesar pada tahun 2013, yaitu 3.93%.Sementara itu, rasio ketersediaan daya listrik mencapai angka 80.00% pada tahun 2016, lebih sedikit capaian tahun 2014, yaitu 90.00%.

2.3.2.6. Perindustrian dan Perdagangan

Industri di Kabupaten Lembata yang didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga dengan jumlah 339 unit pada Tahun 2015, mengalami peningkatan sebesar 33% sehingga mennjadi 506 unit di tahun 2016. Sangat diharapkan adanya peningkatan di tahun berikutnya oleh karena itu factor pendukung seperti Ketersediaan Modal, Stabilias Harga Bahan Baku, keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu ditingkatkan lagi.

Sektor perdagangan merupakan penggerak utama roda perekonomian daerah.Aktivitas perdagangan diperankan oleh dunia usaha/pelaku ekonomi (produsen) dan pelanggan (konsumen).Komoditas perdagangan yang dominan adalah hasil bumi seperti mente, kemiri, kopra dan kebutuhan dasar masyarakat (sembako). Jumlah pasar tradisional dan pasar senja sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 29 buah yang tersebar di 9 (sembilan) di tahun 2016 bertambah menjadi 33 buah. Gambaran kondisi perindustrian dan perdagangan di kabupaten Lembata secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

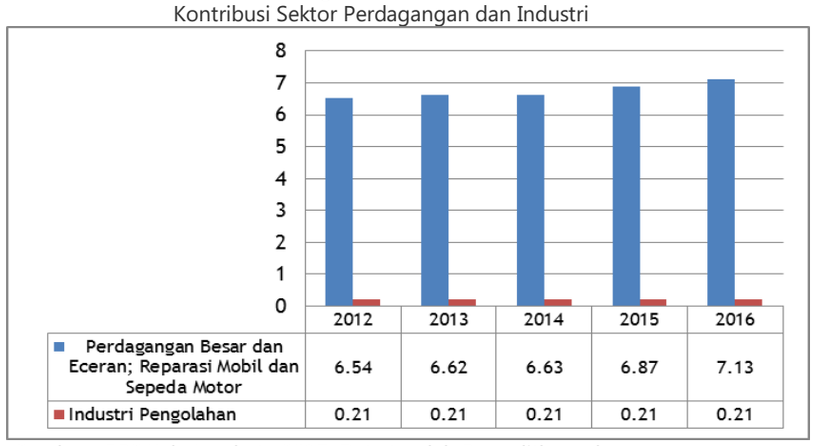
Tabel.2.86
Jumlah Pasar dan Kelompok Kerajinan serta UMKM di Kabupaten Lembata Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*
3.	Jumlah Pasar Tradisonal dan Senja	Pasar	33
4.	Jumlah Binaan Kelompok Pengrajin	Kelompok	60
5.	Jumlah UMKM	UMKM	506

Sumber : Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lembata 2016

Perindustrian dan perdagangan memberikan kontribusi yang cukup terhadap PDRB Kabupaten Lembata. Hal ini dapat disajikan sebagai berikut :

Diagram 2.7.
Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri



	2012	2013	2014	2015	2016
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.54	6.62	6.63	6.87	7.13
Industri Pengolahan	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21

Sumber : BPS Kab. Lembata 2017, Data terolah Bappelitbangda

Kontribusi perdagangan besar dan eceran meningkat dari tahun ke tahun. Terjadi peningkatan 0,26 % dari tahun 2015 sehingga mencapai 7,13% di tahun 2016. Untuk industri pengolahan relative stabil dari tahun 2012 – 2016.

2.3.2.7. Transmigrasi

Kabupaten Lembata memiliki 4 (empat) lokasi transmigrasi lokal yaitu: Waijarang dan Pada di Kecamatan Nubatukan, Wateng di Kecamatan Omesuri serta Twaowutung di Kecamatan Nagawutung.

Indikator Kinerja transmigrasi terfokus padapemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah transmigrasi berupapendidikan dan pelatihan bagi warga transmigrasi lokal sebanyak 70kepala keluarga pada kawasantransmigrasi lokal.Sedangkan pada tahun 2015, pelaksanaan program dan kegiatanterfokus pada pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah transmigrasi berupa penyuluhan tentang transmigrasi umum kepada 40 kepala keluarga pada kawasan transmigrasi lokal.

2.3.3. Fokus Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.3.1. Sekretariat Daerah

Pada Tahun 2016, dilaksanakan dilaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang. Unsur-unsur yang disurvey meliputi 9 aspek dari 14 apek menurut Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2013 antara lain : Prosedur Pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan dan Penanganan Pengaduan.

Dari tabel di atas, hasil survey IKM menunjukkan bahwa pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Lembata masih berada pada pencapaian indeks kepuasan "B" dengan nilai rata-rata 7,6 dari target nilai ratarata 8,0. Sedangkan pada tahun 2015, tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Tabel.2.87
Indikator Perangkat Daerah Kab. Lembata Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Perangkat Daerah					
	1. Sekretariat	3	3	3	3	3
	2. Dinas	12	12	12	12	12
	3. Badan	8	8	8	8	9
	4. Kantor	3	3	3	3	5
	5. Bagian	8	9	9	9	9
	6. Kecamatan	9	9	9	9	9
	7. Kelurahan	7	7	7	8	8
	8. Instansi Vertikal	19	19	19	19	10
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	7,0	7,5	-	7,6

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Lembata Tahun 2017

Tabel.2.88
Nilai, Predikat dan Status AKIP

Tahun	Nilai	Predikat	Status
2013	**31,91**	**C**	**Agak Kurang**
2014	**37,99**	**C**	**Agak Kurang**
2015	**45,25**	**C**	**Agak Kurang**
2016	**45.61**	**C**	**Agak Kurang**

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Lembata Tahun 2017

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai AKIP Kabupaten Lembata dari tahun ke tahun meningkat meskipun dengan predikat C dan status yang masih berada pada level agak kurang. Hal ini menunjukan bahwa dari tahun ke tahun terus dilakukan upaya pembenahan dari segi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban, sehingga diharapkan 5 (lima) tahun kedepan Nilai, Predikat dan Statusnya ditingkatkan menjadi Lebih Baik.

Tabel.2.89
Nilai EKPP

Tahun	Skor	Predikat
2012	**0,952**	**Rendah**
2013	**2,328**	**Tinggi**
2014	**2,254**	**Tinggi**
2015	**2,672**	**Tinggi**
2016	**2,772**	**Tinggi**

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Lembata Tahun 2017

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) dilakukan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncakan. Tujuan utama dari EKPPD adalah untuk menilai kinerja dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dari tabel diatas terlihat bahwa dari tahun ke tahun cenderung terjadi peningkatan Nilai maupun predikat EKPPD dari Rendah ke Tinggi.

Tabel.2.90
Data Desa Sadar Hukum

Tahun	Jumlah	Desa
2015	10 Desa (Sudah Memperoleh SK dari Kemenkum dan HAM)	Tapobali, Balurebong, Lamawara, Lamagute, Panama, Bour, Lusilame, Hingalamamengi, Lolong, Lusiduawutun
2016	9 Desa (Sudah dilakukan pendampingan/Penyuluhan; sedang menunggu SK dari Kemenkum dan HAM)	Atawai, Walangsawah, Doripewut, Bareng, Pada, Aulesa, Muruona, Baopana, Atakera
2017	9 Desa (Sedang Dilakukan Pendampingan/Penyuluhan)	

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata. Lembata, 2017

2.3.3.2. Inspektorat

Tabel.2.91
Gambaran Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2015

Indikator Kinerja	TAHUN							
	2012		2013		2014		2015	
	Adm	Keu	Adm	Keu	Adm	Keu	Adm	Keu
Jumlah Hasil Temuan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lembata	525	334	319	79	280	79	122	54

Sumber: Inspektorat Kab. Lembata Tahun 2017

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah hasil temuan baik admnistrasi maupun keuangan dari tahun 2012 sampai 2015 mengalami penurunan, hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan kabupaten lembata dari tahun ke tahun mengalami perubahan kearah yang lebih baik.

2.3.3.3. Penyelenggara Pelayanan Admnistrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan pelayanan admnistrasi pemeritahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat adalah Perangkat Daerah Kecamatan. Sampai dengan tahun 2017, kecamatan di Kabupaten Lembata terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan yang dapat dilihat pada tabel :

Tabel.2.92
Kecamatan di Kabupaten Lembata

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota
1.	Buyasuri	Wairiang
2.	Omesuri	Balauring
3.	Lebatukan	Hadakewa
4.	Ile Ape	Waipukang
5.	Atadei	Kalikasa
6.	Nagawutung	Loang
7.	Nubatukan	Lewoleba
8.	Wulandoni	Wulandoni
9.	Ile Ape Timur	Lamaau

Sumber : Lembata Dalam Angka, 2016

2.3.4. Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.4.1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat diukur melalui ada tidaknya dokumen perencanaan dan konsistensi program antar dokumen perencanaan daerah. Sedangkan untuk penelitian dan pengembangan dilihat dari jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan. Berikut gambaran kinerja Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Lembata tahun 2012-2016 sebagaimana dapat pada tabel berikut ini :

Tabel.2.93
Kinerja Perencanaan Pembangunan 2012-2016

Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
Dokumen Perda RPJPD yang Ditetapkan	-	-	-	1	-
Dokumen RPJMD yang ditetapkan (Revisi)	1	1	-	-	-
Dokumen RKPD yang ditetapkan/Perubahan RKPD	1	1	1/1	1/1	1/1
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	89.67	90.52	77.14	96.13	97.23
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	1	1	-	-	-

Sumber : Bappelitbangda Kab. Lembata Tahun 2017

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa secara umum sampai dengan tahun 2016 Kabupaten Lembata telah memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan secara lengkap yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata 2005-2025 yang ditetapkan pada bulan Desember 2015, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016 yang ditetapkan pada Bulan Juli 2012 kemudian direvisi dan diperdakan pada bulan Desember 2013, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata yang ditetapkan setiap tahunnya beserta perubahannya.

Sementara itu, Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD terlihat lebih konsisten dalam hal keterkaitan antardokumen perencanaan pada tahun 2016. Hal ini bisa diukur dari prosentase capaian yakni 97.23% atau yang paling tinggi jika dibandingkan tahun- tahun sebelumnya. Ukuran capaian terendah di tahun 2014, yakni 77.14%. Peningkatan juga terlihat dalam jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dihasilkan di mana bertambah menjadi 5 dokumen pada tahun 2016 atau lebih banyak dari sebelumnya.

2.3.4.2. Keuangan

Fokus penunjang urusan pemerintah daerah ini dapat digambarkan melalui kapasitas Pemerintah Daerah terutama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, Pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerahsertameningkatkan SDM aparatur serta kualitas pelayanan publik. Gambaran capaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten Lembata sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel.2.94
Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2012 – 2016

Indikator Kinerja	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Opini BPK terhadap Pengelolaan Keu.Daerah	Disclaimer	Disclaimer	WDP	WDP	WDP

Sumber : BKD Kab. Lembata Tahun 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa Opini BPK pada tahun 2015 terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di kabupaten Lembata adalah WDP sedangkan pada tahun 2016 belum ada opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lembata karena masih menunggu evaluasi temuan hasil pengawasan oleh BPK RI.

Peningkatan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata dengan status WDP disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Lembata telah melakukan pembenahan, terutama dalam penatausahaan aset dan keuangan daerah.Perkembangan hingga tahun 2014, penatausahaan keuangan telah sesuai dengan tuntutan regulasi, sementara pengelolaan aset daerah masih menjadi catatan bagi Pemerintah Kabupaten Lembata untuk berbenah.

2.3.4.3. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Fokus penunjang urusan pemerintah daerah ini dapat digambarkan melalui kapasitas Pemerintah Daerah terutama dalam meningkatkan SDM aparatur. Gambaran capaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten Lembata dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.2.95
Kondisi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lembata
Tahun 2012-2016

Indikator Kinerja	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah aparat yang memiliki kompetensi	-	-	-	-	33
Jumlah ASN	4389	4387	4345	3675	4190
Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat					
1. PIM II	3	-	11	2	1
2. PIM III	5	-	19	12	18
3. PIM IV	9		-	7	20
Jumlah ASN yang Mengikuti Seleksi Jabatan	-	-	-	33	72
Jumlah Peserta Tubel/Ibel	186	214	132	112	112

Sumber : BKDPSDM Kab. Lembata Tahun 2017

Tabel.2.96
Data PNS Berdasarkan Jabatan Struktural Kab. Lembata s/d Tahun 2017

Tesedia (Eselon)		Terisi (Eselon)		LOWONG
II-a	1	II-a	1	-
II-b	30	II-b	25	5
III – a	51	III – a	49	2
III - b	95	III - b	93	2
IV – a	382	IV – a	377	5
IV - b	46	IV - b	45	1

Sumber : BKD-PSDM Kab. Lembata Tahun 2017

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2016 jumlah aparat yang memiliki kompetensi di kabupaten Lembata sebanyak 33 orang. Untuk jumlah ASN, jumlah terbanyak terdapat di tahun 2012, yakni 4.389 orang dan jumlah ASN paling sedikit ada di tahun 2015, yaitu 3.675 orang. Sedangkan jumlah ASN yang mengikuti PIM, baik PIM II,III dan IV terbanyak di tahun 2016, yaitu 39 orang dan paling sedikit 18 orang di tahun 2012. Sementara jumlah

ASN yang mengikuti lelang jabatan sebanyak 72 orang di tahun 2016, lebih banyak dari tahun 2015 yang hanya 33 orang.

Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural terlihat bahwa masih terdapat beberapa jabatan yang kosong sehingga untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu dilakukan upaya pengisian jabatan yang lowong tersebut.

2.3.4.4. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Tabel.2.97
Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kab. Lembata
Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	5	15	17	20	22
2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	10	15	15	25	30

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Lembata Tahun 2017

Dari tabel diatas diketahui bahwa perhatian pemerintah Kabupaten Lembata terhadap binaan organisasi masyarakat, LSM dan OKP setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2012 – 2016.Hal ini diketahui pembinaan politik di daerah pada tahun 2016 sebesar 30.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing suatu daerah dapat diukur dengan melihat beberapa aspek, diantaranya kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur wilayah, fasilitas umum, fasilitas sosial, iklim investasi maupun kualitas sumber daya manusia. Gambaran daya saing Kabupaten Lembata jika ditinjau dari beberapa aspek diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admnistrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Tabel.2.98
Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan
Kabupaten Lembata 2007 – 2015

Tahun	**Makanan**	**Bukan Makanan**	**Rata-rata Pengeluaran**
2007	Rp. 134.133 (66,72)	Rp. 66.894 (33,28)	Rp. 201.027
2008		**Data Tidak Tersedia**	
2009	Rp 194.990 (63,02)	Rp. 91.659 (31,9)	Rp. 286.649
2010	Rp 218.350 (68,02)	Rp. 136.183 (31,98)	Rp. 354.533
2011	Rp. 190.670 (57,69)	Rp. 141.567 (42,61)	Rp. 332.237
2012	Rp. 207.069 (58,25)	Rp. 148.426 (41,75)	Rp. 355.495
2013		**Data Tidak Tersedia**	
2014		**Data Tidak Tersedia**	
2015	Rp. 274.036 (53,00)	Rp. 242.984 (47,00)	Rp. 517.020

Sumber : BPS Kabupaten Lembata Tahun 2015

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran non makanan. Dengan terpenuhinya kebutuhan makanan maka rumah tangga akan dapat memenuhi kebutuhan non makanan. Hal ini akan terlihat pada persentase pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga antara konsumsi makanan dengan non makanan. Dari tabel diatas menunjukan bahwa penduduk Kabupaten Lembata dalam pemenuhan kebutuhannya bukan saja dari segi makanan tetapi juga dari segi non makanan walaupun kedalaman dan sebaran dari peningkatan tersebut tidak dapat digambarkan.Indikator ini cukup memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga kabupaten secara kasar.

Tabel.2.99
Persentase Pengeluaran Rata-Rata Perkapita
Menurut Jenis Pengeluaran Dan Golongan Pengeluaran Sebulan
Kabupaten Lembata Tahun 2015

Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)	Persentase Penduduk
1	2
> 99.999	0,00
100.000 - 149.999	1,25
150.000 - 199.999	7,05
200.000 - 299.999	26,34
300.000 - 499.999	30,72
500.000 - 749.999	17,69
750.000 - 999.999	7,78
≥ 1.000.000	9,18
Total	**100,00**

Sumber : Inkesra Kabupaten Lembata Tahun 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase penduduk Kabupaten Lembata tahun 2015 yang pengeluaran per kapitanya kurang dari Rp 300.000,00 terdapat sebanyak 34,64 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa terdapat kurang lebih 35 persen penduduk Kabupaten Lembata yang memilikirata-rata pengeluaran kurang dari Rp 10.000,00 per harinya.Sementara, persentase tertinggi pengeluaran perkapita penduduk sebulan terdapat pada golongan pengeluaran Rp.300.000,00-Rp.499.999,00 yaitu sebesar 30,72 persen.

2.4.1.2. Pertanian

- Nilai Tukar Petani

Tabel.2.100
Nilai tukar Petani di Kabupaten Lembata Tahun 2015

Bulan	Nilai Tukar Petani
Agustus	101,11
September	102,03
Oktober	102,41
November	101,83
Desember	102,69

Sumber: BPS Kab. Lembata Tahun 2017

Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Desember 2015 didasarkan pada perhitungan NTP dengan tahun dasar 2012 (2012=100).Penghitungan NTP ini mencakup 5 subsektor, yaitu subsektor padi & palawija, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan.

Pada bulan Desember 2015, NTP Nusa Tenggara Timur sebesar 102,69 dengan NTP masing-masing subsektor tercatat sebesar 105,55 untuk subsektor tanaman pangan (NTP-P); 99,70 untuk subsektor hortikultura (NTP-H); 99,06 untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTP-TPR); 105,06 untuk subsektor peternakan (NTP-Pt) dan 102,76 untuk subsektor perikanan (NTP-Pi). Jika NTP Desember 2015 dibandingkan dengan NTP November 2015, terjadi penurunan sebesar 0,78 persen.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

2.4.2.1. Perhubungan

Proses pembangunan fasilitas wilayah/ infrastruktur pada bidang perhubungan di kabupaten Lembata sejauh ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.2.101
Kondisi Pembangunan Perhubungan Tahun 2013-2016

No	Indikator	Capaian Kinerja			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	170.901	189.719	698,400	168.333
2.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	824	819	60	489
3.	Jumlah Terminal/pelabuhan laut & udara	6	7	7	7
4.	Jumlah Angkutan Darat	461	528	832	902
5.	Jumlah Barang yg Terangkut Angk. Umum (Ton)	341	379	349	28.917,5

Sumber : Dinas PUPR Kab. Lembata Tahun 2017

Dari tabel diatas jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 168.333 di tahun 2016 sebelumnya 698.400 di tahun 2014, hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan pribadi masyarakat Kabupaten Lembata. Jumlah uji kir angkutan umum 2016 juga mengalami peningkatan sebesar 489.Jumlah terminal/pelabuhan laut udara tidak mengalami perubahan.

Kemudian jumlah angkutan darat mengalami peningkatan sebesar 902 di tahun 2016, jumlah barang yang terangkut angkutan umum juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 28.917,5 di tahun 2016 yang sebelumnya berjumlah 349 di tahun 2015. Hal ini menggambarkan bahwa ada peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Lembata.

2.4.2.2. Penataan Ruang

Untuk mengetahui kondisi penataan ruang di kabupaten Lembata sebagaiman tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel.2.102
Kondisi Penataan Ruang di Kabupaten Lembata Tahun 2012 – 2016 (ha)

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Ketaatan terhadap RTRW	-	-	-	-	-
2	Luas Wilayah Produktif	607,168				
3	Luas Wilayah Industri	154,447				
4	Luas Wilayah Kebanjiran					33,11%
5	Luas Wilayah Kekeringan					76,82%
6	Luas Wilayah Perkotaan	4734,830				

Sumber: Dinas PUPRP Kab. Lembata Tahun 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa ketaatan terhadap RTRW sejauh ini tidak terdapat data. Luas wilayah produktif di kabupaten Lembata tahun 2012 adalah 607.168 ha.Luas wilayah industry sebesar 154.447 ha.Luas wilayah kebanjiran pada tahun 2016 adalah 33.11% dan luas wilayah kekeringan sebesar 76.82%.

2.4.2.3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admnistrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;

- Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Tabel.2.103
Jenis Bank per Kecamatan di Kab. Lembata Tahun 2016

Kecamatan *Subdistrict*		**Bank Rakyat Indonesia (BRI)**	**Bank Nasional Indonesia (BNI)**	**Bank Nusa Tenggara Timur (Bank NTT)**
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Nagawutung		-	
2	Wulandoni		-	1
3	Atadei		-	
4	Ile Ape	1	-	
5	Ile Ape Timur		-	
6	Lebatukan		-	
7	Nubatukan	4	1	1
8	Omesuri	1	-	
9	Buyasuri	1	-	
Lembata		**7**	**1**	**2**

Sumber: BRI, BNI, Bank NTT

Dari tabel diketahui jumlah bank paling banyak terdapat di Kecamatan Nubatukan yaitu sebanyak 3 buah dan masih ada beberapa kecamatan yang melakukan kegiatan perbankan pada ibu kota Kabupaten.

- Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel

Tabel.2.104
Jumlah Hotel di Kab. Lembata Tahun 2016

Tahun	**Hotel/*Hotels***					
	Bintang 1	**Bintang 2**	**Bintang 3**	**Bintang 4**	**Bintang 5**	**Non-Bintang**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2012	-	-		-	-	5
2013	-	-	-	-	-	5
2014	-	-	-	-	-	5
2015	-	-	-	-	-	5
2016	-	-	-	-	-	6

Sumber: Survei Perusahaan/Usaha Jasa Akomodasi

Dari data diatas diketahui jumlah penginapan dari tahun 2012 – 2016 belum mengalami perubahan. Jenis penginapan di Kabupaten Lembata masih berskala Non bintang dengan jumlah 5 unit.

2.4.2.4. Lingkungan Hidup

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Lembata dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel.2.105
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih
di Kabupaten Lembata Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	25.4	31.78	47.24	67.22	67,22

Sumber: Dinas PU Kab. Lembata Tahun 2015

Dari tabel diatas diketahui terjadi peningkatan penggunaan air bersih di Kabupaten Lembata dari tahun 2012 – 2016.Pada tahun 2016 tidak terjadi peningkatan penggunaan air bersih karena belum ada perluasan jaringan air bersih.

2.4.2.5. Komunikasi dan Informatika

Tabel.2.106
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
di Kabupaten Lembata Tahun 2012 – 2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	36,5	38,70	40,00	92.57

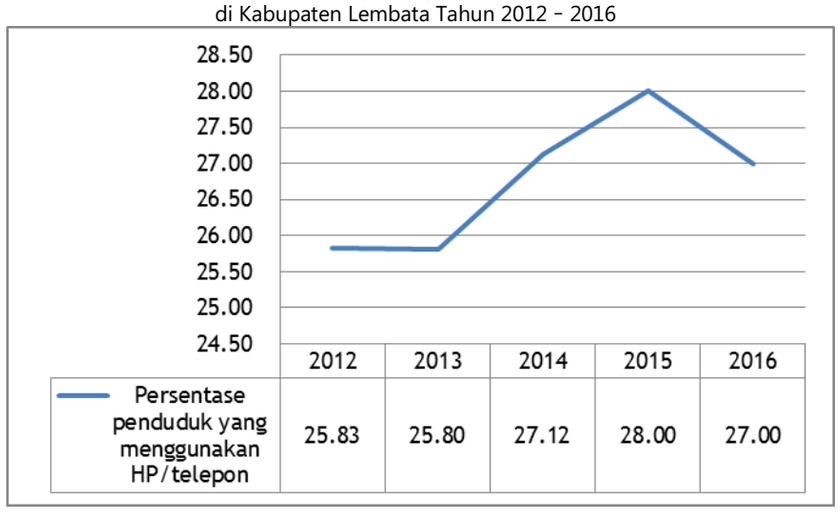
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Lembata Tahun 2016

Dari tabel diatas diketahui persentase rumah tangga yang menggunakan listrik meningkat drastis pada tahun 2015 yakni sebesar 92,57% jika dibandingkan pada tahun 2014 yakni sebesar 40%.

- Persentase Penduduk yang Menggunakan Hp/Telepon

Penggunaan HP/Telepon dari tahun 2012 terus mengalami peningkatan sampai tahun 2015 yakni pada tahun 2012 jumlah pengguna HP/Telepon sebanyak 25,83% sedangkan pada tahun 2015 adalah 28,00 %. Pada tahun 2016 penggunaan Hp/telepon menurun sebanyak 27,00. Gambaran perkembangan pemakaian hp/telepon dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 2. 12.
Persentase Rumah tangga yang menggunakan HP/Telepon
di Kabupaten Lembata Tahun 2012 – 2016



Sumber : Kominfo Kab. Lembata 2017, Data Terolah Bappelitbangda

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admnistrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- Angka Kriminalitas

Tabel.2.107
Angka Kriminalitas di Kabupaten LembataTahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angka kriminalitas	-	169	137	166	-

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Lembata Tahun 2017

Angka kriminalitas di Kabupaten Lembata pada tahun 2015 meningkat dibandingkan dengan tahun 2014.Kenaikan pada tahun 2015 sebanyak 29 dari tahun 2014.

- Jumlah Demo

Tabel.2.108
Jumlah Demo di Kabupaten Lembata Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah demo dalam 1 tahun	43	13	15	19	5

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Lembata Tahun 2017

Jumlah demo yang tercatat sepanjang tahun 2012 – 2016 adalah sebanyak 5 kali. Demo yang dilakukan oleh organisasi, LSM dan komunitas ini berkaitan dengan berbagai pelanggaran serta penegakan hokum di Kabupaten Lembata.

- Lama Proses Perijinan

Tabel.2.109
Lama Proses Perijinan di Kabupaten Lembata Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari)	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Lamanya proses perijinan untuk berinvestasi di Kabupaten Lembata paling lama 1 hari sejak tahun 2012 – 2016. Bagian penanaman modal terus melakukan pembenahan dalam hal pelayanan proses perijinan untuk memudahkan investor menamkan modalnya di Kabupaten Lembata.

- Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Tabel.2.110
Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lembata
Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	25	25	27	26	24

Sumber: BKD Kab. Lembata Tahun 2017

Jumlah pajak yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Lembata cenderung stabil dari tahun 2012 – 2016.Pada tahun 2014 terjadi pengurangan jenis pajak yang merupakan rasionalisasi yang fokusnya tetap mendukung iklim investasi tanpa mengurangi manfaat dari retribusi tersebut.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Ketenagakerjaan

- Ratio Lulusan S1/S2/S3

Tabel.2.111
Ratio Lulusan S1/S2/S3

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Lulusan S1/S2/S3	2,36	2,65	2,78	3,07	4,19

Sumber : Dinas Dukcapil-Data Terolah Bappelitbangda, 2017

- Rasio Ketergantungan

Tabel.2.112
Ratio Ketergantungan

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio ketergantungan	76,95	58,63	61,79	58,23	56,73

Sumber : Dinas Dukcapil-Data Terolah Bappelitbangda, 2017

Tabel di atas memperlihatan rasio ketergantungan penduduk usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 64 tahun terhadap penduduk usia 15-16 tahun. Untuk ketenagakerjaan di Kabupaten Lembata rasio ketergantungan pada tahun 2012 sebesar 76,95 sedangkan pada tahun 2016 sebesar 56,73.

Tabel 2.113
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		Tahun n-5 (2012)	Tahun n-4 (2013)	Tahun n-3 (2014)	Tahun n-2 (2015)	Tahun n-1 (2016)	
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
A.1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**						
A.1.1.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admnistrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**						
	1. Pertumbuhan PDRB (HK) (%)	4.77	4.96	5.09	4.98	4.71	>
	2. Laju Inflasi Provinsi		8.41	7.76	4.92	3.02	DTTT
	3. PDRB Per Kapita (Rp - Jt/Th)	7.85	8.53	9.31	10.1	10.93	>
	4. Indeks Gini			0.27	0.36	0.3	DTTT
	5. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	30,900	29,300	29,068	35,930	35,180	DTTT
	6. Angka Kriminalitas yang Tertangani		169	137	166		DTTT
A.2	**Fokus Kesejahteraan Masyarakat**						
A.2.1.	**Pendidikan**						
	1. Angka Melek Huruf	90.00	99.34	99.34	99.34	100.00	>
	2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	>
	3. Angka Partisipasi Kasar						
	* SD/MI/Paket A (%)	99.00	99.00	99.42	87.47	87.63	=
	* SMP/MTs/Paket B (%)	90.13	90.13	97.00	96.91	87.63	=
	* SMA/SMK/MA/Paket C (%)				75.47	76.22	>
	4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan	24.72	17.34	22.22	26.55	27.60	DTTT
	5. Angka Partisipasi Murni						
	* SD/MI/Paket A (%)	94.13	94.13	99.12	74.44	74.60	=
	* SMP/MTs/Paket B (%)	91.89	91.89	95.92	53.34	63.57	<
	* SMA/SMK/MA/Paket C (%)						
A.2.2.	**Kesehatan**						
	1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi	23.46	24.14	13.67	14.31	13.06	DTTT

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		Tahun n-5 (2012)	Tahun n-4 (2013)	Tahun n-3 (2014)	Tahun n-2 (2015)	Tahun n-1 (2016)	
	2. Angka Usia Harapan Hidup	65.12	66	66	66	66	<
	3. Persentase Balita Gizi Buruk (%)	1.29	1.5	1.39	1.28	0.3	>
A.2.3.	**Pertanahan**						
	1. Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan						DTT
A.2.4.	**Ketenagakerjaan**						
	1. Rasio Penduduk yang Bekerja	0.68	0.64	0.61	0.70	-	DTTT
A.3	**Fokus Seni dan Budaya**						
A.3.1.	**Kebudayaan**						
	1. Jumlah Grup Kesenian	1	16	12	12	13	DTTT
	2. Jumlah Gedung Kesenian	-	-	-	-	-	DTTT
A.3.2.	**Pemuda dan Olahraga**						
	1. Jumlah Klub Olahraga	-	-	-	20	50	
	2. Jumlah Gedung Olahraga	-	-	-	-	-	DTTT
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
B.1	**Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar**						
B.1.1	**Pendidikan**						
	1. Pendidikan Dasar						
	* Angka Partisipasi Sekolah	992.18	857.80	982.83	692.63	611.49	>
	* Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	6.14	17.73	32.45	81.26	90.83	>
	* Rasio Guru/Murid	456.47	709.01	597.02	805.77	867.80	>
	* Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata	45.66	79.00	59.72	80.58	84.99	>
	2. Fasilitas Pendidikan						
	* Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	30	35	40	45	50	>
	* Sekolah pendidikan SMP/MTs	40	45	50	60	65	>
	3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
	* Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	83.05	74.27	80.44	50.66	74.16	>
	4. Angka Putus Sekolah						
	* Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	1.25	0.50	0.38	0.06	0.41	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		Tahun n-5 (2012)	Tahun n-4 (2013)	Tahun n-3 (2014)	Tahun n-2 (2015)	Tahun n-1 (2016)	
	* Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.95	0.97	0.80	0.16	2.43	>
	* Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0.98	0.98	0.22	0.64	0.87	>
	5. Angka Kelulusan						
	* Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,96	99,36	99,93	100.00	100.00	>
	* Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98,54	99,63	100,00	99,95	99,48	>
	* Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	98,64	99,91	99,85	99,85	99,09	>
	* Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	85,75	122,12	77,40	78,25	112,93	>
	* Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	80,9	138,00	93,89	73,92	137,02	>
	* Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	6,41	20,24	35,72	63,35	70,86	>
B.1.2	**Kesehatan**						
1	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	2.66	2.81	2.81	3.21	2,64	>
2	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	5.37	5.6	5.52	2.96	5,67	>
3	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	2.48	2.4	2.36	3	2.27	>
4	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	34.71	17.61	17.34	20.09	26.48	>
5	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	1.29	1.5	1.39	1.28	0.3	>
6	Rasio Pustu Per satuan Penduduk	28.1	27.22	26.79	3,76	2.5	>
7	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	237	453	98	54,97	71.9	>
8	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	93.05	95.35	84.29	96.7	96.6	>
9	Cakupan Desa atau Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	90	26	106	72.85	85.43	>
10	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	47.54	52.94	100	67.9	83.3	>
11	Penemuan dan penanganan Penderita TBC BTA	173	62	140	88.57	66.67	>
12	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	2,625	227	1,116	2,139	2,182	>
13	Jumlah Posyandu	315	315	315	315	315	=
14	Jumlah Dokter	30	22	20	18	23	>
15	Jumlah Puskesmas	9	9	9	9	9	<
16	Jumlah Pustu	56	61	61	61	65	>
17	Dokter Spesialis		1	2	2	2	>
18	Dokter Umum	15	18	20	19	23	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		Tahun n-5 (2012)	Tahun n-4 (2013)	Tahun n-3 (2014)	Tahun n-2 (2015)	Tahun n-1 (2016)	
19	Dokter Gigi	6	3	3	3	5	>
20	Bidan	152	194	208	278	300	>
21	Perawat	113	223	273	341	389	>
22	Tenaga Kefarmasian	25	34	39	42	54	=
23	Tenaga Gizi	17	21	36	43	43	=
24	Tenaga Kesmas	41	48	46	88	118	=
25	Tenaga Sanitasi	22	14	17	23	23	=
26	Angka Kesakitan Malaria per -100.000 penduduk (API)		30.09	48.62	64.11	60.22	=
B.1.3	**Pekerjaan Umum**						
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (km)	78,24	86,54	98,58	108,57	208,49	>
2.	Panjang jalan dilalui Roda 4	546,53	546,53	546,53	546,53	577,03	=
3.	Panjang Saluran Irigasi	5156,50	5156,50	5609,80	7585,80	10035,30	=
4.	Luas Irigasi Kabupaten					5.555	DTTT
B.1.4	**Penataan Ruang**						
1	Tersedianya Informasi Rencana Tata ruang dan rinciannya	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2	Perda RTRW	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
B.1.5	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**						
1	Prosentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	25.4	31.78	47.78	56.51	62.91	=
2	Prosentase Rumah Tinggal Bersanitasi	40	43,00	77,83	84.49	85.15	=
3	Prosentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	36,5	38,70	40,00	92.57		DTTT
B.1.6	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**						
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	10,09	10,23	9,73	9,53	9,36	<
2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	152,99	155,19	147,59	148,52	145,87	>
3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	2.04	1.95	1.95	1.95	1.95	=
4.	Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	=
5.	Jumlah patroli Petugas Satpol PP Pemantauan Dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 Jam	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		Tahun n-5 (2012)	Tahun n-4 (2013)	Tahun n-3 (2014)	Tahun n-2 (2015)	Tahun n-1 (2016)	
6.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	=
B.1.7	**Sosial**						
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	2	2	2	3	3	=
B.2	**Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**						
B.2.1	**Tenaga Kerja**						
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	-	-	-	100	75	DTTT
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	72.96	74.5	75.25	76	76.66	=
3	Pencari kerja yang ditempatkan	-	-	75	72	142.91	
4	Tingkat pengangguran terbuka	3.45	3.4	3.3	3.2	3.1	>
B.2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	6,86	314%	436%	685%	703%	>
2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	0.97	0.98	0.99	102.00%	105.00%	>
3.	Rasio KDRT	48	76	88	113	107	<
4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	-	-	-	-	-	
5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	40,39	41,80	42,36	43,74	58,63	
B.2.4	**Pertanahan**						
1	Data Luas Tanah Milik Pemerintah Daerah (ha)	-	15 ha	22,242	21,047	302,927	<
2	Jumlah Tanah Pemerintah Daerah berserftikat (buah)		1	26	42	68	
3	Jumlah Kasus Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan		10	9	7	5	<
4	Penyelesaian Ijin Lokasi				7		
B.2.5	**Lingkungan Hidup**						
1	Data kerusakan lingkungan (ha)	34.573	40.122	34.573	2.765	2.811	=
2	Kegiatan perbaikan lingkungan (Ha)	90	2,5	30	60	34	<
3	Jumlah Kasus Lingkungan yang ada			25	18	12	DTTT
4	Jumlah Kasus Lingkungan yang Ditangani Pemda			13	10	5	DTTT
5	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL (%)	0,35	0,48	0,61	0,74	1,00	DTTT

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		Tahun n-5 (2012)	Tahun n-4 (2013)	Tahun n-3 (2014)	Tahun n-2 (2015)	Tahun n-1 (2016)	
6	% Pengangkutan Sampah				32.85	36,30	DTTT
7	% Pengurangan Sampah				-	36,30	DTTT
B.2.6	**Admnistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						DTTT
1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	38,83	48,71	61,56	33,38	67,50	>
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	46,58	33,95	61,52	44,30	39,53	>
3.	Rasio pasangan berakte nikah	1,93	1,44	2,98	21,73	2,52	DTTT
4.	Kepemilikan KTP	38,83	37,17	61,44	33,38	78,40	DTTT
5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	3,13	2,11	4,05	17,55	5,29	DTTT
6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DTTT
7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	DTTT
B.2.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
1.	Jumlah kelompok binaan LPM	151	151	151	151	151	<
2.	Jumlah kelompok binaan PKK	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	>
3.	Jumlah kelompok UEP dan SPP PNPM-MP	1.353	1.557	1.557	1.557	1.557	<
B.2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
1.	Jumlah Akseptor KB	10,261	10,863	8,410	8,951	14,909	>
2.	Prosentase Keluarga Sejahtera	50.43	50.43	48.39	84.90	85,87	DTTT
3.	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	64.74	70.74	57	59	92,27	>
B.2.9	**Perhubungan**						
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum		170.901	189.719	698,400	168.333	>
2	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum		824	819	60	489	=
3	Jumlah Terminal/ pelabuhan laut & udara		6	7	7	7	<
4	Jumlah Angkutan Darat		461	528	832	902	>
B.2.10	**Komunikasi dan Informasi**						
1	Jumlah surat kabar nasional / lokal	2	2	2	3	3	<
2	Jumlah siaran radio lokal aktif	2	1	1	1	-	<
3	Website Milik Pemda	1	1	1	1	1	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		Tahun n-5 (2012)	Tahun n-4 (2013)	Tahun n-3 (2014)	Tahun n-2 (2015)	Tahun n-1 (2016)	
4	Jumlah Menara telepon genggam	13	13	26	27	27	>
5	Jumlah Menara telepon stasioner	1	1	1	1	1	=
6	Prosentase Penduduk yang menggunakan HP/Telpon	25.83	25,80	27,12	28,00	27	DTTT
B.2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**						
1.	Jumlah Koperasi berbadan Hukum		82.00	85.00	91.00	103.00	>
2.	Jumlah Koperasi Aktif berbadan Hukum		58	60	84	90	>
3.	Jumlah Pra Koperasi/ belum badan Hukum		72	93	106	155	>
B.2.12	**Penanaman Modal**						
1.	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	3	4	4	5	4	>
2.	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional	31.528.628.444	31.840.793.082	32.152.957.720	32.465.122.358	38.812.563.161	>
B.2.13	**Kepemudaan dan Olahraga**						
1.	Jumlah klub olahraga				60	60	>
2.	Jumlah organisasi olahraga	12	12	12	12	12	>
3.	Jumlah gedung olahraga	-	-	-	-	-	DTTT
4.	Jumlah kegiatan kepemudaan	1	2	2	2	2	DTTT
5.	Jumlah kegiatan olahraga	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	DTTT
6.	lapangan olahraga	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	DTTT
B.2.14	**Statistik**						
1.	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
B.2.16	**Kebudayaan**						
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	3	2	2	3	DTTT
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	6	6	10	12	DTTT
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	5	5	3	14	6	<
B.2.17	**Perpustakaan**						
1.	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1	=
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	7.6360	7.9990	2.9300	5.1170	3.6210	>
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	16.5190	17.3090	18.2030	19.2690	20.2740	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		Tahun n-5 (2012)	Tahun n-4 (2013)	Tahun n-3 (2014)	Tahun n-2 (2015)	Tahun n-1 (2016)	
B.2.18	**Kearsipan**						
1.	Pengelolaan arsip secara baku	-	-	-	-	2,33	DTTT
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	-	1	1	1	2	DTTT
B.3	**Fokus Penunjang Urusan**						
B.3.1	**Inspektorat**						
1.	Jumlah Hasil Temuan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lembata						
*	Admnistrasi	525	319	280	122		>
*	Keuangan	334	79	79	54		>
B.3.2	**Perencanaan**						
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	-	-	1	-	=
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	1	1	-	-	-	=
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (Murni/Perubahan)	1	1	1/1	1/1	1/2	>
4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	89.67	90.52	77.14	96.13	97.23	=
B.3.4	**Keuangan**						
1.	Opini BPK	Disclaimer	Disclaimer	WDP	WDP	WDP	=
B.3.5	**Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**						
1.	Jumlah aparat yang memiliki kompetensi	-	-	-	-	33	DTTT
2.	Jumlah ASN	4,389	4,387	4,345	3,675	4,190	DTTT
3	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat						
*	PIM II	3	-	11	2	1	DTTT
*	PIM III	5	-	19	12	18	DTTT
*	PIM IV	9		-	7	20	DTTT
4	Jumlah ASN yang Mengikuti Seleksi Jabatan	-	-	-	33	72	DTTT
5	Jumlah Peserta Tubel/Ibel	186	214	132	112	112	DTTT

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		Tahun n-5 (2012)	Tahun n-4 (2013)	Tahun n-3 (2014)	Tahun n-2 (2015)	Tahun n-1 (2016)	
B.3.7	**Penelitian dan Pengembangan**						
	1. Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan	1	1	-	-	-	DTTT
B.4	**Fokus Pendukung**						
B.4.1	**Sekretariat Daerah**						
	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	-	7,0	7,5	-	7,6	DTTT
	2. Nilai AKIP		31,91	37,99	45,25	45.61	DTTT
	3. Nilai EKPP	0,952	2. 328	2 .254	2 .672	2 .772	DTTT
B.5	**Fokus Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**						
	1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	5	15	17	20	22	DTTT
	2. Kegiatan pembinaan politik daerah	10	15	15	25	30	DTTT
B.6	**Fokus Urusan Pilihan**						
B.6.1	**Kelautan dan Perikanan**						
	1. Produksi Ikan Laut	4923	5398	5704	5800	6000	<
	2. Produksi Rumput Laut	5567	103.2	135.8	5420	7500	DTTT
	3. Konsumsi Ikan Laut	24.56	25.74	26.09	26.09	26.09	<
	4. Konsumsi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	7,68	7,74	8,0	8,14	8,42	DTTT
B.6.2	**Pariwisata**						
	1. Kunjungan wisata		3216	4076	4254	6921	DTTT
	2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Juta Rp)	1.18	1.15	1.11	1.09	1.09	DTTT
B.6.3	**Pertanian**						
	1. Jumlah Produksi						
	1 Jumlah Produksi Padi (Ton)	9,618	14,973	12,795	10,509	7,671	>
	2 Jumlah Produksi Jagung	22,547	24,708	25,462	25,384	17,942	>
	3 Jumlah Produksi Ubikayu	25,137	33,192	66,934	60,062	39,742	>
	4 Jumlah Produksi Kacang Tanah	1,675	965	1,213	1,338	409	<
	5 Jumlah Produksi Kopi	314,50	212,30	168.00	187,17	134.70	DTTT
	6 Jumlah Produksi Jambu Mente	1,520.10	1,300.80	1,452.00	1,747.69	1,207.30	DTTT

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		Tahun n-5 (2012)	Tahun n-4 (2013)	Tahun n-3 (2014)	Tahun n-2 (2015)	Tahun n-1 (2016)	
	7 Jumlah Produksi Kelapa	2,328.69	2,330.30	2,335.00	2,834.90	2,512	DTTT
	8 Jumlah Produksi Kakao	115.6	115.6	166	191.82	154.5	DTTT
3.	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (%)	15,53	15,57	15,06	14,63	13,35	DTTT
4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	3,48	3,34	3,29	3,38	3,38	DTTT
5.	Kontribusi Peternakan terhadap PDRB 9%)	5,30	5,38	5,66	5,82	5,89	DTTT
6.	Populasi Ternak Sapi	3,425	4,164	4,247	4,467	4,619	DTTT
7.	Populasi Ternak Kuda	1,354	1,335	1,361	1,385	1,411	DTTT
8.	Populasi Ternak Kambing	39,423	36,334	37,112	38,131	3,906	DTTT
9.	Populasi Ternak Domba	1,132	1,439	1,445	1,451	1,511	DTTT
10.	Populasi Ternak Babi	49,081	38,074	39,566	41,087	42,699	DTTT
11.	Populasi Ternak Unggas	16,353	223,028	205,708	283,900	313,704	DTTT
B.6.4	**Perdagangan**						
1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	6.54	6.62	6.63	6.87	7.13	DTTT
B.6.5	**Perindustrian**						
1.	Kontribusi sektor IndustriPengolahan terhadap PDRB (%)	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	DTTT
C.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
C.1.	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**						
C.1.1.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admnistrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**						
1.	Pengeluaran konsumsi pangan per kapita (Rp)	207,069	DTT	DTT	274,036	DTT	DTTT
2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Rp)	148,426	DTT	DTT	242,984	DTT	DTTT
C.2.	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur**						
C.2.1.	**Perhubungan**						
1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum		170.901	189.719	698,400	168.333	>
2.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum		824	819	60	489	=
3.	Jumlah Terminal/pelabuhan laut & udara		6	7	7	7	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		Tahun n-5 (2012)	Tahun n-4 (2013)	Tahun n-3 (2014)	Tahun n-2 (2015)	Tahun n-1 (2016)	
4.	Jumlah Angkutan Darat		461	528	832	902	>
5.	Jumlah Barang yg Terangkut Angk. Umum (Ton)		341	379	349	28.917,5	>
C.2.2.	**Penataan Ruang**						
1.	Ketaatan terhadap RTRW	-	-	-	-	-	DTTT
2.	Luas wilayah produktif	607,168					DTTT
3.	Luas wilayah industri	154,447					DTTT
4.	Luas wilayah kebanjiran					33,11%	DTTT
5.	Luas wilayah kekeringan					76,82%	DTTT
6.	Luas wilayah perkotaan	4,734,830					DTTT
C.2.3.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admnistrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**						
1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang	3	4	5	7	10	>
2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	2	2	3	3	3	>
3.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	5	5	5	5	6	>
C.2.4.	**Lingkungan Hidup**						
1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	25.4	31.78	47.24	67.22	67,22	>
C.2.5.	**Komunikasi dan Informatika**						
1	Persentase rumah tangga dengan akses listrik.	36,5	38,70	40,00	92.57		>
2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	25.83	25.80	27.12	28.00	27.00	>
C.3.	**Fokus Iklim Berinvestasi**						
C.3.1.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admnistrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**						
1.	Angka kriminalitas	-	169	137	166	-	
2.	Jumlah demo	43	13	15	19	5	
3.	Lama proses perijinan	1	1	1	1	1	=
4.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	25	25	27	26	24	>
5.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	-	-	-	-	-	
6.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	-	-	-	-	-	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		Tahun n-5 (2012)	Tahun n-4 (2013)	Tahun n-3 (2014)	Tahun n-2 (2015)	Tahun n-1 (2016)	
C.4.	**Fokus Sumber Daya Manusia**						
C.4.1.	**Ketenagakerjaan**						
1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	2,36	2,65	2,78	3,07	4,19	>
2.	Rasio ketergantungan	76,95	58,63	61,79	58,23	56,73	<

Bab 3 Gambaran Umum Keuangan Daerah



Ada 3 (tiga) frame besar yang digambarkan pada bagian ini yakni kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu serta kerangka pendanaan. Kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah pada periode sebelumnya (minimal 3 tahun terakhir) guna memberikan gambaran tentang kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan selama kurun waktu 2012–2016 disajikan sebagai gambaran untuk mengetahui perbandingan proporsi anggaran antara belanja aparatur dengan belanja pembangunan, serta pendapatan dan pengeluaran yang bersumber dari pembiayaan. Sementara kerangka pendanaan merupakan alat teropong untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah serta proyeksi pendapatan dan pendanaan belanja daerah untuk periode berikutnya.

BAB III
GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat diproyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun kebelakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan kedepan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD terdiri atas target dan realisasi pendapatan, target dan realisasi belanja, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah.

Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016 diperoleh dari laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada bagian ini diuraikan perkembangan pelaksanaan APBD yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah bersumber dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ; (2) Dana Perimbangan; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenrintahan Daerah, Pasal 279 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi: a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah; b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat dan insentif (fiskal). Selanjutnya pasal 285 menyatakan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas : a. pendapatan asli Daerah meliputi: 1. pajak daerah; 2. retribusi daerah; 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

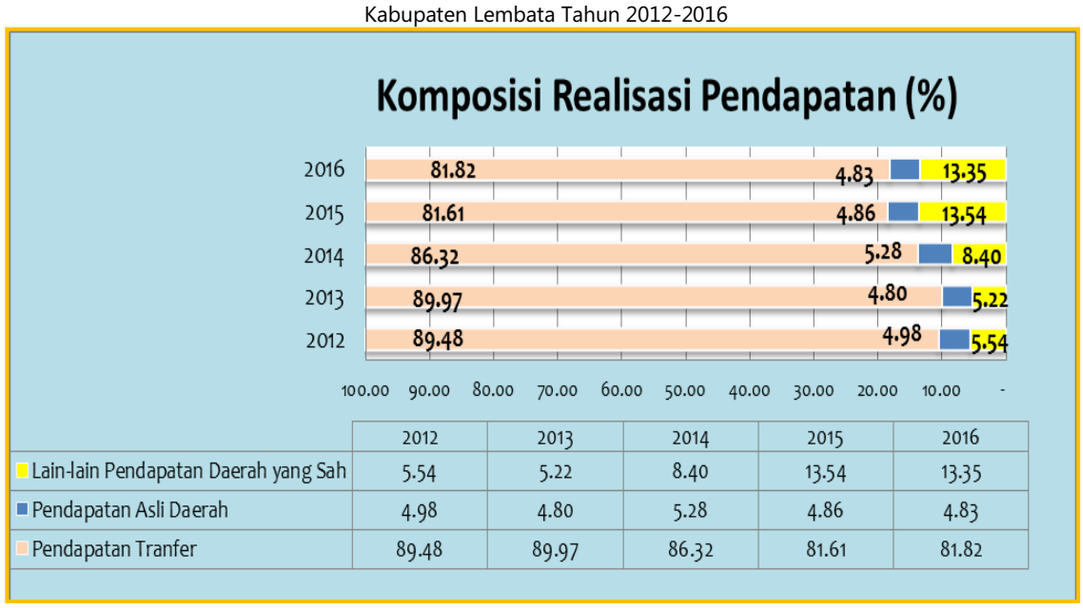
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016, maka dapat diketahui realisasi serta pertumbuhan pendapatan setiap tahunnya, yang dapat dlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.1.
Kinerja Pendapatan
Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

No.	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan Pertahun
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	**PENDAPATAN**	**427,472,869,271.62**	**468,275,411,653.36**	**542,082,611,884.73**	**593,829,248,270.89**	**739,343,686,647.31**	**11.58**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**21,284,014,968.62**	**22,499,236,777.36**	**28,603,504,695.73**	**28,836,775,342.89**	**35,723,669,619.31**	**10.91**
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	2,639,708,918.64	4,436,074,005.22	3,842,201,661.80	5,407,991,493.83	8,001,534,072.87	24.83
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7,458,686,207.23	9,499,161,481.00	9,496,834,310.00	8,649,300,222.00	9,381,094,350.00	4.69
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,798,726,774.87	3,781,176,988.52	4,493,169,887.00	4,990,788,741.00	5,072,858,972.00	12.63
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,386,893,067.88	4,782,824,302.62	10,771,298,836.93	9,788,694,886.06	13,268,182,224.44	9.61
1.2	**Pendapatan Transfer**	**382,505,950,892.00**	**421,328,067,316.00**	**467,938,432,829.00**	**484,594,485,850.00**	**604,951,497,398.00**	**9.60**
1.2.1	Dana Bagi Hasil	17,851,536,892.00	16,206,689,316.00	15,079,482,829.00	9,926,828,850.00	12,066,784,057.00	(7.53)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	314,176,964,000.00	352,353,778,000.00	388,625,200,000.00	418,139,104,000.00	467,239,940,000.00	8.26
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	50,477,450,000.00	52,767,600,000.00	64,233,750,000.00	56,528,553,000.00	125,644,773,341.00	20.01
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**23,682,903,411.00**	**24,448,107,560.00**	**45,540,674,360.00**	**80,397,987,078.00**	**98,668,519,630.00**	**33.03**
1.3.1	Dana Desa	-	-	-	-	86,963,847,000.00	
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	4,077,448,411.00	-	-	-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	19,605,455,000.00	3,588,190,560.00	8,514,202,360.00	9,836,311,078.00	10,480,672,630.00	(11.77)
1.3.4	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan	-	20,859,917,000.00	35,908,672,000.00	69,376,676,000.00	-	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainya	-	-	1,117,800,000.00	1,185,000,000.00	1,224,000,000.00	

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Lembata - 2017

Grafik 3.1.
Komposisi Kinerja Pendapatan Daerah
Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016



	2012	2013	2014	2015	2016
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.54	5.22	8.40	13.54	13.35
Pendapatan Asli Daerah	4.98	4.80	5.28	4.86	4.83
Pendapatan Tranfer	89.48	89.97	86.32	81.61	81.82

Sumber : BKD Kab. Lembata-Data Terolah Bappelitbangda, 2017

Dari tabel 3.1 secara angka dapat dilihat bahwa secara umum Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) komponen yakni PAD, Pendapatan Tranfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 11,58%.

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan perkembangan realisasi masing-masing komponen bervariasi. Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penigkatan dari tahun ke tahun. Meskipun ketiga komponen pembentuk PAD tersebut mengalami fluktuasi, akan tetapi secara keseluruhan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti untuk peningkatan PAD dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada tabel 3.1 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,91%.

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,60%. Dana ini merupakan dana transfer dari pemerintah pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Dari tabel juga terlihat bahwa realisasi ketiga komponen pembentuk Pendapatan transfer cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, meskipun secara keseluruhan pendapatan transfer mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Dana Desa, Pendapatan Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah Daerah Lainnya. Secara umum realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalamai peningkatan dari tahun ketahun dengan pertumbuhan sebesar 33,03% meskipun realisasi pertahun dari masing masing komponen cenderung fluktuatif.

Dari tabel maupun grafik juga terlihat bahwa sumber pendapatan untuk Kabupaten Lembata didominasi oleh Pendapatan Trasfer, diikuti dengan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, sedangkan PAD sebagai sumber pendapatan yang mencerminkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan menduduki urutan terendah. Kondisi tersebut menunjukan bahwa sejatinya Pemerintah Kabupaten Lembata mempunyai kemampuan dan terus berusaha meningkatkan PAD meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa pembiayaan pembangunan di Kabupaten Lembata masih bergantung pada pusat dan provinsi.

Dari gambaran struktur PAD tersebut di atas secara keseluruhan juga menunjukkan bahwa pajak daerah bukan menjadi sumber utama. Hal ini disebabkan oleh masih belum optimalnya transakasi ekonomi yang dapat menumbuhkan potensi pajak, terbatasnya wajib pajak dan belum berkembangnya sistem pengelolaan pajak daerah. Oleh sebab itu, dalam lima tahun mendatang tantangan yang harus diatasi antara lain adalah perlunya percepatan pembangunan ekonomi untuk menumbuhkan potensi pajak, intensfikasi pendataan dan penataan pajak daerah, pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan pelayanan perpajakan, sosialiasi dan penyuluhan pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, tantangan yang perlu dihadapi adalah meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan asset daerah, dan memberikan kemudahan perijinan usaha. Langkah lain yang perlu dilakukan adalah penguatan koordinasi antar dinas/instansi pemungut retribus daerah. Berbagai langkah tersebut secara bertahap diharapkan akan meningkatkan PAD Kabupaten Lembata.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksaaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Lembata 2011-2016. Kebijakan pengelolaan belanja daerah secara bertahap didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada desa, serta belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah dalam konteks pemerintah Kabupaten Lembata maka belanja ini diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016.

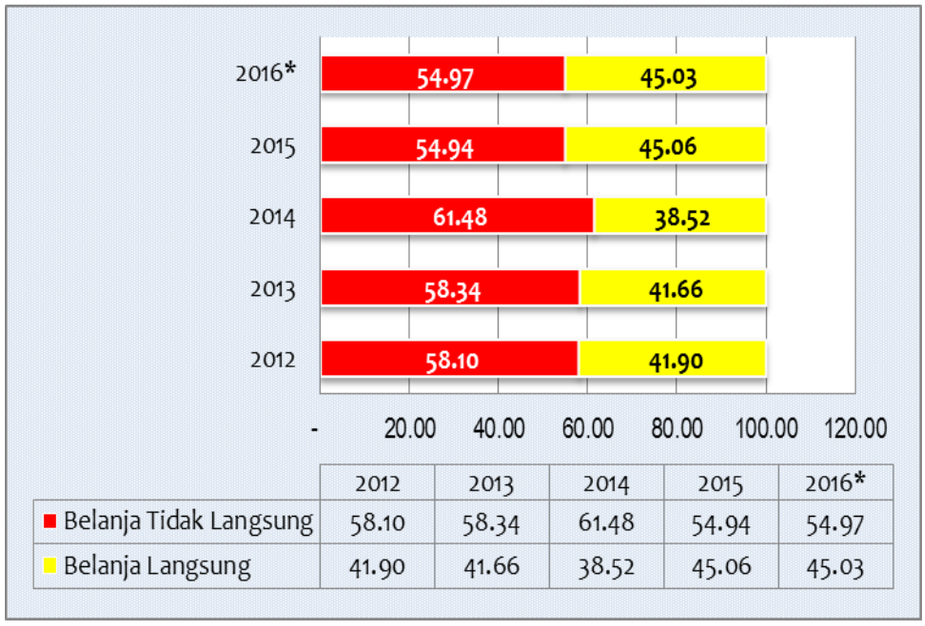
Perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Lembata dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel. 3.2.
Kinerja Belanja Daerah

No	Uraian	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016*	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**BELANJA DAERAH**	**417,696,745,824.69**	**467,549,885,566.68**	**471,681,645,383.66**	**600,745,819,594.50**	**785,427,150,147.14**	**13.46**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**242,686,179,876.48**	**272,765,495,326.67**	**290,011,068,397.63**	**330,037,558,636.37**	**431,740,409,835.64**	**12.21**
2.1.1	Belanja Pegawai	215,520,637,733.00	228,270,911,374.00	241,167,359,878.00	242,926,657,415.00	273,467,175,076.64	4.88
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	95,530,000.00	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	2,748,279,200.00	20,458,779,970.00	21,180,945,279.63	1,380,000,000.00	19,763,768,800.00	48.38
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	24,648,000.00	57,000,000.00	85,500,000.00	242,500,000.00	272,500,000.00	61.70
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	286,194,714.73	242,163,393.00	267,424,573.00	295,395,215.00	295,604,710.00	0.65
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepaa Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	22,314,747,478.75	23,547,295,089.67	25,501,407,027.00	81,796,226,006.37	137,920,861,249.00	43.95
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,696,142,750.00	189,345,500.00	1,808,431,640.00	3,396,780,000.00	20,500,000.00	(58.65)
2.2	**Belanja Langsung**	**175,010,565,948.21**	**194,784,390,240.01**	**181,670,576,986.03**	**270,708,260,958.13**	**353,686,740,311.50**	**15.11**
2.2.1	Belanja Pegawai	15,395,794,168.00	16,289,919,100.00	18,637,987,500.00	26,292,174,500.00	31,532,318,500.00	15.42
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80,262,302,111.10	67,315,342,276.60	69,447,921,132.16	130,600,225,487.80	179,205,460,932.30	17.43
2.2.3	Belanja Modal	79,352,469,669.11	111,179,128,863.41	93,584,668,353.87	113,815,860,970.33	142,948,960,879.20	12.49

Sumber : BKD Kab Lembata-Bappelitbangda Kab Lembata, 2017

Grafik 3.2.
Komposisi Kinerja Belanja Daerah



	2012	2013	2014	2015	2016*
Belanja Tidak Langsung	58.10	58.34	61.48	54.94	54.97
Belanja Langsung	41.90	41.66	38.52	45.06	45.03

Sumber : BKD Kab. Lembata-Data Terolah Bappelitbangda, 2017

Berdasarkan data pada Tabel. 3.2, secara angka dapat dilihat bahwa secara umum terjadi peningkatan realisasi belanja dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,46%, meskipun tidak semua komponen belanja tersebut mengalami peningkatan. Belanja Tidak langsung mengalami peningkatan dari tahun ketahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,21% dan masih didominasi oleh Belanja Pegawai dengan persentasi kurang lebih 80% dari porsi belanja tidak langsung. Realisasi meningkat dari tahun ke tahun serta rata-rata pertumbuhan sebesar 4,88%. Dengan proporsi yang cukup besar ini belanja pegawai sangat mempengaruhi peningkatan realisasi belanja tidak langsung meskipun komponen belanja lainnya cenderung fluktuatif.

Realisasi belanja langsung dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 15,11%. Belanja ini didominasi oleh belanja modal dan Belanja Barang/jasa dengan proporsi kurang lebih 40% dari belanja langsung, sedangkan belanja pegawai hanya berkisar 20% dari total belanja langsung.

Dari grafik 3.2 tergambar bahwa komposisi belanja daerah didominasi oleh belanja tidak langsung dengan persentase diatas 50%. Hal ini menunjukan bahwa APBD Kabupaten Lembata yang digunkan untuk investasi pembangunan daerah masih sangat kecil. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memperhitungkan kembali besarnya potensi penerimaan daerah dari berbagai sumber seperti : potensi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kinerja.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengelolaan pembiayaan daerah merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan fiskal dan sekaligus menjamin terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Lembata 2012-2016. Pembiayaan daerah Kabupaten Lembata terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan.

Penerimaan pembiayaan daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya, dan hasil penjulan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan pengeluaran pembiayaan

daerah mencakup pembentukan cadangan, penanaman modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan piutang tuntutan ganti rugi.

Gambaran pengelolaan pembiayaan daerah Kabupaten Lembata sebagaimana disajikan pada table 3.3. Dari tabel tersebut secara angka terlihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012 sebesar Rp.42.768.284.655,70 pada tahun 2013 naik menjadi Rp.50.065.750.268,63 ditahun 2014 turun menjadi Rp.43.337.824.021,31 ditahun 2015 naik menjadi Rp.107.971.270.912,38 dan ditahun 2016 turun menjadi Rp.103.577.772.243,77

Realisasi pengeluaran pembiayaan dari tahun ke tahun juga cenderung fluktuatif yakni pada tahun 2012 sebesar Rp.2.500.000.000,- tahun 2013 naik menjadi Rp.7.500.000.000,- tahun 2013 turun menjadi Rp.5.000.000.000, tahun 2014 naik menjadi Rp.7.500.000.000 dan di tahun 2016 turun menjadi Rp.5.000.000.000,-

Tabel. 3.3.
Kinerja Pembiayaan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

Nomor Urut	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016*
3	**PEMBIAYAAN**					
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**42,768,284,655.70**	**50,065,750,268.63**	**43,337,824,021.31**	**107,971,270,912.38**	**103,577,772,243.77**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	42,628,143,640.70	50,044,408,102.63	43,296,976,355.31	107,970,070,912.38	93,516,927,900.77
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	10,009,990,193.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	140,141,015.00	21,342,166.00	40,847,666.00	1,200,000.00	50,854,150.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah	**42,768,284,655.70**	**50,065,750,268.63**	**43,337,824,021.31**	**107,971,270,912.38**	**103,577,772,243.77**
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2,500,000,000.00**	**7,500,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**7,500,000,000.00**	**5,000,000,000.00**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	5,000,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah	**2,500,000,000.00**	**7,500,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**7,500,000,000.00**	**5,000,000,000.00**
	Pembiayaan Netto	**40,268,284,655.70**	**42,565,750,268.63**	**38,337,824,021.31**	**100,471,270,912.38**	**98,577,772,243.77**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Lembata, Tahun 2017

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan instrumen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah memuat informasi jumlah aset daerah serta jumlah kewajiban dan ekuitas dana setiap tahunnya. Aset daerah merupakan asset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah, memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat di masa dating sebagai akibat dari peristiwa masa lalu serta dapat diukur dalam uang.

Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Lembata selama 5 Tahun adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.4.
Perkembangan Neraca
Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	\2014	2015	2016
Aset					
Aset Lancar	61,440,225,892.71	54,911,772,281.84	128,899,951,601.41	100,440,129,778.62	68,598,596,997.98
Investasi Jagka Panjang	22,278,591,915.44	25,709,773,500.44	26,482,628,603.77	30,769,220,348.77	35,777,184,940.77
Aset tetap	633,930,017,811.87	739,934,195,784.11	843,929,497,337.40	573,307,021,163.09	614,158,142,409.56
Dana Cadangan	-	5,144,054,075.00	7,954,807,388.00	10,995,125,108.00	-
Aset Lainnya	24,451,029,384.04	20,006,318,717.96	18,667,196,756.54	10,231,446,200.68	7,428,734,312.72
Jumlah Aset	**742,099,865,004.06**	**845,706,114,359.35**	**1,025,934,081,687.12**	**725,742,942,599.16**	**725,962,658,661.03**
Kewajiban	658,484,607.82	704,362,036.30	994,250,329.00	97,309,024.00	1,512,629,445.00
Ekuitas	741,441,380,396.24	845,001,752,323.05	1,024,939,831,358.12	725,645,633,575.16	724,450,029,216.03
Jumlah Kewajiban + Ekuitas	**742,099,865,004.06**	**845,706,114,359.35**	**1,025,934,081,687.12**	**725,742,942,599.16**	**725,962,658,661.03**

Sumber; Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembat, Tahun 2017

Secara angka dapat dilihat bahwa realisasi Aset dari tahun 2012 sampai 2016 cenderung fluktutif, ditahun 2012 sampai 2014 mengalami peningkatan yakni pada tahun 2012 sebesar Rp.742.099.865.004,06 di tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 13,96% menjadi sebesar Rp.845.706.114.359,35 dan terus meningkat sebesar 21,31% di tahun 2014 sehingga menjadi sebesar Rp.1.025.934.081.687,12. Selanjutnya di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 29,26% sehingga menjadi sebesar Rp.725.742.942.599,16 dan di tahun 2016 naik perlahan sebesar 0.03% sehingga menjadi Rp.725.962.658.661,03 hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan belum dilakukan secara efektif dan efisien.

Kewajiban dari tahun 2012 sampai 2016 cenderung fluktuatif, ditahun 2012 sampai 2014 mengalami peningkatan yakni sebesar 6,97% ditahun 2013 dan 41,16% tahun 2014, hal ini berarti kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap pemerintah dari tahun 2013 sampai 2014 meningkat. Sedangkan di tahun 2015 mengalami penurunan dan di tahun 2016 naik menjadi Rp.1.512.629.444,- Perkembangan kewajiban dari tahun ke tahun yang cenderung fluktuatif sebenarnya bukanlah merupakan suatu kejelekan dalam pengelolaan keuangan daerah karena selama manajemen pengelolaan keuangan daerahnya semakin dibenahi kearah yang lebih baik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, maka penyelenggaraan pembangunan daerah ini dapat memberikan efek pada peningkatan pendapatan.

Sedangkan Perkembangan Rasio keuangan dari tahun ke tahun dapat dlihat pada table sebagai berikut :

Tabel. 3.5.
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Lembata 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
I. Ratio likuiditas					
1. Rasio Lancar	93.31	77.96	129.65	1,032.18	45.35
2. Rasio Quick	1,114.28	1,191.07	1,015.35	7,393.44	474.00
II. Ratio Solvabilitas					
1. Total HutangTerhadap Total Aset	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Rasio HutangTerhadap Modal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ratio Aktivitas					
1. Rata-rata Umur Piutang	2.07	3.93	4.30	3.59	3.67
2. Rata-rata Umur Persediaan	287.86	456.09	607.40	302.40	241.83

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata, 2017

Ratio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek. Ratio lancar dihitung dengan membandingkan aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek. Selanjutnya *quick ratio* dihitung dengan membandingkan aktiva lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban jangka pendek.

Ratio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang.

Ratio aktivitas adalah ratio yang digunakan untuk melihat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Ratio yang digunakan adalah rata-rata umum piutang dan rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur piutang yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang sehingga dapat merubah piutang menjadi kas, yang dihitung dengan membadingkan jumlah hari dalam satu tahun (365 hari) dengan perputaran piutang. Rata-rata persediaan yaitu rasio untuk melihat

berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (yang digunakan untuk pelayanan publik), dihitung dengan membandingkan jumlah hari dalam satu tahun dengan perputaran persediaan.

Hasil analisis ratio keuangan pada tabel 3.5 terlihat bahwa ratio likuiditas dari tahun ke tahun fluktuatif akan tetapi tetap memperlihatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lembata untuk membayar utang jangka pendeknya cukup baik. Ratio Solvabilitas menunjukan angka nol ini berarti pengaruh utangnya terhadap asset sangat kecil dan berdasarkan nilai modal yang dimiliki maka Kabupaten Lembata cukup mandiri dan tidak tergantung utang, artinya pembayaran utang pemerintah masih dapat dibiayai sendiri.

Ratio aktivitas menunjukan meskipun fluktuatif akan tetapi tetap menunjukan kemampuan pemerintah dalam memberikan input berupa persediaan untuk menghasilkan output pelayanan publik tiap tahunnya cukup baik.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan (+ 4% dari total pendapatan), dan sekitar 80% masih bergantung pada dana pusat dan provinsi. Oleh karena itu peningkatan sumber pendapatan yang berasal dari PAD yakni Pajak dan Retribusi daerah perlu ditingkatkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan mengoptimalkan peran dari dunia usaha. Hal ini harus terus diupayakan dari tahun ke tahun sehingga dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, persentase ketergantungan terhadap transfer dana pusat secara perlahan-lahan dapat diturunkan. Secara umum kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peran investasi masyarakat dalam pembangunan. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada : 1). Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi daerah, 2). Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah, 3). Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kebijakan yang ditempuh terkait pengelolaan pendapatan adalah :

1) Upaya ekstensifikasi yakni melakukan terobosan terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dan juga melalui usaha intensifikasi yakni dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada guna meningkatkan pendapatan daerah;
2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dalam rangka peningkatan penerimaan daerah;
3) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka terciptanya efektifitas kerja dan efisiensi kerja;
4) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
5) Peningkatan kuantitas dan kualitas ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah melalui upaya sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
6) Melaksanakan rapat evaluasi penerimaan daerah setiap bulan;
7) Mendorong/mengupayakan peningkatan investasi daerah melalui penyertaan modal pada Lembaga keuangan dan Bank dalam rangka mendorong investasi swasta untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.

8) Mendorong peran serta kecamatan, desa dan kelurahan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
9) Pemberian sanksi yang tegas dan adil kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

Selanjutnya belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan belanja daerah tidak langsung diarahkan untuk :

1) Meningkatkan efisiensi, efektivitas mutu dan nilai tambah dalam pelayanan umum dan administrasi pemerintahan;
2) Melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsi SKPD yang memenuhi kriteria kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara keluaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan daerah;
3) Meningkatkan efektivitas organisasi dengan kriteria kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan tindakan antar unit.

Kebijakan belanja langsung diarahkan untuk :

1) Mempercepat terwujudnya visi, misi dan tujuan dan sasaran pembangunan 2011-2016 terutama peningkatan mutu sumberdaya manusia melalui penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong peningkatan perekonomian masyarakat;
2) Mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis kepulauan, dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pemerataan pembangunan.

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan daerah dilakukan dengan mengoptimalkan bantuan keuangan, bantuan provinsi dan pusat, bantuan social dan hibah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang berasal dari pengembalian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat atau daerah lainnya termasuk dana bergulir/penyertaan modal daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan ini dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga ada keseimbangan antara pendapatan dan belanja mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/deficit. Artinya dalam hal suatu APBD mengalami defisit maka jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup deficit tersebut. Sebaliknya apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan pada pengeluaran pembiayaan pada pos-pos pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran pada bagian ini adalah menguraikan proporsi realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran dan bagaimana proporsi belanja untuk pemenuhan aparatur serta pemenuhan pendidikan. Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran, proporsi penggunaan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.6.
Proporsi Realisasi Belanja Daerah terhadap Anggaran

Uraian	Tahun					Proporsi rata-Rata
	2012	2013	2014	2015	2016	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**98.62**	**94.59**	**82.70**	**90.86**	**97.33**	92.82
Belanja Pegawai	99.26	96.01	83.97	84.56	96.52	92.06
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	33.28	-	-	-	-	6.66
Belanja Hibah	88.86	86.93	72.00	75.37	99.69	84.57
Belanja Bantuan Sosial	42.50	57.00	54.29	68.31	68.55	58.13
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	96.87	84.97	81.57	84.03	100.00	89.49
Belanja Bantuan Keuangan Kepala Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	96.61	88.81	87.90	92.78	99.49	93.12
Belanja Tidak Terduga	79.88	99.97	39.75	84.92	2.05	61.31
BELANJA LANGSUNG	**79.54**	**86.16**	**77.71**	**75.54**	**77.07**	**79.20**
Belanja Pegawai	95.51	94.62	96.25	95.45	96.28	95.62
Belanja Barang dan Jasa	92.09	91.35	84.77	85.19	89.27	88.53
Belanja Modal	67.97	82.26	70.63	65.54	65.83	70.45

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata, 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa belanja tidak langsung menempati proporsi terbesar dalam realisasi belanja terhadap anggaran belanja, dengan persentase rata-rata sebesar 92,82%, dan realisasi belanja langsung terhadap anggaran belanja rata-rata sebesar 79,20% dengan penyumbang terbesar dari belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Sedangkan belanja modal rata-rata hanya mampu terealisasi sebesar 70,45%. Hal ini tentunya akan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk lima tahun kedepan untuk lebih optimal dalam pengelolaan belanja modal melalui percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, karena realisasi belanja modal merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah.

Tabel. 3.7.
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (dlm juta rupiah)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (dlm jutaan rupiah)	Prosentase
1	2012	230,916.43	417,696.75	55.28
2	2013	244,560.83	467,549.89	52.31
3	2014	259,805.35	471,681.65	55.08
4	2015	269,218.83	600,745.82	44.81
5	2016	336,531.81	785,331.44	42.85

Sumber : BKD Kabupaten Lembata, 2017

Tabel. 3.8.
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan
Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

No	TA	Total Belanja Pendidikan (dlm juta rupiah)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (dlm jutaan rupiah)	Proporsi
1	2012	141,401.71	417,696.75	33.85
2	2013	137,296.48	467,549.89	29.37
3	2014	138,141.67	471,681.65	29.29
4	2015	29,595.19	600,745.82	4.93
5	2016	13,703.79	785,331.44	1.74

Sumber : BKD Kab. Lembata, 2017

Dari table 3.7 dapat dilihat bahwa total belanja untuk aparatur meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi persentase proporsi dari kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran cenderung fluktuatif, dengan proporsi 3 tahun terakhir menurun dari 55,08% di 2014 menjadi 44,81% di tahun 2015 dan 42,85% di tahun 2016 . Hal menggambarkan bahwa dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya menekan kebutuhan belanja aparatur untuk mengutamakan kebutuhan belanja publik. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun semakin difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat.

Tabel 3.8 menggambarkan proporsi belanja pendidikan terhadap total pembiayaan daerah, yang dapat dijelaskan bahwa total belanja dan proporsi kebutuhan pendidikan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena pemerintah secara serius berkomitmen mengutamakan pemenuhan kebutuhan publik.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran selisih pendapatan daerah dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Apabila selisih positif maka maka pengeluaran daerah dapat dicukupi dari penerimaan pendapatan dan apabila selisih negatif maka harus ditutupi dengan penerimaan pendapatan di luar pendapatan daerah, misalnya dengan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Tabel 3.9 menggambarkan kondisi surplus/defisit riil Kabupaten Lembata dari Tahun 2012 sampai 2016 dengan realisasi yang fluktuatif yakni pada tahun 2012 mengalami surplus sebesar Rp.7,276,123,446.93, di tahun 2013 defisit sebesar Rp.6,774,473,913.32, surplus sebesar Rp.65,400,966,501.07 pada tahun 2014 dan selanjutnya defisit di tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.14,416,571,323.61 dan Rp.51,083,463,586.83.

Tabel. 3.9.
Tabel Surplus/Defisit Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Realisasi Pendapatan Daerah	427,472,869,271.62	468,275,411,653.36	542,082,611,884.73	593,829,248,270.89	739,247,976,777.31
	Dikurangi Realisasi					
2	Belanja Daerah	417,696,745,824.69	467,549,885,566.68	471,681,645,383.66	600,745,819,594.50	785,331,440,364.14
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,500,000,000.00	7,500,000,000.00	5,000,000,000.00	7,500,000,000.00	5,000,000,000.00
	Surplus/Defisif Riil	7,276,123,446.93	(6,774,473,913.32)	65,400,966,501.07	(14,416,571,323.61)	(51,083,463,586.83)

Sumber : BKD Kab. Lembata 2017

Tabel. 3.10.
Tabel Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lembata Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	427,472,869,271.62	468,275,411,653.36	542,082,611,884.73	593,829,248,270.89	739,247,976,777.31
	Dikurangi Realisasi					
2.	Belanja Daerah	417,696,745,824.69	467,549,885,566.68	471,681,645,383.66	600,745,819,594.50	785,331,440,364.14
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,500,000,000.00	7,500,000,000.00	5,000,000,000.00	7,500,000,000.00	5,000,000,000.00
A	**DefisitRiil**	**7,276,123,446.93**	**(6,774,473,913.32)**	**65,400,966,501.07**	**(14,416,571,323.61)**	**(51,083,463,586.83)**
	Realisasi Penerimaan Pembiayaan					
4.	SiLPA TA sebelumnya	42,628,143,640.70	50,044,408,102.63	43,296,976,355.31	107,970,070,912.38	93,546,925,403.77
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	10,009,990,193.00
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	140,141,015.00	21,342,166.00	40,847,666.00	1,200,000.00	50,854,150.00
9.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**42,768,284,655.70**	**50,065,750,268.63**	**43,337,824,021.31**	**107,971,270,912.38**	**103,607,769,746.77**
A-B	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**	**50,044,408,102.63**	**43,291,276,355.31**	**108,738,790,522.38**	**93,554,699,588.77**	**52,524,306,159.94**

Sumber : BKD Kabupaten Lembata, Tahun 2017

Dari tabel penutup defisit anggaran terlihat bahwa adanya surplus riil dengan total realisasi pembiayaan daerah, dengan realisasi yang fluktuatif dari tahun ketahun yakni pada tahun 2012 sebesar Rp.42,628,143,640.70 tahun 2013 naik menjadi sebesar Rp.50,044,408,102.63 di tahun 2014 turun menjadi sebesar Rp.43,296,976,355.31, naik di tahun 2015 menjadi sebesar Rp.107,970,070,912.38 dan turun di tahun 2016 menjadi sebesar Rp.93,546,925,403.77. Kondisi ini menggambarkan kemampuan keuangan yang cukup untuk membiayai belanja daerah. SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran. Sehubungan dengan ini, maka SiLPA bisa bermakna positif maupun negatif. Bermakna positif jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga menjadi *over* target. SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pemerintah. SiLPA yang ada pada APBD Kabupaten Lembata sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan. Hal ini menjadi bahan pertimbangan untuk perencanaan ke depannya agar secara efektif dapat menjalankan program yang telah direncanakan sehingga jumlah SiLPA dapat diperkecil.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan keuangan daerah mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pasal 1 Ayat 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; menyatakan bahwa : Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

Untuk mendukung proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam kurun waktu 5 (tahun) sebelumnya. Analisis ini sangat penting dalam upaya mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang disediakan untuk periode dimaksud, serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas provinsi dan nasional.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran periodik wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik wajib dan mengikat merupakan belanja wajib yang tidak dapat ditunda yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari (1) Belanja Tidak Langsung yang meliputi : Gaji dan Tunjangan, Penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Operasional KDH/WKDH, Belanja Bunga, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga; (2) Belanja Langsung yang meliputi : Belanja Program Pendidikan dan Kesehatan, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Jasa Kantor, Belanja Sewa Gedung Kantor, Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor; (3) Pembiayaan Pengeluaran yang meliputi : Pembentukan Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang.

Pengeluaran Periodik Wajib dan mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lembata Tahun 2012 sampai 2016 secara angka dapat dilihat pada table 3.11 perkembangannya fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2.55%. Sedangkan Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lembata Tahun 2017-2023 dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel. 3.11.
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lembata 2012-2016

URAIAN PENGELUARAN	TAHUN					RATA-RATA
	2012	2013	2014	2015	2016	PERTUMBUHAN
Belanja Tidak Langsung						
Belanja Gaji dan Tunjangan	184,983,864,546.00	201,261,192,512.00	220,590,584,468.00	239,678,809,508.00	237,173,877,198.00	5.10
Belanja Penerimaan Pimpinan & ADPRD & Operasional KDH/Wakil KDH	940,880,000.00	1,761,600,000.00	1,761,600,000.00	1,761,600,000.00	1,761,600,000.00	13.36
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	295,435,506.00	285,000,000.00	327,836,603.00	351,514,793.00	295,604,710.00	0.01
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa	23,097,076,055.00	26,514,925,309.00	29,011,712,088.00	88,165,600,767.00	138,633,639,739.00	43.11
Belanja Tidak Terduga	2,123,490,842.00	189,400,000.00	4,549,255,031.00	4,000,000,000.00	1,000,000,000.00	(13.98)
	211,440,746,949.00	**230,012,117,821.00**	**256,240,988,190.00**	**333,957,525,068.00**	**378,864,721,647.00**	**12.37**
Belanja Langsung						
Belanja Program Pendidikan dan Kesehatan	194,237,369,034.00	197,177,171,861.00	238,561,621,848.00	251,144,907,232.00	65,486,966,095.00	(19.54)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1,802,840,000.00	875,500,000.00	912,500,000.00	1,206,250,000.00	1,342,500,000.00	(5.73)
Belanja Jasa Kantor (tagihan listrik, telepon, air dan sejenisnya)	9,245,818,263.00	10,006,053,076.00	10,695,829,605.00	15,420,587,196.00	26,622,199,704.00	23.55
Belanja Sewa Gedung/Kantor	731,171,999.00	598,580,750.00	621,980,000.00	852,004,000.00	804,550,000.00	1.93
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	68,477,750.00	79,095,000.00	200,162,000.00	146,680,000.00	516,337,200.00	49.79
	206,085,677,046.00	**208,736,400,687.00**	**250,992,093,453.00**	**268,770,428,428.00**	**94,772,552,999.00**	**(14.39)**
Pengeluaran Pembiayaan						
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
	417,526,423,995.00	**438,748,518,508.00**	**507,233,081,643.00**	**602,727,953,496.00**	**473,637,274,646.00**	**2.55**

Sumber : BKD Kabupaten Lembata, Tahun 2017

Tabel. 3.12.
Proyeksi Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lembata 2017-2022

Uraian	APBD TA 2017	PROYEKSI				
		2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Tidak Langsung						
Belanja Gaji dan Tunjangan	217,432,576,098.00	231,383,431,880.00	242,952,603,474.00	255,100,233,647.70	267,855,245,330.09	281,248,007,596.59
Belanja Penerimaan Pimpinan & ADPRD & Operasional KDH/Wakil KDH	1,761,600,000.00	2,773,380,000.00	2,912,049,000.00	3,057,651,450.00	3,210,534,022.50	3,371,060,723.63
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	4,105,594,848.00	1,782,000,000.00	1,817,640,000.00	1,817,640,000.00	1,908,522,000.00	2,099,374,200.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	***223,299,770,946.00***	***235,938,811,880.00***	***247,682,292,474.00***	***259,975,525,097.70***	***272,974,301,352.59***	***286,718,442,520.21***
Belanja Langsung						
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	951,250,000.00	979,787,500.00	1,009,181,125.00	1,039,456,559.00	1,070,640,256.00	1,102,759,464.00
Belanja Jasa Kantor (tagihan listrik, telepon, air dan sejenisnya)	16,632,913,072.00	17,131,900,464.00	17,645,857,478.00	18,175,233,202.00	18,720,490,198.00	19,282,104,904.00
Belanja Sewa Gedung/Kantor	746,717,680.00	746,717,680.00	746,717,680.00	746,717,680.00	746,717,680.00	746,717,680.00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	68,825,000.00	68,825,000.00	68,825,000.00	68,825,000.00	68,825,000.00	68,825,000.00
Jumlah Belanja Langsung	***18,399,705,752.00***	***18,927,230,644.00***	***19,470,581,283.00***	***20,030,232,441.00***	***20,606,673,134.00***	***21,200,407,048.00***
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	**241,699,476,698.00**	**254,866,042,524.00**	**267,152,873,757.00**	**280,005,757,538.70**	**293,580,974,486.59**	**307,918,849,568.21**

Sumber : BKD Kab. Lembata-2017;

3.3.2. Proyeksi Keuangan Daerah

A. Pendapatan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022, perkiraan kebutuhan anggaran selama lima (5) tahun disusun dengan mengacu pada pendekatan penganggaran jangka menengah. Pendekatan penganggaran jangka menengah ini diharapkan mendorong perencanaan berbasis kinerja, memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah dan swasta, serta memberikan kepastian dan kejelasan pola belanja dan investasi Pemerintah Kabupaten Lembata selama lima tahun ke depan. Dengan pendekatan penganggaran jangka menengah tersebut, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan menyusun program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis SKPD secara lebih cermat, akurat dan berbasis kinerja.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lembata selama periode tahun 2017-2022 diarahkan pada hal-hal berikut.

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
   a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
   b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
   c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
   d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan perpajakan;
   e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui pengawasan di lapangan secara terus-menerus, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kabupaten Lembata.
   f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah seperti gedung, asrama, aula dan aset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lembata sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan asset tersebut;
   g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba BUMD;
   h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah;
   i. Melakukan Kerjasama dengan Luar Negeri/Negara Lain
2. Mengupayakan peningkatan penerimaaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.
   a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
   b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;

c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
d. Mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus.

3. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan perangkat daerah dalam pengelolaan berbagai asset daerah;
4. Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah menurut peraturan perundang-undangan.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Lembata tahun 2017-2022 diperkirakan meningkat sampai dengan tahun 2022. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan PAD terutama pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah; serta kenaikan dana perimbangan. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus diperkirakan akan meningkat.

Sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah diperkirakan akan meningkat. Sementara, sumbangan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah tetap masih tinggi. Dengan kata lain, dana perimbangan masih menjadi sumber utama bagi pendapatan daerah. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah diarahkan agar mendorong percepatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya perkembangan ekonomi yang semakin cepat akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pelaku usaha dan pada akhirnya akan memberikan pendapatan pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah.

Tabel. 3.13.
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kabupaten Lembata 2017-2022

Nomor Urut	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**724,419,795,222.00**	**812,010,816,168.00**	**831,249,246,933.30**	**877,102,336,317.00**	**928,793,760,345.00**	**955,407,527,515.80**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**30,691,652,274.00**	**48,386,451,394.00**	**51,991,153,920.60**	**57,881,338,653.00**	**66,349,339,039.00**	**77,943,518,001.00**
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	7,079,217,500.00	9,170,000,000.00	10,833,000,000.00	12,158,925,000.00	13,381,008,750.00	16,683,761,625.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9,214,751,160.00	15,389,496,860.00	17,193,048,658.50	19,813,507,461.00	24,612,295,530.00	30,151,048,587.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,200,000,000.00	5,377,688,311.00	5,915,457,142.10	6,802,775,713.00	7,823,192,070.00	8,996,670,881.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9,197,683,614.00	18,449,266,223.00	18,049,648,120.00	19,106,130,479.00	20,532,842,689.00	22,112,036,908.00
1.2.1	**Dana Perimbangan**	**574,069,137,000.00**	**637,819,868,000.00**	**647,163,371,400.00**	**679,521,539,971.00**	**724,215,758,929.00**	**736,046,117,514.80**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10,176,027,000.00	9,122,109,000.00	9,578,214,450.00	10,057,125,173.00	10,559,981,431.00	11,087,980,503.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	467,239,940,000.00	466,007,663,000.00	489,308,046,150.00	513,773,448,458.00	550,180,262,841.00	559,265,350,281.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	96,653,170,000.00	162,690,096,000.00	148,277,110,800.00	155,690,966,340.00	163,475,514,657.00	165,692,786,730.80
1.3	**Lain-Lain Pendapatan yang Sah**	***119,659,005,948.00***	***125,804,496,774.00***	***132,094,721,612.70***	***139,699,457,693.00***	**138,228,662,377.00**	**141,417,892,000.00**
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	110,907,914,000.00	12,227,804,774.00	12,839,195,012.70	14,481,154,763.00	14,155,212,502.00	14,862,973,127.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8,751,091,948.00	113,576,692,000.00	119,255,526,600.00	125,218,302,930.00	124,073,449,875.00	126,554,918,873.00
	Jumlah Pendapatan	**724,419,795,222.00**	**812,010,816,168.00**	**831,249,246,933.30**	**877,102,336,317.00**	**928,793,760,345.00**	**955,407,527,515.80**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata, 2017

B. Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Lembata akan melakukan perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan dengan berbagai program dan kegiatan unggulan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lembata 2017-2022.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Lembata pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan konsisten sehingga setiap belanja yang dilakukan seluruh perangkat daerah harus dapat menjamin terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022. Oleh sebab itu, pelaksanaan program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata harus mampu menghasilkan keluaran, hasil dan dampak positif dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
2. Mengembangkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terpadu sehingga seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lembata menyusun dan menetapkan belanja dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara konsisten sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lembata 2017-2022. Strategi ini dilakukan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang disebabkan oleh program dan kegiatan yang tumpang tindih, tidak terarah, tidak konsisten dengan perencanaan tugas pokok dan fungsi, serta tidak memberikan sumbangan nyata bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan;
3. Meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah agar mampu merencanakan kegiatan secara cermat, akurat dan terukur disertai dengan indiaktor kinerja yang jelas, spesifik, terukur, masuk akal, dapat dicapai agar belanja daerah menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara nyata;
4. Memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam pelaksanaan berbagai urusan, program dan kegiatan pembangunan melalui pendelegasian berbagai urusan, program dan kegiatan pembangunan dari perangkat daerah kepada Pemerintah Desa dan kecamatan; peningkatan jumlah dan kapasitas aparat Pemerintah Desa dan kecamatan; penyiapan tenaga pendamping pembangunan desa dan kecamatan baik dari perangkat daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Kebijakan belanja langsung daerah Pemerintah Kabupaten Lembata selama tahun 2017-2022 mengutamakan pada pencapaian hasil program dan kegiatan melalui belanja langsung dengan arah sebagai berikut.

1) Meneruskan dan mempertajam pelaksanakan pembangunan desa;
2) Melaksanakan program unggulan;
3) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lembata yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
4) Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin, peningkatan prasarana dan sarana pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, dan penyebaran tenaga pendidik;
5) Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang baik, cepat, bermutu, dan terjangkau melalui program berobat gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, dan pelaksanaan jaminan sosial;
6) Mengoptimalkan belanja modal yang dapat memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan khususnya yang berkaitan dengan

pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum seperti pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, sarana transportasi dan lainnya;

7) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8) Meningkatkan efektivitas Dana Desa yang diberikan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah perdesaan, dan kelurahan;
9) Meningkatkan sinergi anggaran melalui dana sharing antara APBD Kabupaten Lembata, APBD Provinsi dan APBN.
10) Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien terutama kegiatan yang lebih dari 1 tahun (*multiyears*) yang berbasis kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuaan dalam peraturan peundangan yang berlaku.

Kebijakan belanja tidak langsung selama tahun 2017-2022 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1) Mendorong efektivitas dan efisiensi berbagai program dan kegiatan yang dapat memberi nilai tambah dan peningkatan mutu pelayanan umum dan administrasi pemerintahan;
2) Mengoptimalkan pelayanan umum dan administrasi pemerintahan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara keluaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan daerah;
3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dengan kriteria kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan tindakan antar unit.

Tabel. 3.14.
Proyeksi Belanja Kabupaten Kabupaten Lembata 2017-2022

Nomor Urut	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2	**BELANJA DAERAH**	**821,756,131,727.00**	**838,694,493,563.00**	**857,373,383,434.26**	**890,440,354,812.00**	**934,373,760,345.00**	**960,997,527,515.80**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**470,020,068,707.00**	**448,361,237,749.00**	**450,848,859,492.66**	**452,493,514,870.71**	**464,947,733,956.56**	**467,425,971,383.64**
2.1.1	Belanja Pegawai	287,229,078,766.00	280,445,361,669.00	282,054,268,902.38	283,695,354,280.43	295,369,261,366.04	297,276,646,593.36
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	16,734,100,230.00	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00	3,300,000,000.00	3,630,000,000.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	350,000,000.00	350,000,000.00	357,000,000.00	360,570,000.00	500,000,000.00	550,000,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa	4,105,594,848.00	1,782,000,000.00	1,817,640,000.00	1,817,640,000.00	1,908,522,000.00	2,099,374,200.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa	160,601,294,863.00	161,033,876,080.00	161,869,950,590.28	161,869,950,590.28	161,869,950,590.53	161,869,950,590.28
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
2.2	**Belanja Langsung**	**351,736,063,020.00**	**390,333,255,814.00**	**406,524,523,941.60**	**437,946,839,941.29**	**469,426,026,388.44**	**493,571,556,132.17**
2.2.1	Belanja Pegawai	60,601,956,500.00	32,222,671,866.00	35,661,992,975.60	43,489,413,424.87	51,214,331,094.38	50,078,896,343.17
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	131,183,282,750.00	172,391,163,013.00	178,633,853,943.00	185,917,987,801.35	201,254,837,318.53	212,067,764,048.00
2.2.3	Belanja Modal	159,950,823,770.00	185,719,420,935.00	192,228,677,023.00	208,539,438,715.07	216,956,857,975.53	231,424,895,741.00
	Jumlah Belanja	**821,756,131,727.00**	**838,694,493,563.00**	**857,373,383,434.26**	**890,440,354,812.00**	**934,373,760,345.00**	**960,997,527,515.80**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata, 2017- Bappelitbangda, 2017

Dari table 3.14. secara angka terlihat bahwa proyeksi belanja daerah dari tahun ke tahun 2017 perlahan-lahan bergerak naik sampai 2022 dengan rata-rata pertumbuhan 3,18%. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata terus berusaha seoptimal mungkin mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan partisipastif dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dan berorientasi pada pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan seperti tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lembata 2017-2022 dan juga bagian dari upaya dan tekad yang kuat dan bulat Pemerintah Kabupaten Lembata untuk mendorong pengelolaan anggaran daerah lebih berpihak kepada masyarakat.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Lembata tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

a) Mencegah terjadinya Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten, serta prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja.
b) Mengembangkan skema kerjasama pemerintah dan swasta untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan infrastruktur publik dan kegiatan strategis lainnya.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun angaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Lembata tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

a) Mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.
b) Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran.
c) Mendukung penyertaan modal dan pemberian pinjaman pada saat terjadi surplus anggaran dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel. 3.15.
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Kabupaten Lembata 2017-2022

Nomor Urut	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**99,836,336,505.00**	**29,183,677,395.00**	**28,624,136,500.96**	**15,838,018,495.00**	**8,080,000,000.00**	**8,090,000,000.00**
3.1.1	SILPA tahun Sebelumnya	99,786,336,505.00	29,133,677,395.00	28,564,136,500.96	15,768,018,495.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjulan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	50,000,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00	70,000,000.00	80,000,000.00	90,000,000.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**99,836,336,505.00**	**29,183,677,395.00**	**28,624,136,500.96**	**15,838,018,495.00**	**8,080,000,000.00**	**8,090,000,000.00**
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2,500,000,000.00**	**2,500,000,000.00**	**2,500,000,000.00**	**2,500,000,000.00**	**2,500,000,000.00**	**2,500,000,000.00**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi Pemda)	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**2,500,000,000.00**	**2,500,000,000.00**	**2,500,000,000.00**	**2,500,000,000.00**	**2,500,000,000.00**	**2,500,000,000.00**
	Pembiayaan Netto	**97,336,336,505.00**	**26,683,677,395.00**	**26,124,136,500.96**	**13,338,018,495.00**	**5,580,000,000.00**	**5,590,000,000.00**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata, 2017

D. Pengelolaan Dana Masyarakat dan Mitra Pihak Ketiga

Pemerintah Kabupaten Lembata akan terus mengoptimalkan pengelolaan dana masyarakat dan mitra pihak ketiga untuk mendukung proses pembangunan Kabupaten Lembata. Kebijakan pengelolaan dana masyarakat dan mitra pihak ketiga Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 diarahkan untuk membangun kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Lembata. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

a) Mengembangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menyederhanakan proses perijinan;
b) Melakukan harmonisasi peraturan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Lembata;
c) Mengelola kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati bersama;
d) Meningkatkan kerjasama antara BUMD dan pihak swasta;
e) Mendorong kerjasama investasi regional, nasional dan internasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kegiatan yang melibatkan peran masyarakat luas seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; pariwisata serta industri pengolahan hasil pertanian;
f) Meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan, dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat;
g) Mengembangkan promosi secara aktif melalui penguatan jaringan kerjasama regional, nasional dan internasional dan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi.

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan gambaran pendapatan daerah dan pembiayaan daerah, serta gambaran belanja daerah serta pengeluaran periodik yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lembata dan rencana penggunaanya dapat diproyeksikan untuk lima tahun ke depan hingga kondisi akhir RPJMD Kabupaten Lembata
disajikan sebagai berikut :

Tabel. 3.16.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kab. Lembata 2017-2022

Uraian	APBD TA 2017	PROYEKSI				
		2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan	724,419,795,222	812,010,816,168	831,249,246,933	877,102,336,317	928,793,760,345	955,407,527,516
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Riil Anggaran	99,786,336,505	29,133,677,395	28,564,136,501	15,768,018,495	8,000,000,000	8,000,000,000
Total Penerimaan	**824,206,131,727**	**841,144,493,563**	**859,813,383,434**	**892,870,354,812**	**936,793,760,345**	**963,407,527,516**
Dikurangi :						
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib & Mengikat serta Prioritas Utama	241,699,476,698	254,866,042,524	267,152,873,757	280,005,757,539	293,580,974,487	307,918,849,568
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**582,506,655,029**	**586,278,451,039**	**592,660,509,677**	**612,864,597,273**	**643,212,785,858**	**655,488,677,948**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata, 2017

Tabel. 3.17.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I.	**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan**	**582,506,655,029.00**	**586,278,451,039.00**	**592,660,509,677.26**	**612,864,597,273.30**	**643,212,785,858.42**	**655,488,677,947.59**
	Rencana Alokasi Prioritas I						
II.a	Belanja Langsung	351,736,063,020.00	390,333,255,814.00	406,524,523,941.60	437,946,839,941.29	469,426,026,388.44	493,571,556,132.17
II.b	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	Dikurangi						
II.c	Belanja Langsung Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	18,399,705,752.00	18,927,230,644.00	19,470,581,283.00	20,030,232,441.00	20,606,673,134.00	21,200,407,048.00
II.d	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal)	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
II.	**Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b - II.c-II.d)**	**330,836,357,268.00**	**368,906,025,170.00**	**384,553,942,658.60**	**415,416,607,500.29**	**446,319,353,254.44**	**469,871,149,084.17**
	Sisa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran P1	251,670,297,761.00	217,372,425,869.00	208,106,567,018.66	197,447,989,773.01	196,893,432,603.98	185,617,528,863.42
	Rencana Alokasi Prioritas II						
III.a	Belanja Tidak Langsung	470,020,068,707.00	448,361,237,749.00	450,848,859,492.66	452,493,514,870.71	464,947,733,956.56	467,425,971,383.64
	Dikurangi						
III.b	Belanja Tidak Langsung Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	223,299,770,946.00	235,938,811,880.00	247,682,292,474.00	259,975,525,097.70	272,974,301,352.59	286,718,442,520.21
III	**Total Rencana Pengeluaran Prioritas II (III.a-III.b)**	**246,720,297,761.00**	**212,422,425,869.00**	**203,166,567,018.66**	**192,517,989,773.01**	**191,973,432,603.98**	**180,707,528,863.42**
	Surplus Anggaran Riil atau Berimbang (I-II-III)	**4,950,000,000.00**	**4,950,000,000.00**	**4,940,000,000.00**	**4,930,000,000.00**	**4,920,000,000.00**	**4,910,000,000.00**

Sumber : Badan Keuangan Daerah-Bappelitbangda, 2017

Berdasarkan proyeksi pada table 3.16 dan 3.17, menunjukan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lembata pada tahun pertama (2018) sampai tahun kelima (2022) meningkat dengan komposisi kurang lebih 50% dari Total Penerimaan. Hal ini tentu saja diharapkan berimplikasi positif terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lembata, karena kapasitas riil kemampuan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai modal pemerintah daerah dalam membiayai program-program mendukung visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2017-2022 yang diarahkan untuk :

1. Peningkatan kualitas pendidikan, derajad kesehatan, optimalisasi peran pemuda dan perempuan serta peningkatan kesadaran hukum;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur, transportasi, air bersih, energi, komunikasi dan penataan kota;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan sumber daya ekonomi laut dan maritime serta ekonomi kreatif berbasis industri dan pariwisata berkelanjutan;
4. Percepatan pengembangan dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan;
5. Peningkatan Pendapatan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Pembangunan Pedesaan berbasis Industri berkelanjutan;
6. Penataan ASN dan Pendayagunaan SDM berbasis IT.

Dalam rangka pencapaian visi, misi 2017-2022, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III, dimana prioritas I mendapat prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I, merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated)* Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang defenitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (dua pulu persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan public, bersifat monumental, berskala besar dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi proritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti : tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.
Adapun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.18.
Kerangka Pendanaan Alokasi Riil Keuangan Daerah

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prioritas I	258,781,160,705.20	269,729,606,796.30	273,119,463,772.39	286,762,645,537.84	307,016,652,384.45	314,826,510,200.98
Prioritas II	110,906,211,730.80	115,598,402,912.70	117,051,198,759.59	122,898,276,659.08	131,578,565,307.62	134,925,647,228.99
Prioritas III	212,819,282,593.00	200,950,441,330.00	202,489,847,145.28	203,203,675,076.38	204,617,568,166.35	205,736,520,517.62
TOTAL	**582,506,655,029.00**	**586,278,451,039.00**	**592,660,509,677.26**	**612,864,597,273.30**	**643,212,785,858.42**	**655,488,677,947.59**

Sumber : Badan Keuangan Daerah-Bappelitbangda, 2017



Bab 4

Permasalahan & Isu Strategis Daerah

Bagian ini terdiri dari 2 (dua) sub bagian yang terkait satu sama lain yakni uraian tentang permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis internasional, nasional, regional maupun isu lokal. Permasalahan dan isu strategis ini tidak terlepas dari hasil analisis pada bab 2, dan menjadi dasar bagi penyusunan prioritas pembangunan daerah yang diramu dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2017– 2022.



BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu strategis Kabupaten Lembata dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan visi dan misi pembangunan Kabupaten Lembata 2017-2022. Untuk menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan, analisis isu strategis juga dimulai dengan menelaah dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman dan rujukan yaitu : RPJPD Kabupaten Lembata 2005-2025, RPJMN 2015-2019, RPJMD Provinsi NTT 2013-2018 dan RTRW Kabupaten Lembata 2011-2031. Selain itu, analisis isu strategis Kabupaten Lembata juga mengidentifikasi strategi dan arah kebijakan yang dapat menjamin upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lembata dalam lima tahun tahun mendatang (2017-2022).

4.1. TELAAH TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN

4.1.1. Telaah RPJPD Kabupaten Lembata 2005 – 2025

RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD, karena RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan tahapan ketiga pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Lembata. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Oleh karena itu, tekanan pada skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua terus berkesinambungan dari periode satu ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang telah disusun dengan Visi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 adalah **" Kabupaten Lembata yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing"** yang ditempuh dengan misi sebagai berikut :

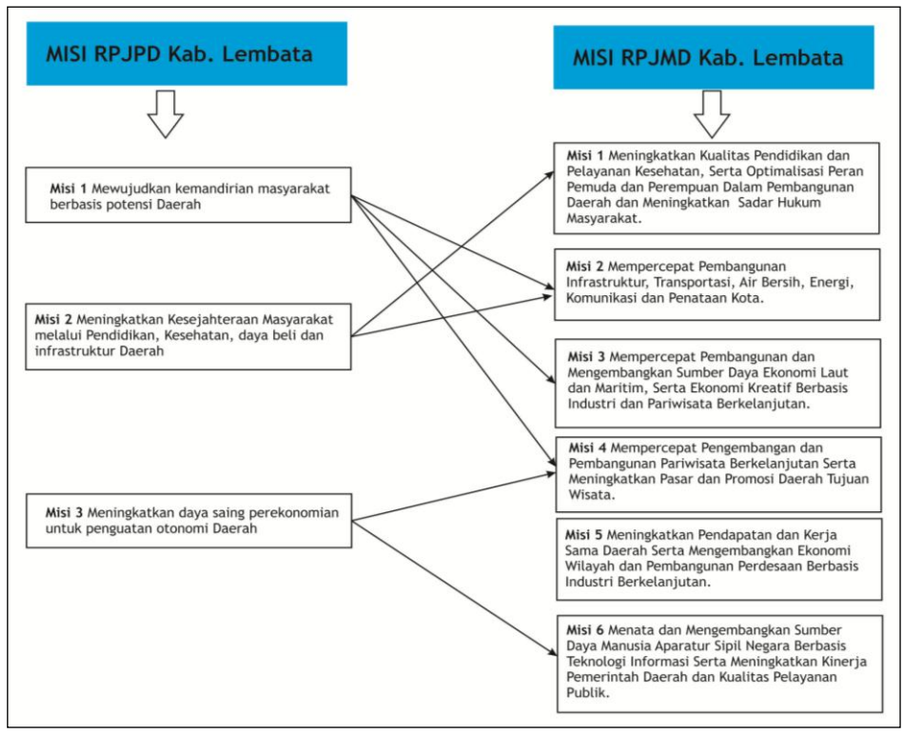
a) Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Berbasis Potensi Daerah;
b) Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Daya Beli dan Infrastruktur Daerah;
c) Meningkatkan Daya Saing Perekonomian untuk Penguatan Otonomi Daerah;

Dari sisi keberlanjutan kebijakan pembangunan daerah, maka tahap III dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mengacu pada beberapa hal: Kemiskinan berfokus pada sasaran global yaitu terlibat dalam pengembangan *Sustainable Development Goals* (*SDG's*) sebagai kelanjutan dari *MDG's* sehingga tercapai pengurangan kemiskinan yang signifikan. Kemajuan Lembata ditentukan pula dengan kualitas sumberdaya manusia berdaya saing global antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran; meningkatnya pendidikan masyarakat dan mutu pendidikan, relevansi pendidikan serta daya saing lulusan; meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan status gizi; peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak. Dengan harapan agar wilayah ini berketahanan ekonomi, sosial, politik dan keamanan didukung oleh pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat yang didukung dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan dan sumberdaya lainnya secara terencana dan terkoordinasi serta berkelanjutan; pembukaan daerah – daerah terisolasi dan terpencil; meningkatnya pengembangan IPTEK yang ramah lingkungan; peningkatan jaringan infrastruktur transportasi; meningkatnya promosi wisata budaya, bahari dan alam melalui jaringan teknologi informatika. Untuk menjamin terjangkaunya pembangunan secara adil dan meningkatnya keswadayaan masyarakat, kualitas pembangunan daerah terpadu berbasis desa/kelurahan diperkuat dari segala

aspek yaitu sumberdaya manusianya, ekonomi, infrastruktur, kualitas lingkungan dan lembaga sebagai wahaha berhimpun rakyat dalam menggerakkan pembangunan lebih optimal.

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, maka landasan pertumbuhan ekonomi yang sudah diletakkan pada tahap sebelumnya dikembangkan, khususnya pada keunggulan kompetitif dan komparatif dengan sektor pariwisata sebagai leading sektor. Pembangunan perekonomian perlu diarahkan kepada pembangunan sektor primer, sekunder dan tersier yang terintegrasi dan saling mendukung, sehingga pertumbuhan sektor primer mendorong pertumbuhan sektor sekunder, dan bersama-sama keduanya mendorong sektor tersier begitu pun sebaliknya. Pembangunan perilaku ekonomi perlu diupayakan ke arah yang lebih untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui upaya-upaya yang mendorong pergeseran perilaku produksi, investasi, menabung dan konsumsi ke arah yang lebih memungkinkan terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi. Oleh karena itu perlu dikembangkan pendekatan ekologi manusia yang mampu menyelaraskan kaidah-kadaih sosial ekonomi masyarakat dengan kaidah-kaidah ekonomi. Untuk menjamin terwujudnya pembangunan ekonomi agregatif kewilayahan dan berdaya ungkit regional maka basis ekonomi wilayah yang menopang kekuatan Lembata diwujudkan melalui; **(1)** Berkembangnya jaringan ekonomi regional Lembata-ALTAKA-Wakatobi, Lembata-Flores dengan Timor Leste, Kerjasama Utara-Utara **(2)** Pengembangan KEK ALTAKA yang didukung jaringan aksesibilitas moda terpadu TOL Laut-Udara dan Darat, **(3)** Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus dan Budidaya, yang terbagi dalam beberapa klaster dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah; **(4)** Interkoneksi pertumbuhan dalam kawasan Lembata – Tarakan – Makasar – Surabaya sebagai Zona Ekspor, **(5)** Meningkatkan kelas even kepariwisataan *rally* wisata bahari sebagai triger kegiatan kepariwisataan dan menjadi bagian dari kalender even nasional dan internasional, **(6)** Pengembangan sumberdaya manusia yang mampu memasuki persaingan Global sebagai bagian dari kesiapan memanfaatkan MEA yang dimulai akhir tahun 2015.

Gambar 4.1.
Telaah RPJPD



4.1.2. Telaah RPJMN Tahun 2015 - 2019

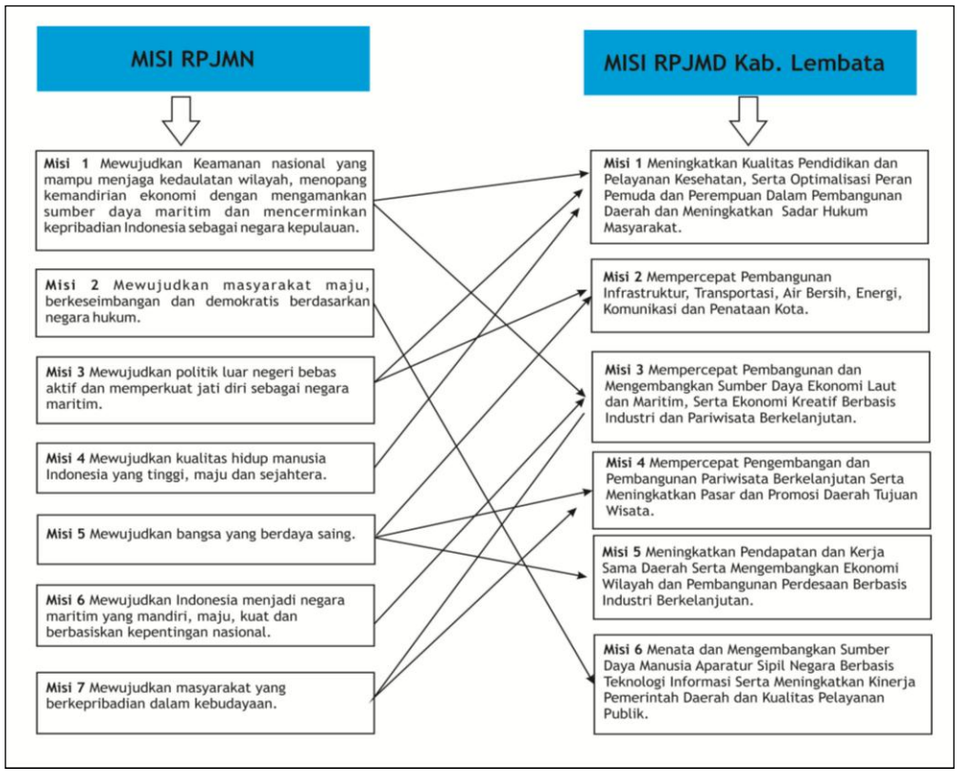
RPJMN Tahun 2015 - 2019, memiliki visi "TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG". Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka RPJMN menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan.

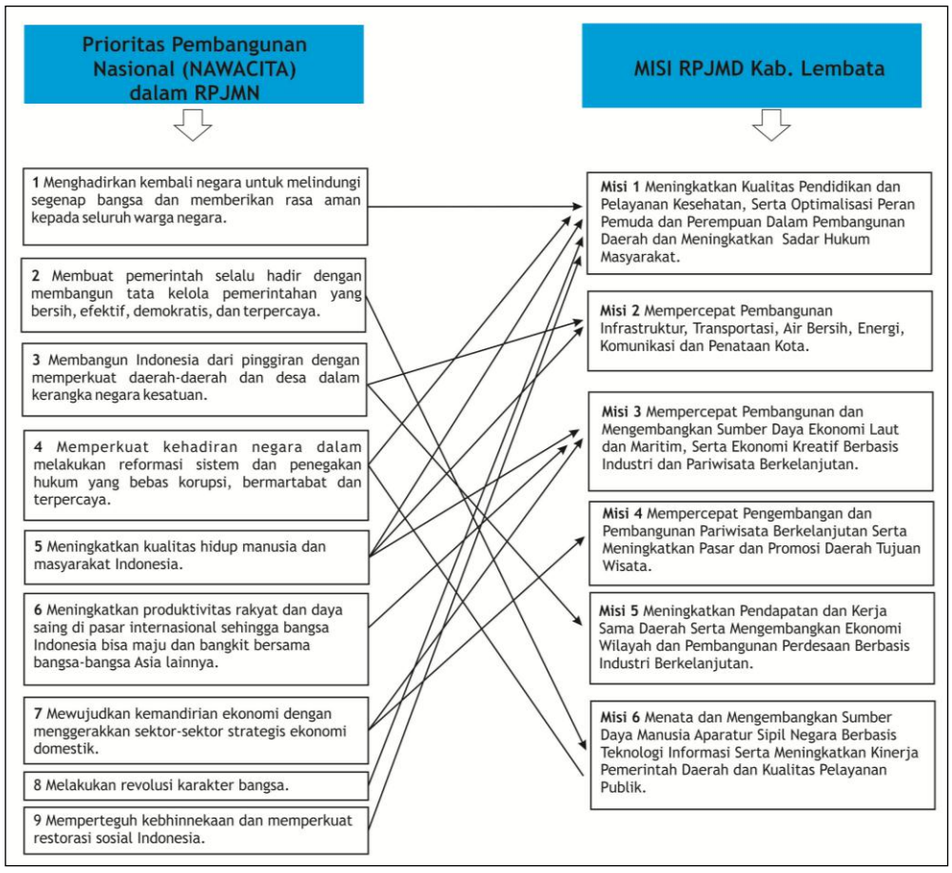
Dengan berlandaskan pada visi dan misi tersebut, maka agenda pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Gambar 4.2.
Telaah RPJMN



Gambar 4.3.
Keterkaitan NAWA CITA dengan MISI RPJMD LEMBATA



4.1.3. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Dari perspesktif keberlajutan kebijakan pembangunan daerah maka RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan implementasi tahapan ketiga dari RPJPD Kabupaten Lembata. Salah satu hal yang menjadi sasaran dalam pembangunan jangka panjang daerah tersebut adalah komitmen untuk terlibat dalam pencapaian tujuan SDG's.

Tabel 4.1
Keterkaitan SDG'S dengan RPJMD 2017-2022

MISI RPJMD 2017-2022	Tujuan SDG's
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan, Serta Optimalisasi Peran Pemuda Dan Perempuan Dalam Pembangunan Daerah Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat	• Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. (Tujuan 4); • Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (Tujuan 3) • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (Tujuan 8) • Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan (Tujuan 5); • Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (Tujuan 16) • Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun (Tujuan 1).
MISI 2 : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur, Transportasi, Air Bersih, Energi, Komunikasi Dan Penataan Kota	• Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; (Tujuan 9) • Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua (Tujuan 7) • Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (Tujuan 6) • Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; (Tujuan 11) • Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (Tujuan 13) • Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti-kan kehilangan keanekaragaman hayati (Tujuan 15) • Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan (Tujuan 14); • Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun (Tujuan 1).
MISI 3 : Mempercepat Pembangunan Dan Mengembangkan Sumber Daya Ekonomi Laut Dan Maritim, Serta Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Dan Pariwisata Berkelanjutan	• Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan (Tujuan 14); • Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; (Tujuan 12) • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (Tujuan 8) • Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (Tujuan 9); • Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun (Tujuan 1).
MISI 4 : Mempercepat Pembangunan Dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Serta Meningkatkan Pasar Dan Promosi Daerah Tujuan Wisata	• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (Tujuan 8) • Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (Tujuan 12); • Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun (Tujuan 1).
MISI 5 : Meningkatkan Pendapatan Dan Kerja Sama Daerah Serta Mengembangkan	• Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan (Tujuan 2); • Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun (Tujuan 1)

MISI RPJMD 2017-2022	Tujuan SDG's
Ekonomi Wilayah Dan Pembangunan Perdesaan Berbasis Industri Berkelanjutan	• Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan; (Tujuan 17) • Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara (Tujuan 10)
MISI 6 : Menata Dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Berbasis Teknologi Informasi Serta Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dan Kualitas Pelayanan Publik	• Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; (Tujuan 16) • Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (Tujuan 17);

4.1.4. Telaah RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2011 – 2031

Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tentu hal ini didasarkan atas azas penyusunan rencana tata ruang wilayah dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang nasional, sebagai berikut:

1. Keterpaduan;
2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
3. Keberlanjutan;
4. Keberdayagunaan dan keberhasil-gunaan;
5. Keterbukaan;
6. Kebersamaan dan kemitraan;
7. Perlindungan kepentingan umum;
8. Kepastian hukum dan keadilan; serta
9. Akuntabilitas.

Sementara itu, ditinjau dari tujuan penyelenggaraan penataan ruang nasional adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Sehingga jika dilihat berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang wilayah nasional serta isu pengembangan wilayah dan visi yang telah ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Lembata , maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lembata sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 bertujuan untuk mewujudkan daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui optimasi/pengaturan ruang yang bertumpu pada sektor kelautan dan perikanan, pertanian dan kehutanan serta pariwisata.

Selanjutnya Kebijakan Penataan Ruang Daerah terdiri atas :

a) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah yang maju, mandiri, sejahtera dan berdaya saing;

b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan prasarana pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah untuk mendukung terlaksananya daerah yang maju, mandiri, sejahtera dan berdaya saing;

c)pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

d) pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;

e) pemantapan fungsi lindung melalui pemeliharaan dan pelestarian terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadapnya;

f) pemantapan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana;

g) perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;

h) pengendalian pemanfaatan kegiatan pada kawasan budidaya hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, pemukiman, militer dan kepolisian yang mengindahkan kaidah-kaidah konservasi lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan

i) pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya, dan pelestarian lingkungan hidup.

Strategi Penataan Ruang

Strategi pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata meliputi:

a) menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa;

b) mempertahankan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal; dan

c) mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan prasarana pengelolaan lingkungan yang terpadu meliputi :

a) meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut maupun udara;

b) mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan informasi;

c) meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi baru, terbarukan, dan tak terbarukan secara optimal; dan

d) meningkatkan jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.

Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi :

a) menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang air dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi;

b) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan

c) mendorong pengelolaan hutan lindung melalui hutan kemasyarakatan.

Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, meliputi :

a) menjaga luasan dan fungsi dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya baik berupa hutan lindung maupun kawasan bergambut dan resapan air;
b) mengendalikan kegiatan pada kawasan lindung setempat dan kawasan suaka alam sehingga tidak mengganggu dan merusak fungsi lindung kawasan;
c) mencegah kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas dan kuantitas air serta morfologi sungai;
d) mencegah kegiatan budidaya di sepanjang pantai yang dapat mengganggu atau merusak kondisi alam pantai terutama pada kawasan gumuk pasir;
e) mencegah kegiatan budidaya di sekitar mata air yang dapat mengganggu kelestarian dan debit air pada mata air; dan
f) mengendalikan perkembangan fisik permukiman di kawasan Waiteba dan Bobu.

Strategi untuk memantapkan fungsi lindung melalui pemeliharaan dan pelestarian terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadapnya, meliputi :

a) mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya Daerah dan pariwisata budaya;
b) mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan pariwisata rekreasi dan pendidikan;
c) mencegah kegiatan budidaya di sekitar cagar budaya yang dapat mengganggu atau merusak kelestarian cagar budaya; dan
d) melarang kegiatan budidaya apapun yang merusak fungsi dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Strategi memantapkan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana, meliputi :

a) pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
b) pemanfaatan kawasan rawan bencana yang terlarang untuk dibangun sebagai ruang terbuka hijau; dan
c) penetapan pola ruang yang mewadahi prinsip-prinsip mitigasi bencana, minimal berupa penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana dari permukiman penduduk.

Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi:

a) menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Daerah untuk mendorong pengembangan daerah;
b) mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
c) mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Strategi pengendalian pemanfaatan kegiatan pada kawasan budidaya hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, militer dan kepolisian yang mengindahkan kaidah-kaidah konservasi lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:

a) mengembangkan lahan perkebunan masyarakat sekitar pemukiman dalam kawasan hutan lindung melalui hutan kemasyarakatan;
b) menetapkan lahan pertanian abadi dan melarang upaya konversi lahan pertanian untuk peruntukan lain;
c) mengembangkan cluster-cluster kawasan perikanan dan pengembangan kawasan minapolitan daerah;
d) mengembangkan pertambangan yang mengindahkan kaidah-kaidah konservasi lingkungan, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
e) khusus pertambangan bahan tambang mineral logam dan radioaktif ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kearifan setempat;
f) melarang segala bentuk industri yang menimbulkan pencemaran lingkungan;
g) mengembangkan industri besar dalam lingkup kawasan industri yang ditetapkan;
h) mengembangkan bentuk-bentuk industri mikro, kecil dan menengah yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
i) mengembangkan cluster-cluster kawasan pariwisata;
j) melestarikan nilai-nilai budaya bangsa dan obyek-obyek budaya, ilmu pengetahuan dan pendidikan serta benda cagar budaya;
k) memanfaatkan secara bijaksana obyek dan benda cagar budaya untuk kegiatan pariwisata;
l) mengembangkan pemukiman dalam lingkup kawasan permukiman yang telah ditetapkan;
m) melarang pembentukan kawasan permukiman baru pada kawasan lindung, dan lahan pertanian abadi;
n) menentukan trayek batas sementara dan data awal terhadap kawasan permukiman yang telah ada dalam kawasan hutan lindung untuk diusulkan sebagai enclave;
o) mengalokasikan kawasan militer dan kepolisian dalam rangka pertahanan dan keamanan;
p) mengembangkan wilayah Daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
q) mempertahankan pasar tradisional sebagai salah satu bentuk pelayanan ekonomi masyarakat; dan
r) meningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum lainnya seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, perkantoran dan pemakaman.

Strategi pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya, dan pelestarian lingkungan hidup, meliputi:

a) mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis Daerah yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan strategis;
b) merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Daerah; dan
c) mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan strategis ekonomi Daerah sehingga memberikan nilai tambah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

4.1.5. Telaah RPJMD Provinsi NTT 2013-2018

RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Periode 2013-2018, yaitu Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dicapai melalui 8 (delapan) misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing;
2. Meningkatkan derajad dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat dan ekonomi kepariwisataan dengan mendorong pelaku ekonomi mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;
4. Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah;
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan rakyat;
7. Mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan;
8. Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan.

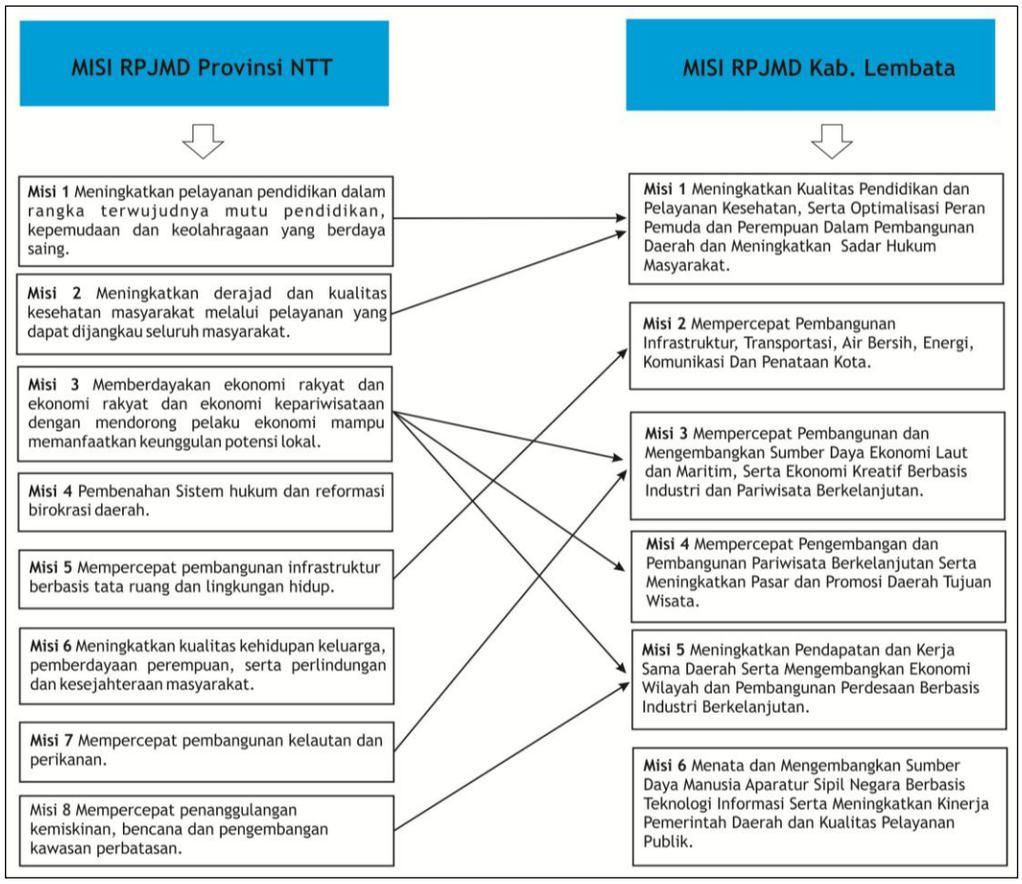
Untuk mewujudkan capaian Visi dan Misi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) Strategi Pokok Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

1. Strategi Kemitraan;
2. Strategi Berkelanjutan;
3. Strategi Peningkatan dan Percepatan;
4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Strategi Keterpaduan Antar Sektor

Selanjutnya untuk mengoptimalkan 5 (lima) strategi pokok tersebut yang menjadi landasan implementasi seluruh program dan kegiatan pembangunan maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Investasi Pembangunan;
2. Peningkatan dan Percepatan Pembangunan;
3. Perwilayahan Pembangunan;
4. Prioritas Lokasi Pembangunan;

Gambar 4.4.
Telaah RPJMD Provinsi NTT 2013-2018



4.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gambaran antara target dan capaian kinerja pembangunan Kabupaten Lembata.

4.2.1. Permasalahan Geografi dan Demografi

Wilayah Kabupaten Lembata sebagian besar merupakan perbukitan bergelombang, perbukitan terjal dan pedataran yang kering. Permasalahan utama yang harus diatasi adalah ketertinggalan dan keterisolasian desa sebagai akibat terbatasnya akses infrastruktur.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Lembata rata-rata lebih dari 2,60 persen per tahun lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan penduduk secara nasional. Di satu sisi, pertambahan penduduk akan menjadi potensi peningkatan produksi. Di sisi lain, pertambahan penduduk akan menjadi beban daerah apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produksi pangan, pembangunan prasarana dan sarana pelayanan publik. Permasalahan yang harus diatasi pada tahun 2017-2022 adalah kurang meratanya persebaran penduduk antarkecamatan, belum tertatanya administrasi kependudukan, dan terbatasnya prasarana dan sarana publik.

4.2.2. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat

1. Perekonomian Daerah

Dalam dua tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi daerah mengalami perlambatan. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang (2017-2022) adalah belum optimalnya kerjasama antar SKPD dalam mendorong percepatan dan perubahan ekonomi daerah, belum adanya sinergi antara SKPD dan pemerintah desa dalam mendorong pengembangan komoditas unggulan di

setiap desa dan kecamatan, serta belum berkembangnya kerjasama investasi dan perdagangan yang dapat menggerakkan ekonomi daerah.

Struktur ekonomi Kabupaten Lembata saat ini menunjukkan dominasi kegiatan berbasis sumber daya alam terutama pertanian dan perikanan, dan administrasi pemerintahan dengan total sumbangan terhadap nilai PDRB Kabupaten Lembata secara rata-rata lebih dari 63 persen. Tingginya ketergantungan pada kegiatan pertanian, perikanan dan pemerintahan membuat perekonomian Kabupaten Lembata stagnan. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang (2017-2022) adalah belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan; industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan; serta pariwisata.

Disamping itu dalam struktur ekonomi Lembata belum menunjukan secara jelas kontribusi dari tenaga kerja Indonesia/buruh migran padahal ada sebagian masyarakat Lembata yang perekonomian domestiknya bergantung dari para buruh migran atau TKI. Fakta bahwa kontribusi TKI terhadap ketahanan ekonomi (rumah tangga miskin) perbaikan fasilitas rumah, pendidikan anak cukup kuat/besar. Hal ini dikarenakan tiadanya data tentang jumlah buruh migran asal Lembata, tingkat mobilisasi TKI per tahun dan data aliran dana yang masuk ke Lembata dari para TKI.

2. Permasalahan Pembangunan Manusia

Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lembata menunjukkan kemajuan pembangunan terutama pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan IPM Kabupaten Lembata menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2011, angka IPM Kabupaten Lembata sebesar 58,76 meningkat menjadi 62,81 pada tahun 2016 atau mengalami peningkatan sebesar 4,05 poin dalam waktu lima tahun. Walaupun menunjukan tren yang positif IPM Kabupaten Lembata belum berada pada titik yang tinggi. Karena itu, permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang (2017-2022) adalah terbatasnya tenaga pendidikan dan kesehatan, dan terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan; serta belum optimalnya pengembangan ekonomi masyarakat desa dan daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

3. Permasalahan Kemiskinan

Penduduk Kabupaten Lembata sebagian besar tinggal di daerah perdesaan dan pesisir dengan taraf hidup yang terbatas. Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan masih belum optimal mengurangi jumlah penduduk miskin. Angka kemiskinan di Kabupaten Lembata masih lebih dari 22 persen. Selain itu, indeks kedalaman dan indeks keparahan juga relatif tinggi. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Lembata secara fluktuatif terus mengalami penurunan sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 namun pada tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 35.930,- jiwa dan pada kondisi terakhir tahun 2016 mengalami penurunan kembali sebesar 35.180,- jiwa. Sementara angka garis kemiskinan di tahun 2016 adalah Rp.309.992,- per kapita per bulan.

Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Lembata bersifat multidimensi tidak hanya menyangkut rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan pemenuhan hak dasar rakyat atas pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan rasa aman, dan partisipasi. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang (2017-2022) adalah belum optimalnya kerjasama antar SKPD dalam mendorong pemenuhan hak-hak dasar rakyat perdesaan terutama dalam hal penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan rasa aman, dan partisipasi; belum optimalnya kerjasama antar SKPD dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat; belum optimalnya pelaksanaan revitalisasi pertanian, kelautan dan perikanan; serta belum optimalnya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Fakta kemiskinan juga berdampak pada cukup banyak masyarakat Lembata yang memilih untuk menjadi tenaga kerja Indonesia/TKI. Namun kualitas TKI relatif rendah dan TKI asal Lembata kebanyak berstatus TKI illegal karena rendahnya akses masyarakat atas pelayanan dokumen keimigrasian dan rendahnya mutu atau keahlian TKI asal Lembata. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lembata perlu menyiapkan fasilitas layanan keimigrasian dan balai latihan kerja.

4.2.3. Pelayanan Umum

1. Pendidikan

Angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Lembata untuk jenjang pendikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA tercatat masih rendah yang menunjukkan masih adanya penduduk usia sekolah yang belum menikmati pendidikan pada jenjang menurut usia. APS cukup tinggi pada penduduk kelompok umur 7-12 tahun (99,28 persen), Sementara itu, penduduk kelompok umur 16-18 tahun hanya mencapai 69,72 persen di mana umur tersebut adalah umur rata-rata untuk memasuki Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, terutama perempuan di perdesaan (58,10 persen). Ada indikasi bahwa banyak anak mengalami putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah lagi pada kelompok umur tersebut.

Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya jangkauan pelayanan pendidikan menengah dan atas bagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Lembata.

Perluasan jangkauan dan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Lembata sangat ditentukan oleh ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan. Sampai tahun 2016 ketersediaan jumlah sekolah dan guru untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masih belum memadai sehingga dapat menghambat pelayanan pendidikan. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan juga terbatasnya jumlah guru untuk setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan.

2. Kesehatan

Pengembangan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan jumlah dan mutu tenaga kesehatan dan penyediaan obat-obatan. Akan tetapi ditinjau dari aspek ketersediaan tenaga kesehatan (paramedis dan dokter) maka terjadi kesenjangan yang cukup besar antar desa di mana desa - desa dengan kondisi aksesibilitas transportasi yang sulit, kekurangan tenaga paramedis sangat dirasakan. Terbatasnya jumlah tenaga dokter

umum menyebabkan penyebarannya hanya sampai pada tingkat Puskesmas sedangkan Puskesmas Pembantu belum memiliki tenaga dokter umum. Di Kabupaten Lembata hanya terdapat 18 orang Dokter sehingga sering kali pasien harus dirujuk ke daerah lain. Selain itu, derajat kesehatan masyarakat juga sangat ditentukan oleh pemahaman masyarakat dan ketersediaan pasokan makanan dan gizi; serta perbaikan prasarana dan sarana sanitasi dan lingkungan tempat tinggal.

Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan, belum optimalnya Puskesmas dan Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa; terbatasnya jumlah tenaga kesehatan terutama dokter umum dan dokter spesialis, tenaga farmasi dan ahli gizi untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan; serta belum optimalnya Rumah Sakit Umum Daerah sebagai rumah sakit rujukan.

4.2.4. Permasalahan Sarana dan Prasarana Daerah

1. Transportasi

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi sangat penting untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang baik antardesa, antarkecamatan dan antarkabupaten. Transportasi di Kabupaten Lembata mencakup pengembangan transportasi darat, laut dan udara. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya jalan beraspal dibanding keseluruhan panjang jalan, dan sebagian besar jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Di Kabupaten Lembata Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 108.49 Km dari panjang jalan yang dilalaui roda empat 577,03 km. Hal ini menyebabkan kurang lancarnya lalu lintas penduduk dan barang antardesa dan antarkecamatan. Selain itu, di Kabupaten Lembata jalan negara dan jalan provinsi tidak bertambah selama lima tahun. Kondisi ini menyiratkan kurangnya perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembangunan jalan di Kabupaten Lembata. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya transportasi darat yang menghubungkan antardesa dan antarkecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara pusat-pusat produksi dan pusat-pusat perdagangan dan pemasaran.

Kondisi prasarana dan sarana transportasi darat berupa jalan di Kabupaten Lembata sebagian besar masih berupa jalan tanah. Permasalahan yang harus diatasi adalah terbatasnya akses jalan untuk meningkatkan mobilitas penduduk dan barang, membuka keterisolasian dan mempercepat kamajuan desa.

Dari segi intensitas transportasi udara, jumlah penerbangan dan jumlah penumpang di Kabupaten Lembata terus meningkat. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah masih terbatasnya lapangan terbang perintis; serta terbatasnya jangkauan dan jalur penerbangan.

Transportasi laut di Kabupaten Lembata juga terus meningkat terutama transportasi barang dari luar daerah masuk ke Kabupaten Lembata. Permasalahan yang harus diatasi adalah terbatasnya tambatan perahu dan pelabuhan, dan terbatasnya jangkauan transportasi laut untuk mengangkut hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; serta wisatawan.

2. Komunikasi dan Informasi

Pengembangan telekomunikasi dan informasi memegang peran sangat penting dalam menghubungkan antarpenduduk dan antardesa, memajukan kehidupan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Lembata. pembangunan sarana komunikasi dan informasi di kabupaten Lembata masih terbatas. Cakupan pelayanan komunikasi dan informasi belum memadai. Hal ini bisa dilihat dari jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlah siaran radio aktif, jumlah website milik Pemda, jumlah menara telpon yang mana ketersediaannya tidak mengalami peningkatan dan terbatas sejak tahun 2012 hingga tahun 2016. Sementara jumlah Menara telpon genggam sedikit mengalami peningkatan jumlah dari 13 di tahun 2012 menjadi 27 di tahun 2016. Peningkatan jumlah menara telepon genggam yang tidak signifikan ini berdampak pada prosentase penduduk yang menggunakan Hp/Telp. Prosentase tertinggi di tahun 2015, yaitu 28% dan terendah di tahun 2013 sebesar 25.80%.

Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah masih terbatasnya jaringan komunikasi dan informasi untuk menjangkau desa dan kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten.

3. Air Minum

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Perkembangan rumah tangga menurut sumber air minum di Kabupaten Lembata menunjukkan belum adanya perbaikan nyata terhadap akses air bersih. Prosentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga setiap hari pada tahun 2016 sebesar 55,91 % dari total rumah tangga di Kabupaten Lembata. Dari berbagai sumber air baku yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga di Kabupaten Lembata, saat ini baru memanfaatkan air permukaan (mata air), sumur gali dan sebagian kecil sumur bor. Sedangkan potensi air baku lain yang belum dimanfaatkan adalah air sungai, 15ending, embung dan air bawah tanah. Sedangkan pelayanan air minum mengalami terhadap penduduk Kabupaten Lembata mengalami peningkatan cukup signifikan yakni 25,40% pada tahun 2012 meningkat mencapai 58,06% pada tahun 2016. Dengan demikian maka perlu peningkatan sebesar 10,82 % untuk mencapai target MDGs 68,87 % terhadap total penduduk kabupaten Lembata.

Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah belum optimalnya pengelolaan sumber air baku dan terbatasnya jaringan air bersih yang murah dan terjangkau terutama bagi masyarakat.

4. Listrik

Ketersediaan listrik sangat penting untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Lembata. Pada tahun 2016 penduduk di Kabupaten Lembata masih terdapat 25 Desa yang belum terlayani listrik atau 16,56% dari jumlah seluruh desa/kelurahan.

Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah belum optimalnya jangkauan pelayanan listrik bagi masyarakat.

4.2.5. Aspek Daya Saing

Aspek daya saing juga menjadi persoalan Kabupaten Lembata. Hal ini tergambar dari :

1) Kemampuan ekonomi daerah yang belum mandiri diantaranya tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah yang rendah, laju pertumbuhan ekonomi yang masih melambat, struktur ekonomi makro masih bertumpuh pada sektor primer yang tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan sektor sekunder dan tersier secara signifikan;
2) Berdasarkan evaluasi periode 2011-2016, struktur pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Lembata menunjukkan bahwa sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 4,81 persen pertahun. Sementara, sumbangan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 85,20 persen pertahun dan sumbangan lain-lain pendapatan rata-rata sebesar 9,90 persen pertahun. Struktur pendapatan tersebut menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah. Dengan demikian, tantangan dalam lima tahun mendatang adalah perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
3) Iklim investasi kabupaten yang belum berkembang dengan baik. Hal ini dilihat dari jumlah investor yang masih kurang. Sampai dengan tahun 2016 jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Lembata sebanyak 4 investor dengan nilai investasi Rp.38.812.563.161,-
4) Infrastruktur wilayah yang tidak mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung daya saing daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan perlu pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang mendukung kawasan strategis dan cepat tumbuh. Karena ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang, baik antar desa, antar kecamatan dan antar kabupaten.

4.3. ANALISIS ISU STRATEGIS

Analisis isu strategis Kabupaten Lembata dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan visi dan misi pembangunan Kabupaten Lembata 2017-2022. Selain itu, analisis isu strategis Kabupaten Lembata juga mengidentifikasi strategi dan arah kebijakan yang dapat menjamin upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lembata dalam lima tahun tahun mendatang (2017-2022).

4.3.1. Identifikasi dan Analisis Lingkungan Internal

Identifikasi dan analisis lingkungan internal Kabupaten Lembata dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lembata dalam lima tahun mendatang (2017-2022).

4.3.1.1. Identifikasi dan Analisis Kekuatan Daerah

Berbagai sumber daya sebagai kekuatan yang diperkirakan dapat mendukung pembangunan Kabupaten Lembata, yaitu :

1) Kabupaten Lembata merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam maritim yang sangat besar, khususnya kelautan dan perikanan;

2) Kabupaten Lembata memiliki wilayah laut yang sangat potensial bagi perolehan devisa, khususnya dari komoditi perikanan dan pengolahan hasil perikanan;
3) Kabupaten Lembata memiliki kawasan pesisir yang menyimpan potensi bagi pengembangan ekonomi wilayah;
4) Kabupaten Lembata memiliki potensi wisata bahari yang cukup kaya dan beragam;
5) Kabupaten Lembata memiliki modal sosial dan budaya yang sangat kuat sehingga menjadi perekat dan pemersatu masyarakat dalam memajukan Kabupaten Lembata;
6) Kabupaten Lembata merupakan kabupaten yang baru terbentuk selama 17 tahun sehingga penuh harapan dan dinamika untuk meraih kemajuan;
7) Kabupaten Lembata memiliki budaya lokal yang unik.
8) Kabupaten Lembata merupakan kabupaten yang memiliki sejarah hubungan panjang dengan Negara Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan (TKI).

4.3.1.2. Identifikasi dan Analisis Kelemahan Daerah

Berbagai kelemahan yang diperkirakan dapat menghambat kemajuan pembangunan Kabupaten Lembata, yaitu:

1) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah sehingga akan berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, dan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2) Belum siapnya masyarakat menghadapi pergeseran budaya dan perkembangan teknologi informasi yang cepat sehingga membawa dampak terjadinya kekagetan budaya (*culture shock*) dan memudarnya nilai-nilai budaya masyarakat Lembata;
3) Belum meratanya infrastruktur dasar antara lain prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan; prasarana dan sarana air bersih, pembangkit dan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan informasi;
4) Belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu terutama bagi bagi masyarakat desa;
5) Belum optimalnya pelayanan pemerintahan di desa dan kecamatan yang disebabkan oleh belum tertatanya kelembagaan secara memadai, terbatasnya prasarana dan sarana pemerintahan, serta terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya aparatur;
6) Belum berkembangnya adanya industri hilir yang mampu mengolah sumber daya alam, khususnya perikanan menjadi komoditas yang memiliki nilai tambah;
7) Belum berkembangnya kelembagaan BUMD, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah;
8) Masih terbatasnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam terutama pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan sebagai akibat terbatasnya modal, sarana dan prasarana pendukung;
9) Belum tertatanya infrastruktur perekonomian (jaringan jalan, transportasi, pembangkit dan jaringan listrik, dan air baku) yang menghambat pengembangan usaha.

10) Terbatasnya kapasitas birokrasi dan aparatur daerah akan menghambat upaya peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan publik, dan percepatan pembangunan daerah;
11) Belum optimalnya penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Lembata akan menghambat pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan;
12) Belum tertatanya manajemen kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah akan menyebabkan pengelolaan sumber daya daerah menjadi kurang efisien dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
13) Belum adanya manajemen pengembangan desa dan kecamatan yang terpadu dan terukur akan menghambat kemajuan pembangunan daerah;
14) Belum optimalnya kerjasama pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan pertanian, perkebunan, industri pengolahan dan parwisata di Kabupaten Lembata akan menyebabkan kurangnya daya tarik dan daya saing daerah;
15) Belum berkembangnya pola dan manajemen kepimpimpinan yang demoraktis, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan menyebabkan menguatnya kepentingan kelompok;
16) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik yang menyangkut pengelolaan sumber daya daerah akan mengakibatkan terpinggirkannya masyarakat dalam pengambilan keputusan publik;
17) Belum berkembangnya forum komunikasi dan konsultasi publik dalam proses pengambilan keputusan akan menyebabkan munculnya ketegangan dan konflik;
18) Belum optimalnya layanan dan fasilitas peningkatan kapasitas/keterampilan TKI asal Lembata.

4.3.2. Identifikasi dan Analisis Lingkungan Eksternal

Kabupaten Lembata merupakan salah satu wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terus berkembang dengan berbagai peluang dan ancaman. Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang mungkin muncul dalam lima tahun mendatang berkaitan dengan tiga arus utama perubahan yang terjadi di Kabupaten Lembata, yaitu globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi.

4.3.2.1. Identifikasi dan Analisis Peluang

Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya perpindahan barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar nasional dan pasar internasional secara lebih terbuka dan cepat memberi peluang bagi masa depan Kabupaten Lembata, yaitu:

1) Perluasan jaringan transportasi akan meningkatkan mobilitas penduduk dan barang dari dan ke Kabupaten Lembata;
2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah Kabupaten Lembata;
3) Perluasan jaringan dan kerjasama internasional baik Masyarakat Ekonomi ASEAN, kerjasama *APEC* dan kerjasama internasional lainnya akan mendorong perubahan nilai, etos kerja dan budaya kerja yang lebih

produktif, efisien dan efektif bagi masyarakat, pelaku usaha dan aparat Pemerintah Kabupaten Lembata;

4) Perluasan pasar regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan investasi dan produksi di bidang pertanian, peruikanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata dan perdagangan dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Lembata;
5) Perluasan jaringan dan kerjasama investasi, perdagangan dan pariwisata nasional dan internasional berbasis teknologi informasi akan dapat menciptakan peluang yang lebih besar bagi pengembangan pertanian, perikanan, perkebunan, industri pengolahan dan pariwisata Kabupaten Lembata baik wisata alam, wisata religi, wisata budaya, dan wisata kuliner; perluasan kesempatan kerja; perluasan jaringan kerjasama pasar TKI ke Negara Malaysia dan negara-negara tujuan lainnya; peningkatan pendapatan; dan perluasan jaringan sosial budaya masyarakat;

Demokratisasi yang ditandai oleh perubahan tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan mengutamakan apsirasi dan partisipasi rakyat memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Lembata untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, yaitu:

1) Proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat akan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan adil dengan mempertimbangkan pentingnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat terutama hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya;
2) Proses perumusan kebijakan dan pengelolaan sumber daya dan asset daerah akan didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan jender, keistimewaan, kekhususan dan keragaman masyarakat;
3) Proses perencanaan, penganggaraan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan; serta pengendalian dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan mengutamakan partisipasi masyarakat sehingga mendorong pengembangan potensi dan peningkatan mutu hidup masyarakat, dan terciptanya suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, aman, nyaman, bermutu dan bermartabat;

Sejalan dengan pelaksanaan **desentralisasi dan otonomi daerah**, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dan sumber daya yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu:

a. Perluasan kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Lembata untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan percepatan kemajuan daerah;
b. Pemerintah Kabupaten Lembata akan dapat menjalankan fungsi secara optimal dan motivasi yang tinggi utuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, maju, cepat, mudah, terjangkau dan bermutu;

c. Pemerintah Kabupaten Lembata dapat mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Lembata;

d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan daerah akan memperhitungkan penghormatan, perlindungan dan penghargaan terhadap nilai-nilai sosial budaya daerah, kearifan lokal, kekhususan dan keragaman masyarakat.

4.3.2.2. Identifikasi dan Analisis Ancaman Daerah

Globalisasi membawa dampak negatif yang dapat menjadi ancaman bagi Kabupaten Lembata, yaitu:

1) Peningkatan investasi dan percepatan pembangunan Kabupaten Lembata akan mendorong pemanfaatan lahan dan wilayah secara berlebihan yang berdampak negatif bagi kerusakan lingkungan dan menghambat kesinambungan pembangunan;
2) Perdagangan yang terus meningkat akan mendorong arus masuk barang dari luar baik dari kabupaten/kota lain maupun dari negara lain secara lebih cepat dan lebih banyak dan selanjutnya akan mendominasi pasar lokal di Kabupaten Lembata yang berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan para pelaku usaha di Kabupaten Lembata;
3) Krisis pangan, krisis ekonomi, krisis energi dan menurunnya harga komoditas perkebunan dan pertambangan yang berasal dari gejolak pasar internasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, meningkatkan angka krmiminalitas, dan menurunnya pendapatan daerah Kabupaten Lembata;

Demokratisasi memerlukan proses pendidikan politik yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Ketidaksiapan dalam melaksanakan demokrasi kemungkinan membawa perubahan yang tidak diharapkan bagi rakyat Kabupaten Lembata, yaitu:

1) Praktik demokrasi secara partisipastif dan konsultatif antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lembata dengan masyarakat sipil seringkali memerlukan waktu yang panjang, berulang dan tidak pasti sehingga berdampak pada kelambananan dalam pengambilan keputusan dan keterlambatan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan;
2) Pelaksanaan demokrasi seringkali dipahami secara sempit sebagai kebebasan tanpa batas dalam bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur, tanpa ijin dan merusak sehingga akan mengganggu ketertiban dan kenyamanan kehidupan masyarakat di Kabupaten Lembata;
3) Tata kelola politik yang cenderung rumit, adanya dominasi elit dan terjadinya konflik menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dan mengaburkan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahteraan rakyat di Kabupaten Lembata.

Desentralisasi dan otonomi daerah membawa dampak yang dapat mengganggu efektvitas, kelancaran dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Lembata, yaitu:

1) Berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah seringkali tidak konsisten dan kurang sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Lembata;
2) Persaingan antardaerah dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan asset daerah; penetapan daerah perbatasan; serta pengelolaan infrastruktur cenderung meningkat, menimbulkan konflik dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan jangka panjang sehingga menghambat kemajuan daerah;
3) Lemahnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan dan penganggaran menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah; kurang efektifnya pelayanan publik; serta kurang optimalnya pengembangan ekonomi;
4) Meningkatnya kesenjangan antara Kabupaten Lembata dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong migrasi penduduk dari kabupaten lain ke Kabupaten Lembata sehingga menyebabkan meningkatnya beban penyediaan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman; pendidikan dan kesehatan; dan tempat usaha.

4.4. ISU STRATEGIS DAERAH

Dengan memperhatikan Analisis lingkungan strategis eksternal dan internal, isu strategis daerah Kabupaten Lembata dalam lima tahun (2017-2022) mendatang adalah sebagai berikut:

4.4.1. Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia terutama kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, peran pemuda dan perempuan serta sadar hukum yang belum maksimal.

a) Belum meratanya akses layanan pendidikan yang bermutu disebabkan antara lain oleh kurangnya prasarana dan sarana, terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar, serta belum meratanya persebaran tenaga pengajar;
b) Belum meratanya akses layanan kesehatan yang bermutu sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana layanan kesehatan, belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga kesehatan, serta kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;
c) Memudarnya penerapan nilai-nilai budaya daerah dalam kehidupan kemasyarakatan;
d) Belum berkembangnya semangat kewirausahaan di kalangan pemuda dan pemudi;
e) Rendahnya penguasaan teknologi komunikasi dan informasi yang dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; rendahnya budaya masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; dan belum optimalnya sinergi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi;
f) Belum optimalnya akses masyarakat terhadap layanan peningkatan kapasitas tenaga kerja dalam dan luar negeri serta layanan keimigrasian bagi keamanan dan kenyamanan kerja ke luar negeri.

4.4.2. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur, transportasi, air bersih, energi, komunikasi dan penataan kota (PSU).

a) Terbatasnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Lembata;
b) Belum meratanya pembangunan jalan arteri primer (jalan utama), jalan lingkungan dan arteri sekunder yang menghubungkan antardesa dan antarkecamatan;
c) Terbatasnya jumlah dan mutu sarana prasarana ketenagalistrikan dan telekomunikasi;
d) Belum tertatanya jaringan sanitasi dan air bersih.
e) Terbatasnya transportasi laut terutama dalam menghubungkan antarpulau;
f) Belum adanya keterpaduan *moda* transportasi antara darat-laut-dan udara yang menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Lembata dan daerah sekitarnya;
g) Terbatasnya jumlah dan mutu sarana prasarana ketenagalistrikan dan telekomunikasi;
h) Belum Optimalnya Konservasi Lahan dan Air.

4.4.3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya laut dan kemaritiman serta ekonomi kreatif.

a) Belum berkembangnya ekonomi kreatif;
b) Terbatasnya infrastruktur kelautan dan kemaritiman;
c) Belum berkembangnya industri perikanan dan pengolahan sumber daya kelautan;
d) Belum berkembangnya wisata bahari;
e) Belum optimalnya peningkatan produktifitas, nilai tambah dan pendapatan dari perikanan;
f) Rendahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang sumber daya laut dan kemaritiman.

4.4.4. Belum optimalnya pengembangan dan promosi pariwisata daerah.

a) Belum berkembangnya industrialisasi pariwisata;
b) Terbatasnya infrastruktur dan akses transportasi-informasi-promosi pariwisata;
c) Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata;
d) Belum optimalnya pasar dan promosi pariwisata;
e) Belum optimalnya pengembangan, pembangunan dan penataan DTW dan objek wisata potensial;
f) Terbatasnya kapasitas kelembagaan, SDM dan infrastruktur budaya lokal;

4.4.5. Belum maksimalnya pendapatan dan kerjasama daerah serta pengembangan ekonomi wilayah dan pembangunan perdesaan belum berorientasi industri.

a) Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian dan perkebunan;
b) Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari perikanan;
c) Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari industri kerajinan dan rumah tangga;
d) Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pariwisata;
e) Belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;

f) Belum tertatanya manajemen dan kelembagaan BUMD, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah;
g) Belum berkembangnya kegiatan penanaman modal dalam mendukung penguatan usaha masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah sebagai akibat adanya hambatan status lahan, belum terciptanya iklim usaha yang kondusif, lemahnya promosi daerah, dan terbatasnya kerjasama antardaerah;
h) Belum berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung penguatan usaha masyarakat dan pembangunan ekonomi desa;
i) Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan daerah.

4.4.6. Belum optimalnya penataan dan pengembangan SDM ASN serta penyelengaraan pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien, produktif dan berbasis teknologi informasi.

a) Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu;
b) Belum optimalnya kinerja pelayanan pemerintahan terutama di desa dan kecamatan;
c) Kurangnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan antarperangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat kemajuan desa dan kecamatan;
d) Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi namun dalam implementasinya belum optimal;
e) Kualitas SDM ASN dalam hal efektifitas, efisiensi dan produktivitas yang berbasis IT dalam mengelolah aplikasi *e-government* belum optimal.
f) Optimalisasi pendayagunaan ASN berbasis kinerja belum optimal;
g) Kapasitas SDM aparatur desa belum optimal;
h) Kompleksitas persoalan pembangunan menghendaki adanya organisasi fungsional perencana.
i) Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan;
j) Belum tertatanya manajemen aset daerah;
k) Belum berkembangnya manajemen pengetahuan sebagai pondasi kemajuan daerah.



Bab 5

Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran



Judul bab ini sudah mencerminkan cakupannya yakni uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017 – 2022 sebagai tindak lanjut dari visi – misi calon Bupati/Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada masa kampanye Pemilukada 2017 lalu. Paparan ini diikuti dengan penjelasan arah dan kata-kata kunci visi, penjelasan pernyataan misi, pernyataan tujuan, pernyataan sasaran yang diikuti dengan indikator dan rencana target sasaran serta sebuah matriks keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI DAN MISI

5.1.1. Visi Pembangunan

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata terpilih Tahun 2017-2022, Visi pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 adalah :

"Terwujudnya Lembata yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Rakyat Berkelanjutan"

Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:

1. **LEMBATA yang PRODUKTIF** adalah Lembata yang dapat mengelola modal sumber daya alam : pertanian, kelautan dan perikanan, dan pariwisata; modal sosial budaya:gotong royong; serta modal pengetahuan, teknologi dan informasi secara efisien dan efektif ditopang oleh kerja sama dan kemitraan masyarakat, pemerintah daerah dan pelaku usaha yang kuat untuk meningkatkan produksi, nilai tambah dan pendapatan masyarakat dan daerah;
2. **LEMBATA yang BERDAYA SAING** adalah Lembata sebagai simpul maritim nusantara yang mempunyai keunggulan secara nasional dalam pengembangan pusat seni dan budaya, pusat pengetahuan dan informasi, pusat produksi, pusat pengolahan, pusat perdagangan, dan pusat pariwisata berbasis maritim;
3. **KESEJAHTERAAN RAKYAT LEMBATA** adalah kondisi masyarakat Lembata yang mempunyai taraf hidup yang baik dan terus meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, kesehatan, pendidikan, perumahan, listrik, air bersih, pekerjaan, dan rasa aman;
4. **LEMBATA yang BERKELANJUTAN** adalah kondisi tatanan kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik Lembata yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan yang ditopang oleh penerapan dan pelaksanaan nilai-nilai agama, etika dan moralita, dan nilai-nilai keutamaan sosial budaya; serta mengutamakan kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi masa depan Lembata yang lebih baik dan bermartabat.

5.1.2. Misi Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lembata Tahun 2017 - 2022 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Lembata dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Lembata. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. **MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN, SERTA OPTIMALISASI PERAN PEMUDA DAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT;**

   Pada misi ini pemerintah daerah fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan yang berkualitas yang berorientasi pada pendidikan vokasi termasuk melalui lembaga diklat (BLK), peningkatan kualitas guru dan pendekatan pelayanan

pendidikan masyarakat; peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan yang bermutu, dan pendekatan pelayanan kesehatan melalui klinik primer desa berbasis masyarakat dengan gerakan good pagi; pembangunan sarana prasarana olahraga, aktivitas dan kegiatan olah raga serta pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan festival inovasi pemuda lembata (Lembata *Innovation Youth*) untuk turut serta dalam pembangunan daerah di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan daerah; optimalisasi peran perempuan serta membudayakan sikap sadar hukum di kalangan masyarakat.

2. MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, TRANSPORTASI, AIR BERSIH, ENERGI, KOMUNIKASI DAN PENATAAN KOTA;

Pemerintah Daerah melakukan kegiatan percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur strategis daerah dan aksesibilitas pada pusat-pusat produksi-obyek wisata dan pada daerah tujuan wisata untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, menyediakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar berupa jalan, air dan listrik serta perluasan jaringan komunikasi dan pembangunan infrastruktur jalan strategis daerah yang terintegrasi dalam desain pengembangan wilayah serta *wifi* gratis untuk mendukung kabupaten literasi, menata kota Lewoleba sebagai kota humanis dan tematik seperti *smart city* dan *water front city*.

3. MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DAN MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA EKONOMI LAUT DAN MARITIM, SERTA EKONOMI KREATIF BERBASIS INDUSTRI DAN PARIWISATA BERKELANJUTAN;

Dengan memperhatikan potensi kekayaan daerah pesisir pantai dan sumberdaya laut yang melimpah seperti sumberdaya kelautan dan perikanan, rumput laut, garam, transportasi laut, dan pariwisata bahari serta letak geografis-geoekonomi Kabupaten Lembata dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus ALTAKA dan kerjasama antar daerah Kabupaten Lembata dengan Kabupaten Alor, Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Rote Ndao di bidang pariwisata bahari dan kebudayaan yang terintegrasi dalam Kerjasama Utara-Utara dalam upaya untuk mewujudkan Lembata sebagai simpul poros maritim nusantara/simpul klaster ekonomi maritim, maka sangat perlu meletakkan laut sebagai sektor strategis penyumbang produktivitas ekonomi laut menjadi keunggulan kompetitif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk peningkatan pendapatan daerah. Karenanya, pembangunan berbasis kelautan dan kemaritiman harus dioptimalkan.

Ketersediaan sarana dan fasilitas perikanan dan kemaritiman harus terintegrasi dengan aktivitas ekonomi darat sebagai konektivitas cincin industri, yang terintegrasi sebagai rantai ekonomi untuk menunjang kegiatan perdagangan antar pulau. Hal ini mengingat Lembata adalah Kabupaten satu pulau. Kekayaan sumberdaya alam dan budaya yang ada perlu digarap melalui aktivitas yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif. Karena itu perlu fokus pada ketersediaan sumber daya kreatif (orang kreatif), industri kreatif yang berdaya saing, ketersediaan biaya, perluasan pasar, dan kelembagaan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

4. MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN SERTA MENINGKATKAN PASAR DAN PROMOSI DAERAH TUJUAN WISATA;

Misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata melalui inovasi dan kreativitas dengan meningkatkan pasar serta mempromosikan daerah tujuan wisata dan daya tarik wisata sehingga dapat menjadi destinasi dengan tetap memperhatikan konsep 4A =

Attraction (Daya Tarik), *Accesibility* (Aksesibitas), *Amenities* (Fasilitas), *Ancillary* (Kelembagaan) dan Industrialisasi Pariwisata serta Kerjasama Investasi Kepariwisataan yang memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Karena itu pemerintah daerah fokus membangun kemudahan akses jalan, transportasi serta fasilitas pendukung, pengembangan, pembangunan dan penataan daya tarik wisata dan daerah tujuan wisata, kegiatan peningkatan pasar dan promosi serta optimalisasi obyek wisata yang memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan. Kebijakan pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Lembata dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah pengembangan yang disebut *Triangle Line Tourism* melalui even yang berkelanjutan yaitu *Rally* Wisata Bahari-Lembata #*Truly Heaven*-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 (Tiga) Gunung (*Blue Mountain Tours*), dengan berbagai aktivitas dalam spirit *One Product-Ten Activity-Hundred Reward and Travel Village #Explore Rural* Lembata (Fokus pada Penguatan Struktur Budaya dan Pengembangan Atraksi). Upaya ini dilakukan untuk mengangkat citra wisata Kabupaten Lembata yang beragam, unik dan menarik.

Pemahaman konsep tiga wilayah pengembangan/*Triangle Line Tourism* didasarkan pada sebaran potensi daerah tujuan wisata, seperti alam bukit dan pegunungan, alam pantai, pesona taman laut, dan budaya yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Adapun potensi pengembangan daya tarik wisata sebagai berikut :

a. Wilayah Pengembangan Pariwisata I, meliputi :
   - Daya Tarik Wisata Pantai Bour/Pantai Waijarang;
   - Daya Tarik Wisata Religi Bukit Doa Watomiten;
   - Daya Tarik Wisata Panorama Bukit Cinta Wolor Pass;
   - Daya Tarik Wisata Malam Bukit Susu;
   - Daya Tarik Wisata Penyu di pantai Penyu Loang;
   - Daya Tarik Wisata Mangrove Pantai Mutiara Waijarang;
   - Daya Tarik Wisata Kolam Renang Apung Pulau Siput Awulolong;
   - Daya Tarik Wisata Pantai Tanjung Tuak Kolipadan;
   - Daya Tarik Wisata Unik Volkano Ile Lewotolok;
   - Daya Tarik Wisata Unik Volkano Pulau Gunung Batutara;
   - Daya Tarik Wisata Budaya Pesta Kacang Lewohala;
   - Daya Tarik Wisata Lembata Under Water Hukung Waijarang dan Teluk Lewoleba;
   - Daya Tarik Wisata *Adventure and Land Tours*;
   - Daya Tarik Wisata Belanja dan *Night Market* Desa Waijarang serta Pasar Seni Lusikawak *City Tours*;
   - Daya Tarik Wisata *Travel Fishing* (Batutara Tuna Festival);
   - Daya Tarik Wisata Budaya dan *Heritage,* dll

     Titik Rencana Strategis : Pulau Gunung Batutara

b. Wilayah Pengembangan Pariwisata II, meliputi :
   - Daya Tarik Wisata *Whale Catching Tourism*- Penangkapan Ikan Paus secara Tradisional
   - Daya Tarik Wisata Pantai Tirer-Tanah Lot di Desa Lusiduawutun;
   - Daya Tarik Wisata Pantai Wai Lei dan Atawua *Palace* (Air Pelangi dan Batu Atar)*;*
   - Daya Tarik Wisata Pantai Desa Lolong;
   - Daya Tarik Wisata Pantai Pasir Putih Mingar;
   - Daya Tarik Wisata Batu Tengkorak dan Batu Atadei di Desa Dulir;

- Daya Tarik Wisata Budaya dan *Heritage* Desa Lusilame-Lamanunang-Lewogolok Desa Lolong;
- Daya Tarik Wisata *Geo Thermal* "Karun" Watuwawer
- Daya Tarik Wisata Atrakasi Tinju Tradisional "Hadok" dan "Ahar" di Desa Atakore;
- Daya Tarik Wisata Nale daerah Mingar dan sekitarnya;
- Daya Tarik Wisata Unik Volkanologi Ile Werung dan jajaran bukit *Five Brothers;*
- Daya Tarik Wisata Menonton Lumba-Lumba-*Dolphin Watching;*
- Daya Tarik Wisata Belanja Pasar Barter Wulandoni;
- Daya Tarik Wisata Budaya dan Heritage, dll

  Titik Rencana Strategis : Lamalera *Whale Catching Tourism*

c. Wilayah Pengembangan Pariwisata III, meliputi :

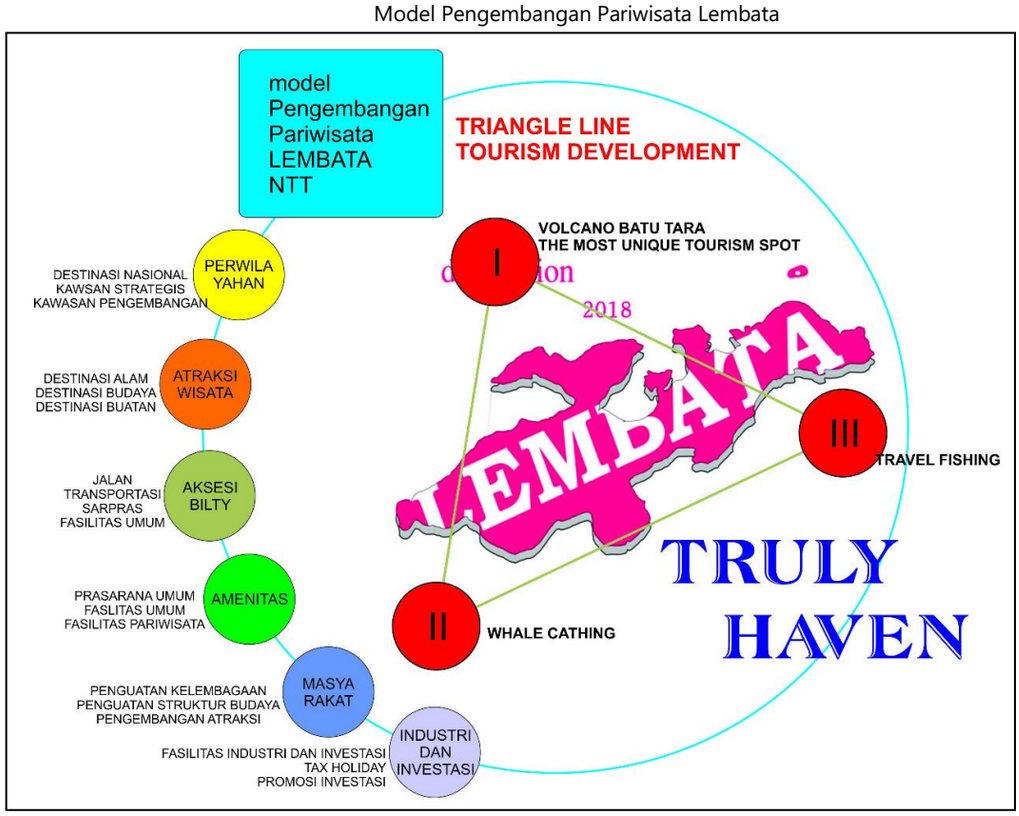
- Daya Tarik Wisata Kuliner Desa Dikesare;
- Daya Tarik Wisata Pantai Selatan Utara Nuhanera Desa Dikesare dan Desa Tapolangu;
- Daya Tarik Wisata *Under Water* Nuhanera-Watodiri-Lamawolo-Tanjung Baja-Tanjung Leur;
- Daya Tarik Wisata Kuliner Khas Uyelewun-Serabe Edang dan Tambole di *Rest Area Sunset* W2 *Pass*;
- Daya Tarik Wisata Pantai *Corner Love* (Pojok Cinta) Balauring;
- Daya Tarik Wisata Rumang *Hill Sunrise* View di Rumang;
- Daya Tarik Wisata Pantai Pasir Putih Tanjung Baja Wailolong;
- Daya Tarik Wisata Budaya Puang Kemer Desa Leuwayang;
- Daya Tarik Wisata Budaya/Heritage Uyelewun Raya;
- Daya Tarik Wisata Pantai Wowong-Pantai Angarlaleng-Pantai Bean-Tamal Haur-Pantai Wade (Balurebong)-Pantai Bobu Desa Lamalela;
- Daya Tarik Wisata Mancing *Travel Fishing;*
- Daya Tarik Wisata *Dolphin Watching* di Batutara dan sekitarnya*;*
- Daya Tarik Wisata Belanja Ikan Teri Hadakewa;
- Daya Tarik Wisata Relief Batu Pra Sejarah Liang Pueng Desa Hingalamamengi;
- Daya Tarik Wisata Budaya dan Heritage, dll

  Titik Rencana Strategis : *Travel Fishing*

Di samping pengembangan DTW di tiga wilayah pengembangan pariwisata tersebut, Pemerintah Kabupaten Lembata dalam hal upaya mengangkat citra wisata Kabupaten Lembata juga melakukan pelbagai aktivitas yang beragam, unik dan menarik antara lain : Lembata *International Heritage Walk* (Lamanunang-Lusilame-Kampung Lama Ile Lewotolok, dll), Lembata *Trail Family Fun Running Race*, Festival Payung Nusantara, Festival Para Layang International, Pesta Kacang Ile Ape, Lamalera *Whale Catching Adventure*, *Visite To Barter And Night Market*, *Exsibhition Volcano Foot Ball*, *Expo* dan Festival Inovasi Pemuda (*Lembata Youth Music And Film Festival*), *Extreme Sport Tourism* (Lomba Dayung Lawan Arus Air Laut), Festival Literasi #Saya Baca, *Travel Fishing*, Nuhanera *Dive*, Festival Lamaholot, *Expo* Uyelewun Raya, NTT *Fashion Carnaval*, Lembata *International Documentary Film Festival*, *Travel Village*, Gala Desa.

Konsep Pengembangan Pariwisata ini dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 5.1.
Model Pengembangan Pariwisata Lembata



5. MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN KERJA SAMA DAERAH SERTA MENGEMBANGKAN EKONOMI WILAYAH DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN BERBASIS INDUSTRI BERKELANJUTAN;

Peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif, serta memacu investasi dan kerjasama daerah, peningkatan daya saing yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Pemerintah daerah juga fokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat, berbasis potensi unggulan sumberdaya alam yang berorientasi pada ketahanan pangan, dalam skema pengembangan ekonomi wilayah untuk menjadikan Lembata sebagai kabupaten industri secara berkelanjutan dan pusat produksi bagi daerah sekitarnya dengan menetapkan koridor ekonomi dalam pengembangan wilayah/kawasan ekonomi strategis cepat tumbuh terintegrasi dan mendorong pembangunan perdesaan, dalam skala pertumbuhan ekonomi desa melalui model klaster-tematik dalam kebijakan #Rantai Ekonomi Lembata 2.0.

6. MENATA DAN MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SERTA MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.

Melalui misi ini, Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan *good and clean governance* dengan melakukan restrukturisasi dan reorganisasi serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM ASN sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pemerintah daerah juga melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan belanja daerah melalui *e-government* (*e-planning, e-budgeting* dan lain-lain, yang berbasis pada teknologi informasi) serta perbaikan kinerja dan pelayanan publik.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam skenario, tujuan, strategi dan sasaran pembangunan daerah tahun 2017-2022, yang dirumuskan ke dalam *Guide of* Lembata *Development* (GoLD) sebagai *road map* percepatan pembangunan melalui kebijakan **Rantai Ekonomi #Lembata 2.0** *(Lembata Two Point Zero*) dengan 9 (sembilan) prioritas pembangunan:

1. Pendidikan dan kesehatan
2. Peran pemuda dan perempuan serta sadar hukum
3. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis (jalan dan jembatan, air bersih, energi, komunikasi dan penataan kota)
4. Konektivitas (transportasi dan kemaritiman)
5. Ketanahan pangan (pertanian dan sumberdaya laut)
6. Pariwisata, ekonomi kreatif dan usaha pengolahan industri
7. Perumahan dan permukiman
8. Peningkatan pendapatan dan kerjasama daerah
9. Penataan dan pengembangan SDM ASN dan berbasis IT

Dan kebijakan inovatif yang menjadi prioritas dalam tahun 2017-2022, yaitu :

1. Pasar baca menuju kabupaten literasi #SAYA BACA
2. Klinik primer desa berbasis masyarakat #G*OOD* PAGI dan Tim Saber malaria #z-MALARIA
3. Forum inovasi anak Lembata #SAYA ANAK PANCASILA SATU LEMBATA, SATU NTT, SATU INDONESIA (Pembangunan Identitas ke-Indonesiaan dan Peningkatan Ketahanan Individu dalam aktivitas Ekonomi Pemuda) melalui kegiatan festival inovasi pemuda Lembata (Lembata *youth innovation festival*)
4. Pemberdayaan ekonomi perempuan #IBU EKONOMI
5. Peningkatan sadar hukum melalui #PTT 151 (Patuh, Taat, Tertib) di 144 Desa dan 7 kelurahan (perbaikan sistem pelayanan publik dan integritas, dan kompetensi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat, penurunan kriminalitas, penguatan masyarakat yang berbudaya hukum dan taat hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi)
6. Pembangunan jalan *long* segmen dengan skema pembiayaan #PUBLIC PRIVAT PARTNERSHIP dan/atau #AP (*Availability Payment*) dan perluasan jaringan distribusi air bersih dan listrik dengan pola *sharing budget*.
7. Integrasi distribusi pertumbuhan pola kawasan melalui *Clustering* –Tematik Desa menuju desa mandiri #DESA TERSENYUM 2.0.
8. Sektor pertanian melalui gerakan revolusi kedaulatan pangan MELATIMEKAR #t-CABANG
9. G-U450 (gerakan usahawan 450)
10. Rally Wisata Bahari – Lembata #*Truly Heaven* – Festival Lembata dengan Puncak Event : Festival 3 Gunung (*Blue Mountains Tours*)
11. #GESERLANI (Gerakan Seribu Rumah Layak Huni)
12. Harmonisasi #DESA PANCASILA
13. #ASN APIIKKK (Aspiratif, Produktif, Inovatif, Integratif, Konkrit, Kontibutif dan Kompetitif) serta budaya ASN yang melayani dengan basis kebutuhan dan kepuasan masyarakat, *Human Capital Management* melalui pengembangan potensi SDM ASN berbasis teknologi informasi serta peningkatan kapasitas APIP
14. #go to WTP
15. #STUDIO e-gov (*e-government*)

5.2. SKENARIO PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022, tiga pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Lembata dalam 5(lima) tahun ke depan adalah:

(1) Pilar 1 : Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pilar ini menekankan pada pembangunan manusia yang mencakup pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kelembagaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan peran pemuda dan perempuan, penegakan hukum dan pengembangan keuangan mikro.

Pilar ini akan menjadi pondasi bagi peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif serta pengelolaan ekologi yang berkelanjutan.

(2) Pilar 2 : Pembangunan Ekonomi

Pilar ini disebut LEMBATA 2.0 yang menekankan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan. Pilar ini terdiri dari dua aspek, yaitu pembangunan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif, kerjasama daerah, penyiapan infrastruktur strategis, penyediaan energy dan komunikasi, penyediaan air bersih, pengembangan transportasi, penguatan konektivitas, pengembangan sistem logistik, pengembangan kawasan industri dan rekayasa teknologi.

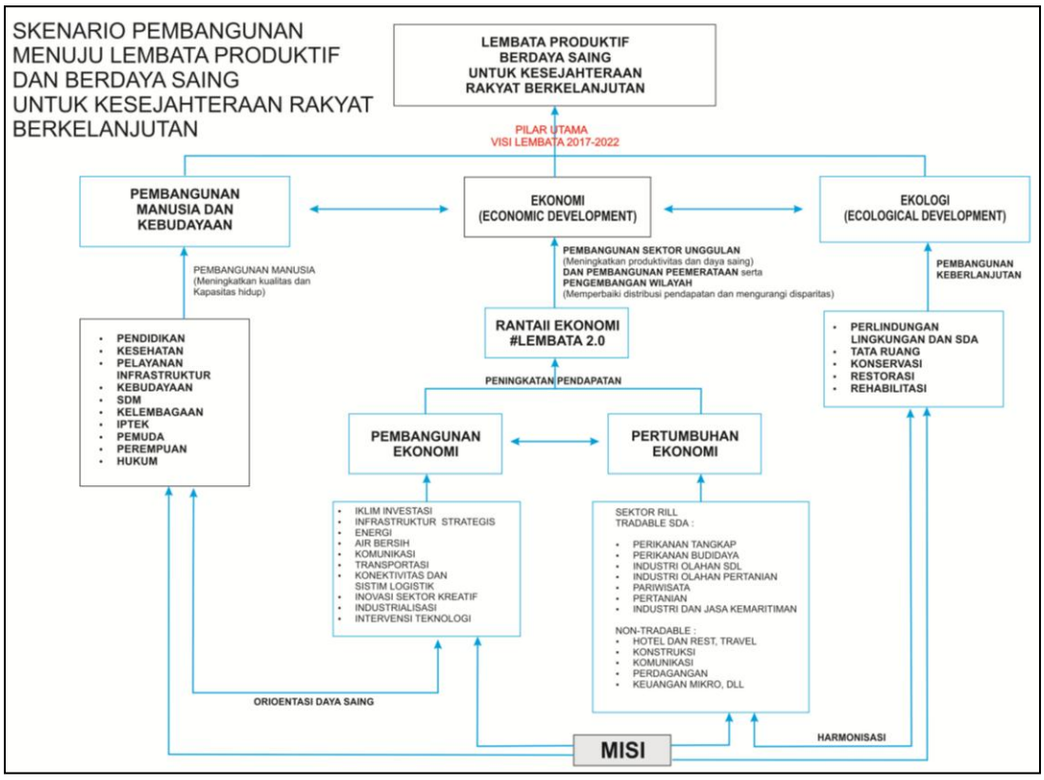
Percepatan pertumbuhan ekonomi mengandalkan pada pengembangan sektor riil berbasis sumber daya alam yang dapat diperdagangkan seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan sumber daya laut, industri pengolahan pertanian, pariwisata, pertanian, industri dan jasa kemaritiman; serta sektor riil yang tidak diperdagangkan seperti hotel dan restoran, jasa perjalanan (travel), konstruksi, telekomunikasi, dan jasa lainnya.

(3) Pilar 3 : Ekologi

Pilar ini menekankan pada harmonisasi lingkungan dalam dimensi pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, pelaksanaan konservasi, restorasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan.

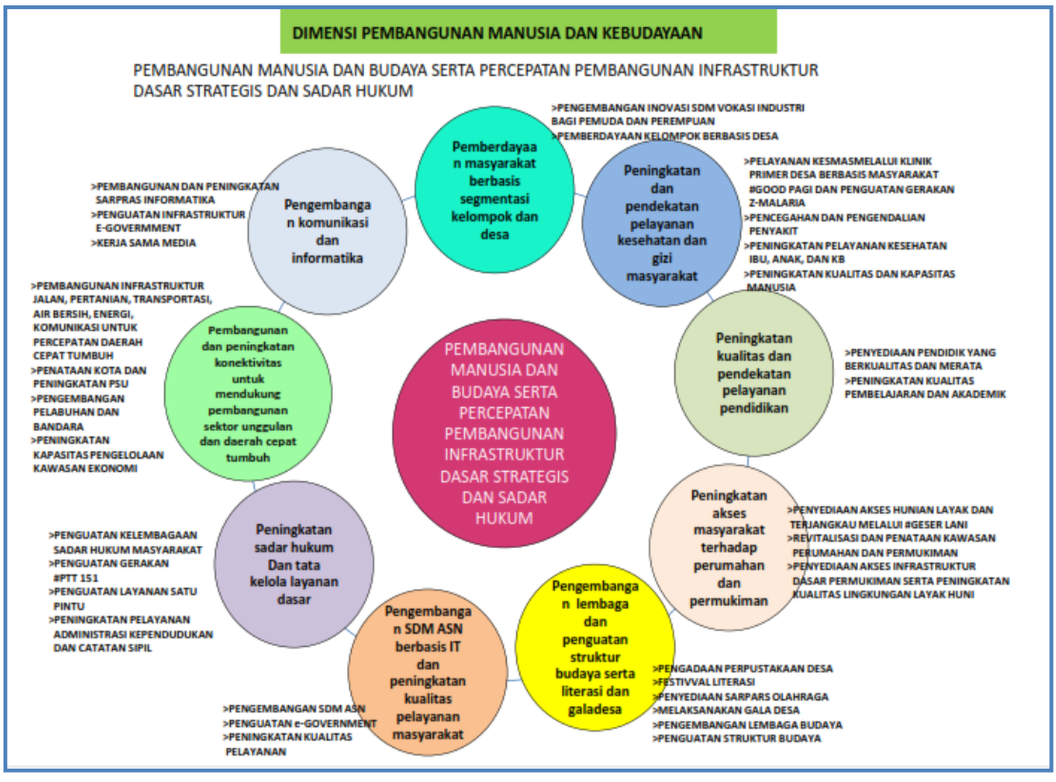
Selanjutnya skenario pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 disebut LEMBATA 2.0 menekankan pembangunan ekonomi wilayah yang berorientasi pada perubahan (*transformasi*) dan percepatan (*akselerasi*) pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dengan fokus pada penyiapan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, pembangunan infrastruktur strategis dan keterpaduan sektor ekonomi.

Gambar 5.2.
Skenario LEMBATA 2.0



Dalam implementasi visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 dilakukan berdasarkan sinergitas 3 (tiga) dimensi pembangunan yang dapat dilihat dalam gambar-gambar berikut ini :

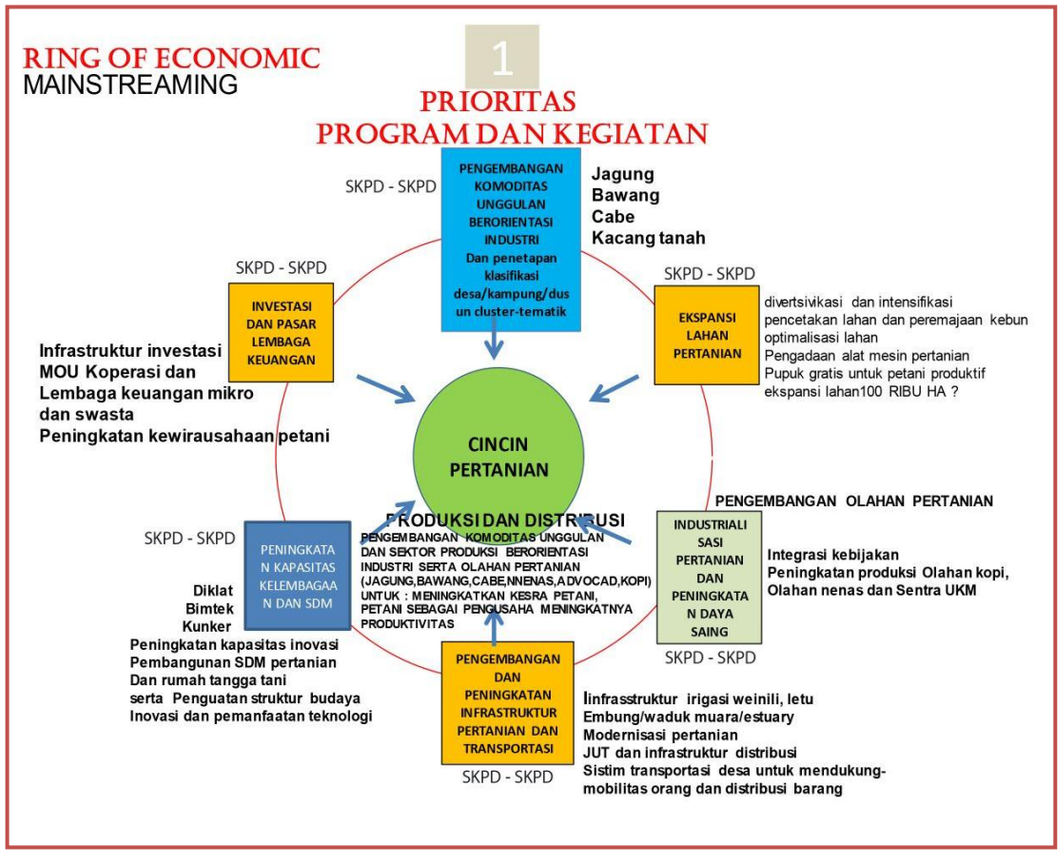
Gambar 5.3.
Dimensi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



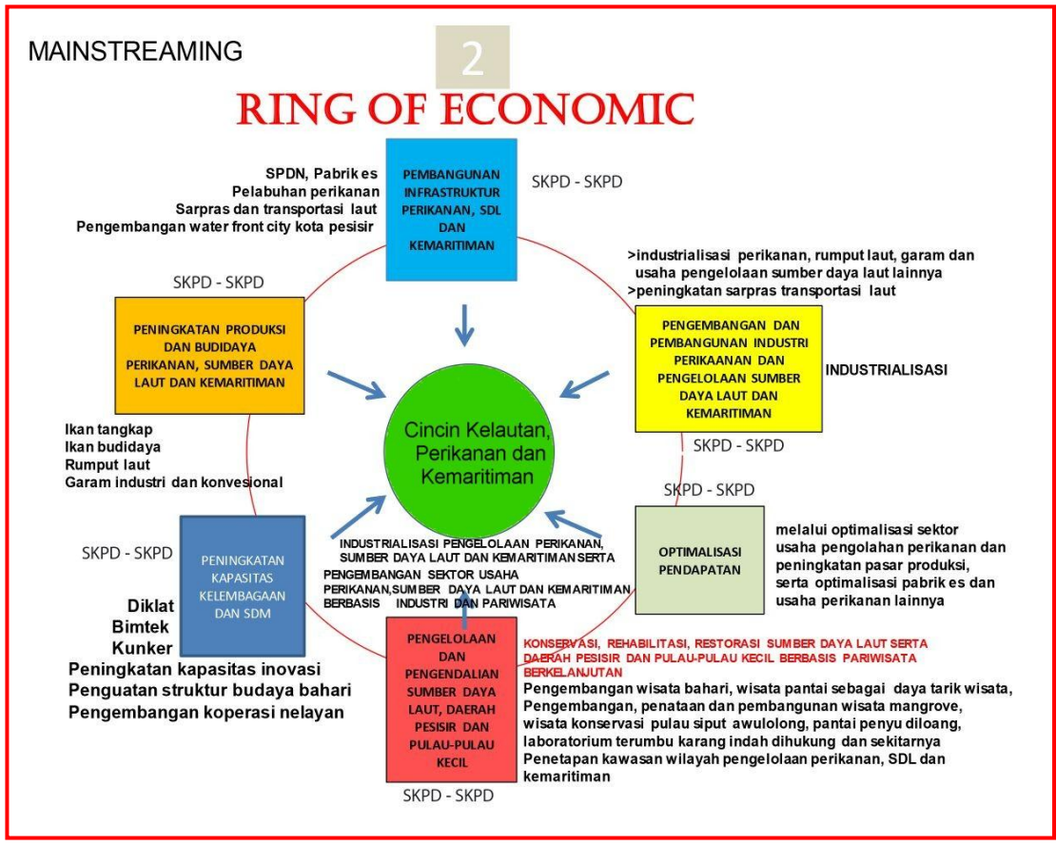
Gambar 5.4.
Dimensi Pembangunan Ekonomi



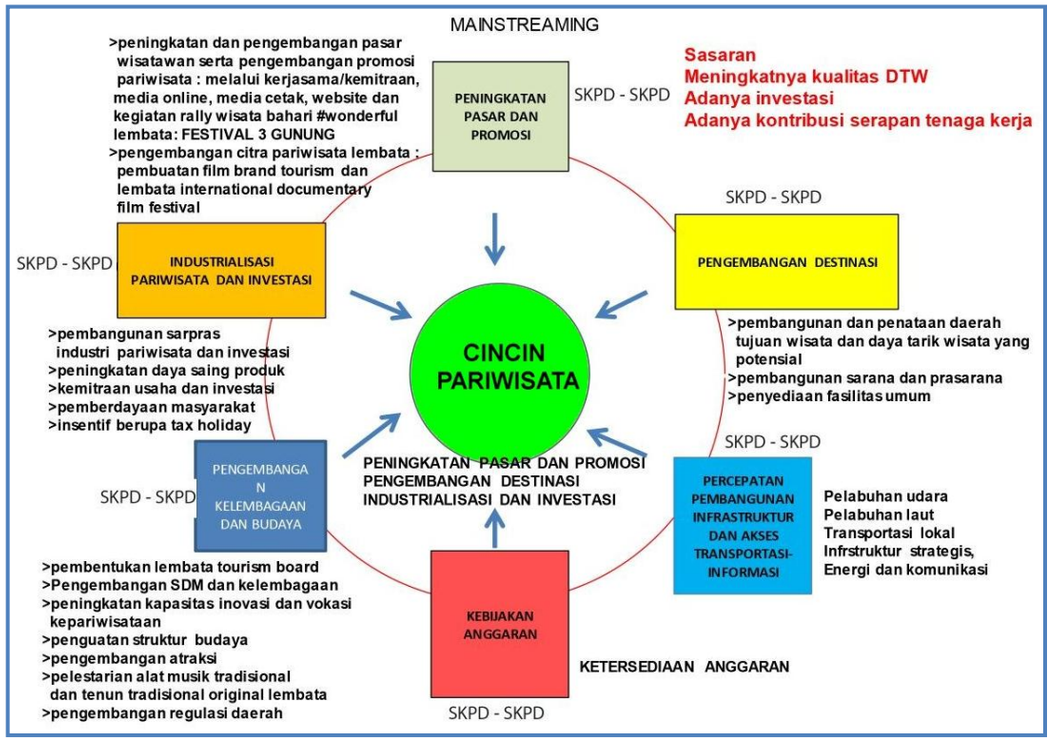
Gambar 5.5.
Cincin Pertanian



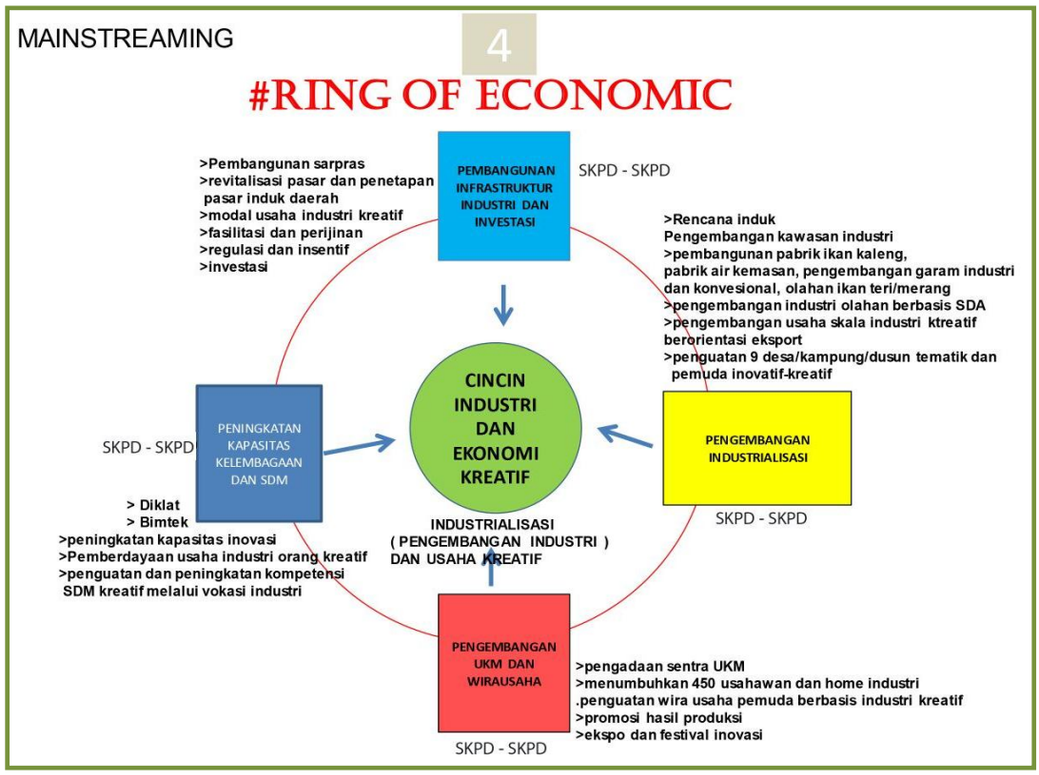
Gambar 5.6.
Cincin Ekonomi Kelautan, Perikanan dan Maritim



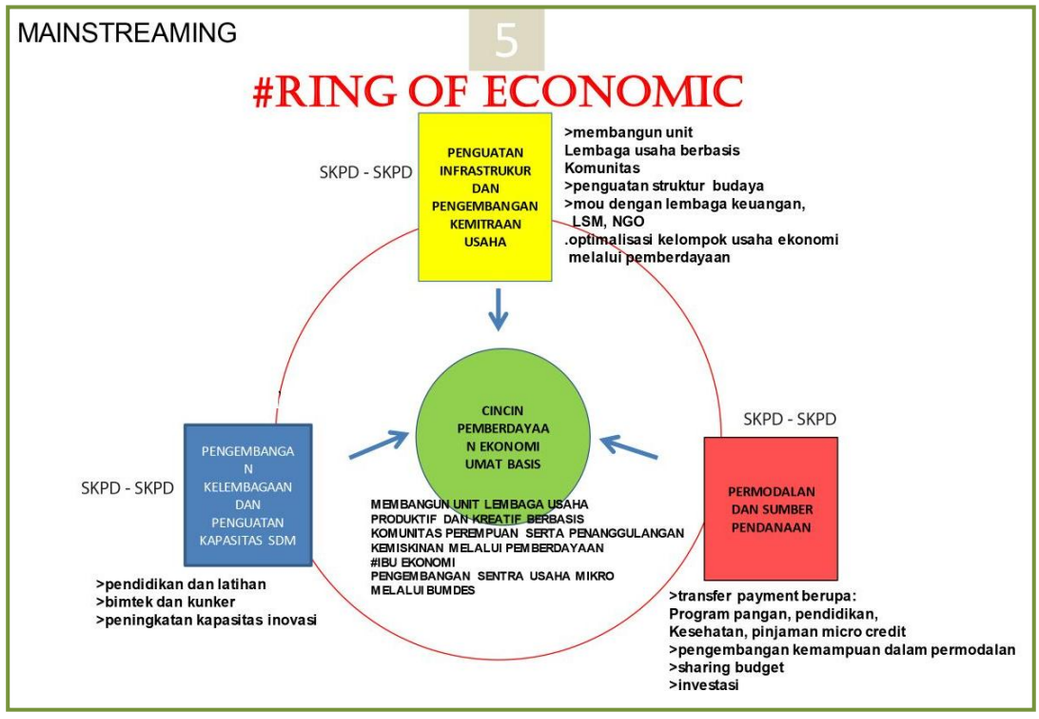
Gambar 5.7.
Cincin Ekonomi Pariwisata



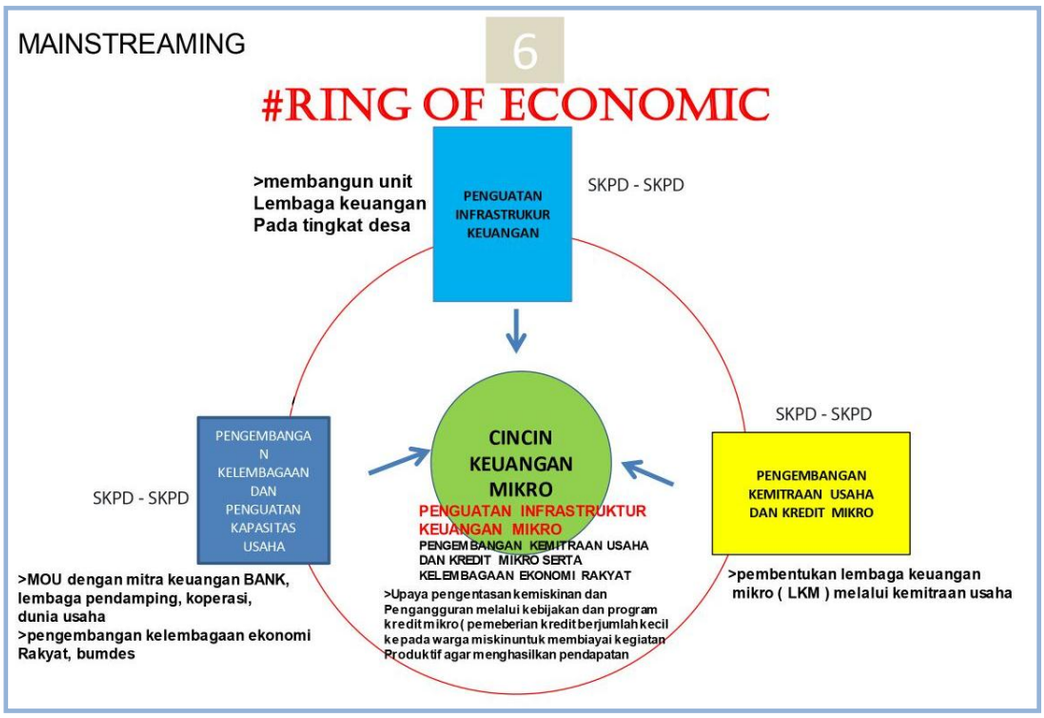
Gambar 5.8.
Cincin Industri dan Ekonomi Kreatif



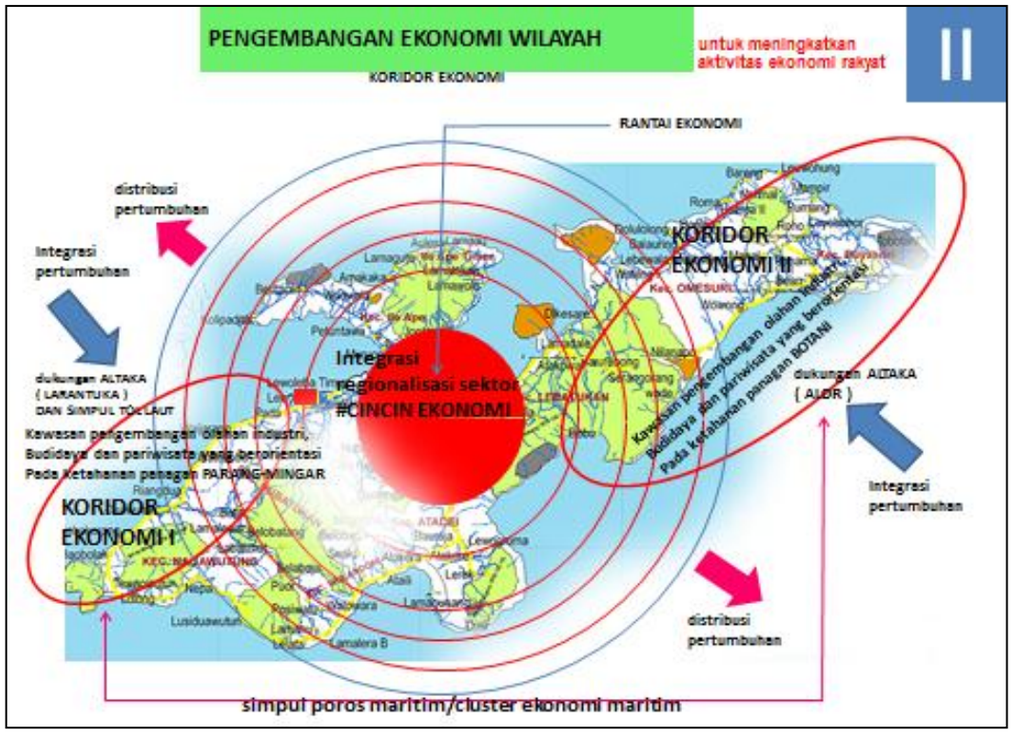
Gambar 5.9.
Cincin Keuangan Mikro



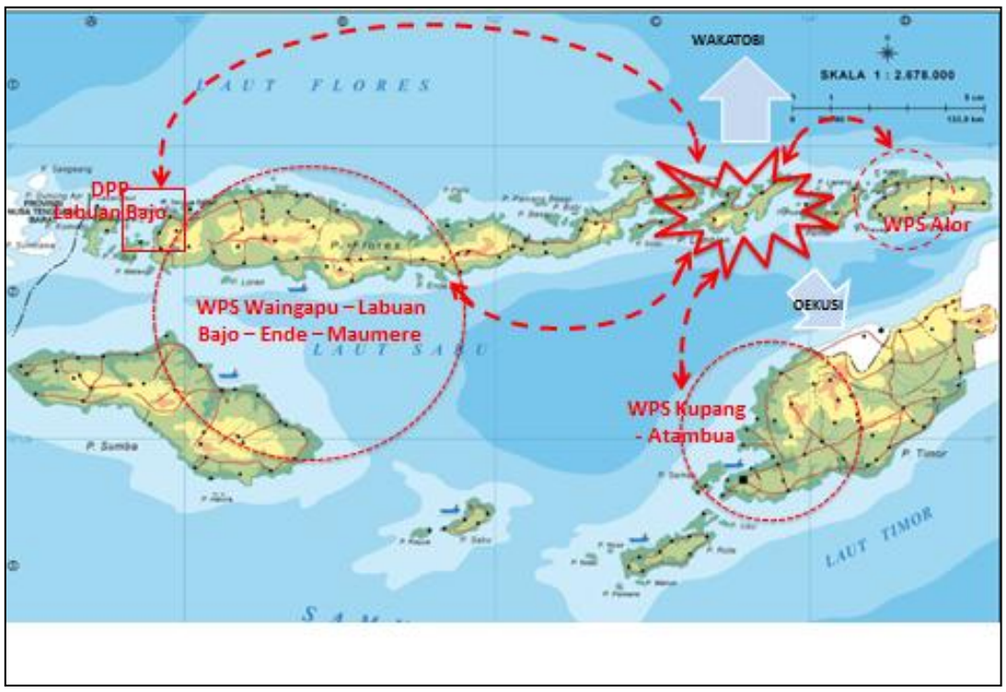
Gambar 5.10.
Cincin Pemberdayaan Ekonomi Umat Basis



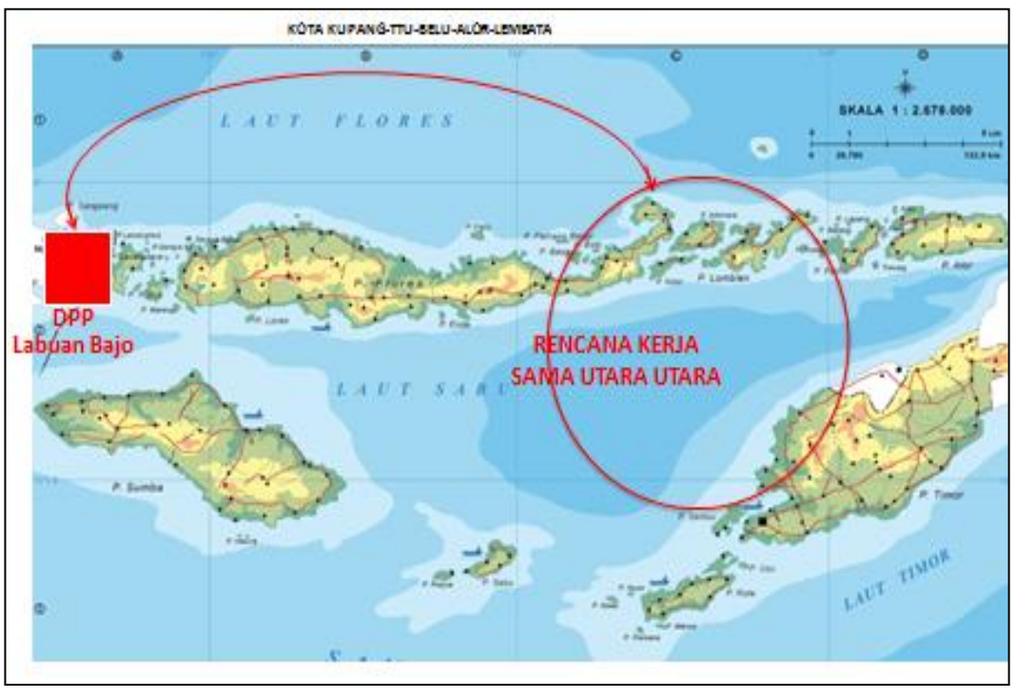
Gambar 5.11.
Pengembangan Ekonomi Wilayah



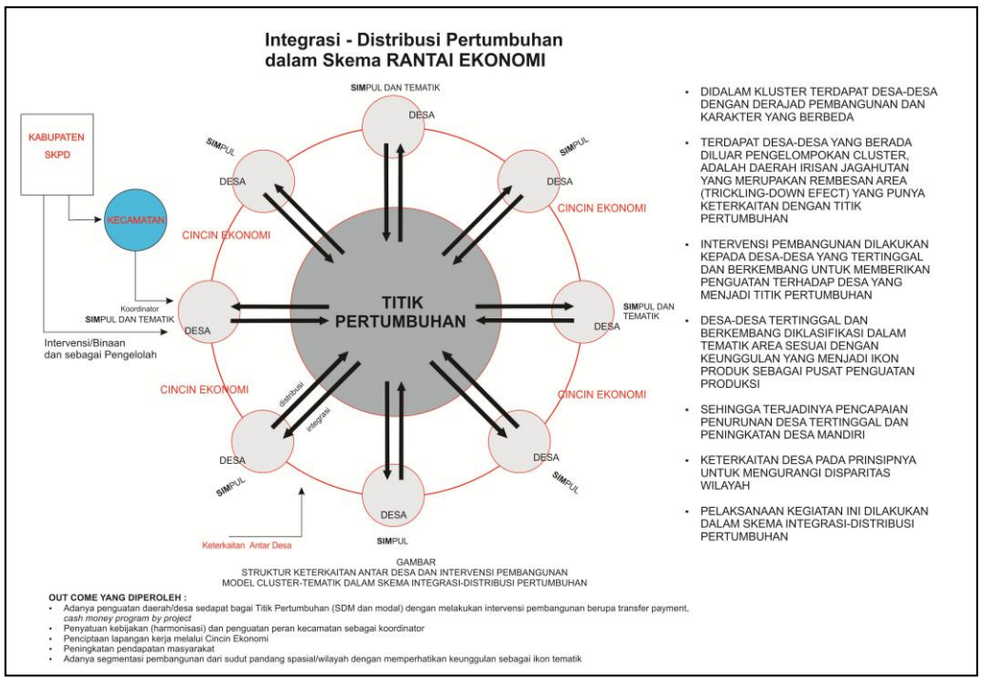
Gambar 5.12.
Wilayah Pertumbuhan Strategis sekitar Kabupaten Lembata



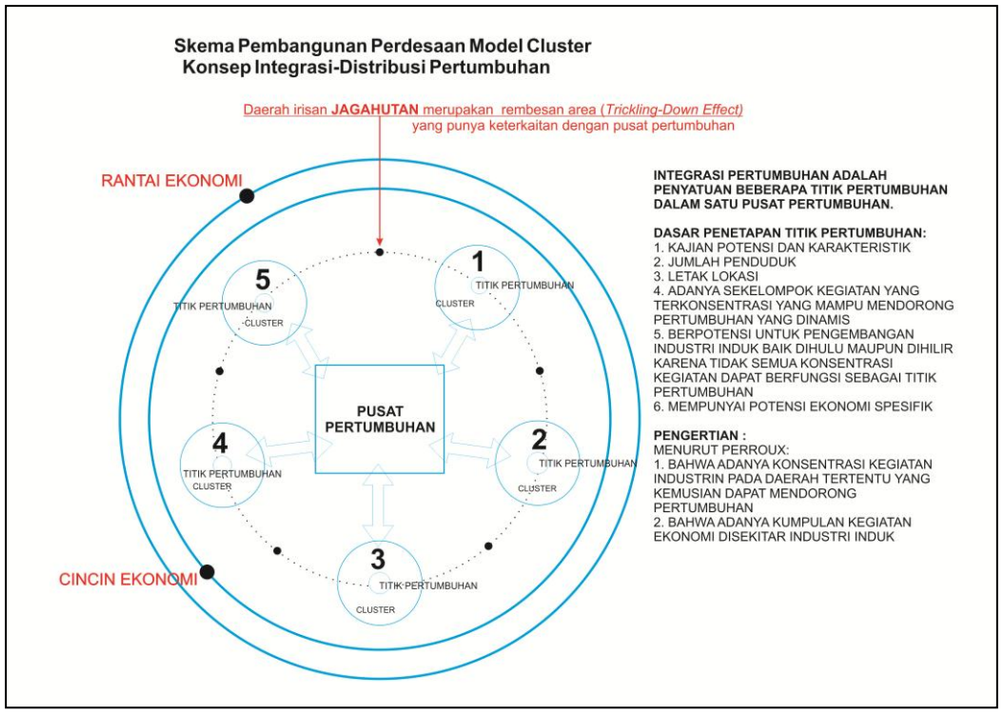
Gambar 5.13.
Rencana Kerjasama Pertumbuhan Strategis Utara-Utara



Gambar 5.14.
Model Integrasi Distribusi dalam Skema Rantai Ekonomi



Gambar 5.15.
Skema Pembangunan Perdesaan Model Cluster



Gambar 5.16.
Dimensi Pembangunan Ekologi

HARMONISASI LINGKUNGAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

- **PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SDA SERTA LINGKUNGAN**
- **TATA RUANG**
- **KONSERVASI**
- **REHABILITASI**
- **RESTORASI**
- **PENGUATAN GERAKAN LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT**

5.2.1. Skenario Pengembangan Wilayah Tahun 2017-2022

Skenario pembangunan wilayah Kabupaten Lembata diperlukan untuk memberikan acuan bagi penataan ruang; pemerataan pembangunan antarwilayah; pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Lembata; pengembangan kawasan ekonomi dan kawasan strategis; serta percepatan kemajuan daerah perdesaan.

Dengan karakteristik wilayah kepulauan, Kabupaten Lembata membutuhkan struktur tata ruang yang kompak dan didukung sistem transportasi regional yang handal. Untuk itu, sesuai kaidah penataan ruang, pengembangan struktur tata ruangnya perlu memperhatikan unsur-unsur pokok seperti : (1) Pusat-pusat pertumbuhan, (2) Pelabuhan sebagai simpul penghubung (sistem transportasi) dan (3) Kawasan strategis.

Pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah pesisir merupakan komponen penting dalam membangun struktur ruang wilayah kepulauan. Pusat-pusat tersebut berfungsi sebagai tempat berkumpulnya berbagai aktivitas di suatu pulau. Pusat pertumbuhan di pesisir ini menjadi titik temu aktivitas di wilayah daratan (*hinterland*) dengan aktivitas di wilayah lautan.

#**Lembata 2.0** dijabarkan dalam 3 (tiga) pendekatan sebagai berikut :

1. Pengembangan potensi ekonomi sektor/wilayah melalui Rantai Ekonomi yang terdiri dari : Cincin Pertanian, Cincin Kelautan, Perikanan dan Kemaritiman, Cincin Pariwisata, Cincin Industri dan Ekonomi Kreatif, Cincin Pemberdayaan Ekonomi Umat Basis dan Cincin Keuangan Mikro;
2. Pengembangan ekonomi wilayah pola kawasan (koridor ekonomi) strategis daerah cepat tumbuh terintegrasi sebagai kawasan pengembangan olahan industri, budidaya dan pariwisata yang berorientasi pada ketahanan pangan yang terdiri dari :
   a. Koridor Ekonomi I PARANG MINGAR (Pada-Waijarang-Mingar).
   b. Koridor Ekonomi II BOTANI (Bobu-Tanjung Leur-Tobotani);
3. Pembangunan Perdesaan.

   Pembangunan perdesaan dititiberatkan pada pembangunan ekonomi desa dengan model klaster-tematik dengan konsep integrasi distribusi pertumbuhan yang berpedoman pada koridor ekonomi. Yang berfokus pada:
   a. Program Percepatan Pembangunan Ekonomi Desa (P3ED) #Desa Tersenyum 2.0;
   b. Pengembangan produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan *model cluster-tematik* untuk mendukung desa cepat tumbuh;
   c. Pengembangan bumdes dan penguatan struktur ekonomi kreatif desa;
   d. Penguatan literasi dan gala desa serta pengembangan pariwisata desa (*travel village*) *#explore rural* lembata

Pembangunan ekonomi desa dengan model klaster-tematik yang berpedoman pada koridor ekonomi didahului dengan penetapan klaster-klaster berdasarkan survei potensi desa untuk ditetapkan menjadi klaster-klaster dengan titik pengembangan/titik pertumbuhan dan simpul-simpul produksi. Penetapan klaster-klaster tersebut akan termuat dalam Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati.

Selain klaster-klaster dimaksud akan ditetapkan juga melalui Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati berupa kelompok desa/desa/kampung/dusun tematik yang dilakukan melalui penataan dan pengembangan kawasan berbasis potensi lokal yang memiliki tema atau ikon tertentu yang unik dan dinamis yang ditetapkan berdasarkan kajian dari hasil pendataan profil dan potensi desa/kampung/dusun serta secara visualisasi pengamatan sesuai dengan keunggulan dan kondisi sosial budaya yang dibina oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan leading sektornya sekaligus memperkuat peran kecamatan sebagai koordinator terdepan. Desa/kampung/dusun tematik merupakan penguatan dari kebijakan percepatan pembangunan ekonomi desa (P3ED) #Desa Tersenyum 2.0 untuk mewujudkan daerah atau desa cepat tumbuh sebagai desa mandiri.

Kebijakan Rantai Ekonomi #Lembata 2.0 fokus pada infrastruktur strategis, ketahanan pangan, dan industri untuk mendorong peningkatan pendapatan melalui optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif, dan pertumbuhan ekonomi, serta memacu investasi, kerjasama daerah dan peningkatan daya saing yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Tema Rantai Ekonomi #Lembata 2.0 adalah **"akselerasi pembangunan infrastruktur strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pengembangan ekonomi wilayah serta pembangunan perdesaan".**

Tema ini dilakukan melalui CINCIN EKONOMI, yaitu cincin pertanian, cincin kelautan, perikanan dan kemaritiman, cincin pariwisata, cincin industri dan ekonomi kreatif, cincin keuangan mikro dan cincin pemberdayaan ekonomi umat basis.

Adapun Pendekatan Lembata 2.0 tersebut dijabarkan secara operasional dengan memperhatikan keterkaitannya dengan inovasi daerah serta target pengembangan setiap tahun. Penjabaran secara operasional dari ketiga pendekatan tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel . 5.1

Penjabaran Operasional Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor/Wilayah melalui Cincin Ekonomi

Skenario Pengembangan Wilayah dan Agenda Politik Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Inovasi Daerah	Target Tahunan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Cincin Pertanian							
1.1 Pengembangan Komoditas Unggulan berorientasi Industri dan Penetapan Kalsifikasi Desa/Kampung/Dusun Tematik	Gerakan Revolusi Kedaulatan Pangan MELATIMEKAR #t-CABANG						
1.1.1 Penyiapan Lahan untuk Produksi Bawang dan Cabe setiap desa		0	65	75	115	135	135
1.1.2. Peningkatan produksi empat (4) komoditi utama, yaitu : jagung industri, bawang, cabe dan kacang tanah							
~ Jagung Industri / Hibrida APBN (Ton)		5.000	15.000	19.600	22.400	22.400	24.000
~ Bawang (ton)		25	390	487,5	862,5	1147,5	1147,5
~ Cabe (ton)		10	40	60	100	120	140
~ Kacang tanah (ton)		409	417,18	425,52	434,03	442,71	451,56
1.1.3. Peningkatan produksi pengembangan dan pemasaran komoditi tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan							
~ Kacang Tanah (Ton)		0	100	200	300	400	500
~ Alpukat (Ha)			30	40	50	50	50
~ Nenas (Ha)		0	10	20	30	40	50
~ Padi (Ha)			50	50	60	70	80
~ Kelapa (Ha)		100	100	100	100	100	100
~ Jangung (Ha)		2.000	6.000	7.840	8.960	8.960	9.600
~ Mente (Ha)		100	100	100	100	100	100
~ Kakao (Ha)			10	20	30	40	50
~ Kopi Belek (Ha)		5	10	20	30	40	50

Skenario Pengembangan Wilayah dan Agenda Politik Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Inovasi Daerah	Target Tahunan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1.4. Pengembangan Desa Bour sebagai Simpul Ketahanan Pangan (Pengembangan Bawang Merah)-(Ha)		1	3	4	4	5	5
1.1.5. Peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian, diantaranya Desa Watokobu sebagai simpul Hortikultura nenas dan ketahanan pangan.		0	10	20	30	40	50
1.1.6 Pengembangan Desa Tematik-Desa Watokobu Dusun Labanobol Labanobol sebagai Dusun Nenas							
* Pengembangan Nanas (Ha)		0	10 Ha	20 Ha	30 Ha	40 Ha	50 Ha
* Hormonisasi Nanas (Pohon)		10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	50.000
* Pemasaran Buah Nanas antar pulau (Ton)		2	3	4	5	6	7
1.1.7. Pengembangan Desa Baolangu sebagai simpul perkebunan kopi dan ketahanan pangan serta desa Lite Ulumado, Udak Melomata, Nubamado dan Desa Paobokol sebagai simpul perkebunanan dan ketahan pangan. (Ha)							
* Pengembangan Kopi (Ha)		5	20	30	40	40	40
* Peremajaan Kopi (Ha)		1	5	10	15	15	15
1.1.8. Pengembangan Desa Tematik di Atadei; Desa-desa Atadei sebagai desa Alpukat							
* Pengembangan Alpukat		0	30	40	50	50	50
* Peremajaan alpukat		0	10	20	20	25	30
1.1.9. Pengembangan Komoditi di desa - desa di Ile Ape untuk :							
*Pengembangan Jagung hibrida/komposit (Ha)		440	500	1.000	1.500	1.500	1.500
* Pengembangan Kacang Tanah (Ha)			50	100	150	200	250
* Pengembangan Bawang Merah (Ha)		3	10	15	25	25	25
* Pengembangan cabe (Ha)		2	4	6	8	8	8
1.1.10. Pengembangan Desa Tematik di Ile Ape diantaranya; Desa Kolipadan dan desa-desa sekitar tanjung sebagai desa jagung titi dan ikan kering							
* Jagung titi (Kg)				200	200	200	200

Skenario Pengembangan Wilayah dan Agenda Politik Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Inovasi Daerah	Target Tahunan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1.11 Pengembangan desa wisata; dengan Desa Tapobaran, Desa Tapolangu dan Desa Dikesare sebagai simpul wisata Bahari, wisata kuliner dan ketahanan pangan							
* Pengembangan Jagung (Ha)			100	150	150	200	250
* Pengembangan Bawang Merah (Ha)			3	4	5	5	5
1.1.12 Peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian;dengan Desa Bobu-Desa Leragere, Desa Dikesare dan desa desa lainnya sebagai simpul ketahanan pangan							
* Pengembangan Jagung (Ha)		230	400	500	500	600	600
* Pengembangan Bawang merah			2	3	4	5	5
* Pengembangan Cabe			2	3	4	4	4
1.1.13 Pengembangan Desa Wowong-Desa Bean-Desa Tobotani-Desa Rumang-Wairiang dengan Desa Wowong dan Desa Bean sebagai titik pertumbuhan/pusat pengembangan yang berorientasi pada pariwisata bahari dan ketahanan pangan, Desa Tobotani sebagai simpul olahan industri garam, peternakan dan ketahanan pangan, Desa Rumang sebagai simpul ketahanan pangan dan Wairiang sebagai simpul perdagangan dan jasa serta Tanjung Leur sebagai simpul olahan industri garam dan pariwisata bahari							
* Pengembangan Bawang Merah			35	37	39	42	45
* Pengembangan Cabe		4	6	8	10	10	12
* Pengembangan Jagung (Ha)		440	1.000	1.200	1.300	1.500	1.500
1.1.14 Peningkatan produksi sapi, kambing, babi, ayam dan pakan ternak							
* Sapi		4.804	4.996	5.196	5.405	5.620	5.845
* Kuda		1.439	1.468	1.497	1.527	1.558	1.589
* Kambing		41.013	43.064	45.217	47.478	49.852	52.344
* Babi		44.834	47.076	49.430	51.901	54.496	57.221

Skenario Pengembangan Wilayah dan Agenda Politik Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Inovasi Daerah	Target Tahunan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
* Unggas		338.800	365.904	395.177	426.791	460.934	497.809
1.1.15 Pembangunan Pusat Pembibitan Ternak							
~ Sapi (Wade dan Atanila)		0	2	2	2	2	2
~ Kambing (Tobotani, Tanjung)				2	2	2	2
1.1.16 Penyediaan dan distribusi Bibit Unggul kepada masyarakat (ekor)							
~ Sapi		0	120	200	200	250	300
~ Kambing		33	200	200	200	300	300
~ Babi		64	200	200	200	300	300
~ Unggas		0	300	300	600	1.000	1.000
~ Kuda		0	0	12	12	24	36
1.1.17 Penyediaan Pangan asal Hewan Yang memenuhi syarat ASUH (asli, sehat, utuh dan halal)				RPU	RPH Kambing		
Pengembangan Pakan Ternak (ha)		10	40	40	50	50	50
1.1.18 Pengolahan Lahan dan Air Untuk Ternak		1	0	1	1	0	0
- Sumur Tanah Dalam (unit)		3	8	8	8	10	10
- Embung embung (unit)		4	10	10	10	10	10
1.1.19 Fasilitasi Pengolahan Hasil Ternak di 9 Ibu Kota Kecamatan, 3 org/ kecamatan		27	27	27	27	27	27
1.1.20 Peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan; dengan Desa Tapobali sebagai simpul budidaya sarang burung wallet							
DST…..							
1.2. Ekspansi Lahan Pertanian							
1.2.1. Optimalisasi lahan pertanian kota untuk mendukung target swasembada							
~ Bawang Merah (Ha)			65	75	115	135	135
~ Cabe (Ha)		5	20	30	50	60	70

Skenario Pengembangan Wilayah dan Agenda Politik Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Inovasi Daerah	Target Tahunan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.2.2. Swasembada bawang, cabe dan jagung industri (tidak impor) melalui ekspansi lahan setiap desa 10 Ha		1410	2820	4230	5640	7050	8460
1.2.3 Pengelolaan lahan dan air							
~ Konsevasi tanah dan air		50	60	70	80	90	100
1.2.4. Pembagian pupuk gratis untuk petani (Ton)			400	400	400	400	400
DST…..							
1.3. Industrialisasi Pertanian dan Peningkatan Daya Saing							
1.3.1. Integrasi kebijakan dalam peningkatan produksi pengembangan dan pemasaran komoditi tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan dan sentra UKM							
~ Pemasaran Nanas untuk industri (Ton)		2	3	4	5	6	7
~ Pemasaran Ubi kayu untuk industri (Ton)			10	20	30	40	50
~ Pemasaran Jagung untuk Industri (Ton)			10	10	10	10	10
~ Pemasaran Pisang untuk industri (Ton)		15	20	25	30	35	40
~ Pemasaran Mangga untuk industri (Ton)				5	5	5	5
~ Pemasaran Mente untuk industri (Ton)			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
DST…..							
1.4. Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Pertanian dan Transportasi							
1.4.1. Modernisasi Pertanian melalui pengadaan Alat-Alat Pertanian Modern							
* Pengadaan Alat Mesin Pertanian			10	20	30	40	50
1.4.2. Pembangunan JUT dan Infrastruktur Distribusi Pertanian dalam mendukung mobilitas orang dan distribusi barang							
1.4.3. Pembangunan Infrastruktur Irigasi /Embung/Waduk Muara/Estuary							
~ Pembangunan Infrastruktur Irigasi pada D.I Wainili		1					
DST…..							

Skenario Pengembangan Wilayah dan Agenda Politik Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Inovasi Daerah	Target Tahunan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia							
1.5.1. Diklat, Bimtek, Kunker, Tour inovasi, Pembangunan SDM pertanian dan rumah tangga tani serta Penguatan struktur budaya Inovasi dan pemanfaatan teknologi			1	1	1	1	1
1.6. Investasi dan Pasar, Lembaga Keuangan							
1.6.1. Infrastruktur investasi MOU Koperasi dan Lembaga keuangan mikro dan swasta Peningkatan kewirausahaan petani			1	1	1	1	1
2. Cincin Kelautan, Perikanan dan Kemaritiman							
2.1. Pembangunan Infrastruktur Perikanan, Sumber Daya Laut dan Kemaritiman							
2.1.1. Penyiapan master plan dan DED Water *Front City* kawasan pesisir utara Lewoleba dan Desa Balauring			1 Paket	1 Paket			
2.1.2 Pembangunan pelabuhan perikanan dan fasilitasnya (Unit)		~	~	1	2	1	~
2.1.3 Pembangunan Solar *Packed Dealer* Nelayan (SPDN) (Unit)		~	~	1	1	1	~
2.1.4 Penyiapan studi lokasi dan pembangunan Pelabuhan Feri Hadingmanuk, Pelabuhan Peti Kemas “Kolipadan Bay” dan Bandara Tanjung di daerah Tuak Wutun							
2.1.5 Pengembangan dan pembangunan industri perikanan pada sisi selatan jalan utama menuju Desa Waijarang							
DST…..							
2.2. Pengembangan dan Pembangunan Industri Perikanan dan Pengelolaan							
2.2.3 Pengembangan industri investasi pembangunan pabrik ikan kaleng Sarden Lembata (Unit)		~	1		~	~	~
2.2.4 Optimalisasi pendapatan usaha industri pengolahan perikanan (Kelompok)		~	30	40	50	60	75

Skenario Pengembangan Wilayah dan Agenda Politik Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Inovasi Daerah	Target Tahunan					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.2.5	Pengolahan sumberdaya laut dan pengolahan Bandeng untuk mendukung industri pengolahan perikanan		~	10	25	45	60	75
2.3.	**Optimalisasi Pendapatan melalui : Optimalisasi Pabrik Tepung Ikan dan Peningkatan Volume Pabrik Es, serta Koperasi Nelayan**							
2.3.1	Peningkatan produksi pabrik es untuk nelayan (Ton)		400	960	960	960	960	960
2.3.2	Pengadaan tempat pendingin (*cold storage*) ikan (Unit)		~	~	1	1	1	~
2.3.3	Peningkatan produksi pabrik es untuk nelayan (Ton)		400	960	960	960	960	960
2.3.4	Pengadaan tempat pendingin (*cold storage*) ikan (Unit)		~	~	1	1	1	~
	DST…..							
2.4.	**Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Laut, Daerah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**							
2.4.1.	Pembangunan laboratorium terumbu karang indah berbasis pariwisata di daerah Hukung dan sekitarnya (Kawasan)		~	~	1	~	~	~
2.4.2	Perlindungan Kawasan Sumberdaya Laut (Kawasan)		~	4	4	4	4	4
2.4.3	Konservasi, rehabilitasi dan restorasi sumberdaya laut		~	4	4	4	4	4
2.4.4	Pemanfaatan mangrove dan daerah pesisir pantai sebagai obyek wisata		~	1	1	1	1	1
2.4.5	Penetapan kawasan wilayah industri pengelolaan perikanan di teluk Hadakewa dan sekitarnya		1	1	1	1	1	1
2.4.6	Penetapan Kawasan industri Pengelolaan Perikanan Teluk Lewoleba		1	1	1	1	1	1
2.4.7	Penetapan Kawasan industri Pengelolaan Budidaya Mutiara di Desa Merdeka		1	1	1	1	1	1
2.4.8	Penetapan Pulau Siput Awulolong dan kawasan wisata mangrove Pantai Mutiara Desa Waijarang		1	1	1	1	1	1
2.4.9	Kawasan Pantai Penyu di Loang		1	1	1	1	1	1

Skenario Pengembangan Wilayah dan Agenda Politik Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Inovasi Daerah	Target Tahunan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.4.10 Pengembangan Desa secara tematik di Wulandoni diantaranya Desa Lamalera A dan Lamalera B sebagai Desa ikan paus;		1	1	1	1	1	1
DST…..							
2.5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM							
2.5.1 Diklat, Bimtek, Kunker, Tour inovasi, Penguatan struktur budaya							
2.6. Peningkatan Produksi dan Budidaya Perikanan, Sumber Daya Laut dan Kemaritiman							
2.6.1 Peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya (Ton)							
* Perikanan Tangkap		7.173,3	7.500	8.000	9.000	9.200	10.300
* Perikanan Budidaya		1.054	1.500	2.000	3.000	4.500	6.500
* Peningkatan produksi komoditas unggulan perikanan dengan Desa Babokerong sebagai simpul budidaya rumput laut (Ton)		200	450	600	750	850	1000
* Pengembangan Desa secara tematik di Nubatukan diantaranya Kampung Nyamuk sebagai Kampung Nelayan							
2.6.2 Peningkatan produksi komoditas unggulan perikanan diantaranya menjadikan Desa Lamatuka-Desa Hadakewa-Desa Merdeka-Desa Tapolangu-Desa Dikesare dengan desa Hadakewa sebagai titik pertumbuhan/pusat pengembangan yang berorientasi pada olahan sumber daya laut (olahan ikan teri dan budidaya ikan kerapu), Desa Merdeka sebagai simpul budidaya mutiara (T0n)		2	5	10	15	20	25
DST…..							

Skenario Pengembangan Wilayah dan Agenda Politik Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Inovasi Daerah	Target Tahunan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3. Cincin Pariwisata							
3.1. Peningkatan Pasar dan Promosi							
3.1.1. Kerja sama promosi dan peningkatan pasar, pengembangan, pembangunan dan penataan DTW dan Obyek Wisata Potensial yang dapat dilakukan melalui kerjasaman dengan pihak ketiga dalam kegiatan rally wisata bahari-Lembata #Truly Heaven-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 Gunung (*Blue Mountain Tours)*	rally wisata bahari-Lembata #Truly Heaven-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 Gunung (Blue Mountain Tours)		1	1	1	1	1
* Penyelenggaraan Festival Budaya Lamaholot (kerjasama Alor, Lembata, Larantuka)		1 Festival	1 Festival	1 Festival	1 Festival	1 Festival	1 Festival
* Ekspo dan festival Uyelewun Raya (kerjasama Lembata dan Alor-Pantar)		-	1 Ekspo, 1 Festival	1 Ekspo, 1 Festival	1 Ekspo, 1 Festival	1 Ekspo, 1 Festival	1 Ekspo, 1 Festival
* Ile Lewotolok *Volcano Tracking*			1 Ekspo, 1 Festival	1 Ekspo, 1 Festival	1 Ekspo, 1 Festival	1 Ekspo, 1 Festival	1 Ekspo, 1 Festival
3.1.2. Pengembangan Citra Pariwisata Lembata melalui Pembuatan *Film Brand Tourism* dan Lembata *International Documentary Film Festival*			2	2	2	2	2
3.2. Pengembangan Destinasi							
3.2.1. Pembangunan dan Penataan Daerah Tujuan Wisata dan Daya Tarik Wisata yang Potensial							
* Wilayah Pengembangan Pariwisata 1			16 pkt	16 pkt	16 pkt	16 pkt	16 pkt
* Wilayah Pengembangan Pariwisata 2			14 pkt	14 pkt	14 pkt	14 pkt	14 pkt
* Wilayah Pengembangan Pariwisata 3			15 Pkt	15 Pkt	15 Pkt	15 Pkt	15 Pkt
3.2.2 Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Umum Penunjang Pariwisata			2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket

Skenario Pengembangan Wilayah dan Agenda Politik Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Inovasi Daerah	Target Tahunan					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Akses Tarsnportasi-Informasi								
3.3.1	Pembangunan sarana dan prasarana Pusat Penyelaman (diving centre) di Kota Lewoleba		-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
3.3.2	Peningkatan dan pembangunan ruas jalan Sp Kwakat - Wolor Pass/ Bukit Cinta		1	Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan
3.3.3	Peningkatan dan pembangunan ruas jalan Sp Watomiten - Bukit Doa		-	1				
3.3.4	Pembangunan ruas jalan Baobolak -Tanjung Naga -Watanlolo-Mingar			5	5	5	5	5
3.3.5	Pembangunan jeti pariwisata, jeti perikanan dan jeti perhubungan laut		-	1 paket	2 paket	2 paket	3 paket	3 paket
3.3.6	Pengadaan Kapal Pariwisata			Pengadaan 1 unit Kapal 7 GT	Pemeliharaan	Pengadaan 1 unit Kapal 7 GT	Pemeliharaan	Pemeliharaan
3.3.7	Pengadaan Bus Wisata			2 Unit	Pemeliharaan	Pemeliharaan 2 Unit	Pengadaan satu Unit	Pemeliharaan 3 Unit
3.3.8	Pembangunan dan peningkatan jalan menuju wisata mangrove Pantai Mutiara Waijarang		-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
3.3.9	Pembangunan talud pengaman pantai berbasis pariwisata di Desa Balauring dan Kota Lewoleba			1 paket	1 paket			
3.3.10	Pembangunan Pelabuhan Udara dan Pelabuhan Laut			2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
3.4 Pengembangan Kelembagaan dan Budaya								
3.4.1	Pembentukan Lembata Tourism Board			1 Paket	1 Paket	1 Paket		
3.4.2	Pengembangan SDM dan Kelembagaan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
3.4.3	Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Vokasi Kepariwisataan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
3.4.4	Penguatan Struktur Budaya			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
3.4.5	Pengembangan Atraksi			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket

Skenario Pengembangan Wilayah dan Agenda Politik Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Inovasi Daerah	Target Tahunan					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.4.6	Pelestarian Alat Musik Tradisional dan Tenun Tradisional Original Lembata			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
3.4.7	Pengembangan Regulasi Daerah			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
3.5. Industrialisasi Pariwisata dan Investasi								
3.5.1	Pembangunan Sarana Prasarana Indsutri Pariwisata dan Investasi			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
3.5.2	Peningkatan Daya Saing Produk			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
3.5.3	Kemitraan Usaha dan Investasi			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
3.5.4	Pemberdayaan Masyarakat			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
3.5.5	Insentif berupa *Tax Holiday*			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	DST…..							
3.5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, SDM dan Infrastruktur Budaya Lokal								
3.5.1	Pengembangan, pembangunan dan penataan wisata budaya Lewohala di Desa Jontona, Lusilame, Lamanunang, wisata budaya Puang Kemer di Desa Leuwayang, Waqkio di Desa Panama, dan budaya Aher di Desa Atakore		-	6 desa	6 desa	6 desa	6 desa	6 desa
3.5.2	Pelestarian alat musik tradisional Tatong Uyelewun Lembata dan musik tradisional lainnya		-	8 desa	12 desa	14 desa	16 desa	18 desa
4. Cincin Industri dan Ekonomi Kreatif								
4.1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Industri dan Investasi								
4.1.1	Pembangunan Sarana Prasarana, modal usaha, penyusunan regulasi dan fasilitasi perijinan serta insentif investasi							
4.1.2	Penetapan Pasar Induk Daerah							
4.1.3	Revitalisasi Pasar		5	5	5	5	5	5
4.1.4	Penataan Perijinan yang ramah investasi		~	1	2	2	~	~
4.1.5	Pembangunan Sarana Prasarana yang mendukung investasi			2	2	2	2	2

Skenario Pengembangan Wilayah dan Agenda Politik Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Inovasi Daerah	Target Tahunan					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.1.6	Studi kelayakan pemanfaatan depo mini BBM dengan memperhatikan kolam labuh pelabuhan laut Kota Lewoleba, pembangunan SPBU di Kota Lewoleba, pembangunan mini SPBU di Desa Balauring (investasi)			3	3	3	3	3
4.2.	**Percepatan Pengembangan Industrialisasi**							
4.2.1	Penyusunan Rencana Induk Pengembagan Kawasan Industri					1		
4.2.2	Pembangunan Pabrik Air Kemasan, garam industri dan pabrik olahan ikan, olahan ikan teri/merang		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
4.2.3	Pengembangan Industri Olahan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
4.2.4	Pengembangan Skala Industri Kreatif berorientasi eksport		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
4.2.6	Penguatan 9 (sembilan) desa/kampung/dusun tematik			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
4.3.	**Pengembangan UKM dan Wirausaha**	G-U450 (gerakan usahawan 450)	**~**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
4.3.1.	Pengadaan Sentra UKM							
4.3.2	Menumbuhkan 450 Usahawan dan home indsutri			90	90	90	90	90
4.3.3	Menggalakan Promosi Hasil Produksi			2 event	2 event	2 event	2 event	2 event
4.3.4	Menjalankan kebijakan anggaran yang berorientasi pada pengembangan UKM dan wirausaha (perbup)			1	2	3	3	3
4.4.	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM**							
4.4.1	Menjalankan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi SDM yang kreatif melalui diklat dan bimtek			1	1	1	1	1
4.4.2	Menjalankan tour inovasi			1	1	1	1	1
4.4.3	Menjalankan pendampingan dan pemberdayaan industri			1	1	1	1	1
5.	**Cincin Pemberdayaan Ekonomi Umat Basis**							
5.1.	**Penguatan Infrastruktur dan Pengembangan Kemitraan Usaha**							
5.1.1	Membangun unit lembaga usaha berbasis komunitas			5	5	5	5	5
5.1.2	Optimalisasi Lembaga usaha berbasis Komunitas dan penguatan struktur budaya (PEKA, Majelis Tahlim, Santa Ana, OMK, Remaja Masjid dan Karang Taruna)			6	6	6	6	6

Skenario Pengembangan Wilayah dan Agenda Politik Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Inovasi Daerah	Target Tahunan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.1.3 Optimalisasi Kelompok Usaha Ekonomi melalui Gerakan Pemberdayaan			6	6	6	6	6
5.1.4 Melakukan MoU dengan lembaga keuangan, bank dan non bank			6	6	6	6	6
5.1.5 Pengembangan sentra usaha mikro melalui Bumdes			9	9	9	9	9
5.2. Permodalan dan Sumber Pendanaan							
5.2.1 Mengembangkan kemampuan dalam permodalan (Kelompok)			9	9	9	9	9
5.2.2 *Transfer Payment* berupa program pangan, pendidikan, kesehatan, pinjaman mikro kredit; (kelompok penerima)			9	9	9	9	9
5.3. Pengembangan Kelembagaan dan Penguatan Kapasitas SDM							
5.3.1. Menjalankan pendampingan pemberdayaan ekonomi umat basis melalui pendidikan dan latihan (kelompok)			9	9	9	9	9
5.3.2 Menjalankan tour inovasi			9 desa Tematik	9 desa Tematik	9 desa Tematik	9 desa Tematik	9 desa Tematik
6. Cincin Keuangan Mikro							
6.1. Pengembangan Kelembagaan dan Penguatan Kapasitas Usaha							
6.1.1 Penguatan Infrastruktur Keuangan							
* Membangun Unit Lembaga Keuangan pada tingkat desa			9 desa Tematik	9 desa Tematik	9 desa Tematik	9 desa Tematik	9 desa Tematik
6.2. Pengembangan Kemitraan Usaha dan Kredit Mikro							
6.2.1 Pembentukan lembaga keuangan mikro LKM melalui kemitraan usaha			9 desa Tematik	9 desa Tematik	9 desa Tematik	9 desa Tematik	9 desa Tematik

Skenario Pengembangan Wilayah dan Agenda Politik Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Inovasi Daerah	Target Tahunan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
6.3. Pengembangan Kelembagaan dan Penguatan Kapasitas Usaha							
6.3.1 Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Rakyat di antaranya BUMDES			9 desa Tematik	9 desa Tematik	9 desa Tematik	9 desa Tematik	9 desa Tematik
6.3.2 MoU dengan Mitra Keuangan Bank, Koperasi, Dunia Usaha dan Lembaga Pendamping (Kelompok)			9	9	9	9	9

5.2.2. Skenario Pembangunan Ekonomi Daerah 2017-2022

Berdasarkan perkembangan kinerja pembangunan Kabupaten Lembata selama 2011-2016, pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Lembata 2017-2022 disusun dengan skenario optimis untuk mendorong percepatan (akselerasi) dan sekaligus perubahan (transformasi) pembangunan melalui pembenahan sistem dan manajemen perencanaan, penganggaran, pengadaaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan; pengembangan daya saing daerah, serta peningkatan kerjasama investasi.

Penyusunan skenario pembangunan ekonomi Kabupaten Lembata tahun 2017-2022 dilakukan dengan memperhitungkan asumsi dasar sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan rata-rata sebesar 2,08 persen pada tahun 2017-2022;
2. Laju pertumbuhan angkatan kerja diperkirakan rata-rata sebesar 0,49 persen pada tahun 2017-2022;
3. Elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan kesempatan kerja diperkirakan sebesar 0,02. Artinya setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja 0,002 persen;
4. Elastisitas pertumbuhan PDRB perkapita terhadap kemiskinan diperkirakan sebesar 0,09 per tahun. Artinya setiap 1 persen pertumbuhan PDRB perkapita akan mengurangi angka kemiskinan sebesar 0,0009 persen.

Hasil proyeksi pembangunan ekonomi Kabupaten Lembata 2017-2022 menurut skenario optimis melalui perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat dari 5,12 persen pada tahun 2016 menjadi 5,75-7,00 persen pada tahun 2022;
- Tingkat pengangguran terbuka akan turun dari 2,96 persen pada tahun 2016 menjadi 2,29-2,35 persen pada tahun 2022;
- Tingkat kemiskinan akan turun dari 26,44 persen pada tahun 2016 menjadi 21,39-21,94 persen pada tahun 2022.

Tabel. 5.2
Perkiraan Pertumbuhan Penduduk, Angkatan Kerja dan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan
di Kabupaten Lembata 2015-2022

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah penduduk (jiwa)	132.081	133.152	137.726	140.591	143.516	146.501	149.548	152.658
2. Pertumbuhan Penduduk (%)	0.73	1,91	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
3. Pertumbuhan Ekonomi (%) [1)]	4.98	4,71	5,23	5,34-5,64	5,44-5,74	5,55-6,15	5,65-6,55	5,75-7,00
4. Pertumbuhan PDRB per kapita (%)	2,66	2,76	2,86	2,96	3,05	3,15	3,29	3,33
5. Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	61.151	61.154	61.157	61.160	61.163	61.166	61.169	61.172
6. Pertumbuhan Angkatan Kerja(%)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
7. Jumlah Penduduk Bekerja (jiwa)	59.284	59.345	59.407	59.470	59.535-59.539	59.601-59.612	59.668-59.690	59.737-59.772
8. Jumlah Penganggur (jiwa)	1.867	1.809	1.750	1.690	1.624-1.628	1.554-1.565	1.479-1.501	1.400-1.435
9. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,05	2,96	2,86	2,76	2,66	2,54-2,56	2,42-2,45	2,29-2,35
10. Jumlah penduduk Miskin (jiwa)	35.930	35.668	35.376	35.055	34.612-34.706	34.052-34.332	33.365-33.918	32.660-32.488
11. Tingkat Kemiskinan (%)	27,18	26,44	25,69	24,93	24,12-24,18	23,23-23,43	22,31-22,68	21,39-21,94
12. Indeks Pembangunan Manusia	62,16	62,81	62,94	63,04	63,33	63,62	63,91	64,16

Sumber: Hasil Analisis 2017

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lembata 2017-2022 adalah Kabupaten Lembata menjadi produktif dan berdaya saing; sektor partanian, kelautan, perikanan dan kemaritiman serta pariwisata demi terwujudnya industrialisasi dimana Kabupaten Lembata menjadi Kabupaten industri 2025 dengan sasarannya adalah peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal diatas, maka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

5.3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Kesatu

Dalam mendukung terwujudnya **Misi Kesatu** : **Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, serta Optimalisasi Peran Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan Daerah dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat;** dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kesatu, kelima dan kedelapan dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesatu, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan kedelapan, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2017-2022) adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, dengan sasaran:

1. Meningkatnya jangkauan kualitas pendidikan dasar antara lain ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi murid (APM) serta meningkatnya angka melek huruf (AMH).
2. Meningkatnya mutu pendidikan dasar antara lain ditandai dengan meningkatnya angka kelulusan murid.
3. Meningkatnya minat baca masyarakat antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan, taman bacaan, jumlah buku bacaan dan persentase arsip yang terpelihara.

Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran:

1. Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat antara lain ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, dan meningkatnya persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi;
2. Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat antara lain ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup;
3. Meningkatnya status gizi masyarakat antara lain ditandai dengan menurunnya prevalensi balita dengan berat badan rendah atau angka gizi buruk;
4. Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana antara lain ditandai dengan menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, dan meningkatnya persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih;
5. Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemik antara lain ditandai dengan menurunnya kasus penyakit menular dan endemik;
6. Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan antara lain ditandai dengan berkurangnya kawasan kumuh.

Tujuan 3 : Optimalisasi peran pemuda dalam pembangunan daerah, dengan sasaran:

1. Berkembangnya kegiatan kepemudaan antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga dan organisasi kepemudaan yang aktif; dan meningkatnya persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan;
2. Meningkatnya prestasi pemuda di bidang seni, budaya dan olah raga antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah kegiatan seni, olah raga dan budaya; dan meningkatnya persentase pemuda yang meraih prestasi seni, olah raga dan budaya;
3. Berkembangnya kewirausahaan para pemuda antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah usahawan muda dan kemandirian secara ekonomi.

Tujuan 4: Optimalisasi partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Berkembangnya lembaga dan organisasi perempuan antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga dan organisasi perempuan yang aktif; dan persentase perempuan yang aktif dalam kegiatan;
2. Meningkatnya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan antara lain ditandai dengan berkurangnya kasus kekerasan dalam rumah tangga; menurunnya kasus perdagangan perempuan; dan berkembangnya pengarusutamaan gender dalam perumusan kebijakan;
3. Terwujudnya keluarga yang sejahtera antara lain ditandai dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam usaha sosial ekonomi dan berkembangnya kelompok usaha bersama perempuan.

Tujuan 5 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dengan sasaran:

1. Terciptanya rasa aman antara lain ditandai dengan berkurangnya angka kriminalitas;
2. Terciptanya ketertiban antara lain ditandai berkurangnya kasus penyalahgunaan narkoba; dan berkurangnya kasus penggunaan minuman keras dan meningkatnya disiplin hidup bermasyarakat;
3. Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan bertanggung jawab antara lain ditandai dengan meningkatnya penyelesaian kasus kriminalitas;

5.3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Kedua

Dalam mendukung terwujudnya **Misi Kedua** : **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur, Transportasi, Air Bersih, Energi, Komunikasi dan Penataan Kota**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita ketiga, keenam dan ketujuh dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, dan keduabelas; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2017-2022) adalah sebagai berikut:

Tujuan 6 : Meningkatkan infrastruktur dasar strategis, transportasi dan komunikasi, dengan sasaran:

1. Terbangunnya jalan – jalan strategis yang menunjang ekonomi yang ditandai dengan pemanfaaatan jalan strategis.
2. Terbangunnya aksebilitas jalan yang menjangkau perdesaan yang ditandai dengan terbangunnya jalan yang menghubungkan akses antar desa;

3. Tersedianya prasarana dan sarana air bersih yang ditandai dengan meningkatnya persentase pelayanan air bersih masyarakat;
4. Tersedianya prasarana dan sarana irigasi antara lain ditandai dengan terbangunnya waduk dan embung dan meningkatnya persentase jaringan irigasi;
5. Tersedianya prasarana dan sarana listrik yang ditandai dengan meningkatnya persentase elektrifikasi;
6. Terbangunnya jaringan transportasi darat, laut dan udara yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kendaraan darat, laut dan udara, pembangunan pelabuhan laut, pelabuhan very, pelabuhan udara dan terbangunnya fasilitas dan peningkatan jaringan transportasi darat, laut dan udara.
7. Terbangunnya jaringan telekomunikasi dan informasi antara lain ditandai dengan meningkatnya akses dan kemudahan komunikasi melalui internet dan lain – lain dan meningkatnya kemudahan BTS.

Tujuan 7 : Meningkatkan mutu lingkungan perumahan dan permukiman, dengan sasaran:

1. Terbangunnya prasarana dan sarana perumahan sesuai standar minimum antara lain ditandai dengan meningkatnya persentase rumah yang sehat, bersih, dan layak huni;
2. Berkurangnya lingkungan permukiman kumuh antara lain ditandai dengan berkurangnya kawasan kumuh.

Tujuan 8 : Mewujudkan Ibukota Kabupaten Lembata yang humanis, dengan sasaran:

1. Meningkatnya standar dan mutu prasarana dan sarana perkotaan antara lain dengan Menata kota yang harmonis (bersih, sehat, indah, tertib, nyaman dan berbudaya) yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat kota, wilayah perkotaan yang terlayani sanitasi yang baik.

Tujuan 9 : Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Terjaganya fungsi lingkungan antara lain ditandai dengan berkurangnya persentase lahan kritis, berkurangnya tingkat pencemaran air, berkurangnya tingkat pencemaran laut dan berkurangnya tingkat pencemaran udara;
2. Berkembangnya kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan antara lain ditandai dengan berkurangnya kasus sengketa pengelolaan sumber daya dan lingkungan, berkurangnya pencurian ikan, berkurangnya penambangan liar, dan berkurangnya penebangan liar;
3. Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi bencana serta pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim antara lain ditandai dengan tersedianya peta rawan bencana, terbentuknya desa tangguh dan siaga bencana, Sekolah Aman Bencana dan meningkatnya kesiapan menghadapi bencana;
4. Meningkatnya Ketersediaan Air antara lain ditandai dengan pelaksanaan kegiatan penanaman penanaman dan panen air.

Tujuan 10: Mengoptimalkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah dan pertanahan, dengan sasaran:

1. Terwujudnya keserasian pemanfaatan ruang wilayah antara lain ditandai dengan meningkatnya ketaatan dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah;
2. Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah antara lain ditandai dengan meningkatnya persentase tanah bersertifikat dan berkurangnya kasus konflik lahan.

5.3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Ketiga

Dalam mendukung terwujudnya **Misi Ketiga** : **Mempercepat Pembangunan dan Mengembangkan Sumber Daya Ekonomi Laut dan Maritim, serta Ekonomi Kreatif Berbasis Industri dan Pariwisata Berkelanjutan**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita keenam dan ketujuh dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kedelapan, kesembilan, dan keduabelas; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2017-2022) adalah sebagai berikut :

Tujuan 11: Mengembangkan industrialisasi pengelolaan perikanan, Sumber daya laut dan kemaritiman, dengan sasaran;

1. Tersedianya kawasan pengelolaan perikanan, sumber daya laut dan kemaritiman
2. Meningkatnya hasil produksi perikanan dan sumber daya laut yang ditandai antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah produksi hasil ikan dan rumput laut dan garam;
3. Meningkatnya nilai tambah hasil pengelolaan perikanan, sumber daya laut dan kemaritiman antara lain ditandai dengan meningkatnya PAD pada sektor perikanan, sumber daya laut dan kemaritiman;
4. Terbangunnya wisata bahari, koperasi nelayan serta meningkatnya kesejahteraan nelayan antara lain ditandai dengan meningkatnya nilai tukar nelayan, dan meningkatnya pertumbuhan pendapatan nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Meningkatnya produksi maritim antara lain ditandai dengan jasa pelayanan dan fasilitas transportasi laut.

Tujuan 12 : Mengembangkan ekonomi kreatif berbasis industri dan pariwisata yang berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Berkembangnya usaha produksi ekonomi kreatif yang ditandai dengan meningkatnya orang kreatif, usaha produktif dan terbangunnya prasarana dan lembaga kreatif untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

5.3.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Keempat

Dalam mendukung terwujudnya **Misi Keempat** : **Mempercepat Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan serta Meningkatkan Pasar dan Promosi Daerah Tujuan Wisata**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kesatu, kedua, keempat dan kedelapan dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesebelas, ketigabelas, kelimabelas, keenambelas dan ketujuhbelas; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2017-2022) adalah sebagai berikut :

Tujuan 13 : Mengembangkan pariwisata daerah yang unggul dan berdaya saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pasar dan promosi pariwisata yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan kepariwisataan;
2. Meningkatnya persentase masyarakat dan investor yang aktif dalam mengelola objek wisata;

3. Terwujudnya pengembangan, pembangunan dan penataan daerah/daya wisata lainnya yang berpotensi yang ditandai dengan jumlah objek wisata yang bernilai jual tinggi.
4. Berkembangnya jasa pariwisata antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah hotel, restoran dan travel dan meningkatnya kunjungan wisatawan;
5. Meningkatnya pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat.

5.3.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Kelima

Dalam mendukung terwujudnya **Misi Kelima** : **Meningkatkan Pendapatan dan Kerja Sama Daerah serta Mengembangkan Ekonomi Wilayah dan Pembangunan Perdesaan Berbasis Industri Berkelanjutan**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kesatu, kedua, keempat dan kedelapan dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesebelas, ketigabelas, kelimabelas, keenambelas dan ketujuhbelas; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2017-2022) adalah sebagai berikut :

Tujuan 14 : Meningkatkan kesejahteraan petani, pekebun dan peternak, dengan sasaran;

1. Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan hasil pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan dan peternakan antara lain ditandai dengan meningkatnya produksi penjualan jagung dan ubi kayu, cabe, bawang, kacang tanah, sayur – sayuran dan buah – buahan, nenas, advokat, kopi, jambu mente, sapi, babi, kambing, ayam kampung dan lain -lain;
2. Meningkatnya kesejahteraan petani, peternak dan pelaku usaha mikro antara lain ditandai dengan meningkatnya nilai usaha mikro.

Tujuan 15 : Meningkatkan produktifitas pembangunan perdesaan, dengan sasaran:

1. Memperbaiki kualitas belanja pembangunan desa antara lain ditandai dengan meningkatnya realisasi APBDes;
2. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa ditandai dengan meningkatnya BUMDES yang aktif;
3. Terwujudnya titik-titik pertumbuhan desa melalui klaster-tematik antara lain ditandai dengan terbentuknya desa pertumbuhan tematik;

Tujuan 16 : Mengembangkan kawasan ekonomi strategis daerah cepat tumbuh, dengan sasaran:

1. Tersedianya master plan wilayah pengembangan kawasan ekonomi strategis koridor ekonomi Rantai Ekonomi #LEMBATA 2.0;
2. Terbangunnya prasarana dan sarana kawasan ekonomi strategis daerah antara lain ditandai dengan tersedianya prasarana dan sarana produksi dan distribusi;

Tujuan 17 : Meningkatkan kerjasama Daerah, dengan sasaran:

1. Terwujudnya kerjasama investasi regional, nasional dan internasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kegiatan yang melibatkan peran masyarakat luas seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan serta pariwisata;

Tujuan 18: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran:

1. Menurunnya kemiskinan antara lain ditandai dengan berkurangnya jumlah dan persentase penduduk miskin;
2. Berkurangnya masalah sosial antara lain ditandai dengan berkurangnya jumlah dan persentase masyarakat penyandang masalah sosial;

3. Meningkatnya kesempatan kerja antara lain ditandai dengan berkurangnya tingkat pengangguran terbuka;
4. Terwujudnya ketahanan pangan antara lain ditandai dengan meningkatnya produksi pangan, meningkatnya pasokan pangan dan terjaganya inflasi.

5.3.6. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Keenam

Dalam mendukung terwujudnya **Misi Keenam** : Menata dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Berbasis Teknologi Informasi serta Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kesatu, kedua, keempat dan kedelapan dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesebelas, ketigabelas, kelimabelas, keenambelas dan ketujuhbelas; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2017-2022) adalah sebagai berikut:

Tujuan 19: Menata dan mengembangkan potensi sumber daya manusia ASN berbasis informasi teknologi, dengan sasaran:

1. Terwujudnya revolusi kerja APIIKKK (Aspiratif, Produktif, Inovatif, Integratif, Konkrit, Kontributif dan Kompetitif) sebagai *human capital management* melalui pengembangan potensi ASN berbasis informasi teknologi;
2. Terciptanya kapasitas SDM ASN yang APIIKKK;
3. Meningkatnya kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Tujuan 20 : Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, dengan sasaran:

1. Terwujudnya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif antara lain meningkatnya jumlah SKPD dan desa dengan status laporan kinerja baik;
2. (Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel antara lain ditandai dengan meningkatnya status laporan keuangan daerah menjadi WTP, bertambahnya pajak dan retribusi daerah, meningkatnya jumlah PD dengan laporan keuangan baik atau WTP, meningkatnya realisasi pendapatan daerah, dan meningkatnya realisasi belanja daerah;
3. Terwujudnya sistem informasi pemerintahan yang transparan antara lain ditandai dengan meningkatnya kesesuaian antara perencanaan (RPJMD dan RKPD) dengan penganggaran (RAPBD) dan pelaksanaan program (LAKIP), persentase masyarakat yang dapat mengakses dokumen APBD, dan persentase masyarakat yang dapat mengakses dokumen laporan kinerja SKPD.

Tujuan 21: Meningkatkan kinerja pelayanan publik, dengan sasaran:

1. Terwujudnya pelayanan publik di SKPD yang cepat, mudah, bermutu dan adil antara lain ditandai dengan meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKPD (Kinerja SKPD);
2. Terwujudnya kemudahan pelayanan pihak ketiga untuk percepatan realisasi penyerapan anggaran pembangunan daerah;
3. Terwujudnya pelayanan publik antara lain ditandai dengan meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat.

Tujuan 22 : Mengembangkan tata kelola politik dan pemerintahan yang demokratis, dengan sasaran:

1. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas proses politik dan pemerintahan antara lain ditandai dengan meningkatnya persentase masyarakat yang aktif dalam konsultasi publik pembahasan peraturan daerah, persentase masyarakat yang aktif dalam konsultasi publik pembahasan RAPBD, dan persentase masyarakat yang aktif dalam konsultasi publik pembahasan pengelolaan asset daerah dan meningkatnya partisipasi penduduk yang ikut dalam kegiatan politik;

   Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran diesertai dengan indicator Kinerja dan Target tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel.5.3. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran diesertai dengan indicator Kinerja dan Target tahun 2017-2022

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, serta Optimalisasi Peran Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan Daerah dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat											
Tujuan, Sasaran	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Indikator Kinerja/SDG's	Satuan	Target Sasaran Kinerja							PD
				Kondisi Awal	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	**Tujuan.1. Mengakhiri Kemiskinan dalam segala Bentuk dimanapun**										
1.1. Meningkatnya jangkauan kualitas pendidikan dasar		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A **(SDG's 1.4.1.(g))**	%	83,55	83,66	84,56	86,76	90,26	95,76	96,26	Dinas PKO
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B **(SDG's 1.4.1.(h))**	%	62,68	65,40	73,48	84,46	97,08	98,07	99,06	Dinas PKO
		Angka Melek Huruf	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PKO
	Tujuan.4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A **(SDG's)4.1.1.(d)**		93,35	96,2	98,15	99,3	104,35	110,4	110,4	Dinas PKO
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B **(SDG's) 4.1.1.(e)**		96,99	97,12	98,8	110,1	112,38	118,3	118,3	Dinas PKO
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C **(SDG's) 4.3.1.(a)**		98,18	98,8	99,1	99,89	118,12	120,5	120,5	Dinas PKO
1.2. Meningkatnya mutu pendidikan dasar		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	97,44	98,38	98,42	98,42	99,42	99,42	99,42	Dinas PKO
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,83	99,89	100	100	100	100	100	Dinas PKO
1.3. Meningkatnya minat baca masyarakat		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	4.754	5.567	6.500	7.000	7.500	8.500	8.500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Buku	20.669	22.295	23.217	24.577	26.005	27.503	27.503	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Taman Baca/Perpustakaan (Kec)	Taman Baca	9	9	9	9	9	9	45	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Arsip Yang Terpelihara	%	20	20	20	20	20	20	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	**Tujuan.1. Mengakhiri Kemiskinan dalam segala Bentuk dimanapun**										
2.1. Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat		Persentase anak dengan imunisasi Dasar Lengkap **(SDG's1.4.1.(b)**	%	91,6	95	95	95	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Tujuan.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan seluruh Penduduk semua Usia	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup **(SDG's 3.2.2.(a))**	Per 1000 Kelahiran Hidup	14,55	<14	<13	<12	<11	<10	<10	Dinas Kesehatan
2.2. Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	66	66,5	67	67,5	67,5	68	68	Dinas Kesehatan
2.3. Meningkatnya status gizi masyarakat		Persentase Balita Gizi Buruk	%	1,15	1,14	1,13	1,12	1,1	1,09	1,09	Dinas Kesehatan
		Prevelansi Balita Gizi Kurang	%	18,8	18	17,2	15,4	14,6	13,8	13,8	Dinas Kesehatan

Tujuan, Sasaran	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Indikator Kinerja/SDG's	Satuan	Target Sasaran Kinerja							PD
				Kondisi Awal	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4. Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup **(SDG's 3.1.1.*)**	AKI	140,78	120	100	90	80	70	<70	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	85,3	88	88	90	93	95	>95	Dinas Kesehatan
2.5. Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemik		Cakupan Penemuan dan Penangan Penderita Penyakit TBC BTA	%	75	75	75	75	75	75	75	Dinas Kesehatan
		Cakupan Penemuan dan Penangan Penderita Penyakit TBC (semua Kasus TBC)	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
		Tingkat Prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	%	90,73	90	88,5	88	75,5	75	75	Dinas Kesehatan
		Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis	%	2,97	2,5	2,2	1,8	1,6	1,3	1	Dinas Kesehatan
		Proporsi Jumlah Kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dalam DOTS	%	75	75	75	75	75	75	75	Dinas Kesehatan
		Proporsi Kasus Tuberkolosis yang diobati dan sembuh dengan program DOTS	%	90	91	92	93	94	95	95	Dinas Kesehatan
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	0	90	90	90	90	90	>90	Dinas Kesehatan
		Penderita Diare yang ditangani	%	62,9	80	85	90	95	100	100	Dinas Kesehatan
		Angka Kejadian Malaria **(SDG's 3.3.3*)**	per 100.000 PendudUk	10.56	<5	<4	3	<2	<1	<1	Dinas Kesehatan
		Tingkat Kematian Akibat Malaria	%	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
		Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi **(SDG's .3.3.1.(a))**	%	0,028	0,027	0,026	0,025	0,024	0,023	0,023	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup **(SDG's 3.2.2.*)**		7,04	7,0	6,5	6	5,5	<5	<5	Dinas Kesehatan
2.6. Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan		Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	17	17	16	15	13,47	12,68	12,68	DisPera-Pertanahan
Tujuan 3 : Optimalisasi peran pemuda dalam pembangunan daerah											
3.1. Berkembangnya kegiatan kepemudaan		Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	6,62	13,25	19,87	26,49	33,11	39,74	39,74	Dinas PKO
3.2. Meningkatnya prestasi pemuda di bidang seni, budaya dan olah raga		Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	5	8	10	13	15	17	17	Dinas PKO
		Jumlah Prestasi Olahraga	Cab. Olaraga	2	3	4	5	6	6	6	Dinas PKO
		Jumlah Organisasi di Bidang Seni dan Budaya	Organisasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas BudaPar
3.3. Berkembangnya kewirausahaan para pemuda		Persentase Wirausaha Muda	%	0	0	0,3	2,25	3,25	4,25	4,25	Dinas PKO

Tujuan, Sasaran	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Indikator Kinerja/SDG's	Satuan	Target Sasaran Kinerja							PD
				Kondisi Awal	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 4 : Optimalisasi partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah											
4.1. Berkembangnya lembaga dan organisasi perempuan		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	7	8,2	9,1	9,7	10,2	11,50	11,50	Dinas P2KBP3A
		Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	1,7	1,9	2,4	2,8	3,40	3,70	3,70	Dinas P2KBP3A
4.2. Meningkatnya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan		Rasio KDRT	%	90	80	75	70	65	60	60	Dinas P2KBP3A
		Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	45	47	49	51	55	58	61	Dinas P2KBP3A
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	59	60,01	61,03	62,04	63,02	63,70	63,70	Dinas P2KBP3A
4.3. Terwujudnya keluarga yang sejahtera		Rata-rata Jumlah Kelompok Kelompok Binaaan PKK		0.74	0.76	0.78	0.81	0.84	0.86	0.89	Dinsos-PMD
		Presentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinsos-PMD
Tujuan 5 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat											
5.1. Terciptanya rasa aman		Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	28,16	9,39	7,51	5,63	3,76	1,88	1,13	Badan Kesbangpol
5.2. Terciptanya ketertiban		Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LinMas) - (%)	%	90	93	94	96	98	100	100	Sat-POL PP
5.3. Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan bertanggung jawab		Persentase Penegakan PERDA	%	90.7	81.97	83.92	87.38	90.36	100	100	Sat-POL PP
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	%	95.51	96.15	97	97.59	100	100	100	Sat-POL PP
Misi 2 : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur, Transportasi, Air Bersih, Energi, Komunikasi dan Penataan Kota											
Tujuan 6 : Meningkatkan infrastruktur dasar strategis, transportasi dan komunikasi	**TUJUAN 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.**										
6.1. Terbangunnya jalan – jalan strategis yang menunjang ekonomi		Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)	%	15.42	17.33	20.8	26	30.33	38.47	38.47	Dinas PUPR-Perhubungan
6.2. Terbangunnya aksebilitas jalan yang menjangkau perdesaan		Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik **(SDG's 9.1.1.(a)**	Km	0,13	0,15	0,18	0,23	0,27	0,34	0,34	Dinas PUPR-Perhubungan
6.3. Tersedianya prasarana dan sarana air bersih	**Tujuan.1. Mengakhiri Kemiskinan dalam segala Bentuk dimanapun**	Persentase Penduduk Berakses Air Minum **(SDG's 1.4.1.(d)**)	%	61.08	64.18	80.56	91.49	97.11	100	100	Dinas PUPR-Perhubungan
	TUJUAN 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan **(SDG's 6.1.1.(a))**	%	37.36	39.26	43.66	47.52	51.88	55.54	55.54	Dinas PUPR-Perhubungan
6.4. Tersedianya prasarana dan sarana irigasi		Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	1	1	4	7	15	15	15	Dinas PUPR-Perhubungan

Tujuan, Sasaran		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Indikator Kinerja/SDG's	Satuan	Target Sasaran Kinerja							PD
					Kondisi Awal	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Kondisi Akhir	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.5.	Tersedianya prasarana dan sarana listrik	**TUJUAN 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.**	Rasio Elektrifikasi **(SDG's 7.1.1.*)**	%	74.16	78.8	84.5	89.5	95	100	100	Setda
6.6.	Terbangunnya jaringan transportasi darat, laut dan udara	**TUJUAN 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.**	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis **(SDG's 9.1.2.(a), 9.1.2.(b) , 9.1.2.(c))**		7	8	8	8	8	8	47	Dinas PUPR-Perhubungan
6.7.	Terbangunnya jaringan telekomunikasi dan informasi		Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	4,27	5,06	5,85	16,11	16,90	17,69	17,69	Dinas Kominfo
			Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon **(SDG's 9.c.1.(a))**	%	51,74	58,00	61,50	62,67	65	73,60	73,60	Dinas Kominfo
			Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet **(SDG's 9.c.1.(b)**	%	1,36	1,58	1,81	2,26	2,93	3,38	3,38	Dinas Kominfo
Tujuan 7 : Meningkatkan mutu lingkungan perumahan dan permukiman												
7.1.	Terbangunnya prasarana dan sarana perumahan sesuai standar minimum	**TUJUAN 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.**	Rasio Rumah Layak Huni		0,14	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,18	DisPera-Pertanahan
			Rasio Pemukiman Layak Huni		0,40	0,42	0,43	0,47	0,5	0,51	0,51	DisPera-Pertanahan
			Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	30	32	35	38	42	45	45	DisPera-Pertanahan
		TUJUAN 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	Persentase rumah tinggal bersanitasi **(SDG's 6.2.1.(b)**	%	85	85	85	86	86	87	87	DisPera-Pertanahan
7.2.	Berkurangnya lingkungan permukiman kumuh		Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	17	17	16	15	13.47	12.68	12.68	DisPera-Pertanahan
Tujuan 8 : Mewujudkan Ibukota Kabupaten Lembata yang humanis												
8.1.	Meningkatnya standar dan mutu prasarana dan sarana perkotaan	**TUJUAN 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.**	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	21	22	23	23	24	24	24	Dinas PUPR-Perhubungan
			Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	30	32	35	38	42	45	45	DisPera-Pertanahan
			Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan. **(SDG's 15.1.1.)**	Ha	50,723.27	50,723.27	50,723.27	50,723.27	50,723.27	50,723.27	50,723.27	DLH/Kehutanan

Tujuan, Sasaran	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Indikator Kinerja/SDG's	Satuan	Target Sasaran Kinerja							PD
				Kondisi Awal	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan **SDG's 15.1.1.(a)**	%	96.48	96.48	96.48	96.48	96.48	96.48	96.48	DLH/Kehutanan
Tujuan 9 : Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan											
9.1. Terjaganya fungsi lingkungan		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air		0,86	0,88	0,93	0,93	0,95	0,96	0,96	DLH
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan		0,26	-	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	DLH
		Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	%	35.22	30.22	25.22	20.22	15.22	10.22	10.22	DLH
9.2. Berkembangnya kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan		Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	30	33	36	39	42	45	45	DLH
		Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	%	75		75	75	75	75	100	DLH
9.3. Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi bencana serta pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	**TUJUAN 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.**	Jumlah Desa/Kota Tangguh Bencana yang Dibentuk **(SDG's) 11.5.1.(b)**	Desa	25	5	5	10	10	5	60	BPBD
		Jumlah Pelayanan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan	76	15	15	20	20	15	161	BPBD
		Persentase sampah perkotaan yang tertangani. **SDG's 11.6.1.(a)**	%	36	31	26	21	16	11	11	DLH
	TUJUAN 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. **(SDG's 13.1.1.*)**	Dok	-	1	1	1	1	1	1	BPBD
9.4. Meningkatnya Ketersediaan Air		Ratio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB		0,00047	0,000938	0,00140	0,00187	0,00234	0,0028	0,0028	DLH
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	21	22	23	23	24	24	24	Dinas PUPR-Perhubungan
Tujuan 10 : Mengoptimalkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah dan pertanahan											
10.1. Terwujudnya keserasian pemanfaatan ruang wilayah		Ketaatan terhadap RTRW	%	99.59	99.59	99.99	99.98	100	100	100	Dinas PUPR-Perhubungan
10.2. Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah		Persentase Luas Tanah Bersertifikat	%	55	55	55	56	56	56	56	DisPera-Pertanahan
		Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	70	47	50	40	40	33	33	DisPera-Pertanahan

Tujuan, Sasaran	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Indikator Kinerja/SDG's	Satuan	Target Sasaran Kinerja							PD
				Kondisi Awal	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Misi 3 : Mempercepat Pembangunan dan Mengembangkan Sumber Daya Ekonomi Laut dan Maritim, serta Ekonomi Kreatif Berbasis Industri dan Pariwisata Berkelanjutan											
Tujuan 11 : Mengembangkan Industrialisasi Pengelolaan Perikanan, Sumber Daya Laut dan Kemaritiman	**TUJUAN 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.**										
11.1. Tersedianya kawasan pengelolaan perikanan, sumber daya laut dan kemaritiman		Jumlah kawasan sumber daya pesisir **(SDG's 14.5.1.*)**	Kawasan	3	3	3	3	4	4	17	Dinas Perikanan
11.2. Meningkatnya hasil produksi perikanan dan sumber daya laut		Produksi Perikanan (Perikanan Tangkap)	Ton	7,352	7,500	8,000	9,000	9,200	10,300	10,420	Dinas Perikanan
		Produksi Perikanan (Perikanan Budidaya)	Ton	2,856	3,504	4,008	4,510	5,015	6,518	7,020	Dinas Perikanan
		Rumput Laut	Ton	2,854	3,500	4,000	4,500	5,000	6,500	7,000	Dinas Perikanan
		Produksi Garam	Ton	81	81	243	486	729	972	972	Dinas Koperindag
		PAD Indsutri (Garam)	Rp.	55,000,000	57,105,000	171,315,000	513,945,000	1,541,835,000	4,625,505,000	4,625,505,000	Dinas Koperindag
11.3. Meningkatnya nilai tambah hasil pengelolaan perikanan, sumber daya laut dan kemaritiman		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PRDB Pertanian		8.42	8.62	8.83	9.05	9.26	9.48	9.48	Dinas Perikanan
11.4. Terbangunnya wisata bahari, koperasi nelayan serta meningkatnya kesejahteraan nelayan		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan & Pemasaran Produk perikanan	Kelompok	30	30	30	30	30	30	150	Dinas Perikanan
		Jumlah Pelaku Usaha Wisata Bahari	Pelaku	2	2	3	4	5	6	22	Dinas Perikanan-Dinas Budpar
		Jumlah Koperasi Nelayan	Koperasi	1	1	2	2	1	1	1	Dinas Perikanan
11.5. Meningkatnya produksi maritim		Jumlah Sarana Budidaya yang tersedia (unit)		5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Dinas Perikanan
		Jumlah infrastruktur Perikanan Sumber Daya Laut dan Kemaritiman yang dibangun		2 CS,2 IS,1 pabrik es, 1 PPI, 2 TPI,1 SPDN	2 CS,2 IS,1 pabrik es, 1 PPI, 2 TPI,1 SPDN	2 CS,2 IS,1 pabrik es, 1 PPI, 2 TPI,1 SPDN	2 CS,2 IS,1 pabrik es, 1 PPI, 2 TPI,1 SPDN	2 CS,2 IS,1 pabrik es, 1 PPI, 2 TPI,1 SPDN	2 CS,2 IS,1 pabrik es, 1 PPI, 2 TPI,1 SPDN	2 CS,2 IS,1 pabrik es, 1 PPI, 2 TPI,1 SPDN	Dinas Perikanan
		Jumlah SPDN			1	1	1	1	1	1	
		Jumlah Sarana Pabrik Es		1	1	1	1	1	1	1	
		Jumlah Sarana TPI		1	1	1	1	1	1	1	
Tujuan 12 : Mengembangkan Ekonomi Kreatif Berbasis Industri dan Pariwisata yang Berkelanjutan											
12.1. Berkembangnya usaha produksi ekonomi kreatif		Jumlah UMKM yang terfasilitasi, Jumlah wirausaha baru		50 orang (2 kelompok)	50 orang (2 kelompok)	30 UMKM, 90 wirausaha	30 UMKM, 90 wirausaha	30 UMKM, 90 wirausaha	30 UMKM, 90 wirausaha	450 orang (Gerakan usahawan baru)	Dinas Koperindag

Tujuan, Sasaran		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Indikator Kinerja/SDG's	Satuan	Target Sasaran Kinerja							PD
					Kondisi Awal	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Kondisi Akhir	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Misi 4 : Mempercepat Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan serta Meningkatkan Pasar dan Promosi Daerah Tujuan Wisata												
Tujuan 13 : Mengembangkan pariwisata daerah yang unggul dan berdaya saing		**TUJUAN 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.**										
13.1.	Meningkatnya pasar dan promosi pariwisata		destinasi wisata yang potensial	Destinasi/ Daya Tarik Wisata	12	12/10	12/10	22/6	28/6	34/6	40	Dinas Budpar
			Jumlah Even/Festival	Paket	1 Festival luar daerah (Festival Lamaholot)	Rally Wisata Bahari-Lembata #Truly Heaven-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 (Tiga) Gunung (Blue Mountain Tours),	Rally Wisata Bahari-Lembata #Truly Heaven-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 (Tiga) Gunung (Blue Mountain Tours),	Rally Wisata Bahari-Lembata #Truly Heaven-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 (Tiga) Gunung (Blue Mountain Tours),	Rally Wisata Bahari-Lembata #Truly Heaven-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 (Tiga) Gunung (Blue Mountain Tours),	Rally Wisata Bahari-Lembata #Truly Heaven-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 (Tiga) Gunung (Blue Mountain Tours),	Rally Wisata Bahari-Lembata #Truly Heaven-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 (Tiga) Gunung (Blue Mountain Tours),	Dinas Budpar
13.2.	Meningkatnya persentase masyarakat dan investor yang aktif dalam mengelola daya tarik wisata		Cakupan Kerjasama/Kemitraan dalam Pengembangan Investasi dan Industrialisasi Pariwisata	%	20	20	20	20	20	20	100	Dinas Budpar
13.3.	Terwujudnya pengembangan, pembangunan dan penataan daerah/daya tarik wisata lainnya yang berpotensi		Jumlah Jety Pariwisata yang dibangun	Jetty	1	1	1	1	1	1	5	Dinas Budpar
			Jumlah DTW potensial yang dibangun dan ditata	Destinasi/ Daya Tarik Wisata	12	12/10	12/10	22/6	28/6	34/6	40 Destinasi	Dinas Budpar
13.4.	Berkembangnya jasa pariwisata		Kunjungan Wisata **(SDG's 8.9.1.(a)**	Orang	6764	7500	10000	11000	12000	12500	53000	Dinas BudPar
			Lama Kunjungan Wisata	Hari	2-3 hari	3-4 hari	4-5 hari	5-6 hari	6-7 hari	7 hari	7 hari	Dinas BudPar
13.5.	Meningkatnya pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat.		PAD Sektor Pariwisata (**SDG's 8.9.1.(c)**	Rp	20,000,000	20,500,000	22,000,000	96,000,000	135,000,000	200,000,000	250,000,000	Dinas BudPar
Misi 5 : Meningkatkan Pendapatan dan Kerja Sama Daerah serta Mengembangkan Ekonomi Wilayah dan Pembangunan Perdesaan Berbasis Industri Berkelanjutan												
Tujuan 14 : Meningkatkan kesejahteraan petani, pekebun dan peternak												
14.1.	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan hasil pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan dan peternakan		Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar									
			~ Padi	%	1.65	1.69	1.72	1.75	1.79	1.82	1.82	Distan-KP
			~ Jagung	%	2	2.04	2.08	2.12	2.16	2.21	2.21	Distan-KP

Tujuan, Sasaran	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Indikator Kinerja/SDG's	Satuan	Target Sasaran Kinerja							PD
				Kondisi Awal	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		~ Ubi Kayu	%	14.81	15.11	15.41	15.72	16.03	16.35	16.35	Distan-KP
		~ Kacang Tanah	%	0.99	1.01	1.03	1.05	1.07	1.09	1.09	Distan-KP
		Jagung Industri / Hibrida	Ton	5.000	15.000	19.600	22.400	22.400	24.000	24.000	Distan-KP
		Produksi Bawang	Ton	25	390	487,5	862,5	1147,5	1147,5	1147,5	Distan-KP
		Produksi Cabai	Ton	10	40	60	100	120	140	140	Distan-KP
		Komoditi tanaman hortikultura yang dipasarkan	Komoditi	6	6	6	6	6	6	6	Distan-KP
		Komoditi tanaman perkebunan yang dipasarkan	Komoditi	2	2	2	2	2	2	2	Distan-KP
		Produksi Daging (Unggas)	Kg	13,917	15,308	16,839	18,523	20,375	22,413	22,413	Dinas Peternakan
		Produksi Telur	Kg	2,076	2,284	2,512	2,763	3,039	3,343	3,343	Dinas Peternakan
14.2. Meningkatnya kesejahteraan petani, peternak dan pelaku usaha mikro		Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	34.27	35.3	36	36.72	37.46	38.21	38,21	Distan-KP
Tujuan 15 : Meningkatkan produktifitas pembangunan perdesaan											
15.1. Memperbaiki kualitas belanja pembangunan desa		Rata-Rata Tingkat Penyerapan APBDes	%	100	100	100	100	100	100	100	
15.2. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa		Jumlah BUMDes	Bumdes	52	5	5	5	5	5	77	DinSos-PMD
15.3. Terwujudnya titik-titik pertumbuhan desa melalui klaster-tematik		Jumlah Desa Tematik	Desa	0	9	9	9	9	9	9	DinSos-PMD
Tujuan 16 : Mengembangkan kawasan ekonomi strategis daerah cepat tumbuh											
16.1. Tersedianya master plan wilayah pengembangan kawasan ekonomi strategis koridor ekonomi Rantai Ekonomi #LEMBATA 2.0		Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Dokumen	2	5	5	5	5	5	25	Bappelitbangda
16.2. Terbangunnya prasarana dan sarana kawasan ekonomi strategis daerah		Persentase Infrastruktur Dasar dan Strategis yang tersedia	%	15	17	21	26	30	38	38	Dinas PUPRP
Tujuan 17 : Meningkatkan kerjasama Daerah											
17.1. Terwujudnya kerjasama investasi regional, nasional dan internasional		Jumlah kerjasama daerah	MoU	5	5	5	5	5	5	25	Setda
Tujuan 18 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat											
18.1. Menurunnya kemiskinan	**Tujuan.1. Mengakhiri Kemiskinan dalam segala Bentuk dimanapun**	Tingkat Kemiskinan **(SDG's 1.2.1.*)**	%	25.69	24.93	24.12-24.18	23.23-23.43	22.31-22.68	21.39-21.94	21.39-21.94	Bappelitbangda
18.2. Berkurangnya masalah sosial		Persentase PMKS yang tertangani	%	29.43	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	Dinsos-PMD
18.3. Meningkatnya kesempatan kerja	TUJUAN 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas		0.23	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.29	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
		Tingkat Pengangguran Terbuka **(SDG's 8.5.2.*)**	%	2.86	2.76	2.66	2.54-2.56	2.42-2.45	2.29-2.35	2.29-2.35	Bappelitbangda
18.4. Terwujudnya ketahanan pangan		Ketersediaan Pangan Utama	%	22.65	23	25	27	29	31	33	Distan-KP
		Tingkat Inflasi	%	6	6	5.5	5.5	5	5	5	Bappelitbangda

Tujuan, Sasaran	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Indikator Kinerja/SDG's	Satuan	Target Sasaran Kinerja							PD
				Kondisi Awal	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Misi 6 : Menata dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Berbasis Teknologi Informasi serta Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik											
Tujuan 19 : Menata dan mengembangkan potensi sumber daya manusia ASN berbasis informasi teknologi	**TUJUAN 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.**										
19.1. Terwujudnya revolusi kerja APIIKKK (Aspiratif, Produktif, Inovatif, Integratif, Konkrit, Kontributif dan Kompetitif) sebagai *human capital* management melalui pengembangan potensi ASN berbasis informasi teknologi		Cakupan Layanan *E-Government*	%	20	20	20	20	20	20	100	Dinas Kominfo
19.2. Terciptanya kapasitas SDM ASN yang APIIKKK		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	2.06	2.3	2.59	2.7	3	3.50	3.55	BKD-PSDM
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	18.67	19.08	21.49	23.97	26.45	28.93	28.93	BKD-PSDM
19.3. Meningkatnya kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)		Persentase APIP yang memiliki Kompetensi	%	20	20	20	20	20	20	100	Inspektorat
		Persentase Temuan BPK	%	2	3	2	1	0.5	0	0	Inspektorat
Tujuan 20 : Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah											
20.1. Terwujudnya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) **(SDG's 16.6.1.(b)**		48,46	50	65	70	75	80	80	Setda
20.2. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan **(SDG's 16.6.1.(a))**		WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKD
		Persentase SILPA (%)	%	0.12	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	BKD
		Penetapan APBD (Sebelum 31 Desember Tahun Sebelumnya)		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BKD
20.3. Terwujudnya sistem informasi pemerintahan yang transparan		Ketersediaan Dokumen Perencanaan Daerah		3	3	3	3	3	3	15	Bappelitbangda
		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	%	108.51	100	100	100	100	100	100	Bappelitbangda
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (%)	%	77.44	93.25	100	100	100	100	100	Bappelitbangda
Tujuan 21 : Meningkatkan kinerja pelayanan publik											
21.1. Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu dan adil		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		2.722	2.822	2.872	2.922	2.972	3.022	3.022	Setda

Tujuan, Sasaran	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Indikator Kinerja/SDG's	Satuan	Target Sasaran Kinerja							PD
				Kondisi Awal	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.2. Terwujudnya kemudahan pelayanan pihak ketiga (#kios bayar) untuk percepatan realisasi penyerapan anggaran pembangunan daerah		Jumlah Kios Bayar		1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR
21.2. Terwujudnya pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat		76.1	78.5	80	82.5	84	85	85	Setda
Tujuan 22 : Mengembangkan tata kelola politik dan pemerintahan yang demokratis											
22.1. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas proses politik dan pemerintahan		Tersusun dan Terintegrasinya Program-progra kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Setwan
		Terintergrasi Program-Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Setwan

Bab 6

Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah

Strategi disusun sebagai jalan atau cara untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada bab 5, sedangkan arah kebijakan menguraikan secara detail arah jalan atau cara dimaksud pada setiap tahun dalam periode 2017 – 2022. Strategi dan arah kebijakan ini menjelaskan bagaimana mewujudkan visi, misi dan tujuan melalui pencapaian sasaran. Mengacu pada strategi dan arah kebijakan bagian ini disusun sebagai jantung dari formula perencanaan pembangunan daerah secara garis besar.



Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MEWUJUDKAN MISI

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Lembata 5 (lima) tahun mendatang, maka pemerintah daerah melaksanakan 6 (enam) misi yang ditempuh melalui strategi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Kabupaten Lembata. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2017-2022, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Beberapa sasaran bersifat melekat dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran. Penentuan alternative strategi pencapaian dari setiap indicator sasaran atau kumpulan sasaran yang bersifat *inherent* adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threats)*. Hal dasar yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal serta analisis SWOT dapat dilihal pada tabel sebagai berikut :

Tabel.6.1
Indentifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT

INTERNAL	
Strength (KEKUATAN)	**Weakness (Kelemahan)**
1. **Mempunya visi misi Kepala Daerah yang jelas dan komitmen yang visioner;** 2. **Sistem tata pemerintahan yang semakin baik;** 3. **Kabupaten Lembata merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam maritim yang sangat besar, khususnya kelautan dan perikanan;** 4. **Kabupaten Lembata memiliki wilayah laut yang sangat potensial bagi perolehan devisa, khususnya dari komoditi perikanan dan pengolahan hasil perikanan;** 5. **Kabupaten Lembata memiliki kawasan pesisir yang menyimpan potensi bagi pengembangan ekonomi wilayah;** 6. **Kabupaten Lembata memiliki potensi wisata bahari yang cukup kaya dan beragam;** 7. **Kabupaten Lembata merupakan kabupaten yang baru terbentuk selama 17 tahun sehingga penuh harapan dan dinamika untuk meraih kemajuan** 8. **Kabupaten Lembata memiliki modal sosial dan budaya yang sangat kuat sehingga menjadi perekat dan pemersatu masyarakat dalam memajukan Kabupaten Lembata;** 9. **Kabupaten Lembata memiliki budaya lokal yang unik.**	1. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah sehingga akan berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, dan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2. Belum meratanya infrastruktur dasar antara lain prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan; prasarana dan sarana air bersih, pembangkit dan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan informasi; 3. Belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu terutama bagi masyarakat desa; 4. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan di desa dan kecamatan yang disebabkan oleh belum tertatanya kelembagaan secara memadai, terbatasnya prasarana dan sarana pemerintahan, serta terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya aparatur; 5. Belum berkembangnya industri hilir yang mampu mengolah sumber daya alam, khususnya perikanan menjadi komoditas yang memiliki nilai tambah; 6. Belum siapnya masyarakat menghadapi pergeseran budaya dan perkembangan teknologi informasi yang cepat sehingga membawa dampak terjadinya kekagetan budaya (*culture shock*) dan memudarnya nilai-nilai budaya masyarakat Lembata; 7. Belum berkembangnya kelembagaan BUMD, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah; 8. Masih terbatasnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam terutama pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan sebagai akibat terbatasnya modal, sarana dan prasarana pendukung;

INTERNAL	
Strength (KEKUATAN)	**Weakness (Kelemahan)**
	9. Belum tertatanya infrastruktur perekonomian (jaringan jalan, transportasi, pembangkit dan jaringan listrik, dan air baku) yang menghambat pengembangan usaha. 10. Terbatasnya kapasitas birokrasi dan aparatur daerah akan menghambat upaya peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan publik, dan percepatan pembangunan daerah; 11. Belum optimalnya penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Lembata akan menghambat pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan; 12. Belum tertatanya manajemen kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah akan menyebabkan pengelolaan sumber daya daerah menjadi kurang efisien dan efektif ; 13. Belum adanya manajemen pengembangan desa dan kecamatan yang terpadu dan terukur akan menghambat kemajuan pembangunan daerah;dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat; 14. Belum optimalnya kerjasama pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan pertanian, perkebunan, industri pengolahan dan parwisata di Kabupaten Lembata akan menyebabkan kurangnya daya tarik dan daya saing daerah;

EKSTERNAL

Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
1. **Perluasan jaringan transportasi akan meningkatkan mobilitas penduduk dan barang dari dan ke Kabupaten Lembata;** 2. **Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong perbaikan manajemen;** 3. **Perluasan jaringan dan kerjasama internasional baik Masyarakat Ekonomi ASEAN,kerjasama APEC dan kerjasama internasional lainnya akan mendorong perubahan nilai, etos kerja dan budaya kerja yang lebih produktif, efisien dan efektif bagi masyarakat, pelaku usaha dan aparat Pemerintah Kabupaten Lembata; dan pembangunan daerah Kabupaten Lembata;** 4. **Perluasan jaringan dan kerjasama investasi, perdagangan dan pariwisata nasional dan internasional berbasis teknologi informasi akan dapat menciptakan peluang yang lebih besar bagi pengembangan pertanian, perikanan, perkebunan, industri pengolahan dan pariwisata Kabupaten Lembata baik wisata alam, wisata religi, wisata budaya, dan wisata kuliner; perluasan kesempatan kerja; peningkatan pendapatan; dan perluasan jaringan sosial budaya masyarakat.** 5. **Perluasan pasar regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan investasi dan produksi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata dan perdagangan dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Lembata;** 6. **Demokratisasi yang ditandai oleh perubahan tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan mengutamakan apsirasi dan partisipasi rakyat memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Lembata untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan;**	1. Peningkatan investasi dan percepatan pembangunan Kabupaten Lembata akan mendorong pemanfaatan lahan dan wilayah secara berlebihan yang berdampak negatif bagi kerusakan lingkungan dan menghambat kesinambungan pembangunan; 2. Perdagangan yang terus meningkat akan mendorong arus masuk barang dari luar baik dari kabupaten/kota lain maupun dari negara lain secara lebih cepat dan lebih banyak dan selanjutnya akan mendominasi pasar lokal di Kabupaten Lembata yang berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan para pelaku usaha di Kabupaten Lembata; 3. Krisis pangan, krisis ekonomi, krisis energi dan menurunnya harga komoditas perkebunan dan pertambangan yang berasal dari gejolak pasar internasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, meningkatkan angka krmiminalitas, dan menurunnya pendapatan daerah Kabupaten Lembata; 4. Demokratisasi memerlukan proses pendidikan politik yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Ketidaksiapan dalam melaksanakan demokrasi kemungkinan membawa perubahan yang tidak diharapkan bagi rakyat Kabupaten Lembata, 5. Berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah seringkali tidak konsisten dan kurang sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Lembata; 6. Lemahnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan dan penganggaran menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah; kurang efektifnya pelayanan publik; serta kurang optimalnya pengembangan ekonomi;

EKSTERNAL

Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
7. **Dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dan sumber daya yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan;** 8. **Kekayaan dan beragam potensi wisata**	7. Meningkatnya kesenjangan antara Kabupaten Lembata dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong migrasi penduduk dari kabupaten lain ke Kabupaten Lembata sehingga menyebabkan meningkatnya beban penyediaan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman; pendidikan dan kesehatan; dan tempat usaha. 8. Adanya kebutuhan untuk peningkatan pelayanan pebulik berbasis informasi dan teknologi.

Identifikasi faktor-faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Kabupaten Lembata. Semakin banyak dan tajam hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang dipisahkan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman maka semakin membantu proses perumusan strategi pembangunan yang benar-benar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan.

Penggunaan metode SWOT dalam penetapan strategi lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan. Atas dasar itu, maka dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut:

Tabel.6.2
Analisis SWOT dalam Penetapan Strategi Pembangunan Daerah

STRATEGI S-O	**STRATEGI W-O**
Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui Pelembagaan Inovasi dan Menata serta Mengembangkan SDM Aparatur Sipil Negara untuk Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik;	Membangun generasi Lembata yang handal melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Serta Optimalisasi Peran Perempuan dan Pemuda;
Mengembangkan ekonomi lokal yang inklusif dan industri melalui Peningkatan pendapatan dan kerja sama daerah serta mengembangkan ekonomi wilayah dan pembangunan perdesaan berbasis industri berkelanjutan; **Mempercepat pembangunan dan pengembangan sumber daya ekonomi laut dan maritim, serta ekonomi kreatif berbasis industri dan Pembangunan serta Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan peningkatan Pasar dan Promosi Daerah Tujuan Wisata;**	Akselerasi pembangunan infrastruktur strategis penunjang perekonomian melalui kemitraan (*partnership*) pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pengembangan ekonomi wilayah serta pembangunan perdesaan.
STRATEGI S-T	**STRATEGI W-T**
Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi yang berorientasi pada perbaikan kinerja;	Mengurangi Disparitas social maupun spasial yang berorientasi pada *pro-job, pro-growth, pro-equity, pro-environment* melalui penguatan interkonektivitas spasial; Pengarusutamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah;

Strategi S-O ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, daerah memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi yang harus diterapkan adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategi*). Strategi ini memberikan penekanan pada metode pemerintah daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Kekuatan dominan yang dimiliki oleh Kabupaten Lembata adalah adanya visi misi membangun yang jelas dan visioner serta kondisi eksisting birokrasi yang semakin baik dan solid. Hal ini yang menjadi kekuatan untuk melakukan inovasi dalam pembangunan serta pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah dalam segala aktivitas pemerintahan untuk mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Sementara peluang paling besar yang dimiliki oleh Kabupaten Lembata adalah kekayaan dan potensi sumber daya maritim dan pertanian serta wisata daerah yang sangat beragam. Oleh sebab itu strategi pokok yang di tetapkan adalah: **Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui Pelembagaan Inovasi dan Menata serta Mengembangkan SDM**

Aparatur Sipil Negara untuk Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik; dan **Mengembangkan ekonomi lokal yang inklusif dan industri melalui Peningkatan pendapatan dan kerja sama daerah serta mengembangkan ekonomi wilayah dan pembangunan perdesaan berbasis industri berkelanjutan**; Serta **Mempercepat pembangunan dan pengembangan sumber daya ekonomi laut dan maritim, serta ekonomi kreatif berbasis industri dan Pembangunan serta Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan peningkatan Pasar dan Promosi Daerah Tujuan Wisata**.

Institusionalisasi Inovasi diarahkan pada seluruh pelaku pembangunan untuk melakukan inovasi, baik pemerintah, swasta dan masyarakat guna mencapai target percepatan pembangunan Kabupaten Lembata. Pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam mendorong Inovasi swasta dan masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dsb). Secara internal, nilai inovasi ditanamkan dalam setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Penataan ASN untuk peningkatan pelayanan publik.

Hal ini mengingat penataan ASN merupakan prasyarat utama tata kelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel. Penataan Aparatur Sipil Negara merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial. Hal merupakan penerjemahan dari tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mempertangungjawabkan hasil-hasil (*outcome*) pembangunan daerah. Agresifitas strategi ini terletak pada Perangkat Daerah memberikan sentuhan inovasi pada setiap aktivitas pembangunan. Pengembangan potensi ekonomi yang inklusif dan berorientasi industri melalui cincin ekonomi, yaitu cincin ekonomi : pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, keuangan mikro, industri dan pemberdayaan ekonomi umat basis, yang tersebar di semua program dan kegiatan. Dengan memperhatikan potensi kekayaan daerah pesisir pantai dan sumberdaya laut yang melimpah seperti sumberdaya perikanan, rumput laut, garam, transportasi laut, dan pariwisata bahari serta letak geografis-geoekonomi Kabupaten Lembata dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus ALTAKA dan dalam upaya untuk mewujudkan Lembata sebagai simpul poros maritim nusantara/simpul klaster ekonomi maritim, maka sangat perlu meletakkan laut sebagai sektor strategis penyumbang produktivitas ekonomi laut menjadi keunggulan kompetitif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk peningkatan pendapatan daerah. Karenanya, pembangunan berbasis kelautan dan kemaritiman harus dioptimalkan. Perlu juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata melalui inovasi dan kreativitas dengan meningkatkan pasar serta mempromosikan daerah tujuan wisata dan obyek wisata sehingga dapat menjadi destinasi. Karena itu pemerintah daerah fokus membangun kemudahan akses jalan, transportasi serta fasilitas pendukung, pengembangan, pembangunan dan penataan daerah tujuan wisata, kegiatan peningkatan pasar dan promosi serta optimalisasi obyek wisata yang memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan. Peningkatan pasar dan promosi dilakukan melalui *Rally* Wisata Bahari – Lembata *#Truly Heaven* – Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 Gunung (*Blue Mountains Tours*) sebagai upaya mengangkat citra wisata Kabupaten Lembata dengan berbagai aktivitas yang beragam yang unik dan menarik antara lain : Lembata *International Heritage Walk* (Lamanunang-Lusilame-Kampung Lama Ile Lewotolok, dll), Lembata *Trail Family Fun Running Race*, Festival Payung Nusantara, Festival Para Layang International, Pesta Kacang Ile Ape, Lamalera *Whale Catching Adventure*, *Visite To Barter And Night Market*, *Exsibhition Volcano Foot Ball, Expo* dan Festival Inovasi Pemuda (Lembata *Youth Music And Film Festival*), *Extreme Sport Tourism* (Lomba Dayung Lawan Arus Air Laut), Festival Literasi #Saya Baca, *Travel Fishing*, Nuhanera *dive,* Festival Lamaholot, *Expo* Uyelewun Raya, NTT *Fashion Carnaval*, Lembata International *Documentary Film Festival, Travel Village,* Gala Desa.

Sedangkan Peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif, serta memacu investasi dan kerjasama daerah, peningkatan daya saing yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Pemerintah daerah juga fokus pada pemberdayaan

ekonomi rakyat, berbasis potensi unggulan sumberdaya alam yang berorientasi pada ketahanan pangan, dalam skema pengembangan ekonomi wilayah untuk menjadikan Lembata sebagai kabupaten industri secara berkelanjutan dan pusat produksi bagi daerah sekitarnya dengan menetapkan koridor ekonomi dalam pengembangan wilayah/kawasan ekonomi strategis cepat tumbuh terintegrasi dan mendorong pembangunan perdesaan, dalam skala pertumbuhan ekonomi desa melalui model klaster-tematik dalam kebijakan Rantai Ekonomi #Lembata 2.0.

Pengembangan ekonomi yang inklusif disamping menaikan indeks kesejahteraan rakyat, dimaksudkan juga pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya akibat perubahan kondisi ekonomi makro, namun juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat (sektor riil) khususnya pada sektor perikanan dan kelautan, pariwisata serta pertanian. Ketiga sektor ini didesain menjadi *"leading sector"* Investasi pemerintah dan swasta di Lembata, peningkatan surplus perdagangan daerah, serta pembangunan infrastruktur merupakan pilar meningkatkan makro ekonomi Lembata. Namun demikian, upaya ini dapat melebarkan kesenjangan kepada masyarakat menengah kebawah yang mengandalkan unit usaha ditingkat mikro, kecil dan menengah yang notabene masyarakat sebagai pelaku ekonomi sesungguhnya. Oleh karenanya perlu afirmasi yang seimbang kepada seluruh pelaku ekonomi. UMKM didesain sebagai sabuk pengaman perekonomian arus bawah, untuk menjadi pilar pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Menciptakan *integrated farming* dalam wadah ekonomi kreatif, yang mempu mengintegrasikan pertanian-pariwisata-UMKM. Termasuk didalamnya pengembangan wirausaha baru, standarisasi, sertifikasi, pengendalian, pengawasan produk dan peningkatan akses permodalan, merupakan bentuk nyata dari strategi ini.

Strategi ini mendapat bentuknya diantaranya melalui gerakan #Ibu Ekonomi yang adalah model pemberdayaan pemerintah Kabupaten Lembata, dalam cincin pemberdayaan ekonomi umat basis dan cincin keuangan mikro (*capacity building*), khusus bagi ibu kepala rumah tangga miskin atau kelompok perempuan miskin melalui pendampingan, pendidikan dan pelatihan (*investing in people*), kemudahan akses terhadap jaringan permodalan dan pemasaran (*investing in network*) dan terorganisir melalui kelompok ibu-ibu (*investing in organisations).*

Investing in people, atau pemberian bimbingan dan pelatihan bagi kelompok atau komunitas para ibu melalui program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dan program peningkatan peran perempuan di perdesaan.

Investing in network, adalah akses terhadap jaringan permodalan bagi komunitas para ibu melalui perbankan dan koperasi, termasuk juga akses terhadap jaringan pemasaran produk yang dihasilkan. Pemerintah daerah melakukan perjanjian kerjasama dengan perbankan dan koperasi yang ada di daerah melalui program kerjasama pembangunan dan akses terhadap jaringan pemasaran melalui program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.

Investing in organisation, adalah pengelompokkan para ibu dalam komunitas basis misalnya komunitas Santa Ana, Majelis Taklim, dan komunitas lainnya yang difasilitasi oleh pemerintah melalui program pengembangan potensi komunitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah perempuan

Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Lembata untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai *mobilization strategy*, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada pemerintah di dorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki.

Berdasarkan identifikasi faktor diatas, Kabupaten Lembata masih memiliki banyak tantangan/ancaman pembangunan. Sementara kekuatan utamanya hanya terletak pada komitmen pelaksanaan sistem pemerintahan yang inovatif. Pada Kondisi dibutuhkan strategi yang mampu merespon kebutuhan pembangunan secara cepat dan tepat, yang berorientasi pada kinerja hasil pembangunan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Sehingga strategi yang dibutuhkan adalah **Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi yang berorientasi pada perbaikan kinerja;**

Hal ini mengingat bahwa keberhasilan pembangunan ditentukan oleh 2 hal yaitu perencanaan yang akurat dan pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat sebagaimana perencanaan yang telah disusun. Data dan informasi yang valid merupakan basis penyusunan rencana pembangunan yang akurat, serta menjadi *early warning* untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan pembangunan daerah yang sedang dijalankan senantiasa tepat sebagaimana perencanaan yang telah disusun.

Kompleksitas penyelenggaran system pemerintahan saat ini, dapat disederhanakan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. TI merupakan instrument penting dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pengendalian dan pengawasan harus mampu menyediakan informasi yang *real-time* (cepat, akurat dan bisa diakes kapanpun dibutuhkan) yang mampu memberikan gambaran hasil dan dampak pembangunan secara nyata.

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Pemerintah daerah menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat *investment* dan yang bersifat *divestment*. Bersifat investasi sebab, strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika pemerintah telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki.

Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Kabupaten Lembata bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih bisa *competitive* atau memiliki daya saing. Sehingga strategi yang dibutuhkan adalah Membangun generasi Lembata yang handal melalui **Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Serta Optimalisasi Peran Perempuan dan Pemuda**; dan **Akselerasi pembangunan infrastruktur strategis penunjang perekonomian melalui kemitraan (*partnership*) pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pengembangan ekonomi wilayah serta pembangunan perdesaan**.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan yang berkualitas yang berorientasi pada pendidikan fokasi, peningkatan kualitas guru dan pendekatan pelayanan pendidikan masyarakat; peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan yang bermutu, dan pendekatan pelayanan kesehatan melalui klinik primer desa berbasis masyarakat dengan gerakan good pagi; pembangunan sarana prasarana olahraga, aktivitas dan kegiatan olah raga serta pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan festival inovasi pemuda lembata (lembata innovation youth festival) untuk turut serta dalam pembangunan daerah di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan daerah. kegiatan percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur strategis daerah dan aksesibilitas pada pusat-pusat produksi-obyek wisata dan pada daerah tujuan wisata untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, menyediakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar berupa jalan, air dan listrik serta perluasan jaringan komunikasi dan wifi gratis untuk mendukung kabupaten literasi, menata kota Lewoleba sebagai kota humanis dan tematik.

Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat defensive atau strategi untuk *survive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam analisis lingkungan diatas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai *demage control*, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki. Strategi yang ditetapkan dalam kondisi ini diantaranya **Pengarustamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah**; dan **Mengurangi *Disparitas social* maupun spasial yang berorientasi pada *pro-job, pro-growth, pro-equity, pro-environment* melalui penguatan *interkonektivitas spasial.*** Melakukan rekayasa sosial (*social engineering*)

dan pengarusutamaan budaya dengan membentuk kelompok-kelompok penggerak sosial berbasis pemberdayaan yang mampu mempertahankan nilai lokalitas. Yang diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial, pencegahan pelanggaran hukum dan menjaga kondusifitas pembangunan.

Sedangkan pembangunan yang *pro-job, pro-growth, pro-equity* adalah orentasi pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak hanya sekedar tumbuh, namun pertumbuhannya yang memperhatikan kapasitas partisipasi masyarakat dalam membangun, keadilan antara daerah kota dan daerah terpencil, antara yang miskin dan yang kaya. Serta pembangunan yang berorientasi pada lingkungan (*pro-environment*), agar kelestarian tetap terjaga dan kapasitas daya dukung dan daya tampung pembangunan masih dapat dinikmati anak cucu masyarakat Kabupaten Lembata.

Berdasarkan analisis diatas, ditetapkan tujuh strategi pokok pembangunan daerah Kabupaten Lembata dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut (Strategi dianalogikan dengan **"SP"):**

SP.1. Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui Pelembagaan Inovasi dan Menata serta Mengembangkan SDM Aparatur Sipil Negara untuk Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik;

SP.2. Mengembangkan ekonomi lokal yang inklusif dan industri melalui Peningkatan pendapatan dan kerja sama daerah serta mengembangkan ekonomi wilayah dan pembangunan perdesaan berbasis industri berkelanjutan; dan Mempercepat pembangunan dan pengembangan sumber daya ekonomi laut dan maritim, serta ekonomi kreatif berbasis industri dan Pembangunan serta Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan peningkatan Pasar dan Promosi Daerah Tujuan Wisata;

SP.3. Membangun generasi Lembata yang handal melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Serta Optimalisasi Peran Perempuan dan Pemuda;

SP.4. Akselerasi pembangunan infrastruktur strategis penunjang perekonomian melalui kemitraan (*partnership*) pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pengembangan ekonomi wilayah serta pembangunan perdesaan;

SP.5. Pengarusutamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah

SP.6 Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi yang berorientasi pada perbaikan kinerja

SP.7. Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada *pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment* melalui penguatan interkonektivitas spasial.

Ke-Tujuh Strategi Pokok tersebut akan dijabarkan dalam Strategi Operasional misi sebagaimana tergambar dalam Tabel 6.2. Strategi pokok maupun strategi operasional disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Identifikasi hubungan strategi pokok dan strategi operasional dalam tabel berikut :

Tabel.6.3
Keterkaitan Antara Strategi Pokok dan Strategi Operasional

STRATEGI POKOK	STRATEGI OPERASIONAL	INOVASI
MISI 1 : Meningkatan Kualitas Pendidikan, Meningkatkan Derajat Kesehatan, Mengoptimalisasi Peran Pemuda Dan Perempuan Dalam Pembangunan Daerah Serta Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat		
1. **SP.3. Membangun generasi Lembata yang handal melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Serta Optimalisasi Peran Perempuan dan Pemuda;**	1.1. Meningkatkan Akses dan mutu pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah; 1.2. Mengembangkan pendidikan berstandar nasional; 1.3. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat 1.4. Mengembangkan layanan perpustakaan daerah; 1.5. Mengembangkan Tata Kelola Arsip Daerah secara Baku; 1.6. Meningkatkan jangkauan dan mutu layanan kesehatan dasar Puskemas dan RSUD 1.7. Meningkatkan status gizi masyarakat 1.8. Meningkatkan jumlah dan mutu layanan dan jaringan keluarga berencana; 1.9. Mengembangkan pola hidup sehat dan bersih; 1.10 Mengembangkan organisasi dan lembaga kepemudaan; 1.11 Mengembangkan semangat dan keterampilan seni, budaya dan olah raga; 1.12 Meningkatkan partisipasi perempuan dalam usaha sosial ekonomi;	✓ Pasar baca menuju kabupaten literasi #SAYA BACA ✓ Klinik primer desa berbasis masyarakat #GOOD PAGI dan Tim Saber malaria #z-MALARIA
2. **SP.5. Pengarusutamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah**	1.13 Mengoptimalkan pencegahan tindakan pelanggaran hukum; 1.14 Melaksanakan pemberian sanksi hukum secara konsisten, adil dan bertanggung jawab; 1.15 Melaksanakan Penyuluhan Hukum Terpadu.	✓ Forum inovasi anak Lembata #SAYA ANAK PANCASILA SATU LEMBATA, SATU NTT, SATU INDONESIA(Pembangunan Identitas ke-Indonesiaan dan Peningkatan Ketahanan Individu dalam aktivitas Ekonomi Pemuda) melalui kegiatan festival inovasi pemuda Lembata ✓ Pemberdayaan ekonomi perempuan #IBU EKONOMI ✓ Peningkatan sadar hukum melalui #PTT 151 (Patuh, Taat, Tertib) di 144 Desa dan 7 kelurahan (perbaikan sistem pelayanan publik dan integritas, dan kompetensi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat, penurunan kriminalitas, penguatan masyarakat yang berbudaya hukum dan taat hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi

STRATEGI POKOK	STRATEGI OPERASIONAL	INOVASI
MISI 2 : Mempercepat Pebangunan Infrastruktur, Transportasi, Air Bersih, Energi, Komunikasi Dan Penataan Kota		
1. SP.4 : Akselerasi pembangunan infrastruktur strategis penunjang perekonomian melalui kemitraan (*partnership*) pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pengembangan ekonomi wilayah serta pembangunan perdesaan	1.1. Membangun embung dan jaringan irigasi; 1.2. Memperluas jaringan penyediaan air bersih 1.3. Membangun sarana energi baru dan terbarukan 1.4. Mempercepat pembangunan prasarana dan sarana penunjang ekonomi 1.5. Mempercepat pembangunan prasarana dan sarana transportasi darat;laut dan udara 1.6. Mempercepat pembangunan prasarana dan sarana komunikasi dan informasi; 1.7. Mempercepat pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman; 1.8. Menata lingkungan perumahan dan permukiman 1.9. Mengembangkan tata kota yang yang harmonis (bersih, sehat, indah, tertib, nyaman dan berbudaya) 1.10. Melaksanakan Penataan Admnistrasi Pertanahan;	✓ Pembangunan jalan long segmen dengan skema pembiayaan #PUBLIC PRIVAT PARTNERSHIP dan/atau #AP (*Availability Payment*) dan perluasa jaringan distribusi air bersih dan listrik dengan pola *sharing budget*. ✓ #GESERLANI (Gerakan Seribu Rumah Layak Huni)
2. SP.7 : Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada *pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment* melalui penguatan interkonektivitas spasial.	2.1. Membangun jalan strategis yang menunjang ekonomi; 2.2. Membangun Aksesbilitas jalan yang menjangkau perdesaan; 2.3. Membangun sistem pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan 2.4. Mempertahankan daya dukung lingkungan hidup 2.5. Mengembangkan manajemen bencana 2.6. Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah secara konsisten	
MISI 3 : Mempercepat pembangunan dan pengembangan sumber daya ekonomi laut dan maritim serta ekonomi kreatif berbasis industri dan pariwisata berkelanjutan		
1. SP.2. Mengembangkan ekonomi lokal yang inklusif dan industri melalui Peningkatan pendapatan dan kerja sama daerah serta mengembangkan ekonomi wilayah dan pembangunan perdesaan berbasis industri	1.1. Membangun sektor kelautan dan perikanan serta kemaritiman berbasis kawasan 1.2. Meningkatkan SDM Kelautan dan Perikanan serta kemaritiman 1.3. Mengembangkan cara dan	✓ Integrasi distribusi pertumbuhan pola kawasan melalui *Clustering*-Tematik Desa menuju desa mandiri #DESA TERSENYUM 2.0. ✓ Pemberdayaan ekonomi perempuan #IBU EKONOMI ✓ #G-U450 (gerakan usahawan

	STRATEGI POKOK	STRATEGI OPERASIONAL	INOVASI
	berkelanjutan; dan Mempercepat pembangunan dan pengembangan sumber daya ekonomi laut dan maritim, serta ekonomi kreatif berbasis industri dan Pembangunan serta Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan peningkatan Pasar serta Promosi Daerah Tujuan Wisata;	teknologi produksi di sektor perikanan,kelautan dan kemaritiman; 1.4. Meningkatkan investasi di sektor perikanan dan kelautan serta kemaritiman 1.5. Meningkatkan mutu hasil kelautan dan perikanan serta kemaritiman 1.6. Meningkatkan perdagangan hasil kelautan, perikanan dan kemaritiman 1.7. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan strategis dalam pembangunan industri garam 1.8. Mengembangkan perdagangan hasil industri pengolahan perikanan dan sumberdaya laut serta kemaritiman 1.9. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan strategis dalam pembangunan industri pengolahan	450)
	MISI 4 : Mempercepat Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan		
1.	**SP.2. Mengembangkan ekonomi lokal yang inklusif dan industri melalui Peningkatan pendapatan dan kerja sama daerah serta mengembangkan ekonomi wilayah dan pembangunan perdesaan berbasis industri berkelanjutan; dan Mempercepat pembangunan dan pengembangan sumber daya ekonomi laut dan maritim, serta ekonomi kreatif berbasis industri dan Pembangunan serta Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan peningkatan Pasar dan Promosi Daerah Tujuan Wisata;**	1.1. Mengembangkan, Menata dan membangun daerah objek wisata Potensial; 1.2. Meningkatkan Pasar dan Promosi Pariwisata 1.3. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan strategis dalam pengembangan wisata 1.4. Memperbaiki sistem pengelolaan pajak dan retribusi dari pariwisata 1.5. Memberdayakan organisasi dan lembaga seni dan budaya daerah 1.6. Melestarikan seni dan budaya daerah 1.7. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan seni dan budaya daerah	✓ Rally Wisata Bahari – Lembata #*Truly Heaven*-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 Gunung (*Blue Mountains Tours*)

STRATEGI POKOK	STRATEGI OPERASIONAL	INOVASI
MISI 5 : Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Kerja Sama Daerah serta Pengembangan Ekonomi Wilayah Dan Pembangunan Perdesaan Berbasis Industri Berkelanjutan		
SP.2 Mengembangkan ekonomi lokal yang inklusif dan industri melalui Peningkatan pendapatan dan kerja sama daerah serta mengembangkan ekonomi wilayah dan pembangunan perdesaan berbasis industri berkelanjutan; dan Mempercepat pembangunan dan pengembangan sumber daya ekonomi laut dan maritim, serta ekonomi kreatif berbasis industri dan Pembangunan serta Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan peningkatan Pasar dan Promosi Daerah Tujuan Wisata; **SP.4. Akselerasi pembangunan infrastruktur strategis penunjang perekonomian melalui kemitraan (*partnership*) pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pengembangan ekonomi wilayah serta pembangunan perdesaan** **SP.7 : Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada *pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment* melalui penguatan interkonektivitas spasial.**	1.1. Meningkatkan kapasitas petani 1.2. Mengembangkan Agribisnis dan Meningkatkan investasi di sektor pertanian 1.3. Meningkatkan mutu hasil pertanian 1.4. Meningkatkan perdagangan hasil pertanian tanaman pangan, Hortikulutura dan Perkebunan 1.5. Meningkatkan kapasitas peternak 1.6. Meningkatkan investasi di sektor peternakan 1.7. Meningkatkan mutu hasil peternakan 1.8. Mengembangkan potensi ekonomi sector/wilayah melalui cincin ekonomi 1.9. Mengoptimalkan penggunaan Dana Desa 1.10. Mengoptimalkan pengelolaan BUMDes 1.11. Mempercepat pembangunan desa/kelurahan dengan model klaster tematik 1.12. Mengoptimalkan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya baik secara regional, nasional maupun internasional	✓ Sektor pertanian melalui gerakan revolusi kedaulatan pangan #MELATIMEKAR dan #t-CABANG ✓ Integrasi distribusi pertumbuhan pola kawasan melalui Clustering –Tematik Desa menuju desa mandiri #DESA TERSENYUM 2.0 ✓ Harmonisasi #DESA PANCASILA#
Misi 6 : Menata dan Mengembangkan Sumber Daya Mnusia Aparatur Sipil Negara Berbasis Teknologi Informasi serta meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		
SP.1. Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui Pelembagaan Inovasi dan Menata serta Mengembangkan SDM Aparatur Sipil Negara untuk Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik; **SP.6 Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi yang berorientasi pada perbaikan kinerja**	1.1. Mendorong reformasi birokrasi 1.2. Melaksanakan anggaran berbasis kinerja secara konsisten 1.3. Mengembangkan sistem administrasi perencanaan dan keuangan daerah berbasis IT 1.4. Mengembangkan manajemen pelayanan prima 1.5. Optimalisasi sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 1.6. Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan desa 1.7. Mengembangkan perencanaan dan penganggaran desa berbasis kinerja	✓ #ASN APIIKKK (Aspiratif, Produktif, Inovatif, Integratif, Konkrit, Kontibutif dan Kompetitif) serta budaya ASN yang melayani dengan basis kebutuhan dan kepuasan masyarakat, *Human Capital Management* melalui pengembangan potensi SDM ASN berbasis teknologi informasi serta peningkatan kapasitas APIP ✓ #go to WTP ✓ #STUDIO e-gov (e-Government)

6.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta optimalisasi peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah dan peningkatan sadar hukum masyarakat, maka stategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel.6.4
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan MISI KESATU

Misi 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN, SERTA OPTIMALISASI PERAN PEMUDA DAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI OPERASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
1. **Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat**	• Meningkatnya jangkauan kualitas pendidikan dasar dan menengah antara lain ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi murid (APM) serta meningkatnya angka melek huruf (AMH).	Meningkatkan Akses dan mutu pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.	• Mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini • Pengembangan Pendidikan Dasar
	• Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah antara lain ditandai dengan meningkatnya angka kelulusan murid.	Mengembangkan pendidikan berstandar nasional.	• Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan • Peningkatan pendidikan dan kompetensi tenaga pengajar • Perbaikan manajemen pendidikan • Peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar
		Mengembangkan layanan perpustakaan daerah.	• Penyediaan prasarana dan sarana perpustakaan • Pembentukan Taman Baca • Pelaksanaan kegiatan gemar membaca dengan #Saya Baca
			• Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
	• Meningkatnya minat baca masyarakat antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan, taman bacaan, jumlah buku bacaan dan persentase arsip yang terpelihara.	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	• Pelaksanaan kegiatan gemar membaca dengan #Saya Baca

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI OPERASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	• Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat antara lain ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, dan meningkatnya persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi;	Meningkatkan jangkauan dan mutu layanan kesehatan dasar Puskemas dan RSUD	• Pengembangan fasilitas kesehatan Puskemas dan RSUD • Peningkatan Kelas Rumah Sakit menjadi Tipe C
	• Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat antara lain ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup.	Meningkatkan jumlah dan mutu layanan dan jaringan keluarga berencana. Meningkatkan status gizi masyarakat	• Penigkatan Pelayaan Kesehatan Primer Klinik Desa Berbasis Masyarakat melalui #Good Pagi dan #z-Malaria • Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat
	• Meningkatnya status gizi masyarakat antara lain ditandai dengan menurunnya prevalensi balita dengan berat badan rendah atau angka gizi buruk.		• Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gizi • Peningkatan Kunjungan oleh Dokter Spesialis ke puskesmas-puskesmas
	• Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana antara lain ditandai dengan menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, dan meningkatnya persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkatkan jumlah dan mutu layanan dan jaringan keluarga berencana	• Pembentukan 10 Pusat Informasi Konseling Remaja dan 10 bina keluarga remaja generasi berencana dan 20 Bina Keluarga Baita Holistik integratif serta pembentukan Kampung KB
	• Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemik antara lain ditandai dengan menurunnya kasus penyakit menular.	Mengembangkan pola hidup sehat dan bersih.	• Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu • Penigkatan Pelayaan Kesehatan Primer Klinik Desa Berbasis Masyarakat melalui #Good Pagi dan #z-Malaria
	• Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan antara lain ditandai dengan berkurangnya kawasan kumuh.		• Peningkatan pengetahuan tentang pola hidup sehat dan bersih
3. Optimalisasi peran pemuda dalam pembangunan daerah	• Berkembangnya kegiatan kepemudaan antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga dan organisasi kepemudaan yang aktif; dan	Mengembangkan organisasi dan lembaga kepemudaan	• Pengembangan kapasitas pengurus organisasi dan lembaga kepemudaan • Pengembangan forum dialog dan kerjasama pemuda

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI OPERASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
	meningkatnya persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan.		• Pembentukan Organisasi Forum Inovasi Anak Lembata (FIAL) • Pengembangan dan pembinaan pramuka melalui Pelaksanaan Kemah Bhakti Bulan Pancasila dengan #Saya Anak Pancasila
	• Meningkatnya prestasi pemuda di bidang seni, budaya dan olah raga antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah kegiatan seni, olah raga dan budaya; dan meningkatnya persentase pemuda yang meraih prestasi seni, olah raga dan budaya.	Mengembangkan semangat dan keterampilan seni, budaya dan olah raga	• Peningkatan prasarana dan sarana seni dan budaya • Pengembangan festival seni dan budaya • Pelaksanaan Olahraga dan Budaya dengan #Gala Desa
	• Berkembangnya kewirausahaan para pemuda antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah usahawan muda dan kemandirian secara ekonomi.	Meningkatkan peran pemuda dalam bidang sosial ekonomi	• Pengembangan pendidikan keterampilan dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
4. Optimalisasi partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah	• Berkembangnya lembaga dan organisasi perempuan antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga dan organisasi perempuan yang aktif; dan persentase perempuan yang aktif dalam kegiatan.	Mengembangkan organisasi dan lembaga perempuan	• Pengembangan kapasitas pengurus organisasi dan lembaga perempuan • Peningkatan kegiatan organisasi perempuan
	• Meningkatnya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan antara lain ditandai dengan berkurangnya kasus kekerasan dalam rumah tangga; menurunnya kasus perdagangan perempuan; dan berkembangnya pengarusutamaan gender dalam perumusan kebijakan.	Mewujudkan pengarus utamaan gender	• Peningkatan kualitas dan akses perempuan terutama dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI OPERASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
	• Terwujudnya keluarga yang sejahtera antara lain ditandai dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam usaha sosial ekonomi dan berkembangnya kelompok usaha bersama perempuan.	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam usaha sosial ekonomi	• Pemberdayaan Ekonomi Perempuan • Revitalisasi Gerakan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) • Kerjasama (MoU) dengan lembaga keuangan untuk modal usaha dengan #Ibu Ekonomi
5. **Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat**	• Terciptanya rasa aman antara lain ditandai dengan berkurangnya angka kriminalitas.	Melaksanakan pemberian sanksi hukum secara konsisten, adil dan bertanggung jawab	• Pengembangan sistem ketertiban dan keamanan yang adil dan bertanggungjawab
	• Terciptanya ketertiban antara lain ditandai berkurangnya kasus penyalahgunaan narkoba; dan berkurangnya kasus penggunaan minuman keras dan meningkatnya disiplin hidup bermasyarakat.	Mengoptimalkan pencegahan tindakan pelanggaran hukum	• Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum
	• Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan bertanggung jawab antara lain ditandai dengan meningkatnya penyelesaian kasus kriminalitas.	Melaksanakan Penyuluhan Hukum Terpadu.	• Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum berbasis masyarakat dan Meningkatkan partisipasi masyarakat yang Patuh, Taat, Tertib (PTT) di 144 Desa dan 7 Kelurahan dengan #PTT 151.

6.1.2. Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua

Dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, transportasi, air bersih, energi, komunikasi dan penataan kota, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel.6.5
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi KEDUA

Misi 2 : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, TRANSPORTASI, AIR BERSIH, ENERGI, KOMUNIKASI DAN PENATAAN KOTA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI OPERASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
6. **Meningkatkan infrastruktur dasar strategis**	Terbangunnya jalan – jalan strategis yang menunjang ekonomi yang ditandai dengan pemanfaaatn jalan strategis.	Membangun jalan strategis yang menunjang ekonomi	• Pembangunan dan pemeliharaan jalan/jembatan dalam mempercepat akses menuju pusat-pusat perekonomian desa

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI OPERASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
	• Terbangunnya aksebilitas jalan yang menjangkau perdesaan yang ditandai dengan terbangunnya jalan yang menghubungkan akses antar desa.	Membangun Aksesbilitas jalan yang menjangkau perdesaan	• Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan • Peningkatan Percepatan Pembangunan jalan dengan pola *long segmen*
	• Tersedianya prasarana dan sarana air bersih yang ditandai dengan meningkatnya persentase pelayanan air bersih masyarakat.	Memperluas jaringan penyediaan air bersih	• Pembangunan dan pemeliharaan sumber air bersih dan Jaringan Air Bersih • Perluasan Jaringan distribusi air minum/pipanisasi dengan konsep *Sharing Budget*
	• Tersedianya prasarana dan sarana irigasi antara lain ditandai dengan terbangunnya waduk dan embung dan meningkatnya persentase jaringan irigasi.	Membangun embung dan jaringan irigasi	• Pembangunan dan pemeliharaan waduk dan embung serta Jaringan Irigasi
	• Tersedianya prasarana dan sarana listrik yang ditandai dengan meningkatnya persentase elektrifikasi.	Membangun Saranan Energi Baru dan Terbarukan	• Pengembangan Energi Baru Terbarukan • Perluasan Jaringan distribus Listrik/lampunisasi dengan konsep *Sharing Budget* • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik
	• Terbangunnya jaringan transportasi darat, laut dan udara yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kendaraan darat, laut dan udara, pembangunan pelabuhan laut, pelabuhan very, pelabuhan udara dan terbangunnya fasilitas dan peningkatan jaringan transportasi darat, laut dan udara.	Mempercepat pembangunan prasarana dan sarana transportasi darat; laut dan udara	• Pengembangan moda transportasi darat • Pembangunan dan pemeliharaan dermaga dan pelabuhan • Pengembangan moda transportasi laut
	• Terbangunnya jaringan telekomunikasi dan informasi antara lain ditandai dengan meningkatnya akses dan kemudahan komunikasi melalui internet dan lain – lain dan meningkatnya kemudahan BTS.	Mempercepat pembangunan prasarana dan sarana komunikasi dan informasi	• Pembangunan dan pemeliharaan menara BTS • Perluasan kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI OPERASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
7. Meningkatkan mutu lingkungan perumahan dan permukiman.	• Terbangunnya prasarana dan sarana perumahan sesuai standar minimum antara lain ditandai dengan meningkatnya persentase rumah yang sehat, bersih, dan layak huni.	Mempercepat pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman	• Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi • Peningkatan Kualitas Perumahan Layak Huni dengan GESER LANI (Gerakan 1.000 Rumah Layak Huni)
	• Berkurangnya lingkungan permukiman kumuh antara lain ditandai dengan berkurangnya kawasan kumuh.	Menata lingkungan perumahan dan permukiman	• Pengembangan perilaku hidup bersih, sehat dan sadar lingkungan
8. Mewujudkan Ibukota Kabupaten Lembata yang humanis	• Meningkatnya standar dan mutu prasarana dan sarana perkotaan antara lain ditandai dengan menata kota yang harmonis (bersih, sehat, indah, tertib, nyaman dan berbudaya) yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat kota, wilayah perkotaan yang terlayani sanitasi yang baik.	Mengembangkan tata kota yang yang harmonis (bersih, sehat, indah, tertib, nyaman dan berbudaya)	• Pembangunan dan pemeliharaan jaringan sanitasi dan persampahan • Penataan Taman Kota; • Pembangunan TPS bersih di Kota Lewoleba (*clean depo tranfer*)
9. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan	• Terjaganya fungsi lingkungan antara lain ditandai dengan berkurangnya persentase lahan kritis, berkurangnya tingkat pencemaran air, berkurangnya tingkat pencemaran laut dan berkurangnya tingkat pencemaran udara.		• Pembangunan dan pemeliharaan jaringan sanitasi dan persampahan
	• Berkembangnya kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan antara lain ditandai dengan berkurangnya kasus sengketa pengelolaan sumber daya dan lingkungan, berkurangnya pencurian ikan dan berkurangnya penebangan liar.	Menegakkan hukum secara konsisten terhadap perusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	• Pemberian sanksi hukum bagi pelaku pembalakan liar, pencurian ikan dan perusak lingkungan hidup

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI OPERASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
	• Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi bencana serta pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim antara lain ditandai dengan tersedianya peta rawan bencana, terbentuknya desa tangguh dan siaga bencana, Sekolah Aman Bencana dan meningkatnya kesiapan menghadapi bencana. • Meningkatnya ketersediaan air antara lain ditandai dengan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman dan panen air	Mengembangkan manajemen bencana	• Mitigasi bencana alam • Penyiapan peta rawan bencana • Pengembangan prasarana dan sarana pencegahan dan penanganan bencana • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana
10. Mengoptimalkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah dan pertanahan	• Terwujudnya keserasian pemanfaatan ruang wilayah antara lain ditandai dengan meningkatnya ketaatan dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah. • Menjamin kepastian hukum dan kepemilikan tanah	Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah secara konsisten	• Penegakan Hukum terhadap pelanggar RTRW • Pencegahan penyalagunaan Tata ruang
		Melaksanakan penataan administrasi pertanahan	• Pengembangan sistem informasi pertanahan • Penegakan hukum terhadap pelanggar pertanahan

6.1.3. Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam upaya mewujudkan Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Laut dan Maritim, serta Ekonomi Kreatif Berbasis Industri dan Pariwisata Berkelanjutan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel.6.6
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi KETIGA

MISI 3 : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DAN MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA EKONOMI LAUT DAN MARITIM, SERTA EKONOMI KREATIF BERBASIS INDUSTRI DAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI OPERASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
11. Mengembangkan industrialisasi pengelolaan perikanan, Sumber daya laut dan kemaritiman	• Tersedianya kawasan pengelolaan perikanan, sumber daya laut dan kemaritiman	Membangun sektor kelautan dan perikanan serta kemaritiman berbasis kawasan	• Peningkatan infrastruktur kelautan dan perikanan • Pengembangan teknologi produksi dan teknologi pengolahan • Perluasan kerjasama dengan swasta
		Meningkatkan SDM Kelautan dan Perikanan serta kemaritiman	• Peningkatan SDM Nelayan & pelaku usaha kelautan dan perikanan
	• Meningkatnya hasil produksi perikanan dan sumber daya laut yang	Mengembangkan cara dan teknologi produksi di sektor perikanan,	• Perluasan kerjasama dengan swasta

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI OPERASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
	ditandai antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah produksi hasil ikan dan rumput laut dan garam.	kelautan dan kemaritiman.	
		Meningkatkan investasi di sektor perikanan dan kelautan serta kemaritiman	• Pembangunan Pabrik Ikan Kaleng Sarden Lembata
	• Meningkatnya nilai tambah hasil pengelolaan perikanan, sumber daya laut dan kemaritiman antara lain ditandai dengan meningkatnya PDRB pada sektor perikanan, sumber daya laut dan kemaritiman.	Meningkatkan mutu hasil kelautan dan perikanan serta kemaritiman	• Peningkatan standar mutu • Pengembangan teknologi pascapanen
		Meningkatkan perdagangan hasil kelautan, perikanan dan kemaritiman	• Perluasan jaringan distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan
	• Terbangunnya wisata bahari, koperasi nelayan serta meningkatnya kesejahteraan nelayan antara lain ditandai dengan meningkatnya nilai tukar nelayan, dan meningkatnya pertumbuhan pendapatan nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.	Mengembangkan perdagangan hasil industri pengolahan perikanan dan sumberdaya laut serta kemaritiman	• Perluasan kerjasama dengan swasta • Pembangunan Pabrik Ikan Kaleng Sarden Lembata; • Penyediaan Sarana Prasarana Wisata Bahari
	• Meningkatnya produksi maritim antara lain ditandai dengan jasa pelayanan dan fasilitas transportasi laut.	Mengembangkan perdagangan hasil industri pengolahan perikanan dan sumberdaya laut serta kemaritiman	• Peningkatan standar mutu • Pengembangan teknologi pasca panen
12. Mengembangkan ekonomi kreatif berbasis industri dan pariwisata yang berkelanjutan.	• Berkembangnya usaha produksi ekonomi kreatif yang ditandai dengan meningkatnya orang kreatif, usaha produktif dan terbangunnya prasarana dan lembaga kreatif untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif.	Mengembangkan kerjasama dan kemitraan strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan.	• Perluasan kerjasama UMKMK dengan swasta.

6.1.4. Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi KEEMPAT

Dalam upaya mewujudkan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel.6.7
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat

MISI 4 : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN SERTA MENINGKATKAN PASAR DAN PROMOSI DAERAH TUJUAN WISATA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI OPERASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
13. Mengembangkan pariwisata daerah yang unggul dan berdaya saing.	• Meningkatnya pasar dan promosi pariwisata yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan kepariwisataan.	Mengembangkan, Menata dan membangun daerah/ daya tarik wisata Potensial	• Perbaikan dan peningkatan infrastruktur
		Meningkatkan Pasar dan Promosi Pariwisata	• Perluasan jaringan promosi dan pemasaran wisata dengan konsep Rally Wisata Bahari – Lembata #*Truly Heaven* –Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 Gunung *(Blue Mountains Tours*)
	• Meningkatnya persentase masyarakat dan investor yang aktif dalam mengelola daya tarik wisata.	Mengembangkan kerjasama dan kemitraan strategis dalam pengembangan wisata	• Peningkatan kapasitas pelaku jasa wisata
	• Terwujudnya pengembangan, pembangunan dan penataan daya tarik wisata lainnya yang berpotensi yang ditandai dengan jumlah daya tarik wisata yang bernilai jual tinggi.	Mengoptimalkan pariwisata daerah	• Penyediaan prasarana pendukung wisata • Pengembangan desa wisata • Peningkatan informasi pariwisata Lembata terpusat (TIC) *Tourism Informasi center* dan pembentukan Lembata *Tourism Board*
	• Berkembangnya jasa pariwisata antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah hotel, restoran dan travel dan meningkatnya kunjungan wisatawan.	Memperbaiki sistem pengelolaan pajak dan retribusi dari pariwisata Memperbaiki sistem pengelolaan pajak dan retribusi dari pariwisata	• Penataan pencatatan dan pengumpulan pajak dan retribusi
	• Meningkatnya pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat.		• Peningkatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi • Penataan pencatatan dan pengumpulan pajak dan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI OPERASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
			retribusi • Peningkatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi

6.1.5. Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi KELIMA

Dalam upaya mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Wilayah, serta Pembangunan Perdesaan Berbasis Industri Berkelanjutan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel.6.8
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan MISI KELIMA

MISI 5 : MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN KERJA SAMA DAERAH SERTA MENGEMBANGKAN EKONOMI WILAYAH DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN BERBASIS INDUSTRI BERKELANJUTAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI OPERASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
14. Meningkatkan kesejahteraan petani, pekebun dan peternak	• Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan hasil pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan dan peternakan antara lain ditandai dengan meningkatnya produksi penjualan jagung dan ubi kayu, cabe, bawang, kacang tanah, sayur – sayuran dan buah – buahan, nenas, advokat, kopi, jambu mente, sapi, babi, kambing, ayam kampong dan lain -lain.	Mengembangkan agribisnis	• Pengembangan sektor pertanian berkelanjutan dengan konsep MELATI MEKAR
		Meningkatkan kapasitas petani	• Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pertanian
		Meningkatkan investasi di sektor pertanian	• Pengembangan pusat pembibitan dan perbenihan
		Meningkatkan mutu hasil pertanian	• Penyediaan peralatan pertanian
			• Penyediaan jaminan kredit bagi petani • Pengembangan teknologi produksi dan teknologi pengolahan
	• Meningkatnya kesejahteraan petani, peternak dan pelaku usaha mikroantara lain ditandai dengan meningkatnya nilai usaha mikro.	Meningkatkan perdagangan hasil pertanian tanaman pangan, Hortikulutura dan Perkebunan	• Perluasan kerjasama dengan swasta • Peningkatan keterampilan petani • Pengembangan teknologi pascapanen • Perluasan jaringan distribusi dan pemasaran

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI OPERASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
			hasil pertanian pangan
			• Perluasan jaringan distribusi dan pemasaran hasil pertanian hortikultura melalui konsep swasembada cabai dan bawang melalui ekspansi lahan 10 Ha dengan # T-Cabang
15. Meningkatkan produktifitas pembangunan perdesaan	• Memperbaiki kualitas belanja pembangunan desa antara lain ditandai dengan meningkatnya kualitas perencanaan.	Mengoptimalkan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya	• Penyiapan masterplan pengembangan koridor ekonomi #Rantai Ekonomi LEMBATA 2.0 • Pengembangan forum kerjasama antardaerah dalam perdagangan dan investasi
	• Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa ditandai dengan meningkatnya BUMDES yang aktif.	Mengoptimalkan pengelolaan BUMDes	• Penyiapan rencana kerjasama investasi kawasan ekonomi khusus daerah
	• Terwujudnya titik-titik pertumbuhan desa melalui klaster-tematik antara lain ditandai dengan meningkatnya desa-desa mandiri.	Mempercepat pembangunan desa/kelurahan dengan model klaster tematik	• Pengembangan desa/kelurahan tematik.
16. Mengembangkan kawasan ekonomi strategis daerah cepat tumbuh	• Tersedianya master plan wilayah pengembangan kawasan ekonomi strategis koridor ekonomi Rantai Ekonomi #LEMBATA 2.0.	Mengoptimalkan cincin ekonomi yang terdiri dari cincin pertanian, cincin kelautan, perikanan dan kemaritiman, cincin industry dan ekonomi kreatif, cincin keuangan mikro dan cincin pemberdayaan umat basis.	• Pembangungan infrastruktur strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pengembangan ekonomi wilayah serta pembangunan perdesaan.
	• Terbangunnya prasarana dan sarana kawasan ekonomi strategis daerah antara lain ditandai dengan tersedianya prasarana dan sarana produksi dan distribusi.		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI OPERASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
17. Meningkatkan kerjasama Daerah	• Terwujudnya kerjasama investasi regional, nasional dan internasional yang dapat menigkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kegiatan yang melibatkan peran masyarakat luas seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan serta pariwisata.	Mengembangkan kerjasama dan kemitraan	• Perluasan kerjasama • Pemberian kemudahan investasi
18. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	• Menurunnya kemiskinan antara lain ditandai dengan berkurangnya jumlah dan persentase penduduk miskin.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	• Peningkatan keterampilan • Perluasan akses permodalan
	• Berkurangnya masalah sosial antara lain ditandai dengan berkurangnya jumlah dan persentase masyarakat penyandang masalah sosial.	Mengoptimalkan jaminan sosial	• Peningkatan pemahaman tetang Jaminan Sosial • Penataan pusat perlindungan sosial
	• Meningkatnya kesempatan kerja antara lain ditandai dengan berkurangnya tingkat pengangguran terbuka.	Mengembangkan padat karya	• Pelaksanaan padat karya
	• Terwujudnya ketahanan pangan antara lain ditandai dengan meningkatnya produksi pangan, meningkatnya pasokan pangan dan terjaganya inflasi.	Meningkatkan ketersediaan pangan	• Peningkatan produksi pangan lokal • Pengamanan pasokan pangan • Pengendalian harga pangan

6.1.6. Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi KEENAM

Dalam upaya Penataan aparatur sipil negara dan pendayagunaan sumber daya manusia berbasis teknologi informasi, maka maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel.6.9
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan MISI KEENAM

MISI 6 : MENATA DAN MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SERTA MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI OPERASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
19. Menata dan mengembangkan potensi sumber daya manusia ASN berbasis informasi teknologi.	• Terwujudnya revolusi kerja APIIKKK (Aspiratif, Produktif, Inovatif, Integratif, Konkrit, Kontributif dan Kompetitif) sebagai *human capital management* melalui pengembangan potensi ASN berbasis informasi teknologi.	Mendorong reformasi birokrasi	• Penataan organisasi perangkat daerah • Peningkatan kapasitas aparatur dengan #ASN APPIKK (Aspiratif, Produktif, Inovatif, Integratif, Konkrit, Kontributif) • Peningkatan pengendalian dan pengawasan
	• Terciptanya kapasitas SDM ASN yang APIIKKK.	Melaksanakan anggaran berbasis kinerja secara konsisten	• Peningkatan mutu laporan kinerja keuangan daerah untuk WTP (*go to* WTP) • Penataan pengendalian dan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
	• Meningkatnya kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).	Mengembangkan sistem administrasi perencanaan dan keuangan daerah	• Pengembangan sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara terpadu • Pengembangan *e-Government (e-Planning* dan *e-Budgeting)*
20. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah	• Terwujudnya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif antara lain meningkatnya jumlah OPD dan desa dengan status laporan kinerja baik.	Mengembangkan sistem administrasi perencanaan dan keuangan daerah berbasis IT	• Peningkatan kapasitas aparat OPD
		Optimalisasi sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	• Penguatan mangemen pemerintahan daerah
	• Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel antara lain ditandai dengan meningkatnya status laporan keuangan daerah menjadi WTP, bertambahnya pajak		• Peningkatan kapasitas aparat desa dan kecamatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI OPERASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
	dan retribusi daerah, meningkatnya jumlah OPD dengan laporan keuangan baik atau WTP, meningkatnya realisasi pendapatan daerah, dan meningkatnya realisasi belanja daerah.		
	• Terwujudnya sistem informasi pemerintahan yang transparan antara lain ditandai dengan meningkatnya kesesuaian antara perencanaan (RPJMD dan RKPD) dengan penganggaran (RAPBD) dan pelaksanaan program (LAKIP), persentase masyarakat yang dapat mengakses dokumen APBD, dan persentase masyarakat yang dapat mengakses dokumen laporan kinerja OPD.		• Pengembangan sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara terpadu • Pengembangan *e-Government (e-Planning* dan *e-Budgeting)*
21. Meningkatkan kinerja pelayanan publik	• Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu dan adil antara lain ditandai dengan meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD.	Mengembangkan pelayanan perijinan terpadu satu pintu yang cepat dan mudah	• Penghapusan hambatan investasi
		Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan dengan swasta	• Penyediaan prasarana dan sarana pendukung investasi • Perluasan kerjasama dan kemitraan dengan swasta
	• Terwujudnya kemudahan pelayanan pihak ketiga (#kios bayar) untuk percepatan realisasi penyerapan anggaran pembangunan daerah.	Mengembangkan managemen pelayanan prima	• Penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi
	• Terwujudnya pelayanan publik antara lain ditandai dengan meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat.		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI OPERASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
22. **Mengembangkan tata kelola politik dan pemerintahan yang demokratis**	• Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas proses politik dan pemerintahan antara lain ditandai dengan meningkatnya persentase masyarakat yang aktif dalam konsultasi publik pembahasan peraturan daerah, persentase masyarakat yang aktif dalam konsultasi publik pembahasan RAPBD, dan persentase masyarakat yang aktif dalam konsultasi publik pembahasan pengelolaan asset daerah dan meningkatnya partisipasi penduduk yang ikut dalam kegiatan politik.	Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan desa	• Penataan dan pengembangan data dan infromasi pembangunan desa

6.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN

Dengan mempertimbangkan sinergi RPJMD Kabupaten Lembata dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lembata, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kecamatan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis baik pengembangan ekonomi, penguatan sosial budaya, pengelolaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan penguatan daya dukung lingkungan. Untuk pengembangan ekonomi wilayah kecamatan desainnya tetap merujuk pada pola kawasan (koridor ekonomi) strategis daerah cepat tumbuh yang terintegrasi sebagai kawasan pengembangan olahan industri, budidaya dan pariwisata yang berorientasi pada ketahanan pangan, yaitu Koridor Ekonomi I PARANG MINGAR (Pada-Waijarang-Mingar) dan Koridor Ekonomi II BOTANI (Bobu-Tanjung Leur-Tobotani).

6.2.1 Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Nagawutung

Kecamatan Nagawutung terdiri dari 18 Desa: Pasir Putih, Lolong, Bobokerong, Duawatun, Wukerong, Penikene, Atawai, Lusiduawatun, Belabaja, Labalimut, Ileboli, Tewaowutung, Baobolak, Bolibean, Ria Bao, Idalolong, Warawatung, dan Liwulagang. Desa yang sebagian besar berada di wilayah pesisir atau pantai adalah Desa Pasir Putih, Lolong, Babokerong, Duawatun, Wuakerong, Penikene, Lusiduawatun, Tewaowutung, Baobolak, Ria Bao, Idalolon dan Warwatung. Desa lainnya berada di lereng atau perbukitan.

Luas wilayah Kecamatan Nagawutung adalah 185,70 km^2 (14,66 persen dari luas Kabupaten Lenbata dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 tercatat sebesar 9.374 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 51 jiwa per km^2. Desa dengan jumlah penduduk terbesar adalah Desa Pasir Putih. Sebagian besar penduduk mata pencahariannya adalah nelayan, petani padi dan palawija. Hasil produksi utama Kecamatan Nagawutung adalah padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kelapa, kopi, cengkeh, kakao, jambu mete, pinang dan kapuk. Hasil perikanan utama adalah kakap, ikan merah, dan ikan lainnya. Selain itu, peternakan yang dikembangkan adalah babi,

ayam buras, ayam ras, kambing, sapi, domba, bebek, kuda dan domba. Potensi Pariwisata Kecamatan Nagawutung adalah wisata bahari dan atraksi seni.

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan, tingginya kemiskinan, terbatasnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, kurangnya prasarana transportasi, terbatasnya air bersih dan sanitasi, terbatasnya prasarana perumahan dan permukiman, kurangnya jaringan listrik dan telekomunikasi dan informasi; serta meningkatnya kerusakan lingkungan.

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Nagawutung pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

(1) Perluasan jangkauan dan mutu pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan;

(2) Pengembangan ekonomi desa dengan model klaster yang berpedoman pada koridor ekonomi;

(3) Pengembangan desa/kelompok desa/kampung secara tematik yang dilakukan melalui penataan dan pengembangan kawasan berbasis potensi lokal yang memiliki tema atau ikon tertentu dan unik serta dinamis;

(4) Pembangunan prasarana dan sarana desa secara merata dan terpadu terutama perumahan, air bersih, listrik, transportasi dan komunikasi;

(5) Penguatan solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat desa;

(6) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Nagawutung pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel.6.10
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Nagawutung
Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Menurunkan angka kemiskinan 2. Menurunkan angka pengangguran	Mempercepat pengembangan ekonomi desa	(1) Peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian dengan Desa Labalimut sebagai simpul perkebunana kopi dan ketahanan pangan. (2) Peningkatan produksi komoditas unggulan perikanan dengan Desa Babokerong sebagai simpul budidaya rumput laut: (3) Pengembangan desa wisata dengan Desa Mingar sebagai simpul pariwisata (4) Pengembangan Desa Tematik Nagawutung diantaranya; Desa Ria Bao sebagai Desa Penyu, Desa Pasir Putih sebagai Desa pariwisata.
		Meningkatkan jangkauan dan pelayanan pendidikan	(1) Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini (2) Rehabilitasi dan pembangunan sekolah (3) Pengadaan peralatan sekolah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			(4) Membangun Taman Baca di setiap desa.
		Meningkatkan jangkauan dan pelayanan kesehatan	(1) Penyediaan prasarana dan sarana Posynadu (2) Rehabilitasi dan pembangunan pusksesmas dan pustu
Meningkatkan kemajuan desa	Meningkatkan akses prasarana dasar	Meningkatkan ketersediaan air bersih	Pembangunan tempat penampungan air bersih
		Meningkatkan ketersediaan listrik	Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan
		Mengembangkan lingkungan perumahan dan permukiman	Penataan dan rehabilitasi perumahan dan permukiman
		Meningkatkan akses transportasi	Pembangunan jalan dan jembatan desa
Meningkatkan solidaritas dan ketahan sosial masyarakat	Menciptakan gerakan dan semangat semangat membangun desa	Menjaga dan melaksanakan nilai-nilai budaya masyarakat lokal atau adat	(1) Rehabilitasi dan pembangunan balai budaya (2) Pengadaan pertunjukan seni dan budaya (3) Penyelenggaraan festival budaya
		Membangun kerjasama dan kegotoroyongan	Pelaksanaan kegiatan masyarakat secara bersama

6.2.2 Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Wulandoni

Kecamatan Wulandoni terdiri dari 15 Desa: Lelata, Lamalera A, Lamalera B, Imulolong, Puor, Belobao, Wulandoni, Pantai Harapan, Atakera, Leworaja, Alap Atadei, Posiwatu, Tapobali, Puor B, dan Ataili.

Luas wilayah Kecamatan Wulandoni adalah 121,44 km^2 dengan jumlah penduduk Kecamatan Wulandoni pada tahun 2015 tercatat sebesar 2.464 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 69 jiwa per km^2. Desa dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Lamalera A dan terendah adalah Belobao. Sebagian besar penduduk mata pencahariannya adalah pertanian palawija dan perikanan. Hasil produksi utama Kecamatan Wulandoni adalah jagung, padi, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau. Hasil perikanan utama adalah ikan tembang, layang, cakalang dan tongkol. Selain itu, peternakan yang dikembangkan adalah babi, ayam buras, ayam ras, kambing, sapi, domba, bebek, kuda dan domba. Potensi Pariwisata Kecamatan Wulandoni adalah wisata bahari dan atraksi seni.

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan, tingginya kemiskinan, terbatasnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, kurangnya prasarana transportasi, terbatasnya air bersih dan sanitasi, terbatasnya prasarana perumahan dan permukiman, kurangnya jaringan listrik dan telekomunikasi dan informasi; serta meningkatnya kerusakan lingkungan.

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Wulandoni pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

(1) Perluasan jangkauan dan mutu pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan;

(2) Pengembangan ekonomi desa dengan model klaster yang berpedoman pada koridor ekonomi;

(3) Pengembangan desa/kelompok desa/kampung secara tematik yang dilakukan melalui penataan dan pengembangan kawasan berbasis potensi lokal yang memiliki tema atau ikon tertentu dan unik serta dinamis;

(4) Pembangunan prasarana dan sarana desa secara merata dan terpadu terutama perumahan, air bersih, listrik, transportasi dan komunikasi;

(5) Penguatan solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat desa;

(6) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Wulandoni pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel.6.11
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Wulandoni
Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Menurunkan angka kemiskinan 2. Menurunkan angka pengangguran	Mempercepat pengembangan ekonomi desa	(1) Peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian; dengan Desa Puor A dan Desa Puor B sebagai simpul perkebunana Kopi dan ketahanan pangan; (2) Peningkatan produksi komoditas unggulan perikanan: (3) Peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan; dengan Desa Tapobali sebagai simpul budidaya sarang burung wallet; (4) Pengembangan Desa secara tematik di Wulandoni diantaranya; Desa Wulandoni sebagai desa pasar Barter, Desa Lamalera A dan Lamalera B sebagai ikan paus; (5) Pengembangan desa wisata; dengan Desa Lamalera A dan Lamalera B sebgai simpul pariwisata
		Meningkatkan jangkauan dan pelayanan pendidikan	(1) Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini (2) Rehabilitasi dan pembangunan sekolah (3) Pengadaan peralatan sekolah (4) Membangun Taman Baca di setiap desa.
		Meningkatkan jangkauan dan pelayanan kesehatan	(1) Penyediaan prasarana dan sarana Posyandu (2) Rehabilitasi dan pembangunan pusksesmas dan pustu
Meningkatkan kemajuan desa	Meningkatkan akses prasarana dasar	Meningkatkan ketersediaan air bersih	Pembangunan tempat penampungan air bersih
		Meningkatkan ketersediaan listrik	Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan
		Mengembangkan lingkungan perumahan dan permukiman	Penataan dan rehabilitasi perumahan dan permukiman
		Meningkatkan akses transportasi	Pembangunan jalan dan jembatan desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan solidaritas dan ketahan sosial masyarakat	Menciptakan gerakan dan semangat semangat membangun desa	Menjaga dan melaksanakan nilai-nilai budaya masyarakat lokal atau adat	(1) Rehabilitasi dan pembangunan balai budaya (2) Pengadaan pertunjukan seni dan budaya (3) Penyelenggaraan festival budaya
		Membangun kerjasama dan kegotoroyongan	Pelaksanaan kegiatan masyarakat secara bersama

6.2.3 Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Ile Ape

Kecamatan Ile Ape terdiri dari 17 Desa: Kolontobo, Laranwutun, Muruona, Watodiri, Napasabok, Bunga Muda, Amakaka, Tanjung Batu, Petuntawa, Waowala, Tagawiti, Dulitukan, Kolipadan, Palilolon, Lamawara, Beutaran dan Riangbao.

Luas wilayah Kecamatan Ile Ape adalah 96,86 km^2 dengan jumlah penduduk Kecamatan Ile Ape pada tahun 2015 tercatat sebesar 12.309 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 127 jiwa per km^2. Desa dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Amakaka dan terendah adalah Riangbao. Sebagian besar penduduk mata pencaharian adalah pertanian palawija dan perikanan. Hasil produksi utama Kecamatan Ile Ape adalah jagung, padi, ubi kayu, ubi jalar, jambu mete, dan kelapa. Hasil perikanan utama adalah ikan laut. Selain itu, peternakan yang dikembangkan adalah babi, ayam buras, ayam ras, kambing, sapi, domba, bebek, kuda dan domba. Potensi Pariwisata Kecamatan Ile Ape adalah wisata bahari dan atraksi seni.

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan, tingginya kemiskinan, terbatasnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, kurangnya prasarana transportasi, terbatasnya air bersih dan sanitasi, terbatasnya prasarana perumahan dan permukiman, kurangnya jaringan listrik dan telekomunikasi dan informasi; serta meningkatnya kerusakan lingkungan.

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Ile Ape pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1) Perluasan jangkauan dan mutu pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan;
2) Pengembangan ekonomi desa dengan model klaster yang berpedoman pada koridor ekonomi;
3) Pengembangan desa/kelompok desa/kampung secara tematik yang dilakukan melalui penataan dan pengembangan kawasan berbasis potensi lokal yang memiliki tema atau ikon tertentu dan unik serta dinamis;
4) Pembangunan prasarana dan sarana desa secara merata dan terpadu terutama perumahan, air bersih, listrik, transportasi dan komunikasi;
5) Penguatan solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat desa;
6) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Ile Ape pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel.6.12
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Ile Ape
Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Menurunkan angka kemiskinan 2. Menurunkan angka pengangguran	Mempercepat pengembangan ekonomi desa	(1) Menjadikan Tanjung Tuak-Lewotolok-Waipukang, dengan desa Kolipadan sebagai titik pertumbuhan/pusat pengembangan yang berorientasi pada pariwisata, industry dan kemaritiman, serta desa desa lain sebagai simpul ketahanan pangan dan olahan industri madu; (2) Peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian (3) Peningkatan produksi komoditas unggulan perikanan: (4) Peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan (5) Pengembangan Desa Tematik di Ile Ape diantaranya; Desa Kolipadan dan desa-desa sekitar tanjung sebagai desa jagung titi dan ikan kering; Desa Amakaka sebgai desa madu; (6) Pengembangan desa wisata
		Meningkatkan jangkauan dan pelayanan pendidikan	(1) Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini (2) Rehabilitasi dan pembangunan sekolah (3) Pengadaan peralatan sekolah (4) Membangun Taman Baca di setiap desa.
		Meningkatkan jangkauan dan pelayanan kesehatan	(1) Penyediaan prasarana dan sarana Posynadu (2) Rehabilitasi dan pembangunan pusksesmas dan pustu
Meningkatkan kemajuan desa	Meningkatkan akses prasarana dasar	Meningkatkan ketersediaan air bersih	Pembangunan tempat penampungan air bersih
		Meningkatkan ketersediaan listrik	Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan
		Mengembangkan lingkungan perumahan dan permukiman	Penataan dan rehabilitasi perumahan dan permukiman
		Meningkatkan akses transportasi	Pembangunan jalan dan jembatan desa
Meningkatkan solidaritas dan ketahan sosial masyarakat	Menciptakan gerakan dan semangat semangat membangun desa	Menjaga dan melaksanakan nilai-nilai budaya masyarakat lokal atau adat	(1) Rehabilitasi dan pembangunan balai budaya (2) Pengadaan pertunjukan seni dan budaya (3) Penyelenggaraan festival budaya
		Membangun kerjasama dan kegotoroyongan	Pelaksanaan kegiatan masyarakat secara bersama

6.2.4 Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Ile Ape Timur

Kecamatan Ile Ape Timur terdiri dari 9 Desa: Todanara, Jontona, Lamawolo, Lamatokan, Lamaau, Aulesa, Waimatan, Lamagute dan Bao Lali Duli. Sebagian desar desa termasuk daerah pesisir atau pantai disertai dengan padang rumput.

Luas wilayah Kecamatan Ile Ape Timur adalah 38,26 km^2 dengan jumlah penduduk Kecamatan Ile Ape Timur pada tahun 2015 tercatat sebesar 5.633 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 147 jiwa per km^2. Desa dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Lamatokan dan terendah adalah Lamagute. Sebagian besar penduduk mata pencaharian adalah pertanian palawija dan perikanan. Hasil produksi utama Kecamatan Ile Ape Timur adalah jagung, padi ladang, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, jambu mete, dan kelapa. Hasil perikanan utama adalah ikan laut. Selain itu, peternakan yang dikembangkan adalah babi, ayam buras, ayam ras, kambing, sapi, domba, bebek, kuda dan domba. Potensi Pariwisata Kecamatan Ile Ape Timur adalah wisata bahari dan atraksi seni.

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan, tingginya kemiskinan, terbatasnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, kurangnya prasarana transportasi, terbatasnya air bersih dan sanitasi, terbatasnya prasarana perumahan dan permukiman, kurangnya jaringan listrik dan telekomunikasi dan informasi; serta meningkatnya kerusakan lingkungan.

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Ile Ape Timur pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

(1) Perluasan jangkauan dan mutu pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan;

(2) Pengembangan ekonomi desa dengan model klaster yang berpedoman pada koridor ekonomi;

(3) Pengembangan desa/kelompok desa/kampung secara tematik yang dilakukan melalui penataan dan pengembangan kawasan berbasis potensi lokal yang memiliki tema atau ikon tertentu dan unik serta dinamis;

(4) Pembangunan prasarana dan sarana desa secara merata dan terpadu terutama perumahan, air bersih, listrik, transportasi dan komunikasi;

(5) Penguatan solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat desa;

(6) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Ile Ape Timur pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel.6.13
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Ile Ape Timur
Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Menurunkan angka kemiskinan 2. Menurunkan angka pengangguran	Mempercepat pengembangan ekonomi desa	(1) Peningkatan produksi komoditas unggulan perikanan dengan Desa Lemau-Desa Lamatokan, Desa Watodiri sebagai titik pertumbuhan/pusat pengembangan yang berorientasi pada olahan sumber daya laut (olahan ikan teri dan budidaya ikan kerapu): (2) Peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian (3) Peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan (4) Peningkatan produksi komoditas unggulan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			kehutanan: (5) Pengembangan desa wisata
		Meningkatkan jangkauan dan pelayanan pendidikan	(1) Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini (2) Rehabilitasi dan pembangunan sekolah (3) Pengadaan peralatan sekolah
		Meningkatkan jangkauan dan pelayanan kesehatan	(1) Penyediaan prasarana dan sarana Posynadu (2) Rehabilitasi dan pembangunan pusksesmas dan pustu
Meningkatkan kemajuan desa	Meningkatkan akses prasarana dasar	Meningkatkan ketersediaan air bersih	(1) Pembangunan tempat penampungan air bersih
		Meningkatkan ketersediaan listrik	(1) Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan
		Mengembangkan lingkungan perumahan dan permukiman	(1) Penataan dan rehabilitasi perumahan dan permukiman
		Meningkatkan akses transportasi	Pembangunan jalan dan jembatan desa
Meningkatkan solidaritas dan ketahan sosial masyarakat	Menciptakan gerakan dan semangat semangat membangun desa	Menjaga dan melaksanakan nilai-nilai budaya masyarakat lokal atau adat	(1) Rehabilitasi dan pembangunan balai budaya (2) Pengadaan pertunjukan seni dan budaya (3) Penyelenggaraan festival budaya
		Membangun kerjasama dan kegotoroyongan	Pelaksanaan kegiatan masyarakat secara bersama

6.2.5 Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Lebatukan

Kecamatan Lebatukan terdiri dari 17 Desa: Lamatuka, Baopana, Merdeka, Hadakewa, Lerahinga, Waienga, Tapobaran, Dikesare, Lamadale, Lewoeleng, Lodotodokowa, Serangorang, Balurebong, Lamalela, Tapolangu, Banitobo, dan Atakowa. Sebagian desar desa termasuk daerah pesisir atau pantai disertai dengan padang rumput.

Luas wilayah Kecamatan Lebatukan adalah 241,90 km^2 dengan jumlah penduduk Kecamatan Lebatukan pada tahun 2015 tercatat sebesar 9.024 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 37 jiwa per km^2. Sebagian besar penduduk mata pencaharian adalah pertanian palawija dan perikanan. Hasil produksi utama Kecamatan Lebatukan adalah jagung, padi ladang, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, jambu mete, dan kelapa. Hasil perikanan utama adalah ikan laut. Selain itu, peternakan yang dikembangkan adalah babi, ayam buras, ayam ras, kambing, sapi, domba, bebek, kuda dan domba. Potensi Pariwisata Kecamatan Lebatukan adalah wisata bahari dan atraksi seni.

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan, tingginya kemiskinan, terbatasnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, kurangnya prasarana transportasi, terbatasnya air bersih dan sanitasi, terbatasnya prasarana perumahan dan permukiman, kurangnya jaringan listrik dan telekomunikasi dan informasi; serta meningkatnya kerusakan lingkungan.

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Lebatukan pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

(1) Perluasan jangkauan dan mutu pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan;

(2) Pengembangan ekonomi desa dengan model klaster yang berpedoman pada koridor ekonomi;

(3) Pengembangan desa/kelompok desa/kampung secara tematik yang dilakukan melalui penataan dan pengembangan kawasan berbasis potensi lokal yang memiliki tema atau ikon tertentu dan unik serta dinamis;

(4) Pembangunan prasarana dan sarana desa secara merata dan terpadu terutama perumahan, air bersih, listrik, transportasi dan komunikasi;

(5) Penguatan solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat desa;

(6) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Lebatukan pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel.6.14
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Lebatukan
Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Menurunkan angka kemiskinan 2. Menurunkan angka pengangguran	Mempercepat pengembangan ekonomi desa	(1) Peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian;dengan Desa Bobu-Desa Leragere, Desa Dikesare dan desa desa lainnya sebagai simpul ketahanan pangan; (2) Peningkatan produksi komoditas unggulan perikanan diantaranya menjadikan Desa Lamatuka-Desa Hadakewa-Desa Merdeka-Desa Tapolangu-Desa Dikesare dengan desa Hadakewa sebagai titik pertumbuhan/pusat pengembangan yang berorientasi pada olahan sumber daya laut (olahan ikan teri dan budidaya ikan kerapu), Desa Merdeka sebagai simpul budidaya mutiara; (3) Peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan (4) Pengembangan Desa secara tematik di Lebatukan diantaranya; Desa Tapobaran sebagai Desa garam, Desa Hadakewa sebagai desa Ikan Teri, Desa Dikesare sebagai desa kuliner; (5) Pengembangan desa wisata; dengan Desa Tapobaran, Desa Tapolangu dan Desa Dikesare sebagai simpul wisata Bahari, wisata kuliner dan ketahanan pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan jangkauan dan pelayanan pendidikan	(1) Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini (2) Rehabilitasi dan pembangunan sekolah (3) Membangun Taman Baca di setiap desa, (4) Pengadaan peralatan sekolah.
		Meningkatkan jangkauan dan pelayanan kesehatan	(1) Penyediaan prasarana dan sarana Posynadu (2) Rehabilitasi dan pembangunan pusksesmas dan pustu
Meningkatkan kemajuan desa	Meningkatkan akses prasarana dasar	Meningkatkan ketersediaan air bersih	Pembangunan tempat penampungan air bersih
		Meningkatkan ketersediaan listrik	Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan
		Mengembangkan lingkungan perumahan dan permukiman	Penataan dan rehabilitasi perumahan dan permukiman
		Meningkatkan akses transportasi	Pembangunan jalan dan jembatan desa
Meningkatkan solidaritas dan ketahan sosial masyarakat	Menciptakan gerakan dan semangat semangat membangun desa	Menjaga dan melaksanakan nilai-nilai budaya masyarakat lokal atau adat	(1) Rehabilitasi dan pembangunan balai budaya (2) Pengadaan pertunjukan seni dan budaya (3) Penyelenggaraan festival budaya
		Membangun kerjasama dan kegotoroyongan	Pelaksanaan kegiatan masyarakat secara bersama

6.2.6 Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Nubatukan

Kecamatan Nubatukan terdiri dari 7 kelurahan dan 11 Desa : Lewoleba Barat, Lewoleba Utara, Lewoleba, Lewoleba Tengah, Lewoleba Timur, Lewoleba Selatan, Selandoro, Belobatang, Udakmelomata, Baolangu, Nubamado, Paobokol, Watokobu, Walijarang, Liteulumado, Pada, Bakalerek dan Bour. Sebagian desar desa termasuk daerah pesisir atau pantai disertai dengan padang rumput.

Luas wilayah Kecamatan Nubatukan adalah 165,64 km^2 dengan jumlah penduduk Kecamatan Nubatukan pada tahun 2015 tercatat sebesar 33.796 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 195 jiwa per km^2. Sebagian besar penduduk mata pencaharian adalah pertanian palawija dan perikanan. Hasil produksi utama Kecamatan Nubatukan adalah jagung, padi ladang, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, jambu mete, kelapa, kopi, kakao, pinang dan kapok. Hasil perikanan utama adalah ikan laut. Selain itu, peternakan yang dikembangkan adalah babi, ayam buras, ayam ras, kambing, sapi, domba, bebek, kuda dan domba. Potensi Pariwisata Kecamatan Nubatukan adalah wisata bahari dan atraksi seni.

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan, tingginya kemiskinan, terbatasnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, kurangnya prasarana transportasi, terbatasnya air bersih dan sanitasi, terbatasnya prasarana perumahan dan permukiman, kurangnya jaringan listrik dan telekomunikasi dan informasi; serta meningkatnya kerusakan lingkungan.

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Nubatukan pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

(1) Perluasan jangkauan dan mutu pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan;

(2) Pengembangan ekonomi desa dengan model klaster yang berpedoman pada koridor ekonomi;

(3) Pengembangan desa/kelompok desa/kampung secara tematik yang dilakukan melalui penataan dan pengembangan kawasan berbasis potensi lokal yang memiliki tema atau ikon tertentu dan unik serta dinamis;

(4) Pembangunan prasarana dan sarana desa secara merata dan terpadu terutama perumahan, air bersih, listrik, transportasi dan komunikasi;

(5) Penguatan solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat desa;

(6) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Nubatukan pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel.6.15
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Nubatukan
Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Menurunkan angka kemiskinan 2. Menurunkan angka pengangguran	Mempercepat pengembangan ekonomi desa	(1) Pengembangan Desa Pada-Desa Waijarang-Desa Bour, dengan Desa Waijarang sebagai titik pertumbuhan/pusat pengembangan berorientasi pada pariwisata, Desa Pada sebagai simpul industry olahan dan pariwisata, Desa Bour sebagai simpul pariwisata dan ketahanan pangan; (2) Peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian, diantaranya Desa Watokobu sebagai simpul perkebunana nenas dan ketahanan pangan; Desa Liteulumado sebagai simpul perkebunana kopi dan ketahanan pangan serta desa Udak Melomata dan Desa Paobokol sebagai simpul perkebunana dan ketahan pangan; (3) Peningkatan produksi komoditas unggulan perikanan: (4) Peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan (5) Pengembangan Desa secara tematik di Nubatukan diantaranya; Dusun Labanob di Desa watokobu sebagai desa Nnas, Desa Pada sebagai desa Industri, Kampung Nyamuk sebagai Kampung Nelayan, Taman Kota Lewoleba sebagai taman Selata (Seni Lapak Lembata): (6) Pengembangan desa wisata; diantaranya Desa Bour dan Desa Waijarang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan jangkauan dan pelayanan pendidikan	(1) Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini (2) Rehabilitasi dan pembangunan sekolah (3) Pembangunan Taman Baca (4) Pengadaan peralatan sekolah
		Meningkatkan jangkauan dan pelayanan kesehatan	(1) Penyediaan prasarana dan sarana Posynadu (2) Rehabilitasi dan pembangunan pusksesmas dan pustu
Meningkatkan kemajuan desa	Meningkatkan akses prasarana dasar	Meningkatkan ketersediaan air bersih	Pembangunan tempat penampungan air bersih
		Meningkatkan ketersediaan listrik	Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan
		Mengembangkan lingkungan perumahan dan permukiman	Penataan dan rehabilitasi perumahan dan permukiman
		Meningkatkan akses transportasi	Pembangunan jalan dan jembatan desa
Meningkatkan solidaritas dan ketahan sosial masyarakat	Menciptakan gerakan dan semangat semangat membangun desa	Menjaga dan melaksanakan nilai-nilai budaya masyarakat lokal atau adat	(1) Rehabilitasi dan pembangunan balai budaya (2) Pengadaan pertunjukan seni dan budaya (3) Penyelenggaraan festival budaya
		Membangun kerjasama dan kegotoroyongan	Pelaksanaan kegiatan masyarakat secara bersama

6.2.7 Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Omesuri

Kecamatan Omesuri terdiri dari 22 Desa: Aramengi, Balauring, Dolulolong, Hingalamamengi, Hoelea, Hoelea II, Lebewala, Leubatang, Leudanung, Leuwayang, Mahal, Mahal II, Meluwiting, Nilanapo, Normal, Peusawah, Roma, Wailolong, Walangsawah, Wowong, Normal I dan Meluwiting I. Sebagian desar desa termasuk daerah pesisir atau pantai disertai dengan padang rumput.

Luas wilayah Kecamatan Omesuri adalah 161,91 km^2 dengan jumlah penduduk Kecamatan Omesuri pada tahun 2015 tercatat sebesar 17.112 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 102 jiwa per km^2. Sebagian besar penduduk mata pencaharian adalah pertanian palawija dan perikanan. Hasil produksi utama Kecamatan Omesuri adalah jagung, padi ladang, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, jambu mete, kelapa, kopi, kakao, pinang dan kapok. Hasil perikanan utama adalah ikan laut. Selain itu, peternakan yang dikembangkan adalah babi, ayam buras, ayam ras, kambing, sapi, domba, bebek, kuda dan domba. Potensi Pariwisata Kecamatan Omesuri adalah wisata bahari dan atraksi seni.

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan, tingginya kemiskinan, terbatasnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, kurangnya prasarana transportasi, terbatasnya air bersih dan sanitasi, terbatasnya prasarana perumahan dan permukiman, kurangnya jaringan listrik dan telekomunikasi dan informasi; serta meningkatnya kerusakan lingkungan.

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Omesuri pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

(1) Perluasan jangkauan dan mutu pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan;

(2) Pengembangan ekonomi desa dengan model klaster yang berpedoman pada koridor ekonomi;

(3) Pengembangan desa/kelompok desa/kampung secara tematik yang dilakukan melalui penataan dan pengembangan kawasan berbasis potensi lokal yang memiliki tema atau ikon tertentu dan unik serta dinamis;

(4) Pembangunan prasarana dan sarana desa secara merata dan terpadu terutama perumahan, air bersih, listrik, transportasi dan komunikasi;

(5) Penguatan solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat desa;

(6) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Omesuri pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel.6.16
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Omesuri
Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Menurunkan angka kemiskinan 2. Menurunkan angka pengangguran	Mempercepat pengembangan ekonomi desa	(1) Pengembangan Desa Wailolong-Desa Balauring–Desa Hingalamengi, Desa Walangsawah-Desa Melowiting dengan Desa Balauring sebagai titik pertumbuhan/pusat pengembangan yang berorientasi pada olahan sumber daya laut dan perdagangan jasa serta pariwisata; desa Walangsawah sebagai titik pertumbuhan/pusat pengembangan yang berorientasi pada perdagangan jasa dan ketahanan pangan, Desa Wailolong sebagai simpul ketahanan pangan, Desa Hingalamengi sebagai simpul ketahanan pangan; (2) Pengembangan Desa Tematik di Omesuri diantaranya Desa Lewayang sebagai Desa Budaya; (3) Peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian (4) Peningkatan produksi komoditas unggulan perikanan: (5) Peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan; (6) Pengembangan desa wisata
		Meningkatkan jangkauan dan	(1) Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		pelayanan pendidikan	anak usia dini (2) Rehabilitasi dan pembangunan sekolah (3) Pembangunan Taman baca di setiap desa (4) Pengadaan peralatan sekolah
		Meningkatkan jangkauan dan pelayanan kesehatan	(1) Penyediaan prasarana dan sarana Posynadu (2) Rehabilitasi dan pembangunan pusksesmas dan pustu
Meningkatkan kemajuan desa	Meningkatkan akses prasarana dasar	Meningkatkan ketersediaan air bersih	Pembangunan tempat penampungan air bersih
		Meningkatkan ketersediaan listrik	Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan
		Mengembangkan lingkungan perumahan dan permukiman	Penataan dan rehabilitasi perumahan dan permukiman
		Meningkatkan akses transportasi	Pembangunan jalan dan jembatan desa
Meningkatkan solidaritas dan ketahan sosial masyarakat	Menciptakan gerakan dan semangat semangat membangun desa	Menjaga dan melaksanakan nilai-nilai budaya masyarakat lokal atau adat	(1) Rehabilitasi dan pembangunan balai budaya (2) Pengadaan pertunjukan seni dan budaya (3) Penyelenggaraan festival budaya
		Membangun kerjasama dan kegotoroyongan	Pelaksanaan kegiatan masyarakat secara bersama

6.2.8 Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Buyasuri

Kecamatan Buyasuri terdiri dari 20 Desa: Panama, Bean, Benihading, Benihading II, Atutaleng, Tubungwalang, Roho, Loyobohor, Leuburi, Tobotani, Kalikur WL, Kaohua, Umaleu, Buriwutung, Mampir, Leuwohung, Bareng, Kalikur, Rumang, dan Atu Walupang. Sebagian desar desa termasuk daerah pertanian, padang rumput dan permukiman.

Luas wilayah Kecamatan Buyasuri adalah 104,26 km^2 dengan jumlah penduduk Kecamatan Buyasuri pada tahun 2015 tercatat sebesar 19.982 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 102 jiwa per km^2. Sebagian besar penduduk mata pencaharian adalah pertanian palawija dan perikanan. Hasil produksi utama Kecamatan Buyasuri adalah jagung, padi ladang, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, jambu mete, kelapa, kopi, kakao, pinang dan kapok. Selain itu, peternakan yang dikembangkan adalah babi, ayam buras, ayam ras, kambing, sapi, domba, bebek, kuda dan domba. Potensi Pariwisata Kecamatan Buyasuri adalah wisata bahari dan atraksi seni.

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan, tingginya kemiskinan, terbatasnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, kurangnya prasarana transportasi, terbatasnya air bersih dan sanitasi, terbatasnya prasarana perumahan dan permukiman, kurangnya jaringan listrik dan telekomunikasi dan informasi; serta meningkatnya kerusakan lingkungan.

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Buyasuri pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

(1) Perluasan jangkauan dan mutu pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan;

(2) Pengembangan ekonomi desa dengan model klaster yang berpedoman pada koridor ekonomi;

(3) Pengembangan desa/kelompok desa/kampung secara tematik yang dilakukan melalui penataan dan pengembangan kawasan berbasis potensi lokal yang memiliki tema atau ikon tertentu dan unik serta dinamis;

(4) Pembangunan prasarana dan sarana desa secara merata dan terpadu terutama perumahan, air bersih, listrik, transportasi dan komunikasi;

(5) Penguatan solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat desa;

(6) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Buyasuri pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel.6.17
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Buyasuri
Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Menurunkan angka kemiskinan 2. Menurunkan angka pengangguran	Mempercepat pengembangan ekonomi desa	(1) Desa Wowong-Desa Bean-Desa Tobotani-Desa Rumang-Wairiang dengan Desa Wowong dan Desa Bean sebagai titik pertumbuhan/pusat pengembangan yang berorientasi pada pariwisata bahari dan ketahanan pangan, Desa Tobotani sebagai simpul olahan industri garam, peternakan dan ketahanan pangan, Desa Rumang sebagai simpul ketahanan pangan dan Wairiang sebagai simpul perdagangan dan jasa serta Tanjung Leur sebagai simpul olahan industri garam dan pariwisata bahari; (2) Pengembangan Desa Tematik diantaranya; Desa Tobotani sebagai Desa ternak Kambing;Desa Atanila sebagai Desa Rusa; (3) Peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian (4) Peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan (5) Pengembangan desa wisata
		Meningkatkan jangkauan dan pelayanan pendidikan	(1) Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini (2) Rehabilitasi dan pembangunan sekolah (3) Pembangunan Taman Baca di setiap desa (4) Pengadaan peralatan sekolah
		Meningkatkan jangkauan dan pelayanan kesehatan	(1) Penyediaan prasarana dan sarana Posynadu (2) Rehabilitasi dan pembangunan pusksesmas dan pustu (3)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kemajuan desa	Meningkatkan akses prasarana dasar	Meningkatkan ketersediaan air bersih	Pembangunan tempat penampungan air bersih
		Meningkatkan ketersediaan listrik	Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan
		Mengembangkan lingkungan perumahan dan permukiman	Penataan dan rehabilitasi perumahan dan permukiman
		Meningkatkan akses transportasi	Pembangunan jalan dan jembatan desa
Meningkatkan solidaritas dan ketahan sosial masyarakat	Menciptakan gerakan dan semangat semangat membangun desa	Menjaga dan melaksanakan nilai-nilai budaya masyarakat lokal atau adat	(1) Rehabilitasi dan pembangunan balai budaya (2) Pengadaan pertunjukan seni dan budaya (3) Penyelenggaraan festival budaya
		Membangun kerjasama dan kegotoroyongan	Pelaksanaan kegiatan masyarakat secara bersama

6.2.9 Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Atadei

Kecamatan Atadei terdiri dari 15 Desa: Lusilame, Dulir, Lerek, Atakore, Nubahaeraka, Lebaata, Ile Kerbau, Doripewut, Ile Kimok, Tubuk Rajan, Katakeja, Nuba Atalojo, Nogodoni Lewogroma, Nubaboli. Desa yang sebagian besar berada di wilayah Lereng/Perbukitan.

Luas wilayah Kecamatan Atadei adalah 150,42 km^2. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 tercatat sebesar 7.408 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 52 jiwa per km^2. Desa dengan jumlah penduduk terbesar adalah Desa Ile Kimok. Sebagian besar penduduk mata pencaharian adalah petani padi dan palawija. Hasil produksi utama Kecamatan Atadei adalah padi ladang, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, pinang. Selain itu, peternakan yang dikembangkan adalah babi, ayam buras, ayam ras, kambing, sapi, domba, bebek, kuda. Potensi Pariwisata Kecamatan Atadei adalah wisata Alam (Panas Bumi) dan atraksi seni.

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah rendahnya kesejahteraan petani, tingginya kemiskinan, terbatasnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, kurangnya prasarana transportasi, terbatasnya air bersih dan sanitasi, terbatasnya prasarana perumahan dan permukiman, kurangnya jaringan listrik dan telekomunikasi dan informasi; serta meningkatnya kerusakan lingkungan.

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Atadei pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

(1) Perluasan jangkauan dan mutu pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan;

(2) Pengembangan ekonomi desa dengan model klaster yang berpedoman pada koridor ekonomi;

(3) Pengembangan desa/kelompok desa/kampung secara tematik yang dilakukan melalui penataan dan pengembangan kawasan berbasis potensi lokal yang memiliki tema atau ikon tertentu dan unik serta dinamis;

(4) Pembangunan prasarana dan sarana desa secara merata dan terpadu terutama perumahan, air bersih, listrik, transportasi dan komunikasi;

(5) Penguatan solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat desa;

(6) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Atadei pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel.6.18
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Atadei
Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Menurunkan angka kemiskinan 2. Menurunkan angka pengangguran	Mempercepat pengembangan ekonomi desa	(1) Desa Lusilame-Desa Atakore-Desa Katakeja-Desa Baolangu-dengan Desa Katakeja sebagai titik pertumbuhan/pusat pengembangan olahan pertanian yang berorientasi pada ketahanan pangan .Desa Lusilame dan Desa Atakore sebagai simpul pariwisata geopark dan budaya; (2) Pengembangan Desa Tematik di Atadei;Desa-desa Atadei sebagai desa Advokad; (3) peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian (4) Peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan (5) Peningkatan produksi komoditas unggulan kehutanan (6) Pengembangan desa wisata
		Meningkatkan jangkauan dan pelayanan pendidikan	(1) Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini (2) Rehabilitasi dan pembangunan sekolah (3) Pembangunan Taman Baca di setiap desa; (4) Pengadaan peralatan sekolah
		Meningkatkan jangkauan dan pelayanan kesehatan	(1) Penyediaan prasarana dan sarana Posynadu (2) Rehabilitasi dan pembangunan pusksesmas dan pustu
Meningkatkan kemajuan desa	Meningkatkan akses prasarana dasar	Meningkatkan ketersediaan air bersih	Pembangunan tempat penampungan air bersih
		Meningkatkan ketersediaan listrik	Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan
		Mengembangkan lingkungan perumahan dan permukiman	Penataan dan rehabilitasi perumahan dan permukiman
		Meningkatkan akses transportasi	Pembangunan jalan dan jembatan desa
Meningkatkan solidaritas dan ketahan sosial masyarakat	Menciptakan gerakan dan semangat semangat membangun desa	Menjaga dan melaksanakan nilai-nilai budaya masyarakat lokal atau adat	(1) Rehabilitasi dan pembangunan balai budaya (2) Pengadaan pertunjukan seni dan budaya (3) Penyelenggaraan festival budaya
		Membangun kerjasama dan kegotoroyongan	Pelaksanaan kegiatan masyarakat secara bersama

6.3. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.3.1. Kebijakan Umum

Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah pada bagian ini menjadi bagian penting untuk mencapai sasaran pembangunan daerah Tahun 2017 – 2022 dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan umum yang dipaparkan pada bagian ini menjembatani keterhubungan antara strategi pencapaian indikator sasaran dan program pembangunan daerah dengan memperhatikan perspektif layanan, proses internal, kelembagaan dan perspektif keuangan. Berangkat dari rumusan kebijakan umum, kemudian ditetapkan program pembangunan daerah yang menjadi prioritas utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata untuk lima tahun ke depan. Kebijakan umum ini juga yang kemudian digunakan sebagai arah dan pedoman bagi OPD dan lintas OPD dalam merumuskan kebijakan guna pencapaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 diarahkan untuk :

6.3.1.1. MISI 1 : **Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, serta Optimalisasi Peran Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan Daerah dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat;**

Diarahkan pada :

1. **Prioritas Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan,** sebagai berikut:
   1) Perwujudan Lembata sebagai Kabupaten literasi,
   2) Pelaksanaan gerakan pasar baca #Saya Baca melalui bazar buku, pembagian buku gratis, lomba bercerita, sosialisasi gerakan sadar baca dan lomba berpidato.
   3) Pembangunan taman bacaan di 144 desa dan taman bacaan di 7 kelurahan, serta taman bacaan kelompok-kelompok komunitas lainnya
   4) Pengadaan mobil bacaan bergerak di Kota Lewoleba.
   5) Perluasan kerjasama Dinas PKO dan Kearsipan dan Perpustakaan terkait Kabupaten Literasi,
   6) Penyusunan peta kebutuhan infrastruktur pendidikan berdasarkan matriks rasio kebutuhan untuk mengoptimalkan belanja pendidikan,
   7) Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru,
   8) Pembangunan gedung olahraga,
   9) Pengembangan pendidikan vokasi melalui kerjasama dengan pihak ketiga pada jenjang SMK
   10) Pembangunan gedung perpustakaan dan kearsipan.
   11) Pengembangan kegiatan dan prestasi olahraga dan budaya #Gala Desa.
   12) Penyusunan peta kebutuhan infrastruktur kesehatan berdasarkan matriks rasio kebutuhan untuk mengoptimalkan belanja kesehatan,
   13) Peningkatan pelayanan kesehatan primer klinik primer desa berbasis masyarakat melalui #*Good* Pagi,
   14) Peningkatan peran Puskesmas Balauring menjadi rumah sakit pratama,
   15) Peningkatan kunjungan dokter dan paramedis ke rumah-rumah warga secara periodik untuk pencegahan, pengobatan dan penyuluhan penyakit, serta pengembangan tindakan preventif, kuratif dan promotif dalam pelayanan kesehatan,
   16) Peningkatan kunjungan dokter spesialis ke puskesmas-puskesmas untuk pendekatan pelayanan spesialis ke masyarakat,
   17) Pembentukan Tim SABER (Sapu Bersih) malaria #Z-malaria.
   18) Peningkatan kelas rumah sakit menjadi tipe C,

19) Peningkatan pelayanan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular; dan
20) Penyelenggaraan promosi hidup sehat secara berkelanjutan.

2. Prioritas Pembangunan Sosial, Hukum dan HAM, sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Kemah Bhakti dan Bulan Pancasila #Saya Anak Pancasila,
2) Pembentukan organisasi Forum Inovasi Anak Lembata (FIAL),
3) Pembentukan kelompok sadar hukum berbasis masyarakat (desa sadar hukum dan desa perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat/PATBM) dan perwujudan masyarakat yang Patuh, Taat, Tertib (#PTT151) di 144 desa dan 7 kelurahan, #PTT 151.

3. Prioritas Peningkatan Peran Pemuda, Perempuan dan Anak, sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Kemah Bhakti dan Bulan Pancasila #Saya Anak Pancasila melalui Festival Inovasi Pemuda Lembata,
2) Pembentukan organisasi Forum Inovasi Anak Lembata (FIAL) yang terdiri dari Komunitas SENI "SELATA" (Seni Lapak Lembata), Sahabat Tangguh Zero Korban Bencana dan Sahabat Bersih;
3) Pemberdayaan ekonomi perempuan #Ibu Ekonomi
4) Pelaksanaan Kerjasama (MoU) dengan lembaga keuangan untuk modal usaha #Ibu Ekonomi;
5) Pelaksanaan pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja dan bina keluarga remaja generasi berencana (GenRe), serta Bina Keluarga Balita holistik integratif dan pembentukan Kampung KB di 9 desa tertinggal,
6) Penegakan, pemenuhan, dan promosi hak-hak perempuan dan anak secara berkelanjutan;
7) Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
8) Penyiapan Pos Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (PPTPA).

6.3.1.2. MISI 2 : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur, Transportasi, Air Bersih, Energi, Komunikasi dan Penataan Kota, diarahkan pada :

1. Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis, sebagai berikut :

1) Peningkatan dan pembangunan ruas jalan Hingalamamegi -Kalikur - Wairiang -Tobotani,
2) Peningkatan ruas jalan Hingalamengi -Aramengi- Panama-Wairiang,
3) Peningkatan dan pembangunan ruas jalan Pada - Waijarang - Mingar - Lamalera - Labala (Segmen Waijarang - Mingar), pada koridor ekonomi I,
4) Peningkatan dan pembangunan jembatan Waima pada koridor ekonomi I,
5) Peningkatan ruas jalan Tapobaran - Lodoblolong - Nilanapo - Bean - Tobotani (Segmen Nilanapo-Tobotani), pada koridor ekonomi II,
6) Peningkatan dan pembangunan ruas jalan Waowala - Kawah Gunung Ile Lewotolok,
7) Peningkatan dan pembangunan ruas jalan Sp Kwakat - Wolor Pass/ Bukit Cinta,
8) Peningkatan dan pembangunan ruas jalan Sp Watomiten - Bukit Doa,
9) Peningkatan dan pembangunan ruas jalan Lewoleba-Kalikasa.
10) Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dalam kota Lewoleba,
11) Pembangunan ruas jalan Baobolak -Tanjung Naga -Watanlolo-Mingar,

12) Pembangunan ruas jalan lingkar selatan Labala – Alap Atadei – Dulir - Waiteba –Letu – Bobu – Wade – SP. Nilanapo,
13) Pembangunan Jalan Ring Road Selatan Sp SMA 2 - GOR – Onga,
14) Pembangunan dan peningkatan jalan menuju wisata mangrove Pantai Mutiara Waijarang
15) Pembangunan dan penataan jeti pejalan kaki dan fasilitas perhubungan laut dalam kawasan wisata mangrove Pantai Mutiara Waijarang
16) Pembangunan ruas jalan Tanjung Tuak - Palilolon – Waowala,
17) Peningkatan dan pembangunan ruas jalan kabupaten dan non status,
18) Pembangunan talud pengaman pantai berbasis pariwisata di Desa Balauring dan Kota Lewoleba,
19) Pembangunan talud pengaman pantai,
20) Perencanaan dan pembangunan kolam retensi/polder banjir dan drainase kota di Kota Lewoleba,
21) Penyiapan master plan dan DED *Water Front City* kawasan pesisir utara Lewoleba dan Desa Balauring,
22) Pembangunan, rehabililitasi dan rekonstruksi, serta restorasi infrastruktur yang berpotensi menimbulkan dampak bencana dan tanggap darurat, serta pasca bencana,
23) Optimalisasi, peningkatan dan pembangunan infrastruktur irigasi pada Daerah Irigasi Wainili,
24) Pencetakan lahan sawah di Daerah Irigasi Wainili,
25) Melakukan kajian, perencanaan dan pembangunan Daerah Irigasi Letu di Desa Banitobo Kecamatan Lebatukan,
26) Optimalisasi peningkatan dan pembangunan Daerah Irigasi dan pembangunan embung muara/waduk muara (estuari),
27) Pengadaan unit solarcell untuk penerangan jalan dan obyek wisata serta penguatan listrik di Wailain,
28) Perluasan dan pembangunan jaringan air minum (pipanisasi),
29) Perluasan dan pembangunan jaringan listrik, dan jaringan distribusi dan interkoneksi dengan PLN,
30) Program pengembangan dan perluasan infrastruktur jaringan komunikasi,
31) Revitalisasi taman kota, pengembangan, pembangunan dan penataaan Pasar Seni Lusikawak dan panggung pertunjukan seni Lusikawak, ruang publik kota, dan pembangunan museum /kearsipan kota,
32) Pembangunan simbol perjuangan daerah,
33) Pemetaan/pembuatan landskap tata pembangunan #Kota Humanis di Kota Lewoleba dan pembangunan TPS bersih di Kota Lewoleba (*clean depo transfer*),
34) Mempercepat peningkatan dan pembangunan infrastrurktur strategis (Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di Kota Lewoleba – Pembangunan dan peningkatan infrastrukutr jalan pada daerah pengembangan pariwisata dan pusat-pusat produksi serta wilayah pengembangan strategis dan daerah cepat tumbuh – pembangunan jalan dan jembatan, infrastruktur pertanian, transportasi, air bersih, enegeri, komunikasi dan pengadaan sarana dan prasarana dan fasilitas umum kepariwisataan dan fasilitas sarpras publik lainnya) melalui skema

pembiayaan *Availability Payment* tahun jamak, tahun tunggal dan *sharing budgeting*; penataan kota Lewoleba, pembangunan drainase kota dan penyediaan polder banjir serta penyediaan lahan dan pembangunan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sarpras dan fasilitas pemerintahan, pemeliharaan dan perawatan infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas publik dan pemerintahan lainnya;

35) Mempercepat peningkatan dan pembangunan infrastruktur strategis (jalan dan jembatan, infrastruktur pertanian), Transportasi (pelabuhan laut, pelabuhan ferry, Bandar udara), air bersih, energy, komunikasi dan penataan kota dan PSU melalui skema biaya tahun tunggal, tahun jamak, *availability payment* dan *sharing budgeting* dengan pola *long* segmen serta ketersediaan anggaran untuk biaya pemeliharaan dan perawatan infrastruktur jalan dan fasilitas pemerintahan lainnya;

36) Pembangunan embung muara*/estuary* di Kali Waima untuk irigasi di daerah pesisir (hilirisasi pertanian) dan untuk air baku dengan sasaran Desa Bour, Desa Wuakerong, Desa Duawutung, Desa Riabao, Desa Babokerong dan Desa Baobolak; Pembangunan air baku Desa Lamadale dan Wade, infrastruktur irigasi yang fokus pada Wainili, Letu, Riang Dua, Weilolong, Waikomo dan daerah irigasi lainnya serta pencetakan lahan pertanian*;*

37) Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan perdesaan dan jalan lingkungan perkotaan, jalan antar desa, jalan menuju akses wisata, pipanisasi dan/atau perluasan jaringan air bersih serta listrik desa;

38) Melaksanakan pembangunan jety pariwisata, jety perhubungan laut, jety perikanan serta pembangunan talud pengaman pada daerah pesisir pantai dengan konstruksi sesuai dengan tingkat kerusakannya berbasis pariwisata; Rehabilitasi dan peremajaan daerah pesisir pantai serta reklamasi Pantai Balauring;

39) Melaksanakan kajian dan izin lingkungan, izin lokasi, izin pemanfaatan daerah pesisir pantai dan sumber daya laut berbasis pariwisata;

2. Prioritas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai berikut :

1) Pembangunan/perbaikan rumah layak huni melalui APBDes, APBD, APBN dan kerjasama pihak ketiga (GESER LANI),
2) Peningkatan kualitas perumahan layak huni, prasarana, sarana dan utilitas serta pembangunan rumah ibadah dan aktivitas keagamaan,
3) Pengadaan tanah untuk perluasan Bandara Wunopito, Bandara Tanjung, polder, drainase kota, kantor imigrasi, batalyon TNI, dan Brimob, kampus PT dan kantor BPJS;
4) Pembuatan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) atau Masterplan Pembangunan Perumahan Kabupaten Lembata; Melakukan Kajian dan Pembuatan Peraturan Daerah tentang Penetapan Hak Ulayat di Kabupaten Lembata;

6.3.1.3. MISI 3 : Mempercepat Pembangunan Dan Mengembangkan Sumber Daya Ekonomi Laut Dan Maritim, Serta Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Dan Pariwisata Berkelanjutan, diarahkan pada:

1. **Prioritas Konektivitas (Transportasi dan Kemaritiman),** sebagai berikut :
   1) Penyiapan studi lokasi dan pembangunan Pelabuhan Fery Hadingmanuk, Pelabuhan Peti Kemas "Kolipadan *Bay*" dan Bandara Tanjung di daerah Tuak Wutun,
   2) Penetapan kawasan pengelolaan perikanan, sumber daya laut dan kemaritiman,
   3) Pembangunan jeti pariwisata, jeti perikanan dan jeti perhubungan laut.
   4) Penataan dan pembangunan Pelabuhan Laut Lewoleba, pelabuhan laut Balauring dan pelabuhan laut Wulandoni,
   5) Pengadaan kapal penyeberangan Fery Waijarang-Deri (melalui APBN dan pihak ketiga), khusus melayani Waijarang-Deri setiap hari PP,
   6) Pengadaan rute Kapal PELNI Lewoleba-Wakatobi dan Wakatobi-Lewoleba,
   7) Pengaturan moda transportasi kota dan obyek wisata kota/*city tour* dan pengadaan angkutan kota, melalui kerjasama dengan pihak ketiga,
   8) Pengaturan transportasi antarkota dan antardesa,
   9) Pengaturan kualitas jasa kemaritiman,
   10) Pembangunan jembatan apung dan/atau jeti di Pulau Siput Awalolong.
   11) Industrialisasi perikanan, sumber daya laut dan kemaritiman.

2. **Prioritas Ketahanan Pangan (Pertanian, Peternakan dan Sumberdaya Laut),** sebagai berikut :
   1) Peningkatan produksi empat (4) komoditi utama, yaitu: jagung industri, bawang, cabe dan kacang tanah,
   2) Swasembada bawang, cabe dan jagung industri (tidak impor) melalui ekspansi lahan setiap desa 10 ha,
   3) Pengembangan komoditi holtikultura dan sayuran: cabe, kacang tanah, nanas, alpukat dan kopi untuk industri olahan,
   4) Pembagian pupuk gratis untuk petani,
   5) Peningkatan produksi sapi, kambing, babi, ayam dan pakan ternak,
   6) Peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya,
   7) Pengolahan sumberdaya laut dan pengolahan Bandeng untuk mendukung industri pengolahan perikanan,
   8) Pembangunan pelabuhan perikanan dan fasilitasnya,
   9) Pembangunan *Solar Packed Dealer* Nelayan (SPDN),
   10) Peningkatan produksi pabrik es untuk nelayan,
   11) Pengadaan tempat pendingin (*cold storage*) ikan,
   12) Pengembangan industri perikanan melalui investasi pengolahan ikan,
   13) Pembangunan laboratorium terumbu karang indah berbasis pariwisata di daerah Hukung dan sekitarnya,
   14) Optimalisasi pendapatan usaha industri pengolahan perikanan,
   15) Perlindungan Kawasan Sumberdaya Laut,
   16) Konservasi, rehabilitasi dan restorasi sumberdaya laut,
   17) Pemanfaatan mangrove dan daerah pesisir pantai sebagai obyek wisata.

3. **Prioritas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Industri Pengolahan,** diarahkan pada :
   1) Pengembangan, pembangunan dan penataan kawasan wisata yang menjadi daerah tujuan wisata serta optimalisasi obyek wisata daerah dan obyek wisata lainnya yang berorientasi pada peningkatan pendapatan;
   2) Pengembangan desa wisata;
   3) Pembangunan infrastruktur pariwisata berkelanjutan;
   4) Penyediaan sanggar atau dana stimulan untuk memacu tumbuh dan berkembangnya sanggar-sanggar seni dan budaya daerah, komunitas seni Lapak Lembata ("Selata");
   5) Penyelenggaraan lomba seni budaya tradisional dan kontemporer daerah secara berkala;
   6) Pelaksanaan promosi seni dan budaya daerah di dalam dan luar negeri.
   7) Pembangunan industri kecil berbasis keunggulan komparatif lokal dan keunggulan kompetitif yakni yang berkaitan dengan hasil-hasil sumber daya alam;
   8) Pembentukan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati yang melindungi kepentingan ekonomi rakyat;
   9) Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka menunjang usaha-usaha ekonomi rakyat;
   10) Jaminan ketersediaan pasar dan akses bagi pelaku ekonomi kerakyatan;
   11) Penyediaan modal usaha dan kemudahan akses memperoleh modal usaha.
   12) Pengembangan dan pembangunan industri perikanan pada sisi selatan jalan utama menuju Desa Waijarang,
   13) Pengembangan 450 usahawan baru/gerakan 450 usahawan.
   14) Pembangunan gedung sentra UKM dan dan Balai Latihan Kerja (Workshop),
   15) Pengembangan sektor usaha industri olahan pertanian dan perikanan,
   16) Peningkatan usaha industri olahan dan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan kerjasama dengan pihak ketiga,
   17) Pengembangan usaha garam konsumsi dan industri.

6.3.1.4. MISI 4 : Mempercepat Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan serta Meningkatkan Pasar dan Promosi Daerah Tujuan Wisata, diarahkan pada :

1. **Pengembangan , Pembangunan dan Penataan Pariwisata Berkelanjutan,** sebagai berikut:
   1) Penyelenggaraan Rally Wisata Bahari-Lembata *#Truly Heaven* –Festival Lembata dengan Puncak Event : Festival 3 Gunung (*Blue Mountains Tours*) #wonderful Lembata; Festival Nuhanera, Lamalera *whale catching*, Ekspedisi Batutara (*truly of Batutara*), Penyelenggaraan Festival Budaya Lamaholot (kerjasama Alor, Lembata, Larantuka), Ekspo dan festival Uyelewun Raya (kerjasama Lembata dan Alor-Pantar),
   2) Meningkatkan pasar dan promosi pariwisata daerah (Rally Wisata Bahari) dilakukan melalui tour inovasi daerah, tour promo dan kegiatan kepariwisataan yang bekerja sama dengan pihak ketiga, pembuatan website pariwisata dan publikasi melalui media elektronik, media masa.
   3) Pembentukan dan pengelolaan Badan Pengelola Pariwisata Lembata: Lembata *tourism board*.

4) Pembangunan sarana dan prasarana Pusat Penyelaman (*diving centre*) di wisata mangrove Desa Waijarang.

5) Pengembangan, pembangunan dan penataan wisata mangrove Pantai Mutiara Waijarang, dengan melaksanakan pembangunan akses jalan masuk serta pembangunan jety dan fasilitas lainnya serta Pengembangan Wisata kolam renang apung pulau Siput Awulolong dan daya tarik wisata lainnya yang berpotensi menjadi daerah tujuan wisata; Pengembangan pariwisata desa (*Travel Village*) #*Explore Rural Lembata* serta pipanisasi air bersih, lampunisasi pada daerah pengembangan daya tarik wisata di Desa Dikesare, di Desa Tewaowutung, Desa Lolong, Pantai Wade dan sekitaranya, Rest Area W2Pass di Desa Balauring, Pantai *Corner Love* di Desa Balauring, Wisata Pantai Tanjung Tuak di Desa Kolipadan;

6) Pengembangan, pembangunan dan penataan Wisata Wolor Pass, Pulau Gunung Batutara, Wisata Rest Area Ile Lewotolok, Wisata Ile Werung, Wisata Religi Bukit Doa Wato Miten, Wisata Pantai Selatan Utara Nuhanera, dan Wisata Kuliner Lewolein, under water Nuhanera dan sekitarnya, *Travel Fishing*, Wisata *Corner Love (Pojok Cinta) Balauring*, Wisata Kuliner Khas Uyelewunraya "Sarabe Edang dan Tambole", di Rest Area W2Pass Balauring, Wisata Pantai Wailei - Atauwua palace Tewaowutung, Lolong, Wisata Pantai Tirer, Wisata Pantai Wowong-Angarlaleng-Beang-Tanjung Leur - Wade -Bobu, Wisata Budaya dan *Heritage* Lewogolok Desa Lolong – Lamanunang – Lusilame – Leuwayang-Wakio, Wisata Pesta Kacang Lewohala-Jontona, Wisata Nale, Lamalera *Whale Catching* dan daya tarik wisata lainnya yang potensial, wisata buatan, wisata kuliner, wisata belanja; wisata budaya dan heritage lainnya, wisata sport, wisata rohani, dan lain-lain.

   Pembangunan dan penyediaan fasilitas umum, sarana dan prasarana wisata, serta pembangunan sarpras industri pariwisata untuk memicu dan memacu investasi;

7) Peningkatan pasar dan promosi pariwisata melalui peningkatan jaringan/*network,* melalui media online, media elektronik, media cetak, website, pameran dan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam upaya publikasi kegiatan dan promosi pariwisata serta tour promo Dalam dan Luar Negeri;

   Melaksanakan kegiatan Rally Wisata Bahari-Lembata #*Truly Heaven*-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 Gunung (*Blue Mountains Tours*), dan berbagai aktivitas dalam semangat *One Product - Ten Activity – Hundred Reward*, Festival Lamaholot, Expo Budaya Uyelewun Raya, Pengembangan Atraksi, Penguatan Struktur Budaya dan Gala Desa;

8) Pengembangan, penataan pariwisata kolam renang apung Pulau Siput Awalolong serta fasilitas dan sarana prasarana lainnya,

9) Pengembangan, penataan dan pembangunan pariwisata mangrove Pantai Mutiara di Desa Waijarang serta fasilitas dan sarana prasarana lainnya,

10) Pembangunan rumah penangkaran penyu di pesisir pantai Lembata,

11) Pembangunan rumah ibadah (kapela dan mushola) di kawasan wisata mangrove Pantai Mutiara Desa Waijarang (melalui dana DAK)

12) Pengembangan kawasan industri pariwisata pada sisi utara jalan utama Desa Waijarang,

13) Pengembangan kawasan wisata di pesisir utara Tanjung Tuak,

14) Pengembangan, pembangunan dan penataan wisata budaya Lewohala di Desa Jontona, Lusilame, Lamanunang, wisata budaya Puang Kemer di Desa Leuwayang, Waqkio di Desa Panama, dan budaya Aher di Desa Atakore, Wisata Budaya Lewogolok Desa Lolong, *Heritage Tours*;

15) Pengembangan dan pembangunan wisata alam, wisata religi, wisata kuliner, wisata sport, wisata bahari, wisata minat khusus, wisata geopark dan wisata buatan, yang ramah lingkungan;

16) Pelestarian alat musik tradisional Tatong Uyelewun Lembata dan musik tradisional lainnya;

6.3.1.5. MISI 5 : Meningkatkan Pendapatan dan Kerja Sama Daerah serta Mengembangkan Ekonomi Wilayah dan Pembangunan Perdesaan Berbasis Industri Berkelanjutan, diarahkan pada :

Prioritas Peningkatan pendapatan, kerjasama daerah, pengembangan ekonomi wilayah dan pembangunan perdesaan, yaitu :

1) Pembuatan dan pelaksanaan *roadmap* potensi pendapatan daerah;
2) Optimalisasi pendapatan berupa *redesign* kebijakan;
3) Optimalisasi dan revitalisasi Pasar Pada menjadi pasar induk, Pasar Lamahora, Pasar TPI dan pasar desa;
4) Pembangunan SPBU;
5) Pembangunan pabrik air mineral (investasi);
6) Optimalisasi pengolahan dan pengembangan garam industri di Desa Tapobaran dan daerah potensial lainnya;
7) Meningkatkan penguatan pembangunan perikanan, sumber daya laut dan kemaritiman serta pertanian dan pariwisata sebagai sumber utama peningkatan pendapatan daerah;
8) Meningkatkan produksi dan nilai tambah ekonomi untuk peningkatan pendapatan dari sektorperikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata serta perluasan jaringan pasar;
   Optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif melalui pengembangan destinasi dan daya tarik wisata potensial serta usaha ekonomi kreatif;
   Optimalisasi pendapatan untuk peningkatan PAD;
9) Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur dan masyarakat desa melalui diklat, bimtek dan tour inovasi, dan taman bacaan/perpustakaan desa;
10) Pengawasan dan pendampingan pengelolaan dana desa dalam perencanaan penganggaran, serta implementasi secara transparan dan bertanggungjawab;
11) Penegasan dan pengesahan batas desa;
12) Rencana pengembangan wilayah/kawasan sebagai daerah cepat tumbuh pada Koridor Ekonomi I dan Koridor Ekonomi II;
13) Pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi dan keunggulan desa model cluster-tematik;
14) Percepatan pembangunan infrastruktur jalan desa, air minum desa (pipanisasi) dan listrik desa (lampunisasi) untuk meningkatkan aktivitas ekonomi desa;
15) Membuka dan Meningkatkan Infrastruktur Jalan pada Pusat-pusat Produksi untuk Distribusi Barang dan Mobilitas Orang melalui Jalan Usaha Tani;

Aksesibilitas Infratruktur Jalan Menuju Daya Tarik Wisata Desa (*Travel Village*) *#Explore Rural Lembata*, Jalan Menuju Wisata Budaya, Jalan Menuju *Heritage Tourism*; Membuka dan Meningkatkan Infrastruktur Jalan Strategis Daerah untuk aksesibilitas dan daya saing yang terintegrasi dalam Pengembangan Wilayah Strategis yakni Jalan Lingkar Tanjung Baja, Jalan Lingkar Balauring-Lohu-Dolu, Jalan Lamadale-Weilolong, Jalan Lingkar Tanjung Tuak, Jalan Lingkar Tanjung Naga, Jalan Simpang Nilanapo-Wade-Bobu-Lamalela-Banitobo-Hadakewa, Jalan Simpang Puskesmas Balauring-Puakoyong-Meluwiting, Jalan Simpang Swaralaleng-Puskesmas Balauring, Jalan Simpang Meru-Dolu-Hingalamamengi, Jalan dari Mahal II-Angarlaleng; Aksesibilitas Jalan Pariwisata Menuju Rest Area Ile Lewotolok, Jalan Menuju Ile Werung, Jalan Menuju Gunung Uyelewun, Jalan Menuju Kawasan Wisata Pantai Wailei – Atawua *Palace* - *Stone Garden* Tewaowutung, Lolong dan Sekitarnya;

16) Pembangunan infrastruktur untuk penguatan ekonomi desa melaui P3ED #Lembata Tersenyum 2.0 dengan model klaster-tematik;
17) Pemberdayaan masyarakat untuk membangun infrastruktur dan pengembangan ekonomi desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
18) Pemberdayaan dan pemantapan potensi lahan desa untuk menjadi produk unggulan desa berbasis diversifikasi produk berkelanjutan dan tematik sebagai icon desa;
19) Penyiapan lahan untuk produksi bawang dan cabe 10 ha setiap desa melalui gerakan swasembada cabe dan bawang #t-Cabang;
20) Optimalisasi lahan pertanian kota untuk mendukung target swasembada cabe dan bawang;
21) Gerakan harmonisasi desa 2.0 #DESA PANCASILA.

6.3.1.6. MISI 6 : Menata dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Berbasis Teknologi Informasi serta Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, diarahkan pada :

1. Prioritas Penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN Berbasis Teknologi Informasi, yaitu :

1) Pengadaan pusat data, informasi dan pengetahuan berbasis sistem informasi (website pemda),
2) Restrukturisasi dan reorganisasi organisasi pemerintah sesuai dengan kebutuhan daerah,
3) Restrukturisasi ASN sesuai dengan kompetensi dalam merit system berdasarkan Undang-undang ASN,
4) Rasionalisasi KSO dan rekruitment Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atas dasar analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan rekomendasi BPK,
5) Pengembangan e-*Government* (e-*Planning* dan e-*Budgeting*, dan aplikasi terkait pelayanan pemerintahan),
6) Optimalisasi Teknologi Informasi (TI), kerjasama dengan pihak ketiga pembangunan BTS untuk peningkatan jaringan telekomunikasi,
7) Pengembangan kerjasama dengan media memuat informasi pembangunan daerah;

8) Peningkatan kualitas SDM ASN dan peningkatan kulaitas pelayanan publik.
9) Peningkatan kapasitas dan peran APIP.

6.3.2. Tahapan Pembangunan

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kabupaten Lembata 2017-2022 dibagi dalam tahapan pembangunan setiap tahun untuk menjaga percepatan (akselerasi) pembangunan dan mendorong perubahan (transformasi) pembangunan bagi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang (2017-2022).

6.3.2.1 Tahapan Pembangunan Tahun 2017

Tahapan pembangunan Tahun 2017 merupakan tahapan pembangunan yang menjadi pondasi dan landasan bagi rencana aksi percepatan (akselerasi) dan transformasi (pembaharuan) melalui terobosan inovasi kebijakan dalam skema rantai ekonomi Lembata 2.0 yang fokus pada peningkatan pendapatan untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan di tahun 2017 adalah:

1. Menetapkan RPJMD, RENSTRA SKPD, RPJMDesa 2017-2022;
2. Pembentukan FIAL Saya Anak Pancasila yang terdiri dari Komunitas Seni @Selata@ (Seni Lapak Lembata), Genre, Sahabat Tangguh Zero Korban Bencana dan Tourism Board;
3. Deklarasi menuju Kabupaten Literasi Pasar Baca #Saya Baca;
4. Melaksanakan Program Pendekatan Pelayanan Kesehatan dengan program klinik primer desa berbasis masyarakat melalui gerakan #*good* pagi serta pendekatan pelayanan kesehatan melalui kunjungan dokter spesialis serta pembentukan tim zaber malaria #z-malaria untuk peningkatan pelayanan preventif;
5. Membuat *road map* dan penyusunan rencana aksi program prioritas sesuai dengan prioritas kebijakan cincin ekonomi secara konsisten dan pembentukan lembaga fungsional perencanaan untuk percepatan pembangunan daerah. Kebijakan cincin terdiri dari :
   1) Cincin Pertanian yang fokus pada Produksi dan Distribusi yang terdiri dari :
      - Pengembangan Komoditas Unggulan berbasis Industri;
      - Industrialisasi Pertanian dan Peningkatan Daya Saing;
      - Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Pertanian dan Transportasi;
      - Ekspansi Lahan Pertanian;
      - Investasi dan Pasar Lembaga Keuangan
      - Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan SDM;
   2) Cincin Kelautan, Perikanan dan Kemaritiman yang fokus pada Industrialisasi dan Pengelolaan Ekonomi Laut, Perikanan dan Kemaritiman serta Pengembangan Sektor Usaha Kelautan, Perikanan dan Kemaritiman berbasis Industri dan Pariwisata, yang terdiri dari :
      - Pengembangan dan Pembangunan Industri Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Kemaritiman;
      - Peningkatan Produksi dan Budidaya Perikanan, Sumber Daya Laut dan Kemaritiman;
      - Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Laut Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
      - Pembangunan Infrastruktur Perikanan, Sumber Daya Laut dan Kemaritiman;
      - Optimalisasi Pendapatan;
   3) Cincin Pariwisata yang Fokus pada Rally Wisata Bahari-Lembata *#Truly Heaven* – Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 Gunung; Peningkatan Pasar

dan Promosi serta Pengembangan Pembangunan dan Penataan Destinasi, yang terdiri dari :

- Pengembangan Destinasi;
- Peningkatan Pasar dan Promosi;
- Industrialisasi Pariwisata;
- Pembangunan Infrastruktur dan Akses Transportasi Komunikasi;
- Pengembangan Kelembagaan;

4) Cincin Industri dan Ekonomi Kreatif yang Fokus pada Industrialisasi Pengembangan Industri, yang terdiri dari :
   - Pengembangan Industrialisasi;
   - Pengembangan UKM dan Wirausaha;
   - Pembangunan Infrastruktur, Industri dan Investasi;
   - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM;
5) Cincin Pemberdayaan Ekonomi Umat Basis, yang Fokus pada #IBU EKONOMI, yang terdiri dari :
   - Penguatan Infrastruktur dan Pengembangan Kemitraan Usaha;
   - Permodalan dan Sumber Pendanaan;
   - Pengembangan Kelembagaan dan Penguatan Kapasitas SDM;
6) Cincin Keuangan Mikro, yang Fokus pada Penguatan Infrastruktur Keuangan Mikro, yang terdiri dari :
   - Pengembangan Kemitraan Usaha dan Kredit Mikro;
   - Penguatan Infrastruktur Keuangan;
   - Pengembangan Kelembagaan dan Penguatan Kapasitas Usaha.

6. Melaksanakan Harmonisasi Kebijakan dan Target Pendapatan;
7. Melaksanakan kajian pendirian sentra UKM;
8. Optimalisasi pemanfaatan taman kota melalui penataan dan pembangunan sarana dan fasilitas berupa *free wi-fi,* lapak dan fasilitas lainnya untuk dijadikan taman tematik;
9. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis (jalan dan jembatan, inftastruktur pertanian), transportasi (pelabuhan laut, pelabuhan feri, bandar udara), air bersih, energy, komunikasi dan penataan kota lewoleba;
10. Melaksanakan kegiatan dan perbaikan regulasi untuk memacu investasi;
11. Melaksanakan kajian pemekaran desa, kelurahan dan kecamatan;
12. Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja, job fit, lelang jabatan, dan rasionalisasi KSO dalam rangka restrukturisasi dan reorganisasi penyelenggaraan pemerintahan serta menata dan mengembangkan SDM ASN dan peningkatan kinerja pemerintah daerah serta perbaikan pelayanan publik;
13. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program prioritas sesuai dengan inovasi daerah dan pengelompokan serta spesifikasi cluster-tematik desa yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
14. Mengembangkan manajemen berbasis informasi teknologi melalui pembangunan Studio e-Government, kerjasama IT yang berorientasi kinerja melalui revolusi kerja APIIKKK serta peningkatan kinerja pemerintah daerah serta perbaikan pelayanan publik ;
15. Meningkatkan kualitas hidup manusia dengan mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan instrumen pendukung pendidikan dan kesehatan berupa pengadaan

buku bacaan dan kelengkapan laboratorium serta alat kesehatan, peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga pendidikan dan kesehatan, peningkatan kapasitas inovasi masyarakat;

16. Memperkuat peran pemerintah kecamatan sebagai koordinator dalam mengkoordinir desa cepat tumbuh serta peran kepala SKPD sebagai pembina dan pengelola desa cepat tumbuh melalui cluster-tematik desa;
17. Pembuatan kajian profil dan potensi desa untuk pengelompokan cluster desa dan klasifikasi desa tematik;
18. Optimalisasi dan penguatan Struktur Budaya melalui #GALA DESA;
19. Optimalisasi pendapatan dan meningkatkan kerjasama daerah serta perluasan pasar kreatif dan jaringan usaha untuk memacu investasi;

6.3.2.2 Tahapan Pembangunan Tahun 2018

Tahap pembangunan Tahun 2018 diarahkan untuk memperkuat landasan bagi percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) serta pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan dalam skema RANTAI EKONOMI LEMBATA 2.0 :

1. Melaksanakan program prioritas sesuai dengan inovasi daerah dan keberlanjutan program prioritas kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan perdesaan;
2. Melaksanakan Rencana Aksi Program Prioritas Cincin-Cincin Ekonomi yang terdiri dari:
   1) Cincin Pertanian yang fokus pada Produksi dan Distribusi yang terdiri dari :
      - Pengembangan Komoditas Unggulan berbasis Industri;
      - Industrialisasi Pertanian dan Peningkatan Daya Saing;
      - Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Pertanian dan Transportasi;
      - Ekspansi Lahan Pertanian;
      - Investasi dan Pasar Lembaga Keuangan
      - Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan SDM;
   2) Cincin Kelautan, Perikanan dan Kemaritiman yang fokus pada Industrialisasi dan Pengelolaan Ekonomi Laut, Perikanan dan Kemaritiman serta Pengembangan Sektor Usaha Kelautan, Perikanan dan Kemaritiman berbasis Industri dan Pariwisata, yang terdiri dari :
      - Pengembangan dan Pembangunan Industri Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Kemaritiman;
      - Peningkatan Produksi dan Budidaya Perikanan, Sumber Daya Laut dan Kemaritiman;
      - Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Laut Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
      - Pembangunan Infrastruktur Perikanan, Sumber Daya Laut dan Kemaritiman;
      - Optimalisasi Pendapatan;
   3) Cincin Pariwisata yang Fokus pada peningkatan pasar dan promosi, pengembangan destinasi, serta industrialisasi dan investasi melalui *Rally* Wisata Bahari – Lembata *#Truly Heaven* –Festival Lembata, dengan Puncak Event : Festival 3 Gunung (*Blue Mountains Tours*); Peningkatan Pasar dan Promosi serta Pengembangan Pembangunan dan Penataan Destinasi, yang terdiri dari :
      - Pengembangan Destinasi;
      - Peningkatan Pasar dan Promosi;
      - Industrialisasi Pariwisata dan Invetasi;

- Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Akses Transformasi Informasi;
- Pengembangan Kelembagaan dan Penguatan Struktur Budaya;

4) Cincin Industri dan Ekonomi Kreatif yang Fokus pada Industrialisasi Pengembangan Industri, yang terdiri dari :
   - Pengembangan Industrialisasi;
   - Pengembangan UKM dan Wirausaha;
   - Pembangunan Infrastruktur, Industri dan Investasi;
   - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM;
5) Cincin Pemberdayaan Ekonomi Umat Basis, yang Fokus pada #IBU EKONOMI, yang terdiri dari :
   - Penguatan Infrastruktur dan Pengembangan Kemitraan Usaha;
   - Permodalan dan Sumber Pendanaan;
   - Pengembangan Kelembagaan dan Penguatan Kapasitas SDM;
6) Cincin Keuangan Mikro, yang Fokus pada Penguatan Infrastruktur Keuangan Mikro, yang terdiri dari :
   - Pengembangan Kemitraan Usaha dan Kredit Mikro;
   - Penguatan Infrastruktur Keuangan;
   - Pengembangan Kelembagaan dan Penguatan Kapasitas Usaha.

3. Pembentukan lembaga fungsional perencanaan untuk percepatan pembangunan daerah;
4. Melaksanakan kegiatan Kemah Bhakti Pemuda, Expo dan Festival Inovasi Pemuda Lembata (*Youth* Lembata *Innovation Expo* and *Festival*);
5. Melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Gerakan #IBU EKONOMI, Sahabat bersih, Sahabat Tangguh Zero Bencana, FIAL dan SELATA;
6. Melaksanakan Festival Literasi Baca: Pasar Baca #SAYA BACA dan membangun taman bacaan/perpustakaan desa, kelurahan, komunitas basis dan ruang publik dan tempat wisata (wisata baca); Penyediaan pendidikan yang berkualitas dan merata serta peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik;
7. Peningkatan dan Pendekatan Pelayanan Kesehatan melalui Klinik Primer Desa Berbasis Masyarakat; Penguatan Gerakan #GOOD PAGI dan Sapu Bersih #z-MALARIA untuk Peningkatan Pelayanan Preventif serta Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Manusia; Melaksanakan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana;
8. Optimalisasi dan Ekspansi Lahan dan Pengadaan Alat Mesin Pertanian untuk Produksi Cabe dan Bawang serta Produksi Unggulan Lainnya;
9. Melaksanakan Harmonisasi Kebijakan Pertanian serta Program Pupuk Gratis bagi Petani Produktif untuk Peningkatan Produksi Cabai, Bawang, Nenas, Kopi, Advokad, Jagung Industri, Kacang Tanah;
10. Membuka dan Meningkatkan Infrastruktur Jalan pada Pusat-pusat Produksi untuk Distribusi Barang dan Mobilitas Orang melalui Jalan Usaha Tani; Aksesibilitas Infratruktur Jalan Menuju Daya Tarik Wisata Desa (*Travel Village*) *#Explore Rural* Lembata, Jalan Menuju Wisata Budaya, Jalan Menuju *Heritage Tourism*, Jalan Lingkar Tanjung Baja, jalan lingkar Balauring-Lohu, Jalan Lingkar Tanjung Tuak, Jalan Lingkar Tanjung Naga, Jalan Menuju Rest Area Ile Lewotolok, Jalan Menuju Ile Werung, Jalan Menuju Gunung Uyelewun, Jalan Menuju Kawasan Wisata Pantai Wai Lei – Atawua *Palace- Stone Garden* Tewaowutung dan Sekitarnya;

11. Optimalisasi pemanfaatan taman kota melalui penataan dan pembangunan sarana dan fasilitas berupa *Free Wifi*, lapak dan fasilitas lainnya untuk dijadikan taman tematik dan pembangunan pasar seni Lusikawak serta pengadaan tanah untuk kantor pemerintahan dan fasilitas publik serta polder banjir, lembaga pemerintah lainnya, dan pembangunan taman publik di kota Lewoleba dan sekitarnya;
12. Pengembangan sentra UKM, BUMDes, Koperasi Komunitas dan peningkatan pasar, serta pengembangan jasa kreatif, peningkatan kapasitas usaha kreatif serta penguatan kelembagaan dan modal usaha melalui transfer payment dan mitra usaha kredit mikro; pengembangan inovasi SDM Vokasi Industri bagi pemuda dan perempuan; Pemberdayaan kelompok ekonomi berbasis desa;
13. Pengembangan, pembangunan dan penataan wisata mangrove Pantai Mutiara Waijarang, dengan melaksanakan pembangunan akses jalan masuk serta pembangunan jety danfasilitas lainnya serta Pengembangan Wisata kolam renang apung pulau Siput Awulolong dan daya tarik wisata lainnya yang berpotensi menjadi daerah tujuan wisata; Pengembangan pariwisata desa (*Travel Village*) #*Explore Rural* Lembata serta pipanisasi air bersih serta lampunisasi pada daerah pengembangan daya tarik wisata di Desa Dikesare, di desa Tewaowutung, di Rest Area W2Pass di Desa Balauring, Pantai *Corner Love* di Desa Balauring, Wisata Pantai Tanjung Tuak di Desa Kolipadan;
14. Pengembangan, pembangunan dan penataan Wisata Wolor Pass, Pulau Gunung Batutara, Wisata Rest Area Ile Lewotolok, Wisata Ile Werung, Wisata Religi Bukit Doa Wato Miten, Wisata Pantai Selatan Utara Nuhanera, dan Wisata Kuliner Lewolein, under water Nuhanera dan sekitarnya, *Travel Fishing*, Wisata *Corner Love* (Pojok Cinta) Balauring, Wisata Kuliner Khas Uyelewun Raya "Sarabe Edang dan Tambole", di *Rest Area* W2Pass Balauring, Wisata Pantai Wai Lei-Atauwua *Palace* Tewaowutung, Wisata Pantai Tirer, Wisata Pantai Wowong-Angarlaleng-Beang-Tanjung Leur - Wade -Bobu, Wisata Budaya dan Heritage Lewogolok Desa Lolong – Lamanunang – Lusilame – Leuwayang-Wakio, Wisata Pesta Kacang Lewohala-Jontona, Wisata Nale, Lamalera whale catching dan daya tarik wisata lainnya yang potensial, wisata buatan, wisata kuliner, wisata belanja; wisata budaya dan heritage lainnya, wisata sport, wisata rohani, dan lain-lain.

    Pembangunan dan penyediaan fasilitas umum, sarana dan prasarana wisata, serta pembangunan sarpras industri pariwisata untuk memicu dan memacu investasi;
15. Peningkatan pasar dan promosi pariwisata melalui peningkatan jaringan/*network*, melalui media o*nline*, media elektronik, media cetak, website, pameran dan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam upaya publikasi kegiatan dan promosi pariwisata serta tour promo dalam dan luar negeri;
16. Melaksanakan kegiatan Rally Wisata Bahari-Lembata #*Truly Heaven*: -Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 Gunung (Blue *Mountains Tours*), dan berbagai aktivitas dalam semangat *One Product - Ten Activity – Hundred Reward,* Festival Lamaholot, Expo Budaya Uyelewun Raya, Pengembangan Atraksi, Penguatan Struktur Budaya dan Gala Desa;
17. Melaksanakan Program pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran dengan melalukan pengembangan infrastruktur investasi dan *transfer payment* melalui kerjasama/MOU dengan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank untuk Gerakan #Ibu Ekonomi dan #G-U450 untuk peningkatan kewirausahaan;

18. Optimalisasi lembaga usaha kreatif dan jasa kreatif berbasis masyarakat dan/atau komunitas seperti: PEKKA, Majelis Ta'lim, Santa Ana, OMK, Remaja Masjid, dan Karang Taruna untuk melaksanakan Gerakan Ekonomi Rakyat, Ekonomi Pemuda dan (Ekonomi Keluarga #Ibu Ekonomi) serta Penguatan Struktur Budaya;
19. Pengembangan sektor usaha skala industri kreatif berorientasi eksport dan peningkatan nilai tambah produk;
20. Pengembangan dan peningkatan produksi dan pasar usaha industri garam di Desa Tapobaran dan daerah yang potensial, olahan Ikan Teri di Desa Hadakewa, olahan krupuk ikan tuna di Desa Balauring;
21. Pembangunan dan peningkatan sarpras informatika; penguatan infrastruktur e-*Government*; peningkatan kerjasama media serta melaksanakan kegiatan dan perbaikan regulasi untuk memicu dan memacu investasi;
22. Melaksanakan pemekaran desa, kelurahan dan kecamatan dan penetapan Cluster Desa serta Kampung/Dusun/Desa Tematik;
23. Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja, job fit, lelang jabatan, dalam rangka redesign, restrukturisasi dan reorganisasi penyelenggaraan pemerintahan serta menata dan mengembangkan SDM ASN;
24. Pembangunan stadion olah raga, GOR dan Lapangan Desa;
25. Melakukan intervensi pembangunan lintas sektor kepada desa cepat tumbuh dalam wilayah pengembangan koridor ekonomi dalam pengelompokan cluster desa dan klasifikasi desa tematik;
26. Pengembangan usaha kreatif sumber daya laut, sumber daya pertanian, dan jasa kreatif pariwisata;
27. Meningkatkan kualitas hidup manusia dengan mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan instrumen pendukung pendidikan dan kesehatan berupa pengadaan buku bacaan dan kelengkapan laboratorium serta alat kesehatan, peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga pendidikan dan kesehatan, peningkatan kapasitas inovasi masyarakat;
28. Penyediaan akses hunian layak dan terjangkau melalui #GESER LANI serta Revitalisasi dan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman serta Penyediaan Akses Infrastruktur Dasar Permukiman serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Layak Huni;
29. Meningkatkan penguatan pembangunan perikanan, sumber daya laut dan kemaritiman serta pertanian dan pariwisata sebagai sumber utama peningkatan pendapatan daerah;
30. Meningkatkan produksi dan nilai tambah ekonomi untuk peningkatan pendapatan dari sektorperikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata serta perluasan jaringan pasar; optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif melalui pengembangan destinasi dan daya tarik wisata potensial serta usaha ekonomi kreatif; Optimalisasi pendapatan untuk peningkatan PAD;
31. Mengembangkan SDM ASN berbasis informasi teknologi melalui pembangunan Studio e-Government, kerjasama IT serta inovasi SDM vokasi industri pemuda dan perempuan yang berorientasi kinerja melalui revolusi kerja APIIKKK untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan masyarakat;
32. Memonitor pelaksanaan peran pemerintah kecamatan sebagai coordinator dalam mengkoordinir desa cepat tumbuh serta peran kepala OPD/SKPD sebagai Pembina dan pengelola desa cepat tumbuh melalui cluster -tematik desa dan Finalisasi

pembuatan kajian profil dan potensi desa untuk pengelompokan cluster desa dan klasifikasi desa tematik;

33. Pembuatan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) atau Masterplan Pembangunan Perumahan Kabupaten Lembata; Melakukan Kajian dan Pembuatan Peraturan Daerah tentang Penetapan Hak Ulayat di Kabupaten Lembata;
34. Mempercepat peningkatan dan pembangunan infrastrurktur strategis (Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di Kota Lewoleba – Pembangunan dan peningkatan infrastrukutr jalan pada daerah pengembangan pariwisata dan pusat-pusat produksi serta wilayah pengembangan strategis dan daerah cepat tumbuh – pembangunan jalan dan jembatan, infrastruktur pertanian, transportasi, air bersih, enegeri, komunikasi dan pengadaan sarana dan prasarana dan fasilitas umum kepariwisataan dan fasilitas sarpras publik lainnya) melalui skema pembiayaan *Avaibility Payment* tahun jamak , tahun tunggal dan *sharing budgeting*; penataan kota Lewoleba, pembangunan drainase kota dan penyediaan polder banjir serta penyediaan lahan dan pembangunan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sarpras dan fasilitas pemerintahan, pemeliharaan dan perawatan infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas publik dan pemerintahan lainnya;
35. Pembangunan embung muara/estuary di Kali Waima untuk irigasi di daerah pesisir (hilirisasi pertanian) dan untuk air baku dengan sasaran Desa Bour, Desa Wuakerong, desa Duawutung, Desa Riabao, Desa Babokerong dan Desa Baobolak; Pembuatan air baku Desa Lamadale dan Wade, infrastruktur irigasi yang fokus pada Wainili, Letu, Riang Dua, Weilolong, Waikomo dan daerah irigasi lainnya serta pencetakan lahan pertanian;
36. Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan perdesaan dan jalan lingkungan perkotaan, jalan antar desa, jalan menuju akses wisata, pipanisasi air bersih dan listrik desa;
37. Melaksanakan pembangunan jetty pariwisata, jetty perhubungan laut, jetty perikanan serta membangun talud pengaman pada daerah peisisir pantai dengan konstruksi sesuai dengan tingkat kerusakannya berbasis pariwisata; pengembangan daerah pesisir pantai untuk wisata bahari, rehabilitasi dan peremajaan daerah pesisir pantai serta reklamasi Pantai Balauring, Pantai Lewoleba, Pantai Wairiang, Pantai Babokerong dan rehabilitasi, rekonstruksi daerah bencana serta daerah potensi bencana;

    Melaksanakan kajian dan izin lingkungan, izin lokasi, izin pemanfaatan daerah pesisir pantai dan sumber daya laut berbasis pariwisata;
38. Optimalisasi pendapatan dan meningkatkan kerjasama daerah serta perluasan pasar kreatif dan jaringan usaha untuk memicu dan memacu investasi;
39. Optimalisasi dan penguatan Literasi desa, struktur budaya melalui #GALA DESA , pengembangan atraksi budaya, revitalisasi rumah adat dan pelestarian alat musik tradisional Tatong Uyelewun Lembata serta tenun tradisional orginal Lembata;
40. Pengembangan Destinasi Pariwisata, promosi dan peningkatan pasar pariwisata serta kerjasama dan investasi kepariwisataan;
41. Pengembangan daerah pesisir pantai untuk pariwisata bahari;
42. Menyediakan sarana angkutan perdesaan, peningkatan transportasi laut dan tol laut serta kapal wisata;
43. Pengembangan ternak dan pembangunan Rumah Potong Hewan;

44. Pengembangan Pasar Induk Pada dan Pasar Desa serta Pasar Kecamatan, Pasar Barter Wulandoni, Pasar Malam Waijarang;
45. Penguatan kelembagaan sadar hukum masyarakat dan penguatan Gerakan #PTT 151 serta peningkatan layanan satu pintu dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
46. Pembangunan dan penataan Rumah Layak Huni #GESER LANI;
47. Pengembangan industrialisasi perikanan, industri air mineral, industri olahan pertanian dan industri pariwisata;
48. Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Strategis Antar Daerah;
49. Penguatan kemitraan dan kewirausahaan serta pengembangan kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), BUMDes, #IBU EKONOMI dan Ekonomi Pemuda;
50. Penguatan struktur ekonomi kreatif dan pengembangan pasar rakyat serta pasar wisata;
51. Pengembangan pusat pertumbuhan pada Koridor Ekonomi I dan Koridor Ekonomi II serta Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Koridor Ekonomi I dan Koridor Ekonomi II;
52. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kawasan Ekonomi Korodor I dan Koridor II;
53. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Penguatan Daerah/Desa Cepat Tumbuh Melalui Strategi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Tipologi Desa (Cluster Tematik);
54. Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Penguatan Gerakan Lingkungan Bersih dan Sehat serta Fasilitasi Gerakan Kelompok Sadar Sungai;
55. Melaksanakan Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi dan restorasi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Laut serta Konservasi Air dan Hutan Dalam Perspektif Tata Ruang;
56. Pemeliharaan dan pelestarian situs budaya, sejarah dan kepurbakalaan (Batu relief prasejarah Liangpueng Desa Hingalamamengi dan sekitarnya, tengkorak manusia di Lewogolok Desa Lolong dan lain-lainnya);
57. Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Lembata dengan Kabupaten Alor, Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Rote Ndao di Bidang Pariwisata Bahari dan Kebudayaan yang terintegrasi dalam Kerjasama Utara-Utara.
58. Pembangunan SPBU;
59. Melaksanakan kios bayar secara terpadu untuk percepatan realisasi pembayaran pembangunan kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
60. Membangun kantor imigrasi;
61. Membangun dan menata desa yang berfokus pada 4 titik pengembangan yaitu : Program percepatan pembangunan ekonomi desa (P3ED) #Desa Tersenyum 2.0, Pengembangan produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan model cluster-tematik untuk mendukung desa cepat tumbuh, Pengembangan BUMDes dan penguatan struktur ekonomi kreatif desa, penguatan literasi dan gala desa serta pengembangan pariwisata desa (*travel village*) #*explore rural* lembata;
62. Melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan Prioritas Nasional dan Daerah Provinsi NTT Setiap Tahun;

6.3.2.3 Tahapan Pembangunan Tahun 2019

Tahap pembangunan Tahun 2019 merupakan tahapan lanjutan pelaksanaan aksi pembangunan untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan pendapatan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan program prioritas sesuai dengan inovasi daerah dan keberlanjutan program prioritas kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan perdesaan serta pengendalian anggaran untuk kualitas belanja;
2. Melaksanakan Rencana Aksi Program Prioritas Cincin-Cincin Ekonomi secara konsisten serta memantau dan mengevaluasi rencana aksi dan pelaksanaan prioritas kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 termasuk mengevaluasi penerapan *e-Government;*

   Rencana Aksi Program Prioritas Cincin-cincin Ekonomi yang terdiri dari :

   1) Cincin Pertanian yang fokus pada Produksi dan Distribusi yang terdiri dari :
      - Pengembangan Komoditas Unggulan berbasis Industri;
      - Industrialisasi Pertanian dan Peningkatan Daya Saing;
      - Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Pertanian dan Transportasi;
      - Ekspansi Lahan Pertanian;
      - Investasi dan Pasar Lembaga Keuangan
      - Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan SDM;
   2) Cincin Kelautan, Perikanan dan Kemaritiman yang fokus pada Industrialisasi dan Pengelolaan Ekonomi Laut, Perikanan dan Kemaritiman serta Pengembangan Sektor Usaha Kelautan, Perikanan dan Kemaritiman berbasis Industri dan Pariwisata, yang terdiri dari :
      - Pengembangan dan Pembangunan Industri Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Kemaritiman;
      - Peningkatan Produksi dan Budidaya Perikanan, Sumber Daya Laut dan Kemaritiman;
      - Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Laut Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
      - Pembangunan Infrastruktur Perikanan, Sumber Daya Laut dan Kemaritiman;
      - Optimalisasi Pendapatan;
   3) Cincin Pariwisata yang Fokus pada peningkatan pasar dan promosi, pengembangan destinasi, serta industrialisasi dan investasi melalui Rally Wisata Bahari-Lembata#*Truly Heaven* –Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 Gunung (*Blue Mountains Tours*); yang terdiri dari :
      - Pengembangan Destinasi;
      - Peningkatan Pasar dan Promosi;
      - Industrialisasi Pariwisata dan Investasi;
      - Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Akses Transformasi Informasi;
      - Pengembangan Kelembagaan dan Penguatan Struktur Budaya;
   4) Cincin Industri dan Ekonomi Kreatif yang Fokus pada Industrialisasi Pengembangan Industri, yang terdiri dari :
      - Pembangunan Infrastruktur, Industri dan Investasi;
      - Industrialisasi;
      - Pengembangan UKM dan Wirausaha;
      - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM.

5) Cincin Pemberdayaan Ekonomi Umat Basis, yang Fokus pada mengembangkan unit lembaga usaha produktif dan kreatif berbasis komunitas pemuda dan perempuan serta penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan #IBU EKONOMI dan FIAL serta pengembangan sentra usaha mikro melalui BUMDes yang terdiri dari :
   - Penguatan Infrastruktur dan Pengembangan Kemitraan Usaha;
   - Permodalan dan Sumber Pendanaan;
   - Pengembangan Kelembagaan dan Penguatan Kapasitas SDM.

6) Cincin Keuangan Mikro, yang Fokus pada Penguatan Infrastruktur Keuangan Mikro, yang terdiri dari :
   - Pengembangan Kemitraan Usaha dan Kredit Mikro;
   - Penguatan Infrastruktur Keuangan;
   - Pengembangan Kelembagaan dan Penguatan Kapasitas Usaha.

3. Pembentukan lembaga fungsional perencanaan untuk percepatan pembangunan daerah;
4. Melaksanakan kegiatan Kemah Bhakti Pemuda, Expo dan Festival Inovasi Pemuda Lembata (*Youth Lembata Innovation Expo and Festival*);
5. Melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Gerakan #IBU EKONOMI, Sahabat bersih, Sahabat Tangguh Zero Bencana, FIAL dan SELATA;
6. Melaksanakan Festival Literasi Baca: Pasar Baca #SAYA BACA dan membangun taman bacaan/perpustakaan desa, kelurahan, komunitas basis dan ruang publik dan tempat wisata (wisata baca); Penyediaan pendidikan yang berkualitas dan merata serta peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik;
7. Peningkatan dan Pendekatan Pelayanan Kesehatan melalui Klinik Primer Desa Berbasis Masyarakat; Penguatan Gerakan #GOOD PAGI dan Sapu Bersih #z-MALARIA untuk Peningkatan Pelayanan Preventif serta Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Manusia; Melaksanakan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana;
8. Optimalisasi dan Ekspansi Lahan dan Pengadaan Alat Mesin Pertanian untuk Produksi Cabe dan Bawang serta Produksi Unggulan Lainnya;
9. Melaksanakan Harmonisasi Kebijakan Pertanian serta Program Pupuk Gratis bagi Petani Produktif untuk Peningkatan Produksi Cabai, Bawang, Nenas, Kopi, Advokad, Jagung Industri, Kacang Tanah;
10. Membuka dan Meningkatkan Infrastruktur Jalan pada Pusat-pusat Produksi untuk Distribusi Barang dan Mobilitas Orang melalui Jalan Usaha Tani; Aksesibilitas Infratruktur Jalan Menuju Daya Tarik Wisata Desa (Travel Village) #Explore Rural Lembata, Jalan Menuju Wisata Budaya, Jalan Menuju Heritage Tourism, Jalan Lingkar Tanjung Baja, jalan lingkar Balauring-Lohu, Jalan Lingkar Tanjung Tuak, Jalan Lingkar Tanjung Naga, Jalan Menuju Rest Area Ile Lewotolok, Jalan Menuju Ile Werung, Jalan Menuju Gunung Uyelewun, Jalan Menuju Kawasan Wisata Pantai Wai Lei – Atawua *Palace- Stone Garden* Tewaowutung dan Sekitarnya;
11. Optimalisasi pemanfaatan taman kota melalui penataan dan pembangunan sarana dan fasilitas berupa Free Wifi, lapak dan fasilitas lainnya untuk dijadikan taman tematik dan pembangunan pasar seni Lusikawak serta pengadaan tanah untuk kantor pemerintahan dan fasilitas publik serta polder banjir, lembaga pemerintah lainnya, dan pembangunan taman publik di kota Lewoleba dan sekitarnya;

12. Pengembangan sentra UKM, BUMDes, Koperasi Komunitas dan peningkatan pasar, serta pengembangan jasa kreatif, peningkatan kapasitas usaha kreatif serta penguatan kelembagaan dan modal usaha melalui transfer payment dan mitra usaha kredit mikro; pengembangan inovasi SDM Vokasi Industri bagi pemuda dan perempuan; Pemberdayaan kelompok ekonomi berbasis desa;
13. Pengembangan, pembangunan dan penataan wisata mangrove Pantai Mutiara Waijarang, dengan melaksanakan pembangunan akses jalan masuk serta pembangunan jety dan fasilitas lainnya serta Pengembangan Wisata kolam renang apung pulau Siput Awulolong dan daya tarik wisata lainnya yang berpotensi menjadi daerah tujuan wisata; Pengembangan pariwisata desa (*Travel Village*) #*Explore Rural Lembata* serta pipanisasi air bersih serta lampunisasi pada daerah pengembangan daya tarik wisata di Desa Dikesare, di desa Tewaowutung, di Rest Area W2Pass di Desa Balauring, Pantai *Corner Love* di Desa Balauring, Wisata Pantai Tanjung Tuak di Desa Kolipadan;
14. Pengembangan, pembangunan dan penataan Wisata Wolor Pass, Pulau Gunung Batutara, Wisata Rest Area Ile Lewotolok, Wisata Ile Werung, Wisata Religi Bukit Doa Wato Miten, Wisata Pantai Selatan Utara Nuhanera, dan Wisata Kuliner Lewolein, under water Nuhanera dan sekitarnya, *Travel Fishing*, Wisata *Corner Love* (Pojok Cinta) Balauring, Wisata Kuliner Khas Uyelewun Raya "Sarabe Edang dan Tambole", di Rest Area W2Pass Balauring, Wisata Pantai Wai Lei-Atauwua Palace Tewaowutung, Wisata Pantai Tirer, Wisata Pantai Wowong-Angarlaleng-Beang-Tanjung Leur - Wade –Bobu, Wisata Budaya dan Heritage Lewogolok Desa Lolong – Lamanunang – Lusilame – Leuwayang-Wakio, Wisata Pesta Kacang Lewohala-Jontona, Wisata Nale, Lamalera whale catching dan daya tarik wisata lainnya yang potensial, wisata buatan, wisata kuliner, wisata belanja; wisata budaya dan heritage lainnya, wisata sport, wisata rohani, dan lain-lain.

    Pembangunan dan penyediaan fasilitas umum, sarana dan prasarana wisata, serta pembangunan sarpras industri pariwisata untuk memicu dan memacu investasi;
15. Peningkatan pasar dan promosi pariwisata melalui peningkatan jaringan/*network*, melalui media online, media elektronik, media cetak, website, pameran dan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam upaya publikasi kegiatan dan promosi pariwisata serta tour promo dalam dan luar negeri;
16. Melaksanakan kegiatan Rally Wisata Bahari-Lembata #Truly Heaven-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 Gunung (*Blue Mountains Tours*), dan berbagai aktivitas dalam semangat *One Product - Ten Activity – Hundred Reward*, Festival Lamaholot, Expo Budaya Uyelewun Raya, Pengembangan Atraksi, Penguatan Struktur Budaya dan Gala Desa;
17. Melaksanakan Program pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran dengan melalukan pengembangan infrastruktur investasi dan transfer payment melalui kerjasama/MOU dengan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank untuk Gerakan #Ibu Ekonomi dan #G-U450 untuk peningkatan kewirausahaan;
18. Optimalisasi lembaga usaha kreatif dan jasa kreatif berbasis masyarakat dan/atau komunitas seperti: PEKKA, Majelis Ta'lim, Santa Ana, OMK, Remaja Masjid, dan Karang Taruna untuk melaksanakan Gerakan Ekonomi Rakyat, Ekonomi Pemuda dan (Ekonomi Keluarga #Ibu Ekonomi) serta Penguatan Struktur Budaya;

19. Pengembangan sektor usaha skala industri kreatif berorientasi eksport dan peningkatan nilai tambah produk;
20. Pengembangan dan peningkatan produksi dan pasar usaha industri garam di Desa Tapobaran dan daerah yang potensial, olahan Ikan Teri di Desa Hadakewa, olahan krupuk ikan tuna di Desa Balauring;
21. Pembangunan dan peningkatan sarpras informatika; penguatan infrastruktur e-Government; peningkatan kerjasama media serta melaksanakan kegiatan dan perbaikan regulasi untuk memicu dan memacu investasi;
22. Melaksanakan pemekaran desa, kelurahan dan kecamatan dan penetapan Cluster Desa serta Kampung/Dusun/Desa Tematik;
23. Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja, job fit, lelang jabatan, dalam rangka redesign, restrukturisasi dan reorganisasi penyelenggaraan pemerintahan serta menata dan mengembangkan SDM ASN;
24. Pembangunan stadion olah raga, GOR dan Lapangan Desa;
25. Melakukan intervensi pembangunan lintas sektor kepada desa cepat tumbuh dalam wilayah pengembangan koridor ekonomi dalam pengelompokan cluster desa dan klasifikasi desa tematik;
26. Pengembangan usaha kreatif sumber daya laut, sumber daya pertanian, dan jasa kreatif pariwisata;
27. Meningkatkan kualitas hidup manusia dengan mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan instrumen pendukung pendidikan dan kesehatan berupa pengadaan buku bacaan dan kelengkapan laboratorium serta alat kesehatan, peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga pendidikan dan kesehatan, peningkatan kapasitas inovasi masyarakat;
28. Penyediaan akses hunian layak dan terjangkau melalui #GESER LANI serta Revitalisasi dan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman serta Penyediaan Akses Infrastruktur Dasar Permukiman serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Layak Huni;
29. Meningkatkan penguatan pembangunan perikanan, sumber daya laut dan kemaritiman serta pertanian dan pariwisata sebagai sumber utama peningkatan pendapatan daerah;
30. Meningkatkan produksi dan nilai tambah ekonomi untuk peningkatan pendapatan dari sektorperikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata serta perluasan jaringan pasar; optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif melalui pengembangan destinasi dan daya tarik wisata potensial serta usaha ekonomi kreatif; Optimalisasi pendapatan untuk peningkatan PAD;
31. Mengembangkan SDM ASN berbasis informasi teknologi melalui pembangunan Studio e-Government, kerjasama IT serta inovasi SDM vokasi industri pemuda dan perempuan yang berorientasi kinerja melalui revolusi kerja APIIKKK untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan masyarakat;
32. Memonitor pelaksanaan peran pemerintah kecamatan sebagai coordinator dalam mengkoordinir desa cepat tumbuh serta peran kepala OPD/SKPD sebagai Pembina dan pengelola desa cepat tumbuh melalui cluster -tematik desa dan Finalisasi pembuatan kajian profil dan potensi desa untuk pengelompokan cluster desa dan klasifikasi desa tematik;
33. Pembuatan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) atau Masterplan Pembangunan Perumahan Kabupaten

Lembata; Melakukan Kajian dan Pembuatan Peraturan Daerah tentang Penetapan Hak Ulayat di Kabupaten Lembata;

34. Mempercepat peningkatan dan pembangunan infrastrurktur strategis (Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di Kota Lewoleba – Pembangunan dan peningkatan infrastrukutr jalan pada daerah pengembangan pariwisata dan pusat-pusat produksi serta wilayah pengembangan strategis dan daerah cepat tumbuh – pembangunan jalan dan jembatan, infrastruktur pertanian, transportasi, air bersih, enegeri, komunikasi dan pengadaan sarana dan prasarana dan fasilitas umum kepariwisataan dan fasilitas sarpras publik lainnya) melalui skema pembiayaan *Avaibility Payment* tahun jamak , tahun tunggal dan sharing budgeting; penataan kota Lewoleba, pembangunan drainase kota dan penyediaan polder banjir serta penyediaan lahan dan pembangunan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sarpras dan fasilitas pemerintahan, pemeliharaan dan perawatan infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas publik dan pemerintahan lainnya;
35. Pembangunan embung muara/estuary di Kali Waima untuk irigasi di daerah pesisir (hilirisasi pertanian) dan untuk air baku dengan sasaran Desa Bour, Desa Wuakerong, desa Duawutung, Desa Riabao, Desa Babokerong dan Desa Baobolak; Pembuatan air baku Desa Lamadale dan Wade, infrastruktur irigasi yang fokus pada Wainili, Letu, Riang Dua, Weilolong, Waikomo dan daerah irigasi lainnya serta pencetakan lahan pertanian;
36. Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan perdesaan dan jalan lingkungan perkotaan, jalan antar desa, jalan menuju akses wisata, pipanisasi air bersih dan listrik desa;
37. Melaksanakan pembangunan jetty pariwisata, jetty perhubungan laut, jetty perikanan serta membangun talud pengaman pada daerah peisisir pantai dengan konstruksi sesuai dengan tingkat kerusakannya berbasis pariwisata; pengembangan daerah pesisir pantai untuk wisata bahari, rehabilitasi dan peremajaan daerah pesisir pantai serta reklamasi Pantai Balauring, Pantai Lewoleba, Pantai Wairiang, Pantai Babokerong dan rehabilitasi, rekonstruksi daerah bencana serta daerah potensi bencana;

    Melaksanakan kajian dan izin lingkungan, izin lokasi, izin pemanfaatan daerah pesisir pantai dan sumber daya laut berbasis pariwisata;
38. Optimalisasi pendapatan dan meningkatkan kerjasama daerah serta perluasan pasar kreatif dan jaringan usaha untuk memicu dan memacu investasi;
39. Optimalisasi dan penguatan Literasi desa, struktur budaya melalui #GALA DESA , pengembangan atraksi budaya, revitalisasi rumah adat dan pelestarian alat musik tradisional Tatong Uyelewun Lembata serta tenun tradisional orginal Lembata;
40. Pengembangan Destinasi Pariwisata, promosi dan peningkatan pasar pariwisata serta kerjasama dan investasi kepariwisataan;
41. Pengembangan daerah pesisir pantai untuk pariwisata bahari.
42. Menyediakan sarana angkutan perdesaan, peningkatan transportasi laut dan tol laut serta kapal wisata;
43. Pengembangan ternak dan pembangunan Rumah Potong Hewan;
44. Pengembangan Pasar Induk Pada dan Pasar Desa serta Pasar Kecamatan, Pasar Barter Wulandoni, Pasar Malam Waijarang;

45. Penguatan kelembagaan sadar hukum masyarakat dan penguatan Gerakan #PTT 151 serta peningkatan layanan satu pintu dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
46. Pembangunan dan penataan Rumah Layak Huni #GESER LANI;
47. Pengembangan industrialisasi perikanan, industri air mineral, industri olahan pertanian dan industri pariwisata;
48. Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Strategis Antar Daerah;
49. Penguatan kemitraan dan kewirausahaan serta pengembangan kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), BUMDes, #IBU EKONOMI dan Ekonomi Pemuda;
50. Penguatan struktur ekonomi kreatif dan pengembangan pasar rakyat serta pasar wisata;
51. Pengembangan pusat pertumbuhan pada Koridor Ekonomi I dan Koridor Ekonomi II serta Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Koridor Ekonomi I dan Koridor Ekonomi II;
52. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kawasan Ekonomi Korodor I dan Koridor II;
53. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Penguatan Daerah/Desa Cepat Tumbuh Melalui Strategi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Tipologi Desa (Cluster Tematik);
54. Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Penguatan Gerakan Lingkungan Bersih dan Sehat dan Fasilitasi Gerakan Kelompok Sadar Sungai;
55. Melaksanakan Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi dan restorasi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Laut serta Konservasi Air dan Hutan Dalam Perspektif Tata Ruang;
56. Pemeliharaan dan pelestarian situs budaya, sejarah dan kepurbakalaan (Batu relief prasejarah liangpueng Desa Hingalamamengi dan sekitarnya, tengkorak manusia di Lewogolok desa Lolong dan lain-lainnya).
57. Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Lembata dengan Kabupaten Alor, Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Rote Ndao di Bidang Pariwisata Bahari dan Kebudayaan yang terintegrasi dalam Kerjasama Utara-Utara;
58. Pembangunan SPBU;
59. Melaksanakan kios bayar secara terpadu untuk percepatan realisasi pembayaran pembangunan kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
60. Membangun kantor imigrasi;
61. Membangun dan menata desa yang berfokus pada 4 titik pengembangan yaitu : Program percepatan pembangunan ekonomi desa (P3ED) #Desa Tersenyum 2.0, Pengembangan produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan model cluster-tematik untuk mendukung desa cepat tumbuh, Pengembangan bumdes dan penguatan struktur ekonomi kreatif desa, penguatan literasi dan gala desa serta pengembangan pariwisata desa (*travel village*) #*explore rural* lembata;
62. Melaksanakan kegiata pembangunan sesuai dengan Prioritas Nasional dan Daerah Provinsi NTT Setiap Tahun;

6.3.2.4 Tahapan Pembangunan Tahun 2020

Tahapan Pembangunan Tahun 2020 merupakan tahapan lanjutan pelaksanaan aksi pembangunan untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan pendapatan. Pada tahap pembangunan Tahun 2020 mengutamakan pada pengembangan industrialisasi untuk mencapai target pertumbuhan dan melakukan evaluasi terhadap kualitas rencana dan pelaksanaan pembangunan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan program prioritas sesuai dengan inovasi daerah dan keberlanjutan program prioritas kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan perdesaan serta pengendalian anggaran untuk kualitas belanja;
2. Melaksanakan rencana aksi program prioritas cincin-cincin ekonomi secara konsisten serta memantau dan mengevaluasi rencana aksi dan pelaksanaan prioritas kegiatan tahun anggaran 2019 termasuk mengevaluasi penerapan e-government;

   Rencana Aksi Cincin-Cincin Ekonomi terdiri dari :

   1) Cincin Pertanian yang fokus pada Produksi dan Distribusi yang terdiri dari :
      - Pengembangan Komoditas Unggulan berbasis Industri;
      - Industrialisasi Pertanian dan Peningkatan Daya Saing;
      - Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Pertanian dan Transportasi;
      - Ekspansi Lahan Pertanian;
      - Investasi dan Pasar Lembaga Keuangan
      - Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan SDM;
   2) Cincin Kelautan, Perikanan dan Kemaritiman yang fokus pada Industrialisasi dan Pengelolaan Ekonomi Laut, Perikanan dan Kemaritiman serta Pengembangan Sektor Usaha Kelautan, Perikanan dan Kemaritiman berbasis Industri dan Pariwisata, yang terdiri dari :
      - Pengembangan dan Pembangunan Industri Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Kemaritiman;
      - Peningkatan Produksi dan Budidaya Perikanan, Sumber Daya Laut dan Kemaritiman;
      - Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Laut Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
      - Pembangunan Infrastruktur Perikanan, Sumber Daya Laut dan Kemaritiman;
      - Optimalisasi Pendapatan;

      3) Cincin Pariwisata yang Fokus pada *Rally* Wisata Bahari – Lembata *#Truly Heaven* –Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 Gunung (*Blue Mountains Tours*); Peningkatan Pasar dan Promosi serta Pengembangan Pembangunan dan Penataan Destinasi, yang terdiri dari :
      - Pengembangan Destinasi;
      - Peningkatan Pasar dan Promosi;
      - Industrialisasi Pariwisata;
      - Pembangunan Infrastruktur dan Akses Transportasi Komunikasi;
      - Pengembangan Kelembagaan dan Penguatan Struktur Budaya;

   4) Cincin Industri dan Ekonomi Kreatif yang Fokus pada Industrialisasi Pengembangan Industri, yang terdiri dari :
      - Pengembangan Industrialisasi;
      - Pengembangan UKM dan Wirausaha;
      - Pembangunan Infrastruktur, Industri dan Investasi;

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM;

5) Cincin Pemberdayaan Ekonomi Umat Basis, yang Fokus pada #IBU EKONOMI, yang terdiri dari :
   - Penguatan Infrastruktur dan Pengembangan Kemitraan Usaha;
   - Permodalan dan Sumber Pendanaan;
   - Pengembangan Kelembagaan dan Penguatan Kapasitas SDM;
6) Cincin Keuangan Mikro, yang Fokus pada Penguatan Infrastruktur Keuangan Mikro, yang terdiri dari :
   - Pengembangan Kemitraan Usaha dan Kredit Mikro;
   - Penguatan Infrastruktur Keuangan;
   - Pengembangan Kelembagaan dan Penguatan Kapasitas Usaha.

3. Pembentukan lembaga fungsional perencana untuk mempercepat pembangunan daerah;
4. Melaksanakan kegiatan Kemah Bhakti Pemuda, Expo dan Festival Inovasi Pemuda Lembata (Y*outh* Lembata *Innovation Expo* and Festival);
5. Melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Gerakan #IBU EKONOMI, Sahabat bersih, Sahabat Tangguh Zero Bencana, FIAL dan SELATA;
6. Melaksanakan Festival Literasi Baca: Pasar Baca #SAYA BACA dan membangun taman bacaan/perpustakaan desa, kelurahan, komunitas basis dan ruang publik dan tempat wisata (wisata baca); Penyediaan pendidikan yang berkualitas dan merata serta peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik;
7. Peningkatan dan Pendekatan Pelayanan Kesehatan melalui Klinik Primer Desa Berbasis Masyarakat; Penguatan Gerakan #GOOD PAGI dan Sapu Bersih #z-MALARIA untuk Peningkatan Pelayanan Preventif serta Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Manusia; Melaksanakan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana;
8. Optimalisasi dan Ekspansi Lahan dan Pengadaan Alat Mesin Pertanian untuk Produksi Cabe dan Bawang serta Produksi Unggulan Lainnya;
9. Melaksanakan Harmonisasi Kebijakan Pertanian serta Program Pupuk Gratis bagi Petani Produktif untuk Peningkatan Produksi Cabai, Bawang, Nenas, Kopi, Advokad, Jagung Industri, Kacang Tanah;
10. Membuka dan Meningkatkan Infrastruktur Jalan pada Pusat-pusat Produksi untuk Distribusi Barang dan Mobilitas Orang melalui Jalan Usaha Tani; Aksesibilitas Infratruktur Jalan Menuju Daya Tarik Wisata Desa (Travel Village) #Explore Rural Lembata, Jalan Menuju Wisata Budaya, Jalan Menuju Heritage Tourism, Jalan Lingkar Tanjung Baja, jalan lingkar Balauring-Lohu, Jalan Lingkar Tanjung Tuak, Jalan Lingkar Tanjung Naga, Jalan Menuju Rest Area Ile Lewotolok, Jalan Menuju Ile Werung, Jalan Menuju Gunung Uyelewun, Jalan Menuju Kawasan Wisata Pantai Wai Lei – Atawua Palace- Stone Garden Tewaowutung dan Sekitarnya;
11. Optimalisasi pemanfaatan taman kota melalui penataan dan pembangunan sarana dan fasilitas berupa Free Wifi, lapak dan fasilitas lainnya untuk dijadikan taman tematik dan pembangunan pasar seni Lusikawak serta pengadaan tanah untuk kantor pemerintahan dan fasilitas publik serta polder banjir, lembaga pemerintah lainnya, dan pembangunan taman publik di kota Lewoleba dan sekitarnya;
12. Pengembangan sentra UKM, BUMDes, Koperasi Komunitas dan peningkatan pasar, serta pengembangan jasa kreatif, peningkatan kapasitas usaha kreatif serta penguatan kelembagaan dan modal usaha melalui transfer payment dan mitra usaha

kredit mikro; pengembangan inovasi SDM Vokasi Industri bagi pemuda dan perempuan; Pemberdayaan kelompok ekonomi berbasis desa;

13. Pengembangan, pembangunan dan penataan wisata mangrove Pantai Mutiara Waijarang, dengan melaksanakan pembangunan akses jalan masuk serta pembangunan jety danfasilitas lainnya serta Pengembangan Wisata kolam renang apung pulau Siput Awulolong dan daya tarik wisata lainnya yang berpotensi menjadi daerah tujuan wisata; Pengembangan pariwisata desa (*Travel Village*) #Explore Rural Lembata serta pipanisasi air bersih serta lampunisasi pada daerah pengembangan daya tarik wisata di Desa Dikesare, di desa Tewaowutung, di Rest Area W2Pass di Desa Balauring, Pantai Corner Love di Desa Balauring, Wisata Pantai Tanjung Tuak di Desa Kolipadan;
14. Pengembangan, pembangunan dan penataan Wisata Wolor Pass, Pulau Gunung Batutara, Wisata Rest Area Ile Lewotolok, Wisata Ile Werung, Wisata Religi Bukit Doa Wato Miten, Wisata Pantai Selatan Utara Nuhanera, dan Wisata Kuliner Lewolein, under water Nuhanera dan sekitarnya, Travel Fishing, Wisata Corner Love (Pojok Cinta) Balauring, Wisata Kuliner Khas Uyelewun Raya "Sarabe Edang dan Tambole", di Rest Area W2 *Pass* Balauring, Wisata Pantai Wai Lei-Atauwua Palace Tewaowutung, Wisata Pantai Tirer, Wisata Pantai Wowong-Angarlaleng-Beang-Tanjung Leur - Wade -Bobu, Wisata Budaya dan Heritage Lewogolok Desa Lolong – Lamanunang – Lusilame – Leuwayang-Wakio, Wisata Pesta Kacang Lewohala-Jontona, Wisata Nale, Lamalera whale catching dan daya tarik wisata lainnya yang potensial, wisata buatan, wisata kuliner, wisata belanja; wisata budaya dan heritage lainnya, wisata sport, wisata rohani, dan lain-lain.

    Pembangunan dan penyediaan fasilitas umum, sarana dan prasarana wisata, serta pembangunan sarpras industri pariwisata untuk memicu dan memacu investasi;
15. Peningkatan pasar dan promosi pariwisata melalui peningkatan jaringan/network, melalui media online, media elektronik, media cetak, website, pameran dan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam upaya publikasi kegiatan dan promosi pariwisata serta tour promo dalam dan luar negeri;
16. Melaksanakan kegiatan *Rally* Wisata Bahari-Lembata *#Truly Heaven*-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 Gunung (*Blue Mountains Tours*), dan berbagai aktivitas dalam semangat *One Product-Ten Activity- Hundred Reward*, Festival Lamaholot, Expo Budaya Uyelewun Raya, Pengembangan Atraksi, Penguatan Struktur Budaya dan Gala Desa;
17. Melaksanakan Program pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran dengan melalukan pengembangan infrastruktur investasi dan transfer payment melalui kerjasama/MOU dengan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank untuk Gerakan #Ibu Ekonomi dan #G-U450 untuk peningkatan kewirausahaan;
18. Optimalisasi lembaga usaha kreatif dan jasa kreatif berbasis masyarakat dan/atau komunitas seperti: PEKKA, Majelis Ta'lim, Santa Ana, OMK, Remaja Masjid, dan Karang Taruna untuk melaksanakan Gerakan Ekonomi Rakyat, Ekonomi Pemuda dan (Ekonomi Keluarga #Ibu Ekonomi) serta Penguatan Struktur Budaya;
19. Pengembangan sektor usaha skala industri kreatif berorientasi eksport dan peningkatan nilai tambah produk;

20. Pengembangan dan peningkatan produksi dan pasar usaha industri garam di Desa Tapobaran dan daerah yang potensial, olahan Ikan Teri di Desa Hadakewa, olahan krupuk ikan tuna di Desa Balauring;
21. Pembangunan dan peningkatan sarpras informatika; penguatan infrastruktur *e-Government*; peningkatan kerjasama media serta melaksanakan kegiatan dan perbaikan regulasi untuk memicu dan memacu investasi;
22. Melaksanakan pemekaran desa, kelurahan dan kecamatan dan penetapan Cluster Desa serta Kampung/Dusun/Desa Tematik;
23. Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja, job fit, lelang jabatan, dalam rangka redesign, restrukturisasi dan reorganisasi penyelenggaraan pemerintahan serta menata dan mengembangkan SDM ASN;
24. Pembangunan stadion olah raga, GOR dan Lapangan Desa;
25. Melakukan intervensi pembangunan lintas sektor kepada desa cepat tumbuh dalam wilayah pengembangan koridor ekonomi dalam pengelompokan cluster desa dan klasifikasi desa tematik;
26. Pengembangan usaha kreatif sumber daya laut, sumber daya pertanian, dan jasa kreatif pariwisata;
27. Meningkatkan kualitas hidup manusia dengan mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan instrumen pendukung pendidikan dan kesehatan berupa pengadaan buku bacaan dan kelengkapan laboratorium serta alat kesehatan, peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga pendidikan dan kesehatan, peningkatan kapasitas inovasi masyarakat;
28. Penyediaan akses hunian layak dan terjangkau melalui #GESER LANI serta Revitalisasi dan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman serta Penyediaan Akses Infrastruktur Dasar Permukiman serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Layak Huni;
29. Meningkatkan penguatan pembangunan perikanan, sumber daya laut dan kemaritiman serta pertanian dan pariwisata sebagai sumber utama peningkatan pendapatan daerah;
30. Meningkatkan produksi dan nilai tambah ekonomi untuk peningkatan pendapatan dari sektor perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata serta perluasan jaringan pasar; optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif melalui pengembangan destinasi dan daya tarik wisata potensial serta usaha ekonomi kreatif; Optimalisasi pendapatan untuk peningkatan PAD;
31. Mengembangkan SDM ASN berbasis informasi teknologi melalui pembangunan Studio e-Government, kerjasama IT serta inovasi SDM vokasi industri pemuda dan perempuan yang berorientasi kinerja melalui revolusi kerja APIIKKK untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan masyarakat;
32. Memonitor pelaksanaan peran pemerintah kecamatan sebagai coordinator dalam mengkoordinir desa cepat tumbuh serta peran kepala PD sebagai Pembina dan pengelola desa cepat tumbuh melalui cluster -tematik desa dan Finalisasi pembuatan kajian profil dan potensi desa untuk pengelompokan cluster desa dan klasifikasi desa tematik;
33. Pembuatan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) atau Masterplan Pembangunan Perumahan Kabupaten Lembata; Melakukan kajian dan pembuatan Peraturan Daerah tentang Penetapan Hak Ulayat di Kabupaten Lembata;

34. Mempercepat peningkatan dan pembangunan infrastrurktur strategis (Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di Kota Lewoleba – Pembangunan dan peningkatan infrastrukutr jalan pada daerah pengembangan pariwisata dan pusat-pusat produksi serta wilayah pengembangan strategis dan daerah cepat tumbuh – pembangunan jalan dan jembatan, infrastruktur pertanian, transportasi, air bersih, enegeri, komunikasi dan pengadaan sarana dan prasarana dan fasilitas umum kepariwisataan dan fasilitas sarpras publik lainnya) melalui skema pembiayaan *Avaibility Payment* tahun jamak , tahun tunggal dan sharing budgeting; penataan kota Lewoleba, pembangunan drainase kota dan penyediaan polder banjir serta penyediaan lahan dan pembangunan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sarpras dan fasilitas pemerintahan, pemeliharaan dan perawatan infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas publik dan pemerintahan lainnya;
35. Pembangunan embung muara/estuary di Kali Waima untuk irigasi di daerah pesisir (hilirisasi pertanian) dan untuk air baku dengan sasaran Desa Bour, Desa Wuakerong, desa Duawutung, Desa Riabao, Desa Babokerong dan Desa Baobolak; Pembuatan air baku Desa Lamadale dan Wade, infrastruktur irigasi yang fokus pada Wainili, Letu, Riang Dua, Weilolong, Waikomo dan daerah irigasi lainnya serta pencetakan lahan pertanian;
36. Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan perdesaan dan jalan lingkungan perkotaan, jalan antar desa, jalan menuju akses wisata, pipanisasi air bersih dan listrik desa;
37. Melaksanakan pembangunan jetty pariwisata, jetty perhubungan laut, jetty perikanan serta membangun talud pengaman pada daerah peisisir pantai dengan konstruksi sesuai dengan tingkat kerusakannya berbasis pariwisata; pengembangan daerah pesisir pantai untuk wisata bahari, rehabilitasi dan peremajaan daerah pesisir pantai serta reklamasi Pantai Balauring, Pantai Lewoleba, Pantai Wairiang, Pantai Babokerong dan rehabilitasi, rekonstruksi daerah bencana serta daerah potensi bencana;

    Melaksanakan kajian dan izin lingkungan, izin lokasi, izin pemanfaatan daerah pesisir pantai dan sumber daya laut berbasis pariwisata;
38. Optimalisasi pendapatan dan meningkatkan kerjasama daerah serta perluasan pasar kreatif dan jaringan usaha untuk memacu investasi;
39. Optimalisasi dan penguatan Literasi desa, struktur budaya melalui #GALA DESA , pengembangan atraksi budaya, revitalisasi rumah adat dan pelestarian alat musik tradisional Tatong Uyelewun Lembata serta tenun tradisional orginal Lembata;
40. Pengembangan Destinasi Pariwisata, promosi dan peningkatan pasar pariwisata serta kerjasama dan investasi kepariwisataan;
41. Pengembangan daerah pesisir pantai untuk pariwisata bahari.
42. Menyediakan sarana angkutan perdesaan, peningkatan transportasi laut dan tol laut serta kapal wisata;
43. Pengembangan ternak dan pembangunan Rumah Potong Hewan;
44. Pengembangan Pasar Induk Pada dan Pasar Desa serta Pasar Kecamatan, Pasar Barter Wulandoni, Pasar Malam Waijarang;
45. Penguatan kelembagaan sadar hukum masyarakat dan penguatan Gerakan #PTT 151 serta peningkatan layanan satu pintu dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
46. Pembangunan dan penataan Rumah Layak Huni #GESER LANI;

47. Pengembangan industrialisasi perikanan, industri air mineral, industri olahan pertanian dan industri pariwisata;
48. Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Strategis Antar Daerah;
49. Penguatan kemitraan dan kewirausahaan serta pengembangan kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), BUMDes, #IBU EKONOMI dan Ekonomi Pemuda;
50. Penguatan struktur ekonomi kreatif dan pengembangan pasar rakyat serta pasar wisata;
51. Pengembangan pusat pertumbuhan pada Koridor Ekonomi I dan Koridor Ekonomi II serta Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Koridor Ekonomi I dan Koridor Ekonomi II;
52. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kawasan Ekonomi Korodor I dan Koridor II;
53. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Penguatan Daerah/Desa Cepat Tumbuh Melalui Strategi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Tipologi Desa (Cluster Tematik);
54. Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Penguatan Gerakan Lingkungan Bersih dan Sehat dan Fasilitasi Gerakan Kelompok Sadar Sungai;
55. Melaksanakan Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi dan restorasi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Laut serta Konservasi Air dan Hutan Dalam Perspektif Tata Ruang;
56. Pemeliharaan dan pelestarian situs budaya, sejarah dan kepurbakalaan (Batu relief prasejarah Liangpueng Desa Hingalamamengi dan sekitarnya, tengkorak manusia di Lewogolok desa Lolong dan lain-lainnya);
57. Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Lembata dengan Kabupaten Alor, Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Rote Ndao di Bidang Pariwisata Bahari dan Kebudayaan yang terintegrasi dalam Kerjasama Utara-Utara;
58. Pembangunan SPBU;
59. Melaksanakan kios bayar secara terpadu untuk percepatan realisasi pembayaran pembangunan kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
60. Membangun kantor imigrasi;
61. Membangun dan menata desa yang berfokus pada 4 titik pengembangan yaitu : Program percepatan pembangunan ekonomi desa (P3ED) #Desa Tersenyum 2.0, Pengembangan produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan model cluster-tematik untuk mendukung desa cepat tumbuh, Pengembangan bumdes dan penguatan struktur ekonomi kreatif desa, penguatan literasi dan gala desa serta pengembangan pariwisata desa (*travel village*) #*explore rural* lembata;
62. Melaksanakan kegiata pembangunan sesuai dengan Prioritas Nasional dan Daerah Provinsi NTT Setiap Tahun;

6.3.2.5 Tahapan Pembangunan Tahun 2021

Tahap pembangunan Tahun 2021 merupakan tahap lanjutan pelaksanaan aksi dan evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan program prioritas sesuai dengan inovasi daerah dan keberlanjutan program prioritas kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan perdesaan serta pengendalian anggaran untuk kualitas belanja;
2. Melaksanakan rencana aksi program prioritas cincin-cincin ekonomi secara konsisten serta memantau dan mengevaluasi rencana aksi dan pelaksanaan prioritas kegiatan

tahun anggaran 2020 termasuk peningkatan penerapan *e-government* secara menyeluruh; Rencana Aksi Program Prioritas Cincin Ekonomi terdiri dari :

1) Cincin Pertanian yang fokus pada Produksi dan Distribusi yang terdiri dari :
   - Pengembangan Komoditas Unggulan berbasis Industri;
   - Industrialisasi Pertanian dan Peningkatan Daya Saing;
   - Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Pertanian dan Transportasi;
   - Ekspansi Lahan Pertanian;
   - Investasi dan Pasar Lembaga Keuangan
   - Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan SDM;
2) Cincin Kelautan, Perikanan dan Kemaritiman yang fokus pada Industrialisasi dan Pengelolaan Ekonomi Laut, Perikanan dan Kemaritiman serta Pengembangan Sektor Usaha Kelautan, Perikanan dan Kemaritiman berbasis Industri dan Pariwisata, yang terdiri dari :
   - Pengembangan dan Pembangunan Industri Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Kemaritiman;
   - Peningkatan Produksi dan Budidaya Perikanan, Sumber Daya Laut dan Kemaritiman;
   - Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Laut Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
   - Pembangunan Infrastruktur Perikanan, Sumber Daya Laut dan Kemaritiman;
   - Optimalisasi Pendapatan;
3) Cincin Pariwisata yang Fokus pada *Rally* Wisata Bahari – Lembata *#Truly Heaven* –Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 Gunung (*Blue Mountains Tours*); Peningkatan Pasar dan Promosi serta Pengembangan Pembangunan dan Penataan Destinasi, yang terdiri dari :
   - Pengembangan Destinasi;
   - Peningkatan Pasar dan Promosi;
   - Industrialisasi Pariwisata;
   - Pembangunan Infrastruktur dan Akses Transportasi Komunikasi;
   - Pengembangan Kelembagaan;
4) Cincin Industri dan Ekonomi Kreatif yang Fokus pada Industrialisasi Pengembangan Industri, yang terdiri dari :
   - Pengembangan Industrialisasi;
   - Pengembangan UKM dan Wirausaha;
   - Pembangunan Infrastruktur, Industri dan Investasi;
   - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM;
5) Cincin Pemberdayaan Ekonomi Umat Basis, yang Fokus pada #IBU EKONOMI, yang terdiri dari :
   - Penguatan Infrastruktur dan Pengembangan Kemitraan Usaha;
   - Permodalan dan Sumber Pendanaan;
   - Pengembangan Kelembagaan dan Penguatan Kapasitas SDM;
6) Cincin Keuangan Mikro, yang Fokus pada Penguatan Infrastruktur Keuangan Mikro, yang terdiri dari :
   - Pengembangan Kemitraan Usaha dan Kredit Mikro;
   - Penguatan Infrastruktur Keuangan;
   - Pengembangan Kelembagaan dan Penguatan Kapasitas Usaha.

3. Pembentukan lembaga fungsional perencana untuk mempercepat pembangunan daerah;
4. Melaksanakan kegiatan Kemah Bhakti Pemuda, *Expo* dan Festival Inovasi Pemuda Lembata (*Youth Lembata Innovation Expo and Festival*);
5. Melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Gerakan #IBU EKONOMI, Sahabat bersih, Sahabat Tangguh *Zero* Bencana, FIAL dan SELATA;
6. Melaksanakan Festival Literasi Baca: Pasar Baca #SAYA BACA dan membangun taman bacaan/perpustakaan desa, kelurahan, komunitas basis dan ruang publik dan tempat wisata (wisata baca); Penyediaan pendidikan yang berkualitas dan merata serta peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik;
7. Peningkatan dan Pendekatan Pelayanan Kesehatan melalui Klinik Primer Desa Berbasis Masyarakat; Penguatan Gerakan #G*OOD* PAGI dan Sapu Bersih #z-MALARIA untuk Peningkatan Pelayanan Preventif serta Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Manusia; Melaksanakan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana;
8. Optimalisasi dan Ekspansi Lahan dan Pengadaan Alat Mesin Pertanian untuk Produksi Cabe dan Bawang serta Produksi Unggulan Lainnya;
9. Melaksanakan Harmonisasi Kebijakan Pertanian serta Program Pupuk Gratis bagi Petani Produktif untuk Peningkatan Produksi Cabai, Bawang, Nenas, Kopi, Advokad, Jagung Industri, Kacang Tanah;
10. Membuka dan Meningkatkan Infrastruktur Jalan pada Pusat-pusat Produksi untuk Distribusi Barang dan Mobilitas Orang melalui Jalan Usaha Tani; Aksesibilitas Infratruktur Jalan Menuju Daya Tarik Wisata Desa (*Travel Village*) #Explore Rural Lembata, Jalan Menuju Wisata Budaya, Jalan Menuju Heritage *Tourism*, Jalan Lingkar Tanjung Baja, jalan lingkar Balauring-Lohu, Jalan Lingkar Tanjung Tuak, Jalan Lingkar Tanjung Naga, Jalan Menuju Rest Area Ile Lewotolok, Jalan Menuju Ile Werung, Jalan Menuju Gunung Uyelewun, Jalan Menuju Kawasan Wisata Pantai Wai lei – Atawua *Palace- Stone Garden* Tewaowutung dan sekitarnya;
11. Optimalisasi pemanfaatan taman kota melalui penataan dan pembangunan sarana dan fasilitas berupa F*ree* W*ifi*, lapak dan fasilitas lainnya untuk dijadikan taman tematik dan pembangunan pasar seni Lusikawak serta pengadaan tanah untuk kantor pemerintahan dan fasilitas publik serta polder banjir, lembaga pemerintah lainnya, dan pembangunan taman publik di kota Lewoleba dan sekitarnya;
12. Pengembangan sentra UKM, BUMDes, Koperasi Komunitas dan peningkatan pasar, serta pengembangan jasa kreatif, peningkatan kapasitas usaha kreatif serta penguatan kelembagaan dan modal usaha melalui transfer payment dan mitra usaha kredit mikro; pengembangan inovasi SDM Vokasi Industri bagi pemuda dan perempuan; Pemberdayaan kelompok ekonomi berbasis desa;
13. Pengembangan, pembangunan dan penataan wisata mangrove Pantai Mutiara Waijarang, dengan melaksanakan pembangunan akses jalan masuk serta pembangunan jety danfasilitas lainnya serta Pengembangan Wisata kolam renang apung pulau Siput Awulolong dan daya tarik wisata lainnya yang berpotensi menjadi daerah tujuan wisata; Pengembangan pariwisata desa (*Travel Village*) #Explore Rural Lembata serta pipanisasi air bersih serta lampunisasi pada daerah pengembangan daya tarik wisata di Desa Dikesare, di desa Tewaowutung, di Rest Area W2Pass di Desa Balauring, Pantai *Corner Love* di Desa Balauring, Wisata Pantai Tanjung Tuak di Desa Kolipadan;

14. Pengembangan, pembangunan dan penataan Wisata Wolor Pass, Pulau Gunung Batutara, Wisata *Rest Area* Ile Lewotolok, Wisata Ile Werung, Wisata Religi Bukit Doa Wato Miten, Wisata Pantai Selatan Utara Nuhanera, dan Wisata Kuliner Lewolein, under water Nuhanera dan sekitarnya, *Travel Fishing*, Wisata *Corner Love* (Pojok Cinta) Balauring, Wisata Kuliner Khas Uyelewun Raya "Sarabe Edang dan Tambole", di *Rest Area W2Pass* Balauring, Wisata Pantai Wai Lei-Atauwua Palace Tewaowutung, Wisata Pantai Tirer, Wisata Pantai Wowong-Angarlaleng-Beang-Tanjung Leur - Wade –Bobu, Wisata Budaya dan Heritage Lewogolok Desa Lolong – Lamanunang – Lusilame – Leuwayang-Wakio, Wisata Pesta Kacang Lewohala-Jontona, Wisata Nale, Lamalera whale catching dan daya tarik wisata lainnya yang potensial, wisata buatan, wisata kuliner, wisata belanja; wisata budaya dan heritage lainnya, wisata sport, wisata rohani, dan lain-lain.

    Pembangunan dan penyediaan fasilitas umum, sarana dan prasarana wisata, serta pembangunan sarpras industri pariwisata untuk memicu dan memacu investasi;
15. Peningkatan pasar dan promosi pariwisata melalui peningkatan jaringan/network, melalui media online, media elektronik, media cetak, website, pameran dan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam upaya publikasi kegiatan dan promosi pariwisata serta tour promo dalam dan luar negeri;
16. Melaksanakan kegiatan Rally Wisata Bahari- Lembata *#Truly Heaven*-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 Gunung (*Blue Mountains Tours*), dan berbagai aktivitas dalam semangat *One Product - Ten Activity – Hundred Reward*, Festival Lamaholot, Expo Budaya Uyelewun Raya, Pengembangan Atraksi, Penguatan Struktur Budaya dan Gala Desa;
17. Melaksanakan Program pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran dengan melalukan pengembangan infrastruktur investasi dan *transfer payment* melalui kerjasama/MOU dengan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank untuk Gerakan #Ibu Ekonomi dan #G-U450 untuk peningkatan kewirausahaan;
18. Optimalisasi lembaga usaha kreatif dan jasa kreatif berbasis masyarakat dan/atau komunitas seperti: PEKKA, Majelis Ta'lim, Santa Ana, OMK, Remaja Masjid, dan Karang Taruna untuk melaksanakan Gerakan Ekonomi Rakyat, Ekonomi Pemuda dan (Ekonomi Keluarga #Ibu Ekonomi) serta Penguatan Struktur Budaya;
19. Pengembangan sektor usaha skala industri kreatif berorientasi eksport dan peningkatan nilai tambah produk;
20. Pengembangan dan peningkatan produksi dan pasar usaha industri garam di Desa Tapobaran dan daerah yang potensial, olahan Ikan Teri di Desa Hadakewa, olahan krupuk ikan tuna di Desa Balauring;
21. Pembangunan dan peningkatan sarpras informatika; penguatan infrastruktur e-Government; peningkatan kerjasama media serta melaksanakan kegiatan dan perbaikan regulasi untuk memicu dan memacu investasi;
22. Melaksanakan pemekaran desa, kelurahan dan kecamatan dan penetapan Cluster Desa serta Kampung/Dusun/Desa Tematik;
23. Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja, job fit, lelang jabatan, dalam rangka redesign, restrukturisasi dan reorganisasi penyelenggaraan pemerintahan serta menata dan mengembangkan SDM ASN;
24. Pembangunan stadion olah raga, GOR dan Lapangan Desa;

25. Melakukan intervensi pembangunan lintas sektor kepada desa cepat tumbuh dalam wilayah pengembangan koridor ekonomi dalam pengelompokan cluster desa dan klasifikasi desa tematik;
26. Pengembangan usaha kreatif sumber daya laut, sumber daya pertanian, dan jasa kreatif pariwisata;
27. Meningkatkan kualitas hidup manusia dengan mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan instrumen pendukung pendidikan dan kesehatan berupa pengadaan buku bacaan dan kelengkapan laboratorium serta alat kesehatan, peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga pendidikan dan kesehatan, peningkatan kapasitas inovasi masyarakat;
28. Penyediaan akses hunian layak dan terjangkau melalui #GESER LANI serta Revitalisasi dan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman serta Penyediaan Akses Infrastruktur Dasar Permukiman serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Layak Huni;
29. Meningkatkan penguatan pembangunan perikanan, sumber daya laut dan kemaritiman serta pertanian dan pariwisata sebagai sumber utama peningkatan pendapatan daerah;
30. Meningkatkan produksi dan nilai tambah ekonomi untuk peningkatan pendapatan dari sektor perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata serta perluasan jaringan pasar; Optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif melalui pengembangan destinasi dan daya tarik wisata potensial serta usaha ekonomi kreatif; Optimalisasi pendapatan untuk peningkatan PAD;
31. Mengembangkan SDM ASN berbasis informasi teknologi melalui pembangunan Studio e-Government, kerjasama IT serta inovasi SDM vokasi industri pemuda dan perempuan yang berorientasi kinerja melalui revolusi kerja APIIKKK untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan masyarakat;
32. Memonitor pelaksanaan peran pemerintah kecamatan sebagai coordinator dalam mengkoordinir desa cepat tumbuh serta peran kepala OPD/SKPD sebagai Pembina dan pengelola desa cepat tumbuh melalui cluster -tematik desa dan Finalisasi pembuatan kajian profil dan potensi desa untuk pengelompokan cluster desa dan klasifikasi desa tematik;
33. Pembuatan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) atau Masterplan Pembangunan Perumahan Kabupaten Lembata ; Melakukan kajian dan pembuatan Peraturan Daerah tentang Penetapan Hak Ulayat di Kabupaten Lembata;
34. Mempercepat peningkatan dan pembangunan infrastrurktur strategis (Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di Kota Lewoleba - Pembangunan dan peningkatan infrastrukutr jalan pada daerah pengembangan pariwisata dan pusat-pusat produksi serta wilayah pengembangan strategis dan daerah cepat tumbuh - pembangunan jalan dan jembatan, infrastruktur pertanian, transportasi, air bersih, enegeri, komunikasi dan pengadaan sarana dan prasarana dan fasilitas umum kepariwisataan dan fasilitas sarpras publik lainnya) melalui skema pembiayaan *Avaibility Payment* tahun jamak , tahun tunggal dan sharing budgeting; penataan kota Lewoleba, pembangunan drainase kota dan penyediaan polder banjir serta penyediaan lahan dan pembangunan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sarpras dan fasilitas pemerintahan, pemeliharaan dan perawatan infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas publik dan pemerintahan lainnya;

35. Pembangunan embung muara/estuary di Kali Waima untuk irigasi di daerah pesisir (hilirisasi pertanian) dan untuk air baku dengan sasaran Desa Bour, Desa Wuakerong, desa Duawutung, Desa Riabao, Desa Babokerong dan Desa Baobolak; Pembuatan air baku Desa Lamadale dan Wade, infrastruktur irigasi yang fokus pada Wainili, Letu, Riang Dua, Weilolong, Waikomo dan daerah irigasi lainnya serta pencetakan lahan pertanian;
36. Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan perdesaan dan jalan lingkungan perkotaan, jalan antar desa, jalan menuju akses wisata, pipanisasi air bersih dan listrik desa;
37. Melaksanakan pembangunan jetty pariwisata, jetty perhubungan laut, jetty perikanan serta membangun talud pengaman pada daerah peisisir pantai dengan konstruksi sesuai dengan tingkat kerusakannya berbasis pariwisata; pengembangan daerah pesisir pantai untuk wisata bahari, rehabilitasi dan peremajaan daerah pesisir pantai serta reklamasi Pantai Balauring, Pantai Lewoleba, Pantai Wairiang, Pantai Babokerong dan rehabilitasi, rekonstruksi daerah bencana serta daerah potensi bencana;

    Melaksanakan kajian dan izin lingkungan, izin lokasi, izin pemanfaatan daerah pesisir pantai dan sumber daya laut berbasis pariwisata;
38. Optimalisasi pendapatan dan meningkatkan kerjasama daerah serta perluasan pasar kreatif dan jaringan usaha untuk memacu investasi;
39. Optimalisasi dan penguatan Literasi desa, struktur budaya melalui #GALA DESA , pengembangan atraksi budaya, revitalisasi rumah adat dan pelestarian alat musik tradisional Tatong Uyelewun Lembata serta tenun tradisional orginal Lembata;
40. Pengembangan Destinasi Pariwisata, promosi dan peningkatan pasar pariwisata serta kerjasama dan investasi kepariwisataan;
41. Pengembangan daerah pesisir pantai untuk pariwisata bahari.
42. Menyediakan sarana angkutan perdesaan, peningkatan transportasi laut dan tol laut serta kapal wisata;
43. Pengembangan ternak dan pembangunan Rumah Potong Hewan;
44. Pengembangan Pasar Induk Pada dan Pasar Desa serta Pasar Kecamatan, Pasar Barter Wulandoni, Pasar Malam Waijarang;
45. Penguatan kelembagaan sadar hukum masyarakat dan penguatan Gerakan #PTT 151 serta peningkatan layanan satu pintu dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
46. Pembangunan dan penataan Rumah Layak Huni #GESER LANI;
47. Pengembangan industrialisasi perikanan, industri air mineral, industri olahan pertanian dan industri pariwisata;
48. Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Strategis Antar Daerah;
49. Penguatan kemitraan dan kewirausahaan serta pengembangan kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), BUMDes, #IBU EKONOMI dan Ekonomi Pemuda;
50. Penguatan struktur ekonomi kreatif dan pengembangan pasar rakyat serta pasar wisata;
51. Pengembangan pusat pertumbuhan pada Koridor Ekonomi I dan Koridor Ekonomi II serta Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Koridor Ekonomi I dan Koridor Ekonomi II;
52. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kawasan Ekonomi Korodor I dan Koridor II;

53. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Penguatan Daerah/Desa Cepat Tumbuh Melalui Strategi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Tipologi Desa (Cluster Tematik);
54. Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Penguatan Gerakan Lingkungan Bersih dan Sehat dan Fasilitasi Gerakan Kelompok Sadar Sungai;
55. Melaksanakan Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi dan restorasi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Laut serta Konservasi Air dan Hutan Dalam Perspektif Tata Ruang;
56. Pemeliharaan dan pelestarian situs budaya, sejarah dan kepurbakalaan (Batu relief prasejarah Liangpueng Desa Hingalamamengi dan sekitarnya, tengkorak manusia di Lewogolok desa Lolong dan lain-lainnya);
57. Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Lembata dengan Kabupaten Alor, Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Rote Ndao di Bidang Pariwisata Bahari dan Kebudayaan yang terintegrasi dalam Kerjasama Utara-Utara;
58. Pembangunan SPBU;
59. Melaksanakan kios bayar secara terpadu untuk percepatan realisasi pembayaran pembangunan kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
60. Membangun kantor imigrasi;
61. Membangun dan menata desa yang berfokus pada 4 titik pengembangan yaitu : Program percepatan pembangunan ekonomi desa (P3ED) #Desa Tersenyum 2.0, Pengembangan produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan model cluster-tematik untuk mendukung desa cepat tumbuh, Pengembangan bumdes dan penguatan struktur ekonomi kreatif desa, penguatan literasi dan gala desa serta pengembangan pariwisata desa (*travel village*) #*explore rural* lembata;
62. Melaksanakan kegiata pembangunan sesuai dengan Prioritas Nasional dan Daerah Provinsi NTT Setiap Tahun;

6.3.2.6 Tahapan Pembangunan Tahun 2022

Tahap pembangunan tahun 2022 merupakan tahap finalisasi pelaksanaan aksi pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD, dengan langkah-langka sebagai berikut :

1. Melaksanakan program prioritas sesuai dengan inovasi daerah dan keberlanjutan program prioritas kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan perdesaan serta pengendalian anggaran untuk kualitas belanja;
2. Melaksanakan finalisasi rencana aksi program prioritas cincin-cincin ekonomi secara konsisten serta memantau dan mengevaluasi rencana aksi dan pelaksanaan prioritas kegiatan tahun anggaran 2017-2022 termasuk peningkatan penerapan *e-government* secara menyeluruh;

   Rencana Aksi Program Prioritas Cincin-cincin Ekonomi yang terdiri dari:

   1) Cincin Pertanian yang fokus pada Produksi dan Distribusi yang terdiri dari :
      - Pengembangan Komoditas Unggulan berbasis Industri;
      - Industrialisasi Pertanian dan Peningkatan Daya Saing;
      - Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Pertanian dan Transportasi;
      - Ekspansi Lahan Pertanian;
      - Investasi dan Pasar Lembaga Keuangan
      - Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan SDM;

2) Cincin Kelautan, Perikanan dan Kemaritiman yang fokus pada Industrialisasi dan Pengelolaan Ekonomi Laut, Perikanan dan Kemaritiman serta Pengembangan Sektor Usaha Kelautan, Perikanan dan Kemaritiman berbasis Industri dan Pariwisata, yang terdiri dari :
   - Pengembangan dan Pembangunan Industri Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Kemaritiman;
   - Peningkatan Produksi dan Budidaya Perikanan, Sumber Daya Laut dan Kemaritiman;
   - Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Laut Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
   - Pembangunan Infrastruktur Perikanan, Sumber Daya Laut dan Kemaritiman;
   - Optimalisasi Pendapatan;
3) Cincin Pariwisata yang Fokus pada Fokus pada *Rally* Wisata Bahari – Lembata *#Truly Heaven* –Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 Gunung (*Blue Mountains Tours*); Peningkatan Pasar dan Promosi serta Pengembangan Pembangunan dan Penataan Destinasi, yang terdiri dari :
   - Pengembangan Destinasi;
   - Peningkatan Pasar dan Promosi;
   - Industrialisasi Pariwisata;
   - Pembangunan Infrastruktur dan Akses Transportasi Komunikasi;
   - Pengembangan Kelembagaan;
4) Cincin Industri dan Ekonomi Kreatif yang Fokus pada Industrialisasi Pengembangan Industri, yang terdiri dari :
   - Pengembangan Industrialisasi;
   - Pengembangan UKM dan Wirausaha;
   - Pembangunan Infrastruktur, Industri dan Investasi;
   - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM;
5) Cincin Pemberdayaan Ekonomi Umat Basis, yang Fokus pada #IBU EKONOMI, yang terdiri dari :
   - Penguatan Infrastruktur dan Pengembangan Kemitraan Usaha;
   - Permodalan dan Sumber Pendanaan;
   - Pengembangan Kelembagaan dan Penguatan Kapasitas SDM;
6) Cincin Keuangan Mikro, yang Fokus pada Penguatan Infrastruktur Keuangan Mikro, yang terdiri dari :
   - Pengembangan Kemitraan Usaha dan Kredit Mikro;
   - Penguatan Infrastruktur Keuangan;
   - Pengembangan Kelembagaan dan Penguatan Kapasitas Usaha.

3. Pembentukan lembaga fungsional perencana untuk mempercepat pembangunan daerah;
4. Melaksanakan kegiatan Kemah Bhakti Pemuda, Expo dan Festival Inovasi Pemuda Lembata (*Youth Lembata Innovation Expo and Festival*);
5. Melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Gerakan #IBU EKONOMI, Sahabat bersih, Sahabat Tangguh Zero Bencana, FIAL dan SELATA;
6. Melaksanakan Festival Literasi Baca: Pasar Baca #SAYA BACA dan membangun taman bacaan/perpustakaan desa, kelurahan, komunitas basis dan ruang publik dan tempat wisata (wisata baca); Penyediaan pendidikan yang berkualitas dan merata serta peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik;

7. Peningkatan dan Pendekatan Pelayanan Kesehatan melalui Klinik Primer Desa Berbasis Masyarakat; Penguatan Gerakan #GOOD PAGI dan Sapu Bersih #z-MALARIA untuk Peningkatan Pelayanan Preventif serta Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Manusia; Melaksanakan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana;
8. Optimalisasi dan Ekspansi Lahan dan Pengadaan Alat Mesin Pertanian untuk Produksi Cabe dan Bawang serta Produksi Unggulan Lainnya;
9. Melaksanakan Harmonisasi Kebijakan Pertanian serta Program Pupuk Gratis bagi Petani Produktif untuk Peningkatan Produksi Cabai, Bawang, Nenas, Kopi, Advokad, Jagung Industri, Kacang Tanah;
10. Membuka dan Meningkatkan Infrastruktur Jalan pada Pusat-pusat Produksi untuk Distribusi Barang dan Mobilitas Orang melalui Jalan Usaha Tani; Aksesibilitas Infratruktur Jalan Menuju Daya Tarik Wisata Desa (Travel Village) #Explore Rural Lembata, Jalan Menuju Wisata Budaya, Jalan Menuju Heritage Tourism, Jalan Lingkar Tanjung Baja, jalan lingkar Balauring-Lohu, Jalan Lingkar Tanjung Tuak, Jalan Lingkar Tanjung Naga, Jalan Menuju Rest Area Ile Lewotolok, Jalan Menuju Ile Werung, Jalan Menuju Gunung Uyelewun, Jalan Menuju Kawasan Wisata Pantai Wai Lei – Atawua Palace- Stone Garden Tewaowutung dan Sekitarnya;
11. Optimalisasi pemanfaatan taman kota melalui penataan dan pembangunan sarana dan fasilitas berupa Free Wifi, lapak dan fasilitas lainnya untuk dijadikan taman tematik dan pembangunan pasar seni Lusikawak serta pengadaan tanah untuk kantor pemerintahan dan fasilitas publik serta polder banjir, lembaga pemerintah lainnya, dan pembangunan taman publik di kota Lewoleba dan sekitarnya;
12. Pengembangan sentra UKM, BUMDes, Koperasi Komunitas dan peningkatan pasar, serta pengembangan jasa kreatif, peningkatan kapasitas usaha kreatif serta penguatan kelembagaan dan modal usaha melalui transfer payment dan mitra usaha kredit mikro; pengembangan inovasi SDM Vokasi Industri bagi pemuda dan perempuan; Pemberdayaan kelompok ekonomi berbasis desa;
13. Pengembangan, pembangunan dan penataan wisata mangrove Pantai Mutiara Waijarang, dengan melaksanakan pembangunan akses jalan masuk serta pembangunan jety danfasilitas lainnya serta Pengembangan Wisata kolam renang apung pulau Siput Awulolong dan daya tarik wisata lainnya yang berpotensi menjadi daerah tujuan wisata; Pengembangan pariwisata desa (Travel Village) #Explore Rural Lembata serta pipanisasi air bersih serta lampunisasi pada daerah pengembangan daya tarik wisata di Desa Dikesare, di desa Tewaowutung, di Rest Area W2Pass di Desa Balauring, Pantai Corner Love di Desa Balauring, Wisata Pantai Tanjung Tuak di Desa Kolipadan;
14. Pengembangan, pembangunan dan penataan Wisata Wolor Pass, Pulau Gunung Batutara, Wisata Rest Area Ile Lewotolok, Wisata Ile Werung, Wisata Religi Bukit Doa Wato Miten, Wisata Pantai Selatan Utara Nuhanera, dan Wisata Kuliner Lewolein, under water Nuhanera dan sekitarnya, Travel Fishing, Wisata Corner Love (Pojok Cinta) Balauring, Wisata Kuliner Khas Uyelewun Raya "Sarabe Edang dan Tambole", di Rest Area W2Pass Balauring, Wisata Pantai Wai Lei-Atauwua Palace Tewaowutung, Wisata Pantai Tirer, Wisata Pantai Wowong-Angarlaleng-Beang-Tanjung Leur - Wade –Bobu, Wisata Budaya dan Heritage Lewogolok Desa Lolong – Lamanunang – Lusilame – Leuwayang-Wakio, Wisata Pesta Kacang Lewohala-Jontona, Wisata Nale, Lamalera whale catching dan daya tarik wisata lainnya yang potensial, wisata buatan,

wisata kuliner, wisata belanja; wisata budaya dan heritage lainnya, wisata sport, wisata rohani, dan lain-lain.

Pembangunan dan penyediaan fasilitas umum, sarana dan prasarana wisata, serta pembangunan sarpras industri pariwisata untuk memicu dan memacu investasi;

15. Peningkatan pasar dan promosi pariwisata melalui peningkatan jaringan/network, melalui media online, media elektronik, media cetak, website, pameran dan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam upaya publikasi kegiatan dan promosi pariwisata serta tour promo dalam dan luar negeri;
16. Melaksanakan kegiatan Rally Wisata Bahari Lembata #Truly Heaven-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 Gunung (*Blue Mountains Tours*), dan berbagai aktivitas dalam semangat *One Product - Ten Activity – Hundred Reward*, Festival Lamaholot, Expo Budaya Uyelewun Raya, Pengembangan Atraksi, Penguatan Struktur Budaya dan Gala Desa;
17. Melaksanakan Program pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran dengan melalukan pengembangan infrastruktur investasi dan transfer payment melalui kerjasama/MOU dengan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank untuk Gerakan #Ibu Ekonomi dan #G-U450 untuk peningkatan kewirausahaan;
18. Optimalisasi lembaga usaha kreatif dan jasa kreatif berbasis masyarakat dan/atau komunitas seperti: PEKKA, Majelis Ta'lim, Santa Ana, OMK, Remaja Masjid, dan Karang Taruna untuk melaksanakan Gerakan Ekonomi Rakyat, Ekonomi Pemuda dan (Ekonomi Keluarga #Ibu Ekonomi) serta Penguatan Struktur Budaya;
19. Pengembangan sektor usaha skala industri kreatif berorientasi eksport dan peningkatan nilai tambah produk;
20. Pengembangan dan peningkatan produksi dan pasar usaha industri garam di Desa Tapobaran dan daerah yang potensial, olahan Ikan Teri di Desa Hadakewa, olahan krupuk ikan tuna di Desa Balauring;
21. Pembangunan dan peningkatan sarpras informatika; penguatan infrastruktur e-Government; Peningkatan kerjasama media serta melaksanakan kegiatan dan perbaikan regulasi untuk memicu dan memacu investasi;
22. Melaksanakan pemekaran desa, kelurahan dan kecamatan dan penetapan Cluster Desa serta Kampung/Dusun/Desa Tematik;
23. Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja, job fit, lelang jabatan, dalam rangka redesign, restrukturisasi dan reorganisasi penyelenggaraan pemerintahan serta menata dan mengembangkan SDM ASN;
24. Pembangunan stadion olah raga, GOR dan Lapangan Desa;
25. Melakukan intervensi pembangunan lintas sektor kepada desa cepat tumbuh dalam wilayah pengembangan koridor ekonomi dalam pengelompokan cluster desa dan klasifikasi desa tematik;
26. Pengembangan usaha kreatif sumber daya laut, sumber daya pertanian, dan jasa kreatif pariwisata;
27. Meningkatkan kualitas hidup manusia dengan mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan instrumen pendukung pendidikan dan kesehatan berupa pengadaan buku bacaan dan kelengkapan laboratorium serta alat kesehatan, peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga pendidikan dan kesehatan, peningkatan kapasitas inovasi masyarakat;

28. Penyediaan akses hunian layak dan terjangkau melalui #GESER LANI serta Revitalisasi dan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman serta Penyediaan Akses Infrastruktur Dasar Permukiman serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Layak Huni;
29. Meningkatkan penguatan pembangunan perikanan, sumber daya laut dan kemaritiman serta pertanian dan pariwisata sebagai sumber utama peningkatan pendapatan daerah;
30. Meningkatkan produksi dan nilai tambah ekonomi untuk peningkatan pendapatan dari sektor perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata serta perluasan jaringan pasar; Optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif melalui pengembangan destinasi dan daya tarik wisata potensial serta usaha ekonomi kreatif; Optimalisasi pendapatan untuk peningkatan PAD;
31. Mengembangkan SDM ASN berbasis informasi teknologi melalui pembangunan Studio e-Government, kerjasama IT serta inovasi SDM vokasi industri pemuda dan perempuan yang berorientasi kinerja melalui revolusi kerja APIIKKK untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan masyarakat;
32. Memonitor pelaksanaan peran pemerintah kecamatan sebagai coordinator dalam mengkoordinir desa cepat tumbuh serta peran kepala OPD/SKPD sebagai Pembina dan pengelola desa cepat tumbuh melalui cluster -tematik desa dan Finalisasi pembuatan kajian profil dan potensi desa untuk pengelompokan cluster desa dan klasifikasi desa tematik;
33. Pembuatan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) atau Masterplan Pembangunan Perumahan Kabupaten Lembata ; Melakukan kajian dan pembuatan Peraturan Daerah tentang Penetapan Hak Ulayat di Kabupaten Lembata;
34. Mempercepat peningkatan dan pembangunan infrastrurktur strategis (Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di Kota Lewoleba - Pembangunan dan peningkatan infrastrukutr jalan pada daerah pengembangan pariwisata dan pusat-pusat produksi serta wilayah pengembangan strategis dan daerah cepat tumbuh - pembangunan jalan dan jembatan, infrastruktur pertanian, transportasi, air bersih, enegeri, komunikasi dan pengadaan sarana dan prasarana dan fasilitas umum kepariwisataan dan fasilitas sarpras publik lainnya) melalui skema pembiayaan *Avaibility Payment* tahun jamak , tahun tunggal dan sharing budgeting; penataan kota Lewoleba, pembangunan drainase kota dan penyediaan polder banjir serta penyediaan lahan dan pembangunan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sarpras dan fasilitas pemerintahan, pemeliharaan dan perawatan infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas publik dan pemerintahan lainnya;
35. Pembangunan embung muara/estuary di Kali Waima untuk irigasi di daerah pesisir (hilirisasi pertanian) dan untuk air baku dengan sasaran Desa Bour, Desa Wuakerong, desa Duawutung, Desa Riabao, Desa Babokerong dan Desa Baobolak; Pembuatan air baku Desa Lamadale dan Wade, infrastruktur irigasi yang fokus pada Wainili, Letu, Riang Dua, Weilolong, Waikomo dan daerah irigasi lainnya serta pencetakan lahan pertanian;
36. Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan perdesaan dan jalan lingkungan perkotaan, jalan antar desa, jalan menuju akses wisata, pipanisasi air bersih dan listrik desa;
37. Melaksanakan pembangunan jetty pariwisata, jetty perhubungan laut, jetty perikanan serta membangun talud pengaman pada daerah peisisir pantai dengan konstruksi

sesuai dengan tingkat kerusakannya berbasis pariwisata; pengembangan daerah pesisir pantai untuk wisata bahari, rehabilitasi dan peremajaan daerah pesisir pantai serta reklamasi Pantai Balauring, Pantai Lewoleba, Pantai Wairiang, Pantai Babokerong dan rehabilitasi, rekonstruksi daerah bencana serta daerah potensi bencana;

Melaksanakan kajian dan izin lingkungan, izin lokasi, izin pemanfaatan daerah pesisir pantai dan sumber daya laut berbasis pariwisata;

38. Optimalisasi pendapatan dan meningkatkan kerjasama daerah serta perluasan pasar kreatif dan jaringan usaha untuk memacu investasi;
39. Optimalisasi dan penguatan Literasi desa, struktur budaya melalui #GALA DESA , pengembangan atraksi budaya, revitalisasi rumah adat dan pelestarian alat musik tradisional Tatong Uyelewun Lembata serta tenun tradisional orginal Lembata;
40. Pengembangan Destinasi Pariwisata, promosi dan peningkatan pasar pariwisata serta kerjasama dan investasi kepariwisataan;
41. Pengembangan daerah pesisir pantai untuk pariwisata bahari.
42. Menyediakan sarana angkutan perdesaan, peningkatan transportasi laut dan tol laut serta kapal wisata;
43. Pengembangan ternak dan pembangunan Rumah Potong Hewan;
44. Pengembangan Pasar Induk Pada dan Pasar Desa serta Pasar Kecamatan, Pasar Barter Wulandoni, Pasar Malam Waijarang;
45. Penguatan kelembagaan sadar hukum masyarakat dan penguatan Gerakan #PTT 151 serta peningkatan layanan satu pintu dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
46. Pembangunan dan penataan Rumah Layak Huni #GESER LANI;
47. Pengembangan industrialisasi perikanan, industri air mineral, industri olahan pertanian dan industri pariwisata;
48. Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Strategis Antar Daerah;
49. Penguatan kemitraan dan kewirausahaan serta pengembangan kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), BUMDes, #IBU EKONOMI dan Ekonomi Pemuda;
50. Penguatan struktur ekonomi kreatif dan pengembangan pasar rakyat serta pasar wisata;
51. Pengembangan pusat pertumbuhan pada Koridor Ekonomi I dan Koridor Ekonomi II serta Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Koridor Ekonomi I dan Koridor Ekonomi II;
52. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kawasan Ekonomi Korodor I dan Koridor II;
53. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Penguatan Daerah/Desa Cepat Tumbuh Melalui Strategi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Tipologi Desa (Cluster Tematik);
54. Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Penguatan Gerakan Lingkungan Bersih dan Sehat dan Fasilitasi Gerakan Kelompok Sadar Sungai;
55. Melaksanakan Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi dan restorasi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Laut serta Konservasi Air dan Hutan Dalam Perspektif Tata Ruang;
56. Pemeliharaan dan pelestarian situs budaya, sejarah dan kepurbakalaan (Batu relief prasejarah Liangpueng Desa Hingalamamengi dan sekitarnya, tengkorak manusia di Lewogolok desa Lolong dan lain-lainnya);

57. Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Lembata dengan Kabupaten Alor, Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Rote Ndao di Bidang Pariwisata Bahari dan Kebudayaan yang terintegrasi dalam Kerjasama Utara-Utara;
58. Pembangunan SPBU;
59. Melaksanakan kios bayar secara terpadu untuk percepatan realisasi pembayaran pembangunan kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
60. Membangun kantor imigrasi;
61. Membangun dan menata desa yang berfokus pada 4 titik pengembangan yaitu : Program percepatan pembangunan ekonomi desa (P3ED) #Desa Tersenyum 2.0, Pengembangan produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan model cluster-tematik untuk mendukung desa cepat tumbuh, Pengembangan bumdes dan penguatan struktur ekonomi kreatif desa, penguatan literasi dan gala desa serta pengembangan pariwisata desa (travel village) #explore rural lembata;
62. Melaksanakan kegiata pembangunan sesuai dengan Prioritas Nasional dan Daerah Provinsi NTT Setiap Tahun;

6.3.3. Program Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program khusus yang berkaitan dengan janji-janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam Visi dan Misi dan selanjutnya menjadi program prioritas 5 (lima) tahun kedepan. Program prioritas ini kemudian didefenisikan kedalam program sesuai dengan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang secara rinci nantinya diatur juga dalam Keputusan Kepala Daerah terkait Nomenklatur Program/Kegiatan. Dengan memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lembata, maka program pembangunan prioritas Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel.6.19
Penjabaran Agenda Politik Kepala Daerah ke dalam Program Prioritas

AGENDA POLITIK KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, serta Optimalisasi Peran Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan Daerah dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat	
Perwujudan Lembata sebagai Kabupaten literasi dan Pelaksanaan gerakan pasar baca #Saya Baca melalui bazar buku, pembagian buku gratis, lomba bercerita, sosialisasi gerakan sadar baca dan lomba berpidato.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan
Penyusunan peta kebutuhan infrastruktur pendidikan berdasarkan matriks rasio kebutuhan untuk mengoptimalkan belanja pendidikan	Manajemen Pelayanan Pendidikan
	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SD/MI
	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SMP/MTs
Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pembangunan stadion olahraga dan GOR serta lapangan desa	Program Pembangunan Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga

AGENDA POLITIK KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
Pengembangan kegiatan dan prestasi olahraga dan penguatan struktur budaya #Gala Desa	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; Program Pengembangan Kelembagaan dan Budaya Program Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati
Peningkatan pelayanan kesehatan primer klinik primer desa berbasis masyarakat melalui #Good Pagi	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Gerakan *Good* Pagi)
Pembentukan Tim SABER (Sapu Bersih) malaria #Z-malaria	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelaksanaan Kemah Bhakti dan Bulan Pancasila #Saya Anak Pancasila melalui Festival Inovasi Pemuda Lembata	Program peningkatan peran serta kepemudaan; Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pembentukan Forum Inovasi Anak Lembata (FIAL) #SAYA ANAK PANCASILA terdiri dari Komunitas Seni Lapak Lembata (SELATA), GENRE, Sahabat Tangguh Zero Korban Bencana;	Program pengembangan wawasan kebangsaan
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Pembentukan kelompok sadar hukum berbasis masyarakat (desa sadar hukum dan desa perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat/PATBM) dan perwujudan masyarakat yang Patuh, Taat, Tertib (PTT) di 144 desa dan 7 kelurahan, #PTT 151	Program Peningkatan Kesadaran Hukum
Pemberdayaan ekonomi perempuan #Ibu Ekonomi	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
	Program pengembangan lembaga ekonomi
Pelaksanaan pembentukan 10 Pusat Informasi Konseling Remaja dan 10 bina keluarga remaja generasi berencana (GenRe), serta 20 Bina Keluarga Balita holistik integratif dan pembentukan Kampung KB di 9 desa tertinggal	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
	Program Keluarga Berencana
MISI 2 : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur, Transportasi, Air Bersih, Energi, Komunikasi dan Penataan Kota	
Peningkatan Percepatan Pembangunan infrastruktur strategis (jalan -jembatan-infrastruktur pertanian), transportasi (pelabuhan laut, Bandar udara, transportasi darat), air bersih, energi, dan penataan kota melalui skema biaya tahun tunggal, tahun jamak dan *avaibility payment*	Program Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis
Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta jalan menuju daerah tujuan wisata dan daya tarik wisata lainnya	Program Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis (Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan)
Perluasan Jaringan distribusi air minum/pipanisasi dengan skema biaya APBD, APBN dan *Sharing Budget*	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Perluasan Jaringan distribusi Listrik/lampunisasi dengan skema biaya APBD, APBN dan *Sharing Budget*	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Perencanaan dan pembangunan kolam retensi/polder dan drainase kota di Kota Lewoleba	Program Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
Penyiapan master plan dan DED *Water Front City* kawasan pesisir utara Lewoleba dan Desa Balauring	Program Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis (Pembangunan

AGENDA POLITIK KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
serta pembangunan talud pengaman pantai berbasis pariwisata	Infrastruktur Perkotaan)
	Program Pengamanan Pantai
	Program Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan
	Program Perencanaan Tata Ruang
	Program Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan
Pembangunan, rehabililitasi dan rekonstruksi, serta restorasi infrastruktur yang berpotensi menimbulkan dampak bencana dan tanggap darurat, serta pasca bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
	Program pembangunan daerah rawan bencana
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
	Program Pembangunan turap / talud / bronjong
	Program Pengendalian Banjir
	Program Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis
Pengadaan 6 unit solarcell	Pengembangan Energi Baru Terbarukan
Optimalisasi peningkatan dan pembangunan Daerah Irigasi dan pembangunan embung muara/waduk muara (estuari)	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Program pengembangan dan perluasan infrastruktur jaringan komunikasi	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media masa;
Pemetaan/pembuatan landskap tata pembangunan #Kota Humanis di Kota Lewoleba dan pembangunan TPS bersih di Kota Lewoleba (*clean depo transfer*).	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pembentukan Tim Sahabat Bersih	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Pembangunan/perbaikan rumah layak huni melalui APBDes, APBD, APBN dan kerjasama pihak ketiga. Perumahan Layak Huni dengan GESER LANI (Gerakan 1.000 Rumah Layak Huni)	Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pengembangan Perumahan
Pengadaan tanah untuk perluasan Bandara Wunopito, Bandara Tanjung dan polder banjir, drainase kota, kantor TNI -Polri, Kantor Imigrasi, Kantor BPJS, ruang *public* dan kantor penyelenggaraan pemerintahan	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
MISI 3 : Mempercepat Pembangunan Dan Mengembangkan Sumber Daya Ekonomi Laut Dan Maritim, Serta Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Dan Pariwisata Berkelanjutan	
Penyiapan studi lokasi dan pembangunan Pelabuhan Veri Hadingmanuk, Pelabuhan Peti Kemas "Kolipadan Bay" dan Bandara Tanjung di daerah Tuak Wutun	Program Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pengamanan Pantai Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pembangunan jeti pariwisata, jeti perikanan dan jeti perhubungan laut	
Penataan dan pembangunan Pelabuhan Laut Lewoleba, Balauring dan Wulandoni	Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan
Peningkatan frekwensi pelayaran kapal penyeberangan veri Waijarang-Deri setiap hari PP (melalui APBN dan pihak ketiga),	
Pengadaan rute Kapal PELNI Lewoleba-Wakatobi dan Wakatobi-Lewoleba;	
Pembangunan kolam renang apung dan/atau jeti	

AGENDA POLITIK KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
ke Pulau Siput Awulolong, Jetty Kolipadan, Jetty Tapolangu, dan Jetty Nuhanera	
Peningkatan produksi empat (4) komoditi utama, yaitu: jagung industri, cabe, bawang dan kacang tanah	Program Pengembangan Komoditas Unggulan Berorientasi Industri
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
Swasembada bawang, cabe dan jagung industri (tidak impor) melalui ekspansi lahan setiap desa 10 ha	Program Ekspansi Lahan Pertanian
Pembangunan *Solar Packed Dealer* Nelayan (SPDN) dan Pelabuhan Perikanan	Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan
Pengembangan kerjasama investasi pembangunan pabrik ikan kaleng Sarden Lembata	Program Pengembangan dn Pembangunan Industri Perikanan dan Pengolahan Sumber Daya Laut dan Kemaritiman
Pengolahan sumberdaya laut dan pengolahan Bandeng untuk mendukung industri pengolahan perikanan	Program Peningkatan Produksi & Budidaya Perikanan Sumber Daya Laut & Kemaritiman
Pembangunan infrastruktur pariwisata secara bertahap dan berkelanjutan	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Penataan dan pengembangan berbagai tempat wisata daerah	Peningkatan Pasar dan Promosi
Pengembangan 450 usahawan baru/gerakan 450 usahawan	Program Pengembangan UKM dan Wirausaha; Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
Pengembangan usaha garam konsumsi dan industri	Program Pengembangan Industrialisasi
MISI 4 : Mempercepat Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan serta Meningkatkan Pasar dan Promosi Daerah Tujuan Wisata	
Penyelenggaraan *Rally* Wisata Bahari – Lembata #*Truly Heaven*-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 Gunung (*Blue Mountains Tours*)	• Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; • Program Peningkatan Pasar dan Promosi Wisata; • Program Industrialisasi Pariwisata dan Investasi; • Program Pengembangan Kelembagaan dan Budaya; • Program Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis
Optimalisasi dan Penguatan Struktur Budaya dengan#Gala Desa dan Pelestarian Alat Musik Tradisional Tatong Uyelewun Lembata serta Tenun Tradisional Original Lembata;	
Peningkatan Pasar dan Promosi pariwisata	
Pembangunan sarana dan prasarana Pusat Penyelaman (*diving centre*) di Wisata Mangrove Pantai Mutiara Waijarang	
Pembentukan dan pengelolaan Badan Pengelola Pariwisata Lembata : Lembata *tourism board*	
Pengembangan, pembangunan dan penataan daerah tujuan wisata dan daya tarik wisata yang potensial : Wisata Wolor Pass/Bukit Cinta, Bukit Susu, Bukit Doa, Wisata Mangrove Pantai Mutiara di Desa Waijarang, Pantai Penyu di Desa Loang, Pantai Pojok Cinta di Desa Balauring, *Rest Area* Ile Lewotolok dan Batutara, geotermal Atadei sebagai wisata *geopark*, Pantai Wowong, Pantai Bean, Tanjung Leur, pesisir utara Ile Ape, Pantai Waijarang, Pantai Watomiten, Pantai Bour, Pantai Babokerong, Pantai Watanlolong, Pantai Mingar, Pantai Tanjung Tuak Kolipadan dan sekitarnya, wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, wisata minat khusus, wisata baca, wisata buatan, wisata tirta, wisata *agroforestry*, wisata mangrove, wisata konservasi	
Pengembangan, penataan dan pembangunan pariwisata Kolam Renang Apung Siput Awalolong	

AGENDA POLITIK KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
Pengembangan kawasan industri pariwisata pada sisi utara jalan utama Desa Waijarang	
Pengembangan kawasan wisata di pesisir utara Tanjung Bahagia	
MISI 5 : Meningkatkan Pendapatan dan Kerja Sama Daerah serta Mengembangkan Ekonomi Wilayah dan Pembangunan Perdesaan Berbasis Industri Berkelanjutan	
Pembuatan dan pelaksanaan road map potensi pendapatan daerah	Program Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Pembangunan SPBU Pembangunan pabrik air mineral (investasi)	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;
Optimalisasi dan revitalisasi Pasar Pada menjadi pasar induk, Pasar Lamahora, Pasar TPI dan pasar desa	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Pengawasan dan pendampingan pengelolaan dana desa dalam perencanaan penganggaran, serta implementasi secara transparan dan bertanggungjawab	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan penataan administrasi desa
Rencana pengembangan wilayah/kawasan sebagai daerah cepat tumbuh pada Koridor Ekonomi I dan Koridor Ekonomi II melalui cluster-tematik desa	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Daerah Cepat Tumbuh
	Program Perencanaan Tata Ruang
	Program Kerjasama Pembangunan
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pengembangan Komoditas Unggulan Berorientasi Industri Program peningkatan produksi hasil peternakan Program Pengembangan dan Pembangunan Industri Perikanan dan Pengolahan Sumber Daya Laut dan Kemaritiman
Penyiapan lahan untuk produksi bawang dan cabe 10 ha setiap desa melalui gerakan swasembada cabe dan bawang #t-Cabang	Program Pengembangan Komoditas Unggulan Berorientasi Industri
Optimalisasi dan ekspansi lahan pertanian untuk mendukung target swasembada cabe dan bawang 2018 serta produk unggulan lainnya	
Gerakan harmonisasi desa 2.0 #DESA PANCASILA	Program peningkatan peran serta kepemudaan
	Program pengembangan wawasan kebangsaan
MISI 6 : Menata dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Berbasis Teknologi Informasi serta Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	
Pengadaan pusat data, informasi dan pengetahuan berbasis sistem informasi (website pemda)	• Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa • Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo • Program Pengembangan Data dan
Pembentukan organisasi dan studio UPT (Unit Pelayanan Terpadu) *e-Government* #Studio *e-G*	

AGENDA POLITIK KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
Optimalisasi Teknologi Informasi (TI), kerjasama dengan pihak ketiga pembangunan BTS untuk peningkatan jaringan telekomunikasi	Informasi • Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Pengembangan kerjasama dengan media memuat informasi pembangunan daerah	
Pengembangan *E-Government* (*E-Planning dan E-Budgeting*, dan aplikasi terkait pelayanan pemerintahan),	Program Perencanaan Pembangunan daerah
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah menuju WTP
Restrukturisasi ASN sesuai dengan merit system berdasarkan Undang-undang ASN	• Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah • Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Optimalisasi tenaga ASN, rasionalisasi KSO, dan reorganisasi sesuai kebutuhan daerah	
Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai WTP pada 2019 #Go To WTP	• Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH • Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
Peningkatan Kinerja Pemda dan perbaikan kualitas pelayanan public serta peningkatan kapasitas APIIKKK	• Program Pembinaan, Pengembangan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang APIIKKK; • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang APIIKKK

Bab 7

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat 2 (dua) hal pokok yakni indikasi program prioritas dan kebutuhan pendanaan. Program prioritas yang dimaksudkan di sini adalah bahwa program-program pembangunan daerah yang disebutkan pada bab sebelumnya kemudian dijabarkan dalam program-program prioritas PD yang dilengkapi dengan rencana target capaian (makro) setiap tahun dari setiap program dimaksud. Program-program ini kemudian ditargetkan alokasi pendanaannya sesuai skala prioritas daerah.

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. PERKIRAAN KEBUTUHAN INVESTASI DAN PENDANAAN

7.1.1. Asumsi Dasar Penghitungan Kebutuhan Investasi

Dengan memperhitungkan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Lembata dalam lima tahun mendatang, pendanaan pembangunan diperkirakan akan terus meningkat untuk mendorong penambahan dan pemupukan modal melalui investasi. Perkiraan kebutuhan investasi Kabupaten Lembata tahun 2017-2022 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut:

1. Sesuai dengan skenario optimis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata akan meningkat dengan 5,23 persen pada tahun 2017 menjadi 5,75 - 7,00 persen pada tahun 2022;
2. Nilai ICOR (*incremental capital to output ratio* atau rasio penambahan modal terhadap produksi) dari 4,5 pada tahun 2017 menjadi 4,5 pada tahun 2022;
3. Tingkat depresiasi diperkirakan 6,50 persen per tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
4. Tingkat tabungan per tahun merupakan hasil perkalian dari pertumbuhan ekonomi ditambah depresiasi dan nilai ICOR;
5. PDRB Konstan diperkirakan naik 4,37 persen/tahun
6. Tingkat inflasi diperkirakan sebesar 5 persen per tahun;
7. Kebutuhan Investasi 4,13 persen/tahun
8. Kapasitas fiskal Kabupaten Lembata dihitung berdasarkan jumlah belanja modal Pemerintah Kabupaten Lembata ditambah belanja modal Pemerintah Provinsi dengan memperhitungkan kenaikan belanja modal sebesar 5 persen per tahun;
9. Kesenjangan Investasi 4,01 persen/tahun
10. Investasi Pemerintah Pusat dihitung dari nilai investasi tahun 2015 dengan memperhitungkan pertumbuhan 5 persen per tahun;
11. Perkiraan pertumbuhan nilai investasi swasta (Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing) sebesar 5 persen per tahun.
12. Kebutuhan Investasi Swasta Baru diperkirakan naik 5 persen pertahun

7.1.2. Penghitungan Kebutuhan Investasi 2017-2022

Dengan memperhitungkan berbagai asumsi tersebut, sampai dengan tahun 2022 diperkirakan akan terjadi kesenjangan investasi. Kebutuhan investasi tersebut hanya akan dapat dipenuhi oleh Kabupaten Lembata dengan mempertimbangkan potensi dan kemajuan yang telah dicapai selama ini, kondisi sosial yang kondusif, dan kondisi ketertiban dan keamanan yang terjaga dengan baik sehingga menarik investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Lembata. Perkiraan Kebutuhan insvestasi Kabupaten Lembata 2017-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 7.1.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,23	5,34-5,64	5,44-5,74	5,55-6,15	5,65-6,55	**5,75-7,00**
2	ICOR	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	**4,50**
3	Tingkat depresiasi (%)	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	**6,50**
4	Tingkat tabungan (%)	10,69	10,86	10,56	11,41	12,05	**12,25**
5	PDRB Konstan Tahun 2010 (Rp. Miliar)	1.063,165	1.119,917	1.180,883	1.246,395	1.316,814	**1.375,676**
6	Tingkat Inflasi (%)	6,00	6,00	5,50	5,50	5,00	**5,00**
7	Kebutuhan Investasi (Rp. Miliar)	3.804	4.150	4.531	4.594	4.657	**4,849**
8	Kapasitas Fiskal (Rp. Miliar)	242	188	205	232	262	**294**
	a. Belanja Modal Pemerintah Provinsi (Rp. Miliar)	83	87	91	96	101	**105**
	b. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten (Rp. Miliar)	159	101	114	136	161	**189**
9	Kesenjangan Investasi (Rp. Miliar)	3.493	3.819	4.173	4.209	4.251	**4.421**
10	Perkiraan Investasi Pemerintah (Rp. Miliar)	69	73	77	80	84	**88**
11	Perkiraan Investasi Swasta (Rp. Miliar)	883	957	1.035	1.117	1.188	**1.247**
12	**Kebutuhan Investasi Swasta (PMA+PMDN) Baru (Rp. Miliar)**	**2.540**	**2.789**	**3.062**	**3.012**	**2.979**	**3.076**

Sumber : Hasil Analisis, 2017

7.1.3. Perkiraan Kebutuhan Pendanaan APBD Provinsi

Berdasarkan perhitungan kebutuhan investasi Kabupaten Lembata untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Nusa Tenggara Timur 2013-2018, maka perkiraan kebutuhan pendanaan yang diharapkan dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

Tabel. 7.2.
Perkiraan Kebutuhan Pendanaan APBD Provinsi NTT

Prioritas	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia						
a) Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan (M Rupiah)	1,5	1,57	1,65	1,73	1,82	1,91
b) Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan (M Rupiah)	29,98	31,48	33,05	34,71	36,44	38,26
c) Peningkatan keterampilan dan produktivitas pekerja (M Rupiah)	1.0	1.05	1,10	1,15	1,20	1,25
2. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang baik						
a) Peningkatan kapasitas aparat (M Rupiah)						
b) Peningkatan prasarana dan sarana pemerintahan (M Rupiah)						
3. Pengembangan Ekonomi Daerah						
a) Peningkatan produktivitas, nilai dan pendapatan pertanian dan Perikanan (M Rupiah)	7,42	7,7	8,1	8,5	9,09	9,45
b) Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan industri pengolahan (M Rupiah)						
c) Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan pariwisata (M Rupiah)						
4. Pembangunan Infrastruktur						
a) Pembangunan prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi (M Rupiah)	2,5	2,62	2,75	2,89	3,03	3,19
b) Pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman (M Rupiah)						
c) Pembangunan prasarana dan sarana pengembangan ekonomi (M Rupiah)	197,7	207,5	217,9	228,8	240,3	252,3
5. Pengelolaan sumber daya Alam dan Llingkungan Hidup						
a) Pengolahan limbah (M Rupiah)	1,75	1,83	1,92	2,02	2,12	2,23
b) Penataan dan pemulihan lahan kritis (M Rupiah)	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
c) Pencegahan dan Mitigasi Bencana (M Rupiah)	1,1	1,15	1,21	1,27	1,33	1,40

Sumber : Bappeda 2016

7.1.4. Perkiraan Kebutuhan Pendanaan APBN

Berdasarkan perhitungan kebutuhan investasi Kabupaten Lembata untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022, mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, pemenuhan agenda pembangunan Nawacita dalam RPJMN Tahun 2015-2019, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's), maka perkiraan kebutuhan pendanaan yang diharapkan dari APBN sebagai berikut :

Tabel. 7.3.
Perkiraan Kebutuhan Pendanaan untuk APBN

Prioritas	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia						
a) Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan (M Rupiah)	16	16,8	17,6	18,5	19,4	**20,4**
b) Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan (M Rupiah)	50	52	55,12	57,88	60,77	**63,81**
c) Peningkatan keterampilan dan produktivitas pekerja (M Rupiah)	22,3	23,01	24,2	25,4	26,7	**28.07**
2. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang baik						
a) Peningkatan kapasitas aparat (M Rupiah)	3,1	3,3	3,4	3,6	3,8	**4,2**
b) Peningkatan prasarana dan sarana pemerintahan (M Rupiah)	9,6	10,08	10,58	11,11	11,66	**12,25**
3. Pengembangan Ekonomi Daerah						
a) Peningkatan produktivitas, nilai dan pendapatan pertanian dan Perikanan (M Rupiah)	12,01	12,6	13,23	13,89	14,56	**15,31**
b) Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan industri pengolahan (M Rupiah)	12,9	13,54	14,22	14,93	15,68	**16,46**
c) Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan pariwisata (M Rupiah)	3,1	4,2	4,4	4,6	4,9	**5,1**
4. Pembangunan Infrastruktur						
a) Pembangunan prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi (M Rupiah)	71	74,55	78,27	82,19	86,3	**90,6**
b) Pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman (M Rupiah)	80	97	97,97	102,8	108,1	**113,4**
c) Pembangunan prasarana dan sarana pengembangan ekonomi (M Rupiah)	84	88,2	92,6	97,2	102,1	**107,2**
5. Pengelolaan sumber daya Alam dan Llingkungan Hidup						
a) Pengolahan limbah (M Rupiah)	6,5	6,8	7,2	7,5	7,9	**8,3**
b) Penataan dan pemulihan lahan kritis (M Rupiah)	2,65	2,78	2,92	3,06	3,22	**3,38**
c) Pencegahan dan Mitigasi Bencana (M Rupiah)	**4,1**	**4,3**	**4,41**	**4,63**	**4,86**	**5,10**

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda, 2017

7.2. INDIKASI KEBUTUHAN DANA KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2017-2022

Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 berisi program-program prioritas dan kebutuhan pendanaan baik untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah (mendukung visi, misi) maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pagu indikatif pendanaan ini selanjutnya dipisahkan untuk program prioritas pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pembagian Prioritas dan Indikatif Pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 7.4. dan Uraian Programnya dapat dilihat pada Tabel 7.5, 7.6 dan 7.7

Tabel. 7.4.
Pembagian Prioritas dan Kerangka Pendanaan 5 (lima) Tahun

URAIAN PROGRAM PRIPRITAS	Tahun-1 (2018)	Tahun-2 (2019)	Tahun-3 (2020)	Tahun-4 (2021)	Tahun-5 (2022)
Prioritas I : Merupakan Program Pembangunan Daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan Amanat/Kebijakan Nasional yang defenitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana.	327,124,199,815.00	331,321,407,613.60	354,574,655,316.09	378,028,411,673.38	393,293,401,001.04
Prioritas II : Merupakan Program Prioritas Tingkat OPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan.	22,869,416,925.00	25,695,416,457.50	28,221,814,973.25	30,268,427,870.58	33,763,223,757.63
Prioritas III : Merupakan Program di tingkat OPD yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Program ini untuk pemenuhan kebutuhan kinerja aparatur dalam menigkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan	40,339,639,074.00	49,507,699,870.50	55,150,369,651.95	61,129,186,844.49	66,514,931,373.50
TOTAL	**390,333,255,814.00**	**406,524,523,941.60**	**437,946,839,941.29**	**469,426,026,388.44**	**493,571,556,132.17**

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Bapplitbangda, 2017

Prioritas 1

Program Pembangunan Daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan Amanat/Kebijakan Nasional yang defenitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana

Prioritas I

Halaman

1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ---------- VII-8
2. Dinas Kesehatan ---------- VII-8
3. Rumah Sakit Umum Daerah ---------- VII-10
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan ---------- VII-10
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ---------- VII-11
6. Satuan Polisi Pamong Praja ---------- VII-12
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ---------- VII-12
8. Dinas Lingkungan Hidup ---------- VII-13
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ---------- VII-13
10. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA ---------- VII-14
11. Dinas Komunikasi dan Informatika ---------- VII-14
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ---------- VII-14
13. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan ---------- VII-15
14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ---------- VII-15
15. Dinas Perikanan ---------- VII-15
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ---------- VII-16
17. Dinas Pertanian dan Ketanahan Pangan ---------- VII-17
18. Dinas Peternakan ---------- VII-17
19. Sekretariat Daerah ---------- VII-18
20. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat ---------- VII-18
21. Inspektorat ---------- VII-19
22. Kecamatan Nubatukan ---------- VII-19
23. Kecamatan Lebatukan ---------- VII-19
24. Kecamatan Omesuri ---------- VII-19
25. Kecamatan Buyasuri ---------- VII-20
26. Kecamatan Atadei ---------- VII-20
27. Kecamatan Nagawutung ---------- VII-20
28. Kecamatan Ile Ape ---------- VII-20
29. Kecamatan Wulandoni ---------- VII-20
30. Kecamatan Ile Ape Timur ---------- VII-21
31. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ---------- VII-21
32. Badan Keuangan Daerah ---------- VII-21
33. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ---------- VII-22
34. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ---------- VII-22
35. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ---------- VII-23

Tabel 7.5
Program Prioritas 1

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.01.0.1	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**					**40,275,002,000**		**40,365,493,655**		**40,372,449,026**		**45,481,943,928**		**47,602,388,321**		**214,097,276,929**	**Dinas PKO**
1.01.	**Pendidikan**					**34,372,902,350**		**34,400,934,040**		**34,339,183,449**		**39,373,101,794**		**41,410,411,973**		**183,896,533,606**	**Dinas PKO**
1.01.01. 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SD/MI	Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun di Jenjang SD/MI/Paket A	Orang	15,080	15,231	24,499,981,275	15,383	24,499,981,275	15,537	24,000,000,000	15,692	27,000,000,000	15,849	30,000,000,000	16,008	129,999,962,550	Dinas PKO
		Jumlah Lulusan Jenjang SD/MI	Orang	2811	2994		3070		3066		3007		3102		3075		
		Jumlah Bangunan SD/MI dalam Kondisi Baik	Unit	178	178		178		178		178		178		178		
		Jumlah Bangunan SD/MI	Unit	178	178		178		178		178		178		178		
		Jumlah Guru SD/MI	Orang	1534	1534		1534		1534		1534		1534		1534		
		Jumlah Lulusan SD/MI		2811	2994		3070		3066		3007		3102		3075		
1.01.01. 17	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SMP/MTs	Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun di Jenjang SMP/MTs/Paket B	Orang	4,418	4,422	7,092,033,675	4,436	7,092,033,675	4,458	7,000,000,000	4,480	9,000,000,000	4,503	8,000,000,000	4,525	38,184,067,350	Dinas PKO
		Jumlah Lulusan Jenjang SMP/MTs	Orang	2144	2144		2382		2522		2994		3070		3066		
		Jumlah Bangunan SMP/MTs dalam Kondisi Baik	Unit	58	58		58		58		58		58		58		
		Jumlah Bangunan SMP/MTs	Unit	58	58		58		58		58		58		58		
		Jumlah Guru SMP/MTs	Orang	644	644		644		644		644		644		644		
		Jumlah Lulusan SMP/MTs	Orang	2144	2144		2382		2522		2994		3070		3066		
1.01.01. 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru yang mengikuti ujian kompetensi	Orang	1000	1223	2,500,570,500	1023	2,500,570,500	773	3,000,000,000	723	3,000,000,000	423	3,000,000,000	4165	14,001,141,000	Dinas PKO
		Jumlah Guru yang berijazah S1/DIV	Orang	2,087	2,182		2209		2357		2505		2612		2709		
1.01.01. 21	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah SD/MI yang berakreditasi	Sekolah	71	86	280,316,900	95	308,348,590	105	339,183,449	117	373,101,794	130	410,411,973	145	1,711,362,706	Dinas PKO
		Jumlah SMP/MTs yang berakreditasi	Sekolah	23	26		30		33		37		41		47		
2.13	**Kepemudaan dan Olahraga**					**5,902,099,650**		**5,964,559,615**		**6,033,265,577**		**6,108,842,134**		**6,191,976,348**		**30,200,743,323**	**Dinas PKO**
2.13.00 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda	Klp	74	81	234,490,600	91	207,939,660	103	233,733,626	113	262,106,989	128	293,317,687	143	1,231,588,562	Dinas PKO
		Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	Klp	74	80		85		97		109		109		120		
2.13.00 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah Wirausaha Muda	Orang	7		-	7	100,000,000	7	100,000,000	7	100,000,000	7	100,000,000	7	400,000,000	Dinas PKO
2.13.00 19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah Pelatih Bersertifikat	Orang	5	6	-	8	50,000,000	9	50,000,000	11	50,000,000	14	50,000,000	17	200,000,000	Dinas PKO
2.13.00 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	Co	6	6	390,109,050	8	329,119,955	8	372,031,951	8	419,235,146	9	471,158,660	9	1,981,654,761	Dinas PKO
		Jumlah Atlit yang dibina	Orang	70	80		90		110		110		110		110		
		Jumlah Cabang Olahraga yang dimenangkan	Co	2	3		4		5		6		6		6		
2.13.00 21	Program Pembangunan Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Gedung Olahraga beserta Kelengkapannya (Multiyears)	Paket		1	5,277,500,000	1	5,277,500,000	1	5,277,500,000	1	5,277,500,000	1	5,277,500,000	1	26,387,500,000	Dinas PKO
1.02.0.1.	**Dinas Kesehatan**					**50,268,298,188**		**52,568,543,845**		**59,202,911,198**		**64,422,288,513**		**64,903,907,510**		**291,365,949,253**	**DinKes**
1.02.	**Kesehatan**					**50,144,762,388**		**52,432,654,465**		**59,053,432,880**		**64,257,862,363**		**64,723,038,745**		**290,611,750,841**	**DinKes**
1.02.01. 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	%	85	87.5	3,007,540,000	90	3,308,294,000	91	3,639,123,400	92.5	3,639,123,400	93	3,639,123,400	95	17,233,204,200	DinKes
		Rasio Kebutuhan Obat : Ketersediaan Obat		85	87.5		90		91		92.5		93		95		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Layanan Kefarmasian sesuai Standar	%	87	88		90		92		94		95		97		
1.02.01. 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	Orang	35000	39,000	30,583,257,238	44000	31,000,000,000	45000	33,506,577,062	47000	38,423,411,348	49000	37,784,540,114	55000	171,297,785,763	DinKes
		Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	%	60	62		65		67		69		72		75		
		Cakupan Penanganan Gawat Darurat	%	85	88		90		92		95		97		98		
1.02.01. 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas	%	85	87	198,476,000	89	218,323,600	91	240,155,960	92	264,171,556	93	290,588,712	95	1,211,715,828	DinKes
		Jumlah Apotik, Toko Obat dan Toko Alat Kesehatan yang memilik Izin	Apotik/Toko	8	8		8		9		9		10		10		
1.02.01. 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Gerakan *Good* Pagi)	Jumlah Kunjungan dan Layanan dokter spesialis melalui klinik primer desa	Kali	154	462	755,315,700	462	830,847,270	462	913,931,997	462	1,005,325,197	462	1,105,857,716	462	4,611,277,880	DinKes
		Cakupan Rumah Tangga Sehat	%	67	69		70		72		75		77		80		
		Jumlah Tenaga Medis	Orang	409	409		450		450		450		450		450		
		Jumlah Dokter	Orang	30	35		35		37		39		39		40		
		Jumlah Desa/Kelurahan UCI	Desa/Kel	129	129		135		137		140		147		154		
1.02.01. 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita Gizi Buruk	Orang	36	35	524,173,700	33	576,591,070	30	634,250,177	27	697,675,195	25	767,442,714	20	3,200,132,856	DinKes
		Jumlah Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan	Orang	36	35		33		30		27		25		20		
		Cakupan MP-ASI anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin	%	85	87		89		90		91		92		93		
1.02.01. 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM	Desa/Kel	64	68	874,516,100	74	961,967,710	79	1,058,164,481	87	1,163,980,929	90	1,280,379,022	94	5,339,008,242	DinKes
		Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat	%	77.58	82.72		85.25		89.75		91.15		93.25		95.75		
		Persentase Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	%	97.69	97.75		97.95		98.01		98.15		98.3		98.76		
		Jumlah Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan	TPM	135	138		140		147		150		152		155		
1.02.01. 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	Jumlah Penderita Baru TB BTA	Orang	75	70	2,787,968,650	65	3,066,765,515	60	3,373,442,067	50	3,710,786,273	45	4,081,864,900	40	17,020,827,405	DinKes
		Jumlah Penderita TBC	Orang	172	150		100		95		90		85		80		
		Jumlah Pasien TB yang meninggal	Orang	0	0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pasien TB yang sembuh	Orang	42	50		50		55		57		60		65		
		Jumlah Penderita DBD	Orang	1	0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Penderita Malaria	Orang	7959	7500		7000		6500		6000		5500		4500		
		Jumlah Pasien HIV AIDS	Orang	26	24		23		22		20		17		15		
		Jumlah Penderita Diare yang ditangani	Orang	0	0		0		0		0		0		0		
		Persentase Angka KLB Penyakit	%	0	0		0		0		0		0		0		
1.02.01. 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah PusKesmas Terakreditasi	Pusk	2	5	874,409,000	2	961,849,900	0	1,058,034,890	0	1,163,838,379	0	1,280,222,217	9	5,338,354,386	DinKes
		Persentase Puskesmas dengan Indeks Kepuasan Konsumen	%	1	1		3		4		5		7		9		
1.02.01. 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas/Pustu/ Posyandu/Polindes	%	424	424	8,259,092,000	424	9,000,000,000	424	11,670,935,906	424	10,954,851,452	424	10,954,851,452	424	50,839,730,810	424
		Jumlah Ruang Tambahan Puskesmas yang dibangun	RT	1	1		1		1		1		1		5		
		Cakupan Ketersediaan Saranan Prasarana Penunjang Puskesmas/Pustu	%	70	72.75		75.55		77.57		79.82		81.05		85.75		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02.01. 28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 5 Jenis tenaga kesehatan	Pusk	9	9		9		9	200,000,000	9	200,000,000	9	200,000,000	9	600,000,000	DinKes
1.02.01. 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Jumlah Penderita Pnemonia pada Balita	orang	1189	968	216,466,200	718	238,112,820	524	261,924,102	475	288,116,512	425	316,928,163	400	1,321,547,798	DinKes
		Jumlah Anak Usia 1 Tahun yang diimunisasi campak	Orang	1303	1350		1375		1400		1425		1450		1500		
		Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan	Orang	9329	10550		10726		10895		11003		11213		11501		
1.02.01. 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan skrining kesehatan lansia	%	31.88	35.13	135,971,200	37.26	149,568,320	39.99	164,525,152	41.75	180,977,667	45.27	199,075,434	54.1	830,117,773	DinKes
1.02.01. 31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase industri rumah tangga pangan yang bersertifikat	%	10	15	16,700,000	26	18,370,000	30	20,207,000	37	22,227,700	29	24,450,470	40	101,955,170	DinKes
1.02.01. 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah Kematian Bayi	Orang	21	17	1,910,876,600	16	2,101,964,260	15	2,312,160,686	13	2,543,376,755	11	2,797,714,430	9	11,666,092,731	DinKes
		Jumlah Ibu Hamil yang meninggal karena Hamil, Bersalin dan Nifas	Orang	4	3		2		2		1		1		0		
		Jumlah Komplikasi Kebidanan yang mendapat penanganan	Orang	339	329		320		315		300		290		275		
1.04.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**					**28,470,600**		**31,317,660**		**34,449,426**		**37,894,369**		**41,683,805**		**173,815,860**	**Dinas Kesehatan**
1.04.00. 20	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Fasilitasi Deklarasi STBM	Kali	9	9	28,470,600	9	31,317,660	9	34,449,426	9	37,894,369	9	41,683,805	45	173,815,860	Dinas Kesehatan
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					**95,065,200**		**104,571,720**		**115,028,892**		**126,531,781**		**139,184,959**		**580,382,553**	**Dinas Kesehatan**
2.08.00 15	Program Keluarga Berencana	Cakupan Pelayanan Keluarga Berencana	%	20	20	95,065,200	20	104,571,720	20	115,028,892	20	126,531,781	20	139,184,959	100	580,382,553	Dinas Kesehatan
1.02.02	**Rumah Sakit Umum Daerah**					**42,799,844,600**		**41,281,467,630**		**53,102,811,966**		**58,463,093,163**		**64,359,402,479**		**260,006,619,837**	**RSUD**
1.02.	**Kesehatan**					**42,799,844,600**		**41,281,467,630**		**53,102,811,966**		**58,463,093,163**		**64,359,402,479**		**260,006,619,837**	**RSUD**
1.02.02 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai	%	75	80	4,686,909,300	85	4,655,600,230	89	5,671,160,253	93	6,238,276,278	97	6,862,103,906	100	28,114,049,967	RSUD
		Rasio Kebutuhan Obat : Ketersediaan Obat	%	0.75	0.77		0.82		0.85		0.87		0.91		0.95		
		Persentase Layanan Kefarmasian sesuai Standar	%	90	90		90		90		92		92		95		
1.02.02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Penanganan Gawat Darurat	%	75	86	7,131,415,500	89	7,131,415,500	91	8,129,012,755	92.75	8,991,914,031	93.34	9,941,105,434	94.75	41,324,863,219	RSUD
1.02.02 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan ketersediaan prasarana serta peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit	%	60	65	30,852,198,800	68.75	29,352,198,800	68.57	39,146,160,548	70.35	43,060,776,603	71.26	47,366,854,263	75.95	189,778,189,014	RSUD
1.02.02 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan	%	75	77.27	129,321,000	79.98	142,253,100	81.65	156,478,410	85.27	172,126,251	87.76	189,338,876	90.05	789,517,637	RSUD
1.03.01.	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan**					**74,598,681,100**		**74,591,630,895**		**75,332,126,508**		**76,014,060,019**		**76,434,186,882**		**376,970,685,404**	**Dinas PUPRP**
1.03.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					**70,693,023,500**		**70,627,011,315**		**70,971,044,970**		**71,581,634,486**		**71,923,282,953**		**355,795,997,223**	**Dinas PUPRP**
1.03.01. 15	Program Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis	%	15%	17%	48,883,165,900	21%	48,000,000,000	26%	48,000,000,000	30%	48,000,000,000	38%	48,000,000,000	38%	240,883,165,900	Dinas PUPRP
		Panjang Jalan Kabupaten	Km	577	577		577		577		577		577		577		
		Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Km	89	100		120		150		175		222		222		
		Panjang Jalan yang memiliki Trotoar	Km	11	17		19		22		25		28		28		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan (Akses ke pusat kota, akses ke destinasi wisata)	Km	660	660		660		660		660		660		660		
1.03.01. 16	Program Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Meningkatnya Kualitas Drainase dan Gorong - Gorong	%	33%		-		-	32%	700,000,000	34%	700,000,000	0.089903803	700,000,000	40%	2,100,000,000	Dinas PUPRP
1.03.01. 21	Program Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Kebinamargaan	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	%	43%	47%	368,238,000	50%	405,061,800	54%	445,567,980	57%	490,124,778	65%	539,137,256	65%	2,248,129,814	Dinas PUPRP
1.03.01. 22	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	%	0.74%	1.48%	5,604,681,650	3.69%	6,165,149,815	7.38%	6,165,149,815	14.76%	6,165,149,815	22.14%	6,165,149,815	22.14%	30,265,280,910	Dinas PUPRP
		Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Ha	10	20		50		100		200		300		300		
		Luas Irigasi Kabupaten	Ha	1355	1355		1355		1355		1355		1355		1355		
1.03.01. 24	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Menintkatnya Kualitas Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	%	61.08%	64.18%	13,638,320,450	80.56%	13,638,320,450	91.49%	13,000,000,000	97.11%	13,300,000,000	100.00%	13,300,000,000	100.00%	66,876,640,900	Dinas PUPRP
1.03.01. 25	Program pengendalian banjir	Terkendalinya Dampak Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai	%	48%	52%	224,339,200	55%	246,773,120	58%	271,450,432	64%	298,595,475	70%	328,455,023	70%	1,369,613,250	Dinas PUPRP
1.03.01. 28	Program Pengamanan Pantai	Terkendalinya Dampak Abrasi pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai	%	35.67%	38.40%	1,717,533,800	40.62%	1,889,287,180	42.27%	2,078,215,898	45.68%	2,286,037,488	50.98%	2,514,641,237	50.98%	10,485,715,602	Dinas PUPRP
1.03.01. 29	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW	%	99.59%	99.59%	147,833,800	99.99%	162,617,180	99.98%	178,878,898	100.00%	196,766,788	100.00%	216,443,467	100.00%	902,540,132	Dinas PUPRP
1.03.01. 31	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang	%	0%	0%	58,158,500	0%	63,974,350	0%	70,371,785	0%	77,408,964	0%	85,149,860	0%	355,063,458	Dinas PUPRP
		Jumlah Ruang Publik	Ha	150	150		150		150		150		150		150		
		Jumlah Ruang Publik yang berubah fungsi	Ha	-	-		-		-		-		-		-		
1.03.01. 32	Program Pembinaan Penataan Ruang	Terselenggaranya Pembinaan Penataan Ruang	%	50%	56%	50,752,200	60.12%	55,827,420	64.82%	61,410,162	67.62%	67,551,178	73.18%	74,306,296	73.18%	309,847,256	Dinas PUPRP
2.09	**Perhubungan**					**3,905,657,600**		**3,964,619,580**		**4,361,081,538**		**4,432,425,534**		**4,510,903,929**		**21,174,688,181**	**Dinas PUPRP**
2.09.00 15	Program Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase Sarana Prasarana Perhubungan	%	55.25%	57.82%	3,316,037,800	60.75%	3,316,037,800	64.66%	3,647,641,580	67.94%	3,647,641,580	70.15%	3,647,641,580	70.15%	17,575,000,340	Dinas PUPRP
2.09.00 16	Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Prasarana perhubungan	%	50.45%	55.27%	36,780,000	58.94%	40,458,000	60.82%	44,503,800	64.88%	48,954,180	70.22%	53,849,598	70.22%	224,545,578	Dinas PUPRP
2.09.00 17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Transportasi	%	52.18%	57.80%	43,070,200	59.22%	47,377,220	60.98%	52,114,942	62.16%	57,326,436	65.45%	63,059,080	65.45%	262,947,878	Dinas PUPRP
2.09.00 18	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Prosentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (rambu,marka,guardrill dan LPJU) yang ada di Kabupaten	%	22.45%	27.68%	471,481,800	33.12%	518,629,980	37.89%	570,492,978	48.35%	627,542,276	52.44%	690,296,503	52.44%	2,878,443,537	Dinas PUPRP
2.09.00 19	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Prosentase Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji	%	13.95%	11.01%	38,287,800	10.55%	42,116,580	6.22%	46,328,238	5.73%	50,961,062	5.43%	56,057,168	5.43%	233,750,848	Dinas PUPRP
		Jumlah Angkutan Umum yang tidak memiliki KIR	Unit	30	25		25		15		15		15				
1.04.01.	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**					**11,998,891,720**		**10,998,367,615**		**10,900,426,811**		**11,485,691,926**		**11,766,483,552**		**57,149,861,623**	**Dinas PRPP**
1.04.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**					**9,363,761,820**		**8,099,724,725**		**8,001,783,921**		**8,587,049,036**		**8,867,840,662**		**42,920,160,163**	**Dinas PRPP**
1.04.01. 15	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Rumah Layak Huni untuk masyarakat berpenghasilah rendah, korban bencana dan relokasi program pemerintah	%	20.25	20.25	2,109,629,050	33.37	2,320,591,955	51.96	2,222,651,151	67.91	2,807,916,266	81.54	3,088,707,892	81.54	12,549,496,313	Dinas PRPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.04.01. 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Prosentasi Cakupan Lingkungan yang Sehat dan aman yang di-dukung dengan sarana-prasarana dan utilitas umum (PSU)	%	29.80%	31.79%	7,254,132,770	35.10%	5,779,132,770	38.41%	5,579,132,770	41.72%	5,279,132,770	45.03%	5,579,132,770	45.03%	29,470,663,850	Dinas PRPP
1.04.01. 19	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Prosentase cakupan Pengelolaan Areal Pemakaman	%	25%					35%	200,000,000	50%	500,000,000	55.45%	200,000,000	55.45%	900,000,000	Dinas PRPP
2.04.	**Pertanahan**					**2,635,129,900**		**2,898,642,890**		**2,898,642,890**		**2,898,642,890**		**2,898,642,890**		**14,229,701,460**	**Dinas PRPP**
2.04.00. 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Meningkatnya Kualitas Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	%	0.55	0.55	2,635,129,900	0.55	2,778,642,890	0.56	2,778,642,890	0.56	2,778,642,890	0.56	2,778,642,890	0.56	13,749,701,460	Dinas PRPP
2.04.00. 17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kualitas Penyelesaian Masalah Pertanahan Terpadu	%	70%		-	50%	25,000,000	40%	25,000,000	40%	25,000,000	33%	25,000,000	33%	100,000,000	Dinas PRPP
2.04.00. 19	Program Koordinasi Administrasi Pertanahan yang menjadi Kewenangan Pemda	Terkoordinasi Administrasi Pertanahan yang Menjadi Wewenang Pemda	%	33%		-	40%	25,000,000	40%	25,000,000	50%	25,000,000	70%	25,000,000	70%	100,000,000	Dinas PRPP
2.04.00. 21	Program Peningkatan Kualitas Proses Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Administrasi Pertanahan	Meningkatnya Kualitas Proses Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Administrasi Pertanahan	%	40%		-	43%	70,000,000	46%	70,000,000	50%	70,000,000	55%	70,000,000	55%	280,000,000	Dinas PRPP
1.05.01.	**Satuan Polisi Pamong Praja**					**845,871,100**		**930,458,210**		**940,901,159**		**952,388,403**		**965,024,371**		**4,634,643,243**	**Sat-POLPP**
1.05.	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan**					**845,871,100**		**930,458,210**		**940,901,159**		**952,388,403**		**965,024,371**		**4,634,643,243**	**Sat-POLPP**
1.05.01. 15	Program ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada terkait Keamanan dan Ketertiban Umum	%	20	20	750,935,200	20	826,028,720	20	826,028,720	20	826,028,720	20	826,028,720	100	4,055,050,080	Sat-POLPP
1.05.01. 16	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Ketersediaan Petugas Perlindungan Masyarakat	%	20	20	35,426,900	20	38,969,590	20	42,866,549	20	47,153,204	20	51,868,524	100	216,284,767	Sat-POLPP
1.05.01. 18	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Penanggulangan Kebakaran	%	20	20	59,509,000	20	65,459,900	20	72,005,890	20	79,206,479	20	87,127,127	100	363,308,396	Sat-POLPP
1.06.01	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					**1,679,824,800**		**1,847,807,280**		**1,957,588,008**		**2,235,846,809**		**2,459,431,490**		**10,180,498,386**	**DInSos-PMD**
1.06.	**Sosial**					**718,519,775**		**840,371,753**		**869,408,928**		**956,349,821**		**1,051,984,803**		**4,436,635,078**	**DInSos-PMD**
1.06.01 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah PMKS yang diberi bantuan	orang	20	28		35	140,000,000	35	140,000,000	35	140,000,000	35	140,000,000	35	560,000,000	DinSos-PMD
		Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	orang	20	28		35		35		35		36		35		
		Jumlah PMKS yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE	orang	35	37		35		35		35		35		35		
1.06.01 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Sosial yang menyediakan Pelayanan Kesos	lembaga	2	2	86,167,975	3	94,784,773	5	104,263,250	5	114,689,575	5	126,158,532	5	526,064,104	DinSos-PMD
1.06.01 22	Program Pelayanan Bantuan Sosial	Jumlah Ketersediaan Pangan Beras	kg	10000	12500	632,351,800	15000	605,586,980	17500	625,145,678	17500	701,660,246	17600	785,826,270	17500	3,350,570,974	DinSos-PMD
		Jumlah Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)	keluarga	5682	6500		7600		8000		8725		9250		9500		
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					**961,305,025**		**1,007,435,528**		**1,088,179,080**		**1,279,496,988**		**1,407,446,687**		**5,743,863,308**	**DInSos-PMD**
2.07.00 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah Kelompok Binaan LPM	desa	154	154	175,506,000	154	193,056,600	154	212,362,260	154	233,598,486	154	256,958,335	154	1,071,481,681	DinSos-PMD
		Jumlah Desa Tersenyum 2.0 yang Dibentuk	desa	0	5		5		5		5		5		25		
		Jumlah LPM Berprestasi	desa	0	4		5		5		5		5		25		
2.07.00 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah BUMDes	bumdes	52	5	72,736,900	5	80,010,590	5	88,011,649	5	96,812,814	5	106,494,095	77	444,066,048	DinSos-PMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.07.00 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Swadaya Masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat	%	65	5	45,000,000	5	45,000,000	5	45,000,000	5	45,000,000	5	45,000,000	85	225,000,000	DinSos-PMD
		Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat		1	2		2		3		3		3		3		
2.07.00 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan penataan administrasi desa	Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	Orang	144	288	105,672,900	288	120,740,190	288	137,314,209	288	155,545,630	288	175,600,193	288	694,873,122	DinSos-PMD
		Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa	Orang	288	288		288		288		288		288		288		
		Jumlah Desa / Kelurahan yang Memiliki Profil Desa	desa	10	10		10		10		10		10		60		
		Jumlah Juklak/Juknis dan Perda/Perbub	Dok	5	1		1		1		1		1		10		
		Jumlah Kelembagaan dan Anggota BPD yang Ditetapkan dan Diadvokasi	lembaga	147	147		147		147		147		147		147		
2.07.00 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	PKK Aktif		147	147	427,180,000	147	419,898,000	147	441,887,800	147	568,576,580	147	625,434,238	147	2,482,976,618	DinSos-PMD
		Posyandu Aktif		318	318		318		318		318		318		318		
		Jumlah Kader PKK Yang Dilatih	Orang	144	25		20		20		25		25		259		
		Jumlah Kader Posyandu Yang Dilatih	Orang	1,590	20		30		30		30		30		1,730		
		Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina (Ibu Ekonomi)	klpk	5	5		5		5		5		5		30		
2.07.00 20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa yang Terdampingi dan Terfasilitasi	desa	144	144	92,959,225	144	102,255,148	144	112,480,662	144	123,728,728	144	136,101,601	144	567,525,365	DinSos-PMD
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	desa	144	144		144		144		144		144		144		
		Jumlah Desa yang didampingi	desa	144	144		144		144		144		144		144		
2.07.00 21	Program Penataan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penataan Desa	desa	144	144	42,250,000	144	46,475,000	144	51,122,500	144	56,234,750	144	61,858,225	144	257,940,475	DinSos-PMD
2.05.01	**Dinas Lingkungan Hidup**					**2,661,771,292**		**2,927,948,421**		**3,220,743,263**		**3,542,817,590**		**3,897,099,349**		**16,250,379,915**	**DLH**
2.05.	**Lingkungan Hidup**					**2,661,771,292**		**2,927,948,421**		**3,220,743,263**		**3,542,817,590**		**3,897,099,349**		**16,250,379,915**	**DLH**
2.05.01 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	%	0.25	0.35	300,000,000	40%	400,000,000	50%	400,000,000	60%	400,000,000	65%	400,000,000	65%	1,900,000,000	DLH
2.05.01 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup	%	35.45%	37.34%	95,550,000	39.20%	105,105,000	40.15%	115,615,500	41.66%	127,177,050	42.89%	139,894,755	42.89%	583,342,305	DLH
2.05.01 23	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah	%	21%	22%	1,566,758,572	23%	1,653,434,429	23%	1,858,777,872	24%	2,084,655,659	25%	2,333,121,225	25%	9,496,747,758	DLH
2.05.01 24	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Presentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah terhadap jumlah total penduduk perkotaan	%	12.65%	14.23%	699,462,720	18.86%	769,408,992	24.50%	846,349,891	30.16%	930,984,880	40.50%	1,024,083,368	40.50%	4,270,289,852	DLH
2.06.01	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					**1,040,723,000**		**1,144,795,300**		**1,249,274,830**		**1,385,202,313**		**1,523,722,544**		**6,343,717,987**	**Dinas DukCapil**
2.06.	**Admnistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					**1,040,723,000**		**1,144,795,300**		**1,249,274,830**		**1,385,202,313**		**1,523,722,544**		**6,343,717,987**	**Dinas DukCapil**
2.06.01 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	%	20	20	1,040,723,000	20	1,144,795,300	20	1,249,274,830	20	1,385,202,313	20	1,523,722,544	100	6,343,717,987	Dinas DukCapil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.08.01	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					**2,596,672,120**		**2,856,339,332**		**2,787,364,343**		**2,921,491,889**		**2,959,032,171**		**14,120,899,855**	**Dinas P2KBP3A**
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					**2,325,876,420**		**2,558,464,062**		**2,459,701,546**		**2,561,062,812**		**2,562,560,187**		**12,467,665,027**	**Dinas P2KBP3A**
2.08.01 15	Program Keluarga Berencana	Persentase Angka TFR	%	3,3	3,3	2,314,626,420	3,2	2,546,089,062	3,2	2,446,089,046	3,2	2,546,089,062	3,1	2,546,089,062	3,0	12,398,982,652	Dinas P2KBP3A
		Jumlah Petugas Klinik KB yang terlatih tentang pencatatan dan pelaporan serta terfasilitasinya sarana dan prasarana untuk petugas PKB/PLKB	Orang	144	144		144		144		144		144		144		
		Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif di kampung KB	Orang	15	5		10		10		10		10		60		
		Jumlah Akseptor KB	Orang	9,100	375		450		525		525		525		11,500		
		Jumlah Peserta KB Aktif	Orang	16,000	500		500		500		500		500		18,500		
2.08.01 24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD	Jumlah kelompok BKB Pos Yandu PAUD terbentuk	klpk	25	5	11,250,000	5	12,375,000	5	13,612,500	5	14,973,750	5	16,471,125	50	68,682,375	Dinas P2KBP3A
		Jumlah Kelompok BKR	klpk	35	5		5		2		2		2		51		
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					**270,795,700**		**297,875,270**		**327,662,797**		**360,429,077**		**396,471,984**		**1,653,234,828**	**Dinas P2KBP3A**
2.02.00. 15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan terkait Kualitas anak dan perempuan	%	20	20	83,924,800	20	92,317,280	20	101,549,008	20	111,703,909	20	122,874,300	100	512,369,296	Dinas P2KBP3A
2.02.00. 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%	20	20	136,870,900	20	155,557,990	20	176,113,789	20	198,725,168	20	223,597,685	100	890,865,532	Dinas P2KBP3A
2.02.00. 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan terhadap Kualitas Hidup Perempuan	%	20	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	100	250,000,000	Dinas P2KBP3A
2.10.01	**Dinas Komunikasi dan Informatika**					**4,487,583,300**		**4,487,583,300**		**5,369,975,793**		**5,972,973,372**		**6,570,270,710**		**26,888,386,475**	**Dinas KomInfo**
2.10	**Komunikasi dan Informatika**					**4,487,583,300**		**4,487,583,300**		**5,369,975,793**		**5,972,973,372**		**6,570,270,710**		**26,888,386,475**	**Dinas KomInfo**
2.10.01 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media masa	Cakupan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	%	20	20	1,521,454,900	20	1,321,454,900	20	1,580,960,429	20	1,825,056,472	20	2,027,562,119	100	8,276,488,820	Dinas KomInfo
2.10.01 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	%	20		-	20	200,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	100	800,000,000	Dinas KomInfo
2.10.01 18	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Persentase Publikasi informasi pemerintah melalui media cetak	%	20	20	831,739,500	20	831,739,500	20	1,006,404,795	20	1,107,045,275	20	1,217,749,802	100	4,994,678,871	Dinas KomInfo
2.10.01 22	Program Pengelolaan Data Pos dan Telekomunikasi	Cakupan Pengelolaan Data Pos dan Telekomunikasi	%	20		-	20	100,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	100	700,000,000	Dinas KomInfo
2.10.01 24	Program Pengembangan Data dan Informasi	Cakupan Layanan E-Government	%	20	20	2,134,388,900	20	2,034,388,900	20	2,382,610,569	20	2,640,871,626	20	2,924,958,788	100	12,117,218,783	Dinas KomInfo
2.11.01	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**					**6,821,605,900**		**6,870,766,070**		**6,854,842,257**		**6,984,326,063**		**7,049,758,249**		**34,581,298,539**	**Dinas Koperindag**
2.11.	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					**491,601,700**		**540,761,870**		**574,838,057**		**654,321,863**		**719,754,049**		**2,981,277,539**	**Dinas Koperindag**
2.11.01 21	Program Pengembangan UKM dan Wirausaha	Jumlah UMKM yang terfasilitasi, Jumlah wirausaha baru	Orang	50 orang (2 kelompok)	50 orang (2 kelompok)	321,801,500	30 UMKM, 90 wirausaha	353,981,650	30 UMKM, 90 wirausaha	369,379,815	30 UMKM, 90 wirausaha	428,317,797	30 UMKM, 90 wirausaha	471,149,576	450 orang (Gerakan usahawan baru)	1,944,630,338	Dinas Koperindag
2.11.01 22	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SDM	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	koperasi	105 koperasi	105 koperasi	169,800,200	105 Koperasi	186,780,220	107 koperasi	205,458,242	109 koperasi	226,004,066	111 koperasi	248,604,473	150 koperasi	1,036,647,201	Dinas Koperindag
3.04.	**Perdagangan**					**2,455,637,000**		**2,455,637,000**		**2,430,637,000**		**2,455,637,000**		**2,455,637,000**		**12,253,185,000**	**Dinas Koperindag**
3.04.00 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terlindungnya konsumen dan pengamanan perdagangan	Kali	9 kali	9 kali	1,955,637,000	18 kali	1,955,637,000	18 kali	1,930,637,000	18 kali	1,955,637,000	18 kali	1,955,637,000	18 kali	9,753,185,000	Dinas Koperindag
3.04.00 20	Program Pembangunan Infrastruktur Industri dan Investasi	Ketersediaan Infrastruktur dalam peningkatan investasi	Unit	2 pasar		500,000,000	34 pasar	500,000,000	34 pasar	500,000,000	34 pasar	500,000,000	34 pasar	500,000,000	40 pasar	2,500,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.07.	**Perindustrian**					**3,874,367,200**		**3,874,367,200**		**3,849,367,200**		**3,874,367,200**		**3,874,367,200**		**19,346,836,000**	**Dinas Koperindag**
3.07.00. 20	Pengembangan Industrialisasi	Berkembangnya industri kecil dan menengah			9 IKM	3,874,367,200	9 IKM	3,874,367,200	9 IKM	3,849,367,200	9 IKM	3,874,367,200	9 IKM	3,874,367,200	9 IKM	19,346,836,000	Dinas Koperindag
2.12.01	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan**					**483,530,600**		**531,883,660**		**545,072,026**		**643,579,229**		**707,937,151**		**2,912,002,666**	**Dinas PM-PTSP-Nakertrans**
2.12	**Penanaman Modal**					**483,530,600**		**531,883,660**		**545,072,026**		**643,579,229**		**707,937,151**		**2,912,002,666**	**Dinas PM-PTSP-Nakertrans**
2.12.01 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor	Paket	5 investor	4 investor	100,761,200	5 investor	110,837,320	5 investor	121,921,052	5 investor	134,113,157	5 investor	147,524,473	5 investor	615,157,202	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
2.12.01 18	Program Pelayanan Perijinan Terpadu	Lama proses perijinan (hari)	Hari	± 9 hari		382,769,400	7 hari	421,046,340	6 hari	423,150,974	6 hari	509,466,071	5 hari	560,412,679	4 hari	2,296,845,464	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
2.17.01.	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**					**3,119,915,775**		**3,135,315,775**		**3,132,255,775**		**3,100,889,775**		**3,121,387,175**		**15,609,764,275**	**Dinas Kearsipan dan Perpust**
2.17.	**Perpustakaan**					**3,119,915,775**		**3,135,315,775**		**3,132,255,775**		**3,100,889,775**		**3,121,387,175**		**15,609,764,275**	**Dinas Kearsipan dan Perpust**
2.17.01. 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan dan Taman Bacaan		9	9	2,965,915,775	9	2,965,915,775	9	2,965,915,775	9	2,895,915,775	9	2,895,915,775	45	14,689,578,875	Dinas Kearsipan dan Perpust
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan		1000	1000		1500		2000		2500		3000		3000		
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		1000	1000		1500		2000		2500		10000				
2.17.01. 16	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Jumlah Sarana Penunjang Perpustakaan		1	1	154,000,000	1	169,400,000	1	166,340,000	1	204,974,000	1	225,471,400	5	920,185,400	Dinas Kearsipan dan Perpust
3.01.01.	**Dinas Perikanan**					**11,323,275,100**		**11,358,974,470**		**11,368,243,777**		**11,441,440,015**		**11,488,955,876**		**56,980,889,238**	**Dinas Perikanan**
3.01.	**Kelautan dan Perikanan**					**11,323,275,100**		**11,358,974,470**		**11,368,243,777**		**11,441,440,015**		**11,488,955,876**		**56,980,889,238**	**Dinas Perikanan**
3.01.01. 16	Program Pengelolaan & Pengendalian Sumber Daya Laut Daerah pesisir & Pulau-Pulau Kecil	Terwujudnya ketangguhan/daya dukung kawasan sumber daya pesisir		1 kawasan	1 kawasan	738,192,000	1 kawasan	738,192,000	1 kawasan	738,192,000	1 kawasan	738,192,000	1 kawasan	738,192,000	1 kawasan	3,690,960,000	Dinas Perikanan
		Jumlah kawasan sumber daya pesisir yang pulih		4 kelompok	4 kelompok		4 kelompok		4 kelompok		4 kelompok		4 kelompok		4 kelompok		
		Jumlah dokumen data base perikanan yang disusun		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
		Jumlah laboratorium terumbu karang yang dibangun		1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		
		Tersedianya Fasilitas Edukasi Perlindungan/ Penangkaran Penyu		1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
3.01.01. 27	Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perikanan Sumber Daya Laut dan Kemaritiman	Jumlah infrastruktur Perikanan Sumber Daya Laut dan Kemaritiman yang dibangun	Unit	2 CS,2 IS,1 pabrik es, 1 PPI, 2 TPI,1 SPDN	2 CS,2 IS,2 pabrik es, 1 PPI, 4 TPI,1 SPDN	5,129,605,800	2 CS,2 IS,2 pabrik es, 1 PPI, 4 TPI,1 SPDN	5,129,605,800	2 CS,2 IS,2 pabrik es, 1 PPI, 4 TPI,1 SPDN	5,129,605,800	2 CS,2 IS,2 pabrik es, 1 PPI, 4 TPI,1 SPDN	5,129,605,800	2 CS,2 IS,2 pabrik es, 1 PPI, 4 TPI,1 SPDN	5,129,605,800	2 CS,2 IS,2 pabrik es, 1 PPI, 4 TPI,1 SPDN	25,648,029,000	Dinas Perikanan
		Jumlah SPDN	Unit		1		1		1		1		1		2		
		Jumlah Sarana Pabrik Es	Unit	1	1		2		2		3		4		5		
		Jumlah Sarana TPI		1	1		1		1		1		2		2		
3.01.01. 28	Program Pengembangan dan Pembangunan Industri Perikanan dan Pengolahan Sumber Daya Laut dan Kemaritiman	Volume Produk Perikanan yang dipasarkan	Ton	400 ton	400 ton	214,197,000	400 ton	235,616,700	400 ton	229,178,370	400 ton	285,096,207	400 ton	313,605,828	400 ton	1,277,694,105	Dinas Perikanan
		Jumlah UPI yang diidentifikasi		30 UPI	30 UPI		30 UPI		30 UPI		30 UPI		30 UPI		30 UPI		
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan & Pemasaran Produk perikanan yang mendapat pembinaan / pendampingan teknis		30 Kelompok	30 Kelompok		30 Kelompok		30 Kelompok		30 Kelompok		30 Kelompok		30 Kelompok		
		Jumlah inovasi menu masakan berbahan baku ikan (jenis)		30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah pelaku usaha pengolahan yang terlatih		5 Jenis	5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		
3.01.01. 29	Program Peningkatan Produksi & Budidaya Perikanan Sumber Daya Laut & Kemaritiman	Jumlah produksi perikanan (ton)		Tangkap 7500 ton,budidaya ikan 3 ton dan rumput laut 8000 ton	Tangkap 7500 ton,budidaya ikan 3 ton dan rumput laut 8000 ton	5,098,483,600	Tangkap 7500 ton, budidaya ikan 3 ton dan rumput laut 8000 ton	5,098,483,600	Tangkap 7500 ton, budidaya ikan 3 ton dan rumput laut 8000 ton	5,098,483,600	Tangkap 7500 ton, budidaya ikan 3 ton dan rumput laut 8000 ton	5,098,483,600	Tangkap 7500 ton, budidaya ikan 3 ton dan rumput laut 8000 ton	5,098,483,600	Tangkap 7500 ton, budidaya ikan 3 ton dan rumput laut 8000 ton	25,492,418,000	Dinas Perikanan
		Jumlah pembudidaya ikan yang mendapat pembinaaan/ pendampingan teknis		70 Kelompok	70 Kelompok		70 Kelompok		70 Kelompok		70 Kelompok		70 Kelompok		70 Kelompok		
		Jumlah penerima manfaat usaha budidaya air payau (kelompok)		2 Kelompok	2 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		
		Jumlah penerima manfaat usaha budidaya rumput laut (kelompok)		11 Kelompok	11 Kelompoki		11 Kelompoki		11 Kelompoki		11 Kelompoki		11 Kelompoki		11 Kelompoki		
		Jumlah sarana penangkapan ikan yang diadakan		75 unit	75 unit		75 unit		75 unit		75 unit		75 unit		75 unit		
		Jumlah kegiatan DAK perikanan tangkap yang terlaksana (kegiatan)		1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
		Jumlah penerima manfaat usaha budidaya air payau (kelompok)		3 Kelompok	3 Kelompok		3 Kelompok		3 Kelompok		3 Kelompok		3 Kelompok		3 Kelompok		
		Jumlah Sarana Budidaya yang tersedia (unit)		5 Unit	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		
		Jumlah kegiatan DAK perikanan budidaya yang terlaksana		1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
3.01.01. 30	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & SDM	Jumlah nelayan yang terlatih (orang)		30 orang	30 orang	142,796,700	55 orang	157,076,370	55 orang	172,784,007	60 orang	190,062,408	60 orang	209,068,648	150 Orang	871,788,133	Dinas Perikanan
3.02.01.	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**					**16,977,436,920**		**16,810,910,520**		**16,644,731,480**		**16,818,934,536**		**16,823,557,898**		**84,075,571,354**	**Dinas BudPar**
2.16.	**Kebudayaan**					**888,123,000**		**891,596,600**		**895,417,560**		**899,620,616**		**904,243,978**		**4,479,001,754**	**Dinas BudPar**
2.16.00 19	Program Pengembangan Kelembagaan dan Budaya	Meningkatnya apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap pewarisan budaya daerah; Meningkatnya kualitas SDM pengelola Pariwisata	Jenis	2 Jenis	2 Jenis	888,123,000	10 Jenis	891,596,600	10 Jenis	895,417,560	10 Jenis	899,620,616	10 Jenis	904,243,978	10 Jenis	4,479,001,754	Dinas BudPar
3.02.	**Pariwisata**					**16,089,313,920**		**15,919,313,920**		**15,749,313,920**		**15,919,313,920**		**15,919,313,920**		**79,596,569,600**	**Dinas BudPar**
3.02.01. 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya destinasi wisata yang potensial	Destinasi	1 paket	12 Destinasi	12,786,279,230	12 Destinasi dan 10 DTW	12,616,279,230	22 Destinasi dan 6 ODTW	12,446,279,230	28 Destinasi dan 6 ODTW	12,616,279,230	34 Destinasi, 6 ODTW	12,616,279,230	40 Destinasi	63,081,396,150	Dinas BudPar
		Jumlah Jety Pariwisata yang dibangun (Jety Awulolong)			1		1		1		1		1		5		
		Jumlah DTW potensial yang dibangun dan ditata		1 paket	12 Destinasi		12 Destinasi dan 10 DTW		22 Destinasi dan 6 ODTW		28 Destinasi dan 6 ODTW		34 Destinasi, 6 ODTW		40 Destinasi		
		Jumlah Fasilitasi Umum di DTW yang tersedia		1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
3.02.01. 18	Program Peningkatan Pasar dan Promosi Wisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Event/org	6 event	7500 orang	3,303,034,690	10000 orang	3,103,034,690	11000 orang	3,003,034,690	12000 orang	2,903,034,690	12500 orang	2,803,034,690	53000 orang	15,115,173,450	Dinas BudPar
3.02.01. 19	Program Industrialisasi Pariwisata dan Investasi	Cakupan Kerjasama/Kemitraan dalam Pengembangan Investasi dan Industrialisasi Pariwisata	%	20			20	200,000,000	20	300,000,000	20	400,000,000	20	500,000,000	80	1,400,000,000	Dinas BudPar

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.03.01.	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**					**9,994,005,344**		**10,115,598,789**		**10,119,351,579**		**10,296,479,647**		**10,458,320,522**		**50,983,755,881**	**Distan-KP**
2.03	**Pangan**					**229,335,600**		**252,269,160**		**247,496,076**		**305,245,684**		**335,770,252**		**1,370,116,772**	**Distan-KP**
2.03.00 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan pangan utama, ketersediaan energi dan protein per kapita dan pengawasan dan pembinaan mutu pangan	%	90%	90%	199,335,600	90%	222,269,160	90%	217,496,076	90%	275,245,684	90%	305,770,252	90%	1,220,116,772	Distan-KP
2.03.00 16	Program pemberdayaan penyuluh	Cakupan Wilayah Penyuluhan	%		20	30,000,000	20	30,000,000	20	30,000,000	20	30,000,000	20	30,000,000	100	150,000,000	Distan-KP
3.03.	**Pertanian**					**9,764,669,744**		**9,863,329,629**		**9,871,855,503**		**9,991,233,963**		**10,122,550,270**		**49,613,639,109**	**Distan-KP**
3.03.01. 16	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah komoditi pertanian yang dipasarkan	Komoditi	2 Komoditi	4 komoditi	498,126,900	6 komoditi	547,939,590	7 komoditi	602,733,549	7 komoditi	663,006,904	7 komoditi	729,307,594	7 komoditi	3,041,114,537	Distan-KP
		Jumlah hasil produksi tanaman hortikultura yang dipasarkan		6 komoditi	6 komoditi		6 komoditi		6 komoditi		6 komoditi		6 komoditi		6 komoditi		
		Jumlah hasil produksi tanaman perkebunan yang dipasarkan		2 komoditi	2 komoditi		2 komoditi		2 komoditi		2 komoditi		2 komoditi		2 komoditi		
3.03.01. 23	Program Pengembangan Komoditas Unggulan Berorientasi Industri	Meningkatnya produksi komoditas unggulan pangan, hortikultura dan perkebunan	komoditi, Ha, ton	2 komoditi, 10 Ha	6 komoditi, 27,173 Ton	3,591,573,294	6 komoditi, 27,909 Ton	3,591,573,294	6 komoditi, 28,179 Ton	3,491,573,294	6 komoditi, 29,193 Ton	3,491,573,294	6 komoditi, 29,857 Ton	3,491,573,294	6 komoditi, 29,857 Ton	17,657,866,470	Distan-KP
		Jumlah pembibitan tanaman Hortikultura		Mangga jeruk, nenas 10.000 anakan	Mangga jeruk, nenas 10.000 anakan		Mangga jeruk, nenas 10.000 anakan		Mangga jeruk, nenas 10.000 anakan		Mangga jeruk, nenas 10.000 anakan		Mangga jeruk, nenas 10.000 anakan		Mangga jeruk, nenas 10.000 anakan		
		Jumlah pembibitan tanaman Perkebunan		Kopi 8.000 anakan	Kopi 8.000 anakan		Kopi 8.000 anakan		Kopi 8.000 anakan		Kopi 8.000 anakan		Kopi 8.000 anakan		Kopi 8.000 anakan		
		Luas Pengembangan tanaman pangan		Jagung, 100 Ha	Jagung, 100 Ha		Jagung, 100 Ha		Jagung, 100 Ha		Jagung, 100 Ha		Jagung, 100 Ha		Jagung, 100 Ha		
		Luas Pengembangan tanaman Hortikultura		Nenas 5 Ha, Bawang merah 50 Ha, Cabe 50 Ha	Nenas 5 Ha, Bawang merah 50 Ha, Cabe 50 Ha		Nenas 5 Ha, Bawang merah 50 Ha, Cabe 50 Ha		Nenas 5 Ha, Bawang merah 50 Ha, Cabe 50 Ha		Nenas 5 Ha, Bawang merah 50 Ha, Cabe 50 Ha		Nenas 5 Ha, Bawang merah 50 Ha, Cabe 50 Ha		Nenas 5 Ha, Bawang merah 50 Ha, Cabe 50 Ha		
		Luas Pengembangan tanaman perkebunan		Kopi 5 Ha	Kopi 5 Ha		Kopi 5 Ha		Kopi 5 Ha		Kopi 5 Ha		Kopi 5 Ha		Kopi 5 Ha		
3.03.01. 24	Program Ekspansi Lahan Pertanian	Luas ekspansi dan Otimalisasi lahan pertanian	Ha	230 Ha	230 Ha	3,194,416,000	560 Ha	3,194,416,000	616 Ha	3,194,416,000	677 Ha	3,194,416,000	744 Ha	3,194,416,000	230 Ha	15,972,080,000	Distan-KP
		Luas pengolahan lahan dan air		Lahan 50 Ha, Air 12 paket	Lahan 50 Ha, Air 12 paket		Lahan 560 Ha, Air 12 paket		Lahan 616 Ha, Air 12 paket		Lahan 677 Ha, Air 12 paket		Lahan 744 Ha, Air 12 paket		Lahan 50 Ha, Air 12 paket		
		Jumlah alsintan yang diadakan		I unit Traktor besar	I unit Traktor besar		I unit Traktor besar		I unit Traktor besar		I unit Traktor besar		I unit Traktor besar		I unit Traktor besar		
		Jumlah traktor besar yang layak pakai		6 unit	6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		
3.03.01. 25	Program Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Pertanian dan Transportasi	Panjang JUT yang dibangun	Km	21 KM	21 KM	1,992,081,600	19 KM	1,992,081,600	20 KM	1,992,081,600	20 KM	1,992,081,600	22 KM	1,992,081,600	105	9,960,408,000	Distan-KP
3.03.01. 26	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Persentasi kenaikan kelas kelompok tani, cakupan bina kelompok tani		5 %; 46,45 %	5 %; 46,45 %	488,471,950	5 %; 46,45 %	537,319,145	5 %; 47,83 %	591,051,060	5 %; 49,28 %	650,156,165	5 %; 50,76 %	715,171,782	5 %; 50,76 %	2,982,170,102	Distan-KP
		Tersusunnya Program dan Programa Penyuluhan		3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		
		Terlaksananya pendampingan program pengembangan usaha agribisnis perdesaan		142 Gapoktan	142 Gapoktan		142 Gapoktan		142 Gapoktan		142 Gapoktan		142 Gapoktan		142 Gapoktan		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah petani dan pelaku agribisnis perkebunan terlatih		20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		
		Jumla Petani dan Petugas yang mengikuti magang		20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		
		Jumlah pendampingan dan pembinaan petani tanaman pangan		36 kali	36 kali		36 kali		36 kali		36 kali		36 kali		36 kali		
		Jumlah petani dan petugas yang mengikuti pelatihan		90 orang	90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		
		Jumlah Kelompok yang dinilai		151 Gapoktan/poktan	151 Gapoktan/ poktan		151 Gapoktan/ poktan		151 Gapoktan /poktan		151 Gapoktan /poktan		151 Gapoktan /poktan		151 Gapoktan /poktan		
3.03.02	**Dinas Peternakan**					**2,139,829,280**		**2,152,275,670**		**2,045,966,699**		**2,091,026,831**		**2,107,592,976**		**10,536,691,456**	**Dinas Peternakan**
3.03.	**Pertanian**					**2,139,829,280**		**2,152,275,670**		**2,045,966,699**		**2,091,026,831**		**2,107,592,976**		**10,536,691,456**	**Dinas Peternakan**
3.03.00 19	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Paket	4 Penyakit, 2 Paket, 12 Lokasi,1 Unit poskeswan Ile ape Timur (7x7) m2	4 Penyakit, 2 Paket, 12 Lokasi,1 Unit poskeswan Ile ape Timur (7x7) m2	353,141,720	4 Penyakit, 2 Paket, 12 Lokasi,1 Unit poskeswan Ile ape Timur (7x7) m2	353,141,720	4 Penyakit, 2 Paket, 12 Lokasi,1 Unit poskeswan Ile ape Timur (7x7) m2	323,141,720	4 Penyakit, 2 Paket, 12 Lokasi,1 Unit poskeswan Ile ape Timur (7x7) m2	353,141,720	4 Penyakit, 2 Paket, 12 Lokasi,1 Unit poskeswan Ile ape Timur (7x7) m2	353,141,720	4 Penyakit, 2 Paket, 12 Lokasi,1 Unit poskeswan Ile ape Timur (7x7) m2	1,735,708,600	Dinas Peternakan
		Terlaksananya Pengawasan kesehatan Masyarakat Veteriner		4 Unit (RPH dan Depo daging)	4 Unit (RPH dan Depo daging)		4 Unit (RPH dan Depo daging)		4 Unit (RPH dan Depo daging)		4 Unit (RPH dan Depo daging)		4 Unit (RPH dan Depo daging)		4 Unit (RPH dan Depo daging)		
		Pembinaan Kesejahteraan Hewan		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
3.03.00 20	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Produksi Hasil Peternakan	%	20	20	1,662,223,660	20	1,662,223,660	20	1,572,223,660	20	1,572,223,660	20	1,572,223,660	100	8,041,118,300	Dinas Peternakan
3.03.00 21	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.	Kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	66,279,900	2 kegiatan	72,907,890	2 kegiatan	80,198,679	2 kegiatan	88,218,547	2 kegiatan	97,040,402	2 kegiatan	404,645,417	Dinas Peternakan
		Pengembangan Jaringan Informasi Pasar		12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
3.03.00 22	Program peningkatan penerapan teknologi petenakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Paket	1 paket peralatan IB	1 paket peralatan IB	58,184,000	1 paket peralatan IB	64,002,400	1 paket peralatan IB	70,402,640	1 paket peralatan IB	77,442,904	1 paket peralatan IB	85,187,194	1 paket peralatan IB	355,219,138	Dinas Peternakan
		Terlaksananya Pelatihan dan bimbingan Pengoperasian teknologi Peternakan tepat Guna		20 Orang, 2 Kecamatan	20 Orang, 2 Kecamatan		20 Orang, 2 Kecamatan		20 Orang, 2 Kecamatan		20 Orang, 2 Kecamatan		20 Orang, 2 Kecamatan		20 Orang, 2 Kecamatan		
		Terlaksananya Pelatihan dan bimbingan Pengoperasian teknologi Peternakan tepat Guna		135 orang, 6 aparatur	135 orang, 6 aparatur		135 orang, 6 aparatur		135 orang, 6 aparatur		135 orang, 6 aparatur		135 orang, 6 aparatur		135 orang, 6 aparatur		
4.01.01	**Sekretariat Daerah**					**2,879,829,300**		**3,105,664,400**		**3,280,559,911**		**3,106,655,000**		**3,401,413,000**		**15,774,121,611**	**Setda**
4.01.	**Unsur Staf Perangkat Daerah**					**937,000,000**		**977,664,400**		**2,051,559,911**		**1,779,705,000**		**1,979,615,000**		**7,725,544,311**	**Setda**
4.01.01. 15	Program Peningkatan Kesadaran Hukum	Cakupan Penyusunan Produk Hukum dan Pelayanan Hukum	%	20	20	246,000,000	20	345,000,000	20	495,250,000	20	541,763,000	20	590,551,000	100	2,218,564,000	Setda
4.01.01. 19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Ketersediaan Dokumen terkait pelayanan publik	Dok	2	2	146,000,000	3	170,000,000	3	300,380,000	3	331,918,000	3	365,610,000	14	1,313,908,000	Setda
4.01.01. 20	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Capaian Kelembagaan yang Efektif dan Efisien	%	20	20	379,000,000	20	75,000,000	20	667,719,911	20	354,927,000	20	372,674,000	100	1,849,320,911	Setda
4.01.01. 24	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase ketepatan laporan kinerja Pemerintah Daerah	%	20	20	104,000,000	20	87,664,400	20	209,530,000	20	147,983,000	100	162,561,000	61	711,738,400	Setda
4.01.01. 28	Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Dokumen Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dokumen pendukung lainnya yang Tepat Waktu		6	6	62,000,000	6	300,000,000	6	378,680,000	6	403,114,000	7	488,219,000	31	1,632,013,000	Setda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.06.	**Energi dan Sumber Daya Mineral**					**1,942,829,300**		**2,128,000,000**		**1,229,000,000**		**1,326,950,000**		**1,421,798,000**		**8,048,577,300**	**Setda**
3.06.00. 15	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan		45	45	1,438,671,500	29	1,453,000,000	34	330,000,000	34	350,000,000	34	385,000,000	103	3,956,671,500	Setda
3.06.00. 16	Program Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	Jumlah pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan		11	11	504,157,800	220	675,000,000	220	899,000,000	220	976,950,000	220	1,036,798,000	891	4,091,905,800	Setda
4.02.01	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**					**8,600,000,000**	**-**	**9,440,331,390**	**-**	**10,934,364,529**	**-**	**12,027,800,982**	**-**	**13,230,581,080**	**-**	**54,233,077,981**	**Setwan**
4.02.	**Unsur Pelayanan Admnistrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD**					**8,600,000,000**		**9,440,331,390**		**10,934,364,529**		**12,027,800,982**		**13,230,581,080**		**54,233,077,981**	**Setwan**
4.02.01 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase RAPERDA yang disetujui DPRD	%	20	20	8,600,000,000	20	9,440,331,390	20	10,934,364,529	20	12,027,800,982	20	13,230,581,080	100	54,233,077,981	Setwan
		Persentase Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	%	20	20		20		20		20		20		100		
4.03.01.	**Inspektorat**					**2,660,063,800**		**2,926,070,180**		**3,118,677,198**		**3,540,544,918**		**3,894,599,410**		**16,139,955,505**	**Inspektorat**
4.03.	**Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan**					**2,660,063,800**		**2,926,070,180**		**3,118,677,198**		**3,540,544,918**		**3,894,599,410**		**16,139,955,505**	**Inspektorat**
4.03.01. 15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Temuan dan Penyelesaian Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	20%	20%	2,318,352,800	20%	2,550,188,080	20%	2,705,206,888	20%	3,085,727,577	20%	3,394,300,334	100%	14,053,775,679	Inspektorat
4.03.01. 16	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase APIP yang memiliki Kompetensi	%	20	20	341,711,000	20	375,882,100	20	413,470,310	20	454,817,341	20	500,299,075	100	2,086,179,826	Inspektorat
4.04.01.	**Kecamatan Nubatukan**					**2,078,538,864**	**-**	**3,606,392,750**	**-**	**3,617,032,025**	**-**	**4,363,735,228**	**-**	**4,800,108,751**	**-**	**18,465,807,619**	**Kec. Nubatukan**
4.04.	**Unsur Penyelenggara Pelayanan Admnistrasi Pemerintah, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat**					**2,078,538,864**		**3,606,392,750**		**3,617,032,025**		**4,363,735,228**		**4,800,108,751**		**18,465,807,619**	**Kec. Nubatukan**
4.04.01. 15	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Menjadi Sasaran Pendampingan, Pembinaan dan Monitoring		11 Desa, 7 Kelurahan	11 Desa, 7 Kelurahan	2,025,464,864	11 Desa, 7 Kelurahan	3,548,011,350	11 Desa, 7 Kelurahan	3,552,812,485	11 Desa, 7 Kelurahan	4,293,093,734	11 Desa, 7 Kelurahan	4,722,403,107	11 Desa, 7 Kelurahan	18,141,785,541	Kec. Nubatukan
4.04.01. 16	Program Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati	Jumlah Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Prioritas Daerah di Kecamatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	53,074,000	2 Kegiatan	58,381,400	2 Kegiatan	64,219,540	2 Kegiatan	70,641,494	2 Kegiatan	77,705,643	2 Kegiatan	324,022,077	Kec. Nubatukan
4.04.02	**Kecamatan Lebatukan**					**302,138,000**	**-**	**200,351,800**	**-**	**220,386,980**	**-**	**242,425,678**	**-**	**266,668,246**	**-**	**1,231,970,704**	**Kec. Lebatukan**
4.04.	**Unsur Penyelenggara Pelayanan Admnistrasi Pemerintah, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat**					**302,138,000**		**200,351,800**		**220,386,980**		**242,425,678**		**266,668,246**		**1,231,970,704**	**Kec. Lebatukan**
4.04.02 15	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Desa yang Menjadi Sasaran Pendampingan, Pembinaan dan Monitoring		17 Desa	17 Desa	281,063,400	17 Desa	177,169,740	17 Desa	194,886,714	17 Desa	214,375,385	17 Desa	235,812,924	17 Desa	1,103,308,163	Kec. Lebatukan
4.04.01. 16	Program Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati	Jumlah Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Prioritas Daerah di Kecamatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	21,074,600	2 Kegiatan	23,182,060	2 Kegiatan	25,500,266	2 Kegiatan	28,050,293	2 Kegiatan	30,855,322	2 Kegiatan	128,662,540	Kec. Lebatukan
4.04.03	**Kecamatan Omesuri**					**201,551,690**	**-**	**221,706,859**	**-**	**243,877,545**	**-**	**268,265,299**	**-**	**295,091,829**	**-**	**1,230,493,223**	**Kec. Omesuri**
4.04.	**Unsur Penyelenggara Pelayanan Admnistrasi Pemerintah, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat**					**201,551,690**		**221,706,859**		**243,877,545**		**268,265,299**		**295,091,829**		**1,230,493,223**	**Kec. Omesuri**
4.04.03 15	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Desa yang Menjadi Sasaran Pendampingan, Pembinaan dan Monitoring		22 Desa	22 Desa	186,551,690	22 Desa	205,206,859	22 Desa	225,727,545	22 Desa	248,300,299	22 Desa	273,130,329	22 Desa	1,138,916,723	Kec. Omesuri
4.04.03 16	Program Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati	Jumlah Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Prioritas Daerah di Kecamatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	15,000,000	2 Kegiatan	16,500,000	2 Kegiatan	18,150,000	2 Kegiatan	19,965,000	2 Kegiatan	21,961,500	2 Kegiatan	91,576,500	Kec. Omesuri

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.04.04.	**Kecamatan Buyasuri**					**131,714,200**	**-**	**144,885,620**	**-**	**159,374,182**	**-**	**175,311,600**	**-**	**192,842,760**	**-**	**804,128,362**	**Kec. Buyasuri**
4.04.	**Unsur Penyelenggara Pelayanan Admnistrasi Pemerintah, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat**					**131,714,200**		**144,885,620**		**159,374,182**		**175,311,600**		**192,842,760**		**804,128,362**	**Kec. Buyasuri**
4.04.04. 15	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Desa yang Menjadi Sasaran Pendampingan, Pembinaan dan Monitoring		20 Desa	20 Desa	116,714,200	20 Desa	128,385,620	20 Desa	141,224,182	20 Desa	155,346,600	20 Desa	170,881,260	20 Desa	712,551,862	Kec. Buyasuri
4.04.04. 16	Program Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati	Jumlah Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Prioritas Daerah di Kecamatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	15,000,000	2 Kegiatan	16,500,000	2 Kegiatan	18,150,000	2 Kegiatan	19,965,000	2 Kegiatan	21,961,500	2 Kegiatan	91,576,500	Kec. Buyasuri
4.04.05	**Kecamatan Atadei**					**207,696,700**	**-**	**228,466,370**	**-**	**251,313,007**	**-**	**276,444,308**	**-**	**304,088,738**		**1,268,009,123**	**Kec.Atadei**
4.04.	**Unsur Penyelenggara Pelayanan Admnistrasi Pemerintah, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat**					**207,696,700**		**228,466,370**		**251,313,007**		**276,444,308**		**304,088,738**		**1,268,009,123**	**Kec.Atadei**
4.04.05 15	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Desa yang Menjadi Sasaran Pendampingan, Pembinaan dan Monitoring		15 Desa	15 Desa	30,800,000	15 Desa	33,880,000	15 Desa	37,268,000	15 Desa	40,994,800	15 Desa	45,094,280	15 Desa	188,037,080	Kec.Atadei
4.04.05 16	Program Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati	Jumlah Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Prioritas Daerah di Kecamatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	176,896,700	2 Kegiatan	194,586,370	2 Kegiatan	214,045,007	2 Kegiatan	235,449,508	2 Kegiatan	258,994,458	2 Kegiatan	1,079,972,043	Kec.Atadei
4.04.06.	**Kecamatan Nagawutung**					**129,585,800**	**-**	**142,544,380**	**-**	**156,798,818**	**-**	**172,478,700**	**-**	**189,726,570**		**791,134,268**	**Kec. Nagawutung**
4.04.	**Unsur Penyelenggara Pelayanan Admnistrasi Pemerintah, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat**					**129,585,800**		**142,544,380**		**156,798,818**		**172,478,700**		**189,726,570**		**791,134,268**	**Kec. Nagawutung**
4.04.06. 15	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Desa yang Menjadi Sasaran Pendampingan, Pembinaan dan Monitoring		18 Desa	18 Desa	100,535,800	18 Desa	110,589,380	18 Desa	121,648,318	18 Desa	133,813,150	18 Desa	147,194,465	18 Desa	613,781,113	Kec. Nagawutung
4.04.06. 16	Program Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati	Jumlah Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Prioritas Daerah di Kecamatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	29,050,000	2 Kegiatan	31,955,000	2 Kegiatan	35,150,500	2 Kegiatan	38,665,550	2 Kegiatan	42,532,105	2 Kegiatan	177,353,155	Kec. Nagawutung
4.04.07	**Kecamatan Ile Ape**					**173,441,400**	**-**	**190,785,540**	**-**	**209,864,094**	**-**	**230,850,503**	**-**	**253,935,554**	**-**	**1,058,877,091**	**Kec. Ile Ape**
4.04.	**Unsur Penyelenggara Pelayanan Admnistrasi Pemerintah, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat**					**173,441,400**		**190,785,540**		**209,864,094**		**230,850,503**		**253,935,554**		**1,058,877,091**	**Kec. Ile Ape**
4.04.07 15	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Desa yang Menjadi Sasaran Pendampingan, Pembinaan dan Monitoring		17 Desa	17 Desa	151,716,400	17 Desa	166,888,040	17 Desa	183,576,844	17 Desa	201,934,528	17 Desa	222,127,981	17 Desa	926,243,794	Kec. Ile Ape
4.04.07 16	Program Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati	Jumlah Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Prioritas Daerah di Kecamatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	21,725,000	2 Kegiatan	23,897,500	2 Kegiatan	26,287,250	2 Kegiatan	28,915,975	2 Kegiatan	31,807,573	2 Kegiatan	132,633,298	Kec. Ile Ape
4.04.08.	**Kecamatan Wulandoni**					**283,828,600**	**-**	**312,211,460**	**-**	**343,432,606**	**-**	**377,775,867**	**-**	**415,553,453**	**-**	**1,732,801,986**	**Kec. Wulandoni**
4.04.	**Unsur Penyelenggara Pelayanan Admnistrasi Pemerintah, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat**					**283,828,600**		**312,211,460**		**343,432,606**		**377,775,867**		**415,553,453**		**1,732,801,986**	**Kec. Wulandoni**
4.04.08. 15	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Desa yang Menjadi Sasaran Pendampingan, Pembinaan dan Monitoring		15 Desa	15 Desa	263,835,800	15 Desa	290,219,380	15 Desa	319,241,318	15 Desa	351,165,450	15 Desa	386,281,995	15 Desa	1,610,743,943	Kec. Wulandoni
4.04.08. 16	Program Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati	Jumlah Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Prioritas Daerah di Kecamatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	19,992,800	2 Kegiatan	21,992,080	2 Kegiatan	24,191,288	2 Kegiatan	26,610,417	2 Kegiatan	29,271,458	2 Kegiatan	122,058,043	Kec. Wulandoni

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.04.09	**Kecamatan Ile Ape Timur**					**173,845,520**	**-**	**191,230,072**	**-**	**210,353,079**	**-**	**231,388,387**	**-**	**254,527,226**	**-**	**1,061,344,284**	**Kec. Ile Ape Timur**
4.04.	**Unsur Penyelenggara Pelayanan Admnistrasi Pemerintah, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat**					**173,845,520**		**191,230,072**		**210,353,079**		**231,388,387**		**254,527,226**		**1,061,344,284**	**Kec. Ile Ape Timur**
4.04.09 15	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Desa yang Menjadi Sasaran Pendampingan, Pembinaan dan Monitoring		9 Desa	9 Desa	59,172,700	9 Desa	65,089,970	9 Desa	71,598,967	9 Desa	78,758,864	9 Desa	86,634,750	9 Desa	361,255,251	Kec. Ile Ape Timur
4.04.09 16	Program Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati	Jumlah Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Prioritas Daerah di Kecamatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	114,672,820	2 Kegiatan	126,140,102	2 Kegiatan	138,754,112	2 Kegiatan	152,629,523	2 Kegiatan	167,892,476	2 Kegiatan	700,089,033	Kec. Ile Ape Timur
5.01.01.	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**					**3,697,185,300**	**-**	**4,653,917,010**	**-**	**4,725,196,881**	**-**	**4,866,604,739**	**-**	**4,989,153,383**	**-**	**22,932,057,313**	**Bappelitbangda**
5.01.	**Perencanaan**					**3,431,000,000**		**4,361,113,180**		**4,403,112,668**		**4,512,312,105**		**4,599,431,485**		**21,306,969,438**	**Bappelitbangda**
5.01.01. 15	Program Kerjasama Pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Kerjasama Pembangunan antar daeran dan Lembaga/Dunia Usaha	%	20	20	82,000,000	20	48,063,290	20	52,869,619	20	58,156,581	20	63,972,239	100	305,061,729	Bappelitbangda
5.01.01. 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Dok	2 Dokumen	5	1,030,000,000	5	995,310,100	5	965,310,100	5	995,310,100	5	995,310,100	25	4,981,240,400	Bappelitbangda
5.01.01. 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota dan Desa Menengah dan Besar	Cakupan Perencanaan Pengembangan Desa dan Kota-Kota Menengah dan Besar	%	20	20	144,000,000	20	153,554,390	20	168,909,829	20	185,800,812	20	204,380,893	100	856,645,924	Bappelitbangda
5.01.01. 20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Penyelenggaraan Bimtek Perencanaan Daerah	Kali	1 Kali	1 Kali	125,000,000	1 Kali	144,007,490	1 Kali	158,408,239	1 Kali	174,249,063	1 Kali	191,673,969	5 Kali	793,338,761	Bappelitbangda
5.01.01. 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuai Program dalam Dokumen Tahunan dan Dokumen Penganggaran terhadap Dokumen Perencanaan Tahunan	%	20	20	1,670,000,000	20	2,645,808,200	20	2,645,808,200	20	2,645,808,200	20	2,645,808,200	100	12,253,232,800	Bappelitbangda
5.01.01. 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Capaian Jumlah Program di bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang memenuhi target	%	20	20	172,000,000	20	137,738,260	20	151,512,086	20	166,663,295	20	183,329,624	100	811,243,265	Bappelitbangda
5.01.01. 23	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase Capaian Jumlah Program di bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA yang memenuhi target	%	20	20	87,000,000	20	97,573,520	20	107,330,872	20	118,063,959	20	129,870,355	100	539,838,706	Bappelitbangda
5.01.01. 24	Program Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase Capaian Program/Kegiatan Skala Kabupaten yang memenuhi Target	%	20	20	121,000,000	20	139,057,930	20	152,963,723	20	168,260,095	20	185,086,105	100	766,367,853	Bappelitbangda
5.04.	**Penelitian dan Pengembangan**					**266,185,300**		**292,803,830**		**322,084,213**		**354,292,634**		**389,721,898**		**1,625,087,875**	**Bappelitbangda**
5.04.00 15	Program Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kali	2	2	266,185,300	2	292,803,830	2	322,084,213	2	354,292,634	2	389,721,898	10	1,625,087,875	Bappelitbangda
5.02.01.	**Badan Keuangan Daerah**					**9,825,924,650**	**-**	**10,808,517,115**	**-**	**11,689,368,827**	**-**	**13,078,305,709**	**-**	**14,386,136,280**	**-**	**59,788,252,581**	**BKD**
5.02.	**Keuangan**					**9,825,924,650**		**10,808,517,115**		**11,689,368,827**		**13,078,305,709**		**14,386,136,280**		**59,788,252,581**	**BKD**
5.02.01. 15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah menuju WTP	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	%	20	20	8,274,106,250	20	9,101,516,875	20	9,911,668,563	20	11,012,835,419	20	12,114,118,961	100	50,414,246,067	BKD
		Ketepatan Waktu dalam Penyusunan Dokumen Anggaran Daerah		Tepat	Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		
		Persentase Aset yang dikelola secara efektif dan efisien	%	20	20		20		20		20		20		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.02.01. 16	Program Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Persentase Cakupan pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam rangka kemandiriaan keuangan daerah	%	20	20	1,551,818,400	20	1,707,000,240	20	1,777,700,264	20	2,065,470,290	20	2,272,017,319	100	9,374,006,514	BKD
5.03.01.	**Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**					**3,127,595,900**	**-**	**3,215,003,230**	**-**	**3,181,151,293**	**-**	**3,416,914,162**	**-**	**3,533,253,319**	**-**	**16,473,917,904**	**BKD-PSDM**
5.03	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**					**3,127,595,900**		**3,215,003,230**		**3,181,151,293**		**3,416,914,162**		**3,533,253,319**		**16,473,917,904**	**BKD-PSDM**
5.03.01. 15	Program Pembinaan, Pengembangan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang APIIKKK	Cakupan Pendayagunaan, Pengembangan dan Pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara	%			2,253,522,600	20	2,253,522,600	20	2,173,522,600	20	2,253,522,600	20	2,253,522,600	100	11,187,613,000	BKD-PSDM
		Persentasepegawai yang diterima sesuai formasi	%				20		20		20		20		100		
		Persentase penempatan pegawai sesuai kualifikasi dan kompetensinya	%				20		20		20		20		100		
		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	%				20		20		20		20		100		
		Persentase angka pelanggaran aparatur terhadap hukum	%				20		20		20		20		100		
		Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur	%				15		10		5		0		0		
5.03.01. 19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang APIIKKK	Persentase aparatur PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional	%	20	20	874,073,300	20	961,480,630	20	1,007,628,693	20	1,163,391,562	20	1,279,730,719	100	5,286,304,904	BKD-PSDM
		Persentase aparatur yang mengikuti bimtek/sosialisasi kepegawaian yang memiliki nilai kategori baik	%	20	20		20		20		20		20		100		
05.05.01.	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**					**2,512,655,800**	**-**	**2,629,654,750**	**-**	**2,708,353,595**	**-**	**2,899,922,325**	**-**	**3,055,647,927**	**-**	**13,806,234,396**	**Badan KesbangPol**
05.05.	**Fungsi Penunjang Lainnya yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**					**2,425,755,800**		**2,534,064,750**		**2,603,204,595**		**2,784,258,425**		**2,928,417,637**		**13,275,701,206**	**Badan KesbangPol**
05.05.01 15	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	%	20	20	1,342,666,300	20	1,342,666,300	20	1,342,666,300	20	1,342,666,300	20	1,342,666,300	100	6,713,331,500	Badan KesbangPol
		Cakupan pendidikan Wawasan Kebangsaan	%	20	20		20		20		20		20		100		
05.05.01 16	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Forum-Forum dan Organisasi tentang Wawasan Kebangsaan	%	20	20	1,083,089,500	20	1,191,398,450	20	1,260,538,295	20	1,441,592,125	20	1,585,751,337	100	6,562,369,706	Badan KesbangPol
1.05.	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan**					**86,900,000**		**95,590,000**		**105,149,000**		**115,663,900**		**127,230,290**		**530,533,190**	**Badan KesbangPol**
05.05.00 17	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan penanganan pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	%	20	20	86,900,000	20	95,590,000	20	105,149,000	20	115,663,900	20	127,230,290	100	530,533,190	Badan KesbangPol

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
05.05.02.	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**					**6,025,842,152**	**-**	**4,327,514,250**	**-**	**4,377,514,250**	**-**	**4,498,514,250**	**-**	**4,631,614,250**	**-**	**23,860,999,152**	**BPBD**
05.05.	**Fungsi Penunjang Lainnya yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**					**6,025,842,152**		**4,327,514,250**		**4,377,514,250**		**4,498,514,250**		**4,631,614,250**		**23,860,999,152**	**BPBD**
05.05.02 23	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Daerah Rawan Bencana yang memiliki kemampuan manajemen penanggulangan bencana	%	35,56%	40,25%	3,227,514,250	45,55%	2,227,514,250	50,78%	2,167,514,250	53,44%	2,167,514,250	55,78%	2,167,514,250	55,78%	11,957,571,250	BPBD
		Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	Desa	25.00	5.00		5.00		10.00		10.00		5.00		60.00		
		Jumlah Sekolah Tangguh Bencana yang dibentuk	Paket	76	15		15		20		20		15		161.00		
05.05.02 24	Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Cakupan Daerah Rawan Bencana yang Ditangani	%	45%	50%	1,000,000,000	52%	1,000,000,000	55%	1,000,000,000	57%	1,000,000,000	60%	1,000,000,000	60%	5,000,000,000	BPBD
05.05.02 25	Program Optimalisasi Pengolahan Data dan Informasi Bencana	Ketersediaan Data/Informasi Rawan Bencana	%	32%	35%	300,000,000	50%	300,000,000	53%	300,000,000	55%	300,000,000	58%	300,000,000	58%	1,500,000,000	BPBD
05.05.02 26	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Prosentase Cakupan Wilayah Terpapar Bencana Yang di Tangani	%	50%	60%	1,498,327,902	65%	800,000,000	75%	910,000,000	78,68%	1,031,000,000	80%	1,164,100,000	80%	5,403,427,902	BPBD
TOTAL						**327,124,199,815.00**		**331,321,407,613.60**		**354,574,655,316.09**		**378,028,411,673.38**		**393,293,401,001.04**		**1,784,342,075,419.10**	

Prioritas 2

Merupakan Program Prioritas Tingkat OPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan.

Prioritas 2

Halaman

1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ---------- VII-26
2. Dinas Kesehatan ---------- VII-26
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ---------- VII-26
4. Dinas Lingkungan Hidup ---------- VII-27
5. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA ---------- VII-27
6. Dinas Komunikasi dan Informatika ---------- VII-27
7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan ---------- VII-27
8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ---------- VII-28
9. Sekretariat Daerah ---------- VII-28
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat ---------- VII-30
11. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ---------- VII-30
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ---------- VII-30

Tabel 7.6
Program Prioritas 2

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.01.0.1	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**					**877,549,600**	**-**	**918,789,560**	**-**	**964,153,516**	**-**	**1,014,053,868**	**-**	**1,068,944,254**	**-**	**4,843,490,798**	**Dinas PKO**
1.01.	**Pendidikan**					**877,549,600**		**918,789,560**		**964,153,516**		**1,014,053,868**		**1,068,944,254**		**4,843,490,798**	**Dinas PKO**
1.01.01. 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini	%	74.16	77.868	351,600,000	81.76	386,760,000	84.21	425,436,000	86.74	467,979,600	89.34	514,777,560	92.02	2,146,553,160	Dinas PKO
1.01.01. 18	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Melek Huruf	Orang	19,623.00	19760.361	525,949,600	19,859	532,029,560	19,958	538,717,516	20,058	546,074,268	20,159	554,166,694	20,259	2,696,937,638	Dinas PKO
1.02.0.1.	**Dinas Kesehatan**					**60,748,400**	**-**	**66,823,240**	**-**	**73,505,564**	**-**	**80,856,120**	**-**	**88,941,732**	**-**	**370,875,057**	**DinKes**
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					**60,748,400**		**66,823,240**		**73,505,564**		**80,856,120**		**88,941,732**		**370,875,057**	**Dinas Kesehatan**
2.08.00 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan penyediaan informasi kesehatan reproduksi, HIV AIDS di setiap Desa/kelurahan	%	20	20	60,748,400	20	66,823,240	20	73,505,564	20	80,856,120	20	88,941,732	100	370,875,057	Dinas Kesehatan
1.06.01	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					**357,415,000**	**-**	**403,156,500**	**-**	**482,472,150**	**-**	**525,719,365**	**-**	**573,291,302**	**-**	**2,342,054,317**	**DinSos-PMD**
1.06.	**Sosial**					**357,415,000**		**403,156,500**		**482,472,150**		**525,719,365**		**573,291,302**		**2,342,054,317**	**DinSos-PMD**
1.06.01 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS termasuk Korban Bencana yang mendapatkan pelayanan Psikososial yang Terlayani di Trauma Center	orang	100	100	309,915,000	100	300,906,500	100	374,997,150	100	412,496,865	100	453,746,552	100	1,852,062,067	DinSos-PMD
		Jumlah Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	%	75	76		77		79		80		82		85		
		Jumlah Korban Bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	orang	200	200		200		200		200		200		200		
		Jumlah Korban Bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	Orang	200	200		200		200		200		200		200		
1.06.01 19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental yang menerima Bantuan	Orang	30	35	47,500,000	45	52,250,000	55	57,475,000	55	63,222,500	55	69,544,750	60	289,992,250	DinSos-PMD
		Jumlah Panti Sosial yang menyediakan Sarana Pelayanan Prasarana Kesos	panti	3	3		3		3		5		5		5		
1.06.01 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang terlatih dan terdidik	Orang	35	0		25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	25	200,000,000	DinSos-PMD
2.05.01	**Dinas Lingkungan Hidup**					**431,422,700**	**-**	**474,564,970**	**-**	**522,021,467**	**-**	**574,223,614**	**-**	**631,645,975**	**-**	**2,633,878,726**	**DLH**
2.05.	**Lingkungan Hidup**					**431,422,700**		**474,564,970**		**522,021,467**		**574,223,614**		**631,645,975**		**2,633,878,726**	**DLH**
2.05.01 15	Program pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelestarian lingkungan	Kualitas Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Pelestarian Lingkungan	%	0.0011	0.0022	43,900,000	0.33%	48,290,000	0.44%	53,119,000	0.55%	58,430,900	0.66%	64,273,990	0.66%	268,013,890	DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.05.01 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat terhadap Pelestarian Lingkungan	%	0.25	0.35	119,828,800	45%	131,811,680	55%	144,992,848	65%	159,492,133	75%	175,441,346	75%	731,566,807	DLH
2.05.01 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemulihan cadangan sumber daya alam	%	0.125	0.2216	267,693,900	27.40%	294,463,290	30.12%	323,909,619	35.42%	356,300,581	40.15%	391,930,639	40.15%	1,634,298,029	DLH
2.08.01	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					**2,537,687,380**	**-**	**2,791,456,118**	**-**	**3,040,601,730**	**-**	**3,377,661,903**	**-**	**3,715,428,093**	**-**	**15,462,835,224**	**Dinas P2KBP3A**
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					**2,537,687,380**		**2,791,456,118**		**3,040,601,730**		**3,377,661,903**		**3,715,428,093**		**15,462,835,224**	**Dinas P2KBP3A**
2.08.01 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah PUS yang ber KB	Orang	16000	500	150,000,000	500	165,000,000	500	151,500,000	500	199,650,000	500	219,615,000	18,516	885,765,000	Dinas P2KBP3A
		Jumlah Pasangan Usia Subur	Orang	16000	500		500		500		500		500		18,516		
2.08.01 17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	70	70	47,420,000	75	52,162,000	87	57,378,200	87	63,116,020	87	69,427,622	90	289,503,842	Dinas P2KBP3A
2.08.01 20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa	lembaga	1	1	31,213,400	1	34,334,740	1	37,768,214	1	41,545,035	1	45,699,539	1	190,560,928	Dinas P2KBP3A
2.08.01 23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Jumlah Unit Pelayanan Keluarga Sejahtera di setiap Kecamatan	lembaga	9	9	25,153,800	9	27,669,180	9	30,436,098	9	33,479,708	9	36,827,679	9	153,566,464	Dinas P2KBP3A
2.08.01 27	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Balai Penyuluhan KB	Jumlah sarana prasarana penunjangn Balai Penyuluh	balai	9	9	1,462,420,000	9	1,608,662,000	9	1,769,528,200	9	1,946,481,020	9	2,141,129,122	9	8,928,220,342	Dinas P2KBP3A
2.08.01 28	Program Pembinaan Kinerja Lini Lapangan	Jumlah PPKBD	Orang	151	151	821,480,180	151	903,628,198	151	993,991,018	151	1,093,390,120	151	1,202,729,132	151	5,015,218,647	Dinas P2KBP3A
2.10.01	**Dinas Komunikasi dan Informatika**					**95,016,100**	**-**	**134,517,710**	**-**	**154,969,481**	**-**	**176,466,429**	**-**	**199,113,072**	**-**	**760,082,792**	**Dinas KomInfo**
2.14	**Statistik**					**95,016,100**		**104,517,710**		**114,969,481**		**126,466,429**		**139,113,072**		**580,082,792**	**Dinas KomInfo**
2.14.00 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Statistik dan Informasi Daerah	%	20	20	95,016,100	20	104,517,710	20	114,969,481	20	126,466,429	20	139,113,072	100	580,082,792	Dinas KomInfo
2.15	**Persandian**					**-**		**30,000,000**		**40,000,000**		**50,000,000**		**60,000,000**		**180,000,000**	**Dinas KomInfo**
2.15.00 20	Program Optimalisasi Data Sandi dan Dokumentasi	Cakupan Pengelolaan Persandian	%	20		-	20	30,000,000	20	40,000,000	20	50,000,000	20	60,000,000	100	180,000,000	Dinas KomInfo
2.12.01	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan**					**419,060,120**	**-**	**460,966,132**	**-**	**477,062,745**	**-**	**557,769,020**	**-**	**613,545,922**	**-**	**2,528,403,939**	**Dinas PM-PTSP-Nakertrans**
2.01.	**Tenaga Kerja**					**378,749,520**		**416,624,472**		**428,286,919**		**504,115,611**		**554,527,172**		**2,282,303,695**	**Dinas PM-PTSP-Nakertrans**
2.01.00 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja berbasis kompetensi, dan wirausaha yang dilatih (orang)	Orang	10 orang	8 orang (2 kelompok)	197,497,100	15 orang	217,246,810	30 orang	208,971,491	40 orang	262,868,640	50 orang	289,155,504	75 orang	1,175,739,545	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
2.01.00 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja (orang)	orang	13 orang	15 orang	97,262,720	39 orang	106,988,992	41 orang	117,687,891	43 orang	129,456,680	45 orang	142,402,348	91 orang	593,798,632	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
2.01.00 17	Program Perlindungan Pengembangan Ketenagakerjaan	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial (orang/perusahaan)	perusahaan	10 perusahaan	10 perusahaan	83,989,700	8	92,388,670	5 orang	101,627,537	5 orang	111,790,291	3 orang	122,969,320	1 orang	512,765,517	Dinas PM-PTSP-Nakertrans

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.08.	**Transmigrasi**					**40,310,600**		**44,341,660**		**48,775,826**		**53,653,409**		**59,018,749**		**246,100,244**	**Dinas PM-PTSP-Nakertrans**
3.08.00 16	Program Transmigrasi Lokal	Persentase warga translok yang terlatih	Paket	2 kelompok	2	40,310,600	50	44,341,660	75	48,775,826	80	53,653,409	85	59,018,749	90	246,100,244	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
2.17.01.	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**					**329,426,575**	**-**	**362,369,233**	**-**	**398,606,156**	**-**	**438,466,771**	**-**	**482,313,448**	**-**	**2,011,182,183**	**Dinas Kearsipan dan Perpust**
2.18	**Kearsipan**					**329,426,575**		**362,369,233**		**398,606,156**		**438,466,771**		**482,313,448**		**2,011,182,183**	**Dinas Kearsipan dan Perpust**
2.18.00. 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah data base informasi kearsipan		9 Dokumen	9 Dokumen	7,984,000	9 Dokumen	8,782,400	9 Dokumen	9,660,640	9 Dokumen	10,626,704	9 Dokumen	11,689,374	9 Dokumen	48,743,118	Dinas Kearsipan dan Perpust
		Jumlah katalog data		20 Naskah Arsip Statis di 9 kec.	20 Naskah Arsip Statis di 9 kec.		20 Naskah Arsip Statis di 9 kec.		20 Naskah Arsip Statis di 9 kec.		20 Naskah Arsip Statis di 9 kec.		20 Naskah Arsip Statis di 9 kec.		20 Naskah Arsip Statis di 9 kec.		
		Jumlah sarana penyimpanan arsip		1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		
2.18.00. 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip		1 Paket	1 Paket	98,155,100	1 Paket	107,970,610	1 Paket	118,767,671	1 Paket	130,644,438	1 Paket	143,708,882	1 Paket	599,246,701	Dinas Kearsipan dan Perpust
		Jumlah penarikan arsip statis		20 Naskah Arsip Statis di 9 kec.	20 Naskah Arsip Statis di 9 kec.		20 Naskah Arsip Statis di 9 kec.		20 Naskah Arsip Statis di 9 kec.		20 Naskah Arsip Statis di 9 kec.		20 Naskah Arsip Statis di 9 kec.		20 Naskah Arsip Statis di 9 kec.		
		Jumlah Peraturan daerah tentang Pengelolaan kearsipan		1 Dokumen Perda Kearsipan	1 Dokumen Perda Kearsipan		1 Dokumen Perda Kearsipan		1 Dokumen Perda Kearsipan		1 Dokumen Perda Kearsipan		1 Dokumen Perda Kearsipan		1 Dokumen Perda Kearsipan		
2.18.00. 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase Peningkatan sistem penyimpanan dan penyelamatan arsip	%	20	20	24,588,000	20	27,046,800	20	29,751,480	20	32,726,628	20	35,999,291	100%	150,112,199	Dinas Kearsipan dan Perpust
2.18.00. 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku	%	4,88%	21,95%	198,699,475	41,46%	218,569,423	60,98%	240,426,365	80,49%	264,469,001	100%	290,915,901	100%	1,213,080,165	Dinas Kearsipan dan Perpust
4.01.01	**Sekretariat Daerah**					**15,299,012,000**	**-**	**16,251,358,300**	**-**	**18,143,866,000**	**-**	**18,807,199,000**	**-**	**20,952,387,000**	**-**	**89,453,822,300**	**Setda**
4.01.	**Unsur Staf Perangkat Daerah**					**15,299,012,000**		**16,251,358,300**		**18,143,866,000**		**18,807,199,000**		**20,952,387,000**		**89,453,822,300**	**Setda**
4.01.01. 16	Program Penegakan Hukum dan HAM	Ketersediaan Dokumen Rencana Hukum dan HAM	Dok	2	2	9,700,000	2	20,000,000	2	55,125,000	2	57,881,000	2	60,775,000	10	203,481,000	Setda
4.01.01. 17	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum	Jumlah Pelayanan dan bantuan hukum	Kasus	2	2	186,000,000	2	225,000,000	2	175,000,000	2	200,000,000	2	250,000,000	10	1,036,000,000	Setda
4.01.01. 18	Program Peningkatan Kualitas Proses Kebijakan Daerah dan Instrumen Hukum Lainnya	Ketersediaan Dokumen terkait proses Penyusunan Kebijakan daerah dan Instrumen hukum lainnya	Dok	279	279	1,371,000,000	277	1,931,000,000	277	1,538,784,000	277	1,689,348,000	277	1,858,392,000	1387	8,388,524,000	Setda
4.01.01. 21	Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Dokumen Terkait Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Dok	5	5	35,272,000	5	115,000,000	6	195,000,000	6	215,000,000	6	235,000,000	25	795,272,000	Setda
4.01.01. 22	Program Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	3	3	125,000,000	2	100,000,000	3	280,000,000	2	110,250,000	2	115,000,000	12	730,250,000	Setda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.01.01. 23	Program Peningkatan Transparansi & Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Daerah	Prosentase hasil temuan pengawasan dan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	20	20	34,000,000	20	120,000,000	20	124,354,000	20	252,071,000	20	139,925,000	20	670,350,000	Setda
4.01.01. 25	Program Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kali	167	167	793,040,000	162	580,000,000	171	1,032,075,000	171	1,122,729,000	171	1,242,466,000	851	4,770,310,000	Setda
4.01.01. 26	Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Wilayah Bawahan	Jumlah koordinasi pengembangan wilayah bawahan	Kali	2	2	927,000,000	4	250,000,000	2	547,000,000	2	325,000,000	2	350,000,000	12	2,399,000,000	Setda
4.01.01. 27	Program Peningkatan Kerjasama Daerah	Jumlah kerjasama daerah	Mou	5	5	28,000,000	5	75,000,000	5	130,000,000	5	145,000,000	5	160,000,000	25	538,000,000	Setda
4.01.01. 29	Program Peningkatan Koordinasi Administrasi Pejabat Negara dan DPRD serta Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Jumlah koordinasi pejabat negara dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemilu/Pilkada	Kali	9	9	15,000,000	9	30,000,000	2	140,250,000	2	155,763,000	3	671,551,000	11	1,012,564,000	Setda
4.01.01. 30	Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Hari-hari Besar Kabupaten	Cakupan koordinasi dan fasilitasi pelayanan sosial dan kemasyarakatan dan hari-hari besar	%	20	20	678,000,000	20	770,000,000	20	1,109,339,000	20	1,197,806,000	20	1,273,196,000	100	5,028,341,000	Setda
4.01.01. 31	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Cakupan Pelayanan Kehidupan Beragama	%	20	20	1,232,000,000	20	235,000,000	20	1,037,143,000	20	677,322,000	20	1,389,024,000	100	4,570,489,000	Setda
4.01.01. 32	Program Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	Cakupan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	%	20	20	109,000,000	20	197,578,800	20	368,656,000	20	400,964,000	20	438,775,000	100	1,514,973,800	Setda
4.01.01. 33	Program Pembinaan BUMD dan Layanan Keuangan Inklusif	Cakupan pembinaan BUMD dan layanan keuangan inklusif	%	20	20	25,000,000	20	65,000,000	20	121,749,000	20	133,212,000	20	143,272,000	100	488,233,000	Setda
4.01.01. 34	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perekonomian dan Prasarana Ekonomi Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pelayanan Administrasi Perekonomian	%	20	20	50,000,000	20	160,000,000	20	299,016,000	20	319,592,000	20	353,072,000	100	1,181,680,000	Setda
4.01.01. 35	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehumasan dan Keprotokoleran Pemda	Cakupan pelayanan Kehumasan dan keprotokoleran Pemda	%	20	20	540,000,000	20	651,584,000	20	1,225,000,000	20	1,322,000,000	20	1,421,200,000	100	5,159,784,000	Setda
4.01.01. 36	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Prosentase pemenuhan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan regulasi yang berlaku	%	20	20	8,350,000,000	20	9,887,721,500	20	8,544,700,000	20	9,164,700,000	20	9,416,551,000	100	45,363,672,500	Setda
4.01.01. 37	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Sekda, Assisten Sekda, Staf Ahli Bupati	Prosentase pemenuhan pelayanan kedinasan Sekda, Asisten Sekda dan jumlah pertimbangan/Kajian Staf Ahli Bupati sesuai ketentuan regulasi yang berlaku	%	20	20	403,000,000	20	513,474,000	20	692,675,000	20	746,561,000	20	805,188,000	100	3,160,898,000	Setda
5.05.00. 15	Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa	Rasio paket lelang melalui LPSE dengan paket lelang yang diumumkan melalui RUP		77	77	388,000,000	100	325,000,000	100	528,000,000	100	572,000,000	100	629,000,000	100	2,442,000,000	Setda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah kajian RUP, laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Pedum/Juklak/Juknis yang disusun dan SDM aparatur yang bimtek sertifikasi	dOK	4	4		4		4		4		4		24		
		Persentase kegiatan pengadaaan barang dan jasa yang terlayani secara elektronik	%	20	20		20		20		20		20		100		
4.02.01	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**					**1,780,000,000**	**-**	**3,081,127,740**	**-**	**3,189,240,514**	**-**	**3,808,164,565**	**-**	**4,438,981,022**	**-**	**16,297,513,841**	**Setwan**
4.02.	**Unsur Pelayanan Admnistrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD**					**1,698,000,000**		**2,895,952,200**		**2,985,547,420**		**3,584,102,162**		**4,192,512,378**		**15,356,114,160**	**Setwan**
4.02.01 16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Pemeriksaan Kesehatan		25 Orang	25 Orang	778,000,000	25 Orang	895,952,200	25 Orang	985,547,420	25 Orang	1,084,102,162	25 Orang	1,192,512,378	25 Orang	4,936,114,160	Setwan
4.02.01 17	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan DPRD	Prosentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan regulasi yang berlaku	%	20	20	920,000,000	20	2,000,000,000	20	2,000,000,000	20	2,500,000,000	20	3,000,000,000	100	10,420,000,000	Setwan
2.10	**Komunikasi dan Informatika**					**82,000,000**		**185,175,540**		**203,693,094**		**224,062,403**		**246,468,644**		**941,399,681**	**Setwan**
2.10.00 18	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang Dipublikasikan	%	20	20	82,000,000	20	185,175,540	20	203,693,094	20	224,062,403	20	246,468,644	100	941,399,681	Setwan
5.03.01.	**Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**					**661,666,050**	**-**	**727,832,655**	**-**	**750,615,921**	**-**	**880,677,513**	**-**	**968,745,264**	**-**	**3,989,537,402**	**BKD-PSDM**
5.03	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**					**661,666,050**		**727,832,655**		**750,615,921**		**880,677,513**		**968,745,264**		**3,989,537,402**	**BKD-PSDM**
5.03.01. 16	Program Pembinaan Sistem Administrasi Kearsipan dan Dokumen Kepegawaian	Cakupan Ketersediaan Sistem Admnistrasi Kearsipan dan Dokumen Kepegawaian	%	20	20	101,705,300	20	111,875,830	20	123,063,413	20	135,369,754	20	148,906,730	100	620,921,027	BKD-PSDM
5.03.01. 17	Program Peningkatan Kesejahteraan PNSD	Persentase Peningkatan Kesejahteraan PNS	%	20	20	68,351,200	20	75,186,320	20	82,704,952	20	90,975,447	20	100,072,992	100	417,290,911	BKD-PSDM
5.03.01. 18	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Peningkatan Komptensi ASN	%	20	20	491,609,550	20	540,770,505	20	544,847,556	20	654,332,311	20	719,765,542	100	2,951,325,464	BKD-PSDM
05.05.01.	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**					**20,413,000**	**-**	**22,454,300**	**-**	**24,699,730**	**-**	**27,169,703**	**-**	**29,886,673**	**-**	**124,623,406**	**Badan KesbangPol**
05.05.	**Fungsi Penunjang Lainnya yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**					**20,413,000**		**22,454,300**		**24,699,730**		**27,169,703**		**29,886,673**		**124,623,406**	**Badan KesbangPol**
05.05.01. 19	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan	%	20	20	20,413,000	20	22,454,300	20	24,699,730	20	27,169,703	20	29,886,673	100	124,623,406	Badan KesbangPol
TOTAL						**22,869,416,925.00**		**25,695,416,457.50**		**28,221,814,973.25**		**30,268,427,870.58**		**33,763,223,757.63**		**140,818,299,983.96**	

Prioritas 3

Merupakan Program di tingkat OPD yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Program ini untuk pemenuhan kebutuhan kinerja aparatur dalam menigkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan

Prioritas 3

Halaman

1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ---------- VII-33
2. Dinas Kesehatan ---------- VII-33
3. Rumah Sakit Umum Daerah ---------- VII-34
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan ---------- VII-35
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ---------- VII-35
6. Satuan Polisi Pamong Praja ---------- VII-36
7. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ---------- VII-37
8. Dinas Lingkungan Hidup ---------- VII-37
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ---------- VII-38
10. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak ---------- VII-39
11. Dinas Komunikasi dan Informatika ---------- VII-39
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ---------- VII-40
13. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Nakertrans ---------- VII-41
14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ---------- VII-41
15. Dinas Perikanan ---------- VII-42
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ---------- VII-43
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ---------- VII-43
18. Dinas Peternakan ---------- VII-44
19. Sekretariat Daerah ---------- VII-45
20. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ---------- VII-45
21. Inspektorat ---------- VII-46
22. Kecamatan Nubatukan ---------- VII-46
23. Kecamatan Lebatukan ---------- VII-47
24. Kecamatan Omesuri ---------- VII-48
25. Kecamatan Buyasuri ---------- VII-48
26. Kecamatan Atadei ---------- VII-49
27. Kecamatan Nagawutung ---------- VII-50
28. Kecamatan Ile Ape ---------- VII-50
29. Kecamatan Wulandoni ---------- VII-51
30. Kecamatan Ile Ape Timur ---------- VII-51
31. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Bangda ---------- VII-52
32. Badan Keuangan Daerah ---------- VII-53
33. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM ---------- VII-53
34. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ---------- VII-54
35. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ---------- VII-55

Tabel 7.7
Program Prioritas 3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.01.0.1	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**					**705,874,775.00**		**987,263,105.00**		**1,045,458,638.00**		**1,109,473,724.30**		**1,179,890,319.23**		**5,027,960,561.53**	**Dinas PKO**
	Non Urusan					**705,874,775.00**		**987,263,105.00**		**1,045,458,638.00**		**1,109,473,724.30**		**1,179,890,319.23**		**5,027,960,561.53**	**Dinas PKO**
1.01.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	108,603,825.00	20	108,603,825.00	20	108,603,825.00	20	108,603,825.00	20	108,603,825.00	100	543,019,125.00	Dinas PKO
1.01.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	228,483,300.00	20	502,663,260.00	20	502,929,586.00	20	528,222,544.60	20	589,044,799.06	100	2,351,343,489.66	Dinas PKO
1.01.01. 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	61,768,900.00	20	67,945,790.00	20	44,740,369.00	20	82,214,405.90	20	90,435,846.49	100	347,105,311.39	Dinas PKO
1.01.01. 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	10,314,800.00	11	11,346,280.00	11	12,480,908.00	11	13,728,998.80	11	15,101,898.68	55	62,972,885.48	Dinas PKO
1.01.01. 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	13,007,100.00	2	13,007,100.00	2	13,007,100.00	2	13,007,100.00	2	13,007,100.00	10	65,035,500.00	Dinas PKO
1.01.01. 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	283,696,850.00	20	283,696,850.00	20	283,696,850.00	20	283,696,850.00	20	283,696,850.00	100	1,418,484,250.00	Dinas PKO
1.01.01. 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket	1		-		-	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	3	150,000,000.00	Dinas PKO
1.01.01. 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	Dinas PKO
1.02.0.1.	**Dinas Kesehatan**					**1,872,661,000.00**		**1,866,538,695.00**		**1,940,683,887.00**		**2,022,243,598.20**		**2,111,959,280.52**		**9,814,086,460.72**	**DinKes**
	Non Urusan					**1,872,661,000.00**		**1,866,538,695.00**		**1,940,683,887.00**		**2,022,243,598.20**		**2,111,959,280.52**		**9,814,086,460.72**	**DinKes**
1.02.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	383,000,000.00	20	309,472,975.00	20	309,472,975.00	20	309,472,975.00	20	309,472,975.00	100	1,620,891,900.00	DinKes
1.02.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	815,613,800.00	20	815,613,800.00	20	765,613,800.00	20	735,613,800.00	20	735,613,800.00	100	3,868,069,000.00	DinKes
1.02.01. 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	78,654,900.00	20	86,520,390.00	20	95,172,429.00	20	104,689,671.90	20	115,158,639.09	100	480,196,029.99	DinKes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02.01. 04	Program Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	278,431,500.00	11	306,274,650.00	11	336,902,115.00	11	370,592,326.50	11	407,651,559.15	55	1,699,852,150.65	DinKes
1.02.01. 05	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	87,821,600.00	2	96,603,760.00	2	106,264,136.00	2	116,890,549.60	2	128,579,604.56	10	536,159,650.16	DinKes
1.02.01. 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	229,139,200.00	20	252,053,120.00	20	247,258,432.00	20	304,984,275.20	20	335,482,702.72	100	1,368,917,729.92	DinKes
1.02.01. 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket						1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	3	150,000,000.00	DinKes
1.02.01. 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok						1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	DinKes
1.02.02	**Rumah Sakit Umum Daerah**					**1,688,762,100.00**		**2,357,638,310.00**		**2,543,402,141.00**		**2,747,742,355.10**		**2,972,516,590.61**		**12,310,061,496.71**	**RSUD**
	Non Urusan					**1,688,762,100.00**		**2,357,638,310.00**		**2,543,402,141.00**		**2,747,742,355.10**		**2,972,516,590.61**		**12,310,061,496.71**	**RSUD**
1.02.02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	869,249,600.00	20	926,174,560.00	20	1,051,792,016.00	20	1,156,971,217.60	20	1,272,668,339.36	100	5,276,855,732.96	RSUD
1.02.02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	500,573,400.00	20	550,630,740.00	20	575,693,814.00	20	636,263,195.40	20	702,889,514.94	100	2,966,050,664.34	RSUD
1.02.02 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	61,768,900.00	20	67,945,790.00	20	74,740,369.00	20	82,214,405.90	20	90,435,846.49	100	377,105,311.39	RSUD
1.02.02 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	38,875,900.00	11	42,763,490.00	11	47,039,839.00	11	51,743,822.90	11	56,918,205.19	55	237,341,257.09	RSUD
1.02.02 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	3,741,100.00	2	4,115,210.00	2	4,526,731.00	2	4,979,404.10	2	5,477,344.51	10	22,839,789.61	RSUD
1.02.02 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	214,553,200.00	20	236,008,520.00	20	259,609,372.00	20	285,570,309.20	20	314,127,340.12	100	1,309,868,741.32	RSUD
1.02.02 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	4	2,000,000,000.00	RSUD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02.02 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	4	120,000,000.00	RSUD
1.03.01.	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan**					**1,917,138,800.00**		**2,108,852,680.00**		**2,619,737,948.00**		**2,551,711,742.80**		**2,806,882,917.08**		**12,004,324,087.88**	**Dinas PUPRP**
	Non Urusan					**1,917,138,800.00**		**2,108,852,680.00**		**2,619,737,948.00**		**2,551,711,742.80**		**2,806,882,917.08**		**12,004,324,087.88**	**Dinas PUPRP**
1.03.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	873,939,800.00	20	961,333,780.00	20	1,027,467,158.00	20	1,163,213,873.80	20	1,279,535,261.18	100	5,305,489,872.98	Dinas PUPRP
1.03.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	590,033,900.00	20	649,037,290.00	20	713,941,019.00	20	785,335,120.90	20	863,868,632.99	100	3,602,215,962.89	Dinas PUPRP
1.03.01. 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	156,710,000.00	20	172,381,000.00	20	189,619,100.00	20	208,581,010.00	20	229,439,111.00	100	956,730,221.00	Dinas PUPRP
1.03.01. 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	17,051,000.00	11	18,756,100.00	11	20,631,710.00	11	22,694,881.00	11	24,964,369.10	55	104,098,060.10	Dinas PUPRP
1.03.01. 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	54,644,900.00	2	60,109,390.00	2	66,120,329.00	2	72,732,361.90	2	80,005,598.09	10	333,612,578.99	Dinas PUPRP
1.03.01. 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	224,759,200.00	20	247,235,120.00	20	271,958,632.00	20	269,154,495.20	20	299,069,944.72	100	1,312,177,391.92	Dinas PUPRP
1.03.01. 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	300,000,000.00		-		-	1	300,000,000.00	Dinas PUPRP
1.03.01. 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	Dinas PUPRP
1.04.01.	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**					**576,241,800.00**		**708,865,980.00**		**1,102,252,578.00**		**841,977,835.80**		**918,675,619.38**		**4,148,013,813.18**	**Dinas PRPP**
	Non Urusan					**576,241,800.00**		**708,865,980.00**		**1,102,252,578.00**		**841,977,835.80**		**918,675,619.38**		**4,148,013,813.18**	**Dinas PRPP**
1.04.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	274,385,600.00	20	301,824,160.00	20	332,006,576.00	20	345,207,233.60	20	381,727,956.96	100	1,635,151,526.56	Dinas PRPP
1.04.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	133,888,000.00	20	147,276,800.00	20	162,004,480.00	20	178,204,928.00	20	196,025,420.80	100	817,399,628.80	Dinas PRPP
1.04.01. 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	25		-	25	75,000,000.00	25	75,000,000.00	25	75,000,000.00	25	75,000,000.00	100	300,000,000.00	Dinas PRPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.04.01. 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	8,869,600.00	11	9,756,560.00	11	10,732,216.00	11	11,805,437.60	11	12,985,981.36	55	54,149,794.96	Dinas PRPP
1.04.01. 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	26,430,600.00	2	29,073,660.00	2	31,981,026.00	2	35,179,128.60	2	38,697,041.46	10	161,361,456.06	Dinas PRPP
1.04.01. 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	132,668,000.00	20	145,934,800.00	20	160,528,280.00	20	146,581,108.00	20	164,239,218.80	100	749,951,406.80	Dinas PRPP
1.04.01. 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	300,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	3	340,000,000.00	Dinas PRPP
1.04.01. 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	Dinas PRPP
1.05.01.	**Satuan Polisi Pamong Praja**					**895,463,700.00**		**985,010,070.00**		**1,083,511,077.00**		**1,191,862,184.70**		**1,311,048,403.17**		**5,466,895,434.87**	**Sat-POLPP**
	Non Urusan					**895,463,700.00**		**985,010,070.00**		**1,083,511,077.00**		**1,191,862,184.70**		**1,311,048,403.17**		**5,466,895,434.87**	**Sat-POLPP**
1.05.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	322,261,400.00	20	354,487,540.00	20	339,936,294.00	20	428,929,923.40	20	471,822,915.74	100	1,917,438,073.14	Sat-POLPP
1.05.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	248,738,700.00	20	273,612,570.00	20	250,973,827.00	20	331,071,209.70	20	364,178,330.67	100	1,468,574,637.37	Sat-POLPP
1.05.01. 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	42,725,000.00	20	46,997,500.00	20	51,697,250.00	20	56,866,975.00	20	62,553,672.50	100	260,840,397.50	Sat-POLPP
1.05.01. 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	28,219,700.00	11	31,041,670.00	11	34,145,837.00	11	37,560,420.70	11	41,316,462.77	55	172,284,090.47	Sat-POLPP
1.05.01. 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	53,429,900.00	2	58,772,890.00	2	64,650,179.00	2	71,115,196.90	2	78,226,716.59	10	326,194,882.49	Sat-POLPP
1.05.01. 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	200,089,000.00	20	220,097,900.00	20	212,107,690.00	20	236,318,459.00	20	262,950,304.90	100	1,131,563,353.90	Sat-POLPP
1.05.01. 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	100,000,000.00		-		-	1	100,000,000.00	Sat-POLPP
1.05.01. 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	Sat-POLPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.06.01	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					**680,669,900.00**		**738,736,890.00**		**848,610,579.00**		**855,971,636.90**		**946,568,800.59**		**4,070,557,806.49**	**DinSos-PMD**
	Non Urusan					**680,669,900.00**		**738,736,890.00**		**848,610,579.00**		**855,971,636.90**		**946,568,800.59**		**4,070,557,806.49**	**DinSos-PMD**
1.06.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	296,539,700.00	20	226,193,670.00	20	248,813,037.00	20	294,694,340.70	20	334,163,774.77	100	1,400,404,522.47	DinSos-PMD
1.06.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	202,053,100.00	20	212,258,410.00	20	204,484,251.00	20	218,932,676.10	20	245,825,943.71	100	1,083,554,380.81	DinSos-PMD
1.06.01 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20		-	20	100,000,000.00	20	100,000,000.00	20	100,000,000.00	20	100,000,000.00	80	400,000,000.00	DinSos-PMD
1.06.01 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	13,521,600.00	11	14,873,760.00	11	16,361,136.00	11	17,997,249.60	11	19,796,974.56	55	82,550,720.16	DinSos-PMD
1.06.01 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	30,455,500.00	2	33,501,050.00	2	36,851,155.00	2	40,536,270.50	2	44,589,897.55	10	185,933,873.05	DinSos-PMD
1.06.01 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	138,100,000.00	20	151,910,000.00	20	137,101,000.00	20	153,811,100.00	20	172,192,210.00	100	753,114,310.00	DinSos-PMD
1.06.01 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	75,000,000.00		-		-	1	75,000,000.00	DinSos-PMD
1.06.01 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	DinSos-PMD
2.05.01	**Dinas Lingkungan Hidup**					**1,067,915,627.00**		**1,174,707,189.70**		**1,292,177,908.67**		**1,421,395,699.54**		**1,563,535,269.49**		**6,519,731,694.40**	**DLH**
	Non Urusan					**1,067,915,627.00**		**1,174,707,189.70**		**1,292,177,908.67**		**1,421,395,699.54**		**1,563,535,269.49**		**6,519,731,694.40**	**DLH**
2.05.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	156,332,200.00	20	171,965,420.00	20	189,161,962.00	20	208,078,158.20	20	228,885,974.02	100	954,423,714.22	DLH
2.05.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	601,770,127.00	20	661,947,139.70	20	628,141,853.67	20	800,956,039.04	20	881,051,642.94	100	3,573,866,802.35	DLH
2.05.01 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	112,134,000.00	20	123,347,400.00	20	105,682,140.00	20	149,250,354.00	20	164,175,389.40	100	654,589,283.40	DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.05.01 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	6,267,500.00	11	6,894,250.00	11	7,583,675.00	11	8,342,042.50	11	9,176,246.75	55	38,263,714.25	DLH
2.05.01 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	59,152,400.00	2	65,067,640.00	2	71,574,404.00	2	78,731,844.40	2	86,605,028.84	10	361,131,317.24	DLH
2.05.01 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	132,259,400.00	20	145,485,340.00	20	160,033,874.00	20	146,037,261.40	20	163,640,987.54	100	747,456,862.94	DLH
2.05.01 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	100,000,000.00		-		-	1	100,000,000.00	DLH
2.05.01 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	DLH
2.06.01	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					**853,564,400.00**		**938,920,840.00**		**1,042,812,924.00**		**1,136,094,216.40**		**1,249,703,638.04**		**5,221,096,018.44**	**Dinas DukCapil**
	Non Urusan					**853,564,400.00**		**938,920,840.00**		**1,042,812,924.00**		**1,136,094,216.40**		**1,249,703,638.04**		**5,221,096,018.44**	**Dinas DukCapil**
2.06.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	281,390,300.00	20	309,529,330.00	20	300,482,263.00	20	374,530,489.30	20	411,983,538.23	100	1,677,915,920.53	Dinas DukCapil
2.06.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	249,797,220.00	20	274,776,942.00	20	272,254,636.20	20	332,480,099.82	20	365,728,109.80	100	1,495,037,007.82	Dinas DukCapil
2.06.01 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	60,196,000.00	20	66,215,600.00	20	52,837,160.00	20	80,120,876.00	20	88,132,963.60	100	347,502,599.60	Dinas DukCapil
2.06.01 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	32,799,480.00	11	36,079,428.00	11	39,687,370.80	11	43,656,107.88	11	48,021,718.67	55	200,244,105.35	Dinas DukCapil
2.06.01 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	5,320,400.00	2	5,852,440.00	2	6,437,684.00	2	7,081,452.40	2	7,789,597.64	10	32,481,574.04	Dinas DukCapil
2.06.01 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	224,061,000.00	20	246,467,100.00	20	241,113,810.00	20	268,225,191.00	20	298,047,710.10	100	1,277,914,811.10	Dinas DukCapil
2.06.01 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	100,000,000.00		-		-	1	100,000,000.00	Dinas DukCapil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.06.01 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	Dinas DukCapil
2.08.01	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					**534,470,350.00**		**587,917,385.00**		**776,709,123.50**		**711,380,035.85**		**782,518,039.44**		**3,392,994,933.79**	**Dinas P2KBP3A**
	Non Urusan					**534,470,350.00**		**587,917,385.00**		**776,709,123.50**		**711,380,035.85**		**782,518,039.44**		**3,392,994,933.79**	**Dinas P2KBP3A**
2.08.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	233,457,250.00	20	256,802,975.00	20	282,483,272.50	20	310,731,599.75	20	341,804,759.73	100	1,425,279,856.98	Dinas P2KBP3A
2.08.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	118,748,200.00	20	130,623,020.00	20	143,685,322.00	20	158,053,854.20	20	173,859,239.62	100	724,969,635.82	Dinas P2KBP3A
2.08.01 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	4,469,500.00	20	4,916,450.00	20	5,408,095.00	20	5,948,904.50	20	6,543,794.95	100	27,286,744.45	Dinas P2KBP3A
2.08.01 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	5,438,300.00	11	5,982,130.00	11	6,580,343.00	11	7,238,377.30	11	7,962,215.03	55	33,201,365.33	Dinas P2KBP3A
2.08.01 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	16,181,300.00	2	17,799,430.00	2	19,579,373.00	2	21,537,310.30	2	23,691,041.33	10	98,788,454.63	Dinas P2KBP3A
2.08.01 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	156,175,800.00	20	171,793,380.00	20	188,972,718.00	20	177,869,989.80	20	198,656,988.78	100	893,468,876.58	Dinas P2KBP3A
2.08.01 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	100,000,000.00		-		-	1	100,000,000.00	Dinas P2KBP3A
2.08.01 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	Dinas P2KBP3A
2.10.01	**Dinas Komunikasi dan Informatika**					**1,251,870,500.00**		**1,377,057,550.00**		**1,574,763,305.00**		**1,666,239,635.50**		**1,832,863,599.05**		**7,702,794,589.55**	**Dinas KomInfo**
	Non Urusan					**1,251,870,500.00**		**1,377,057,550.00**		**1,574,763,305.00**		**1,666,239,635.50**		**1,832,863,599.05**		**7,702,794,589.55**	**Dinas KomInfo**
2.10.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	243,015,100.00	20	267,316,610.00	20	264,048,271.00	20	323,453,098.10	20	355,798,407.91	100	1,453,631,487.01	Dinas KomInfo
2.10.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	830,225,200.00	20	913,247,720.00	20	974,572,492.00	20	1,105,029,741.20	20	1,215,532,715.32	100	5,038,607,868.52	Dinas KomInfo
2.10.01 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	100	-	Dinas KomInfo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.10.01 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	11,914,800.00	11	13,106,280.00	11	14,416,908.00	11	15,858,598.80	11	17,444,458.68	55	72,741,045.48	Dinas KomInfo
2.10.01 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	26,466,600.00	2	29,113,260.00	2	32,024,586.00	2	35,227,044.60	2	38,749,749.06	10	161,581,239.66	Dinas KomInfo
2.10.01 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	140,248,800.00	20	154,273,680.00	20	159,701,048.00	20	156,671,152.80	20	175,338,268.08	100	786,232,948.88	Dinas KomInfo
2.10.01 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	100,000,000.00		-		-	1	100,000,000.00	Dinas KomInfo
2.10.01 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	Dinas KomInfo
2.11.01	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**					**728,217,150.00**		**801,038,865.00**		**951,142,751.50**		**969,257,026.65**		**1,066,182,729.32**		**4,515,838,522.47**	**Dinas Koperindag**
	Non Urusan					**728,217,150.00**		**801,038,865.00**		**951,142,751.50**		**969,257,026.65**		**1,066,182,729.32**		**4,515,838,522.47**	**Dinas Koperindag**
2.11.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	309,377,450.00	20	340,315,195.00	20	344,346,714.50	20	411,781,385.95	20	452,959,524.55	100	1,858,780,270.00	Dinas Koperindag
2.11.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	72,125,400.00	20	79,337,940.00	20	87,271,734.00	20	95,998,907.40	20	105,598,798.14	100	440,332,779.54	Dinas Koperindag
2.11.01 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	100	-	Dinas Koperindag
2.11.01 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	57,616,200.00	11	63,377,820.00	11	69,715,602.00	11	76,687,162.20	11	84,355,878.42	55	351,752,662.62	Dinas Koperindag
2.11.01 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	5,015,500.00	2	5,517,050.00	2	6,068,755.00	2	6,675,630.50	2	7,343,193.55	10	30,620,129.05	Dinas Koperindag
2.11.01 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	284,082,600.00	20	312,490,860.00	20	313,739,946.00	20	348,113,940.60	20	385,925,334.66	100	1,644,352,681.26	Dinas Koperindag

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.01 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	100,000,000.00		-		-	1	100,000,000.00	Dinas Koperindag
2.11.01 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	Dinas Koperindag
2.12.01	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan**					**546,852,645.00**		**601,537,909.50**		**731,691,700.45**		**727,860,870.50**		**800,646,957.54**		**3,408,590,082.99**	**Dinas PM-PTSP-Nakertrans**
	Non Urusan					**546,852,645.00**		**601,537,909.50**		**731,691,700.45**		**727,860,870.50**		**800,646,957.54**		**3,408,590,082.99**	
2.12.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	211,156,000.00	20	212,271,600.00	20	225,498,760.00	20	231,048,636.00	20	259,153,499.60	100	1,139,128,495.60	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
2.12.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	111,155,545.00	20	102,271,099.50	20	114,498,209.45	20	147,948,030.40	20	162,742,833.43	100	638,615,717.78	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
2.12.01 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	25		-	25	50,000,000.00	25	50,000,000.00	25	50,000,000.00	25	50,000,000.00	100	200,000,000.00	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
2.12.01 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	16,127,600.00	11	17,740,360.00	11	19,514,396.00	11	21,465,835.60	11	23,612,419.16	55	98,460,610.76	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
2.12.01 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	27,284,200.00	2	30,012,620.00	2	33,013,882.00	2	36,315,270.20	2	39,946,797.22	10	166,572,769.42	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
2.12.01 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	181,129,300.00	20	189,242,230.00	20	189,166,453.00	20	211,083,098.30	20	235,191,408.13	100	1,005,812,489.43	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
2.12.01 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	70,000,000.00		-		-	1	70,000,000.00	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
2.12.01 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
2.17.01.	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**					**779,750,200.00**		**857,725,220.00**		**963,497,742.00**		**1,107,847,516.20**		**1,211,632,267.82**		**4,920,452,946.02**	**Dinas Kearsipan dan Perpust**
	Non Urusan					**779,750,200.00**		**857,725,220.00**		**963,497,742.00**		**1,107,847,516.20**		**1,211,632,267.82**		**4,920,452,946.02**	**Dinas Kearsipan dan Perpust**
2.17.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	207,450,925.00	20	228,196,017.50	20	201,015,619.25	20	276,117,181.18	20	303,728,899.29	100	1,216,508,642.22	Dinas Kearsipan dan Perpust
2.17.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	355,211,300.00	20	330,732,430.00	20	349,805,673.00	20	472,786,240.30	20	520,064,864.33	100	2,028,600,507.63	Dinas Kearsipan dan Perpust

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.17.01. 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	25		-	25	100,000,000.00	25	70,000,000.00	25	70,000,000.00	25	70,000,000.00	100	310,000,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpust
2.17.01. 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	7,886,000.00	11	8,674,600.00	11	9,542,060.00	11	10,496,266.00	11	11,545,892.60	55	48,144,818.60	Dinas Kearsipan dan Perpust
2.17.01. 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	30,246,175.00	2	33,270,792.50	2	36,597,871.75	2	40,257,658.93	2	44,283,424.82	10	184,655,922.99	Dinas Kearsipan dan Perpust
2.17.01. 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	178,955,800.00	20	156,851,380.00	20	166,536,518.00	20	208,190,169.80	20	232,009,186.78	100	942,543,054.58	Dinas Kearsipan dan Perpust
2.17.01. 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	100,000,000.00		-		-	1	100,000,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpust
2.17.01. 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpust
3.01.01.	**Dinas Perikanan**					**680,550,300.00**		**748,605,330.00**		**853,465,863.00**		**905,812,449.30**		**996,393,694.23**		**4,184,827,636.53**	**Dinas Perikanan**
	Non Urusan					**680,550,300.00**		**748,605,330.00**		**853,465,863.00**		**905,812,449.30**		**996,393,694.23**		**4,184,827,636.53**	**Dinas Perikanan**
3.01.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	357,560,800.00	20	393,316,880.00	20	382,648,568.00	20	475,913,424.80	20	523,504,767.28	100	2,132,944,440.08	Dinas Perikanan
3.01.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	87,156,500.00	20	95,872,150.00	20	105,459,365.00	20	116,005,301.50	20	127,605,831.65	100	532,099,148.15	Dinas Perikanan
3.01.01. 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	76,700,000.00	20	84,370,000.00	20	72,807,000.00	20	102,087,700.00	20	112,296,470.00	100	448,261,170.00	Dinas Perikanan
3.01.01. 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	11,820,000.00	11	13,002,000.00	11	14,302,200.00	11	15,732,420.00	11	17,305,662.00	55	72,162,282.00	Dinas Perikanan
3.01.01. 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	24,947,600.00	2	27,442,360.00	2	30,186,596.00	2	33,205,255.60	2	36,525,781.16	10	152,307,592.76	Dinas Perikanan
3.01.01. 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	122,365,400.00	20	134,601,940.00	20	148,062,134.00	20	132,868,347.40	20	149,155,182.14	100	687,053,003.54	Dinas Perikanan
3.01.01. 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket						1	70,000,000.00					1	70,000,000.00	Dinas Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.01.01. 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok						1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	Dinas Perikanan
3.02.01.	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**					**924,268,160.00**		**1,016,694,976.00**		**1,288,364,473.65**		**1,230,200,920.96**		**1,353,221,013.06**		**5,812,749,543.67**	**Dinas BudPar**
	Non Urusan					**924,268,160.00**		**1,016,694,976.00**		**1,288,364,473.65**		**1,230,200,920.96**		**1,353,221,013.06**		**5,812,749,543.67**	**Dinas BudPar**
3.02.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	155,593,200.00	20	171,152,520.00	20	178,267,772.00	20	207,094,549.20	20	227,804,004.12	100	939,912,045.32	Dinas BudPar
3.02.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	575,087,760.00	20	632,596,536.00	20	645,856,189.65	20	765,441,808.56	20	841,985,989.42	100	3,460,968,283.63	Dinas BudPar
3.02.01. 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	100	-	Dinas BudPar
3.02.01. 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	11,445,500.00	11	12,590,050.00	11	13,849,055.00	11	15,233,960.50	11	16,757,356.55	55	69,875,922.05	Dinas BudPar
3.02.01. 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	4,423,600.00	2	4,865,960.00	2	5,352,556.00	2	5,887,811.60	2	6,476,592.76	10	27,006,520.36	Dinas BudPar
3.02.01. 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	177,718,100.00	20	195,489,910.00	20	215,038,901.00	20	206,542,791.10	20	230,197,070.21	100	1,024,986,772.31	Dinas BudPar
3.02.01. 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	200,000,000.00		-		-	1	200,000,000.00	Dinas BudPar
3.02.01. 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	Dinas BudPar
3.03.01.	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**					**816,319,187.00**		**897,951,105.70**		**1,117,746,216.27**		**1,186,520,837.90**		**1,295,172,921.69**		**5,313,710,268.55**	**Distan-KP**
	Non Urusan					**816,319,187.00**		**897,951,105.70**		**1,117,746,216.27**		**1,186,520,837.90**		**1,295,172,921.69**		**5,313,710,268.55**	**Distan-KP**
3.03.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	336,476,600.00	20	320,124,260.00	20	407,136,686.00	20	447,850,354.60	20	492,635,390.06	100	2,004,223,290.66	Distan-KP
3.03.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	175,625,287.00	20	143,187,815.70	20	212,506,597.27	20	233,757,257.00	20	257,132,982.70	100	1,022,209,939.66	Distan-KP
3.03.01. 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	25		-	25	100,000,000.00	25	100,000,000.00	25	100,000,000.00	25	100,000,000.00	100	400,000,000.00	Distan-KP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.03.01. 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	32,342,000.00	11	35,576,200.00	11	(10,866,180.00)	11	43,047,202.00	11	47,351,922.20	55	147,451,144.20	Distan-KP
3.03.01. 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	25,100,000.00	2	27,610,000.00	2	30,371,000.00	2	33,408,100.00	2	36,748,910.00	10	153,238,010.00	Distan-KP
3.03.01. 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	246,775,300.00	20	271,452,830.00	20	248,598,113.00	20	298,457,924.30	20	331,303,716.73	100	1,396,587,884.03	Distan-KP
3.03.01. 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	100,000,000.00		-		-	1	100,000,000.00	Distan-KP
3.03.01. 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	Distan-KP
3.03.02	**Dinas Peternakan**				**-**	**615,047,160.00**	**-**	**676,551,876.00**	**-**	**864,207,063.60**	**-**	**908,627,769.96**	**-**	**990,490,546.96**	**-**	**4,054,924,416.52**	**Dinas Peternakan**
	Non Urusan					**615,047,160.00**		**676,551,876.00**		**864,207,063.60**		**908,627,769.96**		**990,490,546.96**		**4,054,924,416.52**	**Dinas Peternakan**
3.03.00 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	212,319,030.00	20	233,550,933.00	20	206,906,026.30	20	282,596,628.93	20	310,856,291.82	100	1,246,228,910.05	Dinas Peternakan
3.03.00 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	162,212,670.00	20	178,433,937.00	20	176,277,330.70	20	215,905,063.77	20	237,495,570.15	100	970,324,571.62	Dinas Peternakan
3.03.00 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20		-		-	33.33	90,000,000.00	33.33	90,000,000.00	33.33	90,000,000.00	99.99	270,000,000.00	Dinas Peternakan
3.03.00 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	14,250,100.00	11	15,675,110.00	11	17,242,621.00	11	18,966,883.10	11	20,863,571.41	55	86,998,285.51	Dinas Peternakan
3.03.00 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	51,372,680.00	2	56,509,948.00	2	62,160,942.80	2	68,377,037.08	2	75,214,740.79	10	313,635,348.67	Dinas Peternakan
3.03.00 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	174,892,680.00	20	192,381,948.00	20	181,620,142.80	20	202,782,157.08	20	226,060,372.79	100	977,737,300.67	Dinas Peternakan
3.03.00 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	100,000,000.00		-		-	1	100,000,000.00	Dinas Peternakan
3.03.00 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	Dinas Peternakan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.01.01	**Sekretariat Daerah**					**4,708,477,300.00**	**-**	**8,195,247,700.00**	**-**	**6,680,043,000.00**	**-**	**8,290,867,000.00**	**-**	**8,990,319,000.00**	**-**	**36,864,954,000.00**	**Setda**
	Non Urusan					**4,708,477,300.00**		**8,195,247,700.00**		**6,680,043,000.00**		**8,290,867,000.00**		**8,990,319,000.00**		**36,864,954,000.00**	**Setda**
4.01.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	1,617,074,500.00	20	1,902,647,700.00	20	2,000,000,000.00	20	2,900,906,000.00	20	3,077,677,000.00	100	11,498,305,200.00	Setda
4.01.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	2,011,177,800.00	20	4,005,600,000.00	20	1,835,000,000.00	20	2,180,000,000.00	20	1,575,000,000.00	100	11,606,777,800.00	Setda
4.01.01 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	17,225,000.00	20	300,000,000.00	20	550,000,000.00	20	540,000,000.00	20	650,000,000.00	100	2,057,225,000.00	Setda
4.01.01 04	Program Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	140,000,000.00	11	177,000,000.00	11	327,222,000.00	11	343,583,000.00	11	360,762,000.00	55	1,348,567,000.00	Setda
4.01.01 05	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	23,000,000.00	2	60,000,000.00	2	110,250,000.00	2	115,763,000.00	2	121,551,000.00	10	430,564,000.00	Setda
4.01.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	800,000,000.00	20	975,000,000.00	20	1,404,237,000.00	20	1,516,948,000.00	20	1,580,295,000.00	100	6,276,480,000.00	Setda
4.01.01 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket	1		100,000,000.00	2	775,000,000.00	3	453,334,000.00	2	693,667,000.00	3	1,625,034,000.00	10	3,647,035,000.00	Setda
4.02.01	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**					**4,092,317,950.00**	**-**	**6,005,063,036.60**	**-**	**6,854,172,629.61**	**-**	**9,739,589,892.57**	**-**	**10,713,548,881.83**	**-**	**37,404,692,390.61**	**Setwan**
	Non Urusan					**4,092,317,950.00**		**6,005,063,036.60**		**6,854,172,629.61**		**9,739,589,892.57**		**10,713,548,881.83**		**37,404,692,390.61**	**Setwan**
4.02.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	3,000,000,000.00	20	3,378,120,371.00	20	3,214,535,696.90	20	5,955,989,266.59	20	6,551,588,193.25	100	22,100,233,527.74	Setwan
4.02.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	477,000,000.00	20	1,534,435,260.60	20	2,237,878,787.21	20	2,461,666,665.93	20	2,707,833,332.52	100	9,418,814,046.27	Setwan
4.02.01 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	244,000,000.00	20	656,724,200.00	20	722,396,620.00	20	794,636,282.00	20	874,099,910.20	100	3,291,857,012.20	Setwan
4.02.01 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan	Dok	11	11	5,317,950.00	11	5,849,745.00	11	6,434,719.50	11	7,078,191.45	11	7,786,010.60	55	32,466,616.55	Setwan
4.02.01 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	6,000,000.00	2	31,196,000.00	2	34,315,600.00	2	37,747,160.00	2	41,521,876.00	10	150,780,636.00	Setwan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.02.01 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	360,000,000.00	20	398,737,460.00	20	408,611,206.00	20	452,472,326.60	20	500,719,559.26	100	2,120,540,551.86	Setwan
4.02.01 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	200,000,000.00		-		-	1	200,000,000.00	Setwan
4.02.01 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	Setwan
4.03.01.	**Inspektorat**					**575,040,000.00**	**-**	**632,544,000.00**	**-**	**795,798,400.00**	**-**	**765,378,240.00**	**-**	**841,916,064.00**	**-**	**3,610,676,704.00**	**Inspektorat**
	Non Urusan					**575,040,000.00**		**632,544,000.00**		**795,798,400.00**		**765,378,240.00**		**841,916,064.00**		**3,610,676,704.00**	**Inspektorat**
4.03.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	288,401,900.00	20	317,242,090.00	20	318,966,299.00	20	353,862,928.90	20	392,249,221.79	100	1,670,722,439.69	Inspektorat
4.03.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	112,195,600.00	20	123,415,160.00	20	135,756,676.00	20	149,332,343.60	20	164,265,577.96	100	684,965,357.56	Inspektorat
4.03.01. 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	36,494,600.00	20	40,144,060.00	20	44,158,466.00	20	48,574,312.60	20	53,431,743.86	100	222,803,182.46	Inspektorat
4.03.01. 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	91,182,200.00	11	100,300,420.00	11	110,330,462.00	11	121,363,508.20	11	133,499,859.02	55	556,676,449.22	Inspektorat
4.03.01. 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	33,815,300.00	2	37,196,830.00	2	40,916,513.00	2	45,008,164.30	2	49,508,980.73	10	206,445,788.03	Inspektorat
4.03.01. 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	12,950,400.00	20	14,245,440.00	20	15,669,984.00	20	17,236,982.40	20	18,960,680.64	100	79,063,487.04	Inspektorat
4.03.01. 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	100,000,000.00		-		-	1	100,000,000.00	Inspektorat
4.03.01. 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	Inspektorat
4.04.01.	**Kecamatan Nubatukan**				**-**	**1,765,831,236.00**	**-**	**1,942,414,359.60**	**-**	**2,486,655,795.56**	**-**	**2,350,321,375.12**	**-**	**2,585,353,512.63**	**-**	**11,130,576,278.90**	**Kec. Nubatukan**
	Non Urusan					**1,765,831,236.00**		**1,942,414,359.60**		**2,486,655,795.56**		**2,350,321,375.12**		**2,585,353,512.63**		**11,130,576,278.90**	**Kec. Nubatukan**
4.04.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	539,118,600.00	20	593,030,460.00	20	652,333,506.00	20	717,566,856.60	20	789,323,542.26	100	3,291,372,964.86	Kec. Nubatukan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.04.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	883,979,236.00	20	972,377,159.60	20	1,039,614,875.56	20	1,176,576,363.12	20	1,294,233,999.43	100	5,366,781,633.70	Kec. Nubatukan
4.04.01. 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	26,750,000.00	20	29,425,000.00	20	32,367,500.00	20	35,604,250.00	20	39,164,675.00	100	163,311,425.00	Kec. Nubatukan
4.04.01. 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	7,183,300.00	11	7,901,630.00	11	8,691,793.00	11	9,560,972.30	11	10,517,069.53	55	43,854,764.83	Kec. Nubatukan
4.04.01. 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	40,598,000.00	2	44,657,800.00	2	49,123,580.00	2	54,035,938.00	2	59,439,531.80	10	247,854,849.80	Kec. Nubatukan
4.04.01. 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	268,202,100.00	20	295,022,310.00	20	324,524,541.00	20	326,976,995.10	20	362,674,694.61	100	1,577,400,640.71	Kec. Nubatukan
4.04.01. 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	350,000,000.00		-		-	1	350,000,000.00	Kec. Nubatukan
4.04.01. 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	Kec. Nubatukan
4.04.02	**Kecamatan Lebatukan**					**1,459,069,700.00**	**-**	**1,604,976,670.00**	**-**	**1,765,474,337.00**	**-**	**1,942,021,770.70**	**-**	**2,136,223,947.77**	**-**	**8,907,766,425.47**	**Kec. Lebatukan**
	Non Urusan					**1,459,069,700.00**		**1,604,976,670.00**		**1,765,474,337.00**		**1,942,021,770.70**		**2,136,223,947.77**		**8,907,766,425.47**	**Kec. Lebatukan**
4.04.02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	164,677,600.00	20	181,145,360.00	20	199,259,896.00	20	219,185,885.60	20	241,104,474.16	100	1,005,373,215.76	Kec. Lebatukan
4.04.02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	1,124,263,500.00	20	1,236,689,850.00	20	1,260,358,835.00	20	1,496,394,718.50	20	1,646,034,190.35	100	6,763,741,093.85	Kec. Lebatukan
4.04.02 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	22,500,000.00	20	24,750,000.00	20	27,225,000.00	20	29,947,500.00	20	32,942,250.00	100	137,364,750.00	Kec. Lebatukan
4.04.02 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	5,980,200.00	11	6,578,220.00	11	7,236,042.00	11	7,959,646.20	11	8,755,610.82	55	36,509,719.02	Kec. Lebatukan
4.04.02 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	16,041,920.00	2	17,646,112.00	2	19,410,723.20	2	21,351,795.52	2	23,486,975.07	10	97,937,525.79	Kec. Lebatukan
4.04.02 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	125,606,480.00	20	138,167,128.00	20	121,983,840.80	20	137,182,224.88	20	153,900,447.37	100	676,840,121.05	Kec. Lebatukan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.04.02 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	100,000,000.00		-		-	1	100,000,000.00	Kec. Lebatukan
4.04.02 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	Kec. Lebatukan
4.04.03	**Kecamatan Omesuri**					**721,197,460.00**	**-**	**793,317,206.00**	**-**	**872,648,926.60**	**-**	**959,913,819.26**	**-**	**1,055,905,201.19**	**-**	**4,402,982,613.05**	**Kec. Omesuri**
	Non Urusan					**721,197,460.00**		**793,317,206.00**		**872,648,926.60**		**959,913,819.26**		**1,055,905,201.19**		**4,402,982,613.05**	**Kec. Omesuri**
4.04.03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	124,699,500.00	20	137,169,450.00	20	150,886,395.00	20	165,975,034.50	20	182,572,537.95	100	761,302,917.45	Kec. Omesuri
4.04.03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	333,138,760.00	20	366,452,636.00	20	403,097,899.60	20	443,407,689.56	20	487,748,458.52	100	2,033,845,443.68	Kec. Omesuri
4.04.03 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	21,275,000.00	20	23,402,500.00	20	25,742,750.00	20	28,317,025.00	20	31,148,727.50	100	129,886,002.50	Kec. Omesuri
4.04.03 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	14,504,900.00	11	15,955,390.00	11	17,550,929.00	11	19,306,021.90	11	21,236,624.09	55	88,553,864.99	Kec. Omesuri
4.04.03 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	26,185,200.00	2	28,803,720.00	2	31,684,092.00	2	34,852,501.20	2	38,337,751.32	10	159,863,264.52	Kec. Omesuri
4.04.03 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	90,589,400.00	20	99,648,340.00	20	109,613,174.00	20	120,574,491.40	20	132,631,940.54	100	553,057,345.94	Kec. Omesuri
4.04.03 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket		1	110,804,700.00	1	121,885,170.00	1	104,073,687.00	1	117,481,055.70	1	132,229,161.27	5	586,473,773.97	Kec. Omesuri
4.04.03 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	Kec. Omesuri
4.04.04.	**Kecamatan Buyasuri**					**1,379,733,900.00**	**-**	**1,517,707,290.00**	**-**	**1,669,478,019.00**	**-**	**1,836,425,820.90**	**-**	**2,020,068,402.99**	**-**	**8,423,413,432.89**	**Kec. Buyasuri**
	Non Urusan					**1,379,733,900.00**		**1,517,707,290.00**		**1,669,478,019.00**		**1,836,425,820.90**		**2,020,068,402.99**		**8,423,413,432.89**	**Kec. Buyasuri**
4.04.04. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	114,203,800.00	12	125,624,180.00	12	138,186,598.00	12	152,005,257.80	12	167,205,783.58	68	697,225,619.38	Kec. Buyasuri
4.04.04. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	1,093,979,300.00	20	1,203,377,230.00	20	1,253,714,953.00	20	1,386,086,448.30	20	1,531,695,093.13	100	6,468,853,024.43	Kec. Buyasuri
4.04.04. 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20		-		-	33.3	20,000,000.00	33.3	20,000,000.00	33.3	20,000,000.00	99.9	60,000,000.00	Kec. Buyasuri

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.04.04. 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan	Dok	11	11	15,718,200.00	4	17,290,020.00	4	19,019,022.00	4	20,920,924.20	4	23,013,016.62	27	95,961,182.82	Kec. Buyasuri
4.04.04. 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	27,789,200.00	2	30,568,120.00	2	33,624,932.00	2	36,987,425.20	2	40,686,167.72	10	169,655,844.92	Kec. Buyasuri
4.04.04. 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	128,043,400.00	3	140,847,740.00	3	154,932,514.00	3	170,425,765.40	3	187,468,341.94	32	781,717,761.34	Kec. Buyasuri
4.04.04. 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	3	90,000,000.00	Kec. Buyasuri
4.04.04. 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	3	60,000,000.00	Kec. Buyasuri
4.04.05	**Kecamatan Atadei**					**839,777,100.00**	**-**	**923,754,810.00**	**-**	**1,016,130,291.00**	**-**	**1,117,743,320.10**	**-**	**1,229,517,651.67**	**-**	**5,126,923,172.77**	**Kec.Atadei**
	Non Urusan					**839,777,100.00**		**923,754,810.00**		**1,016,130,291.00**		**1,117,743,320.10**		**1,229,517,651.67**		**5,126,923,172.77**	**Kec.Atadei**
4.04.05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	207,118,770.00	20	227,830,647.00	20	220,613,711.70	20	275,675,082.87	20	303,242,591.16	100	1,234,480,802.73	Kec.Atadei
4.04.05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	470,533,710.00	20	517,587,081.00	20	509,345,789.10	20	616,280,368.01	20	678,908,404.81	100	2,792,655,352.92	Kec.Atadei
4.04.05 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	29,372,000.00	20	32,309,200.00	20	35,540,120.00	20	39,094,132.00	20	43,003,547.36	100	179,318,999.36	Kec.Atadei
4.04.05 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	10,000,000.00		-	11	10,000,000.00	11	10,000,000.00	11	10,000,000.00	44	40,000,000.00	Kec.Atadei
4.04.05 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	5,200,000.00	2	5,720,000.00	2	6,292,000.00	2	6,921,200.00	2	7,613,320.00	10	31,746,520.00	Kec.Atadei
4.04.05 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	117,552,620.00	20	140,307,882.00	20	104,338,670.20	20	149,772,537.22	20	166,749,788.34	100	678,721,497.76	Kec.Atadei
4.04.05 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	100,000,000.00		-		-	1	100,000,000.00	Kec.Atadei
4.04.05 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	3	70,000,000.00	Kec.Atadei

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.04.06.	**Kecamatan Nagawutung**					**1,066,867,650.00**	**-**	**1,173,554,415.00**	**-**	**1,290,909,856.50**	**-**	**1,440,000,842.15**	**-**	**1,582,000,926.37**	**-**	**6,553,333,690.02**	**Kec. Nagawutung**
	Non Urusan					**1,066,867,650.00**		**1,173,554,415.00**		**1,290,909,856.50**		**1,440,000,842.15**		**1,582,000,926.37**		**6,553,333,690.02**	**Kec. Nagawutung**
4.04.06. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	110,209,800.00	20	121,230,780.00	20	103,353,858.00	20	146,689,243.80	20	161,358,168.18	100	642,841,849.98	Kec. Nagawutung
4.04.06. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	800,935,210.00	20	881,028,731.00	20	869,131,604.10	20	1,036,044,764.51	20	1,142,649,240.96	100	4,729,789,550.57	Kec. Nagawutung
4.04.06. 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	25	25	30,000,000.00		-	25	30,000,000.00	25	30,000,000.00	25	30,000,000.00	100	120,000,000.00	Kec. Nagawutung
4.04.06. 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	12,687,740.00	11	13,956,514.00	11	15,352,165.40	11	16,887,381.94	11	18,576,120.13	55	77,459,921.47	Kec. Nagawutung
4.04.06. 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	28,007,400.00	2	30,808,140.00	2	33,888,954.00	2	37,277,849.40	2	41,005,634.34	10	170,987,977.74	Kec. Nagawutung
4.04.06. 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	85,027,500.00	20	126,530,250.00	20	109,183,275.00	20	153,101,602.50	20	168,411,762.75	100	642,254,390.25	Kec. Nagawutung
4.04.06. 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	100,000,000.00		-		-	1	100,000,000.00	Kec. Nagawutung
4.04.06. 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	3	70,000,000.00	Kec. Nagawutung
4.04.07	**Kecamatan Ile Ape**					**736,653,725.00**	**-**	**810,319,097.50**	**-**	**891,351,007.25**	**-**	**960,486,107.98**	**-**	**1,058,534,718.77**	**-**	**4,457,344,656.50**	**Kec. Ile Ape**
	Non Urusan					**736,653,725.00**		**810,319,097.50**		**891,351,007.25**		**960,486,107.98**		**1,058,534,718.77**		**4,457,344,656.50**	**Kec. Ile Ape**
4.04.07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	145,607,260.00	20	160,167,986.00	20	147,184,784.60	20	193,803,263.06	20	213,183,589.37	100	859,946,883.03	Kec. Ile Ape
4.04.07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	398,000,125.00	20	470,800,137.50	20	387,880,151.25	20	539,668,166.38	20	596,634,983.01	100	2,392,983,563.14	Kec. Ile Ape
4.04.07 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	25	25	30,000,000.00		-	25	30,000,000.00	25	30,000,000.00	25	30,000,000.00	100	120,000,000.00	Kec. Ile Ape

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.04.07 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	24,987,060.00	11	27,485,766.00	11	30,234,342.60	11	33,257,776.86	11	36,583,554.55	55	152,548,500.01	Kec. Ile Ape
4.04.07 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	27,020,600.00	2	29,722,660.00	2	32,694,926.00	2	35,964,418.60	2	39,560,860.46	10	164,963,465.06	Kec. Ile Ape
4.04.07 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	109,452,800.00	20	120,398,080.00	20	132,437,888.00	20	125,681,676.80	20	140,249,844.48	100	628,220,289.28	Kec. Ile Ape
4.04.07 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	129,000,000.00		-		-	1	129,000,000.00	Kec. Ile Ape
4.04.07 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok		1	1,585,880.00	1	1,744,468.00	1	1,918,914.80	1	2,110,806.28	1	2,321,886.91	5	9,681,955.99	Kec. Ile Ape
4.04.08.	**Kecamatan Wulandoni**					**1,429,928,200.00**		**1,572,921,020.00**	**-**	**1,730,213,122.00**	**-**	**1,903,234,434.20**	**-**	**2,093,557,877.62**	**-**	**8,729,854,653.82**	**Kec. Wulandoni**
	Non Urusan					**1,429,928,200.00**		**1,572,921,020.00**		**1,730,213,122.00**		**1,903,234,434.20**		**2,093,557,877.62**		**8,729,854,653.82**	**Kec. Wulandoni**
4.04.08. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	123,927,310.00	12	136,320,041.00	12	149,952,045.10	12	164,947,249.61	12	181,441,974.57	68	756,588,620.28	Kec. Wulandoni
4.04.08. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	185,564,250.00		204,120,675.00		224,532,742.50		246,986,016.75		271,684,618.43	20	1,132,888,302.68	Kec. Wulandoni
4.04.08. 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	33.33		-		-	33.33	30,000,000.00	33.33	30,000,000.00	33.33	30,000,000.00	99.99	90,000,000.00	Kec. Wulandoni
4.04.08. 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	33,199,840.00	4	36,519,824.00	4	40,171,806.40	4	44,188,987.04	4	48,607,885.74	27	202,688,343.18	Kec. Wulandoni
4.04.08. 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	2,953,200.00	2	3,248,520.00	2	3,573,372.00	2	3,930,709.20	2	4,323,780.12	10	18,029,581.32	Kec. Wulandoni
4.04.08. 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	109,283,600.00	3	120,211,960.00	3	132,233,156.00	3	130,456,471.60	3	145,002,118.76	32	637,187,306.36	Kec. Wulandoni
4.04.08. 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket		1	975,000,000.00	1	1,072,500,000.00	1	1,119,750,000.00	1	1,267,725,000.00	1	1,397,497,500.00	5	5,832,472,500.00	Kec. Wulandoni
4.04.08. 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00	1	60,000,000.00	Kec. Wulandoni

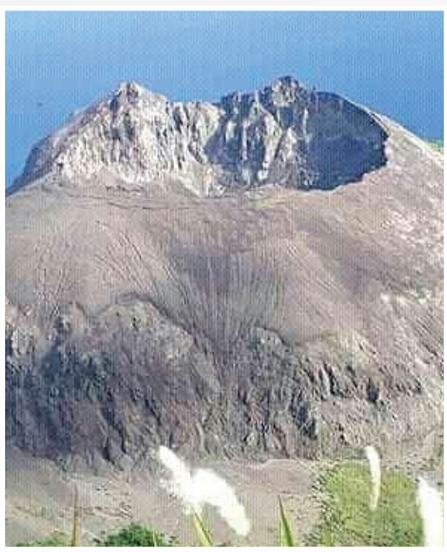
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.04.09	**Kecamatan Ile Ape Timur**					**614,086,780.00**	**-**	**675,495,458.00**	**-**	**743,045,003.80**	**-**	**817,349,504.18**	**-**	**899,084,454.60**		**3,749,061,200.58**	**Kec. Ile Ape Timur**
	Non Urusan					**614,086,780.00**		**675,495,458.00**		**743,045,003.80**		**817,349,504.18**		**899,084,454.60**		**3,749,061,200.58**	**Kec. Ile Ape Timur**
4.04.09 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	144,771,560.00	20	159,248,716.00	20	175,173,587.60	20	192,690,946.36	20	211,960,041.00	100	883,844,850.96	Kec. Ile Ape Timur
4.04.09 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	142,767,900.00	20	157,044,690.00	20	152,749,159.00	20	190,024,074.90	20	209,026,482.39	100	851,612,306.29	Kec. Ile Ape Timur
4.04.09 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	63,525,000.00	20	69,877,500.00	20	76,865,250.00	20	84,551,775.00	20	93,006,952.50	100	387,826,477.50	Kec. Ile Ape Timur
4.04.09 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	36,736,020.00	11	40,409,622.00	11	44,450,584.20	11	48,895,642.62	11	53,785,206.88	55	224,277,075.70	Kec. Ile Ape Timur
4.04.09 05	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	40,329,600.00	2	44,362,560.00	2	48,798,816.00	2	53,678,697.60	2	59,046,567.36	10	246,216,240.96	Kec. Ile Ape Timur
4.04.09 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	65,802,900.00	20	72,383,190.00	20	79,621,509.00	20	72,583,659.90	20	81,342,025.89	100	371,733,284.79	Kec. Ile Ape Timur
4.04.09 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket		1	120,153,800.00	1	132,169,180.00	1	135,386,098.00	1	159,924,707.80	1	175,917,178.58	5	723,550,964.38	Kec. Ile Ape Timur
4.04.09 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	3	60,000,000.00	Kec. Ile Ape Timur
5.01.01.	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**					**510,810,900.00**	**-**	**594,140,470.00**	**-**	**1,226,119,931.00**	**-**	**1,255,731,924.10**	**-**	**1,021,305,116.51**	**-**	**4,608,108,341.61**	**Bappelitbangda**
	Non Urusan					**510,810,900.00**		**594,140,470.00**		**1,226,119,931.00**		**1,255,731,924.10**		**1,021,305,116.51**		**4,608,108,341.61**	**Bappelitbangda**
5.01.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	305,679,300.00	20	279,601,300.00	20	307,561,430.00	20	338,317,573.00	20	372,149,330.30	100	1,603,308,933.30	Bappelitbangda
5.01.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	25,131,600.00	20	52,213,260.00	20	200,000,000.00	20	200,000,000.00	20	200,000,000.00	100	677,344,860.00	Bappelitbangda
5.01.01. 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%			-		-	33.33	200,000,000.00	33.33	200,000,000.00	33.33	100,000,000.00	99.99	500,000,000.00	Bappelitbangda
5.01.01. 04	Program Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	15,000,000.00	11	36,522,530.00	11	40,174,783.00	11	44,192,261.30	11	48,611,487.43	55	184,501,061.73	Bappelitbangda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.01.01. 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	15,000,000.00	2	42,450,100.00	2	46,695,110.00	2	51,364,621.00	2	56,501,083.10	10	212,010,914.10	Bappelitbangda
5.01.01. 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	150,000,000.00	20	183,353,280.00	20	201,688,608.00	20	211,857,468.80	20	234,043,215.68	100	980,942,572.48	Bappelitbangda
5.01.01. 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00		-	2	400,000,000.00	Bappelitbangda
5.01.01. 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	3	50,000,000.00	Bappelitbangda
5.02.01.	**Badan Keuangan Daerah**				**-**	**1,830,758,644.00**	**-**	**2,013,834,508.40**	**-**	**2,415,217,959.24**	**-**	**2,436,739,755.16**	**-**	**2,680,413,730.68**	**-**	**11,376,964,597.48**	**BKD**
	Non Urusan					**1,830,758,644.00**		**2,013,834,508.40**		**2,415,217,959.24**		**2,436,739,755.16**		**2,680,413,730.68**		**11,376,964,597.48**	**BKD**
5.02.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	689,213,140.00	20	758,134,454.00	20	833,947,899.40	20	917,342,689.34	20	1,009,076,958.27	100	4,207,715,141.01	BKD
5.02.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	586,695,804.00	20	645,365,384.40	20	709,901,922.84	20	780,892,115.12	20	858,981,326.64	100	3,581,836,553.00	BKD
5.02.01. 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	208,517,000.00	20	229,368,700.00	20	252,305,570.00	20	277,536,127.00	20	305,289,739.70	100	1,273,017,136.70	BKD
5.02.01. 04	Program Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	31,958,800.00	11	35,154,680.00	11	38,670,148.00	11	42,537,162.80	11	46,790,879.08	55	195,111,669.88	BKD
5.02.01. 05	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	40,541,500.00	2	44,595,650.00	2	49,055,215.00	2	53,960,736.50	2	59,356,810.15	10	247,509,911.65	BKD
5.02.01. 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	273,832,400.00	20	301,215,640.00	20	301,337,204.00	20	354,470,924.40	20	390,918,016.84	100	1,621,774,185.24	BKD
5.02.01. 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	200,000,000.00		-		-	1	200,000,000.00	BKD
5.02.01. 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	3	50,000,000.00	BKD
5.03.01.	**Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**					**551,619,775.00**	**-**	**606,781,752.50**	**-**	**847,459,927.75**	**-**	**734,205,920.53**	**-**	**807,626,512.58**	**-**	**3,547,693,888.35**	**BKD-PSDM**
	Non Urusan					**551,619,775.00**		**606,781,752.50**		**847,459,927.75**		**734,205,920.53**		**807,626,512.58**		**3,547,693,888.35**	**BKD-PSDM**
5.03.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	212,635,135.00	20	233,898,648.50	20	257,288,513.35	20	283,017,364.69	20	311,319,101.15	100	1,298,158,762.69	BKD-PSDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.03.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	49,367,900.00	20	54,304,690.00	20	59,735,159.00	20	65,708,674.90	20	72,279,542.39	100	301,395,966.29	BKD-PSDM
5.03.01. 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	20,000,000.00	20	22,000,000.00	20	24,200,000.00	20	26,620,000.00	20	29,282,000.00	100	122,102,000.00	BKD-PSDM
5.03.01. 04	Program Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	17,999,400.00	11	19,799,340.00	11	21,779,274.00	11	23,957,201.40	11	26,352,921.54	55	109,888,136.94	BKD-PSDM
5.03.01. 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	27,700,140.00	2	30,470,154.00	2	33,517,169.40	2	36,868,886.34	2	40,555,774.97	10	169,112,124.71	BKD-PSDM
5.03.01. 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	173,886,400.00	20	191,275,040.00	20	200,402,544.00	20	231,442,798.40	20	254,587,078.24	100	1,051,593,860.64	BKD-PSDM
5.03.01. 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	200,000,000.00		-		-	1	200,000,000.00	BKD-PSDM
5.03.01. 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok	1	1	50,030,800.00	1	55,033,880.00	1	50,537,268.00	1	66,590,994.80	1	73,250,094.28	5	295,443,037.08	BKD-PSDM
05.05.01.	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**					**464,510,000.00**	**-**	**510,961,000.00**	**-**	**612,057,100.00**	**-**	**618,262,810.00**	**-**	**680,089,091.00**	**-**	**2,885,880,001.00**	**Badan KesbangPol**
	Non Urusan					**464,510,000.00**		**510,961,000.00**		**612,057,100.00**		**618,262,810.00**		**680,089,091.00**		**2,885,880,001.00**	**Badan KesbangPol**
05.05.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	226,349,400.00	20	248,984,340.00	20	243,882,774.00	20	301,271,051.40	20	331,398,156.54	100	1,351,885,721.94	Badan KesbangPol
05.05.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	53,602,800.00	20	58,963,080.00	20	64,859,388.00	20	71,345,326.80	20	78,479,859.48	100	327,250,454.28	Badan KesbangPol
05.05.01. 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%	20	20	21,881,000.00	20	24,069,100.00	20	26,476,010.00	20	29,123,611.00	20	32,035,972.10	100	133,585,693.10	Badan KesbangPol
05.05.01. 04	Program Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	3,405,800.00	11	3,746,380.00	11	4,121,018.00	11	4,533,119.80	11	4,986,431.78	55	20,792,749.58	Badan KesbangPol
05.05.01. 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2	2	17,110,200.00	2	18,821,220.00	2	20,703,342.00	2	22,773,676.20	2	25,051,043.82	10	104,459,482.02	Badan KesbangPol
05.05.01. 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat	%	20	20	142,160,800.00	20	156,376,880.00	20	152,014,568.00	20	179,216,024.80	20	198,137,627.28	100	827,905,900.08	Badan KesbangPol

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggungjawab
					Tahun-1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
05.05.01. 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	70,000,000.00		-		-	1	70,000,000.00	Badan KesbangPol
05.05.01. 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	3	50,000,000.00	Badan KesbangPol
05.05.02.	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**					**457,321,000.00**	**-**	**503,053,100.00**	**-**	**613,358,426.00**	**-**	**668,694,251.00**	**-**	**729,563,676.10**	**-**	**2,971,990,453.10**	**BPBD**
	Non Urusan					**457,321,000.00**		**503,053,100.00**		**613,358,426.00**		**668,694,251.00**		**729,563,676.10**		**2,971,990,453.10**	**BPBD**
05.05.02. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	211,017,100.00	20	232,118,810.00	20	225,330,691.00	20	280,863,760.10	20	308,950,136.11	100	1,258,280,497.21	BPBD
05.05.02. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	20	20	97,816,700.00	20	107,598,370.00	20	108,358,207.00	20	130,194,027.70	20	143,213,430.47	100	587,180,735.17	BPBD
05.05.02. 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK	Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK	%			-		-	33.33	40,000,000.00	33.33	50,000,000.00	33.33	50,000,000.00	99.99	140,000,000.00	BPBD
05.05.02. 04	Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok	11	11	9,480,700.00	11	10,428,770.00	11	11,471,647.00	11	12,618,811.70	11	13,880,692.87	55	57,880,621.57	BPBD
05.05.02. 05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen terkait Pengelolaan Barang/Aset	Dok	2		-		-	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	6	30,000,000.00	BPBD
05.05.02. 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah	%	20	20	139,006,500.00	20	152,907,150.00	20	118,197,881.00	20	175,017,651.50	20	193,519,416.65	100	778,648,599.15	BPBD
05.05.02. 07	Program Penataan Lingkungan Perkantoran dan Perumahan Dinas	Ketersediaan Areal Perkantoran yang tertata baik di Lingkungan Perkantoran	Paket			-		-	1	70,000,000.00		-		-	1	70,000,000.00	BPBD
05.05.02. 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Peraturan/Instrumen Hukum	Dok			-		-	1	30,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	3	50,000,000.00	BPBD
TOTAL						**40,339,639,074.00**		**49,507,699,870.50**		**55,150,369,651.95**		**61,129,186,844.49**		**66,514,931,373.50**		**272,641,826,814.44**	

Bab 8
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



Indikator kinerja daerah pada bagian ini meliputi beberapa hal yang mana indikator capaiannya bersifat makro dan diuraikan setiap tahun. Target indikator ini merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pada akhir masa jabatan Bupati/Wakil Bupati.



BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan program prioritas dan pendanaan program pada Bab VII, selanjutnya ditetapkan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah yang meliputi aspek kesejahteraan, pelayanan dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Target capaian indikator kinerja daerah disajikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel. 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target				
				Tahun - 1	Tahun - 2	Tahun - 3	Tahun - 4	Tahun - 5
MISI 1	**Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, serta Optimalisasi Peran Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan Daerah dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat**							
1.1.	Meningkatnya jangkauan kualitas pendidikan dasar	Angka Melek Huruf	%	100	100	100	100	100
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Th	7.80	8.00	8.50	9.00	9.50
1.2.	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Th	67	67,5	67,8	68	68
1.3.	Berkembangnya kewirausahaan para pemuda	Persentase Wirausaha Muda	%	0	0,3	2,25	3,25	4,25
1.4.	Meningkatnya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan	Rasio KDRT	%	80	75	70	65	60
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	60,01	61,03	62,04	63,02	63,70
1.5.	Terciptanya rasa aman	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	9,39	7,51	5,63	3,76	1,88
MISI 2	**Mempercepat Pembangunan Infrastruktur, Transportasi, Air Bersih, Energi, Komunikasi dan Penataan Kota**							
	Terbangunnya jalan – jalan strategis yang menunjang ekonomi	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)	%	17.33	20.8	26	30.33	38.47
	Terbangunnya jaringan transportasi darat, laut dan udara	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		8	8	8	8	8
	Tersedianya prasarana dan sarana air bersih	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	64.18	80.56	91.49	97.11	100
	Tersedianya prasarana dan sarana listrik	Rasio Elektrifikasi	%	78.8	84.5	89.5	95	100
	Terbangunnya jaringan telekomunikasi dan informasi	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	1,58	1,81	2,26	2,93	3,38
	Meningkatnya standar dan mutu prasarana dan sarana perkotaan	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	22	23	23	24	24
		Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	31	26	21	16	11
	Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi bencana serta pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Desa/Kota Tangguh Bencana yang Dibentuk	Desa/Kelurahan	5	5	10	10	5
	Terwujudnya keserasian pemanfaatan ruang wilayah	Ketaatan terhadap RTRW	%	99.59	99.99	99.98	100	100
	Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	47	50	40	40	33
MISI 3	**Mempercepat Pembangunan dan Mengembangkan Sumber Daya Ekonomi Laut dan Maritim, serta Ekonomi Kreatif Berbasis Industri dan Pariwisata Berkelanjutan**							
	Meningkatnya hasil produksi perikanan dan sumber daya laut	Produksi Perikanan (Perikanan Tangkap)	Ton	7,500	8,000	9,000	9,200	10,300
		Produksi Perikanan (Perikanan Budidaya)	Ton	3,504	4,008	4,510	5,015	6,518
		Rumput Laut	Ton	3,500	4,000	4,500	5,000	6,500

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target				
				Tahun - 1	Tahun - 2	Tahun - 3	Tahun - 4	Tahun - 5
		Produksi Garam	Ton	81	243	486	729	972
		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PRDB	%	8.62	8.83	9.05	9.26	9.48
		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,34-5,64	5,44-5,74	5,55-6,15	5,65-6,55	5,75-7,00
		PDRB Konstan TD 2010	(Miliar)	1.119,917	1.180,883	1.246,395	1.316,814	1.375,676
MISI 4	**Mempercepat Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan serta Meningkatkan Pasar dan Promosi Daerah Tujuan Wisata**							
	Berkembangnya jasa pariwisata	Kunjungan Wisata	Orang	7500	10000	11000	12000	12500
		Lama Kunjungan Wisata	Hari	3-4 hari	4-5 hari	5-6 hari	6-7 hari	7 hari
		PAD Sektor Pariwisata	Rp	20,500,000	25,500,000	30,500,000	35,500,000	40,500,000
		Jumlah Pelaku Usaha Wisata Bahari	Pelaku	2	3	4	5	6
		Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	3	3	4	4	4
		Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	M Rp	40	42	43	44	45
MISI 5	**Meningkatkan Pendapatan dan Kerja Sama Daerah serta Mengembangkan Ekonomi Wilayah dan Pembangunan Perdesaan Berbasis Industri Berkelanjutan**							
	Meningkatnya kesejahteraan petani, peternak dan pelaku usaha mikro	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	35.3	36	36.72	37.46	38.21
	Terwujudnya titik-titik pertumbuhan desa melalui klaster-tematik	Jumlah Desa Tematik	Desa	9	9	9	9	9
	Menurunnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	24.93	24.12-24.18	23.23-23.43	22.31-22.68	21.39-21.94
	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	(%)	72,20	72,30	73,14	74,16	75,67
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.76	2.66	2.54-2.56	2.42-2.45	2.29-2.35
	Terwujudnya ketahanan pangan	Ketersediaan Pangan Utama	%	23	25	27	29	31
		Tingkat Inflasi	%	6	5.5	5.5	5	5
MISI 6	**Menata dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Berbasis Teknologi Informasi serta Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik**							
	Terwujudnya revolusi kerja APIIKKK (Aspiratif, Produktif, Inovatif, Integratif, Konkrit, Kontributif dan Kompetitif) sebagai *human capital* management melalui pengembangan potensi ASN berbasis informasi teknologi	Cakupan Layanan *E-Government*	%	20	20	20	20	20
	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)		50	65	70	75	80

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target				
				Tahun - 1	Tahun - 2	Tahun - 3	Tahun - 4	Tahun - 5
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu dan adil	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		2.822	2.872	2.922	2.972	3.022
		Indeks Kepuasan Masyarakat		78.5	80	82.5	84	85

Tabel. 8.2.
INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2017-2022

Bidang Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal	Tahun - 1 (2018)	Tahun - 2 (2019)	Tahun - 2 (2020)	Tahun - 2 (2021)	Tahun - 2 (2022)	Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1.1.	Pertumbuhan Ekonomi (Laju Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	5,23	5,34-5,64	5,44-5,74	5,55-6,15	5,65-6,55	5,75-7,00	7,00	Bappelitbangda
1.2	Tingkat Inflasi	%	6,00	6,00	5,50	5,50	5,00	5,00	5,00	Bappelitbangda
1.3	PDRB Konstan Tahun 2010 (Miliar)	Rp.	1.063,165	1.119,917	1.180,883	1.246,395	1.316,814	1.375,676	13.756.76	Bappelitbangda
1.4	Pertumbuhan PDRB Per Kapita	%	2,86	2,96	3,05	3,15	3,29	3,33	3,33	Bappelitbangda
1.5	Indeks Pembangunan Manusia	-	62,94	63,04	63,33	63,62	63,91	64,16	64,16	Bappelitbangda
1.6	Angka Melek Huruf	-	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PKO
1.7.	Angka Usia Harapan Hidup	-	66	66,5	67	67,5	67,8	68	68	Dinas Kesehatan
1.8	Persentase Balita Gizi Buruk	%	1,15	1,14	1,13	1,12	1,1	1,09	1,09	Dinas Kesehatan
1.9	Prevelansi Balita Gizi Kurang	%	18,8	18	17,2	15,4	14,6	13,8	13,8	Dinas Kesehatan
1.10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,51	72,20	72,30	73,14	74,16	75,67	75,67	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
1.11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,86	2,76	2,66	2,54-2,56	2,42-2,45	2,29-2,35	2,29-2,35	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
1.12	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	57,102	59,957	62,954	66,101	69,406	72,876	72,876	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
1.13	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	%	37	39	40	42	44	46	46	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
1.14	Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	%	23	25	26	27	28	29	29	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
1.15	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	76,10	78,50	80	82,50	84	85	85	SETDA
1.16	Presentase PAD terhadap Pendapatan	%	4,24	5,96	6,25	6,60	7,14	8,16	8,16	BKD
1.17	Opini BPK		WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKD
1.18	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Th	7.56	7.8	8.0	8.5	9	9.5	9.5	Dinas PKO
II. Aspek Daya Saing Daerah										
2.1	Angka Kriminalitas yang Tertangani	-	28,16	9,39	7,51	5,63	3,76	1,88	1,13	Badan Kesbangpol
2.2	Rasio Ketergantungan	-	94,93	94,92	86,1	82	75	70	70	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
III. Aspek Pelayanan Umum										
3.1	**Layanan Urusan Wajib Dasar**									
3.1.1.	**Pendidikan**									
~	Pendidikan Anak Usia Dini	%	5.54	19.65	21.67	19.65	19.48	20.39	20.39	Dinas PKO
~	Angka Partisipasi Kasar Paud	-	56,76	56,76	58,52	60,08	100	100	100	Dinas PKO
~	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	-	1.470	1.470	1.519	1.533	1.547	1.561	1,575	Dinas PKO
~	Angka Partisipasi Kasar									
	* Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	-	93,35	96,2	98,15	99,3	104,35	110,4	110,4	Dinas PKO
	* Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	-	96,99	97,12	98,8	110,1	112,38	118,3	118,3	Dinas PKO
	* Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	-	98,18	98,8	99,1	99,89	118,12	120,5	120,5	Dinas PKO

Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun - 1 (2018)	Tahun - 2 (2019)	Tahun - 2 (2020)	Tahun - 2 (2021)	Tahun - 2 (2022)	Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
~ Angka Partisipasi Murni									
* Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	83,55	83,66	84,56	86,76	90,26	95,76	96,26	Dinas PKO
* Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	62,68	65,40	73,48	84,46	97,08	98,07	99,06	Dinas PKO
* Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	10.12	10.88	16.41	15.86	14.56	12.28	12.28	Dinas PKO
~ Angka Partisipasi Sekolah									
* Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	-	112,33	112,33	113,46	114,6	115,75	116,91	118,09	Dinas PKO
* Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	-	95,81	95,81	96,77	98,74	99,73	102,81	104,91	Dinas PKO
* Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	-	78,49	78,49	81,76	84,28	86	89,58	96,32	Dinas PKO
~ Angka Putus Sekolah									
* Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,14	0,07	0,05	0,03	0,02	0,02	0,01	Dinas PKO
* Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	40	30	20	15	10	0,5	0	Dinas PKO
* Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	1,18	1,18	2,36	1,97	1,69	1,48	1,31	Dinas PKO
~ Angka Kelulusan									
* Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	97,44	98,38	98,42	98,42	99,42	99,42	99,42	Dinas PKO
* Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,83	99,89	100	100	100	100	100	Dinas PKO
~ Angka Melanjutkan									
* Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	97,20	97,20	100	100	100	100	100	Dinas PKO
* Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	80	82	85	90	95	98	100	Dinas PKO
~ Fasilitas Pendidikan									
* Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	95	95	96	98	99	99	100	Dinas PKO
* Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	%	85	85	87	89	95	100	100	Dinas PKO
~ Ratio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	-	84.98	86.98	85.391	87.463	89.505	91.518	91.518	Dinas PKO
~ Ratio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	-	65.36	72.36	70.49	72.75	74.91	76.96	76.96	Dinas PKO
~ Ratio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	-	129,060	129,060	25,812	51,624	103,248	206,496	412,992	Dinas PKO
~ Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	-	114,430	114,430	127,144	141,272	156,968	174,409	174,409	Dinas PKO
~ Ratio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar	-	12,906	12,906	15,184	16,871	18,745	20,828	23,142	Dinas PKO
~ Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata	-	11,443	11,443	13,462	15,838	18,633	21,921	25,790	Dinas PKO
~ Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PKO

Bidang Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal	Tahun - 1 (2018)	Tahun - 2 (2019)	Tahun - 2 (2020)	Tahun - 2 (2021)	Tahun - 2 (2022)	Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
~	Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PKO
~	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	80,63	83,12	85,69	88,34	92,02	94,87	99,86	Dinas PKO
3.1.2.	**Kesehatan**									
~	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	-	14,55	<14	<13	<12	<11	<10	<10	Dinas Kesehatan
~	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	-	985,45	986	987	988	989	990	990	Dinas Kesehatan
~	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	-	15.49	<14	<13	<12	<11	<10	<10	Dinas Kesehatan
~	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	-	7,04	7,0	6,5	6.0	5,5	<5	<5	Dinas Kesehatan
~	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	-	140,78	120	100	90	80	70	<70	Dinas Kesehatan
~	Rasio Posyandu per Satuan Balita	-	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	Dinas Kesehatan
~	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Dinas Kesehatan
~	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Dinas Kesehatan
~	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	-	0,37	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
~	Ratio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	-	4,58	4,58	4,58	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
~	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	43,5	70	75	80	85	90	>90	Dinas Kesehatan
~	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	85,3	88	88	90	93	95	>95	Dinas Kesehatan
~	Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	%	65,56	75	80	90	95	100	100	Dinas Kesehatan
~	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	68	75	80	90	95	100	100	Dinas Kesehatan
~	Persentase anak usia 1 Tahun yang diimunisasi campak	%	91,6	95	95	95	100	100	100	Dinas Kesehatan
~	Non Polio AFP Rate per 100.000 penduduk	%	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
~	Cakupan Penemuan dan Penangan Penderita Penyakit TBC BTA	%	75	75	75	75	75	75	75	Dinas Kesehatan
~	Cakupan Penemuan dan Penangan Penderita Penyakit TBC (semua Kasus TBC)	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
~	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	-	90,73	90	88,5	88	75,5	75	75	Dinas Kesehatan
~	Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis	-	2,97	2,5	2,2	1,8	1,6	1,3	1	Dinas Kesehatan
~	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dalam DOTS	%	75	75	75	75	75	75	75	Dinas Kesehatan
~	Proporsi Kasus Tuberkolosis yang diobati dan sembuh dengan program DOTS	%	90	91	92	93	94	95	95	Dinas Kesehatan
~	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	0	90	90	90	90	90	>90	Dinas Kesehatan
~	Penderita Diare yang ditangani	%	62,9	80	85	90	95	100	100	Dinas Kesehatan
~	Angka Kejadian Malaria	-	10.56	<5	<4	3	<2	<1	<1	Dinas Kesehatan
~	Tingkat Kematian Akibat Malaria	-	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal	Tahun - 1 (2018)	Tahun - 2 (2019)	Tahun - 2 (2020)	Tahun - 2 (2021)	Tahun - 2 (2022)	Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
~	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi	%	0,028	0,027	0,026	0,025	0,024	0,023	0,023	Dinas Kesehatan
~	Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir	%	0	5	26	47	68	90	90	Dinas Kesehatan
~	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	28,6	48	68	88	100	100	100	Dinas Kesehatan
~	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	69,51	80	85	87	89	90	>90	Dinas Kesehatan
~	Cakupan Kunjungan Bayi	%	65,13	80	85	87	89	90	100	Dinas Kesehatan
~	Cakupan Puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
~	Cakupan pembantu puskesmas	%	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	Dinas Kesehatan
~	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	53,5	70	75	80	83	85	>85	Dinas Kesehatan
~	Cakupan Pelayanan Nifas	%	84,1	85	87	90	93	95	>95	Dinas Kesehatan
~	Cakupan Neonatus dengan Kompilasi yang Ditangani	%	39,9	60	75	80	83	85	>85	Dinas Kesehatan
~	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	56,97	60	75	80	83	85	>85	Dinas Kesehatan
~	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	%	0	5	10	15	20	25	25	Dinas Kesehatan
~	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	69,51	>90	>90	>90	>90	>90	>90	Dinas Kesehatan
~	Kemampuan menangani life saving	-	100	100	100	100	100	100	100	RSUD
~	Jam buka Pelayanan	Jam	24	24	24	24	24	24	24	RSUD
~	Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS (masih berlaku)	-	82,8	100	100	100	100	100	100	RSUD
~	Kematian Pasien ≤ 24 jam	Jam	7,66	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	RSUD
~	Waktu tunggu operasi efektif	Menit	24	≤ 48	≤ 48	≤ 48	≤ 48	≤ 48	≤ 48	RSUD
~	Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endrotraheal tube	-	0	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	RSUD
~	Ketersedian Pelayanan (klinik)	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	RSUD
~	Waktu tunggu di rawat jalan	Menit	30,8	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60	RSUD
~	Waktu tunggu hasil pelayanan toraxfoto	Menit	1.22,5	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	RSUD
~	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	Menit	3,47	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	RSUD
~	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium kimia darah dan lab rutin	Menit	48,8	≤ 90	≤ 90	≤ 90	≤ 90	≤ 90	≤ 90	RSUD
~	Waktu tunggu pelayanan									RSUD
~	* Obat Jadi	Menit	9,01	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	RSUD
~	* Obat Racikan	Menit	15,11	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60	RSUD

Bidang Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal	Tahun - 1 (2018)	Tahun - 2 (2019)	Tahun - 2 (2020)	Tahun - 2 (2021)	Tahun - 2 (2022)	Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
~	Tidak adanya kesalahan dalam pemberian obat	%	83,25	100	100	100	100	100	100	RSUD
~	Penulisan Resep sesuai Formularium		100	100	100	100	100	100	100	RSUD
~	Kebutuhan darah bagi setiap transfusi darah terpenuhi		100	100	100	100	100	100	100	RSUD
~	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat (≤ 15 menit)		91,33	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	RSUD
~	Pelayanan ambulance atau kereta jenazah	Jam	24	24	24	24	24	24	24	RSUD
~	Waktu tanggap (respon time pemulasaran Jenazah)		≤ 20 /120	≤ 20 /120	≤ 20 /120	≤ 20 /120	≤ 20 /120	≤ 20 /120	≤ 20 /120	RSUD
3.1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
~	**Pekerjaan Umum**									
	* Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	-	0,13	0,15	0,18	0,23	0,27	0,34	0,34	Dinas PUPR-Perhubungan
	* Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	-	0,0049	0,0049	0,0048	0,0048	0,0048	0,0047	0,0047	Dinas PUPR-Perhubungan
	* Persetase Kawasan Pemukiman yang Belum dapat dilalui Kendaraan Roda Empat	%	8,47	7,91	6,78	6,21	5,65	4,52	4,52	Dinas PUPR-Perhubungan
	* Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)	%	15,42	17,33	20,80	26,00	30,33	38,47	38,47	Dinas PUPR-Perhubungan
	* Persentase Jalan yang mimiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	%	1,91	2,95	3,29	3,81	4,33	4,85	4,85	Dinas PUPR-Perhubungan
	* Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	%	33	32	28	19	14	9	9	Dinas PUPR-Perhubungan
	* Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun	%	69	69	67	50	33	17	17	Dinas PUPR-Perhubungan
	* Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	1	1	4	7	15	15	15	Dinas PUPR-Perhubungan
	* Rasio Jaringan Irigasi	-	1.222,2	708.6	311.78	163.69	85.94	60.15	60.15	Dinas PUPR-Perhubungan
	* Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	61,08	64,18	80,56	91,49	97,11	100	100	Dinas PUPR-Perhubungan
	* Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	37,36	39,26	43,66	47,52	51,88	55,54	55,54	Dinas PUPR-Perhubungan
	* Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	%	0,36	10,36	20,36	30,36	40,36	50,36	50,36	Dinas PUPR-Perhubungan
	* Ratio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	-	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	Setda/BKD
~	**Penataan Ruang**									
	* Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	21	22	23	23	24	24	24	Dinas PUPR-Perhubungan
	* Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan		0,61	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	Dinas PUPR-Perhubungan
	* Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR-Perhubungan
	* Ketaatan terhadap RTRW	%	99,59	99,59	99,99	99,98	100	100	100	Dinas PUPR-Perhubungan
~	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**									
	* Rasio Rumah Layak Huni	-	0,14	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,18	DisPera-Pertanahan
	* Rasio Pemukiman Layak Huni	-	0,40	0,42	0,43	0,47	0,5	0,51	0,51	DisPera-Pertanahan

Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun - 1 (2018)	Tahun - 2 (2019)	Tahun - 2 (2020)	Tahun - 2 (2021)	Tahun - 2 (2022)	Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
* Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	65	65	69	73	77	81	81	DisPera-Pertanahan
* Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	%	61	62	64	67	69	71	71	DisPera-Pertanahan
* Persentase Pemukiman yang Tertata	%	40	42	43	47	50	51	51	DisPera-Pertanahan
* Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	85	85	85	86	86	87	87	DisPera-Pertanahan
* Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	17	17	16	15	13.47	12.68	12.68	DisPera-Pertanahan
* Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	30	32	35	38	42	45	45	DisPera-Pertanahan
~ Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
* Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LinMas) - (%)	%	90	93	94	96	98	100	100%	Sat-POL PP
* Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	%	95.51	96.15	97	97.59	100	100	100%	Sat-POL PP
* Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota (%)	%	13.95	13.95	25	25	30	30	27.89	Sat-POL PP
* Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	0	0	50	60	70	80	80	Sat-POL PP
* Persentase Penegakan PERDA	%	90.71	81.97	83.92	87.38	90.36	100	100	Sat-POL PP
* Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	11.68	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	14.9	Dinsos-PMD
* Persentase PMKS yang tertangani	%	29.43	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	Dinsos-PMD
* Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan standar	%	29.43	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	Dinsos-PMD
* Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Jenis Lainnya	%	0	0	0	0	0	0	0	Dinsos-PMD
* Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasaran pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinsos-PMD
* Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	%	75	80	85	90	95	100	100	Dinsos-PMD
* Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	75	25	30	35	40	45	45	Dinsos-PMD
* Pesentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia tidak Potensial yang telah menerima Jaminan Sosial	%	2.41	-	4.75	4.75	4.75	4.75	18.99	Dinsos-PMD
3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
3.2.1 Tenaga Kerja									
* Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	-	42,42	58,82	89,29	71,01	63,95	74,29	74,29	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
* Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	85,71	80	91,67	75	90	84,62	84,62	Dinas PM-PTSP-Nakertrans

Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun - 1 (2018)	Tahun - 2 (2019)	Tahun - 2 (2020)	Tahun - 2 (2021)	Tahun - 2 (2022)	Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
* Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	%	37	39	41	43	45	47	47	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
* Keselamatan dan Perlindungan	%	10,38	12,9	16,12	19,35	32,25	48,33	48,33	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
* Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek	%	64,26	66	68	73	77	84	84	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
* Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi	%	88,88	93,32	98	102,89	108,02	113,42	113,42	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
* Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	%	83,3	70	65	60	55	45	40	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
* Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
* Rasio Lulusan S1/S2/S3	-	55	58	61	64	67	70	70	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
* Rasio Ketergantungan		-	94,93	94,92	86,1	82	75	70	70
3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
* Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	7	8,2	9,1	9,7	10,2	11,50	11,50	Dinas P2KBP3A
* Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR	%	0	0	2	0	0	0	2	Dinas P2KBP3A
* Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	-	1,7	1,9	2,4	2,8	3,40	3,70	3,70	Dinas P2KBP3A
* Rasio KDRT	-	90	80	75	70	65	60	60	Dinas P2KBP3A
* Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur	%	0	0	0	0	0	0	0	Dinas P2KBP3A
* Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	59.00	60,01	61,03	62,04	63,02	63,70	63,70	Dinas P2KBP3A
* Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	71.43	73.37	75.35	77.15	78.89	79.56	79.56	Dinas P2KBP3A
* Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	79.37	81.05	83.13	85.26	87.13	89.01	89.01	Dinas P2KBP3A
* Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	79.37	81.05	83.13	85.26	87.13	89.01	89.01	Dinas P2KBP3A
* Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikasn sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	28.57	30.26	32.13	35.01	37.14	39.27	45.13	Dinas P2KBP3A
* Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	45.00	49.00	51.00	55.00	58.00	61.00	65.00	Dinas P2KBP3A

Bidang Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal	Tahun - 1 (2018)	Tahun - 2 (2019)	Tahun - 2 (2020)	Tahun - 2 (2021)	Tahun - 2 (2022)	Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
	* Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	86	89	90	92	94	97	97	Dinas P2KBP3A
	* Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	45	47	49	51	55	58	58	Dinas P2KBP3A
	* Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD	-	102.509	109.509	106.152	116.868	126.842	125.583	125.583	Dinas PKO
	* Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP	-	101.744	106.744	99.52	122.638	139.849	134.422	134.422	Dinas PKO
	* Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA	-	106.918	107.918	112.741	104.114	103.064	113.866	113.866	Dinas PKO
	* Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	-	0.94	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.00	Dinas PKO
3.2.3	**Pangan**									
	* Ketersediaan Pangan Utama	%	22,65	23	25	27	29	31	33	Distan-KP
	* Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita									Distan-KP
	~ Energi	-	146,77	90	90	90	90	90	90	Distan-KP
	~ Protein	-	113,74	90	90	90	90	90	90	Distan-KP
	* Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	70	80	80	80	80	80	80	Distan-KP
3.2.4	**Pertanahan**									
	* Persentase Luas Tanah Bersertifikat	%	55	55	55	56	56	56	56	DisPera-Pertanahan
	* Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	70	47	50	40	40	33	33	DisPera-Pertanahan
3.2.5	**Lingkungan Hidup**									
	* Tersusunnya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	-	-	-	1	1	1	1	1	DLH
	* Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	-	-	-	1	1	1	1	1	DLH
	* Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten	-	1	1	1	1	1	1	6	DLH
	* Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	-	0,86	0,88	0,93	0,93	0,95	0,96	0,96	DLH
	* Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	0,26	-	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	DLH
	* Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	30	33	36	39	42	45	45	DLH
	* Pembinaan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	-	-	-	1	1	1	1	4	DLH
	* Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	-	-	-	1	1	1	1	4	DLH

Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun - 1 (2018)	Tahun - 2 (2019)	Tahun - 2 (2020)	Tahun - 2 (2021)	Tahun - 2 (2022)	Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
* Terverifikasi MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	-	-	-	1	1	1	1	4	DLH
* Terverifikasi Hak Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional	-			1	1	1	1	4	DLH
* Penetapan Hak MHA	-	-	-	1	1	1	1	1	DLH
* Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan	-	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	DLH
* Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	-	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	DLH
* Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	-	3	3	3	3	3	3	18	DLH
* Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup		19/Ada	Tidak Ada	10/Ada	10/Ada	10/Ada	10/Ada	10/Ada	DLH
* Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	%	75		75	75	75	75	100	DLH
* Timbulan Sampah yang Ditangani	%	36.29	31.29	26.29	21.29	16.29	11.29	11.29	DLH
* Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	%	35.22	30.22	25.22	20.22	15.22	10.22	10.22	DLH
* Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	DLH
* Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	36	31	26	21	16	11	11	DLH
* Ratio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	-	0,00047	0,000938	0,00140	0,00187	0,00234	0,0028	0,0028	DLH
3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
* Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	-	69,88	74,90	79,92	84,94	89,96	94,98	100	Dinas DukCapil
* Rasio Bayi Berakte Kelahiran	-	69,83	74,86	79,89	84,92	89,94	94,97	100	Dinas DukCapil
* Rasio Pasangan Berakte Nikah	-	33,68	44,73	55,79	66,84	77,89	88,95	100	Dinas DukCapil
* Penetapan KTP Nasional bebasis NIK	-	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Dinas DukCapil
* Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	70,77	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	Dinas DukCapil
* Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	65,78	70,00	75,00	80,00	90,00	100,00	100,00	Dinas DukCapil
3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
* Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	17,36	19,33	19,33	19,33	19,33	22,69	22,69	Dinsos-PMD
* Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	-	0.83	0.84	0.87	0.89	0.91	0.93	0.95	Dinsos-PMD
* Rata-rata Jumlah Kelompok Kelompok Binaaan PKK	-	0.74	0.76	0.78	0.81	0.84	0.86	0.89	Dinsos-PMD
* Persentase LSM Aktif	%	60	66.67	73.33	75	81.25	83.33	88.89	Dinsos-PMD
* Persentase LPM Berprestasi	%	33.1	36.42	39.74	43.05	45.70	49.67	52.98	Dinsos-PMD
* Presentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinsos-PMD
* Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinsos-PMD

Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun - 1 (2018)	Tahun - 2 (2019)	Tahun - 2 (2020)	Tahun - 2 (2021)	Tahun - 2 (2022)	Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
* Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinsos-PMD
* Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinsos-PMD
3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
* Laju Pertumbuhan Penduduk	-	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3	Dinas P2KBP3A
* Total Fertility Rate (TFR)	-	3,4	3,3	3,2	3,1	3,1	3,0	3,0	Dinas P2KBP3A
* Persentase Perangkat Daerah yang berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	1	5	7	8	9	9	9	Dinas P2KBP3A
* Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	0	0	0	50	50	50	50	Dinas P2KBP3A
* Jumlah Kebijakan (Perda/Perkada) yang mengatur tentang Pengendalian Kualitas dan Kuantitas Penduduk	-	0	0	0	1	1	0	2	Dinas P2KBP3A
* Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	0	0	2	2	2	2	8	Dinas P2KBP3A
* Jumlah Kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	0	0	5	9	9	9	9	Dinas P2KBP3A
* Rata-rata jumlah anak per keluarga	-	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0	3,0	3,0	Dinas P2KBP3A
* Ratio Akseptor KB	-	61	64	67	70	73	76	76	Dinas P2KBP3A
* Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	-	9.184	9.684	10.184	10.684	11.184	12.184	12.184	Dinas P2KBP3A
* Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	-	0	0	100	60	30	10	10	Dinas P2KBP3A
* Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun	-	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,7	Dinas P2KBP3A
* Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0	0	50	30	20	10	10	Dinas P2KBP3A
* Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need)*	%	48	45	42	39	37	35	35	Dinas P2KBP3A
* Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	60	60	65	70	75	90	90	Dinas P2KBP3A
* Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	klp	50 Kelompok	50 Kelompok	55 Kelompok	60 Kelompok	62 Kelompok	65 Kelompok	65 Kelompok	Dinas P2KBP3A
* Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	-	0	0	0	3	3	3	3	Dinas P2KBP3A

Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun - 1 (2018)	Tahun - 2 (2019)	Tahun - 2 (2020)	Tahun - 2 (2021)	Tahun - 2 (2022)	Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
* Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	-	10 PIK	10 PIK	12 PIK	14 PIK	15 PIK	20 PIK	20 PIK	Dinas P2KBP3A
* Cakupan PKB/PLKB yang didayagunkan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian	-	1 PKB/PLKB : 10 Desa	1 PKB/PLKB : 10 Desa	1 PKB/PLKB : 7 Desa	1 PKB/PLKB : 5 Desa	1 PKB/PLKB : 5 Desa	1 PKB/PLKB : 5 Desa	1 PKB/PLKB : 5 Desa	Dinas P2KBP3A
* Cakupan PUS peserta KB anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	-	10 UPPKS	10 UPPKS	10 UPPKS	15 UPPKS	20 UPPKS	25 UPPKS	25 UPPKS	Dinas P2KBP3A
* Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	Dinas P2KBP3A
* Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi Permintaan Masyarakat	%	9.264	9.694	10.194	10.694	11.194	12.194	12.194	Dinas P2KBP3A
* Persentase Faskes dan Jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	50	50	60	70	80	100	100	Dinas P2KBP3A
* Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	%	0	0	0	50	50	51	151	Dinas P2KBP3A
* Persentase Remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0	0	0	0	0	0	0	Dinas P2KBP3A
* Cakupan Kelompok Kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	-	0	0	10 Kelompok	15 Kelompok	20 Kelompok	25 Kelompok	25 Kelompok	Dinas P2KBP3A
* Cakupan Keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	-	71 BKB	71 BKB	71 BKB	75 BKB	80 BKB	90 BKB	90 BKB	Dinas P2KBP3A
* Rata-rata usia kawin pertama wanita	-	22 S/d 30 Tahun	22 S/d 30 Tahun	22 S/d 30 Tahun	22 S/d 30 Tahun	22 S/d 30 Tahun	22 S/d 30 Tahun	22 S/d 30 Tahun	Dinas P2KBP3A
* Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,9	0,10	0,50	0,70	1,5	1,75	1,75	Dinas P2KBP3A
3.2.9. Perhubungan									
* Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	-	398.597	47.322	438.014	20.436	451.201	473.761	473.761	Dinas PUPR-Perhubungan
* Rasio Ijin Trayek	-	0,0005	0,0005	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	Dinas PUPR-Perhubungan
* Jumlah KIR Angkutan Umum	-	215	227	237	241	262	276	1458	Dinas PUPR-Perhubungan
* Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	-	7	8	8	8	8	8	47	Dinas PUPR-Perhubungan
* Persentase Layanan Angkutan Darat (%)	%	0,013	0,04	0,04	0,0392	0,0383	0,0351	0,0351	Dinas PUPR-Perhubungan
* Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	13.95	11.01	10.55	6.22	5.73	5.43	5.43	Dinas PUPR-Perhubungan
* Pemasanganan Rambu-rambu (%)	%	44	19.6	4	4	4	4	4	Dinas PUPR-Perhubungan
* Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	-	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	Dinas PUPR-Perhubungan

Bidang Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal	Tahun - 1 (2018)	Tahun - 2 (2019)	Tahun - 2 (2020)	Tahun - 2 (2021)	Tahun - 2 (2022)	Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
	* Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum									Dinas PUPR-Perhubungan
	~ Orang	Orang	535,008	183,733	191,482	193,895	203,589	227,735	227,735	Dinas PUPR-Perhubungan
	~ Barang	(Ton/M3)	120,306	126,320	130,568	137,097	143,952	50,513	50,513	Dinas PUPR-Perhubungan
	~ Kendaraan Berotor	(Unit)	46.294	48,608	51,038	53,590	56,270	59,084	59,084	Dinas PUPR-Perhubungan
3.2.10	**Komunikasi dan Informatika**									
	* Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	%	11,2	22,3	33,4	44,5	55,6	66,7	667	Dinas Kominfo
	* Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	4,27	5,06	5,85	16,11	16,90	17,69	17,69	Dinas Kominfo
	* Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon	%	51,74	58,00	61,50	62,67	65	73,60	73,60	Dinas Kominfo
	* Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	1,36	1,58	1,81	2,26	2,93	3,38	3,38	Dinas Kominfo
	* Proporsi Rumah Tangga yang memiliki Komputer Pribadi	%	24,79	28,84	30,20	32,45	32,90	38,31	38,31	Dinas Kominfo
3.2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**									
	* Persentase Koperasi Aktif	%	70,53	71,13	71,72	72,28	72,28	73,33	100	Dinas Koperindag
	* Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif	%	1,22	3	5	8	12	15	18	Dinas Koperindag
	* Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	46,14	48	52	55	58	62	66	Dinas Koperindag
3.2.12	**Penanaman Modal**									
	* Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	-	3	3	3	4	4	4	65	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
	* Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	M Rp	38	40	42	43	44	45	45	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
	* Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	-	150	170	300	350	400	500	500	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
	* Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)	-	2	2	2	1	1	1	1	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
	* Lamanya Proses Perijinan	Hari	7	7	6	5	4	3	3	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
3.2.13	**Kepemudaan dan Olahraga**									
	* Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	6,62	13,25	19,87	26,49	33,11	39,74	39,74	Dinas PKO
	* Persentase Wirausaha Muda	%	0	0	0,3	2,25	3,25	4,25	4,25	Dinas PKO
	* Cakupan Pembinaan Olahraga	%	6	6	6	6	6	6	6	Dinas PKO
	* Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	%	5	20	30	40	50	60	60	Dinas PKO
	* Cakupan Pembinaan Altet Muda	%	60	70	80	90	100	110	110	Dinas PKO
	* Jumlah Atlet Berprestasi	-	5	8	10	13	15	17	17	Dinas PKO
	* Jumlah Prestasi Olahraga	-	2	3	4	5	6	6	6	Dinas PKO
3.2.14	**Statistik**									
	* Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kominfo
	* Buku "Kabupaten" Dalam Angka	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kominfo
	* Buku PDRB	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kominfo

Bidang Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal	Tahun - 1 (2018)	Tahun - 2 (2019)	Tahun - 2 (2020)	Tahun - 2 (2021)	Tahun - 2 (2022)	Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
3.2.15	**Persandian**									
	* Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	-	-	-	14	19	22	22	Dinas Kominfo
3.2.16	**Kebudayaan**									
	* Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	-	1 Festival luar daerah (Festival Lamaholot)	Rally Wisata Bahari-Lembata #Truly Heaven-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 (Tiga) Gunung (Blue Mountain Tours),	Rally Wisata Bahari-Lembata #Truly Heaven-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 (Tiga) Gunung (Blue Mountain Tours),	Rally Wisata Bahari-Lembata #Truly Heaven-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 (Tiga) Gunung (Blue Mountain Tours),	Rally Wisata Bahari-Lembata #Truly Heaven-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 (Tiga) Gunung (Blue Mountain Tours),	Rally Wisata Bahari-Lembata #Truly Heaven-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 (Tiga) Gunung (Blue Mountain Tours),	Rally Wisata Bahari-Lembata #Truly Heaven-Festival Lembata dengan Puncak Event Festival 3 (Tiga) Gunung (Blue Mountain Tours),	Dinas BudPar
	* Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	-	12 situs/BCB/KCB	2 situs/BCB/KCB	0	46 situs/BCB/KCB	46 situs/BCB/KCB	47 situs/BCB/KCB	153 situs/BCB/KCB	Dinas BudPar
	* Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	-	0	2	2	2	3	3	12	Dinas BudPar
	* Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu	-	4	4	10	10	10	10	44	Dinas BudPar
	* Jumlah Organisasi Kesenian dan Budaya	-	1	1	1	1	1	1	5	Dinas BudPar
3.2.17	**Perpustakaan**									
	* Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	-	4.754	5.567	6.500	7.000	7.500	8.500	8.500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	* Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	-	20.669	22.295	23.217	24.577	26.005	27.503	27.503	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	* Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk	-	0.035	0.041	0.048	0.052	0.056	0.063	0.063	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	* Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	-	4.754	5.567	6.500	7.000	7.500	8.500	8.500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	* Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	-	12.322	12.949	13.596	14.276	14.99	15.739	15.739	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	* Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki Sertifikat	-	2	4	6	8	10	12	12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.2.18	**Kearsipan**									
	* Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku	%	4,88	21,95	41,46	60,98	80,49	100	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	* Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	-	40	70	132	194	256	318	318	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun - 1 (2018)	Tahun - 2 (2019)	Tahun - 2 (2020)	Tahun - 2 (2021)	Tahun - 2 (2022)	Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
3.3 Layanan Urusan Pilihan									
3.3.1 Pariwisata									
* Kunjungan Wisata (Orang)	-	6764	7500	10000	11000	12000	12500	53000	Dinas BudPar
* Lama Kunjungan Wisata	-	2-3 hari	3-4 hari	4-5 hari	5-6 hari	6-7 hari	7 hari	7 hari	Dinas BudPar
* PAD Sektor Pariwisata	Rp	20,000,000.00	20,500,000.00	22,000,000.00	96,000,000.00	135,000,000.00	200,000,000.00	250,000,000.00	Dinas BudPar
* Jumlah Pelaku Usaha Wisata Bahari	Pelaku	2	2	3	4	5	6	22	Dinas Perikanan-Dinas Budpar
3.3.2 Pertanian									
* Kontribusi Sektor Pertanian/Pekebunan terhadap PDRB		34,27	35,30	36,00	36,72	37,46	38,21	38,21	Distan-KP
* Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar									Distan-KP
~ Padi	Ton/Ha	1,65	1,69	1,72	1,75	1,79	1,82	1,82	Distan-KP
~ Jagung	Ton/Ha	2,00	2,04	2,08	2,12	2,16	2,21	2,21	Distan-KP
~ Ubi Kayu	Ton/Ha	14,81	15,11	15,41	15,72	16,03	16,35	16,35	Distan-KP
~ Kacang Tanah	Ton/Ha	0,99	1,01	1,03	1,05	1,07	1,09	1,09	Distan-KP
* Cakupan Bina Kelompok Petani	%	43,8	45,10	46,45	47,85	49,28	50,76	52,29	Distan-KP
* Produksi Daging (Unggas)	Kg	13,917	15,308	16,839	18,523	20,375	22,413	22,413	Dinas Peternakan
* Produksi Telur	Kg	2,076	2,284	2,512	2,763	3,039	3,343	3,343	Dinas Peternakan
* Populasi Sapi	Ekor	4,852	5,337	5,871	6,458	7,104	7,814	7,814	Dinas Peternakan
* Populasi Babi	Ekor	46,111	50,722	55,794	61,374	67,511	74,262	74,262	Dinas Peternakan
* Populasi Kambing	Ekor	40,749	44,824	49,306	54,237	59,661	65,627	65,627	Dinas Peternakan
* Produksi Jagung Industri / Hibrida	Ton	5.000	15.000	19.600	22.400	22.400	24.000	24.000	Distan-KP
* Produksi Bawang	Ton	25	390	487,5	862,5	1147,5	1147,5	1147,5	Distan-KP
* Produksi Cabai	Ton	10	40	60	100	120	140	140	Distan-KP
3.3.5 Perdagangan									
* Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	28,56	100	Dinas Koperindag
3.3.6 Perindustrian									
* Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	2,86	3,2	3,8	4,6	5,4	6,6	7	Dinas Koperindag
* Produksi Garam	Ton	81	81	243	486	729	972	972	Dinas Koperindag
* PAD Indsutri (Garam)	Rp.	55,000,000	57,105,000	171,315,000	513,945,000	1,541,835,000	4,625,505,000	4,625,505,000	Dinas Koperindag
3.3.7 Transmigrasi									
* Persentase Transmigrasi Swakarsa	%	72,82	72,9	73	73,12	73,5	75	75	Dinas PM-PTSP-Nakertrans
3.3.8 Kelautan dan Perikanan									
* Produksi Perikanan (Perikanan Tangkap)	Ton	7,352	7,500	8,000	9,000	9,200	10,300	10,420	Dinas Perikanan
* Produksi Perikanan (Perikanan Budidaya)	Ton	2,856	3,504	4,008	4,510	5,015	6,518	7,020	Dinas Perikanan
* Rumput Laut	Ton	2,854	3,500	4,000	4,500	5,000	6,500	7,000	Dinas Perikanan
* Konsumsi Ikan	Ton	28.69	30	32	36	36.8	41.2	41.68	Dinas Perikanan
* Jumlah Kawasan Pesisir yang Dikembangkan	-	3	3	3	3	4	4	4	Dinas Perikanan
* Jumlah Koperasi Nelayan		1	1	2	2	1	1	8	Dinas Perikanan
* Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	40%	45%	50%	60%	70%	80%	80%	Dinas Perikanan

Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun - 1 (2018)	Tahun - 2 (2019)	Tahun - 2 (2020)	Tahun - 2 (2021)	Tahun - 2 (2022)	Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
3.4 Penunjang Urusan									
3.4.1 Perencanaan Pembangunan									
* Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	1	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappelitbangda
* Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	1	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappelitbangda
* Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	-	3	2	2	2	2	2	2	Bappelitbangda
* Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	-	1	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappelitbangda
* Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	108,51	100	100	100	100	100	100	Bappelitbangda
* Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	77.44	93,25	100	100	100	100	100	Bappelitbangda
3.4.2 Keuangan									
* Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKD
* Persentase SILPA (%)	%	0.12	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	BKD
* Persentase SILPA terhadap APBD (%)	%	0.12	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	BKD
* Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan	%	5.98	5.38	4.62	3.85	3.08	2.31	1.5	BKD
* Persentase Belanja Pendidikan (20%) (%)	%	3.11	4.98	4.92	4.75	5.08	5.17	5.18	BKD
* Persentase Belanja Kesehatan (10%) (%)	%	7.71	11.05	10.96	12.62	13.15	13.45	13.45	BKD
* Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	-	57.02 : 42.67	53.30 : 46.40	52.43 : 47.28	50.67 : 49.05	49.63 : 50.11	48.51 : 51.23	48.51 : 51.23	BKD
* Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	%	0.5	0.21	0.21	0.2	0.2	0.2	0.2	BKD
* Penetapan APBD (Sebelum 31 Desember Tahun Sebelumnya)	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BKD
3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan									
* Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	-	5 Bulan	5.3 Bulan	6 Bulan	6,3 Bulan	7,3 Bulan	8 Bulan	8.3 Bulan	BKD-PSDM
* Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	2,06%	2,3%	2,59%	2,7%	3,00 %	3,50%	3,55%	BKD-PSDM
* Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	18,67%	19,08%	21,49%	23,97%	26,45%	28,93%	28,93%	BKD-PSDM
* Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	-	31	31	31	31	31	31	31	BKD-PSDM
* Jumlah Jabatan Admnistrasi pada Instansi Pemerintah	-	574	574	574	574	574	574	574	BKD-PSDM
* Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemeritah	-	1.956	1.918	2.029	2.040	2.051	2.060	2.070	BKD-PSDM
3.4.4. Penelitian dan Pengembangan									
* Persentse Implementasi Rencana Kelitbangan	%	-	100	100	100	100	100	100	Bappelitbangda
* Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	-	100	100	100	100	100	100	Bappelitbangda

Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun - 1 (2018)	Tahun - 2 (2019)	Tahun - 2 (2020)	Tahun - 2 (2021)	Tahun - 2 (2022)	Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
3.4.5 Pengawasan									
* Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	%	22,85	28	35	38	40	45	50	Inspektorat
* Persentase Temuan APIP	%	22,12	26	30	35	40	45	50	Inspektorat
* Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	BKD-PSDM
* Persentase Temuan BPK	%	2	3	2	1	0.5	0	0	Inspektorat
* Jumlah Temuan BPK	Rp.	32.517.022.950	32.717.772.186,33	32.717.772.186,33	32.717.772.186,33	32.717.772.186,33	32.717.772.186,33	32.717.772.186,33	Inspektorat
* jumlah Temuan APIP (BPKP, Inspektorat Prov dan Kabupaten)	Rp.	22.288.724.538,69	23.788.274.538,69	24.788.274.538,69	24.788.274.538,69	24.788.274.538,69	24.788.274.538,69	24.788.274.538,69	
3.4.6 Sekretariat Daerah									
* Jumlah Desa Sadar Hukum	-	28	18	27	27	27	24	151	Setda
* Indeks Kepuasan Masyarakat	-	76,10	78,50	80,00	82,50	84,00	85,00	85,00	Setda
* Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	-	48,46	50	65	70	75	80	80	Setda
* Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	2,722	2,822	2,872	2,922	2,972	3,022	2,722	Setda
3.4.7 Penanggulangan Bencana									
* Jumlah Desa/Kota Tangguh Bencana yang Dibentuk	-	25	5	5	10	10	5	60	BPBD
* Jumlah Pelayanan Bencana Kabupaten/Kota	-	76	15	15	20	20	15	15	BPBD
3.4.8 Sekretariat Dewan									
* Tersedinya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Setwan
* Tersusun dan Terintegrasinya Program-progra kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Setwan
* Terintergrasi Program-Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Setwan

Bab 9

PENUTUP



BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 merupakan dokumen strategis yang dirumuskan menjadi ***Guide of* Lembata *Development* (GoLD)** sebagai *roadmap* (peta jalan) percepatan pembangunan bagi seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, DPRD, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan Kabupaten Lembata 5 (lima) tahun ke depan melanjutkan RPJMD periode sebelumnya (2011-2016).

Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dijelaskan dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan, upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 sangat ditentukan oleh adanya penerapan manajemen berbasis kinerja secara konsisten; pengembangan sistem informasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi secara terpadu; pengembangan manajemen pengetahuan; peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur; penguatan peran Desa dan Kecamatan dengan mendelegasikan kewenangan dari perangkat daerah kepada kecamatan dan desa; pengendalian dan pengawasan secara terus menerus; serta pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha yang solid dan berkelanjutan.

Karena itu, pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai pedoman transisi untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum bagi proses perencanaan dan penganggaran serta kaidah pelaksanaan secara umum.

9.1. Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, disusun berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022. Dalam hal terdapat perbedaan substansi antara RKPD 2018 dengan Perda RPJMD 2017-2022, maka penyusunan APBD Tahun 2018 mengacu pada Perda RPJMD 2017-2022, dan akan dilaksanakan penyesuaian terhadap substansi RKPD Tahun 2018.

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 pada Tahun 2022, perlu disusun RPJMD Kabupaten Tahun 2023-2028 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2023. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023 akan didasarkan pada RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Lembata serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, diperlukan kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022, yang akan dilaksanakan

dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati Lembata berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 kepada seluruh masyarakat Lembata;
2. Bupati Lembata menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pedoman penyusunan penjabaran perencanaan dan tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022;
3. Bupati Lembata dan Wakil Bupati Lembata mengarahkan dan mengendalikan langsung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata;
4. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan program RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022;
5. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022;
6. Seluruh Pemerintah Desa perlu menyusun dan/atau mensinkronkan RPJMDesa dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022, dan melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya;
7. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lembata;
8. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lembata adalah sebagai berikut:
    a. Pembentukan dan penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Lembata yang efisien dan efektif;
    b. Pengembangan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lembata;
    c. Pembangunan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi (*e-Goverment*);
    d. Penguatan peran Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
    e. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Lembata dalam penguasaaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan;
    f. Pengendalian pelaksanaan Renstra PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD;
    g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lembata menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
    h. Kepala PD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja OPD dan Rencana Kerja dan Anggaran PD periode sebelumnya;
    i. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lembata menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi OPD sebagaimana dimaksud pada huruf h;
    j. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf i menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

9. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Lembata dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Lembata untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

9.3. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Terhadap program/kegiatan prioritas, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan:

1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya serta kerjasama pemerintah daerah dan swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah;
2. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaaan (*CSR*) diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi;
3. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, kebijakan dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 secara terpadu, sinergi dan searah dengan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat selama 5 (lima) tahun ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 ditentukan oleh komitmen dan dukungan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lembata, DPRD Kabupaten Lembata, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat menuju Lembata yang Produktif dan Berdaya Saing Untuk Ke sejahteraan Rakyat Berkelanjutan.

BUPATI LEMBATA

ELIASER YENTJI SUNUR